

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH**  
**R K P D**  
**KABUPATEN LANGKAT**  
**Tahun 2021**



**PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**  
**BAPPEDA KABUPATEN LANGKAT 2020**



**BUPATI LANGKAT  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

**PERATURAN BUPATI LANGKAT  
NOMOR 29 TAHUN 2020**

**TENTANG**

**RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Bappeda menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
- b. bahwa untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021 dalam penyusunan RAPBD Tahun 2021;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587). Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II

Binjai ke Kota Stabat dalam Wilayah Kabupaten Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelola Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerahm Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Tahun 2021

13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011, tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 01);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Dinas, Badan, Inspektorat, Kantor dan Kecamatan, di lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.
5. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan Rancangan Kerja dan

Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) setelah disepakati dengan DPRD.

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui Bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD serta ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## Pasal 2

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021, yang selanjutnya disebut RKPD Tahun 2021, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun yaitu tahun 2021 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2021 dan berakhir hingga tanggal 31 Desember 2021.

## Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), yang memuat rancangan kerangka ekonomi, prioritas daerah pembangunan, rencana kerja dan pendanaannya yang disusun dengan jangka waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada RKP dan Program Strategis Nasional yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
- (2) RKPD Tahun 2021 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi :
  - a. Pedoman bagi SKPD dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renca SKPD) Tahun 2021.
  - b. Pedoman bagi Pemerintahan Daerah dalam menyusun Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2021.
  - c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021.
  - d. RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal 4

Dalam rangka penyusunan Rancangan APBD Tahun 2021 :

- a. Pemerintah Daerah menggunakan RKPD Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan kebijakan umum dan prioritas anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- b. SKPD menggunakan RKPD Tahun 2021 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan Anggaran dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di Stabat  
pada tanggal 24-7-2020

BUPATI LANGKAT,

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Diundangkan di Stabat  
pada tanggal 24-7-2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LANGKAT,

ttd

INDRA SALAHUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2020 NOMOR : .....29.....

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ALIMAT TARIGAN, SH  
NIP. 19730803 200212 1 005

DAFTAR ISI

	Halaman
DAFTAR ISI .....	i
DAFTAR TABEL .....	iv
DAFTAR ISI GAMBAR.....	ix
<b>BAB I      PENDAHULUAN .....</b>	<b>I – 1</b>
1.1      Latar Belakang.....	I – 1
1.2      Dasar Hukum Penyusunan .....	I – 3
1.3      Hubungan Antar Dokumen .....	I – 4
1.4      Maksud Dan Tujuan .....	I – 7
1.5      Sistematika Dokumen RKPD .....	I – 9
<b>BAB II      GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH.....</b>	<b>II – 1</b>
2.1      Kondisi Umum Daerah .....	II – 1
2.1.1      Aspek Geografi dan Demofologi .....	II – 1
2.1.2      Aspek Kesejahteraan Masyarakat .....	II – 23
2.1.2.1      Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi .....	II – 23
2.1.2.2      Fokus Kesejahteraan Sosial.....	II – 30
2.1.2.3      Fokus Seni Budaya dan Olahraga.....	II – 35
2.1.3.      Aspek Pelayanan Umum .....	II –37
2.1.3.1      Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib.....	II – 37
2.1.3.2      Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan .....	II – 59
2.1.3.3      Fokus Layanan Penunjang Urusan .....	II – 63
2.1.4      Aspek Daya Saing Daerah .....	II –64
2.1.4.1      Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah.....	II – 64
2.1.4.2      Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur .....	II – 64
2.1.4.3      Fokus Iklim Berinvestasi.....	II – 66
2.1.4.4      Fokus Sumber Daya Manusia.....	II – 69
2.2      Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD .....	II –70
2.2.1      Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan .....	II – 70
2.2.2      Realisasi RPJMD .....	II – 72
2.2.2.1      Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD tahun 2019 .....	II – 72
2.2.2.2      Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan.....	II – 78



2.3	Permasalahan Pembangunan Kabupaten Langkat .....	II –97
2.3.1	Permasalahan daerah yang berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	II – 97
2.3.2	Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah.....	II – 97
2.3.3	Isu Strategis.....	II – 101
2.4	Standar Pelayanan Minimal .....	II – 109
<b>BAB III</b>	<b>KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH .....</b>	<b>III – 1</b>
3.1.	Arah Kebijakan Ekonomi Daerah .....	III – 1
3.1.1	Kondisi Ekonomi Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan .....	III – 2
3.1.2	Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun Rencana (2021) dan Satu Tahun Setelah Tahun Rencana (2022).....	III – 8
3.2.	Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	III –12
3.2.1	Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah .....	III – 13
3.2.2	Arah Kebijakan Belanja Daerah .....	III – 16
<b>BAB IV</b>	<b>SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH .....</b>	<b>IV–1</b>
4.1.	Tujuan dan Sasaran Pembangunan .....	IV – 1
4.1.1	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah .....	IV – 2
4.1.2	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Menurut RPJMD Kab. Langkat Tahun 2019-2024.....	IV – 4
4.1.3	Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021.....	IV – 22
4.2	Prioritas Pembangunan Tahun 2021.....	IV – 26
4.2.1	Prioritas Pembangunan Nasional .....	IV – 26
4.2.2	Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2021 .....	IV – 31
4.2.3	Prioritas Pembangunan Kabupaten Langkat.....	IV – 39
4.2.3.1	Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021.....	IV – 39
4.2.3.2	Prioritas Pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2021.....	IV – 43
4.3.	Inovasi .....	IV – 80
<b>BAB V</b>	<b>RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH .....</b>	<b>V – 1</b>
5.1.	Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN/APBD Provsu/KPBU/CSR .....	V – 1
5.2.	Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Langkat.....	V – 2
5.2.1	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah .....	V – 3
5.2.2	Pagu Indikatif Perangkat Daerah .....	V – 12

5.3	Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021.....	V – 15
5.3.1	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Pengembangan Berkelanjutan.....	V – 16
5.3.2	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG).....	V – 17
5.3.3	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya.....	V – 19
5.3.4	Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Transformasi Digital.....	V – 21
5.4	Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Provinsi Tahun 2021.....	V – 24
5.5.	Pokok-Pokok Pikiran DPRD .....	V – 24
<b>BAB VI</b>	<b>PENYELENGGARAAN TUGAS UMUM PEMERINTAHAN .....</b>	<b>VI – 1</b>
6.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU) .....	VI – 1
6.2	Indikator Kinerja Kunci .....	VI – 23
<b>BAB VII</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>VII – 1</b>

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2-1 : Pembagian Wilayah di Kabupaten Langkat .....	II – 2
Tabel 2-2 : Jenis Bahan Galian di Kabupaten Langkat .....	II – 5
Tabel 2-3 : Data Aliran Sungai di Kabupaten Langkat .....	II – 7
Tabel 2-4 : Data Curah Hujan Kabupaten Langkat Tahun 2015-2019 .....	II – 8
Tabel 2-5 : Tata Guna Lahan Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2019 Berdasarkan Kecamatan .....	II – 10
Tabel 2-6 : Luas Potensi Sempadan Sungai Kabupaten Langkat Berdasarkan Nama Sungai .....	II – 11
Tabel 2-7 : Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Langkat 2010-2019 .....	II – 18
Tabel 2-8 : Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan diKabupaten Langkat 2019 .....	II – 19
Tabel 2-9 : Persentase Penduduk Berumur 7–24 Tahun menurut KarakteristikDan Status Pendidikan di Kabupaten Langkat .....	II – 20
Tabel 2-10 : Sebaran Jumlah Penduduk menurut Suku Berdasarkan Kecamatan di Kabupaten Langkat Hasil SP 2000 .....	II – 21
Tabel 2-11 : Persentase Jumlah Penduduk menurut Agama yang dianut PerKecamatan di Kabupaten Langkat Berdasarkan SP Tahun 2000.....	II – 22
Tabel 2-12 : Sebaran Jumlah Penduduk menurut Agama yag dianut perKecamatan di Kabupaten Langkat Berdasarkan SP Tahun 2010.....	II – 22
Tabel 2-13 : Nilai Sektor dalam PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar HargaKonstan 2010 Tahun 2015–2019 (dalam miliar rupiah) .....	II – 25
Tabel 2-14 : Nilai Sektor dalam PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015–2019 (dalam miliar Rupiah) .....	II – 26
Tabel 2-15 : Perkembangan Indikator Agregat PDRB Kabupaten Langkat tahun 2015–2019 .....	II – 27
Tabel 2-16 : Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita KabupatenLangkat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) & Atas Dasar HargaKonstan (ADHK) Tahun 2015–2019.....	II – 28
Tabel 2-17 : Perkembangan Inflasi Year on Year (YoY) Kabupaten LangkatTahun 2015–2019 .....	II – 28
Tabel 2-18 : Kumulatif Inflasi Menurut Sub Kelompok Pengeluaran .....	II – 29
Tabel 2-19 : Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia .....	II – 29
Tabel 2-20 : Data Kemiskinan Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019.....	II – 30
Tabel 2-21 : Perkembangan Angka Melek Huruf Kab. Langkat Tahun 2015–2019..	II – 31
Tabel 2-22 : Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupeten Langkat 2015–2019.....	II – 31
Tabel 2-23 : Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2015–2019.....	II – 32
Tabel 2-24 : Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun2015–2019 .....	II – 32
Tabel 2-25 : Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun2015–2019.....	II – 33

Tabel 2-26 :	Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Langkat 2015–2019 .....	II – 33
Tabel 2-27 :	Pravelensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Langkat 2015-2019 .....	II – 33
Tabel 2-28 :	Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Langkat 2015–2019 .....	II – 34
Tabel 2-29 :	Indikator kemiskinan Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019 .....	II – 34
Tabel 2-30 :	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat 2015–2019 .....	II – 35
Tabel 2-31 :	Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2017–2019 .....	II – 36
Tabel 2-32 :	Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemuda dan OlahragaKabupaten Langkat Tahun 2017–2019 .....	II – 37
Tabel 2-33 :	Jumlah Sekolah, Guru, dan Murid Jenjang Taman Kanak-kanakDi Kabupaten Langkat 2015–2019 .....	II – 37
Tabel 2-34 :	Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015–2019 ....	II – 38
Tabel 2-35 :	Perkembangan Angka Partisipasi Murnii (APM) Tahun 2015–2019 ....	II – 38
Tabel 2-36 :	Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2015–2019.....	II – 39
Tabel 2-37 :	Perkembangan Angka Putus Sekolah Kab. Langkat 2015–2019.....	II – 39
Tabel 2-38 :	Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Langkat 2015–2019 .....	II – 40
Tabel 2-39 :	Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019....	II – 40
Tabel 2-40 :	Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid kabupaten Langkat Tahun 2015–2019 .....	II – 41
Tabel 2-41 :	Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019 .....	II – 41
Tabel 2-42 :	Kondisi Jalan Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019 .....	II – 42
Tabel 2-43 :	Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan Tahun 2019 .....	II – 43
Tabel 2-44 :	Daerah Irigasi di Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2019 .....	II – 44
Tabel 2-45 :	Produksi Air Minum Menurut Sumber Air yang Dipakai .....	II – 45
Tabel 2-46 :	Banyaknya Pelanggan Saluran Air Minum PDAM Tirta Wampu .....	II – 46
Tabel 2-47 :	Luasan Rencana Pola Ruang Kabupaten Langkat Tahun 2013–2033 ...	II – 46
Tabel 2-48 :	Kondisi Rumah Tinggal Menurut Rumah Tangga Kab.Langkat.....	II – 47
Tabel 2-49 :	Rasio Rumah Layak Huni terhadap Penduduk menurut KecamatanTahun 2019 Kabupaten Langkat .....	II – 49
Tabel 2-50 :	Capaian Kinerja Urusan Sosial .....	II – 50
Tabel 2-51 :	PMKS Kabupaten Langkat 2015–2019.....	II – 50
Tabel2-52 :	Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat 2015–2019 .....	II – 51
Tabel 2-53 :	Realisasi Indikator Kinerja Urusan Pemberdayaan PerempuanDan Perlindungan Anak Kabupaten Langkat Tahun 2018–2019 .....	II – 52
Tabel 2-54 :	Jumlah PMKS Terkait Pemberdayaan Perempuan dan PerlindunganDan Perlindungan Anak Kabupaten Langkat 2015–2019	II – 53
Tabel 2-55 :	Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019 .....	II – 53

Tabel 2-56 : PerkembanganJumlah Sertifikat Hak Atas Tanah KabupatenLangkat Tahun 2015–2019 .....	II – 54
Tabel 2-57 : Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun 2018–2019 .....	II – 54
Tabel 2-58 : Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan PencatatanDan Pencatatan Sipil Tahun 2018–2019 .....	II – 55
Tabel 2-59 : Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Langkat 2018–2019 .....	II – 55
Tabel 2-60 : Klasifikasi Status Desa .....	II – 55
Tabel2-61 : Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana .....	II – 56
Tabel2-62 : Capaian Kinerja urusan Perhubungan 2018–2019 .....	II – 57
Tabel 2-63 : Jumlah Koperasi Tahun 2014–2018.....	II – 57
Tabel 2-64 : Indikator dan Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga ...	II – 58
Tabel 2-65 : Capaian Urusan Perpustakaan di Kabupaten Langkat Tahun 2017–2019 .....	II – 59
Tabel 2-66 : Produksi Ikan Kabupaten Langkat 2015–2019 .....	II – 59
Tabel 2-67 : Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Langkat 2017–2019 .....	II – 60
Tabel 2-68 : Produksi Tanaman Pangan 2015–2019 .....	II – 60
Tabel 2-69 : Populasi Ternak Kabupaten Langkat 2015–2019 .....	II – 61
Tabel 2-70 : Produksi Hasil Perkebunan Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019.....	II – 61
Tabel2-71 : Jumlah Penerbit SIUP Tahun 2015–2019 .....	II – 62
Tabel2-72 : Capaian Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019 .....	II – 63
Tabel 2-73 : Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018–2019 .....	II – 63
Tabel 2-74 : Perkembangan Angka Pengeluaran Riil per Kapita 2015–2019 .....	II – 64
Tabel 2-75 : Jenis Permukaan Jaringan Jalan Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019 .....	II – 64
Tabel 2-76 : Kondisi jaringan Jalan Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019 .....	II – 65
Tabel 2-77 : Luas Lahan Persawahan Menurut Kecamatan Tahun 2019 .....	II – 65
Tabel 2-78 : Perkembangan Jumlah Hotel, Restoran, dan Rumah Makan yang Pengurus Izin di Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019 .....	II – 66
Tabel 2-79 : Catatan Kriminalitas di Lingkungan Kabupaten Langklat Tahun 2015–2019 .....	II – 67
Tabel 2-80 : Komponen dan Besaran Pajak Daerah .....	II – 67
Tabel2-81 : Besaran Retribusi Daerah Tahun 2015–2019 .....	II – 68
Tabel2-82 : Persentase Desa Berstatus Swasembada Terhadap Total Desa.....	II – 69
Tabel 2-83 : Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Berdasarkan tingkat Pendidikan Tahun 2019 .....	II – 69
Tabel 2-84 : Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2015–2019 .....	II – 70
Tabel 2-85 : Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Langkat Tahun 2019 .....	II – 71

Tabel 2-86 :	Capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019 .....	II – 73
Tabel 2-87 :	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Langkat sampai dengan tahun 2019 .....	II –79
Tabel 2-88 :	Standar Pelayanan Minimal Tahun 2014–2019 Dinas KesehatanKabupaten Langkat .....	II – 116
Tabel 2-89 :	Standar Pelayanan Minimal Tahun 2015–2019 Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat.....	II – 136
Tabel 2-90 :	Standar Pelayanan Minimal Tahun 2015–2019 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Langkat.....	II – 136
Tabel 2-91 :	Standar Pelayanan Minimal Tahun 2015–2019 Bidang KeluargaBerencana .....	II – 138
Tabel 3-1 :	Perkembangan PDRB Kabupaten Langkat atas Dasar HargaBerlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2015–2019 (juta rupiah) .....	III – 3
Tabel 3-2 :	Nilai Sektor dalam PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2019 (dalam miliar Rupiah).....	III – 3
Tabel 3-3 :	Nilai Sektor dalam PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2018–2019 .....	III – 4
Tabel 3-4 :	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) & Atas Dasar harga Konstan (ADHK) Tahun 2015–2019 .....	III – 5
Tabel 3-5 :	Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Langkat Tahun 2016–2019.....	III – 7
Tabel 3-6 :	Proyeksi PDRB ADHB dan PDRB ADHK (juta) 2020-2021 .....	III– 11
Tabel 3-7 :	Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Langkat Tahun 2017–2021 (dalam miliar rupiah) .....	III – 14
Tabel 3-7 :	Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah Kabupaten LangkatTahun 2017–2021 .....	III – 17
Tabel 3-8 :	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Dearah Kabupaten Langkat Tahun 2017–2021 .....	III – 18
Tabel 3-9 :	Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan DaerahKabupaten Langkat Tahun 2017–2021 .....	III – 19
Tabel 4-1 :	Penjabaran Visi, Misi dan Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Langkat 2019-2024 .....	IV –7
Tabel 4-2 :	Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Langkat 2019–2024 .....	IV –8
Tabel 4-3 :	Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Pembangunan Kabupaten Langkat 2020-2024 .....	IV – 12
Tabel 4-4 :	Tujuan, Sasaran dan Indikator RKPD Tahun 2021 .....	IV –23
Tabel 4-5 :	Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKP Tahun 2021 .....	IV – 30
Tabel 4-6 :	Prioritas Propinsi dan Program Prioritas RKPD Propinsi Sumatera Utara Tahun 2021 .....	IV – 35
Tabel 4-7 :	Prioritas Kabupaten, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 .....	IV – 44



Tabel 4-8	: Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 terhadap RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 .....	IV – 71
Tabel 4-9	: Sandingan Rancangan Prioritas Nasional Tahun 2021 Dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2021 .....	IV – 79
Tabel 4-10	: Sandingan Rancangan Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2021.....	IV – 80
Tabel 5-1	: Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2020.....	V – 1
Tabel 5-2	: Proyeksi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 .....	V – 12
Tabel 5-3	: Proyeksi Belanja Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021.....	V – 13
Tabel 5-4	: Proyeksi Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021.....	V – 13
Tabel 5-5	: Rencana Pagu Anggaran Pembangunan Kabupaten Langkat RKPD Tahun 2021 Belanja Langsung .....	V – 13
Tabel 5-6	: Rekapitulasi Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kab. Langkat yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021 .....	V – 15
Tabel 5-7	: Rekapitulasi Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan .....	V – 16
Tabel 5-8	: Rekapitulasi Program dan Kegiatan, serta Anggaran Kabupaten Langkat yang Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG).....	V – 17
Tabel 5-9	: Rekapitulasi Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang Mendukung Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya .....	V – 19
Tabel 5-10	: Rekapitulasi Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang Mendukung Pengarusutamaan Transformasi Digital.....	V – 22
Tabel 5-11	: Rekapitulasi Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang Mendukung Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 .....	V – 24
Tabel 5-12	: Pokok-pokok Pikiran DPRD Yang Tertampung Dalam Reses DPRD Kabupaten Langkat .....	V – 24
Tabel 6-1	: Indikator Kinerja Utama (IKU) Kab. Langkat Tahun 2021.....	VI – 1
Tabel 6-2	: Program Pembangunan yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Langkat Tahun 2021 .....	VI – 3
Tabel 6-3	: Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	VI – 24
Tabel 6-4	: Indikator Aspek Daya Saing Daerah.....	VI – 27
Tabel 6-5	: Indikator Aspek Pelayanan Umum .....	VI – 29

## DAFTAR GAMBAR

	<b>Halaman</b>
Gambar 1-1 : Hubungan RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2020 dengan Dokumen Perencanaan Lainnya .....	I – 6
Gambar 2-1 : Peta Administrasi Wilayah Kabupaten Langkat .....	II – 1
Gambar 2-2 : Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Langkat Tahun 2013-2019 dan Perbandingannya pada Tingkat Provinsi (%) .....	II – 24
Gambar 2-3 : Pertumbuhan Ekonomi Setiap Sektor pada Tahun 2018.....	II – 24
Gambar 2-4 : Kontribusi Sektor Terhadap Total PDRB ADHK Kabupaten Langkat Tahun 2018 (%) .....	II – 26
Gambar 2-5 : Grafik Proporsi Kondisi Jalan Kabupaten Langkat Tahun 2013 – 2017 .....	II – 42



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dalam rangka memenuhi amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Pasal 150 ayat ayat (3) huruf d Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Badan Perencanaan menyusun Rencana Kerja Pembangunan Daerah selanjutnya disebut RKPD dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten serta mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJM Nasional serta RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat, dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.

RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), yakni sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Dokumen ini memuat rancangan kerangka baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 merupakan pelaksanaan Tahun ke empat dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), RKPD merupakan Pedoman bagi SKPD untuk menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) dan untuk menyusun RKA SKPD Tahun 2021.



Mengingat RKPD merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka RKPD 2021 merujuk pada dokumen-dokumen perencanaan yang sudah ada yaitu RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Tahun 2021, RPJPD Provinsi Sumatera Utara, dan RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 terutama dilihat dari keterkaitan kebijakan dan arah pembangunan yang dilaksanakan Tahun 2021. Penetapan prioritas pembangunan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 berorientasi pada arah pembangunan yang telah ditetapkan pada RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025.

Penyusunan RKPD dilaksanakan melalui 3 tahapan yaitu penyusunan rancangan awal RKPD, rancangan RKPD, rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD dengan menggunakan pendekatan Teknokratik, Partisipatif, Bottom-Up dan Top-Down. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berfikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk menyusun perencanaan pendapatan, perencanaan belanja dan perencanaan pembiayaan, termasuk melalui proses konsultasi dengan para pakar. Proses partisipatif dilakukan dengan mengikutsertakan seluruh pemangku kepentingan pembangunan antara lain melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Proses bottom-up dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa, Kecamatan, Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Pada penyusunan RKPD Tahun 2021, berpedoman pada RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 dan RPJPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2005-2025. Hal ini sejalan dengan amanat pasal 287 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa bagi daerah yang belum memiliki RPJMD Kabupaten dan mengacu pada RPJMD provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten dengan pembangunan daerah provinsi.

Dalam Penyusunan RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 juga berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa RKPD Tahun 2021 merupakan penjabaran dari RPJMD dan RKPD Tahun 2021 memuat :



- a. Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah.
- b. Prioritas Pembangunan Daerah.
- c. Rencana Kerja dan Pendanaan dalam jangka waktu 1 (satu) Tahun.

## **1.2 Dasar Hukum Penyusunan**

Dasar Hukum Penyusunan RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 ini mengacu kepada:

1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982, tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Dati II Langkat dari Wilayah Kodya Dati II Binjai ke Kota Stabat di Wilayah Dati II Langkat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
7. Peraturan Pemerintahan Nomor 10 Tahun 1986, tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Binjai, Kabupaten Dati II Langkat dan Kabupaten Dati II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Tahun 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);



9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008, tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2021
13. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009, Tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kabupaten Langkat (Lembaran daerah Kabupaten Langkat Tahun 2009 Nomor 1, Tambahn Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 4);
14. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 Nomor 01.
15. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 10 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2018 Nomor 3).
17. Peraturan Bupati Langkat Nomor 45 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019.

### **1.3 Hubungan Antar Dokumen**

RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 disusun untuk mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan dan harus selaras dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang, dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keselarasan, ketertarikan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi.





RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 merupakan penjabaran taktis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD Tahun 2005-2025) dan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, sehingga keberadaannya tidak dapat terpisahkan. Penyusunan RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021, serta RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024. Agar RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 selaras dengan Kebijakan Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara, perlu dilakukan telaahan terhadap pembangunan nasional yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.

Secara lebih terperinci hubungan antara RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

**a. Hubungan RKPD Kab. Langkat dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021**

RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 merupakan dokumen perencanaan pembangunan Tahunan daerah yang wajib mempedomani Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah harus sesuai dan bersinergi dengan Rencana Kerja Pemerintah. Beberapa hal penting yang harus diperhatikan diantaranya adalah agenda prioritas nasional dan dimensi pembangunan. Lima agenda prioritas nasional yang harus diperhatikan dalam penyusunan RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 yaitu:

1. Pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.
2. Infrastruktur dan pemerataan wilayah.
3. Nilai tambah sektor, riil, industrialisasi dan kesempatan kerja.
4. Ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup.
5. Stabilitas pertahanan dan keamanan.

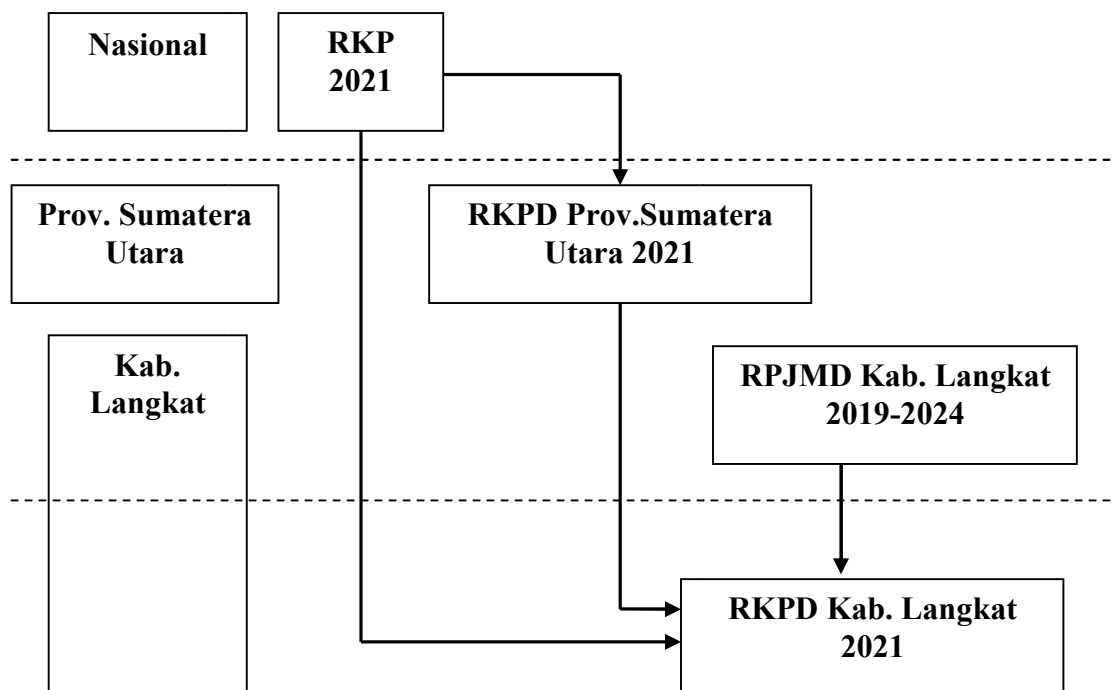
**b. Hubungan RKPD Kab. Langkat dengan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021**

Penyusunan RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 wajib mengacu pada dokumen RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021. Proses penyusunan RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 perlu memperhatikan prioritas pembangunan Provinsi Sumatera Utara, yaitu:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha.
2. Peningkatan dan pemenuhan akses pendidikan.
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan.
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas.
5. Peningkatan daya saing sektor agraris dan pariwisata.

**c. Hubungan RKPD Kab. Langkat dengan RPJMD Kab. Langkat Tahun 2019-2024**

RKPD adalah dokumen perencanaan Tahunan pembangunan daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJMD. RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 merupakan rencana pembangunan tahun kedua dari RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024. Oleh sebab itu, penyusunan RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 memuat prioritas dan sasaran pembangunan, rincian program dan kegiatan, serta target pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD. Selain itu, rencana program serta kegiatan prioritas Tahunan daerah juga harus selaras dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.



*Gambar 1.1*  
*Hubungan RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021*  
*Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya*

**d. Hubungan RKPD Kab. Langkat dengan RTRW Kab. Langkat 2013-2033**

Penyusunan RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 berpedoman pada RTRW Kabupaten Langkat, yaitu dengan menyelaraskan pencapaian strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan Tahunan daerah dengan pemanfaatan struktur dan pola ruang kota. Penyusunan RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033.



**e. hubungan RKPD Kab. Langkat dengan Renja Perangkat Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, RKPD Kabupaten/Kota yang telah ditetapkan dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah. Program dan kegiatan dalam Renja Perangkat Daerah dirumuskan dalam rangka mewujudkan pencapaian sasaran serta target kebijakan program dan kegiatan pembangunan dalam RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021. Perumusan Renja Perangkat daerah merupakan proses yang tidak terpisahkan dan dilakukan bersamaan dengan tahap perumusan rancangan RKPD. penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah bertujuan untuk mempertajam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan daerah sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam RKPD.

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021.

Rancangan Perkada tentang RKPD sebagaimana di maksud pada ayat (2) dan ayat (3), disampaikan secara lengkap dengan melampirkan dokumen yang terdiri atas:

- a. Surat permohonan fasilitas dari gubernur kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah atau dari bupati/wali kota kepada gubernur melalui kepala Bappeda provinsi;
- b. Rancangan Akhir RKPD;
- c. Berita Acara Kesepakatan Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan RKPD;
- d. Hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan Tahunan;
- e. Gambaran konsistensi program dan kerangka pendanaan antara RPJMD dan RKPD;
- f. Hasil review Aparat Pengawasan Internal Pemerintah Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah; dan
- g. Format isian fasilitasi RKPD Tahun 2021.

## **1.4 Maksud dan Tujuan**

### **1. Maksud**

Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Langkat Tahun 2021 dimaksudkan sebagai;



- a. Menjabarkan arahan umum RPJPD Tahun 2005-2025 dikaitkan dengan hasil kajian mengenai isu-isu strategis yang diperkirakan akan berdampak terhadap penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan Tahun 2021;
- b. Mengakomodasi pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Mengidentifikasi kebutuhan masyarakat dan merumuskannya menjadi prioritas pembangunan daerah;
- d. Mengidentifikasi perkiraan ketersediaan sumberdaya dan dana pembangunan yang akan dijadikan sebagai salah satu kekuatan pembangunan;
- e. Memberikan arah dan sekaligus tolak ukur keberhasilan pembangunan;
- f. Pedoman bagi SKPD Kabupaten Langkat dalam menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD) Tahun 2021;

## **2. Tujuan**

Tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Langkat Tahun 2021 adalah:

- a. Tersedianya rumusan program strategis dalam skala prioritas yang lebih tajam dan merupakan indikasi program APBD Kabupaten Langkat pada Tahun Anggaran 2021 mendatang;
- b. Tersedianya pedoman umum untuk menetapkan APBD Tahun 2021, berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Kabupaten Langkat dengan DPRD yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJP dan RPJM, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang berkembang dan disampaikan melalui lembaga eksekutif;
- c. Tersedianya tolok ukur untuk mengevaluasi penilaian Kinerja Pemerintah Daerah;
- d. Sebagai salah satu upaya untuk membangun komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD pada Tahun 2021;
- e. Mendorong partisipasi masyarakat melalui kepastian kebijakan dalam pembangunan jangka pendek;
- f. Sebagai pedoman dan arah dalam penyusunan RAPBD Tahun Anggaran 2020;
- g. Menjadi acuan bagi seluruh SKPD Kabupaten Langkat dalam penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD);
- h. Menjadi pedoman dalam penyusunan KUA, PPAD dan APBD Tahun Anggaran 2021;



- i. Menciptakan kepastian dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan; serta
- j. Mewujudkan efisiensi dan efektivitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah;

Guna menjamin konsistensi antara dalam perencanaan dan penganggaran, efektivitas dan efisiensi pencapaian prioritas serta sasaran pembangunan nasional dan daerah, program dan kegiatan yang ditetapkan dalam RKPD menjadi landasan penyusunan KUA dan PPAS untuk menyusun R.APBD. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan sebagai berikut;

- a. Pasal 17 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyatakan bahwa penyusunan R.APBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara;
- b. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyampaikan KUA Tahun anggaran berikutnya sejalan dengan RKPD, sebagai landasan penyusunan R.APBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan Juni Tahun berjalan;
- c. Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan R.APBD.

### **1.5 Sistematika Dokumen RKPD**

Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

1. **BAB I. PENDAHULUAN;** Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.
2. **BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH;** Evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD Tahun lalu. Selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD Tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi, demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.



3. **BAB III. KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH;** Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi Tahun lalu dan perkiraan Tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.
4. **BAB IV. SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH;** Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu strategis dan masalah mendesak di tingkat daerah dan nasional, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan. Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan apa yang diusulkan oleh SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD Tahun sebelumnya.
5. **BAB V. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;** Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan Tahunan, kedudukan Tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.
6. **BAB VI. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH;** Berisikan tentang penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertujuan untuk memberikan panduan dalam pencapaian kinerja Tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir Tahun perencanaan.
7. **BAB VII. PENUTUP.**



## BAB II

## GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

## 2.1 KONDISI UMUM DAERAH

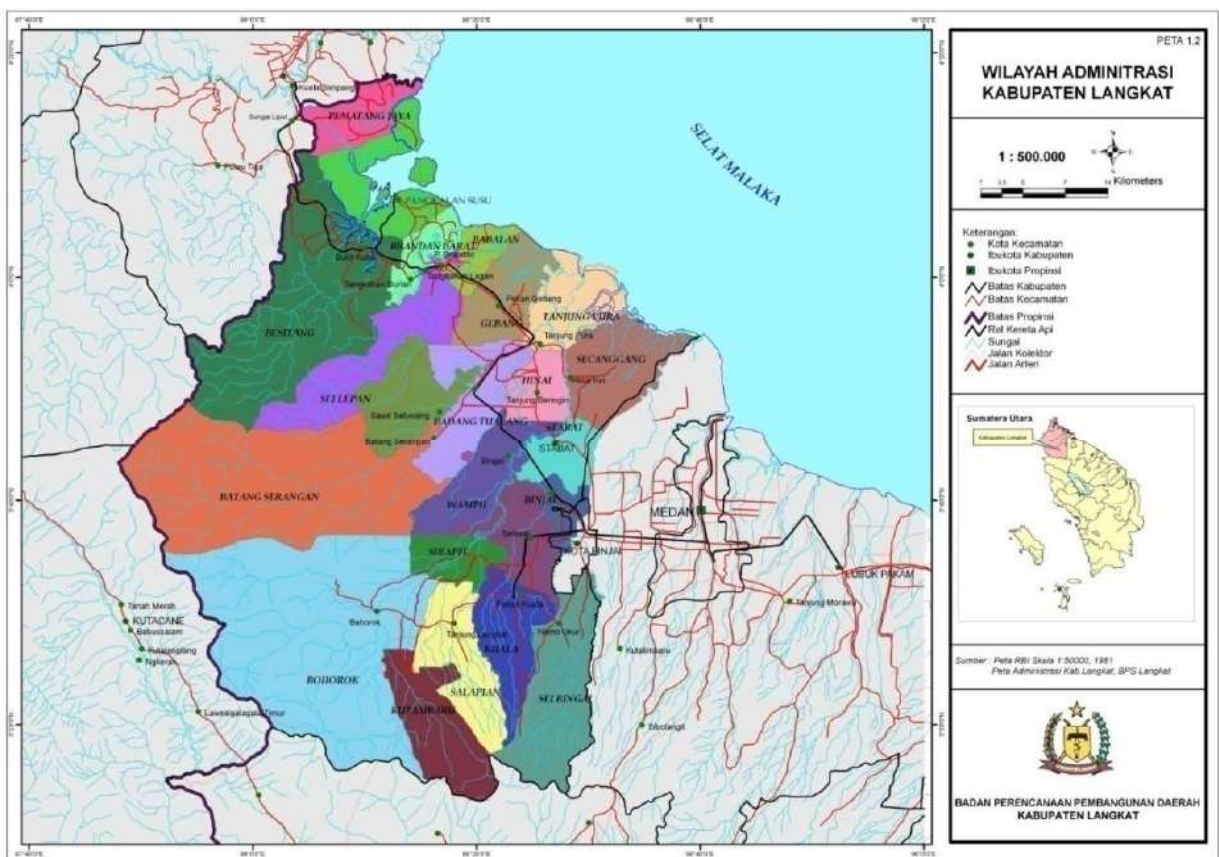
### 2.1.1 Aspek Geografi dan Demofologi

### A. karakteristik Lokasi dan Wilayah

### 1) Luas Wilayah dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Langkat memiliki luas wilayah sebesar 6.262,29 km<sup>2</sup>. Kabupaten ini merupakan Kabupaten dengan luas wilayah terbesar di Sumatera Utara. Kabupaten Langkat berada di kawasan Pantai Timur Sumatera Utara yang mempunyai batas-batas administrasi antara lain :

- Utara : Provinsi Aceh, Selat Malaka
- Selatan : Kabupaten Karo, Kota Binjai
- Barat : Provinsi Aceh
- Timur : Kabupaten Deli Serdang



### Gambar 2-1

**Peta Administrasi Wilayah Kab. Langkat**  
*Sumber : RTRW kab. Langkat Tahun 2013-2033*



Secara administratif, Kabupaten Langkat terdiri dari 23 wilayah Kecamatan, dan 37 Kelurahan. Berdasarkan luas daerah menurut kecamatan, Kecamatan Bahorok merupakan kecamatan terluas di Kabupaten Langkat, dengan luas 1.101,83 Km<sup>2</sup> atau 17,59% dari luas Kabupaten Langkat. Kecamatan dengan luas daerah terkecil adalah Kecamatan Binjai dengan luas 42,05 Km<sup>2</sup> atau 0,67% dari luas Kabupaten Langkat. Kecamatan yang memiliki desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Bahorok dan Kecamatan Tanjung Pura (19 desa/kelurahan) sedangkan kecamatan dengan desa/kelurahan paling sedikit adalah Kecamatan Sawit Seberang, Brandan Barat dan Binjai (7 Desa/Kelurahan).

TABEL 2-1  
Pembagian Wilayah di Kabupaten Langkat

NO	KECAMATAN	IBU KECAMATAN	BANYAKNYA		LUAS	
			DESA	KELURAHAN	KM <sup>2</sup>	%
1	Bahorok	Pekan Bahorok	18	1	1.101,83	17,59
2	Sirapit	Sidorejo	10	0	98,5	1,57
3	Salapian	Minta Kasih	16	1	221,73	3,54
4	Kutambaru	Kutambaru	8	0	234,84	3,78
5	Sei Bingei	Namu Ukur Selatan	15	1	333,17	5,32
6	Kuala	Pekan Kuala	14	2	206,23	3,29
7	Selesai	Pekan Selesai	13	1	167,73	2,68
8	Binjai	Kwala Begumit	6	1	42,05	0,67
9	Stabat	Stabat Baru	6	6	108,85	1,74
10	Sei Wampu	Bingai	13	1	194,21	3,10
11	Batang Serangan	Batang Serangan	7	1	899,38	14,36
12	Sawit Seberang	Sawit Seberang	6	1	209,10	3,34
13	Padang Tualang	Tanjung Selamat	11	1	221,14	3,53
14	Hinai	Kebun Lada	12	1	105,26	1,68
15	Secanggang	Hinai Kiri	16	1	231,19	3,69
16	Tanjung Pura	Pekan Tanjung Pura	18	1	179,61	2,87
17	Gebang	Pekan Gebang	10	1	178,49	2,85
18	Babalan	Pelawi Utara	4	4	76,41	1,22
19	Sei Lapan	Alur Dua	9	5	280,68	4,48
20	Brandan Barat	Tangkahan Durian	5	2	89,80	1,43
21	Besitang	Pekan Besitang	6	3	720,74	11,51
22	Pangkalan Susu	Bukit Jengkol	9	2	151,35	2,42
23	Pematang Jaya	Limau Mungkur	8	0	209,00	3,34
JUMLAH			240	37	6,263,29	100

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka

---

## 2) letak dan Kondisi Geografi

### a) Posisi Astronomis

Posisi astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Posisi astronomis Kabupaten Langkat adalah  $3^{\circ}14'$  Lintang Utara –  $4^{\circ}13'$  Lintang Utara dan  $97^{\circ}52'$  Bujur Timur –  $98^{\circ}45'$  Bujur Timur.

### b) Posisi Geostrategik

Kabupaten Langkat terletak dibagian Timur Laut Propinsi Sumatera Utara, di sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tamiang) dan Selat Malaka. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Karo. Sebelah Timur berbatasan dengan Propinsi Aceh (Kabupaten Aceh Tenggara). Berdasarkan jalur lintas antar daerah, kondisi wilayah Kabupaten Langkat dilewati jalur jalan Negara yang merupakan jalur ekonomi penting yang menghubungkan kota-kota utama di Provinsi Sumatera Utara dan Provinsi Aceh, Khususnya untuk pantai Timur Sumatera Utara Bagian Utara, Yakni jalur lintas Medan-Banda Aceh.

Jalur lau lintas jalan propinsi poros Binjai – Bukit Lawang. Merupakan jalur wisata alam dan konservasi TNGL, di sepanjang jalur tersebut selain kawasan wisata, juga merupakan lokasi perkebunan besar nasional, serta memungkinkan untuk dikembangkan menjadi sentra produksi hortikultura buah – buahan dan sayuran serta tanaman pangan.

### c) Kondisi/Kawasan

Kawasan pegunungan terletak di wilayah Langkat Hulu. Wilayah ini merupakan hulu dari sungai – sungai yang ada di Kabupaten Langkat. Sebagai besar wilayahnya merupakan lahan konservasi sumberdaya alam Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Kawasan dataran rendah dan pesisir terletak di wilayah Kabupaten Langkat Hilir dan Teluk Aru. Kawasan pesisir Kabupaten Langkat adalah Kawasan yang berhadapan dengan Selat Malaka ini, Kabupaten Langkat memiliki beberapa buah pulau kecil yang berada di wilayah perairan Kecamatan Pangkalan Susu. Pulau yang memiliki nama adalah Pulau Kampai dan Pulau Sembilan. Kedua pulau inii memiliki penghuni, dan dikenal sebagai satu sentra pembuatan terasi yang cukup dikenal di Sumatera Utara.

### **3) Topografi**

Kondisi topografi bervariasi mulai dari datar untuk daerah sekitar pesisir pantai, bergelombang dan berbukit sampai bergunung untuk daerah hulu sungai, dengan ketinggian antara 0-1.200 mdpl, dengan garis pantai sepanjang 110km. Bagian Timur Laut berada perbukitan di bagian Timur Laut disekitar Kecamatan Pematang Jaya dan Kecamatan Gebang. Daerah tersebut rata-rata memiliki ketinggian 0-4 mdpl, meliputi Kecamatan Pematang Jaya, Besitang, Pangkalan Susu, Brandan Barat, Sei Lapan, Babalan, Gebang, Tanjung Pura, dan Secanggang.

Bagian Barat sampai dengan Barat Daya relatif datar sampai berikut dengan ketinggian 0-30 mdpl. Daerah tersebut meliputi Kecamatan Stabat, Binjai, Hinai, Wampu, Padang Tualang, Selesai, Sawit Seberang, sebagian Sei Lapan, sebagian Besitang, sebagian Kuala, dan sebagian Sei Bingai.

Daerah yang berbatasan dengan Karo, Aceh Tenggara dan Gayo Luwes bergelombang sampai bergunung yang relatif terjal, dengan ketinggian antara 30 – 1200 mdpl. Daerah tersebut merupakan Hutan Lindung kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL). Kecamatan yang termasuk daerah sebagian Besitang, Sei Lapan, Bahorok, Batang Serangan, Salapian, dan Sei Bingai.

### **4) Geologi**

#### **a) Struktur dan Karakteristik.**

Jenis tanah di Kabupaten Langkat.

- Dataran sepanjang pantai terdiri dari tanah alluvial.
- Dataran rendah terdiri dari jenis glei humus rendah, hidromofil kelabu dan plarosal.
- Dataran tinggi dan perbukitan terdiri dari tanah pobsolid merah kuning.

Adapun susunan batuan (geologi) di Kabupaten Langkat adalah :

- QH = Alluvium : Kerikil, Pasir, dan Lempung.
- Qpme = Formasi Medan : Bongkahan – bongkahan Kerikil, Pasir, Lanau dan Lempung.
- QTjr = Formasi Juru Rayeu : Batupasir berlapis selang-seling dan Berlumpur;
- Qvt = Tufa Toba : Tufa riodasit, sebagian terlaskan;



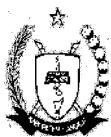
- Qvbj = Satuan Binjai : Breksi aliran bersusun andesit sampai desit;
- Ppbl = Formasi batu Gamping Batumilmil : Batu Gamping dan Rijang;
- Pub = Formasi Bahorok : Wakemalihan, Batusabak, arenit, kuarsa malihan, batulanau malihan, konglomerat;
- Tps = Formasi Seurela : Batupasir berirama, batulumpur, dan konglomerat;
- Tuk = Formasi Keutapan : Batupasir berlapis selang-seling dan berlumpur;
- Tmb = Formasi Baong : Batulumpur (beberapa bergalukonit) dan batu pasir;
- Top = Formasi Bruksah : Batupasir dan konglomerat.

b) Potensi

berpedoman kepada kriteria peruntukan ppertambangan dan pembagian Wilayah Pengembangan di Kabupaten Langkat, maka potensi yang ada dan mendapat prioritas pengembangan dapat dilihat dari Tabel 2.2.

**TABEL 2-2**  
**Jenis Bahan Galian Di Kabupaten Langkat**

NO	JENIS BAHAN GALIAN	LOKASI	KEGUNAAN
1.	Batu Gamping	Kec. Salapian	Bahan bangunan/jalan, dan bahan baku semen
2.	Kulit Kerang	Kec. Bahorok, Salapian dan Hinai	Bahan baku utama/penolong sektor industry
3.	Fosfat	Bahorok	Pembuatan pupuk
4.	Feldsfar	Sepanjang Patai Timur	Industri keramik, kaca lembaran
5.	Gambut	Padang Tualang	Bahan bakar gas dan cair
6.	Kalsit	Salapian	Pengisi kertas, cat, tapal gigi, pemutih
7.	Kaolin	Bahorok	Bahan Keramik, bahan filter pada industri cat, karet
8.	Sirtu	Bahorok, Padang Tualang, Selesai	Bahan bangunan, Jalan dan lain-lain
9.	Oker	Brandan Barat	Bahan baku cat
10.	Bentonit	Besitang	Pemboran, pencoran logam dan enjernih minyak goreng, minyak bumi, pembuatan wol mineral, campran semen
11.	Batu bara	Bahorok, Batang Serangan	Bahan Bakar
12.	Lempung	Kuala, Bahorok	Bahan batu bara dan bahan baku semen
13.	Pasir Laut	Sepanjang Pantai Timur	Campuran lempung feldsfer



14.	Batu Setengah Mulia	Brandan Barat	Perhiasan dan bahan dekorasi atau hiasan
15.	Tanah Urug	Padan Tualang, Besitang	Penimbunan
16.	Pasir Kuarsa	Pangkalan Susu	Bahan baku gelas
17.	Pasir	Stabat, Wampu, Selesai	Bahan bangunan
18.	Emas	Padang Tualang (masih dalam kajian)	Perhiasan
19.	Minyak dan Gas Bumi	Kabupaten Langkat (potensi)	

Sumber : RTRW Kabupaten Langkat, 2013-2033

## 5) Hidrologi

### a) Daerah Aliran Sungai (DAS)

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2012 tentang Penetapan Wilayah Sungai, sungai-sungai yang berada di wilayah kabupaten Langkat masuk dalam Wilayah Sungai Wampu-Besitang. DAS yang masuk dalam wilayah sungai tersebut meliputi DAS Damar Condong, DAS Pangkalan Susu, DAS Simpang Kiri, DAS Pardongkelan, DAS Besitang, DAS Beras Basah, DAS Tenggulung, DAS Lapan, DAS Karakunda, DAS Gebang, DAS Wampu, DAS Tanjung Ibus dan DAS Sembilan.

DAS Wampu adalah merupakan DAS terluas di wilayah Kabupaten Langkat, dengan laus areal mencapai 416,175.19 Ha. Tingkat kekritisan lahan DAS Wampu mencapai 87,103.16 Ha atau 20.08% di mana sub DAS Lau Biang Hulu merupakan wilayah yang memiliki kekritisan lahan paling luas yaitu 25,186.16 Ha atau 25.17% dari luasan Sub DAS Lau Biang Hulu atau 6.05% dari luasan DAS Wampu.

### b) Sungai

Di Wilayah Kabupaten Langkat terdapat 26 buah aliran sungai besar dan kecil, Berdasarkan Klasifikasi sungai menurut Kern dalam Maryono, A., 2005, Sungai Wampudan Sungai Batang Serangan masuk dalam kategori sungai besar ( sungai dengan lebar lebih dari 80m), Sedangkan Sungai Besitang, Sungai Musam, Sungai Sei Lapan, dan Sungai Bahorok termasuk kategori Sungai (sungai dengan lebar s-d 80m), sungai-sungai yang lain termasuk kategori sungai menengah dan sungai kecil (sungai menengah dengan lebar 10m s/d 20m). keberadaan sungai tersebut merupakan potensi fisik yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber air untuk irigasi dan budidaya air tawar. Data aliran sungai di Kabupaten Langkat disajikan dalam Tabel 2.3 dibawah ini.





Tabel 2-3  
Data Aliran Sungai di Kabupaten Langkat

NO	NAMA SUNGAI	LUAS (KM <sup>2</sup> )	KECAMATAN	PANJANG (KM)	LEBAR (M)	ISI NORMAL (KM <sup>3</sup> )
1.	Wampu	2.569	Bahorok, Salapian, Kuala, Selesai, Stabat, Binjai, Secanggang	105	100	80
2.	Bt. Serangan	1.413	Pdg. Tualang, Tj. Pura	80	100	43
3.	Besitang	440	Besitang	83	50	8
4.	Musam	175	Pdg. Tualang	25	43	18
5.	Lepan	825	Babalan	80	40	9
6.	Bahorok	150	Bahorok	25	40	8
7.	Mencirim	43	Bujai, Wampu	38	38	13
8.	Kr. Gading	160	Secanggang, Stabat	27	30	2
9.	Bekulap	134	Salapian, Kuala	40	30	10
10.	Bingai	717	Sei Bingai, Bijai, Stabat	67	30	15
11.	Begumit	347	Kuala, Selesai	34	30	13
12.	Tenang	144	Pdg, Salapian	47	30	12
13.	Dendang	160	Stabat	27	30	2
14.	Bagerpang	57	Bahorok	20	25	5
15.	Salapian	145	Salapian	27	25	9
16.	Bekiun	94	Kuala, Salapian	25	20	6
17.	Gergas	58	Bahorok, Stabat	24	15	3
18.	Tembo	42	Kuala	27	15	4
19.	Besilam	288	Stabat, Pdg Tualang, Binjai	45	15	13
20.	Temuyuk	5	Salapian	4	10	1
21.	Bengaru	18	Sei Bingei	10	10	3
22.	Salaon	6	Sei Bingei	5	10	1
23.	Menjahong	18	Sei Biangei, kuala	13	10	3
24.	Belengking	40	Stabat	17	10	1
25.	Serapuh	40	Tanjung Pura	10	15	1
26.	Alur Hitam	18	Gebang	10	10	0,5

Sumber : kabupaten Langkat Dalam Angka

6) Klimatologi

Kabupaten Langkat memiliki iklim trofis basah, dimana sepanjang tahun merupakan bulan basah ( curah hujan diatas 100 mm<sup>3</sup>/bulan ) tanpa ada bulan kering, sehingga bisa disebut hujan hampir merata sepanjang tahun, dengan rata-rata curah hujan tertinggi untuk tiga tahun terakhir terjadi di bulan Mei yaitu 300 mm<sup>3</sup> dengan curah hujan terendah terjadi di bulan Pebruari yaitu 116 mm<sup>3</sup>.



Berdasarkan klarifikasi Schmidt-Ferguson, wilayah Kabupaten Langkat termasuk tipe iklim A dimana musim kemarau terjadi pada bulan Pebruari-Maret dan musim hujan pada bulan September sampai dengan Februari. Curah hujan rata-rata berkisar antara 1.000 mm sampai dengan 3.000 mm pertahun. Suhu rata-rata minimum berkisar antara 23<sup>0</sup> – 25<sup>0</sup> C dan rata-rata maksimum 30<sup>0</sup> – 33<sup>0</sup> C, serta kelembaban udara relatif antara 65% - 75%.

Di Kabupaten langkat juga terdapat fenomena alam yang disebut angin Bahorok, yaitu angin kencang dan kering yang berhembus dari arah Samudera Hindia melewati perbukitan daerah Bahorok menuju ke arah dataran rendah bagian timur. Angin tersebut biasa terjadi di pertengahan tahun.

Tabel 2-4  
Data Curah Hujan Kabupaten Langkat Tahun 2015-2019

DAERAH PENGAMATAN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
BPP Bahorok	425	97	378	284	264	355	232	89	481	525	466	521
BPP Tg. Langkat	434	97	145	154	234	257	200	139	324	683	450	443
Ktr. Camat Kuala	106	30	10	13	74	140	114	104	111	245	98	107
BPP Selesai	76	23	38	61	233	268	283	30	263	232	180	128
BPP Sei Bingai	203	60	187	358	159	272	299	138	200	279	538	338
BPP Kw. Begumit	153	12	101	202	271	184	271	223	336	398	191	171
BPP Perdamaian	78	44	40	58	90	168	169	105	363	236	166	151
BPP Cempa	141	83	61	188	129	97	81	178	227	298	168	246
Ktr. Camat Pd. Tualang	117	21	31	79	55	95	146	36	170	91	34	70
Ktr. Camat Bt. Serangan	320	66	26	288	390	405	395	208	468	732	613	520
BPP Babalan	133	33	40	109	50	140	113	186	245	288	82	187
BPP Brandan Barat	157	64	34	92	150	89	105	177	157	314	145	222
BPP Besitang	144	65	53	64	199	226	63	96	215	415	241	325
Ktr. Camat Pkl. Susu	169	72	43	90	133	111	117	146	125	330	247	123
BPP Gebang	178	47	79	191	77	137	67	195	214	380	126	162
BPP Pem. Jaya	59	75	52	146	138	50	64	112	129	265	259	146
BPP Secanggang	222	40	60	100	76	102	118	83	228	360	283	170
BPP Tanjung Pura	101	58	38	-	60	48	90	140	104	261	80	115
BPP Sei Lapan	133	72	109	80	50	-	111	134	243	257	76	185
BPP Sirapit	181	9	101	17	-	88	218	39	174	223	175	185
BPP Kutambaru	412	128	190	239	308	153	159	43	340	313	270	380



DAERAH PENGAMATAN	JAN	PEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGT	SEP	OKT	NOP	DES
BPP Sawit Seberang	213	115	70	261	151	247	197	116	439	274	180	272
BPP Peternakan Ds. Lbk Kasih	217	28	72	97	202	239	70	128	333	623	165	340
BPP Wampu	160	53	38	185	93	-	202	94	398	345	139	208
BPP Sei Siur Pkl. Susu	172	51	41	152	136	165	209	169	160	324	249	271
Rata-rata Tahun 2019	188,2	57,7	81,5	146,2	155,1	175,5	163,7	124,3	257,9	347,6	224,8	239,4
Tahun 2018	188,2	57,7	81,5	146,2	155,1	175,5	163,7	124,3	257,9	347,6	224,8	239,4
Tahun 2017	200,1	108,1	136,8	224,6	224,6	182,2	195,4	271,2	265,2	213,0	280,3	246,7
Tahun 2016	110,6	178,2	22,2	53,5	179,5	169,9	197,6	171,2	365,9	281,0	174,2	209,4
Tahun 2015	196,4	89,6	54,2	103,7	171,4	95,3	110,1	168,3	190,1	314,9	202,0	138,3

Sumber : Kabupaten langkat Dalam Angka

## 7) Penggunaan Lahan

### a) Kawasan Budidaya

Penggunaan lahan di Kabupaten Langkat tahun 2013 diklasifikasikan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu guna lahan pertanian sawah yang mencapai sekitar 6,46%, lahan buka pertanian sekitar 10,95% dan lahan pertanian bukan sawah sekitar 81,31% dari total luas wilayah Kabupaten Langkat.

Penggunaan lahan pertanian bukan sawah sebagian besar (66,67%) untuk areal perkebunan. Luas areal perkebunan di Kabupaten Langkat adalah 208.782.83 Ha atau 33,3% dari luas wilayah Kabupaten Langkat. Dengan komposisi perkebunan rakyat 43,99% (91.431,60 Ha). Perkebunan Negara 34,67% (72.387,61 Ha), Perkebunan Swasta Nasional 15,82% (33.038,41 Ha) dan Perkebunan Swasta Asing 5,70% (11.919,21 ha).

Areal perkebunan tersebut didominasi oleh perkebunan Kelapa Sawit dan Karet. Dengan perincian kebun Kelapa sawit 132.006 ha. (63,23%),Karet 60.327 ha (30,35%), Coklat 8.324 ha (4,19%), Kelapa 3.598 ha (1,81%), Tebu 1.159 ha (0,58%), Tembakau 1.476 ha (0,74%), Kopi 670 ha (0,33%) dan lain-lain 1.222,83 ha (0,62%).

Sedangkan luas baku areal persawahan adalah 43.805 ha pada tahun 2009, pada tahun 2013 tercatat tinggal 38.456 ha. Terdiri dari lahan sawah Irigasi 8.379 ha (Sumber; SP Lahan Dinas Pertanian Kabupaten



Langkat 2013), sisanya merupakan lahan sawah tadah hujan, pasang surut dan rawa lebak.

Tabel 2-5  
Tata Guna Lahan Wilayah Kabupaten Langkat Tahun 2019  
Berdasarkan Kecamatan

No	KECAMATAN	LAHAN PERTANIAN (HA)		NON PERTANIAIAN (HA)	JUMLAH (HA)
		SAWAH	BUKAN SAWAH		
1	Bahorok	700	105.185	4.298	110.183
2	Serapit	1.502	7.917	431	9.850
3	Salapian	171	20.587	1.415	22.173
4	Kutambaru	0	22.870	814	23.684
5	Sei Bingei	3.089	28.793	1435	33.317
6	Kuala	906	18.370	1.080	20.356
7	Selesai	1.221	12.437	3.115	16.773
8	Binjai	1.175	2.101	929	4.205
9	Stabat	1.342	6.758	2.785	10.885
10	Wampu	710	15.416	3.295	19.421
11	Batang Serangan	118	88.522	1.298	89.938
12	Sawit Seberang	0	19.637	1.273	20.910
13	Padang Tualang	74	19.327	2.713	22.114
14	Hinai	1.655	7.641	1.230	10.526
15	Secanggang	5.884	13.064	4.171	23.119
16	Tanjung Pura	2.738	13.507	1.716	17.961
17	Gebang	1.862	14.341	1.646	17.849
18	Babalan	4.259	2.337	1.045	7.641
19	Sei Lapan	1.426	23.594	3.048	28.068
20	Brandan Barat	1.521	5.519	1.940	8.980
21	Besitang	1.406	60.708	9.960	72.074
22	Pangkalan Susu	2.791	10.733	1.878	15.402
23	Pematang Jaya	803	18.672	1425	20.900
	Langkat	35.353	538.036	52.940	626.329

Sumber : Kabupaten langkat Dalam Angka

b) Kawasan Lindung

(1) Kawasan Hutan Lindung

Kawasan hutan lindung/kawasan konservasi/resapan air dengan nama kawasan Taman Hutan Wisata Bahorok (atau yang di kenal



dengan nama Bukit Lawang ) seluas 46.701 Ha, yang berada di Kecamatan Bahorok.

(2) Kawasan Perlindungan Setempat

– Sempadan Pantai

Kawasan sempadan pantai, meliputi daratan sepanjang tepian pantai yang lebarnya proporsional dengan bentuk dan kondisi fisik pantai, minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi kearah darat.

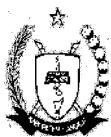
Adapun kawasan lindung berupa sepadan pantai ini di Kabupaten Langkat diarahkan terdapat pada kecamatan yang terdapat disepanjang kawasan pesisir Pantai Timur yaitu Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Brandan Barat, Babalan, Gebang, Tanjung Pura dan Secanggang. Luasan Kawasan Lindung untuk sepadan pantai adalah sepanjang garis pantai di Kabupaten Langkat di kurangi Kawasan budidaya seperti dermaga, kawasan wisata dan kawasan pendaratan ikan.

– Sempadan Sungai

Kawasan sempadan sungai, dengan lebar 100 meter di kiri-kanan seungai besar dan 50 meter di kiri-kanan anak sungai yang berada di luar permukiman. Garis sempadan sungai di kawasan permukiman diperkirakan cukup untuk untuk membangun jalan inspkesi yaitu antara 10-15 meter. Potensi sempadan sungai di Kabupaten Langkat sebesar 55 Km<sup>2</sup> atau 5.500 Ha. Dengan perincian sebagaimana disajikan dalam Tabel 2.6 sebagai berikut.

**Tabel 2-6**  
**Luas Potensi Sempadan Sungai Kabupaten Langkat**  
**Berdasarkan Nama Sungai**

NO	NAMA SUNGAI	KECAMATAN	PANJANG (KM)	LEBAR (M)	LUAS POTENSI SEMPADAN SUNGAI (KM <sup>2</sup> )
1.	Wampu	Bahorok, Salapian, Kuala, Selesai, Stabat,	105	100	10,5
2.	Bt, Serangan	Pdg Tualang, Tj, Pura	80	50	8
3.	Besitang	Besitang	83	43	4,15
4.	Musam	Pdg, Tualang	25	40	1,25
5.	Lepan	Babalan	80	40	4
6.	Bahorok	Bahorok	25	40	1,25



7.	Mencirim	Kabupaten Binjai, Wampu	38	38	1,9
8.	Kr, Gading	Secanggang, Stabat	27	30	1,35
9.	Bekulap	Salapian , Kuala	40	30	2
10.	Bingai	Sei, Bingai, Binjai, Stabat	67	30	3,35
11.	Begumit	Kuala, Selesai	34	30	1,7
12.	Tenang	Pdg, Tualang	47	30	2,35
13.	Dendang	Stabat	27	30	1,35
14.	Baperpang	Bahorok	20	25	1
15.	Salapian	Salapian	27	25	1,35
16.	Bekiun	Kuala, Salapian	25	20	1,25
17.	Gergas	Bahorok, Stabat	24	15	1,2
18.	Tembo	Kuala	27	15	1,35
19.	Besilam	Stabat, Pdg,Tualang, Binjai	45	15	2,25
20.	Temuyuk	Salapian	4	10	0,2
21.	Bengaru	Sei Bingai	10	10	0,5
22.	Salaon	Sei Bingai	5	10	0,25
23.	Menjahong	Sei Bingai, Kuala	13	10	0,65
24.	Belengking	Stabat	17	10	0,85
25.	Serapuh	Tanjung Pura	10	15	0,5
26.	Alaur Hitam	Gebang	10	10	0,5

Sumber : Kecamatan Dalam Angka (diolah)

### (3) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya

#### – Kawasan Suka Alam

Kawasan Suaka Alam di Kabupaten Langkat adalah hutan TNGL dengan luas lebih kurang 216.047 Ha. Dan Kawasan Suaka Marga Satwa Langkat Timur Laut di Kecamatan Tanjung Pura dan Secanggang dengan luas lebih kurang 9.520 Ha.

#### – Kawasan Pelestarian Alam

Kawasan hutan baku mangrove yang berada disepanjang pesisir Pantai Timur Kabupaten Langkat. Dimana kawasan hutan mangrove yang terdapat di 9 Kecamatan pesisir agar tetap dipertahankan dengan radius minimal 200 meter dari pasang tertinggi ke arah darat, yang terbentang disepanjang pesisir Kabupaten Langkat dikurangi kawasan budidaya yang telah diizinkan, seperti pelabuhan, pendaratan ikan, dan permukiman nelayan yang dibatasi pemanfaatan ruangnya.



## **B. Potensi Pengembangan Wilayah**

### **a. Potensi Sumber Daya Alam**

Berdasarkan karakteristik sumber daya yang ada, wilayah Kabupaten Langkat terbagi menjadi 2 kawasan , yaitu :

- Kawasan Langkat Hulu, wilayah ini meliputi Kecamatan Bahorok, Kutambaru, Salapian, Sirapit, Kuala, Sei Bingai, Selesai, dan Binjai. Wilayah ini merupakan hulu sungai dari sungai-sungai yang ada di Kabupaten Langkat. Banyak jeram-jeram berarus deras, yang layak untuk dikembangkan sebagai energy listrik mikro hidro. Di kawasan ini terdapat potensi tambang Batu Kapur dan Batubara. Selain terdapat potensi wisata berupa ekowisata Bukit Lawang yang berorientasi pada kegiatan konservasi orang utan dan ekosistemnya.
- Kawasan Langkat Hilir, wilayah ini meliputi Kecamatan Stabat, Wampu, Secanggang, Hinai, Batang Serangan, Sawit Seberang, Padang Tualang dan Tanjung Pura. Wilayah ini didominasi dataran rendah yang cocok untuk budidaya pertanian. Langkat Hilir sejak jaman Belanda dikenal sebagai wilayah perkebunan besar, yang sekarang dikenal dengan PTPN (PT Perkebunan Negara II dan IV). Sehingga budaya masyarakat perkebunan masih terlihat di wilayah ini. Sebagian wilayahnya juga merupakan lahan konservasi sumberdaya alam TNGL. Di Kecamatan Batang Serangan terdapat ekowisata Tangkahan, dengan atraksi menarik Unit Patroli Gajah. Para wisatawan dapat menikmati hiburan menaiki dan memandikan Gajah.
- Wilayah Teluk Aru, yaitu wilayah perbatasan antara provinsi Sumatera Utara dengan Provinsi Aceh, wilayah ini meliputi Kecamatan Gebang, Babalan, Se Iepan, Berandan Barat, Pangkalan Susu, Besitang dan Pematang Jaya. Di wilayah ini merupakan daerah eksplorasi PT Pertamina yang pertama di Indonesia, sehingga wilayah ini mempunyai karakteristik miniatur Indonesia. Namun potensi minyak dan gas bumi di Teluk Aru sudah semakin menipis dan kurang ekonomis untuk diusahakan, makan kilang Pertamina di Pangkalan Brandan ditutup. Penutupan Kilang ini sangat terasa dampaknya bagi perekonomian masyarakat setempat. Sebagian wilayahnya juga merupakan lahan konservasi sumberdaya alam TNGL. Di Kecamatan Besitang juga terdapat Unit Patroli Gajah Aras Napal yang dikelola oleh Balai Besar Konservasi Sumberdaya Alam.



**b. Potensi Sektor Ekonomi Rakyat**

kawasan budidaya yang di rencanakan di Kabupaten Langkat sesuai dengan RTRW Kabupaten Langkat tahun 2013-2023 adalah :

1. Kawasan hutan produksi :
  - Kawasan hutan produksi terbatas dengan luas sekitar 56.141 Ha. Terletak di Kecamatan Bahorok; Salapian; Kutambaru; Sei Bingai Kuala; Batang Sarangan; Sawit Seberang; Sei Lapan; Berandan Barat; Besitang; Pangkalan Susu; dan Pematang Jaya.
  - Kawasan hutan produksi tetap memiliki luas sebesar 39.453 Ha, meliputi Kecamatan Secanggang; Tanjung Pura; Gebang; Babalan; Sei Lapan; Brandan Barat; Besitang; Pangkalan Susu; dan Pematang Jaya.
2. Kawasan Pertanian :
  - Kawasan tanaman lahan basah, berdasarkan analisa kesesuaian lahan, kawasan ini di rencanakan baerkolasi menyebar hampir di seluruh wilayah Kecamatan baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total  $\pm 49.293$  Ha.
  - Kawasan tanaman lahan kering direncanakan menyebar diseluruh kecamatan Kabupaten Langkat baik dalam skala besar maupun kecil dengan luas total 36.348 Ha, dengan pusat pengembangan pertanian lahan kering meliputi Kecamatan Besitang; Bahorok; Hinai; Tanjung Pura; Binjai; Selesai; Wampu dan Secanggang.
  - Kawasan tanaman tahunan/perkebunan diarahkan meliputi seluruh kecamatan dengan luas pengembangan mencapai  $\pm 202.485$  Ha.
3. Kawasan peternakan di Kabupaten Langkat meliputi :
  - Peternakan hewan besar; Arahana sentra produksi Peternakan hewan besar seperti sapi potong dan kerbau meliputi Kecamatan Sei Bingai; Kuala; Selesai; Binjai; Wampu; Batang Serangan; Sawit Sebernag; Padang Tualang; Hinai; Secanggang; Pematang Jaya; Stabat; Bahorok; dan Sirapit.
  - Peternakan hewan kecil seperti domba, kambing dan babi meliputi : Kecamatan Selesai; Binjai; Hinai; Wampu; Padang Tualang; Sawit Seberang; Tanjung Pura; Sei Bingai; Kuala; dan Gebang.
  - Peternakan unggas seperti ayam dan itik meliputi : Kecamatan Binjai; Selesai; Kuala; Salapian; Tanjung Pura; dan Secanggang.





4. Kawasan perindustrian di Kabupaten Langkat terutama industri kecil dan menengah diarahkan diseluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Langkat. Sedangkan industri besar dapat diarahkan dan disesuaikan dengan hasil komoditi yang ada di setiap kecamatan dengan Pusat Industri berada pada Kecamatan Pangkalan Susu.

**c. Potensi Tambang Panas Bumi, Minyak Bumi, Mineral Batu Bara**

- 1) kawasan Pertambangan rakyat berada di Kecamatan Kutambaru, Bahorok, Salapian, Kuala, Sirapit, Selesai, Sei Bingai, Wampu, Batang Serangan, Pangkalan Susu, dan Berandan Barat.
- 2) Kawasan Pertambangan besar meliputi :
  - Pertambang Minyak dan Gas Bumi berada di Pangkalan Susu, Brandan Barat, Sei Lapan, Babalan, Hinai, Padang Tualang, Secanggang dan Binjai;
  - Tambang Panas Bumi;
  - Tambang Batu Bara; dan
  - Tambang Air Tanah CAT Medan;

**d. Potensi Perikanan dan Kelautan**

Kawasan budidaya perikanan di Kabupaten Langkat meliputi :

- Pengembangan budidaya perikanan laut dan budidaya (tambak), diarahkan di Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Tanjung Pura, Brandan Barat, Sei Lapan, Gebang, Besitang, dan Kecamatan Secanggang; dan
- Perikanan air tawar berupa kolam potensial dikembangkan diseluruh Kecamatan di Kabupaten Langkat, sedangkan perikanan air tawar berupa minapadi potensial dikembangkan di lahan sawah beririgasi di Kabupaten Langkat.

Pengembangan kawasan perikanan tangkap di Kabupaten Langkat meliputi :

- Perikanan tangkap di laut diarahkan pada jalur penangkapan ikan 0 – 4 mil dari garis pantai di Kecamatan Pematang Jaya, Pangkalan Susu, Tanjung Pura, Brandan Barat, Sei Lapan, Gebang, Babalan, dan Kecamatan Secanggang.
- Perikanan tangkap di perairan Umum diarahkan di Kecamatan Kutambaru, Sei Bingai, Bahorok, Salapian, Kuala, Padang Tualang Stabat, Wampu, Hinai dan Tanjung Pura; dan



- Pengembangan perikanan terpadu melalui konsep minapolitan dipusatkan di Kecamatan Pangkalan Susu dan didukung oleh desa-desa pesisir.
- Kawasan agromarinepolitan meliputi kawasan pantai timur Kabupaten Langkat.
- Pangkalan pendaratan ikan (PPI) untuk mendukung kegiatan perikanan tangkap meliputi PPI Pangkalan Susu, PPI Kuala Gebang.
- Pengembangan perumahan nelayan diarahkan di Kecamatan Brandan Barat, Kecamatan Sei Lapan, Kecamatan Babalan dan Pangkalan Susu.

**e. Potensi Pariwisata**

Kawasan pariwisata terdiri dari :

a) Wisata Alam (Darat) meliputi

- Pemandian dan rehabilitasi Orang Utan, Gua Batu Kapal dan Gua Batu Rizal, Kecamatan Baohorok;
- Gua, Air Terjun Marike dan Air Panas Simolap Kutumbaru di Kecamatan Kutumbaru
- Pemandian Namu Relok, Kecamatan Salapian;
- Pemandian Pangkal, Pemandian/Air Terjun Lau Berte, Pemandian Namu Ukur Utara, Kecamatan Sei Bingai;
- Sumber Air Panas Kuala Buluh, Kecamatan Padang Tualang;
- Batu rongreng Desa Sungai Musam dan Tangkahan di Kecamatan Batang Serangan ;
- Suaka Marga Satwa Langkat Timur Laut di Kecamatan Tanjung Pura dan Secanggang; dan
- Arung Jeram Sungai Wampu dan Sungai Bingai.

b) Wisata Alam (Laut) meliputi :

- Pulau Sembilan, Pantai Berawe di Pulau Kampai Kecamatan Pangkalan Susu; dan
- Pantai Kuala Serapuh, Kecamatan Tanjung Pura.

c) Wisata Buatan meliputi :

- Istana Batu Bukit Mas Kecamatan Besitang.
- Pulau Kuburan Mas Merah dan kuburan Panjang di Pulau Kampai Kecamatan Susu;
- Mesjid Azizi, Makan T. Amir Hamzah dan Museum, Kecamatan Tanjung Pura;
- Haul Tuan Guru Besilam, Kecamatan Padang Tualang; dan
- Kampung Bali di Kecamatan Wampu.

d) Kawasan Strategis

Kawasan strategis adalah merupakan kawasan yang didalamnya berlangsung kegiatan yang mempunyai pengaruh besar terhadap tata ruang di wilayah sekitarnya, kegiatan lain di bidang yang sejenis dan kegiatan di bidang lainnya dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan RTRW Kabupaten Langkat tahun 2013-2023, kawasan strategis di wilayah Kabupaten Langkat adalah :

1. Kawasan Strategis Ekonomi, meliputi ;
  - Kawasan ekonomi terpadu di Kecamatan Stabat.
  - Pelabuhan Laut di Kecamatan Pangkalan Susu dan Kecamatan Tanjung Pura.
  - Kawasan Industri di Kecamatan Pangkalan Susu.
  - Kawasan wisata bahari dan lingkungan hidup di Kecamatan Pangkalan Susu.
2. kawasan Strategis dan Budaya, meliputi ;
  - Masjid azizi, Makan T, Amir Hamzah dan Museum Daerah di Kecamatan Tanjung Pura.
  - Makam Tuan Guru Besilam di Kecamatan Padang Tualang.
  - Kampung Bali di Kecamatan Wampu.
3. Kawasan Strategis Lingkungan, meliputi ;
  - Taman Nasional Gunung Leuser di Kecamatan Batang Serangan, Bahorok dan KutamBaru.
  - Kawasan Rawan Bencana di Kecamatan Bahorok.
  - Pulau Sembilan di Kecamatan Pangkalan Susu.
  - Suaka Marga Satwa Langkat Timur dan Kecamatan Tanjung Pura dan Secanggang.
  - Bahorok – Tangkahan

**C. Wilayah Rawan Bencana**

**1. Kawasan Rawan Tanah Lonsor**

Kawasan rawan bencana tanah longsor berada di bagian tengah memanjang dari Utara ke Selatan Kabupaten Langkat, yaitu di Kecamatan Batang Serangan (Utara), hingga Kecamatan Bohorok (Selatan) . pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi longsor tanah menuju kawasan yang lebih rendah.



2. Kawasan Rawan Banjir

Kawasan rawan bencana banjir berada di sepanjang kawasan pesisir Kabupaten Langkat, yaitu di Kecamatan Babalan, Tanjung Pura, Secanggang, Hinai, Padang Tualang dan Stabat. Pada waktu curah hujan tinggi, sering terjadi banjir terutama disepanjang aliran sungai besar.

D. Kondisi Demografi

1. Laju Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk Langkat tahun 2017 diperkirakan mencapai 1.028.309 jiwa terdiri dari 517.804 jiwa laki – laki dan perempuan sebanyak 510.505 jiwa. Pertumbuhan penduduk terus meningkat setiap tahunnya. Pertumbuhan penduduk Kabupaten Langkat periode 2000-2017, rata-rata hanya 0.8% untuk penduduk laki-laki dan 0.9% untuk penduduk perempuan. Dengan demikian pertumbuhan penduduk perempuan lebih besar dari pertumbuhan penduduk laki-laki. Sedangkan sebaran pertumbuhan penduduk di tingkat Kecamatan, Kecamatan Stabat memiliki rata-rata pertumbuhan penduduk laki-laki tertinggi dengan rata-rata 1,8%/tahun. Sedangkan untuk penduduk perempuan Kecamatan Stabat juga memiliki pertumbuhan tertinggi yaitu 1,95%/tahun. Sebaran pertumbuhan penduduk per-kecamatan disajikan dalam Tabel 2.9 sebagai berikut.

Tabel 2-7  
Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Langkat 2000-2019

KECAMATAN	2000		2010		2019			LAJU PERTUM BUHAN
	LAKI- LAKI	PEREM PUAN	LAKI- LAKI	PEREM PUAN	LAKI- LAKI	PEREM PUAN	Jumlah	PEREM PUAN
Bahorok	21.225	20.561	19.992	19.859	21.486	21.392	42.878	0,615
Serapit	-	-	8.022	7.886	8.623	8.498	17.121	0,617
Salapian	24.859	23.996	13.045	12.879	14.009	13.863	27.872	0,614
Kutambaru	-	-	6.826	6.599	7.324	7.098	14.422	0,614
Sei Bingei	21.912	22.196	24.131	24.215	26.015	26.166	52.181	0,615
Kuala	19.699	20.014	19.513	19.612	20.982	21.137	42.119	0,616
Selesai	28.300	28.002	34.922	34.399	37.591	37.114	74.705	0,614
Binjai	17.394	17.088	21.495	20.830	23.226	22.560	45.786	0,615
Stabat	32.112	32.044	40.609	41.362	43.907	44.827	88.734	0,613
Wampu	18.598	18.081	20.607	20.005	22.129	21.533	43.662	0,615
Btg Serangan	16.516	16.367	17.887	17.132	19.209	18.443	37.652	0,615
Sawit Seberang	12.689	12.297	12.640	12.557	13.578	13.520	27.098	0,616



KECAMATAN	2000		2010		2019			LAJU PERTUM BUHAN
Padang Tualang	21.850	21.420	23.287	23.400	25.004	25.184	50.188	0,613
Hinai	22.936	22.607	24.108	23.735	25.872	25.530	51.402	0,615
Secanggang	30.334	29.780	32.939	32.410	35.380	34.892	70.272	0,614
Tanjung Pura	31.212	30.570	32.524	31.888	34.982	34.379	69.361	0,614
Gebang	21.366	20.258	21.490	21.097	23.056	22.686	45.742	0,616
Babalan	26.333	26.330	28.766	27.690	30.880	29.795	60.675	0,614
Sei Lapan	23.563	23.121	23.861	22.949	25.635	24.713	50.348	0,616
Brandan Barat	9.985	9.597	11.256	10.649	12.112	11.488	23.600	0,614
Besitang	24.019	23.471	22.226	21.732	23.878	23.402	47.280	0,615
Pangkalan Susu	23.528	22.769	20.895	20.617	22.475	22.228	44.703	0,614
Pematang Jaya	-	-	6.635	6.357	7.128	6.846	13.974	0,619
Kab. Langkat	448.430	440.569	487.676	479.859	524.481	517.294	1.041.775	0,615

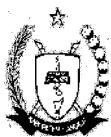
Sumber : Kabupaten Langkat dalam Angka

2. Distribusi Penduduk/Persebaran penduduk

Berdasarkan data, kecamatan terpadat di Kabupaten Langkata adalah Kecamatan Binjai, diikuti oleh Kecamatan Stabat. Sedangkan, kepadatan penduduk rendah ada di Kecamatan Bahorok yang merupakan Kecamatan terluas di Kabupten Langkat.

Tabel 2-8  
Distribusi dan Kepadatan Penduduk Menurut Kecamatan  
di Kabupaten Langkat 2019

KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM <sup>2</sup> )	LAKI- LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM <sup>2</sup> )
Bahorok	1.101,83	21.486	21.392	42.878	39
Serapit	98,5	8.623	8.498	17.121	174
Salapian	221,73	14.009	13.863	27.872	126
Kutambaru	236,84	7.324	7.098	14.422	61
Sei Bingei	333,17	26.015	26.166	52.181	157
Kuala	206,23	20.982	21.137	42.119	204
Selesai	167,73	37.591	37.114	74.705	445
Binjai	42,05	23.226	22.560	45.786	1.089
Stabat	108,85	43.907	44.827	88.734	815
Wampu	194,21	22.129	21.533	43.662	225
Batang Serangan	899,38	19.209	18.443	37.652	42
Sawit Seberang	209,1	13.578	13.520	27.098	130
Padang Tualang	221,14	25.004	25.184	50.188	227



KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM <sup>2</sup> )	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	KEPADATAN PENDUDUK (JIWA/KM <sup>2</sup> )
Hinai	105,26	25.872	25.530	51.402	488
Secanggang	231,19	35.380	34.892	70.272	304
Tanjung Pura	179,61	34.982	34.379	69.361	386
Gebang	178,49	23.056	22.686	45.742	256
Babalan	76,41	30.880	29.795	60.675	794
Sei Lapan	280,68	25.635	24.713	50.348	179
Brandan Barat	89,8	12.112	11.488	23.600	263
Besitang	720,74	23.878	23.402	47.280	66
Pangkalan Susu	151,35	22.475	22.228	44.703	295
Pematang Jaya	209	7.128	6.846	13.974	67
Kab. Langkat	6.263,29	524.481	517.294	1.041.775	166

Sumber : Kabupaten Langkat dalam Angka

3. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan

Penduduk berumur 7-24 tahun di Kabupaten Langkat didominasi oleh penduduk yang masih bersekolah di tingkat SD/sederajat, diikuti oleh penduduk yang sudah tidak bersekolah lagi. Hal ini juga berkaitan dengan piramida penduduk Kabupaten Langkat yang bersifat ekspansif.

Tabel 2-9  
Presentase Penduduk berumur 7-24 Tahun menurut Karakteristik dan Status Pendidikan di Kabupaten Langkat

JENIS KELAMIN	TIDAK/BELUM PERNAH BERSEKOLAH	MASIH BERSEKOLAH			TIDAK BERSEKOLAH LAGI
		SD/ SEDERAJAT	SMP/ SEDERAJAT	SMA/ SEDERAJAT	
Laki-laki	0,32	35,58	16,79	18,01	29,31
Perempuan	0,42	34,55	15,80	20,78	28,44
Jumlah	037	35,08	16,31	19,36	28,88

Sumber : Kabupaten Langkat dalam Angka

4. komposisi Penduduk Menurut Suku

Penduduk Kabupaten Langkat terdiri dari berbagai suku. Berdasarkan hasil SP 2000 penduduk Kabupaten langkat mayoritas bersuku bangsa jawa (56,87 persen), diikuti dengan suku Melayu (14,93 persen), karo (10,22 persen), batak (Tapanuli Utara/Simalungun/Pak Pak) (4,76 persen), Madina (2,54



persen). Sebaran jumlah penduduk menurut suku per kecamatan hasil SP 2000 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2-10  
Sebaran Jumlah Penduduk Suku Berdasarkan Kecamatan  
di Kabupaten Langkat Hasil SP 2010

KECAMATAN	MELAYU	KARO	BATAK	MADINA	NIAS	JAWA	MINANG	CINA	ACEH	LAINNYA
Bahorok	22,8	17,69	1,38	1,36	0,06	53,17	0,26	0,13	0,2	2,94
Salapian	1,08	37,47	1,83	0,74	0,05	56,18	0,23	0,02	0,14	2,32
Sei BIngai	0,32	64,99	1,96	0,42	0,19	28,75	0,54	0	0,37	2,58
Kuala	1,09	30,66	1,4	1,09	0,21	59,4	2	0,72	0,24	3,3
Selesai	12,85	11,47	3,38	2	0,17	66,42	0,51	0,75	0,45	2,08
Binjai	2,98	1,24	1,57	1,61	0,13	82,61	0,87	1,01	0,85	8,19
Stabat	14,25	1,8	3,33	2,6	0,25	67,24	1,38	2,56	0,8	5,87
Wampu	18,66	1,91	2,29	1,68	0,16	72,24	0,24	0,17	0,35	0,37
Bt, Serangan	1,51	17,62	5,94	1,87	0,12	69,72	0,32	0,18	0,4	2,62
Sawit Seberang	1,75	2,59	10,93	1,82	0,06	80,14	0,6	0,08	0,15	1,75
Padang Tualang	11,49	1,97	4,92	3,5	0,05	74,3	0,44	0,07	0,58	2,56
Hinai	22,49	0,72	1,56	1,39	0,19	69,08	0,47	0,12	0,53	3,6
Secanggang	20,06	0,35	0,56	0,92	0,21	63,95	0,25	0,1	0,7	13,05
Tanjung Pura	42,28	1,34	1,59	3,07	0,17	36,49	1,66	3,79	1,24	8,5
Gebang	18,28	2,5	13,28	2,22	0,13	53,37	0,91	0,57	1,74	6,94
Babalan	14,46	2,57	13,76	5,59	0,25	39,41	6,42	2,78	3,01	11,69
Sei Lapan	20,05	5,14	5,67	4,87	0,16	51,6	2,68	0,48	2,59	6,75
Brandan Barat	26,64	1,6	2,81	6,24	0,12	39,46	1,12	0,09	6,55	5,18
Besitang	13,13	4,01	15,44	4,62	0,06	49,77	0,8	0,24	6,55	5,18
Pangkalan Susu	15,4	1,84	4,25	3,87	0,05	39,41	2,66	0,8	20,01	11,68
JUMLAH / TOTAL	14,93	10,22	4,76	2,54	0,16	56,87	1,29	0,88	2,29	6,1

Sumber : Langkat Dalam Angka, 2011

5. Komposisi Penduduk Menurut Agama dan Kepercayaan

Berdasarkan hasil Sensus Penduduk (SP) 2000 dan SP 2010 penduduk Kabupaten Langkat berdasarkan agama yang dianut, terjadi sedikit pergeseran, dimana hasil SP2010 pemeluk Katolik dan Hindu prosentase pemeluknya menurun dibandingkan hasil SP 2000, sedangkan pemeluk agama lainnya relatif meningkat. Prosentase jumlah penduduk berdasarkan agama yang dianut disajikan dalam Tabel 2.11, sedangkan sebaran jumlah



penduduk berdasarkan agama yang dianut menurut agama yang dianut per kecamatan disajikan dalam Tabel 2.12 sebagai berikut :

**Tabel 2-11**  
**Presentase Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut Per Kecamatan**  
**Di Kabupaten Langkat Berdasarkan SP Tahun 2000 dan SP Tahun 2010**

NO	TAHUN SP	ISLAM	KATOLIK	KRISTEN	HINDU	BUDHA	KHONGHU CHU	LAINNYA	JUMLAH
1	2000	90,00	1,06	7,56	0,95	0,95	0,002	0,34	100,00
2	2010	90,58	0,41	7,75	0,79	0,79	0,002	0,42	100,00

Sumber : SP 2000/Langkat Dalam Angka, 2014

**Tabel 2-12**  
**Sebaran Jumlah Penduduk Menurut Agama Uang Dianut Per Kecamatan**  
**Di Kabupaten Langkat Berdasarkan SP Tahun 2010**

KECAMATAN	ISLAM	KATOLIK	KRISTEN	HINDU	BUDHA	KHONG HU CHU	LAINNYA	JUMLAH
Bahorok	34.858	154	4.471	9	60	-	29	39.851
Serapit	14.828	41	1.030	1	7	-	1	15.908
Salapian	21.465	25	4.223	5	144	-	62	25.924
Kutambaru	10.446	4	2.950	-	5	-	20	13.425
Sei Bingei	28.342	1.358	18.376	14	9	2	245	48.346
Kuala	31.156	55	7.190	22	575	-	127	39.125
Selesai	65.217	139	3.550	39	354	-	22	69.321
Binjai	41.223	3	268	10	413	1	407	42.325
Stabat	74.950	250	2.659	93	2.067	8	1.944	81.971
Wampu	39.819	3	611	158	21	-	-	40.612
Batang Serangan	30.830	44	4.087	-	58	-	-	35.019
Sawit Seberang	22.749	126	2.272	-	46	1	3	25.197
Padang Tualang	44.360	21	2.120	-	57	-	129	46.687
Hinai	47.342	23	320	2	156	-	-	47.843
Secanggang	65.225	7	70	-	44	-	3	65.349
Tanjung Pura	61.689	61	590	13	1.599	1	459	64.412
Gebang	37.445	420	4.551	27	141	-	3	42.587
Babalan	48.826	286	6.082	15	1.004	6	247	56.456
Sei Lapan	43.913	254	1.969	-	372	-	302	46.810
Brandan Barat	21.560	14	309	-	18	-	4	21.905





KECAMATAN	ISLAM	KATOLIK	KRISTEN	HINDU	BUDHA	KHONG HU CHU	LAINNYA	JUMLAH
Besitang	37.925	568	5.427	-	20	-	-	43.958
Pangkalan Susu	39.283	123	1.579	1	505	1	20	41.512
Pematang Jaya	12.964	-	27	-	1	-	-	12.992
Kab. langkat	876.405	3.997	75.001	409	7.676	20	4.027	967.535
Presentase	90,58	0,41	7,75	0,04	0,79	0,002	0,42	100,00

Sumber : SP 2000/Langkat Dalam Angka, 2014

### 2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambaran kondisi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Langkat pada bagian ini terdiri dari kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, kesejahteraan sosial, serta seni budaya dan olahraga.

#### 2.1.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, ditunukan terhadap indikator pertumbuhan PDRB, laju implasi provinsi, PDRB per kapita, indeks gini, pemerataan pendapatan versi Bank Dunia, Indeks Ketimpangan Williamson (indeks ketimpangan regional), presentase penduduk diatas garis kemiskinan, angka kriminalitas yang tertangani.

##### 1) Pertumbuhan PDRB

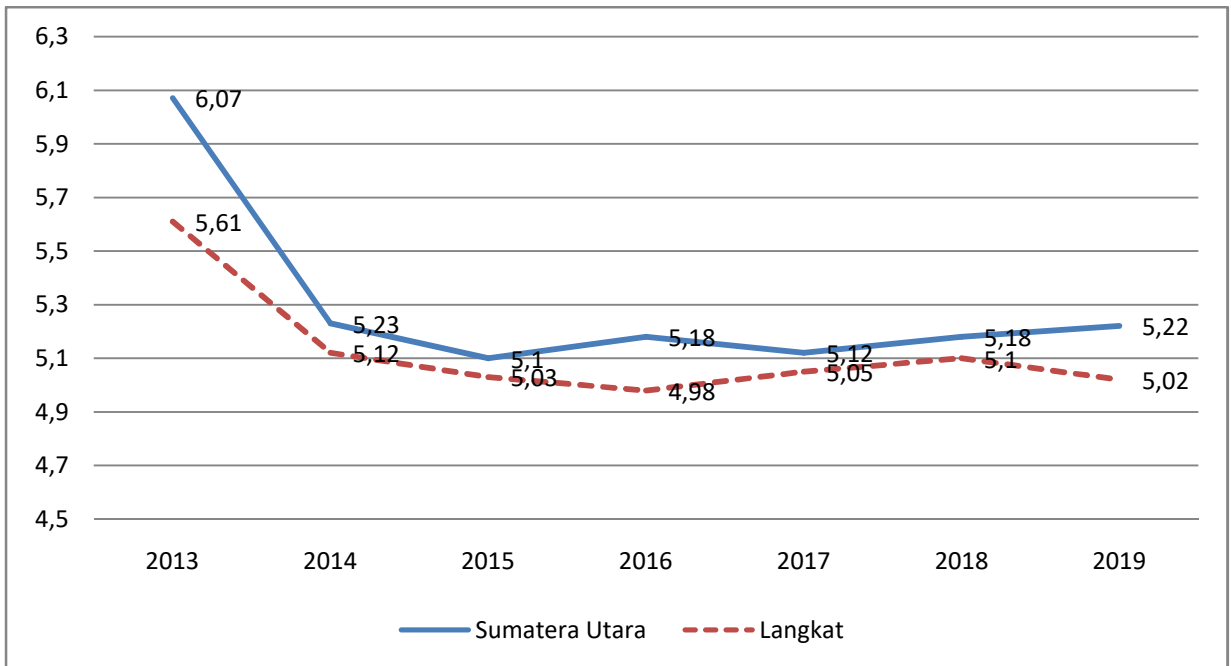
Kondisi ekonomi makro pada suatu daerah dicerminkan pada indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB terdiri atas 2 (dua) jenis penilaian yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan.

Adapun beberapa kegunaan angka PDRB ini antara lain :

- (1) untuk mengetahui tingkat pertumbuhun ekonomi,
- (2) untuk mengetahui struktur perekonomian,
- (3) untuk mengetahui besarnya PDRB Perkapita sebagai indikator tingkat kesejahteraan,
- (4) untuk mengetahui tingkat inflasi/deflasi.

##### 2) Laju Pertumbuhan Ekonomi

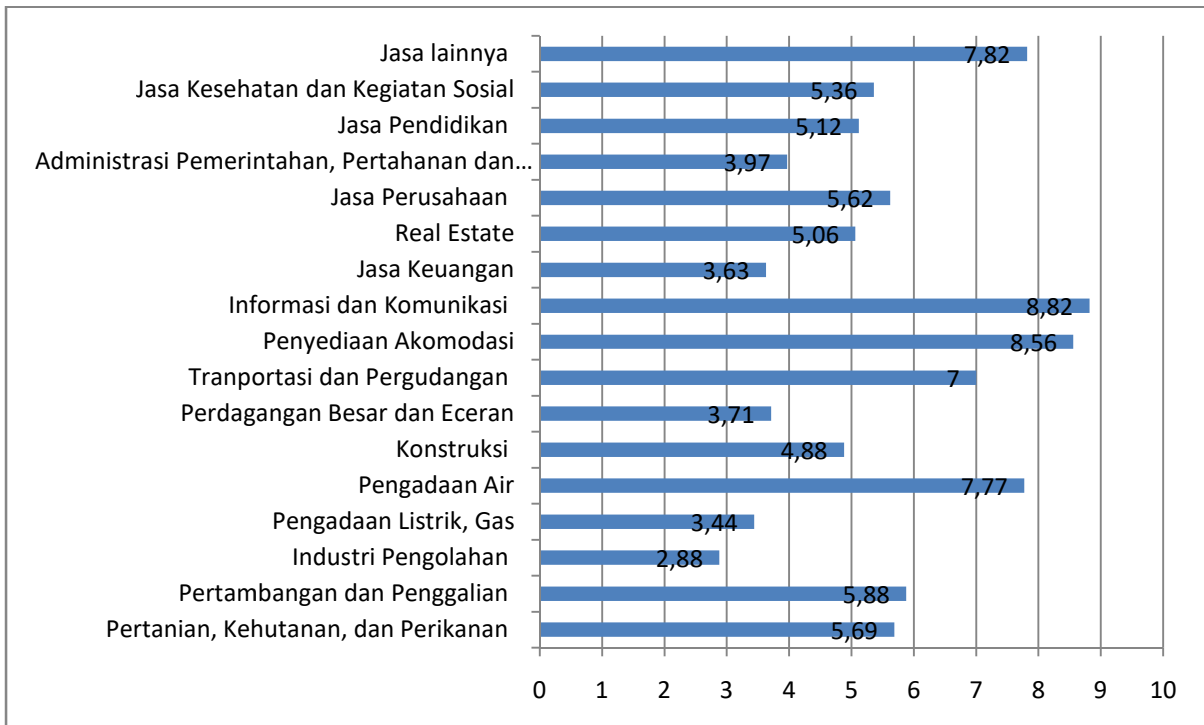
Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Langkat stabil diatas 5 persen tahun 2013 hingga tahun 2019, namun secara umum masih lebih rendah dibandingkan pertumbuhan ekonomi Provinsi sumatara Utara.



**Gambar 2-2**  
**Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Langkat Tahun 2013-2019**  
**Dan Perbandingannya Pada Tingkat Provinsi (%)**

*Sumber : Pengolahan Data BPS Kab. Langkat*

Pada tahun 2019 pertumbuhan ekonomi terjadi pada semua kategori ekonomi, akan tetapi pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor pengadaan informasi dan komunikasi (8,82%), dan penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (8,56%).



**Gambar 2-3**  
**Pertumbuhan Ekonomi Setiap Sektor Pada Tahun 2019**

*Sumber : pengolahan Data BPS Kab. Langkat*



### 3) Struktur PDRB

Pada tahun 2013 – 2018, struktur eonomi Kabupaten Langkatmasih didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; Industri Pengolahan, serta Perdagangan. Berdasarkan PDRB Harga Konstan 2013-2018, rata-rata kontribusi sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan selama 6 (enam) tahun terakhir adalah sebesar 42,69%, sektor Industri Pengolahan sebesar 14,33%, serta sektor perdagangan sebesar 9,89%. kabupaten Langkat memiliki posisi yang cukup strategis terutama karena dilintasi jalan trans Sumatera. Di samping itu, Kabupaten Langkat juga memiliki potensi lahan yang baik untuk pertanian dan perkebunan. Hal tersebut menjadi faktor tingginya kontribusi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan; industri pengolahan, serta perdagangan terhadap PDRB Kabupaten Langkat.

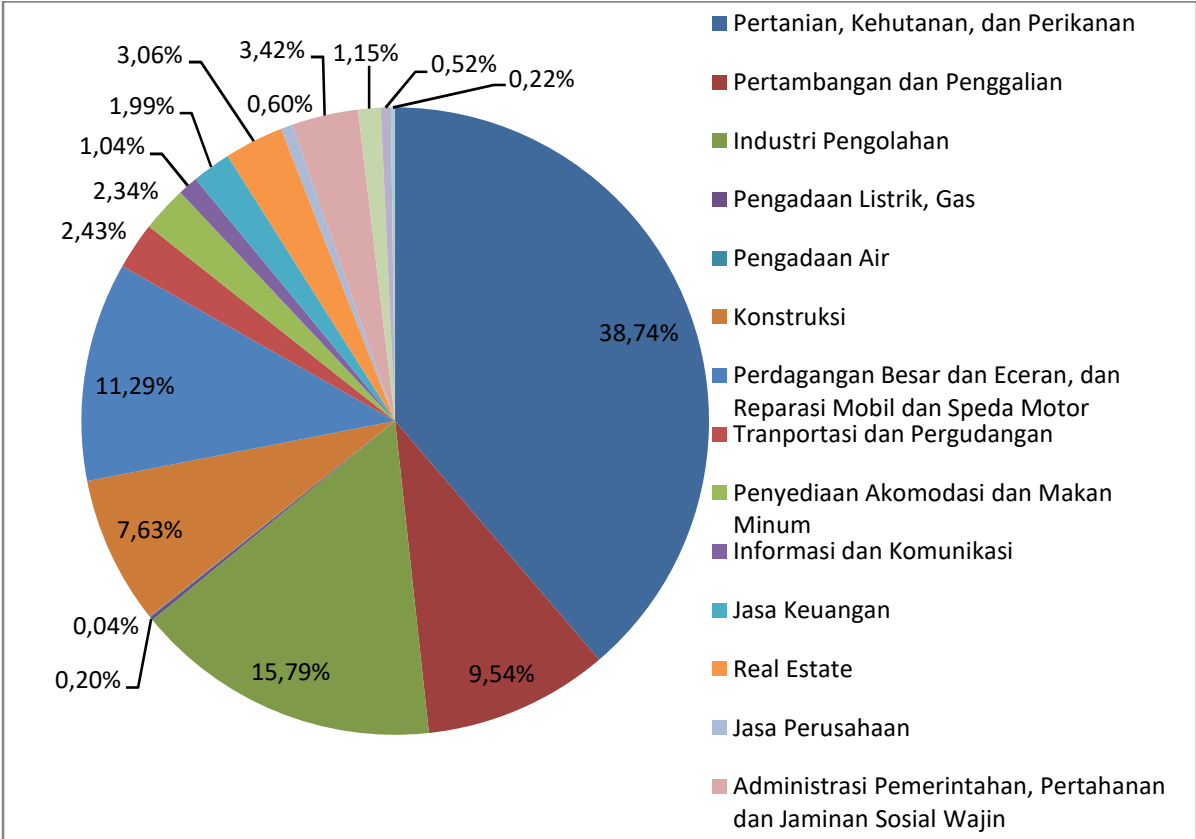
**Tabel 2-13**  
**Nilai Sektor dalam PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Tahun 2015-2019 (dalam miliar Rupiah)**

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.504,66	10.902,07	11.478,95	12.051,57	12.737,61
Pertambangan dan Penggalian	2.351,97	2.473,26	2.627,68	2.768,63	2.931,33
Industri Pengolahan	3.576,43	3.758,40	3.889,66	4.024,17	4.140,11
Pengadaan Listrik, Gas	54,56	57,28	64,41	67,30	69,61
Pengadaan Air	8,91	9,42	10,12	10,87	11,71
Konstruksi	1.747,72	1.867,30	1.967,30	2.077,93	2.179,26
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Speda Motor	2.376,20	2.548,14	2.638,41	2.775,30	2.878,38
Tranportasi dan Pergudangan	488,57	522,32	562,80	600,36	642,40
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	473,95	510,44	551,00	591,04	641,66
Informasi dan Komunikasi	289,19	316,76	347,95	382,68	416,43
Jasa Keuangan	454,72	483,65	502,91	524,35	543,40
Real Estate	657,50	686,83	727,13	773,89	813,08
Jasa Perusahaan	122,67	129,97	137,40	145,60	153,78
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajin	770,42	798,07	816,35	843,71	877,23
Jasa Pendidikan	286,09	301,35	320,04	340,07	357,48
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	114,32	121,15	129,35	137,43	144,80
Jasa lainnya	43,73	47,39	51,13	55,19	59,50
<b>PRODUKSI DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>24.321,61</b>	<b>25.533,80</b>	<b>26.822,59</b>	<b>28.170,09</b>	<b>29.597,77</b>

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka



Pada tahun 2015-2019, secara umum, sektor-sektor ekonomi pada Kabupaten Langkat mengalami pertumbuhan yang positif. Hal tersebut menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi pada Kabupaten Langkat semakin berkembang. Selain itu, apabila ditinjau berdasarkan indikator agregat , nilai PDRB Kabupaten Langkat secara harga berlaku dan konstan, menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya.



Gambar 2-4  
Kontribusi Sektor Terhadap Total PDRB ADHK Kab. Langkat Tahun 2019  
Sumber : pengolahan Data BPS Kab.Langkat

Tabel 2-14  
Nilai Sektor dalam PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2015-2019 (dalam miliar Rupiah)

LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.250,82	13.472,66	14.524,14	15.551,28	16.471,77
Pertambangan dan Penggalian	3.037,46	3.339,60	3.547,69	3.826,74	4.055,45
Industri Pengolahan	4.706,09	5.244,67	6.010,75	6.410,49	6.711,51
Pengadaan Listrik, Gas	61,75	63,29	75,26	80,52	85,40
Pengadaan Air	11,26	11,66	13,05	14,11	15,24
Konstruksi	2.266,26	2.533,47	2.725,86	3.000,67	3.242,94
Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Speda Motor	3.379,70	3.851,63	4.055,49	4.408,86	4.799,03



LAPANGAN USAHA	2015	2016	2017	2018	2019
Transportasi dan Pergudangan	706,14	795,00	866,95	940,86	1.032,35
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	662,53	735,47	833,58	909,10	996,37
Informasi dan Komunikasi	285,82	319,77	355,58	395,92	443,86
Jasa Keuangan	634,29	701,88	756,82	815,60	847,05
Real Estate	895,40	995,64	1.083,03	1.189,55	1.299,59
Jasa Perusahaan	169,93	188,74	209,36	225,38	255,26
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajin	1.116,24	1.236,36	1.310,37	1.371,85	1.454,44
Jasa Pendidikan	350,54	383,75	411,01	446,08	488,62
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	146,19	161,37	175,99	196,04	221,21
Jasa lainnya	61,25	70,01	77,32	84,62	95,10
<b>PRODUKSI DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>30.741,67</b>	<b>34.104,97</b>	<b>37.032,25</b>	<b>39.867,67</b>	<b>42.515,19</b>

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka

**Tabel 2-15**  
**Perkembangan Indikator Agregat PDRB Kabupaten Langkat tahun 2015-2019**

KOMPONEN	2015	2016	2017	2018	2019
PDRB Harga Berlaku (Miliar)	30.741,65	34.104,97	37.032,25	39.867,67	42.515,19
PDRB harga Konstan 2010 (Miliar)	24.321,61	25.533,80	26.822,59	28.170,09	29.597,77
Jumlah Penduduk Kab.Langkat	1.013.385	1.021.208	1.028.309	1.035.411	1.041.775

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka

#### 4) PDRB per Kapita

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Langkat atas Dasar Harga Berlaku selama 5 tahun terakhir (2015 – 2019) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada tahun 2015 nilai PDRB perkapita ADHB Kabupaten Langkat sebesar 30,74 juta rupiah, meningkat menjadi 34,10 juta rupiah di tahun 2016 dan kembali meningkat di tahun 2017 menjadi 30,74 juta rupiah. Pada tahun 2016 nilai PDRB perkapita Kabupaten Langkat telah mencapai 34,10 juta rupiah, meningkat lagi pada tahun 2017 menjadi 37,03 juta dan pada tahun 2019 kembali lagi mengalami peningkatan menjadi 42,52 juta rupiah dengan rata-rata pertumbuhan 6,64 persen.



**Tabel 2-16**  
**Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per kapita Kabupaten Langkat**  
**Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) & Atas Dasar Harga Konstan (ADHK)**  
**Tahun 2015 – 2019**

PDRB per Kapita	2015	2016	2017	2018	2019
<b>ADHB</b>					
- Nilai (juta Rupiah)	30,74	34,10	37,03	39,87	42,52
- Pertumbuhan	10,30%	10,94%	8,58%	7,66%	6,64%
<b>ADHK</b>					
- Nilai (juta Rupiah)	24,32	25,53	26,82	28,17	29,60
- Pertumbuhan	5,01%	4,98%	5,05%	5,02%	5,07%

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

### 5) Inflasi

Inflasi merupakan indikator yang menunjukkan kenaikan barang dan jasa secara umum yang terjadi di suatu wilayah. Inflasi dihitung berdasarkan persentase perubahan angka Indeks Harga Konsumen (IHK) yang merupakan rata-rata perubahan harga dalam suatu periode dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Perkembangan inflasi pada Kabupaten Langkat merujuk pada inflasi di kota Medan. 4 kota inflasi di Sumatera Utara adalah Medan, Padang Sidempuan, Pematang Siantar, dan Sibolga.

**Tabel 2-17**  
**Perkembangan Inflasi Year on Year (YoY) Kabupaten Langkat Tahun 2015 – 2019**

NO	TAHUN/ BULAN	MEDAN	PEMATANG SIANTAR	SIBOLGA	PADANG SIDEMPUAN	SUMUT	NASIONAL
1	2015	3,32	3,36	3,34	1,66	3,24	3,36
2	2016	6,6	4,76	7,39	4,28	6,34	3,02
3	2017	3,1	3,18	3,08	3,82	3,2	3,61
4	2018	0,12	0,38	0,1	0,41	1,23	3,1
5	2019	2,43	1,54	2,58	2,15	2,33	2,7

Sumber : BPS

Inflasi kumulatif tahun 2016 sebesar 6,60 persen, menjadi 3,18 persen pada tahun 2017. Tahun 2017 inflasi kumulatif tertinggi pada kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakat yakni mencapai 6,44 persen.

**Tabel 2-18**  
**Kumulatif Inflasi Menurut Sub Kelompok Pengeluaran**

URAIAN	2015	2016	2017	2018
Bahan Makanan	4,9	15,55	2,59	-3,8
makanan Jadi, Minuman, Rokok, Tembakau	4,9	13,29	2,25	3,73
Perumahan, Air, listrik, dan Bahan Bakar	5,69	2,46	6,44	2,46
Sendang	3,33	2,66	1,12	1,64
Kesehatan	6,23	4,86	1,61	3,23
Pendidikan, Rekreasi, Olah Raga	6,77	5,7	0,41	1,73
Transportasi, Komunikasi & jasa keuangan	2,48	-1,89	2,79	3,59
<b>Inflasi Kumulatif</b>	<b>3,32</b>	<b>6,6</b>	<b>3,18</b>	<b>1,23</b>

Sumber : BPS

#### 6) Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM Kabupaten Langkat pada tahun 2019 adalah 70,76. Angka ini tergolong IPM sedang di Indonesia, namun bila dibandingkan dengan IPM Sumatera Utara, IPM Kabupaten Langkat masih lebih rendah. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Langkat meningkat setiap tahunnya.

**Tabel 2-19**  
**Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1.	IPM Kabupaten Langkat	68,53	69,13	69,82	70,27	70,76
1.1	Angka Harapan hidup	67,63	67,79	67,94	68,22	68,59
1.2	Angka harapan sekolah	12,70	12,71	12,72	12,75	12,81
1.3	Rata-rata lama sekolah	7,92	8,18	8,51	8,52	8,64
1.4	Pengeluaran perkapita disesuaikan (00 Rp)	10.364	10.567	10.782	11.088	11.210
2.	IPM Sumatera Utara	69,51	70,00	70,57	71,18	71,74

Sumber : Kabupaten Langkat dalam Angka dan BPS Sumut

## 7) Kemiskinan

Garis Kemiskinan merupakan salah satu indikator untuk mengukur kemiskinan pada suatu daerah. Penduduk dikatakan miskin apabila penduduk tersebut memiliki rata-rata pengeluaran perbulan dibawah garis kemiskinan. Pada tahun 2015 hingga 2019, garis kemiskinan pada Kabupaten Langkat terus mengalami peningkatan. Jumlah penduduk miskin meningkat selama tahun 2015-2016, dan menurun pada tahun 2017 hingga Tahun 2019.

**Tabel 2-20**  
**Data Kemiskinan Kabupaten Langkat Tahun 2015-2019**

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk miskin (000)	114,19	115,79	144,14	105,46	103,08
2	Presentase penduduk miskin	11,30	11,36	11,15	10,20	9,91
3	Garis kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	304,025	384,205	364,517	382.536	
4	Indeks kedalaman kemiskinan	1,70	1,78	1,67	1,68	
5	Indeks keparahan kemiskinan	0,42	0,41	0,39	0,41	

Sumber : BPS

### 2.1.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kinerja atas kesejahteraan sosial dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka partisipasi murni, dan angka usia harapan hidup.

#### 1) Pendidikan

##### a) Angka Melek Huruf

Angka Melek Huruf didefinisikan sebagai proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki kemampuan membaca dan menulis kalimat sederhana dalam huruf latin, huruf arab, dan huruf lainnya (seperti huruf jawa, kanji, dll) terhadap penduduk usia 15 tahun keatas . pada tahun 2017, angka melek huruf Kabupaten Langkat mencapai 99,28. Hal ini menunjukkan bahwa hampir di seluruh masyarakat Kabupaten Langkat memiliki kemampuan membaca.



**Tabel 2-21**  
**Perkembangan Angka Melek Huruf Kabupaten Langkat Tahun 2015-2019**

Uraian	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Melek Huruf	98,75	98,93	99,28	99,28	99,28

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

**b) Angka Rata-Rata Lama Sekolah**

Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Rata-rata lama sekolah (RLS) Kabupaten Langkat pada tahun 2019 adalah 8,51 tahun. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Langkat memiliki kecenderungan meningkat setiap tahunnya pada sejak tahun 2015 sampai dengan Tahun 2019 yang menunjukkan kecenderungan yang positif.

**Tabel 2-22**  
**Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Langkat 2015-2019**

Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
Angka rata-rata lama sekolah	7,92	12,71	8,51	8,52	8,51

Sumber : BPS kab. Langkat

**c) Angka Partisipasi Kasar (APK)**

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK kabupaten langkat untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2015 sebesar 112,36 dan menjadi 85,24 pada tahun 2019. Pada jenjang pendidikan SMP, pada tahun 2015 sebesar 99,04 dan menjadi 71,68 pada tahun 2019. APK SD dan SMP sama-sama mengalami penurunan pada tahun 2019.

**Tabel 2-23**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2015–2019**

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A	112,36	112,93	111,41	110,43	85,24
Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTS/Paket B	99,04	88,48	92,8	106,99	71,68

*Sumber BPS Kab. Langkat*

**d) Angka partisipasi Murni (APM)**

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM Kabupaten Langkat untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2015 sebesar 94,22 dan menjadi 81,09 pada tahun 2019. Pada jenjang pendidikan SMP, pada tahun 2015 sebesar 78,05 dan menjadi 59,14 pada tahun 2019. Nilai APM untuk kedua jenjang ini mengalami penurunan pada tahun 2019.

**Tabel 2-24**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015-2019**

URAIAN	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,22	94,24	97,28	98,32	81,09
Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78,05	74,81	77,4	78,61	59,14

*Sumber : BPS Kabupaten Langkat*

**e) Angka Partisipasi Sekolah (APS)**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APS di tingkat SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B semakin meningkat di setiap tahunnya dari tahun 2015 ke tahun 2019. Namun, angka partisipasi kasar tersebut belum mencapai 100% khususnya pada tingkat SMP/MTs/Paket B

**Tabel 2-25**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015-2019**

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	82,1	90,5	95,12	96,72	96,72
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	68,02	70,03	75,11	76,15	76,8

*Sumber : BPS Kabupaten Langkat*

**f) Angka Lulusan Tiap Jenjang Pendidikan**

Tingkat kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Langkat memiliki angka yang baik. Kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTS mencapai 100% dan tidak mengalami penurunan dari tahun 2015-2019.

**Tabel 2-26**  
**Perkembang Angka Kelulusan Kabupaten Langkat 2015-2019**

URAIAN	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI	100	100	100	100	100
SMP/MTS	100	100	100	100	100

*Sumber : BPS Kabupaten Langkat*

**2) Kesehatan**

**a) Prevalensi Balita Gizi Kurang**

Prevalensi Balita Gizi Kurang Kabupaten Langkat adalah jumlah balita gizi kurang dibagi jumlah seluruh balita di Kabupaten Langkat. Terjadi penurunan balita gizi kurang selama tahun 2014-2016. Akan tetapi, pada tahun 2017, terjadi kenaikan persentase mencapai 0,35%.

**Tabel 2-27**  
**Prevalensi Balita Gizi Buruk Kabupaten Langkat 2015-2019**

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Balita Gizi Buruk	0,23%	0,14%	0,35%	n/a	n/a

*Sumber : SIPD, 2019*

**b) Cakupan Desa Siaga Aktif**

Cakupan Desa Siaga Aktif adalah desa yang mempunyai Pos Kesehatan Desa UKBM lainnya yang buka setiap hari dan berfungsi sebagai pemberi pelayanan kesehatan dasar, penanggulangan bencana dan kegawatdaruratan, pengawasan berbasis masyarakat yang meliputi pemantauan pertumbuhan (gizi), penyakit, lingkungan dan perilaku sehingga masyarakatnya menerapkan Perilaku Hidup. Di Kabupaten Langkat, cakupan desa siaga sudah mencapai 277 dari 277 desa pada tahun 2016-2017.

**Tabel 2-28**  
**Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten Langkat 2015-2019**

INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
Cakupan Desa Siaga Aktif	n/a	100%	100%	100%	47,29%

Sumber : SIPD, 2019

**3) Kemiskinan**

Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun biaya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global, sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan kooperatif, sementara yang lainnya hanya melihatnya dari segi moral dan evaluatif. Dan yang lainnya lagi memahaminya dari segi ilmiah yang telah mapan. Perkembangan kondisi kemiskinan Kabupaten Langkat menurut data dari BPS dapat dilihat dalam tabel berikut :

**Tabel 2-29**  
**Indikator kemiskinan Kabupaten Langkat Tahun 2015-2019**

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah penduduk miskin (000)	114,19	115,79	144,14	105,46	103,08
2	Presentase penduduk miskin	11,30	11,36	11,15	10,20	9,91
3	Garis kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)	304,025	384,205	364,517	382.536	n/a
4	Indeks kedalaman kemiskinan	1,70	1,78	1,67	1,68	n/a
5	Indeks keparahan kemiskinan	0,42	0,41	0,39	0,41	n/a

Sumber : BPS Kab Langkat, 2019

#### 4) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK pada Kabupaten Langkat cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015 – 2019, meskipun terjadi fluktuasi pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan semakin meningkatnya proporsi angkatan kerja. Tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Langkat meningkat pada tahun 2015 – 2019.

**Tabel 2-30**  
**Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat 2015-2019**

NO	INDIKATOR	2015	2016	2017	2018	2019
1	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,78	5,98	5,50	5,30	5,30

Sumber : BPS Kab Langkat

#### 2.1.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

##### 1) Kebudayaan

Kabupaten Langkat terbentuk dari bekas kesultanan Melayu Langkat. Pada zaman Pemerintahan Belanda, mulai dilakukan pembukaan perkebunan-perkebunan besar di Wilayah Langkat. Pembukaan perkebunan tersebut sekaligus juga membuka Wilayah Langkat terhadap masuknya berbagai etnis/suku lain di Indonesia. Masuknya etnis lain tersebut terutama etnis Jawa dibutuhkan sebagai tenaga kerja di sektor perkebunan besar, selain itu masuk juga etnis Banjar dan etnis-etnis lainnya.

Kedatangan etnis-etnis diluar etnis Melayu tersebut juga membawa kebudayaan dan Kesenian dari masing-masing daerah asalnya. Untuk mewadahi pengembangan adat dan budaya tersebut telah terbentuk organisasi-organisasi yang ada pada awalnya untuk melestarikan adat dan budaya dari masing-masing etnis yang ada. Organisasi tersebut adalah Majelis Adat Budaya Melayu Indonesia (MABMI) Langkat untuk etnis Melayu, Pujakesuma untuk etnis Jawa, Marga Silima untuk etnis Karo, Hikma untuk etnis Mandailing dan Tapanuli Selatan dan lain-lain.

Di Kabupaten Langkat juga terdapat kelompok masyarakat Bali. Kampung Bali yang dihuni sekitar 60KK ini hidup dalam tatanan adat dan agama Hindu Bali yang begitu kental. Pada waktu-waktu tertentu, kita menyaksikan kegiatan keagamaan yang disebut Purnama Tilem dan Hararwati. Sebagai penganut Hindu yang taat,



setiap tahun juga mereka melakukan upacara hari Raya Nyepi dan peringatan Tahun Baru Saka.

Kesenian-kesenian yang ada hanya dipentaskan pada saat-saat ada upacara pesta pernikahan atau pesta-pesta keluarga lainnya. Agenda resmi kebudayaan yang dilaksanakan secara rutin belum ada. Perkembangan jumlah kegiatan seni dan kebudayaan, sarana dan penyelenggaraan seni dan budaya, presentase benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan, dan jumlah kelompok/grup dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut.

**Tabel 2-31**  
**Perkembangan Seni dan Budaya Tahun 2017 – 2019**

NO	URAIAN	2017	2018	2019
1	Jumlah Kegiatan seni dan Kebudayaan	2 Kali	4 Kali	1 kali
2	Sarana dan Penyelenggaraan Seni dan Budaya	3 Unit	n/a	n/a
3	Presentase Benda, situs dan Kawasan Cagar Alam Budaya yang Dilestarikan	0	n/a	n/a
4	Jumlah Kelompok/Grup Kesenian	17 Grup	n/a	n/a

Sumber : SIPD

## 2) Pemuda dan Olahraga

Pemuda dan Olahraga di Kabupaten Langkat ditangani oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Namun olahraga baru sebatas sebagai hobi, belum mengarah pada prestasi. Fasilitas olahraga yang berupa lapangan sepak bola, tersebar di seluruh Kecamatan, sedangkan untuk fasilitas cabang olahraga lainnya biasanya diadakan oleh masing-masing penduduk yang memiliki hobi olahraga tersebut. Kegiatan rutin olahraga yang ada adalah adanya Turnamen sepak Bola Pelajar Piala Bupati Langkat, yang diadakan secara rutin setiap tahun. Sedangkan untuk cabang olahraga lain belum ada agenda resmi. Perkembangan sarana dan prasarana lapangan olahraga dan sebaran jumlah sarana/fasilitas olahraga di Kabupaten Langkat berdasarkan kecamatan disajikan dalam tabel berikut .

**Tabel 2-32**  
**Perkembangan Indikator Urusan Wajib Pemuda dan Olahraga**  
**Kabupaten Langkat Tahun 2017-2019**

NO	INDIKATOR	2017	2018	2019
1	Jumlah Organisasi Pemuda	60	62	62
2	Prestasi Olahraga di Tingkat Provinsi	68 cabang OR	89	83
3	Prestasi Olahraga di Tingkat Nasional	17 cabang OR	13	15
4	Prestasi Olahraga di Tingkat Internasional	1	1	0
5	Jumlah Organisasi Olahraga	26	55	62
6	Jumlah Lapangan Olahraga	382	407	427
7	Jumlah Kegiatan Kepemudaan	5	5	8

*Sumber : Dinas Pemuda dan Olah Raga Kab. Langkat*

### 2.1.3 Aspek Pelayanan Umum

#### 2.1.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib

**Urusan Pemerintahan Wajib berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

##### 1) Pendidikan

###### a) Pendidikan Anak Usia Dini

Penyelenggaraan PAUD Jalur Pendidikan Formal di Kabupaten Langkat Berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK) / Raudhatul Aftal (RA) dan bentuk lain yang sederajat, menggunakan program untuk anak usia 4 – ≤6 tahun. Jumlah sekolah, guru, dan murid pada jenjang pendidikan anak usia dini semakin meningkat dari tahun 2015 – 2019 di Kabupaten Langkat.

**Tabel 2-33**  
**Jumlah Sekolah, Guru dan Murid Jenjang Taman Kanak – kanak**  
**di Kabupaten Langkat 2015 – 2019**

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Sekolah	138	138	175	189	204
Jumlah Guru	460	460	630	510	657
Jumlah Murid	4.214	4.214	4.930	5.538	5.762

*Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka*

###### b) Angka Partisipasi Sekolah

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah proporsi penduduk pada kelompok umur jenjang pendidikan tertentu yang masih bersekolah terhadap penduduk pada kelompok umur tersebut. APS di tingkat SD/MI/Paket A dan

SMP/MTs/Paket B semakin meningkat di setiap tahunnya dari tahun 2015 ke tahun 2019. Namun, angka partisipasi sekolah tersebut belum mencapai 100% terutama pada tingkat SMP/MTs/Paket B yang masih rendah.

**Tabel 2-34**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Tahun 2015 – 2019**

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka Partisipasi Sekolah (APS)	82,10	90,50	95,12	96,72	96,72
Jumlah Guru	68,02	70,03	75,11	76,15	76,80

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

c) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) adalah perbandingan penduduk usia antara 7 hingga 18 tahun yang terdaftar sekolah pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun. Angka Partisipasi Murni (APM) adalah presentase siswa dengan usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikannya dari jumlah penduduk di usia yang sama. APM Kabupaten Langkat untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2015 sebesar 94,22% dan meningkat menjadi 98,32% pada tahun 2018, tetapi terjadi penurunan pada Tahun 2019 yaitu menjadi 81,90%. Pada jenjang pendidikan SMP, pada tahun 2015 sebesar 78,05% dan turun menjadi 74,81% pada tahun 2016 kemudian meningkat pada tahun 2017 dan 2018, dan di Tahun 2019 terjadi penurunan lagi menjadi 59,14.

**Tabel 2-35**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Murni (APM) Tahun 2015-2019**

URAIAN	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	94,22	94,24	97,28	98,32	81,09
Angka partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	78,05	74,81	77,4	78,61	59,14

Sumber : BPS Kabupaten Langkat dan Provinsi Sumatera Utara, 2019

d) Angka Partisipasi Kasar (APK)

APK adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SD/SLTP/SLTA dibagi dengan jumlah penduduk berusia 7 hingga 18 tahun



atau rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK kabupaten langkat untuk jenjang pendidikan SD pada tahun 2015 sebesar 112,36 dan menjadi 85,24 pada tahun 2019. Pada jenjang pendidikan SMP, pada tahun 2015 sebesar 99,04 dan menjadi 71,68 pada tahun 2019. APK SD dan SMP sama-sama mengalami penurunan pada tahun 2019.

**Tabel 2-36**  
**Perkembangan Angka Partisipasi Kasar (APK) Tahun 2015-2019**

URAIAN	Tahun				
	2015	2016	2017	2018	2019
Angka partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	112,36	112,93	111,41	110,43	85,24
Angka partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	99,04	88,48	92,8	106,99	71,68

Sumber : BPS 2019

e) Angka Putus Sekolah

Angka Putus Sekolah dari Tahun 2019 di Kabupaten Langkat mengalami penurunan bila dibanding Tahun 2018. Angka putus sekolah baik untuk jenjang pendidikan SD/MI maupun SMP/MTs masih berada diatas 1% pada tahun 2019.

**Tabel 2-37**  
**Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Langkat 2015 – 2019**

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
APS SD/MI dan SMP/MTS	n/a	n/a	n/a	1,02	1,01

Sumber : SIPD, 2019

f) Angka kelulusan

Tingkat kelulusan Siswa SD/MI dan SMP/MTS di Kabupaten Langkat memiliki angka yang baik. Kelulusan siswa SD/MI dan SMP/MTS mencapai 100% dan tidak mengalami penurunan dari tahun 2014 – 2019

**Tabel 2-38**  
**Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Langkat 2015–2019**

URAIAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
SD/MI	100	100	100	100	100
SMP/MTS	100	100	100	100	100

Sumber : SIPD

g) Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah

Rasio Ketersediaan Sekolah dapat menunjukkan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia pendidikan. Rasio ketersediaan sekolah ini dihitung untuk setiap 10.000 penduduk. Selama kurun waktu 2015-2019 rasio ketersediaan sekolah untuk jenjang pendidikan dasar mengalami kenaikan yang cukup baik. Pada tahun 2017 rasio ketersediaan sekolah mencapai 55,06 sekolah per 10.000 penduduk, meningkat dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 49,97 sekolah per 10.000 penduduk.

**Tabel 2-39**  
**Rasio Ketersediaan Sekolah Kabupaten Langkat Tahun 2015- 2019**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio Ketersediaan sekolah/ Penduduk usia sekolah pendidikan dasar	49,06	49,97	55,06	n/a	n/a
2	Rasio Ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	32,39	33,18	-	n/a	n/a

Sumber : SIPD

h) Rasio Guru Terhadap Murid

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 1.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Pada rentang tahun 2013-2017 jumlah guru pendidikan dasar fluktuatif cenderung terus mengalami penurunan, begitu pula dengan jumlah muridnya. Namun demikian, persentase penurunan jumlah guru masih lebih tinggi dibandingkan dengan penurunan jumlah muridnya.

**Tabel 2-40**  
**Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid kabupaten Langkat Tahun 2015-2019**

No	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rasio guru / Murid sekolah pendidikan dasar	15,07	15,05	15,52	16,51	15,36

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka

## 2) Kesehatan

Berikut merupakan indikator – indikator kesehatan dan nilainya di Kabupaten Langkat. Terdapat kecenderungan angka kematian bayi dan angka kematian balita yang menurun, namun terjadi fluktuasi pada angka kematian ibu. Cakupan balita gizi buruk yang mendapat perawatan pada tahun 2019 sudah mencapai 100%.

**Tabel 2-41**  
**Capaian Kinerja Urusan Kesehatan Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019**

No	INDIKATOR	SATUAN	TAHUN				
			2015	2016	2017	2018	2019
1	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 KH (Kelahiran Hidup)	Angka	3	3	1	2	2
2	Angka Kematian Balita	Angka	3	3	0	n/a	n/a
3	Angka kematian ibu (AKI) per 100.000 KH (Kelahiran Hidup)	Angka	13	13	7	38	13
4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi	Angka	n/a	n/a	18,971	19,372	20343
5	Jumlah Puskesmas terakreditasi	unit	n/a	n/a	n/a	3	30
6	Jumlah Rumah Sakit terakreditasi	unit	n/a	n/a	n/a		1
7	Jumlah Dokter	Orang	138	161	138	172	121
8	Cakupan Balita gizi buruk mendapat perawatan	%	n/a	n/a	n/a	85%	100%
9	Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita Penyakit TBC BTA	%	n/a	n/a	n/a	1.011	1477
10	Cakupan Penemuan dan Penanganan penderita Penyakit DBD	%	n/a	n/a	n/a	616	544
11	Persentase Puskesmas yang akreditasi	%	n/a	n/a	n/a	10	100
12	Persentase Rumah Sakit yang ter Akreditasi	%	n/a	n/a	n/a	n/a	100
13	Persentase Posyandu Aktif	%	n/a	n/a	n/a	87%	95%
14	Persentase penduduk yang memiliki JKN/BPJS	%	n/a	n/a	n/a	70,23	80,95

Sumber : SIPD

3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

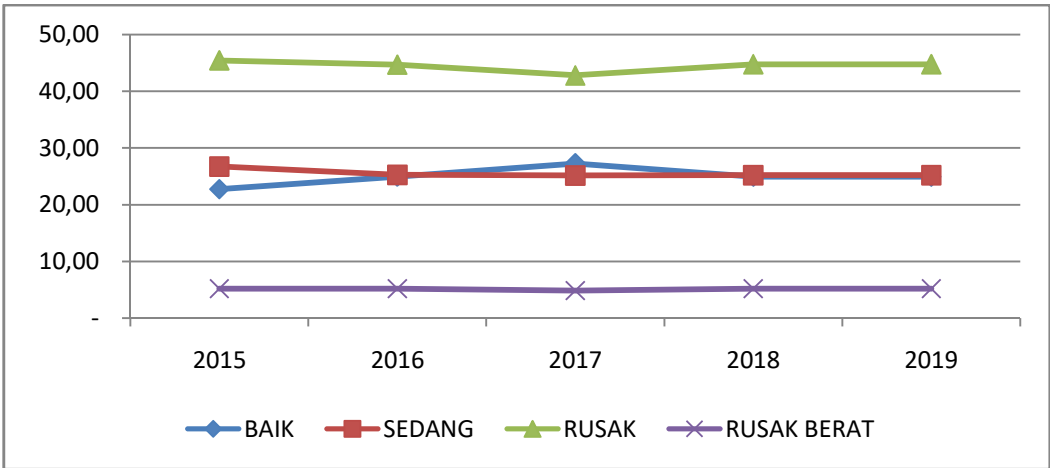
Total panjang jalan kabupaten di Kabupaten Langkat pada tahun 2019 adalah sepanjang 1.561,30 km. Panjang jalan kabupaten Langkat sampai tahun 2017 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun tidak mengalami peningkatan sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2019. Kondisi jalan pada tahun 2019 juga tidak mengalami perubahan bila dibanding dengan tahun 2018. Panjang jalan Kabupaten dengan kondisi mantap (kondisi baik dan sedang) di Kabupaten Langkat memiliki proporsi sebesar 50,10%.

Tabel 2-42  
Kondisi Jalan Kabupaten Langkat Tahun 2015-2019

NO	Tahun	KONDISI JALAN (KM)								TOTAL
		BAIK		SEDANG		RUSAK		RUSAK BERAT		
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	Km
1	2019	388,85	24,91	393,44	25,20	698,35	44,73	80,67	5,17	1561,31
2	2018	388,85	24,91	393,44	25,20	698,35	44,73	80,67	5,17	1561,31
3	2017	425,62	27,26	392,16	25,12	667,91	42,78	75,61	4,84	1561,30
4	2016	388,85	24,94	393,42	25,23	696,36	44,66	80,67	5,17	1559,30
5	2015	354,49	22,71	416,91	26,70	709,20	45,42	80,67	5,17	1561,27

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka

Proporsi kondisi jalan kabupaten dari tahun 2015-2019 dengan kondisi baik di Kabupaten Langkat memiliki peningkatan tahun 2015 – 2017. Namun, kondisi jalan rusak masih memiliki proporsi di atas 40% dari tahun 2015-2019. Keadaan Infrastruktur jalan di Kabupaten Langkat masih memerlukan perhatian karena berkaitan dengan aksesibilitas wilayah.



Gambar 2-5  
Grafik Proporsi Kondisi Jalan Kabupaten Tahun 2015-2019  
Sumber : Kabupaten langkat dalam Angka



Aksesibilitas wilayah di Kabupaten Langkat dapat dilihat juga melalui kondisi jaringan jalan berdasarkan kecamatan. Kecamatan Brandan Barat merupakan kecamatan dengan memiliki panjang jalan kabupaten terendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Sementara itu, dilihat dari kondisinya kecamatan yang memiliki panjang jalan dengan kondisi baik tertinggi adalah Kecamatan Stabat (42,94 km) dan proporsi kondisi jalan baik tertinggi adalah Kecamatan Hinai (47,19%). Sedangkan kecamatan dengan panjang jalan dengan kondisi rusak berat tertinggi adalah Kecamatan Secanggang (29,75 km) dan proporsi kondisi jalan rusak berat tertinggi adalah Kecamatan Sirapit (27,38%).

Tabel 2-43  
Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Menurut Kecamatan Tahun 2019  
Kabupaten Langkat

NO	KECAMATAN	KONDISI JALAN (KM)								TOTAL
		BAIK		SEDANG		RUSAK		RUSAK BERAT		
		Km	%	Km	%	Km	%	Km	%	
1	Bahorok	12,7	17,21	27,45	37,20	33,64	45,59	0	-	73,79
2	Sirapit	12,88	38,21	4,7	13,94	6,9	20,47	9,23	27,38	33,71
3	Salapian	20,05	30,56	13,7	20,88	31,35	47,79	0,5	0,76	65,6
4	Kutambaru	16,1	22,07	16,8	23,03	21,25	29,13	18,8	25,77	72,95
5	Sei Bingai	27,8	24,13	19,32	16,77	38,35	33,28	29,75	25,82	115,22
6	Kuala	27,63	41,78	14,9	22,53	21,5	32,51	2,1	3,18	66,13
7	Selesai	14,15	16,65	35,6	41,88	29,65	34,88	5,6	6,59	85
8	Binjai	19,43	44,34	5,89	13,44	18,5	42,22	0	-	43,82
9	Stabat	42,94	30,53	49,45	35,16	44,45	31,61	3,8	2,70	140,64
10	Wampu	12,4	25,29	10,05	20,50	26,58	54,21	0	-	49,03
11	Batang Serangan	8,8	11,37	20,1	25,98	48,47	62,65	0	-	77,37
12	Sawit Sebrang	4,3	7,41	16,2	27,93	34,5	59,48	3	5,17	58
13	Padang Tualang	10,2	24,66	8,7	21,03	21,43	51,80	1,04	2,51	41,37
14	Hinai	32,29	47,19	14,2	20,75	21,93	32,05	0	-	68,42
15	Secanggang	40,08	33,89	28,6	24,18	49,59	41,93	0	-	118,27
16	Tanjung Pura	9,35	16,58	18,18	32,25	28,85	51,17	0	-	56,38
17	Gebang	18,9	27,75	10,3	15,12	37,67	55,30	1,25	1,83	68,12
18	Babalan	19,2	27,36	16,65	23,73	34,32	48,91	0	-	70,17
19	Sei Lapan	8,7	17,10	15,2	29,87	23,88	46,93	3,1	6,09	50,88
20	Brandan Barat	3,9	21,67	2,22	12,33	11,88	66,00	0	-	18
21	Besitang	17,25	20,80	23,5	28,34	39,67	47,84	2,5	3,01	82,92
22	Pangkalan Susu	4,9	12,23	10,63	26,54	24,53	61,23	0	-	40,06
23	Pematang Jaya	4,9	7,49	11,1	16,96	49,46	75,56	0	-	65,46
Jumlah		388,85		393,44		698,35		80,67		1.561,31

Sumber : Kabupaten Langkat dalam Angka



Di Wilayah Kabupaten Langkat terdapat 26 aliran sungai besar dan kecil, 4 sungai besar diantaranya yaitu : Sungai Wampu, Sungai Batang Serangan, Sungai Lengan dan Sungai Besitang. Secara umum sungai-sungai tersebut dimanfaatkan untuk pengairan, perhubungan dan lain-lain. Pemanfaatan sungai-sungai tersebut untuk irigasi pertanian, telah ditetapkan daerah irigasi sebanyak 34 unit dengan luas baku 12.882 ha. Dari luas lahan baku sawah daerah irigasi tersebut yang telah efektif menjadi lahan sawah beririgasi teknis seluas 8.370 Ha (Dinas Pertanian Kabupaten Langkat Tahun 2014), atau 64,97% dari total luas lahan area baku daerah Irigasi.

Salah satu waduk terpenting adalah bendungan irigasi di hulu Sungai Wampu yang membentuk Daerah Irigasi Namu Sira-sira di Kecamatan Sei Bingai. Daerah Irigasi ini dibagi dua yakni daerah irigasi Namu Sira-sira Kiri dan daerah irigasi Namu Sira-sira Kanan. Daerah irigasi Namu Sira-sira kiri dengan total luas lahan + 1.706 Ha. Di wilayah Kabupaten Langkat yang meliputi dua kecamatan, yakni Kecamatan Kuala dan Selesai. Sedangkan Daerah Irigasi Namu Sira-sira kanan dengan total luas lahan pertanian sawah + 3.226 Ha, yang meliputi kecamatan Sei Bingai Kabupaten Langkat dan Kecamatan Binjai Selatan Kota Binjai

Tabel 2-44  
Daerah Irigasi di Wilayah Kabupaten Langkat tahun 2019

NO	DAERAH IRIGASI	KEWENANGAN	LUAS AREA BAKU (HA)
1	Alur Gadung	Kabupaten	60
2	Alur Lux	Kabupaten	65
3	Bengarau	Kabupaten	768
4	Bengkel	Kabupaten	80
5	Bukit Tinggi	Kabupaten	75
6	Gung Tinggi	Kabupaten	115
7	Kerpei	Kabupaten	60
8	Kp. Mandailing	Kabupaten	60
9	Kuta Pinang	Kabupaten	60
10	Lr. Pembangunan	Kabupaten	300
11	Mambang Kuning	Kabupaten	80
12	Mancang	Kabupaten	75
13	Namu Mbelin	Kabupaten	105
14	Padang Brahrang	Kabupaten	150
15	Palu Pakeh	Kabupaten	709
16	Parit Binndu	Kabupaten	300
17	Pekan Sawah	Kabupaten	105



NO	DAERAH IRIGASI	KEWENANGAN	LUAS AREA BAKU (HA)
18	Perhiasan	Kabupaten	100
19	Sidomukti	Kabupaten	120
20	Simpang Telu	Kabupaten	30
21	Sisira	Kabupaten	75
22	Suka Berbakti	Kabupaten	122
23	Tanjung Keriahan	Kabupaten	313
24	Timbang Lawan	Kabupaten	752
25	Tungkam Jaya	Kabupaten	80
26	Tungkam Sakti	Kabupaten	75
27	Ujung Teran	Kabupaten	130
28	Besadi	Kabupaten	25
29	Paya Tampak	Kabupaten	35
30	Sematar	Kabupaten	40
31	Sidomulio	Kabupaten	45
32	Telaga	Kabupaten	55
33	Secanggang	Provinsi	1.400
34	Namu Sira-sira	Pusat	6.300
JUMLAH			12.882

Sumber : SIPD

Produksi air minum di Kabupaten Langkat dikelola oleh PDAM Tirta Wampu. Berdasarkan sumber airnya, produksi air minum di PDAM Tirta Wampu adalah air permukaan, air bawah tanah, dan gravitasi. Produksi air minum dengan sumber air dari air permukaan memiliki produksi yang tertinggi setiap tahunnya. Dibandingkan dengan tahun 2015 produksi air minum tahun 2019 mengalami peningkatan.

Tabel 2-45  
Produksi Air Minum Menurut Sumber Air Yang Dipakai

NO	Sumber Air	Produksi Air Minum (m³)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Air Permukaan (APU)	6.717.890	7.554.490	6.563.014	4.087.854	6.954.391
2	Danau	-	-	-	-	-
3	Waduk	-	-	-	-	-
4	Air Bawah Tanah	801.076	-	795.367	1.232.474	968.525
5	Gravitasi	122.726	-	118.648	-	-
6	Lainnya	-	-	-	144.540	157.680
Jumlah		7.641.692	7.554.490	7.477.029	5.464.868	8.080.596

Sumber : Kabupaten langkat Dalam Angka

Jumlah pelanggaran PDAM Tirta Wampu semakin meningkat dari tahun 2015–2019. Peningkatan terbesar berada pada pelanggan dengan kategori rumah tempat tinggal. Pada tahun 2019, jumlah air minum yang disalurkan tertinggi diperoleh dari pelanggan dengan kategori rumah tempat tinggal, niaga dan instansi pemerintah.

**Tabel 2-46**  
**Banyaknya Pelanggan Saluran Air Minum PDAM Tirta Wampu**

NO	KATEGORI PELANGGAN	JUMLAH PELANGGAN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Rumah Tempat Tinggal	14.063	14.524	15.275	16.211	16.463
2	Sosial	183	180	191	200	203
3	Niaga	1.127	1.114	1.085	1.044	985
4	Industri	2	2	5	5	6
5	Instansi Pemerintah	184	204	203	206	181
6	Lain-lain	-	22	-	-	
7	Susut/Hilang dalam Penyaluran	-	-	-	-	-
Jumlah		15.559	16.046	16.760	17.666	17.838

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka

Terkait Penataan ruang, sebagian besar wilayah Kabupaten Langkat masih berupa ruang terbuka hijau, mengingat sebagian besar wilayah Kabupaten Langkat berupa hutan, perkebunan dan pertanian tanaman pangan. Rencana penggunaan lahan berdasarkan Rencana Pola Ruang Kabupaten Langkat dalam RTRW Kabupaten Langkat 2013-2033 adalah sebagai berikut.

**Tabel 2-47**  
**Luasan Rencana Pola Ruang Kabupaten Langkat tahun 2013-2033**

NO	LOKASI	LUAS (HA)	PERSENTASE (%)
1	Hutan Suaka Alam dan Wisata	214.382,70	34,23
2	Hutan Lindung	5.538,32	0,88
3	Hutan Produksi	28.232,32	4,51
4	Hutan Produksi Terbatas	54.111,12	8,64
5	Perkebunan	200.803,64	32,06
6	Permukiman	9.277,46	3,47
7	Pertanian Lahan Kering	21.732,46	1,48
8	Pertanian Lahan Basah	74.390,00	11,88
9	Sungai/ Badan Air	10.014,98	1,60
10	Tambak	7.846,23	1,25
JUMLAH		626.329,00	100,00

Sumber : RTRW Kabupaten Langkat, 2013-2033



**4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman**

Mayoritas rumah di Kabupaten Langkat sudah berdinding tembok yaitu sebanyak 45,47% sisanya kayu sebanyak 33,76% dan dinding bambu/tepas sebanyak 19,68%. Sumber penerangan sebagian besar menggunakan fasilitas lampu PLN sebesar 97,17%, sedangkan sisanya menggunakan pelita/teplok/sentir sebanyak 2,01%. Penguasaan bangunan tempat tinggal ditempati rumah tangga di Kabupaten Langkat sebesar 81,02% milik sendiri, sekitar 9,09% adalah merupakan rumah dinas baik dinas milik PT Perkebunan Nusantara maupun milik PT. Pertamina. Sebagian terbesar memiliki luas lantai rumah seluas 20-49 m<sup>2</sup> sebanyak 41,21% dan luas lantai 60–99 m<sup>2</sup> sebanyak 34,57%. Dengan atap seng sebesar 80,15% dan atap rumbia/ijuk sebesar 13,93%.

**Tabel 2-48**  
**Kondisi Rumah Tinggal Menurut Rumah Tangga Kabupaten Langkat**

No	URAIAN	RUMAH TANGGA	
		PROSENTASE	JUMLAH
1	Jumlah Rumah Tangga	100	244.970
2	Penguasa bangunan yang ditempati		
	Milik Sendiri	77,79	189.883
	Kontrak	1,40	3.417
	Sewa	2,75	6.713
	Bebas Sewa	4,65	11.351
	Dinas	8,46	20.651
	Rumah milik saudara	4,25	10.374
	Lainnya	0,69	1.684
3	Menurut jenis atap rumah	-	-
	Beton	1,00	2.441
	Genting	0,34	830
	Sirap	0,37	903
	Seng	80,29	195.985
	Asbes	5,86	14.304
	Ijuk/Daun	12,15	29.658
4	Jenis diding	-	-
	Tembok	49,65	121.194
	Kayu	34,14	83.335
	Bamboo	15,82	38.616
	Lainnya	0,39	952
5	Jenis Lantai	-	-
	Marmer/ Keramik/ granite	17,25	42.107



No	URAIAN	RUMAH TANGGA	
		PROSENTASE	JUMLAH
	Tegel/Traso	3,87	9.447
	Semen	65,43	159.713
	Kayu	6,03	14.719
	Tanah	7,42	18.112
6	Luas lantai rumah (M )	-	-
	< 20	1,10	2.685
	20 – 49	48,11	117.435
	50 – 59	11,67	28.486
	60 – 99	28,99	70.764
	100 – 149	8,25	20.138
	150+	1,88	4.589
7	Sumber Penerangan	-	-
	Listrik PLN	95,61	233.381
	Listrik Non PLN	2,18	5.321
	Aldin/Petromax	0	
	Pelita/Sentir/Obor	2,21	5.321
8	Bahan bakar utama memasak		
	Listrik	1,60	3.906
	Gas/Elpiji	72,95	178.069
	Minyak Tanah	0	-
	Arang	6,07	14.817
	Briket	0	
	Kayu bakar	18,57	45.329
	Lainnya	0,27	659
9	Kondisi Rumah		
	Kumuh	82,13	200.477
	Tidak Kumuh	17,87	43.620
10	Penguasaaan Bangunan yang ditempati		
	Milik Sendiri	77,79	189.883
	Kontrak	1,40	3.417
	Sewa	2,75	6.713
	Bebas Sewa	4,65	11.351
	Dinas	8,46	20.651
	Rumah milik saudara	4,25	10.374
	Lainnya	0,69	1.684

Sumber : Indikator Kesejahteraan Sosial BPS Kabupaten langkat, Susenas 2013



**Tabel 2-49**  
**Rasio Rumah layak Huni Terhadap Penduduk Menurut Kecamatan Tahun 2019**  
**Kabupaten Langkat**

KECAMATAN	LUAS WILAYAH (KM <sup>2</sup> )	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH RUMAH LAYAK HUNI	RASIO RUMAH LAYAK HUNI THD JUMLAH PENDUDUK
Bahorok	1.101,83	40.297	7.211	0.18
Sirapit	98,5	16.083	3.993	0.25
Salapian	221,73	26.196	6.100	0.23
Kutambaru	234,84	13.552	3.3362	0,25
Sei Bingai	333,17	48.865	11.354	0,23
Kuala	206,23	39.577	8.726	0,22
Selesai	167,73	70.182	13.949	0,20
Binjai	42,05	42.972	7.519	0,17
Stabat	108,85	83.273	15.615	0,19
Wampu	194,21	41.041	8,276	0,20
Batang Serangan	899,38	35.390	5.501	0,16
Sawit Seberang	209,1	25.466	3.622	0,14
Padang Tualang	221,14	47.178	13.164	0,28
Hinai	105.26	48.325	9.515	0,29
Secanggang	231,19	66.054	11.566	0,18
Tanjung Pura	179,61	65.175	17.581	0,27
Gebang	178,49	43.007	9.657	0,22
Babalan	76,41	57.042	10.237	0,18
Sei Lapan	280,68	47.320	9.432	0,20
Brandan Barat	89,8	22.167	4.063	0,18
Besitang	720,74	44,438	7.529	0,17
Pangkalan Susu	151,35	42.002	5.201	0,12
Pematang Jaya	209	13.131	3.107	0,24
<b>Kabupaten Langkat</b>	<b>6.261,29</b>	<b>978.734</b>	<b>196.254</b>	<b>0,20</b>

Sumber : Indikator Kesejahteraan Sosial BPS Kabupaten Langkat, Susenas 2013/diolah

## 5) Sosial

Berdasarkan data capaian Kinerja pada LAKIP 2019, Dinas Sosial Kabupaten Langkat sudah memberikan bantuan sosial kepada masyarakat, akan tetapi jumlah PMKS yang tinggi menunjukkan perlunya upaya penanggulangan permasalahan PMKS di Kabupaten Langkat.



Tabel 2-50  
Capaian Kinerja Urusan Sosial

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	REALISASI 2018	REALISASI 2019
Jumlah Penduduk yang memperoleh program Bantuan Sosial KKS	Keluarga	47.590	-
Jumlah Penduduk yang memperoleh program Bantuan Sosial KIP	Jiwa	76.608	-
Jumlah Penduduk yang memperoleh program Bantuan Sosial KIS	Jiwa	441.103	561,320
Jumlah Penduduk yang memperoleh Program Bantuan Sosial Rastra	Jiwa	73.847	65,108
Jumlah Penduduk yang memperoleh program Bantuan Sosial PKH	Jiwa	26.822	40,778

Sumber : SIPD

Kesejahteraan Sosial di suatu daerah dapat diamati dari jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang ada di daerah tersebut. Terkait hal tersebut, jumlah PMKS di Kabupaten Langkat semakin tinggi, bahkan melonjak pada tahun 2018, tetapi mengalami penurunan yang drastis di Tahun 2019. Jenis PMKS tertinggi adalah fakir miskin. Selain itu, korban bencana alam pun tergolong tinggi. Tingginya jumlah PMKS yang berasal Keluarga Fakir Miskin menunjukkan perlunya perhatian khusus terhadap keluarga fakir miskin melalui kegiatan peningkatan bantuan sosial.

Tabel 2-51  
PMKS Kabupaten Langkat 2015 – 2019

JENIS PMKS	2015	2016	2017	2018	2019
Anak Balita Terlantar	0	0	1	1	0
Anak Terlantar	25	28	5	5	2
Anak Nakal	0	0	0	0	0
Anak Jalanan	0	0	0	0	4
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.186	0	328	0	0
Korban Tindak Kekerasan	0	0	0	0	0
Lansia Terlantar	2.288	2.288	261	3	3
Penyandang Cacat	1.765	1.765	2.613	3.379	0
Wanita Tuna Susila	37	48	21	42	0
Pengemis	0	0	19	18	6
Gelandangan	0	15	2	0	0
Bekas Wanita Binaan Lembaga Pemasyarakatan	97	0	0	0	0
Korban Penyalahgunaan Napza	26	35	19	8	4
Keluarga Fakir Miskin	3.181	4.729	542.883	193.050	149.415
Keluarga yang tinggal di	2.240	0	330	70	100



JENIS PMKS	2015	2016	2017	2018	2019
Rumah tidak Layak Huni					
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	6	0	0	0	0
Komunitas adat Terpencil	0	0	0	0	0
Korban Bencana Alam	1	2.427	3.526	5.243	277
Korban Bencana Sosial	148	40	49	45	34
Pekerja Migran Terlantar	499	0	0	0	0
Penyandang HIV/AIDS	0	0	0	0	0
Keluarga Rentan	32	0	0	0	0
Anak Jermal	0	0	0	0	0
Masyarakat di Daerah Rawan Bencana	47	0	12.735	623.033	0
Anak yang Behadapan dengan Hukum	13	4	7	15	14
Anak dengan kedisabilitas	187	0	622	0	0
Jumlah	11.778	11.379	563.421	824.912	149.859

Sumber : kabupaten langkat Dalam Angka

#### Urusan Pemerintah wajib tidak berkaitan dengan Pelayanan dasar

##### 1) Tenaga Kerja

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan proporsi jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja. TPAK pada Kabupaten Langkat cenderung mengalami peningkatan dari tahun 2015–2018, tetapi terjadi penurunan pada tahun 2019. Hal tersebut menunjukan semakin meningkatnya proporsi angkatan kerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Langkat berfluktuasi pada tahun 2015–2019.

**Tabel 2-52**  
**Perkembangan Indikator Ketenagakerjaan Kabupaten Langkat 2015–2019**

NO	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
1	Angkatan Kerja	502.602	452.992	487.420	518.216	505.037
	Bekerja	473.618	425.892	469.295	494.030	478.278
	Pengangguran terbuka	29.034	27.103	35.869	24.186	26.759
	Pernah Bekerja	4.166	12.541	11.810	7.963	8.810
	Tidak Pernah bekerja	24.868	14.562	24.059	16.223	17.949
	Rasio Penduduk yang Bekerja	0,942	0,940	0,929	0,953	94,70%
2	Bukan Angkatan Kerja	174.208	227.292	163.740	208.321	228.782
	Sekolah	51.985	37.058	50.353	64.062	70.354



NO	Indikator	2015	2016	2017	2018	2019
	Mengurus Rumah Tangga	89.789	154.032	88.775	112.946	124.039
	Lainnya	32.434	36.202	24.612	31.313	34.388
3	Jumlah Penduduk diatas 15 tahun	676.568	680.287	668.904	726.537	733.819
4	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	64.51	66,59	67,73	71,33	68,82
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	5,78	5,98	3,57	4,67	4,3
6	Jumlah Pencari Kerja Terdaftar	1966	2464	3576	4.589	4.343

Sumber : BPS Kab Langkat

## 2) Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak

Berikut ini indikator–indikator kinerja pada urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Langkat serta capaian kinerjanya pada tahun 2018 – 2019.

**Tabel 2-53**  
**Realisasi Indikator kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak**  
**Kabupaten Langkat Tahun 2018–2019**

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	REAALISASI 2018	REALISASI 2019
Persentase penyelesaian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	Persentase	21.20 %	46,55 %
Persentase permasalahan KDRT yang diselesaikan	Persentase	67.90 %	60 %
Indeks pembangunan gender (IPG)	Skala	89.30 %	91,30 %
Indeks Pemberdayaan Gender (Gender Empowerment Measurement)	Skala	58.14 %	61,00 %

Sumber : SIPD

Pengamatan urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Langkat dapat dilakukan melalui data penyandang masalah kesejahteraan sosial pada bagian sebelumnya, yang terkait dengan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Diketahui bahwa jumlah perempuan rawan sosial ekonomi dan anak dengan kedisabilitas memiliki angka yang tinggi.

**Tabel 2-54**  
**Jumlah PMKS Terkait Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**  
**Kabupaten Langkat 2013-2019**

JENIS PMKS	2015	2016	2017	2018	2019
Anak Balita Terlantar	0	0	1	1	0
Anak Terlantar	25	28	5	5	2
Anak Nakal	0	0	0	0	0
Anak Jalanan	0	0	0	0	4
Wanita Rawan Sosial Ekonomi	1.186	0	328	0	0
Wanita Tuna Susila	37	48	21	42	0
Bekas Wanita Binaan lembaga	97	0	0	0	0
Anak Jermal	0	0	0	0	0
Anak Yang Berhadapan dengan Hukum	13	4	7	15	14
Anak dengan kedisabilitas	187	0	622	0	0

Sumber : Kabupaten langkat dalam Angka

### 3) Pangan

Ketahanan Pangan Merupakan suatu kondisi terpenuhinya pangan baik dari jumlah, Skor Pola Pangan Harapan (PPH) telah menjadi indikator yang strategis untuk mengukur ketahanan pangan suatu wilayah. PPH merupakan instrument sederhana untuk menilai situasi konsumsi pangan penduduk baik dari jumlah maupun komposisi pangan. Semakin tinggi skor PPH, maka konsumsi pangan semakin beragam dan bergizi seimbang. Skor PPH pada Kabupaten Langkat terus meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2019, skor PPH Kabupaten Langkat telah mencapai 89,6. Hal tersebut mengindikasikan semakin meningkatnya keberagaman konsumsi pangan pada Kabupaten Langkat.

**Tabel 2-55**  
**Capaian Kinerja Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat tahun 2015-2019**

No	Indikator Kinerja	CAPAIAN KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Pola Pangan Harapan (PPH)	78,1	82,3	84,2	n/a	89,6
2	Ketersediaan Pangan Utama (%)	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sumber : SIPD

#### 4) Pertahanan

Status kepemilikan yang tercatat dalam Kabupaten Langkat Dalam Angka adalah hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai. Sertifikat kepemilikan terbanyak adalah hak milik, dengan kecenderungan jumlah yang semakin meningkat setiap tahunnya.

**Tabel 2-56**  
**Perkembangan Jumlah Sertifikat Hak Atas Tanah kabupaten langkat Tahun 2015-2019**

NO	SERTIFIKAT	2015	2016	2017	2018	2019
1	Hak Milik	4.620	6.151	8.688	9.964	n/a
2	Hak Guna Bangunan	72	41	20	58	n/a
3	Hak Pakai	125	168	44	393	n/a
4	Hak Guna Usaha	0	0	15	14	n/a

*Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka*

#### 5) Lingkungan Hidup

Berikut capaian kinerja urusan lingkungan hidup di Kabupaten Langkat pada tahun 2019.

**Tabel 2-57**  
**Capaian Kinerja Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Langkat Tahun 2018–2019**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi 2018	Realisasi 2019
Indeks Pencemaran Air Sungai	Indeks	3	6
Perusahaan memenuhi ambang batas limbah cair	Indeks	4	16
Perusahaan memenuhi ambang batas limbah padat	indeks	10	20
Perusahaan memenuhi ambang batas limbah gas	Indeks	4	5
Cakupan Pelayanan Persampahan perkotaan	Kecamatan	18	6
Cakupan Pelayanan air limbah	Indeks	4	16
Penurunan emisi Gas Rumah Kaca	Indeks	10	20
Indeks Kualitas Air Permukaan	Indeks	3	5
Ruang terbuka (RTH) Perkotaan	%	30	18

*Sumber : SIPD*

#### 6) Administrasi kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pada Tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Langkat yang memiliki KTP belum mencapai 100%. Demikian halnya dengan cakupan anak yang memiliki akta





kelahiran belum mencapai 100%. Berikut capaian kinerja urusan kependudukan dan pencatatan sipil kabupaten Langkat pada tahun 2019.

Tabel 2-58  
Capaian Kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Pencacatan Sipil Tahun 2018–2019

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	REALISASI 2018	REALISASI 2019
Persentase penduduk yang telah ber KTP	Persentase	88	94
Persentase anak yang memiliki akte kelahiran	Persentase	89	80

Sumber : SIPD

7) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Mayoritas desa di Kabupaten Langkat masih berada pada status swadaya, hanya terdapat 8 desa yang memiliki status swasembada. Hal ini menunjukkan masih perlunya peningkatan status desa di Kabupaten Langkat. Berikut data capaian kinerja pemberdayaan masyarakat dan desa berdasarkan LAKIP Kabupaten Langkat tahun 2019.

Tabel 2-59  
Cakupan Desa Siaga Aktif Kabupaten langkat 2018-2019

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	REALISASI 2018	REALISASI 2019
Peresentase BPD Baik	Lembaga BPD	195 Desa	235 Desa
Persentase LPM baik	%	62,5	96%
Persentase PKK pedesaan Aktif	%	100	96%
Persentase BUMDes kondisi baik	Unit BUMDes	193 Unit	230 Unit
Persentase desa yang mengelola DD dengan baik	Desa	195 Desa	240 Desa

Sumber : SIPD

Tabel 2-60  
Klasifikasi Status Desa

KECAMATAN	STATUS TINGKAT PERKEMBANGAN DESA		
	SWADAYA	SWAKARYA	SWASEMBADA
Bahorok	19	0	0
Sirapit	9	1	0
Salapian	17	0	0
Kutambaru	1	6	1
Sei Bingai	13	3	0
Kuala	6	10	0



KECAMATAN	STATUS TINGKAT PERKEMBANGAN DESA		
	SWADAYA	SWAKARYA	SWASEMBADA
Selesai	14	0	0
Binjai	7	0	0
Stabat	11	1	0
Wampu	13	1	0
Batang Serangan	5	3	0
Sawit Sebrang	1	1	5
Padang Tualang	10	2	0
Hinai	11	2	0
Secanggang	12	5	0
Tanjung Pura	18	0	1
Gebang	6	4	1
Babalan	6	2	0
Sei Lapan	10	4	0
Brandan Barat	7	0	0
Besitang	9	0	0
Pangkalan Susu	10	1	0
Pematang Jaya	8	0	0
Kab. Langkat	233	46	8

Sumber : Kabupaten langkat Dalam Angka

8) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Berikut data capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Langkat.

Tabel 2-61  
Capaian Kinerja Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	REALISASI 2018	REALISASI 2019
Persentase akseptor keluarga Berencana	Persentase	138.56%	72,29%
Persentase PUS yang terlayani kontrasepsi	Persentase	69.50%	68,20%
Persentase pemakaian Kontrasepsi (contraceptive prevalence rate/CPR)	Persentase	69.50%	68,20%
Persentase Meningkatnya Penggunaan MKJP	Persentase	25.57%	25,53%
Tingkat Capaian rata-rata jumlah anak ayng dilahirkan oleh seorang ibu pada masa usia subur (TFR)	Persentase	2.51%	2,51%

Sumber : SIPD



## 9) Perhubungan

Berikut capaian kinerja urusan perhubungan kabupaten langkat berdasarkan LAKIP 2019.

**Tabel 2-62**  
**Capaian Kinerja Urusan Perhubungan 2018 – 2019**

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	REALISASI 2018	REALISASI 2019
Rasio angkutan umum per 1000 penduduk	Unit	620	765
Load factor kendaraan umum (Angkot)	indeks	80	90
Persentase angkutan umum yang melakukan KIR	Unit	7.835	7.900

Sumber : SIPD

## 10) Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Jumlah koperasi di Kabupaten Langkat sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 tidak mengalami peningkatan. Ada beberapa kecamatan yang tidak memiliki, yaitu Kecamatan Sirapit, Kutambaru, Batang Serangan dan Sawit Seberang

**Tabel 2-63**  
**Jumlah Koperasi Tahun 2014-2018**

KECAMATAN	BANYAKNYA KOPERASI				
	2014	2015	2016	2017	2018
Bahorok	2	2	2	2	2
Sirapit	-	-	-	-	-
Salapian	3	3	3	3	3
Kutambaru	-	-	-	-	-
Sei Bingai	3	3	3	3	3
Kuala	1	1	1	1	1
Selesai	2	2	2	2	2
Binjai	1	1	1	1	1
Stabat	2	2	2	2	2
Wampu	1	1	1	1	1
Batang serangan	-	-	-	-	-
Sawit seberang	-	-	-	-	-
Padang tualang	5	5	5	5	5
Hinai	2	2	2	2	2
Secanggang	4	4	4	4	4
Tanjung pura	4	4	4	4	4



KECAMATAN	BANYAKNYA KOPERASI				
	2014	2015	2016	2017	2018
Gebang	1	1	1	1	1
Babalan	1	1	1	1	1
Sei Lapan	3	3	3	3	3
Brandan Barat	1	1	1	1	1
Besitang	3	3	3	3	3
Pangkalan Susu	4	4	4	4	4
Pematang Jaya	1	1	1	1	1
<b>Kabupaten Langkat</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>44</b>

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka

#### 11) Kepemudaan dan Olahraga

Prestasi cabang olah raga Kabupaten Langkat di tingkat provinsi dan internasional meningkat pada tahun 2017 – 2019. Namun, prestasi cabang olah raga pada tingkat nasional mengalami penurunan. Jumlah kegiatan seni budaya menurun drastis pada tahun 2018.

**Tabel 2-64**  
**Indikator dan capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olah Raga**

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	REALISASI		
		2017	2018	2019
Prestasi Cabang olahraga tingkat provinsi	Target Juara	68 Cabang OR	89	83
Prestasi Cabang Olahraga tingkat nasional	Target Juara	17 Cabang OR	13	15
Prestasi cabang olahraga tingkat internasional	Target Juara	1	5	10
Jumlah lembaga kepemudaaan yang dibina	Lembaga	60	61	62
Jumlah kegiatan seni budaya	Kegiatan	4	1	1

Sumber : SIPD

#### 12) Perpustakaan dan Kearsipan

Jumlah pengunjung perpustakaan di Kabupaten Langkat mengalami peningkatan dari tahun 2017–2019. Namun, koleksi buku perpustakaan dan persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku mengalami penurunan. Berikut adalah capaian urusan perpustakaan di Kabupaten Langkat.

**Tabel 2-65**  
**Capaian Urusan perpustakaan di Kabupaten langkat Tahun 2017-2019**

INDIKATOR SASARAN	REALISASI		
	2017	2018	2019
Peningkatan Koleksi buku perpustakaan	631	369	380
Peningkatan Jumlah pengunjung perpustakaan	6.465	8.881	14.842
Persentase pengunjung layanan baca yang meminjam buku	30,02	9%	5,61

Sumber : SIPD

#### **2.1.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintah Pilihan**

##### **1) Perikanan**

Kabupaten Langkat memiliki potensi hasil laut yang dapat memberikan manfaat secara ekonomi, dikarenakan letaknya yang memiliki perairan. Produksi perikanan tangkap di Kabupaten Langkat mengalami peningkatan selama tahun 2015-2017, dan terjadi peningkatan produksi yang drastis pada tahun 2017 akan tetapi mengalami penurunan di tahun 2018 dan kembali naik pada tahun 2019. Produksi perikanan budidaya cenderung fluktuatif, terjadi peningkatan drastis pada tahun 2017 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2018, dan kembali naik pada tahun 2019. Sementara Produksi Benih Ikan mengalami kenaikan yang stabil dari tahun 2015 sampai tahun 2019

**Tabel 2-66**  
**Produksi Ikan Kabupaten Langkat 2015-2019**

PRODUKSI IKAN	2015	2016	2017	2018	2019
Perikanan Tangkap (TON)	22.753,23	23.122,4	31.115,7	29.559,9	33.137,69
Perikanan Budidaya(TON)	7.548,31	7.561,51	27.430,1	26.058,6	26.721,31
Produksi Benih ikan (Ekor)	1.000.000	3.070.000	3.094.000	3.665.000	4.325.000

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka

##### **2) Pariwisata**

Terkait objek wisata, di daerah Kabupaten Langkat terdapat Taman Wisata Bukit Lawang sebagai objek wisata, Taman Bukit Lawang ini terletak di kaki Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan udara sejuk oleh hujan tropis, di Bukit



Lawang ini terdapat lokasi rehabilitasi Orang Utan (Mawas) yang dikelola oleh WNF. Taman Nasional Gunung Leuser merupakan aset nasional dan terdapat berbagai satwa yang dilindungi di dalamnya, seperti : Badak Sumatera, Rusa, Kijang, Burung Kuau, Siamang. Di taman nasional ini juga terdapat tidak kurang dari 320 jenis burung, 176 binatang menyusui, 194 binatang melata, 52 jenis amfibi dan 3.500 jenis spesies tumbuh-tumbuhan serta yang paling menarik adalah Bunga Raflesia yang terbesar di dunia. Kunjungan wisata di Kabupaten Langkat cenderung fluktuatif, dengan tahun 2016 sebagai tahun yang paling sedikit mendatangkan wisatawan

**Tabel 2-67**  
**Jumlah Kunjungan Wisata Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019**

WISATAWAN	TAHUN				
	2015	2016	2017	2018	2019
Wisatawan Domestik	47.139	13.715	22.604	88.437	89.728
Wisatawan Mancanegara	3.495	4.885	8.396	11.667	11.672
Jumlah	50.634	18.600	31.000	100.104	101.400

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka

### 3) Pertanian

Untuk meningkatkan Ketahanan pangan, peningkatan produksi pertanian diperlukan oleh kabupaten Langkat. Pada tahun 2015 – 2019, Produksi komoditas padi cenderung fluakuatif, namun terjadi peningkatan yang tinggi pada tahun 2017. Komoditas jagung mengalami peningkatan setiap tahunnya.

**Tabel 2-68**  
**Produksi Tanaman Pangan 2015–2019**

URAIAN	Tahun 2015 (Ton)	Tahun 2016 (Ton)	Tahun 2017 (Ton)	Tahun 2018 (Ton)	Tahun 2019 (Ton)
Padi	513.361	477.270	636.936	637.882	636.558
Jagung	147.696	156.842	169.002	133.388	133.388
Kedelai	1.193	352	1.256	2.508	2.508
Kacang Tanah	1.774	1.360	2.645	417	417
Kacang Hijau	1.422	975	1.313	899	899
Ubi Kayu	18.337	16.878	16.156	15.633	15.633



Ubi Jalar	4.167	3.412	3.012	1.994	1.994
-----------	-------	-------	-------	-------	-------

Sumber : Statistik daerah Kabupaten Langkat

Selain pertanian, perternakan dapat menjadi salah satu sub-sektor yang mampu meningkatkan perekonomian Kabupaten Langkat. Berikut data populasi ternak di Kabupaten Langkat. Populasi ternak sapi potong meningkat setiap tahunnya pada tahun 2015-2019, begitu pula domba, babi, ayam dan itik. Hal ini menunjukkan bahwa secara umum, populasi ternak Kabupaten Langkat cenderung meningkat pada tahun 2015-2019.

Tabel 2-69  
Populasi Ternak Kabupaten Langkat 2015–2019

URAIAN	Tahun 2015 (Ton)	Tahun 2016 (Ton)	Tahun 2017 (Ton)	Tahun 2018 (Ton)	Tahun 2019 (Ton)
Sapi Potong	177.352	186.545	193.073	201.193	216.270
Kerbau	3.494	3.590	3.448	2.463	3.028
Kuda	58	59	45	28	22
Kambing	290.868	297.808	285.609	234.589	264.540
Domba	347.838	355.494	362.604	365.415	382.791
Babi	30.902	31.902	31.969	23.073	29.075
Ayam	9.466.598	9.519.837	9.841.289	10.520.281	10.624.473
Itik	264.242	271.169	311.776	317.048	271.167

Sumber : Statistik Daerah Kabupaten Langkat

Tanaman perkebunan yang banyak ditanam di Kabupaten Langkat adalah karet, kelapa sawit, kakao, kelapa, tebu dan pinang. Tanaman kelapa sawit merupakan tanaman perkebunan terluas dengan luas tanam mencapai 46.832 hektar (statistik daerah Kabupaten Langkat 2019) dan produksi mencapai 754.346,80 ton. Tanaman Karet juga merupakan tanaman yang banyak ditanami dengan luas tanam sebanyak 40.700 hektar dan produksi 38.878,98 ton.

Tabel 2-70  
Produksi Hasil Perkebunan Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019

URAIAN	Tahun 2015 (Ton)	Tahun 2016 (Ton)	Tahun 2017 (Ton)	Tahun 2018 (Ton)	Tahun 2019 (Ton)
Pinang	452.16	451,98	439,06	492,51	492,51
Aren	80,5	80	78,75	1.08,21	1.08,21



URAIAN	Tahun 2015 (Ton)	Tahun 2016 (Ton)	Tahun 2017 (Ton)	Tahun 2018 (Ton)	Tahun 2019 (Ton)
Kapuk	25,9	25,9	24,88	27,9	27,9
Lada	1,5	1,5	1,5	10,78	10,78
Tebu	2.386,32	2.386,32	3.502,79	1.206,09	1.206,09
Kemiri	261,19	269	266,01	277,13	277,13
Nilam	218	26	10	24,24	24,24
Kayu manis	1,18	1,18	1,22	52,04	52,04
Coklat	2.040,35	2.040,36	1.935,04	2.292,15	2.292,15
Kelapa	2.977,64	3514,5	3.498,78	3.760,97	3.760,97
Kopi	45,85	44,35	44,1	61,24	62,85
Kelapa sawit	714.192,28	747.619,4	835.171,4	752.233,95	754.346,80
karet	58.943,1	58.581,87	63.766	40.412,61	38.878,98

Sumber Kabupaten Langkat dalam Angka

#### 4) Perdagangan

Pada sektor perdagangan, jumlah perusahaan terdaftar selama 2018 berjumlah 222 perusahaan yang mengurus SIUP dan 434 perusahaan yang mengurus TDP baru serta 7 perusahaan penerbitan TDP pembaharuan izin. Keseluruhan perusahaan yang terdaftar pada tahun 2018 merupakan perusahaan-perusahaan perorangan/kecil. Jika dibandingkan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 jumlah perusahaan mengurus SIUP mengalami kenaikan dan penurunan yang bervariasi. Dibandingkan tahun 2015 jumlah perusahaan yang mengurus SIUP pada tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup besar namun pada tahun 2017 dan 2018 kembali mengalami penurunan.

**Tabel 2-71**  
**Jumlah Penerbitan SIUP Tahun 2015–2019**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Penerbitan SIUP	886	1.668	1.475	222	n/a

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka



## 5) Perindustrian

Kontribusi sektor industri berdasarkan PDRB ADHK cenderung mengalami peningkatan pada tahun 2015–2016 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2017–2019. Laju pertumbuhannya pun meningkat selama tahun 2015–2016. Akan tetapi, laju pertumbuhan pada tahun 2017-2019 cenderung menurun.

**Tabel 2-72**  
**Capaian Kinerja urusan Perindustrian Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019**

NO	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB ADHK (%)	14,70%	14,72%	14,50%	14,29%	13,99%
2	Laju Pertumbuhan Sektor Industri (%)	4,91%	5,09%	3,49%	3,46%	2,88%

Sumber : BPS Kabupaten Langkat

### 2.1.3.3. Fokus Layanan Penunjang Urusan

#### 1) Perencanaan pembangunan Daerah

Kesesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Langkat mencapai persentase 100% pada tahun 2018 tetapi menurun pada tahun 2019. Pada tahun 2018, sudah dilaksanakan e-perencanaan (e-planning) di Kabupaten Langkat.

**Tabel 2-73**  
**Capaian Kinerja urusan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018–2019**

ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	SATUAN	REALISASI 2018	REALISASI 2019
Proses Kesesuaian antara muatan RJMD dengan RKPD	Persentase	100	100
Jumlah Program RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD	Persentase	100	80
Proses kesesuaian antara RKPD dengan APBD	Persentase	100	80
Pelaksanaan E- Perencanaan	Skala	Sudah	Sudah

Sumber: SIPD, 2019

## 2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah

### 2.1.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Kemampuan Ekonomi daerah dapat diukur melalui jumlah pendapatan pengeluaran penduduk yang diukur melalui indikator pengeluaran rill per kapita. Pengeluaran rill per kapita Kabupaten Langkat terus meningkat pada tahun 2015–2019.

**Tabel 2-74**  
**Perkembangan Angka Pengeluaran Rill Per Kapita 2015–2019**

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Pengeluaran RILL per Kapita	10.364	10.567	10.784	11.088	11.210

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka

### 2.1.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

#### 1) Kondisi Jaringan Jalan

Jenis permukaan pada jaringan jalan di Kabupaten Langkat didominasi oleh aspal dan kerikil pada tahun 2019. Angka ini tidak mengalami peningkatan dibanding 2017. Namun, jaringan jalan dengan jenis permukaan kerikil dan tanah masih banyak ditemukan di Kabupaten Langkat.

**Tabel 2-75**  
**Jenis Permukaan Jaringan Jalan Kabupaten Langkat tahun 2015–2019**

NO	JENIS PERMUKAAN	PANJANG (KM)				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Aspal	822,35	824,38	824,38	824,38	824,38
2	Kerikil	619,44	622,69	622,69	622,68	622,68
3	Batu	-	-	-	-	-
4	Tanah	119,49	144,25	144,25	114,24	114,24
Jumlah			1.561,3	1.561,3	1.561,3	1.561,3

Sumber : Kabupaten Langkat dalam Angka

Sedangkan pada kondisi jaringan jalan dapat dilihat bahwa masih banyak jaringan jalan di kabupaten langkat dalam kondisi rusak dan rusak sedang.



Tidak terjadi Peningkatan yang signifikan pada kondisi jalan baik dari tahun 2015-2019.

Tabel 2-76  
Kondisi Jaringan Jalan Kabupaten langkat Tahun 2015–2019

NO	KONDISI JALAN	PANJANG				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Baik	354,49	388,85	425,62	388,85	388,85
2	Sedang	416,91	393,42	392,16	393,44	393,44
3	Rusak	709,2	698,36	667,91	698,35	698,35
4	Rusak berat	80,67	80,67	75,61	80,67	80,67
Jumlah		1.561,27	1.561,3	1.561,3	1.561,3	1.561,3

Sumber : Kabupaten langkat Dalam Angka

## 2) Luas Wilayah Produktif

Kabupaten Langkat masih mengandalkan pertanian sebagai kontributor PDRB tertinggi. Lahan perkebunan dan hutan mendominasi luas lahan wilayah Kabupaten Langkat. Luas lahan pertanian berupa sawah mencapai besaran 7% dari total luas wilayah Kabupaten Langkat.

Tabel 2-77  
Luas Lahan Persawahan Menurut Kecamatan Pada Tahun 2019

KECAMATAN	LAHAN PERTANIAN (HA)	
	SAWAH	BUKAN SAWAH
Bahorok	700	105.185
Sirapit	1.502	7.917
Salapian	171	20.587
Kutambaru	-	22.870
Sei Bingai	3.089	28.793
Kuala	906	18.637
Selesai	1.221	12.437
Binjai	1.175	2.101
Stabat	1.342	6.758
Wampu	710	15.416
Batang Serangan	118	88.522



KECAMATAN	LAHAN PERTANIAN (HA)	
Sawit Seberang	-	19.637
Padang Tualang	74	19.327
Hinai	1.655	7.641
Secanggang	5.884	13.064
Tanjung Pura	2.738	13.507
Gebang	1.862	14.341
Babalan	4.259	2.337
Sei Lapan	1.426	23.594
Brandan Barat	1.521	5.519
Besitang	1.406	60.708
Pangkalan Susu	2.791	10.466
Pematang Jaya	803	18.672
Kabupaten Langkat	35.353	538.036

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka

3) Jumlah Penginapan/Hotel, Restoran dan Rumah Makan

Dilihat dari jumlah usaha akomodasi dan rumah makan yang mengurus izin di Kabupaten Langkat, perkembangan usaha pariwisata belum cukup pesat di Kabupaten Langkat. Dalam 5 tahun terakhir belum ada perizinan hotel di Kabupaten Langkat

Tabel 2-78  
Perkembangan Jumlah Hotel, Restoran dan Rumah Makan yang Mengurus izin di Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019

JENIS FASILITAS	2015	2016	2017	2018	2019
Hotel	-	-	-	-	-
Losmen	-	-	-	-	-
Wisma	1	13	-	-	-
Restaurant	-	12	-	-	-
Rumah Makan	4	9	3	-	-

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka

2.1.4.3. Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim berinvestasi merupakan suatu prasyarat penting dalam memajukan perekonomian Kabupaten Langkat. Beberapa yang perlu menjadi pertimbangan

yaitu dari tingkat kriminalitas, jumlah demonstrasi, kemudahan perizinan, peraturan yang mendukung iklim berinvestasi, jenis dan macam perpajakan dan kondisi swasembada desa.

1) Angka kriminalitas

Pada tahun 2015 – 2017, Kabupaten Langkat mengalami fluktuasi jumlah perkara tindak kriminalitas. Akan tetapi, dapat diamati bahwa total jumlah tindak kriminal di Kabupaten Langkat mencapai 632 kasus pada tahun 2017, ini merupakan angka terendah sejak 2015.

**Tabel 2-79**  
**Catatan Kriminalitas di Lingkungan Kabupaten Langkat Tahun 2015–2019**

NO	URAIAN	TAHUN				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	Jumlah Kasus Narkoba	190	99	175	n/a	n/a
2	Jumlah kasus Pembunuhan	12	2	3	n/a	n/a
3	Jumlah Kejahatan Seksual	11	3	6	n/a	n/a
4	Jumlah Kasus Penganiayaan	381	352	23	n/a	n/a
5	Jumlah Kasus Pencurian	353	294	292	n/a	n/a
6	Jumlah Kasus Penipuan	89	77	13	n/a	n/a
7	Jumlah Kasus Pemalsuan Uang	11	9	6	n/a	n/a
8	Perampokan	67	18	14	n/a	n/a
9	Total Jumlah Tindak Kriminal Selama 1 Tahun	1.114	854	632	n/a	n/a
10	Jumlah penduduk	976.582	976.885	978.734	1.035.411	1.041.775
11	Angka Kriminalitas	11,41	8,74	5,44	n/a	n/a

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka

2) Jumlah dan Macam Pajak dan retribusi Daerah

Pendapatan Pajak Daerah pada Kabupaten Langkat terdiri dari pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan c, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak sarang burung wallet, pajak bumi dan bangunan (PBB), dan pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

**Tabel 2-80**  
**Komponen dan Besaran Pajak Daerah**



KOMPONEN PAJAK DAERAH	REALISASI CAPAIAN PAJAK				
	2014	2015	2016	2017	2018
Pendapatan Pajak Daerah	37.150.151.469,76	42.304.284.902,54	46.907.543.473,00	57.043.425.625,00	59.730.517.039,00
Pajak Hotel	30.250.000,00	50.720.000,00	53.340.000,00	51.350.000,00	51.350.000,00
Pajak Restoran	902.386.752,00	1.196.220.612,00	1.704.340.017,00	2.418.862.300,00	2.285.594.596,00
Pajak Hiburan	14.095.000,00	18.010.000,00	27.105.000,00	30.815.000,00	30.940.000,00
Pajak Reklame	813.114.293,76	936.182.200,00	977.482.862,00	902.249.650,00	902.059.100,00
Pajak Penerangan Jalan	19.783.530.526,00	22.213.390.412,00	23.542.909.620,00	30.353.508.355,00	33.986.581.694,00
Pajak Penerangan Jalan Non PLN	404.295.472,00	-	560.849.256,00	674.007.686,00	381.383.20,00
Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C	1.380.806.447,00	2.101.153.820,00	1.320.371.325,00	913.258.419,00	1.223.418.727,00
Pajak Parkir	5.605.500,00	5.589.000,00	8.619.000,00	8.877.000,00	10.621.200,00
Pajak Sarang Burung Walet	50.010.000,00	41.650.000,00	41.320.000,00	26.850.000,00	30.400.000,00
Pajak Air Bawah Tanah	400.174.610,00	451.598.078,00	531.443.112,00	626.745.374,00	608.249.707,00
Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	3.180.953.308,00	4.102.995.090,00	3.854.310.944,00	5.927.906.057,00	4.325.101.818,00
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	10.184.929.561,00	11.186.775.690,54	14.326.731.017,00	15.098.995.784,00	15.894.816.992,00

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka

Pada tahun 2015-2019, penerimaan pajak daerah cenderung meningkat setiap tahunnya, dengan pencapaian paling besar sebesar 59,7 miliar pada tahun 2019. Pendapatan dari pajak daerah masih didominasi oleh pajak penerangan jalan dengan pendapatan sekitar 33,9 miliar. Sumber pendapatan lain yang potensial berasal dari pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan bangunan, serta Pajak Restoran. Pajak Restoran pun semakin meningkat setiap tahunnya. Besaran retribusi daerah Kabupaten Langkat meningkat setiap tahunnya pada tahun 2015 – 2019.

Tabel 2-81  
Besaran Retribusi Daerah Tahun 2015–2019

TAHUN	2015	2016	2017	2018	2019
Nilai Retribusi Daerah	18.370.307.878	19.471.687.021	20.765.880.952	20.734.682.392	29.345.779.350

Sumber : kabupaten langkat Dalam Angka

3) Persentase Desa Berstatus Swasembada terhadap Total Desa

Dukungan dari desa berkaitan dengan pembangunan akan membantu meningkatkan iklim investasi di Kabupaten Langkat. Pada tahun 2015 – 2019 yang tercatat dalam kabupaten Langkat Dalam Angka 2020, jumlah desa



berstatus mandiri/berswasembedaya yang ada di Kabupaten Langkat berjumlah 8 Desa atau 3,33% dari total desa.

Tabel 2-82  
Persentase Desa Berstatus Swasembedaya Terhadap Total desa

Tahun	2015	2016	2017	2018	2019
Jumlah Desa Swasasembada	0	8	8	7	8
Total Desa	240	240	240	240	240
Persentase	0,0%	3,33%	3,33%	2,92%	3,33%

Sumber : Langkat Dalam Angka 2015-2019

#### 2.1.4.4. Fokus Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia merupakan satu diantaranya faktor penting dalam kerangka pembangunan daerah. Fokus sumber daya manusia ini akan dibahas kedalam 2 (dua) bagian yaitu kualitas tenaga kerja, dan rasio ketergantungan.

##### 1) Kualitas Tenaga Kerja

Kualitas tenaga kerja di Kabupaten Langkat mempengaruhi nilai investasi. Kualitas Tenaga kerja di Kabupaten Langkat dapat tergambar salah satunya melalui tingkat pendidikan para pencari kerja di Kabupaten Langkat. Menurut data yang terdaftar, tingkat pendidikan tenaga kerja di dominasi oleh lulusan SMTA umum dan SMEA.

Tabel 2-83  
Jumlah Pencari Kerja Terdaftar Berdasarkan Tingkat Pendidikan Tahun 2019

TINGKAT PENDIDIKAN	TERDAFTAR		
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	TOTAL
Tidak Sekolah	-	-	-
SD Tidak Tamat	-	-	-
SD	174	84	258
SMTA Umum	198	241	439
SMTA Lainnya	131	109	240
SMTA Umum	1.286	1.229	2.515
STM	226	-	226
SMEA	55	249	304
SMTA Lainnya	56	37	93
Sarjana Muda+PGSD	16	95	111
Sarjana Lengkap	96	60	156



S2			-
Jumlah/Total	2.238	2.104	4.342

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka

2) Tingkat Ketergantungan

Rasio ketergantungan merupakan angka yang menunjukkan besarnya penduduk golongan umur produktif untuk menghasilkan barang dan jasa bagi golongan tidak produktif. Berdasarkan perhitungan ini, rasio ketergantungan penduduk tahun 2019 sebesar 53,03. Hal ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 53,03 penduduk usia tidak produktif.

**Tabel 2-84**  
**Rasio Ketergantungan Penduduk Tahun 2015–2019**

TAHUN	RASIO KETERGANTUNGAN
2015	53,77
2016	53,54
2017	53,33
2018	53,18
2019	53,03

Sumber : Kabupaten Langkat Dalam Angka

## 2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD

### 2.2.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun berjalan

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan digunakan untuk mengetahui Tingkat capaian Kinerja yaitu dengan membandingkan antara realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Langkat dengan rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Langkat dan melihat tingkat capaian (penyerapan) anggaran yaitu membandingkan antara realisasi penyerapan dana/anggaran program dan kegiatan berdasarkan realisasi APBD dengan pagu anggaran yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Langkat. Evaluasi terhadap hasil RKPD Kabupaten Langkat diperoleh dari evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat.





Tabel 2-85  
Realisasi Anggaran APBD Kabupaten Langkat Tahun 2019

No	Nama Perangkat Daerah	Jumlah Program/Kegiatan APBD 2019		
		Program	Kegiatan	Anggaran
1	Dinas Pendidikan	8	31	159.681.816.771
2	Dinas Kesehatan	13	48	154.655.543.995
3	RSUD T. Pura	9	25	29.012.090.295
4	Dinas PUR	15	68	243.222.223.185
5	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	10	40	37.074.237.000
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	31	2.007.434.131
7	Satuan Polisi Pamong Praja	4	16	5.810.069.348
8	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	31	7.066.233.345
9	Dinas Sosial	9	26	3.675.809.124
10	Dinas Tenaga Kerja	7	26	5.239.906.532
11	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Perempuan, Perlindungan Anak	11	69	10.433.344.080
12	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	14	105	12.684.208.601
13	Dinas Lingkungan Hidup	11	43	13.596.715.870
14	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	3	24	7.798.488.162
15	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	8	54	9.085.165.358
16	Dinas Perhubungan	7	21	4.535.052.718
17	Dinas Komunikasi dan Informatika	7	25	7.119.137.668
18	Dinas Koperasi	9	39	2.415.377.389
19	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	7	49	1.869.521.531
20	Dinas Pemuda dan Olah Raga	8	45	2.957.438.250
21	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7	31	2.867.829.916
22	Dinas Perpustakaan dan Arsip	7	34	2.685.857.164
23	Dinas Perikanan dan Kelautan	7	26	8.934.708.096
24	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	9	28	5.768.376.975
25	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	13	52	5.979.075.756
26	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	6	42	14.047.427.038
27	Badan Kepegawaian Daerah	6	31	2.505.881.981
28	Sekretariat Daerah	22	90	38.769.968.188
29	Sekretariat DPRD	7	24	51.386.245.635



30	Inspektorat Daerah	6	37	4.142.842.971
31	Badan Pendapatan Daerah	7	31	7.131.316.345

## 2.2.2. Realisasi RPJMD

### 2.2.2.1. Capaian Indikator Kinerja Sasaran RPJMD tahun 2019

Pencapaian indikator kinerja sasaran RPJMD mencerminkan capaian Visi dan Misi Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat. Guna mengetahui pencapaian target indikator kinerja utama pada tahun 2019 dilakukan evaluasi terhadap RKPD Kabupaten Langkat tahun 2019. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa target rencana program dan kegiatan pembangunan daerah dalam RKPD 2019 dapat dicapai, untuk mewujudkan visi RPJMD Kabupaten Langkat, dan mencapai sasaran pembangunan RPJMD tahun 2019.

Capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Langkat tahun 2019 disajikan pada tabel dibawah ini.



**Tabel 2-86**  
**Capaian indikator kinerja sasaran RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019**

NO	MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TAHUN 2019		Perangkat Daerah
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	
1		2	3	4	5	6	7
1.	Misi 1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial	Tujuan 1.1 Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	10,2 (2018)	9,91	
			Jumlah Desa Mandiri	Desa	8	10	Dinas Desa
		1.1.1 Meningkatnya status desa	Peningkatan status desa (berdasarkan Indeks Desa Membangun/IDM)				Dinas PMD
			- Desa Maju	Desa	8	8	
			- Desa Berkembang	Desa	193	194	
			- Desa Tertinggal	Desa	38	37	
			- Desa Sangat Tertinggal	Desa	1	1	
		1.1.2 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah PMKS	Orang	4085	2468	Dinas Sosial
			Indeks Pembangunan Gender	Poin	68	68.06	Pengendalian Penduduk, KB dan PPA
		1.1.3 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah prestasi pemuda :	Medali/Piala	127	147	Dinas Pemuda dan Olahraga
			- Internasional	Medali/Piala	13	18	Dinas Pemuda dan Olahraga
			- Nasional	Medali/Piala	5	9	Dinas Pemuda dan Olahraga
			- Daerah	Medali/Piala	109	120	Dinas Pemuda dan Olahraga
		1.1.4 Meningkatnya pengembangan budaya lokal	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal	%	3	5	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



NO	MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TAHUN 2019		Perangkat Daerah
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	
1		2	3	4	5	6	7
		1.1.5 Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	50	50	Dinas PMD
		1.1.6 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	%	n/a	40	Dinas PMD
2.	Misi 2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	Tujuan 2.1 Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan	IPM	Poin	70,27 (2018)	70,76	Dinas Pendidikan
			Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,52 (2018)	8,64	Dinas Pendidikan
		2.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,75 (2018)	12,81	
			APK SD/MI Sederajat	%	110,43 (2017/2018)	85.24	
			APM SD/MI Sederajat	%	94,28 (2017/2018)	81.09	
			APK SMP/MTS Sederajat	%	106,99 (2017/2018)	71.68	
			APM SMP/MTS Sederajat	%	79,59 (2017/2018)	59.14	
		2.1.2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,22 (2018)	68,59	Dinas Pendidikan
			Prevalensi Gizi Buruk	%	0,09		Dinas Kesehatan
			TFR (Total Fertility Rate)	%	2,76	2,51%	Dinas Kesehatan
3.	Misi 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan	Tujuan 3.1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor	LPE	Persen (%)	5,02 (2018)	5,07	Seluruh Perangkat Daerah
			TPT	Persen (%)	4,67	4,3	Dinas Ketenaga kerjaan



NO	MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TAHUN 2019		Perangkat Daerah
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	
1		2	3	4	5	6	7
	prioritas pengembangan pada sektor pariwisata	ekonomi unggulan daerah					
		3.1.1 Meningkatnya kunjungan wisawatan dan pendapatan dari wisata	Tingkat pertumbuhan jumlah wisatawan	%	10	12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
			Kontribusi Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan minum) pada PDRB (ADHB)	%	2,28 (2018)	2,34	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		3.1.2 Meningkatnya pengembangan UMKM dan IKM dalam sektor ekonomi kreatif	Tingkat Pertumbuhan UMKM	%	11,3	n/a	Dinas Koperasi
			Tingkat Pertumbuhan IKM	%	n/a	n/a	Dinas Koperasi
		3.1.3 Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Skor PPH	Poin	89,6	n/a	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian pada PDRB (ADHB)	%	35,06	36,06	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
			Kontribusi Sub Sektor Perikanan pada PDRB (ADHB)	%	3,12	3,62	Dinas Perikanan dan Kehutanan
		3.1.4 Meningkatnya investasi daerah	Tingkat pertumbuhan investasi daerah (PMA-PMDN)	Persen (%)	5	7	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
		3.1.5 Meningkatnya penguatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	%	1,71	10,38	Badan Pendapatan Daerah
		3.1.6 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dalam ekonomi	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha	%	n/a	2,5	Dinas Ketenaga Kerjaan



NO	MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TAHUN 2019		Perangkat Daerah
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	
1		2	3	4	5	6	7
		lokal	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	%	n/a	21	Dinas Ketenaga Kerjaan
4.	Misi 4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan	Tujuan 4.1 Terciptanya penurunan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup	Indeks Gini	Poin	0,25	0,24	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Indeks Williamson	Poin	0,607	0,58	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase Panjang Jalan Kabupaten Per Luas Wilayah	Km/km <sup>2</sup>	0,274	0,277	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4.1.1 Meningkatnya konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	50,11	54	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	%	60	62	Dinas Perhubungan
			Luas Kawasan Kumuh	Ha	150	120	Dinas PKP
		4.1.2 Meningkatnya kinerja infrastruktur permukiman	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Air Bersih	%	14	19	Dinas PKP
			Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi	%	44	50	Dinas PKP
			Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Persampahan	%	78	79	Dinas Lingkungan Hidup
			Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	93	93,634	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		4.1.4 Meningkatnya pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	N/A	60	Dinas Lingkungan Hidup
		4.1.5 Menurunnya resiko kejadian bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	140	128	BPBD
			Luas Wilayah Rawan	Ha	1500	n/a	Dinas PKP



NO	MISI	TUJUAN / SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		TAHUN 2019		Perangkat Daerah
			INDIKATOR	SATUAN	TARGET	CAPAIAN	
1		2	3	4	5	6	7
			Genangan Banjir				
5.	Misi 5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Tujuan 5.1 : Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	n/a	n/a	Bagian Organisasi
		5.1.1 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	Opini BPK	Opini (WTP, WDP, TW, TMP)	WDP	WTP	BPKAD
			Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)	CC (65, Tahun 2018)	CC(65)	Bagian Organisasi
			Indeks Profesionalitas ASN	Poin	n/a	n/a	BKD
		5.1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis SIT	Nilai Indeks SPBE	Poin	2,51	3	0
			Persentase Desa dengan Pelayanan Berbasis TIK	%	n/a	37%	Dinas PMD
			Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75,6 (2018)	72,77	Seluruh Perangkat Daerah

---

**2.2.2.2. Capaian Indikator Kinerja Program dan Kegiatan**

Keberhasilan pencapaian target dari kegiatan dan program akan mendorong tercapainya target sasaran perangkat daerah dan lebih lanjut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Langkat tahun 2021 akan memberikan dampak pada pencapaian target sasaran pembangunan Kabupaten Langkat. Penilaian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan digunakan untuk mengetahui:

- a. Tingkat capaian kinerja yaitu dengan membandingkan antara realisasi program dan kegiatan yang dilaksanakan melalui APBD Kabupaten Langkat dengan rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kabupaten Langkat; dan
- b. Tingkat capaian (penyerapan) anggaran yaitu membandingkan antara realisasi penyerapan dana/anggaran program dan kegiatan berdasarkan laporan realisasi APBD Kabupaten Langkat dengan pagu anggaran yang direncanakan dalam RKPD Kabupaten Langkat.

Lebih lanjut Evaluasi Pelaksanaan program dan Kegiatan RKPD tahun lalu dan realisasi RPJMD dapat dilihat pada Tabel Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah sampai dengan tahun 2019 Kabupaten Langkat sebagai berikut :





**Tabel 2-87**  
**Evaluasi Hasil Pelaksanaan Perencanaan Daerah Kabupaten Langkat sampai dengan tahun 2019**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
<b>A</b>	<b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b>							
1	LPE	Persen (%)	5,02 (2018)	5.02	5.07	5,1	5,2	Seluruh Perangkat Daerah
2	IPM	Poin	70,27 (2018)	70.27	70.76	70,5	71	Seluruh Perangkat Daerah
3	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	10,2 (2018)	10.2	9.91	9,8	9,6	Seluruh Perangkat Daerah
4	Indeks Gini	Poin	0,25	0.25	0.23	0,24	0,23	Seluruh Perangkat Daerah
5	Indeks Williamson	Poin	0,607	0.607	0.58	0,59	0,58	Seluruh Perangkat Daerah
6	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,52 (2018)	8.52	8.82	8,76	8,82	Dinas Pendidikan
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,75 (2018)	12.75	12.9	12,8	12,9	Dinas Pendidikan
8	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,22 (2018)	68.22	68.75	68,5	68,75	Dinas Pendidikan
9	Prevalensi Gizi Buruk	%	0,09	0.09	0	0	0	Dinas Kesehatan
10	TPT	Persen (%)	4,67	4.67	4.3	4,5	4,3	Dinas Ketenaga kerjaan
11	Jumlah Desa Mandiri	Desa	8	8	10	9	10	Dinas PMD
12	Jumlah PMKS	Orang	4085	4085	2468	3268	2468	Dinas Sosial
13	Indeks Pembangunan Gender	Poin	68	68	68.06	68,02	68,06	Dinas PP, KB dan PPA
14	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,76	2.76	2.57	2,6	2,57	Dinas Kesehatan
15	Tingkat pertumbuhan jumlah wisatawan	%	10	10	12	12	12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16	Indeks Risiko Bencana	Poin	140	140	128	139	128	BPBD
17	Skor PPH	Poin	89,6	89.6	n/a	89,8	89,9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18	Kontribusi Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan minum) pada PDRB (ADHB)	%	2,28 (2018)	2.28	2.34	2,4	2,43	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
19	Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian pada PDRB (ADHB)	%	35,06	35.06	36.06	35,56	36,06	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20	Kontribusi Sub Sektor Perikanan pada PDRB (ADHB)	%	3,12	3.12	3.62	3,37	3,62	Dinas Perikanan dan Kelautan
21	Tingkat Pertumbuhan UMKM	%	11,3	11.3	n/a	11,5	12	Dinas Koperasi
22	Tingkat Pertumbuhan IKM	%	n/a	n/a	n/a	2,99	3,04	Dinas Koperasi
23	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	n/a	n/a	n/a	60	62	Bag. Organisasi
24	Opini BPK	Opini (WTP, WDP, TW, TMP)	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
25	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	n/a	n/a	n/a	70	72,5	BKD
26	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)	CC (65, Tahun 2018)	CC (65. Tahun 2018)	CC (65)	B (67,5)	B (70)	Bag. Organisasi
27	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75,6 (2018)	75.6	72.77	76,88	78,16	Seluruh Perangkat Daerah
<b>B</b>	<b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b>							
1	Tingkat pertumbuhan investasi daerah (PMA-PMDN)	Persen (%)	5	5	n/a	6	7	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
2	Pertumbuhan PAD	%	1,71	1,71	10,38	2,5	3,5	Badan Pendapatan Daerah
<b>C</b>	<b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>							
<b>URUSAN WAJIB</b>								
<b>1.</b>	<b>Pendidikan</b>							
1	APK SD/MI Sederajat	%	110,43 (2017/2018)	110.43	85.24	111,5343	112,649643	Dinas Pendidikan
2	APM SD/MI Sederajat	%	94,28 (2017/2018)	94.28	81.09	95,2228	96,2702508	
3	APK SMP/MTS Sederajat	%	106,99 (2017/2018)	106.99	71.68	108,0599	109,140499	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
4	APM SMP/MTS Sederajat	%	79,59 (2017/2018)	79.59	59.14	81,57975	83,6192438	
5	APK PAUD usia 3-6 tahun	Persen (%)	93,67	93.67	20.95	94,63	95,55	
6	Persentase Anak Putus Sekolah di Tingkat SD	Persen (%)	1,19	1.19	n/a	1,18	1,17	
7	Persentase Anak Putus Sekolah di Tingkat SMP	Persen (%)	2,1	2.1	n/a	2,09	2,08	
8	Angka Melanjutkan SD-SMP	Persen (%)	68,19	68.19	68.21	68,2	68,21	
9	Angka kelulusan SMP	Persen (%)	100	100.	100.	100	100	
10	Rasio Siswa Per Ruang Kelas	Siswa : Ruang Kelas	32	32.	32.	32	32	
11	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	Siswa : Ruang Kelas	73,62	73.62	73.65	73,64	73,65	
12	Jumlah Sekolah (SD/ sederajat dan SMP/ sederajat) Terakreditasi A atau B	Sekolah	579 (2018)	579.	643.	603	615	
13	Persentase guru, TK, SD, SMP, yang bersertifikat pendidik	%	85	85.	89.	87	89	
14	Rasio Guru bersertifikat pendidik per sekolah	Rasio	8,6 : 1	8.6 : 1	9.1 : 1	8,9 : 1	9,1 : 1	
<b>2</b>	<b>Kesehatan</b>							
1	% Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	95,5	95.5	95.5	100	100	Dinas Kesehatan dan RSUD Tanjung Pura
2	Jumlah Kematian Balita	Indeks	39	39	39	37	35	
3	Jumlah Kematian Ibu	Indeks	8	8	8	8	8	
4	Jumlah Kematian Bayi	Indeks	36	36	36	34	32	
5	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Persen (%)	12,33	12.33	12.33	12,25	12	
6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persen (%)	20,4	20.4	20.4	20,35	20,3	
7	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun	Persen (%)	13,83	13.83	13.83	13,5	13	
8	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Persen (%)	70	70	70	100	100	
9	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan asuransi/jaminan kesehatan	%	70	70	70	100	100	
10	Persentase Puskesmas yang memberikan Pelayanan	%	100	100	100	100	100	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
	Jaminan Kesehatan Masyarakat							
11	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	86,7	86.7	86.7	100	100	
12	Persentase Rumah Sakit Sesuai Standar (Terakreditasi)	%	50	50	50	50	60	
13	Nilai IKM RSUD	%	n/a	n/a	n/a	78	79	
14	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Status Akreditasi	80	80	80	100	100	
15	Persentase tenaga kesehatan yang berstandar kompetensi	Persen (%)	0	0	0	5	10	
16	Puskesmas yang memiliki dokter minimal 3 orang	%	83	83	83	100	100	
17	Persentasi Keluarga yang Menerapkan PHBS	%	55	55	55	69	70	
18	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Farmasi dan Alat Kesehatan	Persen (%)	100	100	100	100	100	
19	Persentase kasus penyakit menular yang tertangani	Persen (%)	100	100	100	100	100	
20	Persentase Desa UCI	%	89,89	89.89	89.89	91,7	93,9	
21	Jumlah Kemitraan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Kemitraan	0	0	0	2	3	
22	Eradikasi Polio	kasus (spesimen)	0	0	0	0	0	
23	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan (Puskemas, Pustu & jaringannya) dalam kondisi baik	Persen (%)	100	100	100	100	100	
24	Persentase kasus penyakit menular yang tertangani	Persen (%)	100	100	100	100	100	
25	Persentase Desa UCI	%	90	90	90	92	94	
26	Meningkatnya Kesehatan bagi Lansia (UHH)	angka	67,94	67.94	67.94	68	69	
27	Persentase Cakupan Posbindu	%	30,32	30.32	30.32	44,04	57,76	
28	Jumlah Penyuluhan Bahaya Peredaran Miras Dan Narkoba	kali	0	0	0	1	1	
29	Persentase Sarana Distribusi Obat Yang Terstandar	%	89,93	89.93	89.93	100	100	
30	Persentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang terstandart	%	63,92	63.92	63.92	57,06	62,25	
31	Persentase HATRA (Penyehat Tradisional) yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	%	10	10	10	11	12	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
32	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik	%	80	80	80	100	100	
33	Persentasi masyarakat yang terlayani upaya kesehatan masyarakat	%	80	80	80	100	100	
34	Persentasi Realisasi Capaian BLUD	%	80	80	80	100	100	
35	Jumlah sarana dan prasarana dalam kesehatan dalam kondisi baik	%	80	80	80	100	100	
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
1	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Per Luas Wilayah	Km/km <sup>2</sup>	0,274	0.275	0.277	0,275	0,277	Dinas PUPR
2	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	50,11	52	54	52	54	
3	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	93	93.634	94.268	93,634	94,268	
4	Panjang jaringan irigasi dalam Kondisi Baik	meter	52	54	56	54	56	
5	Panjang Jalan Kabupaten	Km	1.561	1.611	1.661	1.611	1.661	
6	Persentase peningkatan kelas jalan Kabupaten	%	54,51	54.610	54.710	54,61	54,71	
7	Jumlah Jembatan	unit	262	282	302	282	302	
8	Database kondisi jalan	Unit	0	0	n/a	0	1	
9	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Km	426,55	484	541	484	541	
10	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	Unit	161	191	221	191	221	
11	Bantaran dan Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	meter	36480	43480	50480	43480	50480	
12	Jumlah Kebijakan Tata Ruang	Dokumen	0	0	0	0	2	
13	Dokumen RDTR, Dokumen RTR Kawasan Strategis Kabupaten	Dokumen	0	7	n/a	7	14	
14	Sistem Informasi Tata Ruang,	Unit	0	0	0	0	1	
15	Jumlah kasus pelanggaran tata ruang	kasus	2	0	0	0	0	
16	Panjang sungai yang terkonservasi	meter	500	1300	2100	1300	2100	
17	Jumlah Rumah Ibadah yang direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	10	
18	Luas lahan yang dibebaskan	m2	1189	2.189	3.189	2.189	3.189	
19	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persen (%)	64	66	68	66	68	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
20	Jumlah ruas jalan yang dilayani Penerangan Jalan Umum	ruas jalan	726	734	742	734	742	
21	Jumlah taman dalam kondisi baik	Unit	12	16	20	16	20	
22	Panjang Turap / Talud dan Bronjong Yang Dibangun	meter	6631	9631	12631	9631	12631	
23	Jumlah Rumah Ibadah yang terehabilitasi	Unit	0	0	0	0	5	
<b>4</b>	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>							
1	Luas Kawasan Kumuh	Ha	150	135	120	135	120	Dinas PKP
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Air Bersih	%	14	19	24	19	24	
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi	%	44	50	56	50	56	
4	Luas Wilayah Rawan Genangan Banjir	Ha	1500	1495	1490	1495	1490	
5	Persentase Rumah Tangga dengan Rumah Tidak Layak Huni	%	11	10.6	10.2	10,6	10,2	
6	Rencana Penanganan Kawasan Kumuh	Dokumen	5	1	1	1	1	
7	Cakupan Wilayah yang Terlayani Air Bersih	%	14	19	24	19	24	
8	Jumlah Lokasi Kawasan Kumuh yang Tertata	Lokasi	1	1	1	1	1	
9	Cakupan Wilayah yang terlayani sanitasi	Persen (%)	44	100	100	100	100	
10	Panjang saluran drainase lingkungan	meter	108000	153000	201000	153000	201000	
11	Panjang Jalan lingkungan	meter	77237	153001	201001	153001	201001	
<b>5</b>	<b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>							
1	Jumlah FKUB	Jumlah	n/a	4	4	4	4	BPBD, Satpol PP, Kantor Kesbangpol
2	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	n/a	100	100	100	100	
3	Jumlah organisasi/kelompok penjaga lingkungan	Kelompok	n/a	23	23	23	23	
4	Jumlah pelanggaran perda	Kasus	n/a	53	45	53	45	
5	Persentase cakupan wilayah penangan Kebakaran	%	n/a	13	17	13	17	
6	Rata-rata waktu respon penanganan kejadian kebakaran	Menit	n/a	15	10	15	10	
7	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0	1	1	1	1	
8	Prosentase ketersediaan data dan informasi kebencanaan	%	100	100	100	100	100	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
9	Persentase Konflik sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100	
10	Jumlah Kasus Pekat	Jumlah	75	70	65	70	65	
11	Cakupan Organisasi Masyarakat Yang mendapatkan Sosialisasi	%	100	100	100	100	100	
12	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Bencana	Desa	2	2	2	2	2	
13	Persentase kejadian bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100	
<b>6</b>	<b>Sosial</b>							
1	Sistem database PMKS	Unit	2	2	2	2	2	Dinas Sosial
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen (%)	55	80	85	80	85	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen (%)	65	68	100	68	100	
4	Tingkat Pertumbuhan Penyandang Penyakit Sosial	Persen (%)	60	45%	40%	45%	40%	
5	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Fakir Miskin	Persen (%)	60	52%	40%	52%	40%	
6	Persentase Penyandang Disabilitas yang Berdayaguna	Persen (%)	0	30%	35%	30%	35%	
7	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen (%)	n/a	20%	30%	20%	30%	
8	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen (%)	n/a	40%	50%	40%	50%	
9	Persentase Anak Terlantar yang dibina	Persen (%)	n/a	70%	75%	70%	75%	
<b>URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>								
<b>7.</b>	<b>Tenaga Kerja</b>							
1	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha	%	n/a	2	2.5	2	2,5	Dinas Ketenaga kerjaan
2	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	%	n/a	20	21	20	21	
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen (%)	n/a	14.81	27.78	14,81	27,78	
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen (%)	n/a	13.89	19.44	13,89	19,44	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
5	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen (%)	n/a	97	98	97	98	
6	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Tertangani	Kasus	n/a	65	70	65	70	
7	Cakupan database ketenagakerjaan	Persen (%)	n/a	95	95	95	95	
8.	<b>Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak</b>							
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen (%)	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perempuan Perlindungan Anak
2	Cakupan pemberdayaan lembaga pengarusutamaan gender dan anak	Persen (%)	18	20	25	20	25	
3	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Orang	80	100	120	100	120	
4	Cakupan Kegiatan peningkatan yang mendukung kualitas anak dan peran perempuan	%	100	100	100	100	100	
5	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	0,03	0.04	0.04	0,04	0,04	
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	42	45	50	45	50	
7	Cakupan kelompok perempuan yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas hidup dan keluarga	Kelompok	9	10	12	10	12	
8	Persentase Intitusi/lembaga dan Kecamatan yang menerapkan kategori layak/ramah anak	%	15	22	30	22	30	
9	Sistem informasi database gender dan anak	Unit	2	3	3	3	3	
9.	<b>Pangan</b>							
1	Volume ketersediaan pangan utama	Ton	333.480	141.131	144.377	141.131	144.377	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
10.	<b>Pertanahan</b>							
1	Persentase Batas Daerah yang tersedia	%	2000	2.000	2.000	2.000	2.000	Sekretariat Daerah
11.	<b>Lingkungan Hidup</b>							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	N/A	58	60	58	60	Dinas Lingkungan Hidup
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Persampahan	%	78	78	79	78	79	
3	Persentase daya tarik ekowisata di kawasan konservasi	Persen (%)	N/A	100	100	100	100	





No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
	yang terkelola							
4	Cakupan RT Perkotaan yang Terlayani Sistem Pengangkutan Sampah	Persen (%)	100	100	100	100	100	
5	Indeks Kualitas Air	poin	n/a	55	57	55	57	
6	Indeks Kualitas Udara	poin	53,32 (2018)	54.32	55.32	54,32	55,32	
7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	n/a	58	60	58	60	
8	Persentase ketaatan/kepatuhan usaha terhadap aspek lingkungan	Persen (%)	100	100	100	100	100	
9	Jumlah Kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan konservasi SDA	%	1	4	4	4	4	
10	Jumlah Dokumen Database Konservasi SDA	Dokumen						
11	Persentase Laporan Masyarakat terkait Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen (%)	100	100	100	100	100	
12	Jumlah kegiatan pengendalian polusi	Kegiatan	1	4	4	4	4	
13	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan PPLH	%	100	100	100	100	100	
14	Jumlah Dokumen Profil MHA	Dokumen	1	1	1	1	1	
<b>12.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
1	Persentase Penduduk Yang Melakukan Perekaman Data Kependudukan	Persen (%)	91	91	94	93	94	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Rata-rata Waktu Pelayanan Administrasi Kependudukan	Hari	5	5	4	4	4	
3	Persentase anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	Persen	86	86	88	87	88	
<b>13.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
1	Peningkatan status desa (berdasarkan Indeks Desa Membangun/IDM)							Dinas PMD
	- Desa Maju	Desa	8	8	8	10	12	
	- Desa Berkembang	Desa	193	193	194	192	191	
	- Desa Tertinggal	Desa	38	38	37	35	32	
	- Desa Sangat Tertinggal	Desa	1	1	1	1	1	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
2	Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	50	50	50	55	60	
3	Persentase Desa dengan Pelayanan Berbasis TIK	%	n/a	37%	37%	60	70	
4	Jumlah satuan keamanan lingkungan aktif	Satuan	-	n/a	n/a	40	45	
5	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik	Persen (%)	100	100	100	100	100	
6	Tingkat pertumbuhan aparatur desa dengan kemampuan pengoperasian TIK	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	240	240	
7	Jumlah BUMDes Aktif	Unit	70	70	212	100	120	
8	Jumlah Kerjasama Antar Desa	MoU	1	1	1	1	1	
9	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	130	130	130	150	170	
10	Tingkat realisasi penyerapan ADD di desa	Persen (%)	100	100	100	100	100	
11	Jumlah desa yang menggunakan pelayanan berbasis TIK	Desa	80	80	80	144	168	
12	Cakupan PKK Aktif	Persen (%)	100	100	100	100	100	
13	Cakupan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	Keg	100	100	100	100	100	
14	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
1	Rasio Akseptor KB	%	65,6	65.6	69.55	69,55	70,22	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perempuan Perlindungan Anak
2	Rata-Rata jumlah Anak Per Keluarga	jiwa	3,16	3.16	3.1	3,1	3,06	
3	ASFR 15 - 19	angka	24,2	24.2	24.07	24,07	23,66	
4	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	8	8	10	10	15	
5	Cakupan kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap bahaya narkoba, PMS, dan HIV/AIDS	Kelompok	12	12	15	15	20	
6	Keluarga yang mempunyai balita tergabung dikelompok bina keluarga	keluarga	525	525	575	575	675	
7	Pengeleloa kelompok bina keluarga yang mendapat pelatihan/pembinaan	orang	35	35	45	45	45	
8	Persentase Perangkat daerah (Badan/Dinas) yang	%	11	11	20	20	22	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
	menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk							
<b>15.</b>	<b>Perhubungan</b>							
1	Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	%	60	60	62	62	64	
2	Jumlah Rambu,Marka,Pagar Pengaman Jalan	unit	500	500	600	600	700	
3	Jumlah Armada Bus Sekolah	unit	2	2	3	3	4	
4	Jumlah Halte Bus/Taxi gedung terminal	unit	10	10	11	11	12	
5	Jumlah Titik Rawan Kemacetan	Titik	20	20	19	19	18	
6	Jumlah Terminal Sesuai Standar	unit	0	0	0	1	2	
7	Cakupan Prasarana dan Fasilitas dalam Kondisi Baik	persen	30	30	35	35%	40%	
8	Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	persen	60	60	60	62%	64%	
<b>16.</b>	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							
1	Nilai Indeks SPBE	Poin	2,51	2.51	3	3	3,25	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Persentase SDM Pemerintahan dengan Kompetensi TIK	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	20	40	
3	Persentase Tindak Lanjut Laporan Masyarakat	%	n/a	n/a	n/a	100	100	
4	Cakupan Integrasi Sistem Aplikasi Pemerintahan dan Layanan Publik	%	n/a	n/a	n/a	100	100	
5	Cakupan Kegiatan Pemerintahan yang Terpublikasi di Media Massa	%	n/a	n/a	n/a	100	100	
6	Cakupan Kegiatan Pemerintahan yang Terpublikasi di Tingkat Kecamatan	%	n/a	n/a	n/a	100	100	
<b>17.</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>							
1	Jumlah fasilitas inkubator teknologi dan bisnis	Unit	0	0	0	1	1	Dinas Koperasi
2	Jumlah wirausaha baru yang memperoleh akses permodalan	Unit	0	0	0	30	30	
3	Jumlah Fasilitas Wirausaha Baru oleh Mitra Badan Usaha	Unit	0	0	0	30	30	
4	Jumlah pertumbuhan kebaruan produk UMKM	Unit	0	0	0	30	30	
5	Jumlah kegiatan akses UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) ke layanan keuangan	keg	1	1	1	1	1	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
6	Persentase UMKM yang mengalami peningkatan skala bisnis	Persen (%)	0	0	0	5	10	
7	Cakupan koperasi aktif	Persen (%)	41	41	41	42	43	
8	Cakupan kegiatan Pengembangan sumber daya manusia KUKM	Keg	0	0	0	11	11	
<b>18.</b>	<b>Penanaman Modal</b>							
1	Dokumen Regulasi Investasi	Perda	0	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
2	Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah	Unit		0	0			
3	Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN)	Rp	5,1 T	5.1 T	5.1 T	5,4 T	5,8 T	
4	Cakupan sistem informasi potensi investasi daerah	%	100	100	80	100	100	
<b>19.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>							
1	Jumlah prestasi pemuda :	Medali/Piala	127	127	147	147	169	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	- Internasional	Medali/Piala	13	13	18	18	22	
	- Nasional	Medali/Piala	5	5	9	9	12	
	- Daerah	Medali/Piala	109	109	120	120	135	
2	Persentase peningkatan jumlah kegiatan organisasi pemuda	Persen (%)	60	60	60	62%	63%	
3	Jumlah wirausaha muda yang dibina	orang	28	28	30	30 Orang	40 Orang	
4	Jumlah prestasi pemuda dalam kejuaraan olahraga	Medali/Juara	127 Medali/Juara	127 Medali/Juara	147 Medali/Juara	147 Medali/Juara	169 Medali/Juara	
5	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	Jumlah	408	408	411	411	413	
6	Jumlah Kegiatan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah (SMA/SMK)	3 Sekolah (SMA/SMK)	3 Sekolah (SMA/SMK)	3 Sekolah (SMA/SMK)	4 Sekolah (SMA/SMK)	5 Sekolah (SMA/SMK)	
7	Jumlah dokumen terkait kebijakan kepemudaan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	n/a	-	1 Dokumen	
8	Jumlah organisasi dan tenaga keolahragaan yang dibina	Organisasi dan orang	1 Dokumen	1 Dokumen	n/a			
<b>20.</b>	<b>Stastitik</b>							
1	Presentase data statistik terintegrasi	Persen (%)	n/a	100	70	100	100	Bappeda



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
2	Dokumen data-data statistik	dokumen/tahun	24	24	24	24	24	
21.	Persandian							
21.	Persentase Pemanfaatan Sandi Daerah	%	n/a	n/a	n/a	100	100	
22.	Kebudayaan							Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal	%	3	3	5	5	10	
2	Presentase peningkatan festival dan event kebudayaan	Persen (%)	10	10	13	13	14	
3	Persentase cagar budaya yang sudah dikelola	Persen (%)	3	3	5	5	10	
4	Jumlah kerjasama pengelolaan kekayaan budaya yang terealisasi	Jumlah kerjasama		n/a	n/a	0	0	
5	Nilai budaya yang telah dikembangkan	kegiatan	0	0	0	0	1	
23.	Perpustakaan							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1	Jumlah koleksi bahan pustaka	eksemplar	25.125	n/a	n/a	1500	1600	
2	Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	kunjungan	n/a	n/a	n/a	9.200	9.300	
24.	Kearsipan							Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	83	86	
2	Dokumen/arsip daerah yang dapat diselamatkan	OPD	n/a	n/a	n/a	10	10	
3	Sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara	Kotak	n/a	n/a	n/a	80	80	
4	Jumlah Dokumen Hasil Olahan hasil Arsip Daerah	Dok	0	0	0	1	1	
URUSAN PILIHAN								Dinas Kelautan dan Perikanan
25.	Kelautan dan Perikanan							
1	Produksi Perikanan Tangkap	ton	31.037,92	31.037.92	31.037.92	31.037,92 Ton	32.605,33	
2	Produksi Perikanan Budidaya	ton	27.361,49	27.361.49	28.729.56	28.729,56	28.756,92	
3	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen (%)	-	-	-	5	6	
4	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	401,89	401.89	421.98	421,98	443,08	
5	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Sosialisasi	Persen (%) Per Tahun	-	-	-	5	6	
6	Jumlah Pokmaswas Yang Terbentuk	Kelompok	-	-	-	3	4	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
7	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Penyuluhan	Persen (%) Per Tahun	-	-	-	5	6	
8	Dokumen Perencanaan Program	Dokumen Per Tahun	-	-	-	2	2	
9	Persentase Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Dibantu	Persen (%)	-	-	-	5	6	
<b>26.</b>	<b>Pariwisata</b>							
1	Lama kunjungan Wisata	hari	2	2	2	2	3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	100.104	100.104	100.104	110.114	123.328	
3	Jumlah Desa Wisata	Desa	-	-	-	-	-	
4	Sistem Informasi Kepariwisataan	Unit	1	1	1	1	1	
5	Pertumbuhan Jumlah Kamar	%	n/a	n/a	n/a	2	2	
6	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Orang	n/a	n/a	n/a	95	100	
<b>27.</b>	<b>Pertanian</b>							
1	Jumlah Produksi komoditas tanaman pangan	Ton	792721	792721	792721	793117	793514	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Jumlah Produksi Komoditas Holtikultura	Ton	95476	95476	95476	95524	95571	
3	Produksi komoditas perkebunan	ton	795635	795635	795635	811507	827701	
4	Jumlah Produk Olahan Hasil Pertanian/ Perkebunan	Produk	0	0	0	1	2	
5	Produksi daging	Ton	8487	8487	8487	8668	8737	
6	Produksi Telur	Ton	10577	10577	10577	10897	11061	
7	Angka kejadian penyakit ternak	Kasus	14841	14841	14841	14544	14253	
8	Angka Kematian Ternak	Kasus	158374	158374	158374	155269	154493	
9	Jumlah Populasi Ternak Sapi	Ekor	201.193	201.193	201.193	207.217	213.434	
10	Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras	Ekor	1.324.604	1.324.604	1.324.604	1.324.604	1.364.342	
11	Jumlah Produk Olahan Hasil Peternakan	Produk	0	0	0	1	1	
12	Jumlah Kelompok Tani/ Petani yang Mendapatkan Pelatihan Usaha Agribisnis	Kelompok Tani/ Petani	30	30	30	30	30	
13	Produktivitas :							



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
	Padi (Kw/ha)	Kw/Ha	63,45	63.45	63.45	58,491	58,782	
	Jagung (Kw/Ha)	Kw/Ha	73,52	73.52	73.52	66,66165	66,9933	
	Kelapa Sawit (Ton/Ha/Th)	Ton/Ha/Th	18,18	18.18	18.18	18,9072	19,2708	
	Karet (Ton/Ha/Th	Ton/Ha/Th	1,04	1.04	1.04	1,0816	1,1024	
	Kakao (ton/Ha/th)	Ton/Ha/Th	1,15	1.15	1.15	1,196	1,219	
	Kelapa (ton/Ha/th)	Ton/Ha/Th	1,14	1.14	1.14	1,1856	1,2084	
14	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan	Orang	177	177	177	177	177	
15	Terlaksananya pelatihan kelompok tani calon mitra usaha/pengurus gapoktan	Kelompok/ Petani	0	0	0	150	150	
28.	Perdagangan							
1	Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri	Produk	15 Produk	15 Produk	25 Produk	15 Produk	25 Produk	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan dikelola secara modern	Pasar	0	0	0	0	0	
3	Jumlah kelompok pedagang Kaki lima dan Asongan yang dibina	Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	2 Kelompok	
4	Jumlah pasar tertib ukur	Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	2 Pasar	
5	Tingkat lonjakan harga barang pokok	%	0	0	-0.28%	5%	5%	
6	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	%	0	0	10%	5%	10%	
29.	Perindustrian							
1	Jumlah IKM	IKM	3347	3347	3547	3447	3547	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Tingkat Pertumbuhan Kebaruan Produk IKM	Persen (%)	0	0	0	3	5	
3	Jumlah Pengembangan Sentra Industri	Sentra	1	1	1	1	2	
4	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	200	200	220	210	220	
PENUNJANG URUSAN								
30.	Kepegawaian							
1	Percepatan durasi penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan akurat	hari	n/a	21	20	21	20	BKD



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
2	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM Per Tahun	Pegawai	n/a	2	2	2	2	
<b>31.</b>	<b>Pengawasan</b>							
1	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Inspektorat
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	2	2	3	3	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Temuan (Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi)	Persen (%)	78,4	78.4	78.4	80	82	
4	Persentase Peningkatan Kompetensi Penjenjangan APIP	Persen (%)	10	10	10	11	12	
<b>32.</b>	<b>Perizinan Terpadu</b>							
1	Rata-rata Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Hari	15	15	15	15	15	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
2	Sistem Informasi Perizinan	Unit	1	1	1	1	1	
3	Persentase realisasi retribusi perizinan	Persen (%)	65	65	65	75	80	
4	Persentase laporan/pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	
<b>33.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							
1	Persentase konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	100	100	100	100	100	Bappeda
2	Persentase cakupan aspirasi Musrenbang Kabupaten dalam e-musrenbang	%	100	100	100	100	100	
3	Persentase Konsistensi RENSTRA SKPD dengan dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100	
4	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	dok	5	5	5	5	5	
5	Jumlah dokumen perencanaan sosbud	dok	1	1	1	0	1	
6	Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	dok		n/a	n/a			
7	Jumlah dokumen pengarusutamaan gender dan anak	dok	0	1	1	1	1	
8	Sistem Database Pembangunan Yang Terbaharui	unit	1	2	2	2	2	
<b>34.</b>	<b>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>							
1	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Keuangannya Selesai Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	BPKAD





No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
2	Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Asset/Barang Daerahnya Diterbitkan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	
3	Persentase Laporan Perangkat Daerah Capaian Kinerjanya Terbit Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	
<b>35.</b>	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>							
1	Persentase Piutang Pajak dan Retribusi yang terselesaikan	Persen (%)	n/a	80	80	80	84	Badan Pendapatan Daerah
2	Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak	Persen (%)	n/a	3	3	3	3,25	
3	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi	Persen (%)	13,18	13.18	13	20	27	
<b>36.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>							
1	Jumlah kebijakan pendukung kelitbangan daerah	Perbup	0	2	2	2	2	Bappeda
2	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen (%)	n/a	20	20	20	40	
<b>37.</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>							
1	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh DPRD	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	100	100	Sekretariat DPRD
2	Cakupan peraturan daerah yang dapat diakses secara online	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	100	100	
3	Cakupan kegiatan DPRD yang terpublikasi	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	100	100	
<b>38.</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>							
1	Unit Khusus Penangana Pengaduan Masyarakat yang terbentuk	Unit	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2	Cakupan peraturan kepala daerah yang dapat diakses secara online	%	100	100	100	100	100	
3	Jumlah kelompok Petani yang dibina	Unit	2	2	2	2	2	
4	Persentase Layanan Kedinasan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	
5	Jumlah kegiatan yang terdokumentasi	Kegiatan	200	200	250	250	250	
6	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	
7	Jumlah Festival, dan event keagamaan	Kegiatan	14	14	14	14	14	
8	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pamsimas	Orang	-	-	-	100	100	
9	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan antar pemerintah	MoU	10	10	10	10	10	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
	daerah							
10	Jumlah Dokumen Kajian Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Dokumen	2	2	2	2	2	
11	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	Dokumen	1	1	1	1	1	
12	Jumlah tim yang terbentuk	Tim	3	3	3	3	3	
13	Jumlah Pameran yang dilaksanakan dalam peningkatan promosi dan investasi	Kegiatan	2	2	2	2	2	
14	Persentase peningkatan harga barang pokok yang tersubsidi	%	-	-	-	10	10	
15	Jumlah masyarakat yang terbina	Orang	-	-	-	200	200	
16	Tingkat realisasi Sasaran Kinerja ASN	%	100	100	100	100	100	
<b>39.</b>	<b>Kewilayahan</b>							
1	Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	%	n/a	40	40	40	45	23 Kecamatan
2	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	Kegiatan Per Tahun	n/a	3	3	3	3	
3	Persentase peningkatan jumlah kegiatan organisasi pemuda	Persen (%)	n/a	10	10	10	10	
4	Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di kelurahan	Persen (%)	n/a	20	20	20	25	
5	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kegiatan	n/a	100	100	100	100	
6	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan Dana Desa	Persen (%)	n/a	100	55.56	100	100	
7	Persentase cakupan aspirasi Musrenbang Kecamatan dalam e-musrenbang	Persen (%)	n/a	100	65	100	100	

Sumber : Bappeda Kabupaten Langkat Tahun 2020 (Data diolah)

## **2.3 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Dalam perencanaan pembangunan daerah menggunakan analisis trend untuk melihat dan menentukan kinerja program dan kegiatan pemerintah daerah sehingga dapat menganalisis permasalahan pembangunan dan isu strategis dalam perencanaan pembangunan daerah di masa yang akan datang.

### **2.3.1. Permasalahan Daerah yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Berdasarkan gambaran umum dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2019 terdapat beberapa permasalahan dan tantangan yang perlu ditingkatkan. Secara umum permasalahan penyelenggaraan pemerintahana yang dihadapi adalah:

1. Belum optimalnya program pembangunan kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh belum meratanya sarana dan prasarana Pendidikan sehingga menjadi salah satu yang berkontribusi pada tingginya persentase penduduk yang tidak memenuhi wajib belajar 9 tahun dan angka partisipasi sekolah yang rendah.
2. Tingkat kesejahteraan masyarakat relatif masih rendah yang digambarkan melalui rendahnya pendapatan per kapita, tingginya angka kemiskinan, dan pertumbuhan ekonomi yang stagnan.
3. Cakupan sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pendekatan penanganan masalah sosial yang hanya bersifat rutinitas, sehingga penanganan PMKS belum optimal dan belum berkelanjutan.
4. Masih dominannya sektor padat modal sehingga penyerapan tenaga kerja belum maksimal.
5. Kurangnya fasilitas dan kualitas prasarana di obyek wisata sehingga pengembangan sektor pariwisata cenderung lambat.
6. Belum optimalnya penyediaan barang publik yang mengindikasikan pada belum maksimalnya tata kelola pemerintahan yang ada.

### **2.3.2. Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

1. Pendidikan
  - a. Masih tingginya angka anak putus sekolah di Kabupaten Langkat.
  - b. Tingginya persentase penduduk yang belum memenuhi wajib belajar 9 tahun.
  - c. Masih terdapat sarana dan prasarana yang belum sesuai standar.
  - d. Kualitas SDM pendidik dan tenaga kependidikan yang belum kompeten.
2. Kesehatan



- a. Masih adanya balita dengan kondisi gizi kurang baik.
- b. Pelayanan kesehatan belum sesuai standar.
- c. Rumah Sakit Umum Daerah belum dapat sepenuhnya menangani keluhan kesehatan yang ada.
- d. Kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hidup sehat.
3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
  - a. Pelaksanaan program kegiatan dalam skala besar belum sepenuhnya terintegrasi dan berkelanjutan karena cenderung menggunakan system anggaran tahun tunggal.
  - b. Perencanaan kegiatan belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten sehingga banyak pelaksanaan kegiatan fisik tertunda.
  - c. Terdapat kegiatan pembangunan di Kabupaten Langkat yang peruntukannya tidak sesuai dengan RTRW dan kegiatan yang belum teridentifikasi dalam Perda RTRW kabupaten Langkat.
4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
  - a. Pembangunan infrastruktur sanitasi komunal sering mengalami hambatan dalam penyediaan lahan masyarakat.
  - b. Perencanaan dan pelaksanaan program kegiatan peningkatan infrastruktur permukiman belum sinkron dan terintegrasi sehingga kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak dan hasil yang kurang signifikan.
5. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
  - a. Belum optimalnya sumber daya manusia dalam penanggulangan tindak darurat bencana.
  - b. Belum optimalnya penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dan perlindungan masyarakat.
6. Sosial
  - a. Cakupan sasaran penyandang masalah kesejahteraan sosial dan pendekatan penanganan masalah sosial yang hanya bersifat rutinitas, sehingga penanganan PMKS belum optimal dan belum berkelanjutan.
7. Tenaga Kerja
  - a. Tingkat pengangguran masih cukup tinggi.
  - b. Banyaknya tenaga kerja dengan tingkat Pendidikan rendah.
  - c. Rendahnya kualitas dan kompetensi tenaga kerja sehingga sulit terserap ke dalam pasar kerja.
8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  - a. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan.



- b. Belum semua pemangku kepentingan memahami pengarusutamaan gender sebagai strategi pembangunan.
- 9. Administrasi dan Catatan Sipil
  - a. Kurangnya sarana dan prasarana perekaman administrasi kependudukan dan pencatatan sipil sehingga pelayanan public kurang optimal.
- 10. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
  - a. Belum optimalnya pengembangan Kawasan unggulan pedesaan dan pemanfaatan dana desa.
  - b. Belum optimalnya fungsi kelembagaan pemberdayaan masyarakat desa.
- 11. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
  - a. Perlu adanya revitalisasi program dan kegiatan KB serta perencanaan program kegiatan yang lebih terintergrasi.
- 12. Perhubungan
  - a. Terbatasnya kualitas dan kuantitas angkutan umum sehingga masyarakat masih memilih menggunakan kendaraan pribadi.
  - b. Terbatasnya rute yang dapat digunakan oleh pengguna angkutan barang sehingga terjadi kepadatan pada ruang jalan terutama sekitar jembatan.
  - c. Sistem dan tata kelola penyelenggaraan moda transportasi yang belum terpadu dan pengelolaan parkir yang belum jelas.
- 13. Komunikasi dan Informatika
  - a. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur permohonan informasi dan dokumentasi melalui PPID.
  - b. Kurangnya SDM yang menguasai bidang statistik dan pemrograman.
- 14. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
  - a. Belum optimalnya pengelolaan koperasi yang dijalankan oleh pengurus karena kurangnya pemahaman tentang manajemen kelembagaan, manajemen usaha, maupun manajemen keuangan koperasi.
  - b. Kurangnya dorongan terhadap pelaku UMKM dalam hal manajemen serta kemitraan dengan pengusaha besar.
- 15. Penanaman Modal
  - a. Masih panjangnya birokrasi perijinan karena regulasi sectoral yang mengharuskan adanya persyaratan teknis sesuai bidangnya.
  - b. Rendahnya nilai investasi yang ada karena belum bisa memanfaatkan potensi daerah yang dapat ditawarkan.
  - c. Belum ada regulasi tentang kemudahan berinvestasi.



- d. Kajian tentang potensi daerah masih kurang sehingga belum dapat menghasilkan perencanaan yang bisa meningkatkan daya jual.
- 16. Kepemudaan dan Olah Raga
  - a. Kurangnya pendanaan dari pemerintah dan masyarakat sehingga terjadi penurunan keikutsertaan olahragawan dalam kejuaraan tingkat nasional dan internasional.
  - b. Keterbatasan faktor pendukung lainnya yang menjadi hambatan dalam pengembangan potensi olahragawan.
- 17. Statistik
  - a. Kurangnya SDM yang menguasai bidang statistic serta mengerti kaidah pengumpulan data secara mandiri.
  - b. Beberapa data yang dibutuhkan belum tersedia.
- 18. Kebudayaan
  - a. Kurangnya minat dan kepedulian masyarakat terhadap seni budaya tradisional.
- 19. Kearsipan dan Perpustakaan
  - a. Rendahnya minat baca masyarakat.
  - b. Minimnya sarana dan prasarana perpustakaan.
  - c. Belum tersedianya pengelola arsip yang terampil pada masing-masing OPD.
- 20. Kelautan dan Perikanan
  - a. Belum optimalnya produksi hasil tangkapan ikan.
  - b. Belum tersedia tempat pelelangan ikan yang representatif.
- 21. Pariwisata
  - a. Kurangnya fasilitas dan kualitas prasaran di obyek wisata.
  - b. Kurangnya promosi parawisata serta kurangnya koordinasi antar asosiasi pelaku pariwisata.
  - c. Kurangnya informasi dan petunjuk jalan menuju objek wisata.
  - d. Pengelolaan obyek wisata belum bersifat komersil sehingga belum dapat mencapai potensi yang seharusnya.
- 22. Pertanian
  - a. Rendahnya produktivitas sektor pertanian.
  - b. Terbatasnya kemampuan petani dalam penawaran produk yang dihasilkan.
  - c. Tingginya alih fungsi lahan.
- 23. Perdagangan
  - a. Lemahnya kegiatan promosi produk dan rendahnya daya saing produk lokal.
  - b. Kurangnya pemanfaatan sarana dan prasarana pasar yang ada.

c. Aksesibilitas dan distribusi barang yang belum optimal.

24. Perindustrian

a. Hilirisasi industri dan industri yang memiliki nilai tambah belum ada.

### 2.3.3. Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Berdasarkan Permasalahan diatas, maka isu strategis Kabupaten Langkat Tahun 2021 adalah sebagai berikut

1. *Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*

Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pendidikan di Kabupaten Langkat berkaitan dengan rendahnya nilai IPM pada dimensi pendidikan. Rendahnya nilai IPM pada dimensi pendidikan disebabkan oleh rata-rata lama sekolah (RLS) yang pada tahun 2018 berada pada angka 8,52 tahun. Rendahnya angka rata-rata lama sekolah terkait dengan kurangnya partisipasi penduduk dalam pendidikan dasar, APM SMP/MTs di Kabupaten Langkat mencapai 78,61. Selain itu, masih terdapat anak putus sekolah atau tidak melanjutkan sekolah pada tingkat SD/MI dan SMP/MTs. Pelayanan pendidikan di Kabupaten Langkat juga belum optimal yang disebabkan oleh rendahnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik maupun sarana dan prasarana pendidikan yang belum memadai.

Partisipasi penduduk dalam dunia pendidikan juga diperburuk dengan tingkat literasi penduduk dan pengetahuan kebudayaan lokal. Masih diperlukan peningkatan pengetahuan masyarakat melalui peningkatan budaya baca dan pelestarian kebudayaan. Tingkat kunjungan perpustakaan di Kabupaten Langkat masih rendah. Rendahnya budaya baca masyarakat juga diakibatkan oleh sarana dan prasarana perpustakaan kurang memadai. Pengetahuan masyarakat terhadap budaya lokal di Kabupaten Langkat juga berkaitan dengan pelestarian budaya yang belum optimal.

Isu partisipasi sekolah rendah akan berakibat pada rendahnya kualitas SDM masyarakat Kab. Langkat dan juga berhubungan dengan potensi permasalahan lainnya. Pada saat ini Kabupaten Langkat memiliki keunggulan karena memiliki potensi pariwisata yang kemudian didukung dengan penetapan KSPN Tangkahan dan sekitarnya serta KPPN Bukit Lawang. Potensi ini akan memberikan dampak ekonomi yang perlu dimanfaatkan dengan penyiapan SDM penduduk. Tingginya angka putus sekolah dan rendahnya partisipasi pendidikan penduduk menyebabkan kualitas tenaga kerja yang rendah dan minimnya partisipasi penduduk dalam kegiatan ekonomi. Hal ini mengakibatkan tingginya tingkat pengangguran, kriminalitas, dan penggunaan NAPZA. Selain itu, hal ini juga mengakibatkan rendahnya partisipasi penduduk usia remaja (pemuda) dalam berwirausaha dan berprestasi dalam kepemudaan maupun bidang olahraga.

2. *Rendahnya Kualitas Kesehatan Masyarakat*

Rendahnya kualitas kesehatan masyarakat ditunjukkan oleh rendahnya Angka Harapan Hidup (AHH). Pada tahun 2018 AHH Kab. Langkat mencapai angka 68,22 dan berada di bawah AHH Provinsi Sumatera Utara. Persoalan ini juga terkait dengan nilai AKI dan AKB masih tinggi, prevalensi gizi buruk, dan masih adanya ancaman penyakit. Dari segi pola hidup masyarakat, masih terdapat persoalan perilaku sebagian masyarakat untuk hidup bersih dan sehat masih kurang karena layanan sanitasi dan air bersih yang belum memadai. Kualitas kesehatan penduduk di Kabupaten Langkat juga berhubungan dengan belum memadainya sarana prasarana kesehatan dan juga tenaga medis. Pelayanan kesehatan juga belum sepenuhnya mencakupi penduduk miskin. Selain persoalan taraf kesehatan penduduk, masih terdapat persoalan terkait pertumbuhan penduduk yang belum optimal pengendaliannya. Belum seluruh masyarakat mengikuti program keluarga berencana.

3. *Belum Optimalnya Partisipasi Masyarakat dalam Pengentasan Permasalahan Sosial, Penciptaan Ketentraman dan Ketertiban, dan Pelestarian Budaya*

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Langkat semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Kemiskinan di Kabupaten Langkat tidak hanya berkaitan dengan masalah ekonomi, tetapi juga menjadi penyebab utama permasalahan sosial di Kabupaten Langkat. Permasalahan sosial di Kabupaten Langkat masih cukup tinggi yang ditunjukkan dengan jumlah PMKS pada tahun 2018 mencapai angka 193.050. Kontributor tertinggi penyebab tingginya jumlah PMKS di Kabupaten Langkat ialah jumlah fakir miskin yang meningkat sebesar 500 ribu



jiwa. Peningkatan lainnya ialah pada korban bencana alam dan masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana. Tingginya angka PMKS juga diakibatkan oleh belum optimalnya pembinaan dan pemberdayaan PMKS. Selain itu potensi dan sumber kesejahteraan sosial juga belum dimanfaatkan untuk menanggulangi permasalahan sosial. Selain itu, kegiatan pelayanan rehabilitasi kesejahteraan sosial masih terbatas.

Permasalahan sosial lainnya di Kabupaten Langkat ialah penyalahgunaan NAPZA yang sangat berpotensi pada peningkatan kriminalitas di lingkungan. Permasalahan kemiskinan dan sosial di Kabupaten Langkat juga menciptakan adanya konflik sosial dan rendahnya tingkat keamanan. Belum intensifnya kegiatan keagamaan dan kebudayaan di Kabupaten Langkat dapat memicu gangguan ketentraman dan ketertiban. Persoalan ini muncul akibat belum intensifnya pemberdayaan terhadap forum komunitas nelayan, forum komunitas dan kerukunan umat beragama, dan komunitas lokal lainnya. Pengentasan permasalahan sosial di Kabupaten Langkat memerlukan tingkat partisipasi yang tinggi dari masyarakat agar masalah-masalah tersebut dapat diselesaikan dalam skala lingkungan.

Terdapat pula permasalahan terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Indeks Pembangunan Gender di Kabupaten Langkat pada tahun 2018 ialah sebesar 68 poin. Partisipasi angkatan kerja perempuan di Kabupaten Langkat pada tahun 2018 mencapai 56,89 persen. Sedangkan dalam hal kekerasan dalam rumah tangga, rasio KDRT per 1.000 Rumah Tangga pada tahun 2017 mencapai 6,88.

4. *Belum Optimalnya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan SDA dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*

Kemiskinan di Kabupaten Langkat tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat namun juga akses masyarakat terhadap pemanfaatan sumber daya alam dan sarana prasarana dasar terutama di level desa. Pemerintahan desa dengan adanya UU Desa No. 6 Tahun 2014 menciptakan kewenangan pemerintah desa yang luas untuk melakukan pembangunan desa di bidang fisik, ekonomi, dan sosial. Namun, di Kabupaten Langkat pemberdayaan desa belum optimal dilakukan terutama untuk pengurangan kemiskinan dan ketimpangan wilayah. Di tahun 2018 Kabupaten Langkat masih memiliki desa tertinggal dan masih sedikit yang merupakan desa mandiri. Belum mandirinya desa diakibatkan oleh kurangnya pemberdayaan masyarakat dan

pemerintahan desa dalam pembangunan pengelolaan SDA dan lingkungan serta pembangunan fisik dan sosial di tingkat desa.

Persoalaan penbgelolaan SDA di Kabupaten Langkat juga berkaitan dengan penciptaan lingkungan hidup yang berkelanjutan. Karakteristik fisik wilayah Kabupaten Langkat yang yang terletak di kawasan pesisir dan juga merupakan memiliki kawasan konservasi menyebabkan pembangunan di wilayah ini tidak hanya harus berkelanjutan secara ekonomi, namun juga secara sosial dan lingkungan. Di Kabupaten Langkat juga terjadi penurunan tingkat kualitas lingkungan. Hal ini disebabkan oleh alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, dan kerusakan pada kawasan konservasi. Pengawasan terhadap kerusakan lingkungan belum optimal akibat belum memadainya infrastruktur dan fasilitas untuk penanganan penurunan kualitas lingkungan hidup serta belum optimalnya pengendalian pemanfaatan ruang.

Kabupaten Langkat juga memiliki tingkat resiko bencana banjir yang cukup tinggi karena terletak di wilayah sungai yang cukup besar. Tingginya tingkat resiko bencana banjir ini juga didukung dengan belum memadainya jaringan drainase sekunder dan tersier dan tidak tertatanya kawasan sempadan sungai. Kerentanan wilayah di Kabupaten Langkat juga cukup tinggi karena belum tertatanya kawasan permukiman dan pertanian di lokasi rawan bencana serta belum optimalnya kapasitas daerah untuk penanggulangan bencana belum tertatanya kawasan pertanian di lokasi rawan bencana.

5. *Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Berbasis SDA Terutama Pariwisata untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing Ekonomi Wilayah*

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Langkat mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh kecenderungan penurunan laju pertumbuhan ekonomi tahun dari tahun 2014 ke tahun 2018. Pada tahun 2018 LPE Kab. Langkat mencapai angka 5.02% dan berada di bawah LPE Sumatera Utara. Kondisi ini tidak sejalan dengan potensi ekonomi Kabupaten Langkat yang memiliki potensi SDA yang tinggi dan ditetapkan sebagai kawasan strategis pariwisata nasional. Potensi ekonomi wilayah terutama dalam sektor pariwisata dan pertanian masih belum dimanfaatkan secara optimal. Bahkan kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB belum signifikan.

Kondisi ekonomi makro tersebut sangat bertolakbelakang dengan potensi SDA yang dimiliki oleh Kabupaten Langkat. Meskipun mengalami peningkatan,



pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Langkat belum berkembang secara signifikan dan mengalami beberapa persoalan. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Langkat mengalami penurunan produktivitas yang diakibatkan oleh penurunan produksi komoditas dan alih fungsi lahan pertanian produktif. Persoalan lainnya ialah diakibatkan kurangnya daya saing komoditas perikanan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Langkat merupakan wilayah pesisir yang memiliki posisi strategis dengan menghadap Selat Malaka. Potensi ini belum dimanfaatkan dan menciptakan daya saing ekonomi maupun kesejahteraan untuk nelayan. Hal ini diakibatkan oleh belum optimalnya infrastruktur pendukung perikanan dan rendahnya penciptaan nilai tambah komoditas perikanan.

Penurunan produktivitas pertanian dan perikanan di Kabupaten juga berhubungan dengan isu ketahanan pangan. Di Kabupaten Langkat, penyerapan pangan masih belum optimal dan tingkat konsumsi pangan masih cukup rendah. Penyerapan pangan berhubungan dengan persoalan distribusi pangan antar wilayah tidak merata, belum optimalnya pencadangan pangan, dan belum memadainya sarana distribusi pangan. Hal yang sama juga terjadi pada subsektor peternakan yang mengalami penurunan produktivitas karena kualitas produksi komoditas yang menurun. Penurunan kualitas produksi komoditas peternakan terjadi karena belum optimalnya penanganan terhadap penyakit ternak dan belum optimalnya kelembagaan peternakan. Kabupaten Langkat juga memiliki kawasan perkebunan yang cukup luas. Namun, komoditas perkebunan masih belum memiliki daya saing akibat mutu benih yang rendah dan kualitas komoditas yang belum tersertifikasi untuk masuk ke dalam rantai industri.

Perekonomian di Kabupaten Langkat yang belum berkembang pesat juga berhubungan dengan tingkat kemiskinan penduduk. Pengembangan ekonomi di Kabupaten Langkat belum cukup signifikan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan penduduk. Masih terdapat penduduk yang menganggur dan belum terserap dalam pasar kerja lokal. Persoalan pengangguran di Kabupaten Langkat diakibatkan oleh rendahnya partisipasi angkatan kerja, rendahnya perluasan kesempatan kerja, rendahnya kualitas tenaga kerja dan belum terserapnya tenaga kerja lokal pada perusahaan di Langkat.

Rendahnya kualitas SDM di Kabupaten Langkat meningkatkan kebutuhan terhadap strategi ekonomi yang tidak mengandalkan penyerapan kerja secara besar-besaran. Dibutuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan

ekonomi kreatif, meskipun pada saat ini belum berkembang optimal. Rendahnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan wirausahawan baru, UMKM dan industri kecil yang lambat yang seharusnya dapat memperluas kesempatan kerja. Selain itu, pemanfaatan BUMDesa dan koperasi untuk pengembangan ekonomi juga belum optimal.

Kabupaten Langkat memiliki keunggulan wilayah secara absolut dan komparatif karena potensi sumber daya alamnya. Namun, dibutuhkan pengembangan ekonomi, SDM, dan infrastruktur untuk menciptakan daya saing kompetitif. Selain itu, dibutuhkan pula penciptaan iklim investasi yang kondusif terutama dalam pengembangan pariwisata. Pertumbuhan investasi di Kabupaten Langkat belum signifikan diakibatkan oleh rendahnya iklim investasi daerah akibat regulasi dan sistem perizinan yang belum mendukung dan kurangnya promosi investasi. Belum terdapat juga rencana tata ruang yang lebih operasional dan mekanisme insentif untuk mendukung investasi ekonomi masuk ke Kabupaten Langkat. Rendahnya investasi yang masuk dan pertumbuhan sektor tersier di Kabupaten Langkat juga mengakibatkan rendahnya pendapatan daerah sehingga mengakibatkan rendahnya rasio kemandirian fiskal Kabupaten Langkat yang mengakibatkan pemerintah juga memiliki kemampuan yang rendah untuk membiayai pembangunan dan masih bergantung pada pemerintah pusat.

6. *Rendahnya kinerja Infrastruktur dan Penataan Ruang Untuk Mendukung Ekonomi dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan*

Pertumbuhan ekonomi wilayah Kabupaten Langkat yang belum signifikan juga dipengaruhi juga oleh rendahnya kinerja infrastruktur di Kabupaten Langkat. Konektivitas wilayah di Kabupaten Langkat masih cukup rendah yang ditunjukkan dengan lambatnya penambahan panjang jalan di Kabupaten Langkat dan banyaknya jaringan jalan dalam kondisi rusak. Konektivitas antar desa juga masih rendah akibat minimnya pengembangan jalan baru. Konektivitas wilayah di Kabupaten Langkat juga berkaitan dengan minimnya pelayanan angkutan umum di Kabupaten Langkat. Belum seluruh wilayah di Kabupaten Langkat terlayani oleh angkutan umum dan terintegrasi. Kondisi ini mempersulit pengembangan pariwisata di Kabupaten Langkat karena aksesibilitas ke daya tarik wisata yang sulit.

Penataan ruang di Kabupaten Langkat juga belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pembangunan wilayah terjadi karena fokus pembangunan masih terpusat di beberapa lokasi. Akibatnya pengembangan

ekonomi terutama untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan belum dapat tercipta akibat pemanfaatan ruang yang belum merata dan sesuai dengan tujuan penataan ruang.

Aksesibilitas penduduk terhadap layanan sarana prasarana dasar terutama permukiman masih rendah. Kinerja infrastruktur permukiman seperti layanan air bersih, sanitasi, dan persampahan di Kabupaten Langkat belum mencakup seluruh wilayah. Pemanfaatan peran desa dan komunitas di lingkungan perumahan belum optimal untuk melakukan pengelolaan infrastruktur tersebut. Selain itu, masih banyak terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Langkat terutama di perdesaan. Persoalan ini tidak hanya mengakibatkan munculnya kawasan kumuh, tetapi juga menurunkan kualitas kesehatan yang berdampak pada kesejahteraan penduduk.

7. *Belum terciptanya sistem tata kelola Pemerintahan yang baik (Good Governance) dan bersih (Clean Government)*

Pemerintahan yang baik dan bersih (good and clean governance) merupakan isu global yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Terkait hal itu, pemerintah pusat juga telah mengeluarkan kebijakan nasional terkait reformasi birokrasi. Kondisi eksisting di Kabupaten Langkat, penyelenggaraan reformasi birokrasi untuk mendukung penciptaan good and clean governance masih belum optimal. Pencapaian sasaran reformasi birokrasi di Kabupaten Langkat belum terwujud. Penilaian BPK terhadap akuntabilitas keuangan di Kab. Langkat masih rendah (WDP). Penilaian akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam evaluasi AKIP masih mendapatkan nilai rendah, yaitu CC. Selain itu pelayanan publik masih belum optimal dan masih banyak terjadinya kasus korupsi. Partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Langkat juga belum optimal. Dalam perencanaan pembangunan di tingkat kecamatan dan kabupaten masih rendah.

Permasalahan penilaian BPK yang masih rendah diakibatkan akuntabilitas keuangan pemerintah yang masih buruk. Sedangkan penilaian akuntabilitas dan transparansi kinerja pemerintah juga memiliki nilai rendah akibat sistem perencanaan dan pelaporan yang masih kurang baik. Rendahnya pelayanan publik di Kabupaten Langkat disebabkan ditunjukkan dengan adanya beberapa permasalahan seperti masih rendahnya indeks profesionalitas ASN dalam pelayanan publik, rendahnya kompetensi pegawai pemerintahan, belum memadainya sarana prasarana pelayanan publik, dan rendahnya pemanfaatan

sistem informasi teknologi untuk pelayanan publik. Rendahnya pelayanan publik di Kabupaten Langkat juga belum didukung oleh sistem pengarsipan yang baik.

Pada saat ini, kebutuhan terhadap penyelenggaraan tata kelola pemerintahan berbasis inovasi dan kelitbangan semakin meningkat. Penelitian dan pengembangan di Kabupaten Langkat juga dibutuhkan untuk inovasi dalam tata kelola pemerintahan yang saat ini belum mencapai prinsip good governance. Kebijakan daerah di Kabupaten Langkat belum sepenuhnya didukung oleh kajian kelitbangan sehingga pendekatan research-based policy belum sepenuhnya dilakukan. Kondisi ini juga disebabkan oleh belum adanya kebijakan yang mendukung sistem inovasi dan kelitbangan daerah di Kabupaten Langkat. Inovasi dan kelitbangan di Kabupaten Langkat juga dibutuhkan untuk penciptaan daya saing ekonomi di Kabupaten Langkat. Pada saat ini, produk ekonomi Kabupaten Langkat belum memiliki nilai tambah yang cukup tinggi.

8. *Belum Terintegrasinya Sistem Informasi Teknologi untuk Meningkatkan Pelayanan Publik*

Perkembangan global dan kebijakan nasional telah mewajibkan dilaksanakannya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik berbasis sistem informasi teknologi. Regulasi pada tingkat nasional juga telah mengamanatkan adanya keterbukaan informasi publik dan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Pada saat ini, pemanfaatan sistem informasi teknologi di Kabupaten Langkat masih belum optimal dan menciptakan performas pelayanan publik yang rendah. Sistem informasi teknologi dan pusat data di tingkat pemerintahan kabupaten belum terintegrasi. Pada level kecamatan dan desa, pelayanan publik juga belum berbasis SIT. Hal ini disebabkan belum terjangkaunya seluruh wilayah oleh jaringan telekomunikasi dan internet. Selain itu, sarana dan prasarana sistem informasi berbasis teknologi di level kecamatan dan desa belum memadai.

Pemerintah Kabupaten Langkat juga belum optimal dalam menyelenggarakan SPB. Kabupaten Langkat belum memiliki sistem layanan informasi maupun pengaduan bagi masyarakat. Hal ini juga mengakibatkan partisipasi dari masyarakat menjadi rendah dalam pembangunan dan penyelenggaraan pemerinatahan. Pelayanan terhadap masyarakat juga masih belum optimalnya basis data kependudukan dan pembangunan yang belum terintegrasi. Saat ini Kabupaten Langkat belum memiliki pusat data terintegrasi dan sarana dan prasarana serta SDM dengan kompetensi TIK yang mencukupi.

#### 9. *Permasalahan Pandemi Covid-19*

Permasalahan pandemi covid-19 sudah menjadi isu nasional, sehingga permasalahan ini juga menjadi isu strategis kabupaten. Berdasarkan Hasil Laporan Perekonomian Provinsi Sumatera Utara bulan Mei 2020 oleh Bank Indonesia, Meluasnya Pandemi Covid-19 memberikan tantangan yang besar terhadap perekonomian Sumatera Utara. Meski demikian tekanan harga diperkirakan akan sedikit meningkat 2020 didorong oleh kenaikan cukai, ketetapan subsidi listrik untuk pelanggan tertentu, serta tren kenaikan harga emas ditengah ketidakpastian tinggi akibat Covi-19. Menyikapi hal, ini Tim pengenalan Inflasi Daerah terus melakukan berbagai upaya melalui 4K (Ketersediaan, Kelancaran Distribusi, Keterjangkauan Harga dan Komunikasi yang efektif)

#### **2.4 Standar Pelayanan Minimal**

Untuk menjamin sinergisitas program pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten/kota, penyusunan RKPD Tahun 2021 berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dengan memperhatikan prioritas dan sasaran pembangunan nasional.

Arah kebijakan pembangunan daerah tersebut berpedoman pada standar pelayanan minimal (SPM) sesuai dengan undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal, bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial serta beberapa prioritas lainnya.

Dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2021 bupati/walikota menggunakan target dan capaian standar pelayanan minimal 6 (enam) urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar disesuaikan dengan rencana capaian target sasaran terukur dari output kegiatan dan outcome program, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :



**a. Pendidikan**

- 1) Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten terdiri atas ;
  - a) Pendidikan anak usia dini;
  - b) Pendidikan dasar; dan
  - c) Pendidikan kesehatan
- 2) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada point 1 ditetapkan dalam standar teknik, yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b) Standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan;
  - c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar
- 3) Penerimaan pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yaitu warga negara dengan ketentuan ;
  - a) Usia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
  - b) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan dasar dan;
  - c) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan
- 4) Arah kebijakan pembangunan daerah mengenai penerapan SPM urusan pendidikan dasar kabupaten/kota mencakup :
  - a) Usai 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan anak usia dini;
  - b) Usia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk jenis pelayanan dasar pendidikan kesetaraan.

Selain itu, perumusan kebijakan bidang pendidikan yang perlu diperhatikan dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 antara lain :

- a) Daerah kabupaten/kota harus menginternalisasikan SPM pendidikan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku;
- b) Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan pendidikan sebesar 20 persen; dan
- c) Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang SPM.

Dalam rangka mendukung prioritas RKP tahun 2021 ketiga yaitu Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing dan prioritas RKPD Provinsi



Sumatera Utara Tahun 2021 kedua yaitu Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan, hal ini didukung oleh Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, maka sasaran yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan untuk mendukung wajib belajar 12 tahun, pendidikan bagi masyarakat miskin di wilayah terpencil, tertinggal dan terbelakang kemudian peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pelaksanaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), yang ditindaklanjuti dengan pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan dasar dan non pelayanan dasar pendidikan secara berkala. Selanjutnya pelaksanaan kebijakan ini mampu mewujudkan peningkatan dan pengembangan pelaksanaan pendidikan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) yang diiringi dengan peningkatan dan pengembangan kualitas dan SDM dalam Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di provinsi.

Memperhatikan kebijakan tersebut, maka pada penyusunan RKPD Tahun 2021, hal-hal ini yang perlu diperhatikan pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- a. Memperhatikan kondisi demografi dan kekhasan daerah;
  - b. Memperhatikan pemenuhan sarana dan prasarana fasilitas pendidikan serta pemenuhan SDM pendidikan;
  - c. Memperhatikan pengembangan kompetensi SDM pendidikan;
  - d. Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN tahun 2015-2019; dan
  - e. Menganggarkan 20 (dua puluh) persen untuk fungsi pendidikan dari APBD
- b. Kesehatan
- 1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM kesehatan Daerah kabupaten/kota terdiri atas :
    - a) Pelayanan kesehatan ibu hamil;
    - b) Pelayanan kesehatan ibu bersalin;
    - c) Pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
    - d) Pelayanan kesehatan balita;
    - e) Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
    - f) Pelayanan kesehatan pada usia produktif
    - g) Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
    - h) Pelayanan kesehatan Penderita hipertensi;
    - i) Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;



- j) Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k) Pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis ; dan
  - l) Pelayanan kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (human immunodeficiency virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif
- 2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada point 1 ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :
- a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b) Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya manusia kesehatan; dan
  - c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 3) Penerimaan pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada poin 1 yaitu warga negara dengan ketentuan :
- a) Ibu hamil untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu hamil;
  - b) Ibu bersalin untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan ibu bersalin;
  - c) Bayi baru lahir untuk jenis pelayanan dasar kesehatan bayi baru lahir;
  - d) Balita untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan balita;
  - e) Usia pendidikan dasar untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
  - f) Usia produktif untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia produktif;
  - g) Usia lanjut untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
  - h) Penderita hipertensi untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
  - i) Penderita diabetes mellitus untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus;
  - j) Orang dengan gangguan jiwa berat untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
  - k) Orang terduga tuberculosis untuk jenis pelayanan dasar pelayanan kesehatan orang terduga tuberculosis ; dan
  - l) Orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency virus) untuk jenis pelayanan dasar

---

kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human immunodeficiency virus).

Dalam rangka meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal pada bidang kesehatan maka beberapa hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 ini adalah sebagai berikut :

- 1) Daerah kabupaten/kota harus menginternalisasikan SPM Kesehatan kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran dengan mempedomani peraturan perundangan yang berlaku;
- 2) Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10%;
- 3) Memanfaatkan alokasi anggaran baik APBD dan APBN (DAK) dengan efektif dan efisien;
- 4) Membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan petunjuk teknis pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan baik fisik dan nonfisik; dan
- 5) Melaksanakan program dan kegiatan yang tertuang dalam SPM Kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang SPM dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016.

Kesehatan merupakan komponen penting dalam pembangunan, terutama dalam pembangunan manusia. Dalam rangka pelaksanaan prioritas RKP Tahun 2021 kelima yakni Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dan prioritas RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 keempat yaitu Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas maka diperlukan tindakan peningkatan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat guna mewujudkan pemenuhan kebutuhan dasar warga negara secara minimal, peningkatan pemerataan akses dan mutu pelayanan serta sumber daya manusia kesehatan. Dengan upaya ini akan meningkatkan fasilitas kesehatan yang terakreditasi, terciptanya 100 persen target UCI, meningkatkan fasilitas kesehatan yang memiliki minimal 5 (lima) jenis tenaga kesehatan.

Kemudian sarana dan prasarana kesehatan juga mempengaruhi efektifitas pengobatan yang dilakukan terhadap masyarakat sehingga perlu diupayakan ketersediaan obat, mutu obat, vaksin, alat kesehatan dan makanan minuman guna mencapai sasaran meningkatnya ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas, meningkatnya kualitas obat yang memenuhi syarat, meningkatnya kualitas dan kuantitas alat kesehatan yang memenuhi syarat, meningkatnya kualitas makanan

dan minuman yang memenuhi syarat, maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Memperhatikan jalur distribusi obat dan vaksin;
- 2) Memastikan ketersediaan obat (Buffer stock);
- 3) Melakukan pemantauan/monitoring ketersediaan alat kesehatan, obat, dan vaksin di fasilitas pelayanan kesehatan;
- 4) Melakukan pengawasan alat kesehatan, termasuk bagi pemerintah kabupaten/kota untuk menerbitkan sertifikat produksi alat kesehatan kelas 1 (satu) tertentu pkrt kelas 1 (satu) tertentu perusahaan rumah tangga ; dan
- 5) Memperhatikan mekanisme pengendalian dan pemantauan dan evaluasi produksi sampai distribusi makanan minuman yang beredar di masyarakat.

Selanjutnya dengan upaya peningkatan status kesehatan dan gizi masyarakat maka sasaran yang ingin dicapai adalah menurunnya prevalensi anemia pada ibu hamil, menurunnya angka kematian ibu (persentase 100 persen capaian penurunan angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup) dan anak (Persentase 100 persen capaian penurunan angka kematian bayi per 1000 kelahiran hidup). Kemudian meningkatnya pemberian ASI eksklusif bayi dengan target persentase bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan yang mendapat ASI eksklusif, menurunnya prevalensi (pendek dan sangat pendek pada anak baduta), menurunnya prevalensi kekurangan (under weight) pada anak balita dan menurunnya prevalensi wasting (kurus) anak balita. Hal ini dapat didukung dengan upaya promotif dan preventif Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) untuk meningkatnya kualitas lingkungan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatnya perilaku hidup sehat, meningkatnya ketersediaan pangan sehat dan percepatan gizi, meningkatnya aktifitas fisik masyarakat, meningkatnya edukasi hidup sehat. Dengan hal ini maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Memperhatikan target pencapaian SPM (100 persen) untuk pelayanan ibu hamil, ibu bersalin, bayi baru lahir, balita, usai pendidikan dasar, usai produktif dan usai lanjut dan melaksanakannya;
- 2) Memperhatikan NSPK yang ditetapkan oleh K/L terkait ;
- 3) Memperhatikan indikator dan target pada sasaran RPJMN;
- 4) Mengoptimalkan alokasi anggaran urusan kesehatan sebesar 10 persen (diluar belanja pegawai);



- 5) Melakukan pencetakan Buku KIA sekaligus distribusi ;
- 6) Memanfaatkan alokasi anggaran baik APBD dan APBN (DAK) dengan efektif dan efisien;
- 7) Membuat peraturan yang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis pemanfaatan DAK Bidang Kesehatan baik Fisik dan Nonfisik;
- 8) Membuat kebijakan terkait dengan ASI eksklusif pada seluruh bayi usia kurang dari 6 (enam) bulan (termasuk bayi dari Ibu Pekerja);
- 9) Melaksanakan seluruh kegiatan yang mendukung status derajat Kesehatan Masyarakat;
- 10) Gubernur melakukan fasilitas dan koordinasi pelaksanaan kegiatan Germas di kabupaten/kota di wilayahnya;
- 11) Bupati/Wali kota mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Germas di wilayahnya;
- 12) Perlu kolaborasi, partisipasi dan collective dan action stakeholder secara terpadu dan terintegrasi;
- 13) Menyediakan fasilitas untuk aktivitas fisik;
- 14) Melakukan evaluasi kegiatan Germas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di wilayahnya; dan
- 15) Melakukan pelaporan pelaksanaan kegiatan Germas yang dilakukan oleh Perangkat Daerah secara berjenjang.

Dalam rangka pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular serta peningkatan penyehatan lingkungan, maka diharapkan kebijakan ini dapat meningkatkan tindakan pencegahan dan pengendalian penyakit menular dan tidak menular yang didukung dengan meningkatnya kualitas lingkungan yang memenuhi syarat kualitas kesehatan lingkungan.

Menindak lanjuti hal ini maka pemerintah kabupaten/kota perlu menyelenggarakan kabupaten/kota sehat. Untuk meningkatkan pelayanan kesehatan pada seluruh lapisan masyarakat maka salah satu upaya yang perlu dilakukan adalah peningkatan penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan dan Penduduk yang menjadi peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI); Jumlah penduduk yang menjadi peserta PBI melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKM)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) diluar beban APBN.



Dengan ini diharapkan meningkatnya jumlah penduduk yang menjadi PBI melalui Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) diluar beban APBN; Jumlah peserta program Jaminan hingga mendekati sasaran universal “Jaminan Kesehatan Nasional” integrasi jamkesda ke JKN; *Unmet need* pelayanan kesehatan serta jumlah penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk pendapatan rendah) mendapatkan kepesertaan jaminan kesehatan.

Kemudian dengan adanya pengalihan perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah maka perlu upaya dalam penyelesaian pengalihan perguruan tinggi kesehatan milik pemerintah daerah yang akan ditutup pada tahun 2021 (passing out). Berdasarkan kebijakan-kebijakan tersebut dalam penyusunan RKPD Kabupaten/Kota Tahun 2021 hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Memperhatikan NSPK yang telah diterbitkan oleh K/L terkait;
- 2) Memperhatikan indicator dan target pada sasaran RPJMN;
- 3) Pengintegrasian penduduk yang menjadi peserta penerima Bantuan Sehat (KIS) sudah harus tuntas pada Tahun 2021 dalam rangka mencapai *Universal Health Coverage* (UHC) sesuai target nasional; dan
- 4) Bagi daerah yang memiliki perguruan tinggi kesehatan, agar tetap mengalokasikan anggaran untuk proses belajar mengajar dan kegiatan operasional selama tahun 2021 sampai proses masa transisi selesai.

**Table 2-88**  
**Standard Pelayanan Minimal Tahun 2015–2019**  
**Dinas Kesehatan Kabupaten Langkat**

No	JENIS PELAYANAN										
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Tar get	Capaian	Tar get	Capaian	Tar get	Capaian	Tar get	Capaian	Tar get	Capaian
1.	<b>Pelayanan Kesehatan Dasar</b>										
	a. Cakupan Kunjungan ibu Hamil K4	25.593	19.870	23.298	21.317	23.296	21.418	23.136	21.825	n/a	n/a
	b. Cakupan komplikasi kebidanan Yang Ditanda Tangai	1.580	1.555	891	891	4.659	3.937	4.627	3.563	n/a	n/a
	c. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memiliki Kompetensi Kebidanan	24.430	19.802	22.239	20.465	22.237	20.566	22.083	21.138	n/a	n/a
	d. Cakupan Pelayanan Nifas	24.430	18.385	23.298	20.465	22.237	20.374	21.083	20.968	n/a	n/a
	e. Cakupan Neonatus Dengan Komplikasi Yang Ditandai	1.250	1.319	981	981	3.176	2.048	3.164	2.626	n/a	n/a
	f. Cakupan Kunjungan Bayi	19.918	19.088	21.180	20.014	21.182	19.971	21.056	19.372	n/a	n/a



	g. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization	277	245	277	233	277	326	277	249	n/a	n/a
	h. Cakupan Pelayanan Anak Balita	68.693	53.870	96.837	79.183	19.005	80.664	104.291	92.082	n/a	n/a
	i. Cakupan Pemberian Makanan Pendamping ASI Pada Anak Usia 6-24 Bulan Keluarga Miskin	-	-	-	-	210	210	-	-	n/a	n/a
	j. Cakupan Balita Gizi Buruk Mendapat Perawatan	87	87	50	50	110	110	93	93	n/a	n/a
	k. Cakupan Penjangkaran Kesehatan Siswa SD dan Setingkat	-	-	-	-	172.273	119.962	10.939	10.939	n/a	n/a
	l. Cakupan Peserta KB Aktif	-	-	-	-	-	-	202.412	140.792	n/a	n/a
	m. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit									n/a	n/a
	– Activate Lfacid Paralysis (AFP) Rate Per 100.000 Penduduk < 15 Tahun	7	7	23	23	8	20	28	28	n/a	n/a
	– Penemuan Penderita Pneumonia Balita	-	-	11.847	973	8.203	795	1.376	1.376	n/a	n/a
	– Penemuan Pasien Baru TB BTA Positif	1.68	1.050	1.682	1.030	1.682	831	1.011	1.011	n/a	n/a
	– Penderita DBD Yang Ditangani	300	439	300	522	300	314	616	616	n/a	n/a
	– Penderita Diare Yang Ditangani	-	16.952	27.167	16.903	24.320	15.078	1.576	-	n/a	n/a
	n. Cakupan Pelayanan Kesehatan Dasar Masyarakat Miskin										
	– Cakupan Rawat Jalan Pasien GAKIN	129.358	119.199	438.823	201.841	590.633	590.633	-	-	n/a	n/a
	– Cakupan Rawat INAP Pasien GAKIN	1.017	493	860	860	1.282	1.282	-	-	n/a	n/a
	o. Sarana Kesehatan Dengan Kemampuan Pelayanan gawat Darurat yang Dapat Diakses Masyarakat	36	6	38	26	40	40	39	39	n/a	n/a
	p. Jumlah Tenaga Kesehatan	1.979	1.979	1.904	1904	1.777	1.777	1.785	1.785	n/a	n/a
	q. Ketersediaan Puskesmas	30	30	30	30	30	30	30	30	n/a	n/a
	r. Ketersediaan Polindes	258	258	258	258	258	258	258	258	n/a	n/a
	s. Ketersediaan pustu	176	176	176	176	176	176	187	187	n/a	n/a
2.	Pelayanan Kesehatan Rujukan										
	a. Cakupan pelayanan Kesehatan	456.320	129.851	438.823	201.841	59.339	-	-	-	n/a	n/a
	b. Darurat Level 1 Yang Harus Diberikan Sarana Kesehatan (RS)	20	-	20	-	12	201.841	-	-	n/a	n/a
3.	Penyelidikan Epidemiologi dan Penanggulangan kejadian Luar Biasa/KLB										
	a. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB yang Dilakukan Penyelidikan Epidemiologi < 24 jam	4	4	1	1	-	-	1	1	n/a	n/a
	b. Cakupan Desa/Kelurahan mengalami KLB	4	4	1	1	-	-	1	1	n/a	n/a
4	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat										
	a. Cakupan Desa Siaga Aktif	277	235	277	277	277	277	277	277	n/a	n/a
	b. Jumlah Tenaga Kesehatan	1.979	1.979	1.904	1.904	1.777	1.777	1.785	1.785	n/a	n/a
	c. Jumlah Puskesmas (Ketersediaan Puskesmas)	30	30	30	30	30	30	30	30	n/a	n/a

**c. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

- 1) Jenis Pelayanan Dasar pada SPM pekerjaan Umum Daerah kabupaten/kota terdiri atas :
  - a) Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari; dan
  - b) Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
- 2) Mutu Pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
  - b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 3) Penerimaan pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada poin 1 yaitu setiap warga negara.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar teknis sebagaimana dimaksud pada poin 2 diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum yang ditetapkan setelah dikoordinasikan dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri dan kementerian/lembaga pemerintahan non kementerian terkait.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional dan prioritas provinsi, terutama dalam hal ketahanan air untuk mendukung ketahanan nasional (Sumber daya air), yaitu: 1). Pembangunan dan peningkatan jaringan irigasi air permukaan, air tanah dan rawa (juta ha); 2) Rehabilitasi jaringan irigasi permukaan, air tanah dan rawa (juta ha); 3) Ketahanan air; pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi (permukaan, air tanah, pompa, rawa, dan tambak). Beberapa arah kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah antara lain

- 1) Pemeliharaan dan pemulihan sumber air dan ekosistem
- 2) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan unruk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat
- 3) Terlaksananya pemenuhan kebutuhan air untuk kebutuhan sosial dan ekonomi
- 4) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko daya rusak air termasuk perubahan iklim; dan





- 5) Peningkatan kapasitas kelembagaan, ketatalaksanaan dan efektif, efisien dan berkelanjutan termasuk peningkatan ketersediaan dan kemudahan akses terhadap data dan informasi

Hal itu sesuai dengan undang-undang Nomor 23 tahun 2014; Peraturan Menteri PUPR Nomor 27/PRT/M/2015 tentang Bendungan; Peraturan Pemerintah Nomor 122 tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM); Peraturan Menteri PUPR Nomor 11/PRT/M.2015 tentang eksploitasi dan Pemeliharaan Jaringan reklamasi Rawa Pasang Surut; Peraturan Menteri Menteri PUPR Nomor 14/PRT/M.2015 tentang kriteria dan penataan status Daerah Irigasi; Peraturan menteri PUPR Nomor 21/PRT/M/2015 Tentang eksploitasi dan Pemeliharaan jaringan Irigasi Tambah; Peraturan Menteri PUPR Nomor 23/PRT/M/2015 tentang pengelolaan Aset Irigasi; Peraturan Menteri PUPR Nomor 29/PRT/M/2015 tentang rawa; Peraturan Menteri PUPR Nomor 30/PRT/M/2015 tentang pengembangan dan pengelolaan Sistem Irigasi; Peraturan Menteri PUPR Nomor 07/PRT/M/2015 tentang pengamanan pantai; peraturan Menteri PUPR Nomor 13/PRT/M/2015 tentang penanggulangan Darurat Bencana Akibat Daya Rusak Air; serta Buku II RPJMN 2015-2019, maka ditetapkan tujuan/sasaran,yaitu :

- 1) Terlaksananya konservasi sumberdaya air;
- 2) Terpenuhi kebutuhan air baku untuk kegiatan irigasi, industri perkotaan serta kebutuhan sosial dan ekonomi produktif lainnya;
- 3) Terpenuhnya kebutuhan air baku untuk kegiatan irigasi, industri perkotaan serta kebutuhan sosial dan ekonomi produktif lainnya.
- 4) Terlaksananya peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko banjir, resiko aliran lahar gunung berapi, serta abrasi pantai; dan
- 5) Terlaksananya pengelolaan sumber daya air terpadu berbasis wilayah sungai

Maka dari itu memperhatikan prioritas nasional, prioritas provinsi dan tujuan/sasaran tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun RKPD kabupaten/kota Tahun 2021, sebgai berikut :

- 1) Meningkatnya sumber air baku yang berasal dari waduk dan embung yang ketersediaan airnya dapat terjamin sepanjang tahun
- 2) Pemenuhan kebutuhan dan jaminan kualitas air untuk kehidupan sehari-hari bagi masyarakat
- 3) Pembangunan bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya
- 4) Rehabilitasi bendungan, embung dan bangunan penampung air lainnya;



- 5) Revitalisasi danau prioritas
- 6) Operasi dan pemeliharaan bendungan, embung dan bangunan air lainnya
- 7) Pemeliharaan danau prioritas;
- 8) Penyediaan sarana prasarana air baku tersebut disinkronkan dengan pengembangan instalasi pengelolaan air dan saluran distribusi hingga ke masyarakat
- 9) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk kegiatan irigasi;
- 10) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk kegiatan industri dan perkotaan dilakukan sebagai satu kesatuan dengan penyediaan sarana dan prasarana air baku untuk kebutuhan sehari-hari masyarakat;
- 11) Peningkatan ketangguhan masyarakat dalam mengurangi resiko banjir;
- 12) Pengelolaan sumber daya air terpadu berbasis wilayah sungai;
- 13) Pembangunan dan rehabilitasi sumur airtanah untuk air baku;
- 14) Pembangunan dan rehabilitasi embung untuk air baku;
- 15) Pembangunan dan rehabilitasi unit air baku, meliputi intake dan saluran air baku;
- 16) Pembangunan dan rehabilitasi bendungan sebagai sumber air;
- 17) Pembangunan dan rehabilitasi bendung dan jaringan irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, dan irigasi tambak sesuai kewenangan;
- 18) Normalisasi sungai dan pembangunan serta rehabilitasi tanggul pengendalian banjir;
- 19) Pembangunan dan rehabilitasi tebing;
- 20) Pembangunan dan rehabilitasi pintu air dan bendungan pengendalian banjir
- 21) Pembangunan dan rehabilitasi kanal banjir
- 22) Pembangunan dan rehabilitasi stasiun pompa banjir;
- 23) Pembangunan dan rehabilitasi polder/kolam retensi;
- 24) Pengelolaan drainase, sesuai dengan kewenangan;
- 25) Pengembangan flood forecasting warning system (FFWS);
- 26) Pembangunan dan rehabilitasi sabo;
- 27) Pembangunan dan rehabilitasi dan rehabilitasi check-dam;
- 28) Pembangunan dan rehabilitasi breakwater;
- 29) Pembangunan dan rehabilitasi seawall/tanggul laut;
- 30) Penyusunan pola dan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dengan kewenangan. Pola dan rencana ini sudah diharmonisasi dengan RTRW Provinsi dan RTRW kabupaten/kota pada wilayah sungai tersebut;

- 31) Koordinasi antar semua stakeholder pada wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai sesuai dengan kewenangan (misal TKSPDA);
- 32) Pelibatan masyarakat pada wilayah sungai untuk pengelolaan sumber daya air; dan
- 33) Pengembangan sistem informasi sumber daya air, termasuk didalam mencakup hidrometeorologi dan hidrogeologi.

Dalam mendukung prioritas RKP Tahun 2021 kelima yakni Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pembangunan Ekonomi dan Pelayanan Dasar dan RKPD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 ketiga yaitu Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan; maka perlu peningkatan infrastruktur dasar dan konektifitas (jalan), yaitu : 1) Kondisi mantap jalan kemantapan jalan provinsi menjadi 75 persen, meningkatnya kemantapan jalan kabupaten/kota menjadi 65 persen; serta akses infrastruktur dasar dan konektivitas pembangunan jalan baru (kumulatif 5 tahun), maka arah kebijakan yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah penyelenggaraan jalan provinsi dan penyelenggaraan jalan kabupaten/kota Tahun 2021 yaitu :

- 1) Memperlancar mobilitas distribusi barang dan jasa, meningkatkan pelayanan kebutuhan pergerakan masyarakat dengan harga yang terjangkau, serta meningkatkan produktivitas masyarakat;
- 2) Peningkatan infrastruktur jalan yang menuju ke desa masih banyak jalan rusak yang berupa jalan setapak yang sulit dilalui oleh kendaraan;
- 3) Meningkatnya kemantapan jalan provinsi menjadi 80 persen dan jalan kabupaten/kota menjadi 70 persen; dan
- 4) Meningkatkan aksesibilitas yang menghubungkan daerah tertinggal dengan pusat pertumbuhan melalui pengembangan sarana dan prasarana transportasi.

Dalam rangka mencapai prioritas infrastruktur dasar dan konektivitas, aktivitas sanitasi layak infrastruktur dasar dan konektivitas dengan tujuan meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar warga Negara secara minimal, maka hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam menyusun RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Tercapainya persentase penduduk yang terlayani sistem air limbah yang memadai, tercapainya pembangunan SPALD dan pengelolaan air limbah lintas kabupaten/kota, tercapainya pengembangan SPLAD;

- 2) Sampah : pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas : a. permukiman layak dan pengurangan sampah; dan b. penanganan sampah. Pengembangan dan optimalisasi kegiatan pengolahan sampah. Pengembangan TPA yang berwawasan lingkungan. Pengembangan TPA Regional; dan
- 3) Drainase: mewujudkan pengelolaan drainase perkotaan melalui penyiapan rencana induk sistem konprehensif. Mewujudkan prasarana dan sarana perkotaan. Mewujudkan pengelolaan drainase dengan memperhatikan konservasi SDA. Pengurangan tingkat genangan terutama pada kawasan strategis perkotaan untuk menjaga produktifitas dan ekonomi kabupaten/kota, melindungi investasi terbangun dan mencegah timbulnya dan tersebarnya penyakit yang ditularkan melalui air. Pengurangan genangan di kawasan perumahan dan permukiman. Pengurangan tingkat genangan untuk menjaga keberlanjutan lingkungan yang layak, sehat dan bersih. Penyediaan PS bangunan yang layak huni dan sehat.

Dalam rangka mencapai prioritas nasional dan provinsi terkait bangunan gedung maka perlu dilakukan upaya yaitu membuat regulasi dalam rangka implementasi penyelenggaraan Bangunan Gedung (BG) berupa peraturan daerah maupun peraturan bupati untuk mendukung kemudahan berusaha dan peningkatan investasi, menetapkan Tim Ahli Bangunan Gedung (TABG), pengkaji teknis, dan penilik BG dalam suatu kelembagaan untuk operasionalisasi implementasi penyelenggaraan kebijakan BG, melakukan pendataan proses penyelenggaraan BG menggunakan sistem informasi.

Upaya-upaya ini dilakukan untuk menyediakan landasan hukum melalui penetapan peraturan bupati dalam pelaksanaan penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF), pendataan BG, dan pembentukan TABG, menjamin terwujudnya bangun gedung yang tertib secara administratif dan andal secara teknis, serta menyediakan basis data sebagai bahan evaluasi maupun penyusunan kebijakan daerah. Dengan demikian dalam penyusunan RKPD kabupaten Tahun 2021 hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan kualitas dan kapasitas aparat pemda sebagai instansi teknis yang akan mengawal penyelenggaraan BG dan implementasi Perda BG;
- 2) Ketersediaan data dan informasi mengenai permasalahan, potensi. Tantangan. Arah pembangunan daerah tersebut (visi misi pembangunan daerah)



- 3) Kesiapan kelembagaan penyelenggaraan BG dan SOP-nya.

Dalam hal pencapaian prioritas nasional dan provinsi yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian, industri dan jasa produktif maka arah kebijakan yang perlu diperhatikan oleh pemerintah kabupaten adalah :

- 1) Penyelenggaraan pelatihan tenaga kerja konstruksi;
- 2) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan pemerintah daerah;
- 3) Penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional; 4) Pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Berdasarkan hal tersebut, hal-hal yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota, meliputi :
  - a) Peningkatan layanan kelembagaan penyelenggaraan sistem informasi;
  - b) Penyediaan data dan informasi sumber daya konstruksi, investasi infrastruktur, pasar konstruksi, izin usaha jasa konstruksi dan tertib penyelenggaraan konstruksi; dan
  - c) Peningkatan layanan informasi tentang produk pembinaan jasa konstruksi.
- 2) Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional yang memerhatikan :
  - a) Domisili;
  - b) Jumlah;
  - c) Persyaratan perpajakan;
  - d) Persyaratan hukum(legalitas); dan
  - e) Persyaratan .
- 3) Pemerintah kabupaten/kota menyelenggarakan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi yang merupakan kewenangan kabupaten/kota melalui pembinaan tertib penyelenggaraan konstruksi :
  - a) Pengawasan sistem rantai pasok sumber daya konstruksi, klasifikasi usaha jasa konstruksi, kualifikasi usaha jasa konstruksi dan pemenuhan persyaratan usaha jasa konstruksi;



- b) Pengawasan proses pemilihan penyedia jasa, kontrak kerja konstruksi, penerapan standar K4 untuk usaha perseorangan dan sistem manajemen mutu; dan
- c) Pengawasan pemanfaatan produk konstruksi yang memperhatikan fungsi, umur rencana, kapasitas beban, serta pemeliharaan produk sesuai siklus hidup asset.

Dalam bidang Penataan ruang untuk mendukung prioritas RKP tahun 2021 keenam yakni Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim dan prioritas RKPD provinsi Sumatera tahun 2021 ketiga yakni Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang, Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang kawasan Ekonomi Khusus, Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang maka sasaran yang perlu dicapai yakni tersusunnya penataan Ruang maka sasaran yang perlu dicapai yakni tersusunnya peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang kawasan Strategis kabupaten/kota, terselenggaranya konsultasi dan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis kabupaten/kota.

Kemudian untuk meminimalkan atau mengurangi kerusakan dan kerugian ekonomi akibat kejadian bencana di masa mendatang, maka sasaran penanggulangan bencana dan pengurangan risiko bencana adalah mengoptimalkan upaya mitigasi bencana pada wilayah yang memiliki indeks risiko bencana tinggi, baik yang fungsi sebagai PKN, PKW, PKSN, Kawasan Ekonomi Khusus, Kawasan Industri maupun pusat-pusat pertumbuhan lainnya. Selain itu terselenggaranya sistem pembangunan yang berkelanjutan dan memiliki ketahanan (resiliensi) tinggi terhadap dampak perubahan iklim, tersusunnya Raperda tentang RTR di Sekitar Kawasan Industri (KI) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) industri/Logistik, dilanjutkan dengan tersedianya instrumen perijinan dan pengendalian pemanfaatan ruang di sekitar KI dan KEK industri/Logistik. Pengembangan KEK bertujuan untuk mempercepat perkembangan daerah dan sebagai model terobosan pengembangan kawasan untuk pertumbuhan ekonomi, antara lain industri, pariwisata, dan perdagangan sehingga dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di masing-masing pulau dengan memanfaatkan potensi dan keunggulan daerah. Selain itu pengembangan KI bertujuan untuk mempercepat penyebaran dan pemerataan pembangunan Kawasan Industri, meningkatkan upaya pembangunan

kawasan industri yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan daya saing kawasan industri dan memberikan kepastian ijin lokasi sesuai tata ruang. Pengembangan kawasan pariwisata prioritas bertujuan untuk memperkuat upaya penataan ruang wilayah dan konservasi potensi kepariwisataan dan lingkungan dalam mendukung daya tarik dan revitalisasi disekitarnya. Selanjutnya untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan berdasarkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Untuk pembangunan desa dan kawasan perdesaan, sasarannya adalah mengurangi jumlah desa tertinggal dan meningkatkan jumlah desa mandiri.

**d. Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- 1) Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas :
  - a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
  - b) Fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 2) Mutu Pelayanan Dasar untuk setiap jenis Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa; dan
  - b) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 3) Penerima pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagai mana dimaksud pada poin 1 yaitu warga negara dengan ketentuan :
  - a) Korban bencana kabupaten/kota yang memiliki rumah terkena dampak bencana untuk jenis pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota; dan
  - b) Masyarakat yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota untuk jenis Pelayanan Dasar fasilitas penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.
- 4) Arah kebijakan pembangunan daerah dalam penyediaan perumahan layak pemerintah kabupaten/Kota :

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota
- b) Rehabilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.

Seusai dengan pernyataan kebijakan di atas maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- 2) Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar target program/kegiatan penyediaan hunian layak di kabupaten/kota;
- 3) Fasilitas penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- 4) Kemudahan perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (penerapan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017);
- 5) Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 6) Pengentasan permukiman kumuh dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- 7) Menyusun rencana penyediaan hunian layak atau dokumen RPK3KP;
- 8) Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh; dan
- 9) Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

Dalam rangka mendukung prioritas nasional dalam penerapan SPM perumahan rakyat dan mencapai tujuan bidang perumahan rakyat yaitu mempercepat pemenuhan SPM untuk pelayanan dasar maka arah kebijakan pembangunan yang diperhatikan oleh pemerintah kabupaten/kota adalah sebagai berikut :

- Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
- Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota.





Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025, Undang-undang Nomor 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2015-2019, Peraturan Presiden Nomor 10 tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan serta Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

Maka hal-hal yang diperhatikan pemerintah daerah dalam menyusun RKPD kabupaten/kota tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Menerapkan SPM; dan
- 2) Melaporkan capaian SPM tahunan kepada Ditjen Bina Pembangunan Daerah kementerian Dalam Negeri.

Dalam hal pencapaian pembangunan bidang perumahan dan pencapaian tujuan meningkatkan akses masyarakat terhadap hunian layak, aman, dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan PSU yang memadai, arah kebijakan pembangunan daerah yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :

- 1) Infrastruktur dasar dan konektivitas; kekurangan tempat tinggal (blacklog) berdasarkan perspektif menghuni;
- 2) Pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk berpendapatan rendah); akses sanitasi layak pelayanan dasar bagi penduduk rentan dan kurang mampu (40 persen penduduk berpendapatan rendah); penyelenggaraan sinergi sanitasi yang dilakukan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota dan masyarakat;
- 3) Terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lima juta rumah tangga;
- 4) Terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; penyediaan rumah susun sewa; penyediaan KPR swadaya;
- 5) Terfasilitasinya penyediaan hunian layak dan terjangkau untuk menurunkan kekurangan tempat tinggal khususnya masyarakat berpenghasilan rendah; bantuan stimulan bangunan baru rumah swadaya;



- 6) Pembangunan rumah khusus di daerah perbatasan, pasca bencana dan pasca konflik;
- 7) Mendorong keswadayaan masyarakat dan dunia usaha dalam penyediaan tempat tinggal yang layak untuk mendukung penurunan angka kekurangan rumah;
- 8) Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni, termasuk dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh; dan
- 9) Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan keswadayaan masyarakat di kelurahan.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan daerah dalam pencapaian prioritas pembangunan nasional dan provinsi tersebut, maka hal-hal yang diperhatikan dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Penyediaan hunian layak serta peningkatan kualitas rumah tidak layak huni dengan indikator : jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- 2) Penyusunan dan pengembangan data rumah tidak layak huni sebagai dasar target program/kegiatan penyediaan hunian layak di kabupaten/kota;
- 3) Fasilitasi penyediaan dan pencadangan lahan untuk perumahan masyarakat berpenghasilan rendah;
- 4) Kemudahan perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah;
- 5) Kemudahan perizinan dalam pembangunan perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (penerapan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 tahun 2017);
- 6) Mendorong pihak swasta (pengembang perumahan dan perbankan) dalam menyediakan hunian bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
- 7) Pengentasan permukiman kumuh dengan indikator jumlah rumah tangga yang terfasilitasi;
- 8) Menyusun rencana penyediaan hunian layak atau dokumen RPKP;
- 9) Mengintegrasikan program/kegiatan perbaikan rumah dan penyediaan infrastruktur dasar (air minum, air limbah, persampahan) dalam rangka penanganan permukiman kumuh; dan

10) Penegakan peraturan terkait tata bangunan untuk pencegahan kumuh.

Dalam hal pencapaian pembangunan nasional dan provinsi bidang kawasan permukiman dan pencapaian tujuan 1). Penyediaan air minum dan sanitasi sebagai layanan dasar; 2). Pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh; 3). Meningkatkan jumlah warga miskin perdesaan dan pinggiran kota yang dapat mengakses pelayanan air minum dan sanitasi; 4). Meningkatkan nilai dan perilaku hidup bersih dan sehat; 5). Menjamin sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (SPAMS) yang terpelihara sehingga mampu memberikan dan bahkan meningkatkan jangkauan pelayanan air minum dan sanitasi serta pola hidup bersih dan sehat; 6). Peningkatan Sinergi dan harmonisasi antar sector, program dan kegiatan terkait pencapaian akses universal sanitasi, maka arah kebijakan pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Tercapainya pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen melalui penanganan kawasan permukiman kumuh dan peningkatan keswadayaan masyarakat di kelurahan;
- 2) Tercapainya 100 persen pelayanan air minum yakni 85 persen penduduk terlayani akses sesuai prinsip 4K (kuantitas, kualitas, kontinuitas dan keterjangkauan) dan 15 persen sesuai kebutuhan dasar (basic-needs); dan
- 3) Pencapaian target universal akses air minum dan sanitasi 100-0-100: pemenuhan target nasional kebutuhan minimal Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL) merupakan layanan wajib dasar bagi masyarakat yang harus diintegrasikan ke dalam target daerah melalui dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dalam rangka pencapaian pembangunan nasional dan provinsi tersebut, maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam penyusunan RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a) Menyusun kebijakan daerah dan program prioritas air minum dan sanitasi jangka menengah dalam bentuk Rencana Aksi Daerah bidang Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (RAD AMPL) kabupaten yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati;
- b) Menyusun roadmap air minum dan sanitasi kabupaten/kota;
- c) Menyediakan alokasi anggaran untuk bidang AMPL bersumber dari APBD kabupaten dan pengintegrasian sumber alokasi dana lainnya untuk mencapai target air minum dan sanitasi di kabupaten;

- d) Meningkatkan kapasitas perangkat daerah/lembaga pengelola air minum dan sanitasi, serta Pokja AMPL/Pokja sanitasi/kelompok kerja yang fokus dalam menangani isu air minum dan sanitasi kabupaten dalam perencanaan, koordinasi program, pemantuan, dan evaluasi;
- e) Meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan program AMPL kabupaten/kota;
- f) Menyusun dokumen Strategis Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) serta terselenggaranya pemutakhiran SSK yang telah melewati 5 (lima) tahun sejak ditandatangani kepala daerah masing-masing;
- g) Meningkatkan alokasi pendanaan APBD dan/atau APBDesa untuk meningkatkan akses pelayanan air limbah domestic;
- h) Percepatan implementasi dokumen SSK, meliputi :
  - 1. Penetapan kebijakan layanan sanitasi berkelanjutan, skenario multi aspek, uji coba skenario;
  - 2. Replikasi pembangunan sanitasi;
  - 3. Sinkronisasi pelaksanaan pembangunan sanitasi permukiman;
  - 4. Optimalisasi pelaksanaan pembangunan sanitai permukiman;
  - 5. Optimalisasi pendanaan kegiatan yang didanai dari APBD kabupaten/kota, APBD provinsi, APBN, PHLN, CSR, Masyarakat dan dunia usaha;
  - 6. Pelaksanaan tata kelola pasca konstruksi (alih pengelolaan sarana prasarana, kelengkapan/keberfungsian sarpras);
  - 7. Pembinaan pembentukan dan optimalisasi institusi penyediaan layanan, serta rancangan manajemen pengelola aset/sarana dan prasarana sanitasi; dan
  - 8. Penerbitan acuan dan prosedur tata kelola pasca konstruksi.

**e. ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat**

- 1) Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat mencakup SPM Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat Daerah kabupaten/kota.
- 2) Jenis pelayanan dasar pada SPM ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas :
  - a. Pelayanan Ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Pelayanan informasi rawan bencana;



- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
  - d. Pelayanan Penyelamatan bencana dan evakuasi korban bencana;
  - e. Pelayanan penyelamatan bencana dan evakuasi korban kebakaran.
- 3) Mutu pelayanan dasar untuk jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. Standar jumlah dan kualitas arang dan/atau jasa;
  - b. Standar jumlah dan kualitas personil/sumber daya; dan
  - c. Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 4) Penerimaan pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagai mana dimaksud pada poin 1 yaitu warga negara dengan ketentuan :
- a. Yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan kepala daerah kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
  - b. Yang berada di kawasan rawan bencana dan yang menjadi korban bencana untuk jenis pelayanan dasar pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
  - c. Yang menjadi korban kebakaran atau terdampak kebakaran untuk jenis pelayanan dasar pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dalam rangka mendukung prioritas RKP Tahun 2021 ketujuh yakni Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik, perlu dilakukan peningkatan reformasi birokrasi, tatakelola pemerintahan, penegakan hukum dan pencegahan korupsi maka sesuai dengan SE Nomor 05.12/7764/SJ, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Pemerintah Nomor 84 tentang Satuan Perlindungan Masyarakat maka perlu dilakukan upaya yaitu dengan pelayanan penanganan gangguan ketentraman dan keterlibatan umum lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi, maka beberapa hal yang perlu diselaraskan dan diperhatikan dalam RKPD kabupaten/Kota Tahun 2021 oleh pemerintah daerah adalah sebagai berikut :

- 1) Penanganan gangguan tarantibum dan linmas;
- 2) Penanganan 1 pintu dan kerjasama dengan dinas sosial;
- 3) Pengembangan sistem informasi deteksi gangguan ketentraman dan ketertiban umum lintas daerah;



- 4) Pengalokasian bimbingan teknis anggota satuan perlindungan masyarakat provinsi dan kabupaten/kota;
- 5) Realokasi DAK untuk rehabilitasi dan pengembangan rumah/panti sosial masyarakat PGOT; dan
- 6) Relokasi DAK untuk dukungan kinerja penyelenggaraan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di daerah sebagai urusan wajib dan pelayanan dasar.

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan satpol PP maka perlu dilakukan upaya fasilitasi peningkatan kapasitas SDM, peningkatan kapasitas PPNS. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2014 tentang Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja dan Angka Kreditnya. Pelayanan di bidang rawan bencana juga perlu diperhatikan mengingat bahwa dengan upaya pelayanan informasi Rawan Bencana, Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran agar masyarakat dapat mengetahui bahwa bencana dapat menimpa wilayah mereka dan dapat membayarkan keselamatan mereka kemudian pelayanan penyelamatan ini dilakukan untuk mempercepat datangnya bantuan dan pertolongan yang diperlukan. Beberapa Upaya diatas dilakukan dengan sasaran menurunkan indeks risiko bencana daerah. Dengan memahami pernyataan pemerintah sebagai tindak lanjut maka hal-hal yang perlu diperhatikan pemerintah daerah dalam RKPD kabupaten/kota Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- 1) Pengintegrasian pengarusutamaan pengurangan risiko bencana dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah;
- 2) Penyusunan kajian risiko bencana;
- 3) Penyusunan rencana penanggulangan bencana;
- 4) Sosialisasi informasi kemungkinan dampak bencana;
- 5) Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana;
- 6) Penyusunan Rencana Tindak Darurat Kebakaran (RTDK);
- 7) Pemetaan potensi ancaman bahaya kebakaran diseluruh jenis/tipologi kebakaran (mitigasi);
- 8) Penyuluhan, penyebaran informasi pelanggaran dan peringatan waspada bahaya kebakaran;
- 9) Pengendalian pencegahan dan kesiapsiagaan bencana dan kebakaran (Pusdalops);



- 10) Pembentukan desa tangguh bencana;
- 11) Pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung pencegahan dan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- 12) Pembuatan rencana kontijensi;
- 13) Pelatihan/simulasi kesiapsiagaan aparaturnya dan masyarakat;
- 14) Kajian risiko kebakaran dan penyusunan Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran (RISPK);
- 15) Pengadaan peralatan perlindungan dan perencanaan pembangunan akses perlindungan bencana kebakaran;
- 16) Inspeksi sistem keselamatan kebakaran;
- 17) Penyusunan kebijakan/regulasi tentang bencana dan kebakaran;
- 18) Membuat posko tanggap kebakaran;
- 19) Pencarian dan penyelamatan korban bencana;
- 20) Evakuasi/pemindahan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat penampungan sementara;
- 21) Operasional administrasi dan komunikasi fungsi sekretariat kantor pemadam kebakaran
- 22) Membentuk Poskotis (Pos Komando Teknis);
- 23) Kaji cepat/size up;
- 24) Operasi pemadaman;
- 25) Pencarian dan penyelamatan korban kebakaran;
- 26) Evakuasi/pemindahan korban kebakaran dari lokasi kebakaran ke tempat aman dan atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan;
- 27) Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
- 28) Penyusunan peta dan kajian risiko bencana;
- 29) Pengembangan sistem dan peralatan peringatan dini bencana dengan teknologi sederhana;
- 30) Pembangunan sistem data informasi kebencanaan daerah;
- 31) Sosialisasi kesadaran terhadap bencana
- 32) Gladi dan simulasi kebencanaan;
- 33) Diseminasi informasi kebencanaan daerah dan PUSDALOPS;
- 34) Integrasi sistem informasi kebencanaan lintas sektor dan PUSDALOPS;
- 35) Penyediaan layanan komunikasi kedaruratan dan PUSDALOPS;
- 36) Penyusunan peta dan kajian risiko bencana;

- 37) Penyusunan dan rivi u rencana penanggulangan bencana;
- 38) Penyusunan rencana kontijensi;
- 39) Penetapan kawasan rawan bencana geologi, wilayah sungai, dan pesisir;
- 40) Pembuatan rambu dan papan peringatan bencana;
- 41) Pembentukan relawan penanggulangan bencana;
- 42) Desa tangguh bencana;
- 43) Penyediaan logistik kebencanaan;
- 44) Penyediaan peralatan dasar kebencanaan; dan
- 45) Pengembangan sistem dan peralatan peringatan dini bencana dengan teknologi sederhana.

**f. Bidang Sosial**

- 1) Jenis Pelayanan dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas :
  - a) Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti;
  - b) Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti;
  - c) Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti;
  - d) Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan
  - e) Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.
- 2) Mutu pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada poin 1 ditetapkan dalam standar teknis, yang sekurang-kurangnya memuat :
  - a) Standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa;
  - b) Standar jumlah dan kualitas sumber daya manusia kesejahteraan sosial; dan
  - c) Petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.
- 3) Penerimaan pelayanan dasar untuk setiap jenis pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada poin 1 yaitu warga negara dengan ketentuan :
  - a) Penyandang disabilitas terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam dan di luar panti;
  - b) Anak terlantar untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di dalam dan diluar panti;
  - c) Lanjut usia terlantar untuk jenis pelayanan daasr rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam dan diluar panti;



- d) Gelandangan dan pengemis untuk jenis pelayanan dasar rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di dalam dan di luar panti;
- e) Korban bencana provinsi untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana provinsi; dan
- f) Korban bencana kabupaten/kota untuk jenis pelayanan dasar perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Dalam rangka mendukung prioritas RKP Tahun 2021 dan prioritas RKPD provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 yang didasari oleh Undang-undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang pemerintah Daerah, RPP PUPK, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan Ratifikasi CPRD, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial, peraturan pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan kewilayahan, Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2017 tentang Standar Rehabilitasi Sosial bagi penyandang Disabilitas.

- 1) Meningkatkan kesejahteraan;
- 2) Masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan
- 3) Kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana prasarana desa, membangun potensi ekonomi lokal; serta
- 4) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan

**g. Bidang kependudukan dan catatan sipil**

Standar Pelayanan Minimal Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil terdiri dari:

- 1) Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga
- 2) Cakupan Penerbitan kartu Tanda Penduduk
- 3) Cakupan Perbitan Kutipan Akta Kelahiran (0-18 Tahun)
- 4) Cakupan Penerbitan Akta Kematian



Tabel 2-89  
Standar Pelayanan Minimal Tahun 2015–2019  
Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Langkat

No	JENIS PELAYANAN										
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Tar get	Capaian	Tar get	Capai an	Tar get	Capaian	Tar get	Capai an	Tar get	Capaian
1	Pelayanan Dokumen Kependudukan										
	a. Cakupan Penerbitan Kartu Keluarga	76	84,13	78	85,44	80	77,46	82	86,59	84	81,30
	b. Cakupan Penerbitan Kartu Tanda Penduduk	75	57,59	80	80,34	83	88,20	87	91,22	91	96,18
	c. Cakupan Penerbitan Akta Kelahiran	70	59,72	75	62,72	80	81,07	82	85,26	86	81,14
	d. Cakupan Penerbitan Akta Kematian	3	4,89	4	3,22	5	3,02	6	5,73	7	10,34

h. Bidang Komunikasi dan Informatika

Standar Pelayanan Minimal Bidang Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat;

- 1) Pelayanan Diseminasi Informasi Nasional terdiri dari ;
  - a) Media massa seperti media massa cetak, majalah, radio dan televisi.
  - b) Media baru seperti website (media online).
  - c) Media tradisional seperti pertunjukan rakyat
  - d) Media interpersonal seperti wawancara, negosiasi, diskusi, sarasehan dan lokakarya.
  - e) Media luar ruang/ tercetak/ rekam seperti spanduk, baliho, videotron, brosur, leaflet, booklet.
- 2) Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat (KIM) yaitu Cakupan pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) di tingkat kecamatan.

Tabel 2-90  
Standard Pelayanan Minimal Tahun 2015–2019  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Langkat

No	JENIS PELAYANAN	TAHUN (%)									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Tar get	Capai an	Tar get	Capai an	Tar get	Capai an	Tar get	Capai an	Tar get	Capai an
1.	Pelaksanaan Diseminasi										
	a. Media Massa	0	-	0	-	100	-	100	-	n/a	n/a



No	JENIS PELAYANAN	TAHUN (%)									
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Tar get	Capai an	Tar get	Capai an	Tar get	Capai an	Tar get	Capai an	Tar get	Capai an
	b. Media website (media online)	100	-	100	-	100	-	100	-	n/a	n/a
	c. Media tradisional seperti pertunjukan rakyat	0	-	0	-	40	-	60	-	n/a	n/a
	d. Media interpersonal seperti sarasehan, cema/diskusi dan lokakarya	0	-	0	-	60	-	80	-	n/a	n/a
	e. Media luar ruang	0	-	0	-	100		100	-	n/a	n/a
2.	Pengembangan dan Pemberdayaan kelompok Informasi Masyarakat (KIM)										
	– Cakupan Pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	0	-	0	-	60	-	80	-	n/a	n/a

i. Bidang Keluarga Berencana

Standar Pelayanan Minimal Bidang keluarga Berencana kabupaten Langkat;

- 1) Pelayanan Komunikasi Informasi dan Eduaksi Keluarga Berencana Sejahtera (KIE KB dan KS) terdiri dari ;
  - a) Cakupan pasangan Usia Subur yang isterinya dibawah 20 tahun (3,5 %)
  - b) Cakupan sasaran Pasangan Usia Subur menjadi peserta KB aktif (65%)
  - c) Cakupan pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need) 5%.
  - d) Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) per-KB (70%)
  - e) Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB (87%).
  - f) Ratio petugas Lapangan keluarga Berencana/penyuluh keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 petugas disetiap 2 (dua) desa/kelurahan.
  - g) Ratio Pembantu Pembinaan keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas disetiap desa/kelurahan.
- 2) Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi
  - Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun.



Tabel 2-91  
Standar Pelayanan Minimal Tahun 2015–2019  
Bidang keluarga Berencana

No	JENIS PELAYANAN										
		2015		2016		2017		2018		2019	
		Tar get	Capai an	Tar get	Capai an	Tar get	Capai an	Tar get	Capai an	Tar get	Capai an
1	Komunikasi Informasi dan edukasi Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera (KIE KB dan KS)										
	a. Cakupan Pangan Usia Subur yang Istrinya dibawah usia 20 tahun	3,5	2,58	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a
	b. Cakupan Sasaran PUS menjadi peserta KB aktif	65	68,63	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a
	c. Cakupam pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	5	23,53	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a
	d. Cakupan Anggota Bina Keluarga Balita (BKB) per-KB	70	69,44	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a
	e. Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB	87	67,97	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a
	f. Ratio Petugas Lapangan keluarga Berencana/Penyuluh Keluarga Berencana (PLKB/PKB) 1 Petugas disetiap 2 (dua) desa/kelurahan	0,5	0,27	-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a
	g. Ratio pembantu Pembina keluarga Berencana (PPKBD) 1 (satu) petugas disetiap desa/kelurahan			-	-	-	-	n/a	n/a	n/a	n/a
2	Penyediaan Alat dan Obat Kontrasepsi										
	– Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat 30% setiap tahun	0	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a
3	Penyediaan Informasi Data Mikro										
	– Cakupan penyediaan informasi data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan 100% setiap tahun	0	0	0	0	0	0	n/a	n/a	n/a	n/a

j. Bidang Pelayanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan

Standard Pelayanan Minimal Bidang Pelayanan Terpadu bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan

- 1) Penanganan Pengaduan/Laporan korban kekerasan Terhadap perempuan dan anak



- Cakupan Perempuan dan Anak korban kekerasan yang mendapat penanganan pengaduan oleh petugas Terlatih di dalam Unit Pelayanan Terpadu
- 2) Pelayanan Kesehatan Bagi Perempuan dan Anak korban kekerasan
  - Cakupan perempuan dan Anak Korban kekerasan yang Mendapatkan Layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas Mamu Tatalaksana KTP/A dan PPT/PKT di RS
- 3) Rehabilitasi Sosial Bagi perempuan dan Anak Korban kekerasan
  - Cakupan Layanan Rehabilitasi Sosial yang diberikan oleh Petugas Rehabilitasi Sosial Terlatih Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di dalam Unit Pelayanan Terpadu
  - Cakupan Layanan Bimbingan Rohani yang diberikan oleh Petugas bimbingan Rohani Terlatih bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Dalam Unit Pelayanan Terpadu
- 4) Penegakan dan Bantuan Hukum Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
  - Cakupan Penegakkan Hukum dari Tingkat Penyidikan sampai dengan putusan Pengadilan atas Kasus-kasus kekerasan
  - Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan Bantuan Hukum
- 5) Pemulangan dan Reintegrasi Sosial Bagi Perempuan dan Anak Korban kekerasan
  - Cakupan layanan Pemulangan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
  - Cakupan Layanan Reintegrasi Sosial bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan



## **BAB III**

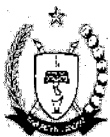
### **KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH**

#### **3.1 ARAH KEBIJAKAN EKONOMI DAERAH**

Mengacu pada Visi RPJPD Kabupaten Langkat 2005-2025 adalah “Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera”. Sedangkan arah kebijakan ekonomi daerah mengacu kepada Misi (3) “Mewujudkan Peningkatan Daya Saing Perekonomian Daerah”.

Sasaran pembangunan Bidang ekonomi Kabupaten Langkat dalam RPJPD Tahun 2005-2025 yaitu;

- a. Terwujudnya pembangunan perekonomian masyarakat berdasarkan keunggulan kompetitif, dengan berbasis agri industri strategis lainnya yang berwawasan lingkungan. Sehingga terbangun struktur ekonomi yang kuat dan berimbang dengan orientasi pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis di pedesaan.
- b. Terwujudnya pertumbuhan investasi yang mampu secara langsung mengangkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, baik investasi dalam sektor primer, sekunder dan tersier.
- c. Tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan yang berada diatas rata-rata Provinsi Sumatera Utara. Tingkat pendapatan perkapita pada tahun 2025 mencapai tingkat kesejahteraan setara negara-negara berpenghasilan menengah.
- d. Meningkatnya daya tahan dan daya saing dunia usaha, serta tumbuhnya wirausaha baru terutama Usaha Kecil Menengah.
- e. Tercapainya pembangunan dan terpeliharanya infrastruktur perhubungan yang memadai dan terintegrasi satu sama lain, baik perhubungan darat maupun perhubungan laut, yang semakin merata ke seluruh wilayah Kabupaten Langkat.
- f. Terbangun dan terpeliharanya jaringan irigasi untuk pemenuhan kebutuhan air bagi pertanian.
- g. Terwujudnya pengendalian pemanfaatan sumber daya air secara berkelanjutan untuk kemajuan daerah.
- h. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan listrik bagi masyarakat.
- i. Terpenuhinya jangkauan pelayanan jaringan komunikasi dan teknologi informasi (telematika) ke seluruh wilayah.



Untuk memperkuat daya saing pembangunan ekonomi Kabupaten Langkat diarahkan kepada:

- a. Pembangunan ekonomi yang berbasis pertanian dan bahari, serta industry strategis lainnya yang berwawasan lingkungan.
- b. Peningkatan investasi dan perdagangan.
- c. Peningkatan daya saing Usaha Kecil Menengah (UKM).
- d. Peningkatan dan pengembangan infrastruktur pendukung investasi.
- e. Peningkatan daya saing pariwisata.
- f. Pengembangan pasar daerah.
- g. Percepatan pemerataan pembangunan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan.
- h. Peningkatan Pengelolaan BUMD.

### **3.1.1 Kondisi Ekonomi Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan**

PDRB sebagai suatu indikator, punya peran penting dalam mengukur keberhasilan pembangunan yang telah dicapai dan juga dapat dijadikan suatu ukuran untuk menentukan arah pembangunan suatu daerah di masa yang akan datang. Kinerja pembangunan ekonomi pada Tahun 2019 di Indonesia, khususnya di Kabupaten Langkat sedikit meningkat dibandingkan pada Tahun 2018. Meningkatnya kinerja pembangunan ekonomi ini disebabkan karena kondisi sosial, politik dan keamanan yang lebih stabil dari pada tahun-tahun sebelumnya.

PDRB Kabupaten Langkat tahun 2018 atas harga berlaku juga mengalami peningkatan, baik dengan minyak bumi maupun tanpa minyak bumi. Dengan minyak bumi PDRB Kabupaten Langkat tahun 2018 sebesar Rp. 39.820,00 milyar rupiah meningkat jika dibandingkan tahun 2017 sebesar Rp. 37.949,47 milyar rupiah.

Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan memberikan kontribusi terbesar penyumbang PDRB Kabupaten Langkat atas harga berlaku yaitu sebesar 42,69%, sedangkan kontribusi penyumbang PDRB terkecil berada pada sektor Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu hanya sebesar 0,04%.



**Tabel 3-1**  
**Perkembangan PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan 2010 Tahun 2015–2019 (Juta Rupiah)**

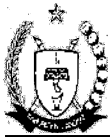
Tahun	Atas Dasar Harga Berlaku (Juta Rupiah)		Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (Juta Rupiah)	
	Dengan Minyak Bumi	Tanpa Minyak Bumi	Dengan Minyak Bumi	Tanpa Minyak Bumi
2015	30.761,65	30.146,99	24.321,61	23.806,01
2016	33.949,48	33.405,46	25.533,81	25.035,79
2017	37.032,25	36.464,24	26.823,48	26.331,70
2018	39,867,67	39.219,05	28.170,09	27.699,11
2019	42.515,19		29.597,77	

Sumber: Kabupaten Langkat dalam Angka

**Tabel 3-2**  
**Nilai Sektor dalam PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2017-2019**

No	LAPANGAN USAHA	2017		2018		2019	
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	14.524,14	39,22%	15.551,28	39,01%	16.471,77	38,74%
2	Pertambangan dan Penggalan	3.547,69	9,58%	3.826,74	9,60%	4.055,45	9,54%
3	Industri Pengolahan	6.010,75	16,23%	6.410,49	16,08%	6.711,51	15,79%
4	Pengadaan Listrik, Gas	75,26	0,20%	80,52	0,20%	85,40	0,20%
5	Pengadaan Air	13,05	0,04%	14,11	0,04%	15,24	0,04%
6	Konstruksi	2.725,86	7,36%	3.000,67	7,53%	3.242,94	7,63%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Speda Motor	4.055,49	10,95%	4.408,86	11,06%	4.799,03	11,29%
8	Transportasi dan Pergudangan	866,95	2,34%	940,86	2,36%	1.032,35	2,43%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	833,58	2,25%	909,10	2,28%	996,37	2,34%
10	Informasi dan Komunikasi	355,58	0,96%	395,92	0,99%	443,86	1,04%
11	Jasa Keuangan	756,82	2,04%	815,60	2,05%	847,05	1,99%
12	Real Estate	1.083,03	2,92%	1.189,55	2,98%	1.299,59	3,06%
13	Jasa Perusahaan	209,36	0,57%	225,38	0,57%	255,26	0,60%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajin	1.310,37	3,54%	1.371,85	3,44%	1.454,44	3,42%
15	Jasa Pendidikan	411,01	1,11%	446,08	1,12%	488,62	1,15%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	175,99	0,48%	196,04	0,49%	221,21	0,52%
17	Jasa lainnya	77,32	0,21%	84,62	0,21%	95,10	0,22%
PRODUKSI DOMESTIK REGIONAL BRUTO		37.032,25		39.867,67		42.515,19	



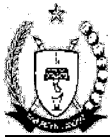


Dari tabel 3.2 diatas dapat dilihat seperti tahun-tahun sebelumnya sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar peranannya terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Langkat. Pada Tahun 2019 sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan menyumbang sebesar 38,74 persen dari total PDRB Kabupaten Langkat, kemudian disusul sektor Industri Pengolahan sebesar 15,79 persen, dan pada peringkat ketiga adalah sektor Perdagangan Besar dan Eceran yang menyumbang sebesar 11,29 persen. Sedangkan sektor yang memiliki peranan paling kecil dalam pembentukan PDRB Kabupaten Langkat Tahun 2019 adalah Sektor Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang yaitu sebesar 0,04 persen saja.

Untuk melihat produktifitas ekonomi di Kabupaten Langkat (mengabaikan inflasi) maka gunakan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) pada Tahun 2010, PDRB Kabupaten Langkat pada tahun 2019 sebesar 29.597,77 milyar. Pada tahun 2019 laju pertumbuhan setiap sektor hampir merata. Tidak terjadi perbedaan yang terlalu mencolok pada setiap sektor. Sektor yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah sektor Informasi dan Komunikasi sebesar 8,82 persen disusul Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 8,56 persen. Sedangkan sektor yang mengalami pertumbuhan terendah adalah sektor Industri Pengolahan yaitu sebesar 2,88 persen. Secara keseluruhan perekonomian di Kabupaten Langkat pada tahun 2019 mengalami peningkatan kinerja perekonomian makro berhasil tumbuh sebesar 5,07 persen.

**Tabel 3-3**  
**Nilai Sektor dalam PDRB Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Konstan 2010**  
**Tahun 2018–2019**

No	Lapangan Usaha/Sektor	2018			2019		
		PDRB	Distribusi	Laju	PDRB	Distribusi	Laju
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	12.051,57	42,78%	4,99%	12.737,61	43,04%	5,69%
2	Pertambangan dan Penggalian	2.768,63	9,83%	5,36%	2.931,33	9,90%	5,88%
3	Industri Pengolahan	4.024,17	14,29%	3,46%	4.140,11	13,99%	2,88%
4	Pengadaan Listrik, Gas	67,30	0,24%	4,49%	69,61	0,24%	3,43%
5	Pengadaan Air	10,87	0,04%	7,41%	11,71	0,04%	7,73%
6	Konstruksi	2.077,93	7,38%	5,62%	2.179,26	7,36%	4,88%
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Speda Motor	2.775,30	9,85%	5,19%	2.878,38	9,72%	3,71%
8	Transportasi dan Pergudangan	600,36	2,13%	6,67%	642,40	2,17%	7,00%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	591,04	2,10%	7,27%	641,66	2,17%	8,56%



10	Informasi dan Komunikasi	382,68	1,36%	9,98%	416,43	1,41%	8,82%
11	Jasa Keuangan	524,35	1,86%	4,26%	543,40	1,84%	3,63%
12	Real Estate	773,89	2,75%	6,43%	813,08	2,75%	5,06%
13	Jasa Perusahaan	145,60	0,52%	5,97%	153,78	0,52%	5,62%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajin	843,71	3,00%	3,35%	877,23	2,96%	3,97%
15	Jasa Pendidikan	340,07	1,21%	6,26%	357,48	1,21%	5,12%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	137,43	0,49%	6,25%	144,80	0,49%	5,36%
17	Jasa lainnya	55,19	0,20%	7,94%	59,50	0,20%	7,81%
	<b>PRODUKSI DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	<b>28.170,09</b>		<b>5,02%</b>	<b>29.597,77</b>		<b>5,07%</b>

Sumber: Kabupaten Langkat Dalam Angka

### PDRB Perkapita Kabupaten Langkat

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Langkat atas Dasar Harga Berlaku selama 5 tahun terakhir (2013 – 2018) menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pada Tahun 2015 nilai PDRB perkapita ADHB Kabupaten Langkat sebesar 30,74 juta rupiah, meningkat menjadi 38,87 juta rupiah di tahun 2018 dan kembali meningkat di tahun 2019 menjadi 45,52 juta rupiah. dengan rata-rata pertumbuhan 8,82 persen.

Tabel 3-4

### Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita Kabupaten Langkat Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) & Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Tahun 2015–2019

PDRB per Kapita	2015	2016	2017	2018	2019
ADHB					
Nilai (Juta Rupiah)	30,74	34,10	37,03	39,87	42,52
Pertumbuhan	10,30%	10,94%	8,58%	7,66%	6,64%
ADHK					
Nilai (Juta Rupiah)	24,32	25,53	26,82	28,17	29,60
Pertumbuhan	5,03%	4,98%	5,05%	5,02%	5,07%

Sumber: BPS Kabupaten Langkat

### Inflasi

Inflasi merupakan fenomena ekonomi sebagai wujud dari ketidakpastian yang hampir terjadi diseluruh daerah tanpa terkecuali Kabupaten Langkat. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus berkaitan dengan



mekanisme pasar yang disebabkan oleh berbagai faktor antara lain : konsumsi masyarakat yang meningkat atau adanya ketidaklancaran distribusi barang, dengan kata lain inflasi juga merupakan proses menurunnya nilai mata uang secara kontinyu.

Perhitungan inflasi di Kabupaten Langkat mengacu pada inflasi yang terjadi di Kota Medan dikarenakan Kota Medan merupakan kota terdekat dengan Kabupaten Langkat di Provinsi Sumatera Utara yang merupakan Kota Inflasi.

Dengan mengacu kepada capaian laju inflasi yang terjadi di Kota Medan selama tahun 2016-2019, Nilai inflasi selama 4 tahun terakhir berada di bawah 10 persen, yaitu 6,6 persen di tahun 2016, menurun di tahun 2017 yaitu sebesar 3,18 persen. Dan kembali menurun di tahun 2018 yang hanya sebesar 0,12 persen dan meningkat Tahun 2019 sebesar 2,43 persen.

Pada Tahun 2016, secara nominal terjadi kenaikan nilai PDRB atas dasar harga berlaku sebesar 34,1 triliun rupiah dan naik pada tahun 2019 nilainya menjadi 42,5 triliun rupiah. Namun kenaikan tersebut belum dapat dikatakan terjadi perbaikan produktivitas ekonomi secara riil karena masih adanya elemen inflasi di dalamnya.

Kondisi ekonomi Kabupaten Langkat sampai akhir Tahun 2019 secara umum dipengaruhi berbagai indikator makro ekonomi Kabupaten Langkat, antara lain pertumbuhan ekonomi makro, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), inflasi, struktur ekonomi, neraca perdagangan luar negeri, tingkat pengangguran, penduduk miskin, dan nilai tukar petani.

Berdasarkan sumber Badan Pusat Statistik Kabupaten Langkat berikut akan digambarkan pencapaian beberapa indikator makro ekonomi Kabupaten Langkat Tahun 2019. Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Langkat di Tahun 2019 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,2% lebih besar 01% dari Tahun 2018 sebesar 5,1%. Sedangkan tingkat inflasi Kabupaten Langkat yang mengacu kepada inflasi Kota Medan terjadi peningkatan Tahun 2019 mencapai 2,43% bila dibandingkan dengan Tahun 2018 yang hanya 0,12%.

Demikian juga dengan struktur ekonomi Kabupaten Langkat Tahun 2017 angka sementara didominasi oleh sektor pertanian, kehutanan dan perikanan dengan sumbangannya terhadap PDRB ADH sebesar 38,74% disusul industri pengolahan sebesar 15,79%, serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,29%.



Indikator kemajuan lainnya adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Langkat meningkat menjadi 5,30% Tahun 2019, begitu pula dengan tingkat penduduk miskin Kabupaten Langkat menjadi 9,91% Tahun 2019.

**Tabel 3-5**  
**Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Langkat Tahun 2016–2019**

No.	Indikator Makro	Satuan	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019
1	Pertumbuhan Ekonomi	Persen	4,98%	5,05%	5,10%	5,20%
2	PDRB-Harga Belaku	Triliun	34,1	37,0	39,9	42,5
3	PDRB-Harga Konstan	Triliun	25,5	26,8	28,2	29,6
4	PDRB Perkapita ADHB	Jutaan	33,40	36,01	38,50	40,81
5	Struktur Ekonomi *)					
	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	Persen	39,50%	39,22%	39,01%	38,74%
	Pertambangan dan Penggalian	Persen	9,79%	9,58%	9,60%	9,54%
	Industri Pengolahan	Persen	15,38%	16,23%	16,08%	15,79%
	Pengadaan Listrik dan Gas	Persen	0,19%	0,20%	0,20%	0,20%
	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	Persen	0,03%	0,04%	0,04%	0,04%
	Konstruksi	Persen	7,43%	7,36%	7,53%	7,63%
	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	Persen	11,29%	10,95%	11,06%	11,29%
	Transportasi dan Pergudangan	Persen	2,33%	2,34%	2,36%	2,43%
	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	Persen	2,16%	2,25%	2,28%	2,34%
	Informasi dan Komunikasi	Persen	0,94%	0,96%	0,99%	1,04%
	Jasa Keuangan dan Asuransi	Persen	2,06%	2,04%	2,05%	1,99%
	Real Estat	Persen	2,92%	2,92%	2,98%	3,06%
	Jasa Perusahaan	Persen	0,55%	0,57%	0,57%	0,60%
	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	Persen	3,63%	3,54%	3,44%	3,42%
	Jasa Pendidikan	Persen	1,13%	1,11%	1,12%	1,15%
	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	Persen	0,47%	0,48%	0,49%	0,52%
	Jasa Lainnya	Persen	0,21%	0,21%	0,21%	0,22%
6	Inflasi	Persen	6.6%	3.18%	0,12%	2,43%
7	Tingkat Pengangguran Terbuka	Persen	5,98%	7,36%	4,67%	5,30%
8	Penduduk Miskin	Persen	11.36%	11.15%	10,20%	9,91%
9	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Persen	69.13%	69.82%	70,27%	70,76%



### **3.1.2 Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun Rencana (2021) dan Satu Tahun Setelah Tahun Rencana (2022)**

Permasalahan ekonomi di Kabupaten Langkat adalah :

#### **1. Belum Optimalnya Pemanfaatan Potensi Ekonomi Berbasis SDA untuk Mendukung Peningkatan Kesejahteraan dan Daya Saing Ekonomi Wilayah**

Perkembangan ekonomi di Kabupaten Langkat mengalami penurunan yang ditunjukkan oleh kecenderungan penurunan laju pertumbuhan ekonomi tahun dari tahun 2013 ke tahun 2018. Pada tahun 2018 LPE Kabupaten Langkat mencapai angka 5,10% dan berada dibawah LPE Sumatera Utara. Kondisi ini tidak sejalan dengan potensi ekonomi Kabupaten Langkat yang memiliki potensi SDA yang tinggi dan ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN). Potensi ekonomi wilayah terutama dalam sektor pariwisata dan pertanian masih belum dimanfaatkan secara optimal, bahkan kontribusi sektor pariwisata dalam PDRB belum signifikan.

Kondisi ekonomi makro tersebut sangat bertolak belakang dengan potensi SDA yang dimiliki oleh Kabupaten Langkat. Meskipun mengalami peningkatan, pertumbuhan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan di Kabupaten Langkat belum berkembang secara signifikan dan mengalami beberapa persoalan. Pertanian tanaman pangan dan hortikultura di Kabupaten Langkat mengalami penurunan produktivitas yang diakibatkan oleh penurunan produksi dan alih fungsi lahan pertanian produktif. Persoalan lainnya adalah diakibatkan kurangnya daya saing komoditas perikanan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Langkat merupakan wilayah pesisir yang memiliki posisi strategis dengan menghadap Selat Malaka. Potensi ini belum dimanfaatkan dan menciptakan daya saing ekonomi maupun kesejahteraan untuk nelayan. Hal ini diakibatkan oleh belum optimalnya infrastruktur pendukung perikanan dan rendahnya penciptaan nilai tambah komoditas perikanan.

Penurunan produktivitas pertanian dan perikanan di Kabupaten Langkat juga berhubungan dengan isu ketahanan pangan. Di Kabupaten Langkat, penyerapan pangan masih belum optimal dan tingkat konsumsi pangan masih cukup rendah. Penyerapan pangan berhubungan dengan persoalan distribusi pangan antar wilayah tidak merata, belum optimalnya pencadangan pangan, dan belum memadainya sarana distribusi pangan. Hal yang sama juga terjadi pada subsektor



peternakan yang mengalami penurunan produktivitas karena kualitas produksi komoditas yang menurun.

Penurunan kualitas produksi komoditas peternakan terjadi karena belum optimalnya penanganan terhadap penyakit ternak dan belum optimalnya kelembagaan peternakan. Kabupaten Langkat juga memiliki kawasan perkebunan yang cukup luas. Namun, komoditas perkebunan masih belum memiliki daya saing akibat mutu benih yang rendah dan kualitas komoditas yang belum tersertifikasi untuk masuk ke dalam rantai industri.

Perekonomian di Kabupaten Langkat yang belum berkembang pesat juga berhubungan dengan tingkat kemiskinan penduduk. Pengembangan ekonomi di Kabupaten Langkat belum cukup signifikan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan penduduk. Masih terdapat penduduk yang menganggur dan belum terserap dalam pasar kerja lokal. Persoalan pengangguran di Kabupaten Langkat diakibatkan oleh rendahnya partisipasi angkatan kerja, rendahnya perluasan kesempatan kerja, rendahnya kualitas tenaga kerja dan belum terserapnya tenaga kerja lokal pada perusahaan di Langkat.

Rendahnya kualitas SDM di Kabupaten Langkat meningkatkan kebutuhan terhadap strategi ekonomi yang tidak mengandalkan penyerapan kerja secara besar-besaran. Dibutuhkan pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi kreatif, meskipun pada saat ini belum berkembang optimal. Rendahnya pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan ekonomi disebabkan oleh pertumbuhan wirausahawan baru, UMKM dan industri kecil yang lambat yang seharusnya dapat memperluas kesempatan kerja. Selain itu, pemanfaatan BUMDesa dan koperasi untuk pengembangan ekonomi juga belum optimal.

Kabupaten Langkat memiliki keunggulan wilayah secara absolut dan komparatif karena potensi sumber daya alamnya. Namun, dibutuhkan pengembangan ekonomi, SDM, dan infrastruktur untuk menciptakan daya saing kompetitif. Selain itu, dibutuhkan pula penciptaan iklim investasi yang kondusif terutama dalam pengembangan pariwisata. Pertumbuhan investasi di Kabupaten Langkat belum signifikan diakibatkan oleh rendahnya iklim investasi daerah akibat regulasi dan sistem perizinan yang belum mendukung dan kurangnya promosi investasi. Belum terdapat juga rencana tata ruang yang lebih operasional dan mekanisme insentif untuk mendukung investasi ekonomi masuk ke Kabupaten Langkat. Rendahnya investasi yang masuk dan pertumbuhan sektor tersier di Kabupaten Langkat juga mengakibatkan rendahnya pendapatan daerah sehingga mengakibatkan



rendahnya rasio kemandirian fiskal Kabupaten Langkat yang mengakibatkan pemerintah juga memiliki kemampuan yang rendah untuk membiayai pembangunan dan masih bergantung pada pemerintah pusat.

## **2. Rendahnya Kinerja Infrastruktur dan Penataan Ruang Untuk Mendukung Ekonomi dan Lingkungan Hidup Berkelanjutan.**

Pertumbuhan ekonomi di wilayah Kabupaten Langkat yang belum signifikan juga dipengaruhi juga oleh rendahnya kinerja infrastruktur di Kabupaten Langkat. Konektivitas wilayah di Kabupaten Langkat masih cukup rendah yang ditunjukkan dengan lambatnya penambahan panjang jalan di Kabupaten Langkat dan banyaknya jaringan jalan dalam kondisi rusak. Konektivitas antar desa juga masih rendah akibat minimnya pengembangan jalan baru. Konektivitas wilayah di Kabupaten Langkat juga berkaitan dengan minimnya pelayanan angkutan umum di Kabupaten Langkat. Belum seluruh wilayah di Kabupaten Langkat terlayani oleh angkutan umum dan terintegrasi. Kondisi ini mempersulit pengembangan pariwisata di Kabupaten Langkat karena aksesibilitas ke daya tarik wisata yang sulit.

Penataan ruang di Kabupaten Langkat juga belum optimal dalam mendukung pertumbuhan ekonomi. Ketimpangan pembangunan wilayah terjadi karena fokus pembangunan masih terpusat di beberapa lokasi. Akibatnya pengembangan ekonomi terutama untuk pengembangan pariwisata yang berkelanjutan belum dapat tercipta akibat pemanfaatan ruang yang belum merata dan sesuai dengan tujuan penataan ruang.

Aksesibilitas penduduk terhadap layanan sarana prasarana dasar terutama permukiman masih rendah. Kinerja infrastruktur permukiman seperti layanan air bersih, sanitasi, dan persampahan di Kabupaten Langkat belum mencakup seluruh wilayah. Pemanfaatan peran desa dan komunitas di lingkungan perumahan belum optimal untuk melakukan pengelolaan infrastruktur tersebut. Selain itu, masih banyak terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Langkat terutama perdesaan. Persoalan ini tidak hanya mengakibatkan munculnya kawasan kumuh, tetapi juga menurunkan kualitas kesehatan yang berdampak pada kesejahteraan penduduk.

Secara terperinci, ekonomi Kabupaten Langkat tetap diproyeksikan akan mengalami peningkatan, meskipun pada tahun 2020 terjadi pandemik covid-19 yang menghambat aktifitas perekonomian dunia. Pada tahun 2021 PDRB ADHB



diproyeksikan ada pada berkisar angka Rp 50.047,84 Triliun dan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) sebesar 32.670,03 Triliun. Angka ini mengalami peningkatan jika dibandingkan tahun 2020, dimana PDRB ADHB diproyeksikan sebesar 46.125,87 Triliun dan PDRB ADHK sebesar 31.094,58 Triliun. Secara keseluruhan, pada tahun 2021 ekonomi Kabupaten Langkat diperkirakan akan tumbuh sebesar 4,29-5,29%

**Tabel 3.6**  
**Proyeksi PDRB ADHB dan PDRB ADHK (juta) 2020-2021**

No	Lapangan Usaha/Sektor	ADHB		ADHK	
		TAHUN		TAHUN	
		2020	2021	2020	2021
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	17.738,82	19.103,34	13.366,71	14.026,88
2	Pertambangan dan Penggalian	4.359,82	4.687,02	3.097,25	3.272,56
3	Industri Pengolahan	7.338,99	8.025,14	4.294,53	4.454,72
4	Pengadaan Listrik, Gas	92,76	100,75	74,02	78,71
5	Pengadaan Air	16,44	17,74	12,54	13,43
6	Konstruksi	3.547,29	3.880,21	2.302,92	2.433,59
7	Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Speda Motor	5.240,78	5.723,18	3.020,00	3.168,60
8	Transportasi dan Pergudangan	1.135,28	1.248,48	687,90	736,63
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.103,50	1.222,15	692,15	746,62
10	Informasi dan Komunikasi	495,49	553,13	456,18	499,72
11	Jasa Keuangan	910,80	979,36	568,18	594,09
12	Real Estate	1.426,49	1.565,78	857,44	904,22
13	Jasa Perusahaan	282,64	312,95	162,72	172,18
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajin	1.554,29	1.660,98	906,19	936,10
15	Jasa Pendidikan	530,94	576,93	377,96	399,61
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	245,36	272,15	153,62	162,97
17	Jasa lainnya	106,17	118,53	64,26	69,40
	<b>PRODUKSI DOMESTIK REGIONAL BRUTO</b>	46.125,87	50.047,84	31.094,58	32.670,03





### **3.2 ARAH KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

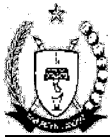
Acuan yang mendasari pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Langkat sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; yang bertujuan agar pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan kebermanfaatan untuk masyarakat.

Beberapa prinsip disiplin anggaran dalam penyusunan anggaran daerah antara lain adalah: (1) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; (2) Penganggaran pengeluaran harus didukung oleh kepastian penerimaan daerah dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi anggarannya dalam APBD/Perubahan APBD; (3) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD, dibukukan dalam rekening Kas Umum Daerah.

Kerangka pengelolaan keuangan pemerintah Kabupaten Langkat secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban. Untuk mengatur kemampuan keuangan daerah Kabupaten Langkat perlu dilakukan analisa kondisi kinerja keuangan pada periode RKPD sebelumnya (2020) maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya. Berdasarkan analisis tersebut, diperoleh proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai kerangka pendanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten Langkat di masa yang akan datang.

Rencana pendanaan pada RKPD ini menjadi dasar dalam penetapan kerangka pendanaan untuk pembangunan tahunan baik dalam Renja OPD. Dalam konteks visualisasi dan aktualisasi perubahan yang diinginkan dalam arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah adalah:

- Mengembangkan pengelolaan keuangan daerah yang bertumpu pada kepentingan publik. Hal ini tidak hanya dilihat dari besarnya proporsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan publik, tetapi juga terlihat pada tingkat partisipasi masyarakat



dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan/pengendalian keuangan daerah.

- Mengembangkan kerangka hukum dan administrasi untuk pembiayaan dan investasi berdasarkan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik, yaitu efisien, efektif, ekonomis, transparan dan akuntabel, serta adil dan patut.
- Prinsip pengadaan dan pengelolaan barang dan jasa daerah secara lebih profesional dan bertanggung jawab.
- Meningkatkan standar dan sistem akuntansi keuangan daerah, laporan keuangan daerah, peran akuntan independen dalam pemeriksaan, pemberian opini dan penilaian kinerja anggaran, serta transparansi informasi anggaran kepada publik.
- Aspek pembinaan dan pengawasan keuangan daerah, baik melalui pengawasan fungsional maupun pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat.
- Mengembangkan sistem informasi keuangan daerah untuk menyediakan informasi anggaran yang akurat sebagai komitmen pemerintah daerah dalam rangka transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah.

### **3.2.1 Realisasi dan Proyeksi Pendapatan Daerah**

Sumber pendapatan daerah berasal dari:

- 1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari kelompok Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah
- 2) Dana Perimbangan yang meliputi Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus;
- 3) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah meliputi Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya, Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus.

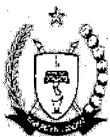
Pendapatan dari Dana Perimbangan diluar kendali Pemerintah Daerah karena alokasi dana tersebut ditentukan oleh Pemerintah Pusat berdasarkan formula yang telah ditetapkan. Dana tersebut dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kewenangan Pemerintahan Daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi kepada daerah terutama untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Penerimaan dari dana perimbangan sangat bergantung dari penerimaan negara dan formula DAU. Dengan demikian untuk menjamin pendapatan daerah, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara harus memfokuskan pada upaya pengembangan dan peningkatan PAD.



**Tabel 3-7**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kabupaten Langkat**  
**Tahun 2017-2021 (dalam miliar rupiah)**

No	Uraian	APBD TA. 2017	APBD TA. 2018	APBD TA. 2019	APBD TA. 2020	Proyeksi/Target Tahun Anggaran 2021**
<b>1.1</b>	<b>Pendapatan Asli Daerah</b>	<b>134.595.233.000,00</b>	<b>148.932.567.030,00</b>	<b>151.480.847.030,00</b>	<b>163.480.847.030,00</b>	<b>483.615.648.061,57</b>
1.1.1	Pajak Daerah	50.658.000.000,00	58.260.000.000,00	61.942.000.000,00	69.586.254.380,00	116.938.050.349,44
1.1.2	Retribusi Daerah	21.362.171.551,00	24.414.179.350,00	24.947.179.350,00	29.345.779.350,00	27.947.101.882,31
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.200.000.000,00	7.200.000.000,00	6.200.000.000,00	9.950.000.000,00	10.426.249.240,78
1.1.4	Lain-lain PAD yang sah	57.375.061.449,00	59.058.387.680,00	58.391.667.680,00	54.598.813.300,00	328.304.246.589,04
<b>1.2</b>	<b>Dana Perimbangan</b>	<b>1.814.105.624.723,00</b>	<b>1.746.118.831.163,00</b>	<b>1.333.962.601.637,00</b>	<b>1.385.870.595.000,00</b>	<b>2.074.242.995.867,83</b>
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Bukan Pajak	179.159.458.278,00	151.798.261.163,00	154.569.737.637,00	173.177.058.000,00	196.465.733.491,93
1.2.2	Dana Alokasi Umum	1.179.392.864.000,00	1.179.392.864.000,00	1.179.392.864.000,00	1.212.693.537.000,00	1.415.515.205.499,90
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	455.553.302.445,00	414.927.706.000,00	-	-	462.262.056.876,00
<b>1.3</b>	<b>Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah</b>	<b>399.369.796.444,00</b>	<b>369.079.173.885,00</b>	<b>333.610.400.956,00</b>	<b>391.684.912.129,00</b>	<b>955.098.968.621,61</b>
1.3.1	Hibah	108.318.800.000,00	105.652.502.057,00	105.380.000.000,00	102.322.200.000,00	250.676.116.816,62
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya	98.187.173.444,00	75.039.416.828,00	49.043.145.956,00	83.916.444.129,00	151.733.452.171,22
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonom Khusus	-	-	-	-	-
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	-	9.200.000.000,00	-	-	-
1.3.6	Pendapatan Lainnya	-	-	-	-	-
1.3.7	Dana Desa	192.863.823.000,00	179.187.255.000,00	179.187.255.000,00	205.446.268.000,00	552.689.399.633,77
	<b>Total Pendapatan</b>	<b>2.348.070.654.167,00</b>	<b>2.264.130.572.078,00</b>	<b>1.819.053.849.623,00</b>	<b>1.941.036.354.159,00</b>	<b>3.512.957.612.551,01</b>



Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan dapat menjadi tolok ukur kemandirian suatu daerah. Semakin besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan daerah menunjukkan tingkat kemandirian suatu daerah. Atau dengan kata lain, ketergantungan terhadap pemerintah pusat melalui dana perimbangan semakin kecil.

Realisasi pendapatan daerah Kabupaten Langkat menunjukkan perubahan yang bervariasi dari tahun ke tahun, dengan rata-rata pertumbuhan pada tahun 2017–2020 mencapai -5,51% per tahun. Perubahan tersebut sebagian besar dipengaruhi oleh peningkatan realisasi DAK dan dana bagi hasil pajak dari provinsi.

Jika dilihat dari tingkat pertumbuhan PAD tahun 2017, angka pertumbuhannya cenderung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan 6,76%. Namun kontribusinya ke Pendapatan Daerah masih relatif kecil. Penerimaan dari Pajak Daerah bertumbuh sebesar 11,22% dan Retribusi Daerah bertumbuh sebesar 11,37%/tahun. Nilai ini masih tergolong relatif kecil, diperlukan adanya upaya yang lebih konkrit agar PAD meningkat secara wajar dan proporsional, agar Kabupaten Langkat mampu mengurangi ketergantungan pada pendanaan yang bersumber dari Pemerintah Pusat.

Secara umum besarnya realisasi Dana Perimbangan tahun 2017–2020 cenderung menurun setiap tahun kecuali di Tahun 2020 terjadi sedikit peningkatan, dengan rata-rata penurunan sebesar -7,82% per tahun hal ini disebabkan terjadi penurunan Pendapatan dari DAK yang begitu signifikan. Khusus untuk pendapatan DAK, besaran penerimaannya tergantung dengan kegiatan yang diusulkan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional, sehingga dapat dipahami bila pertumbuhannya cenderung fluktuatif.

Pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dalam APBD di Kabupaten Langkat terdiri dari pendapatan hibah, dana bagi hasil pajak dari provinsi atau pemda lainnya dan Dana Desa. Proporsi Lain-lain Pendapatan Yang Sah terhadap pendapatan daerah Kabupaten Langkat mengalami penurunan pada tahun 2017-2019 tetapi mengalami kenaikan pada Tahun 2020-2021 sehingga secara umum terjadi kenaikan rata-rata mencapai 0,07%

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya serta Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus memberikan kontribusi terbesar terhadap penerimaan dari Lain-lain Pendapatan yang Sah. Kontribusi masing-masing bervariasi setiap tahunnya. Kabupaten Langkat terakhir menerima pendapatan melalui Bantuan Keuangan dari Provinsi pada Tahun 2018 sebesar Rp. 9.200.000.000,- Sementara itu bagi hasil pajak daerah dari provinsi cenderung menurun dalam lima tahun terakhir.



### **3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar yang merupakan sebuah kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh kembali pembayarannya oleh daerah.

Belanja daerah berkaitan dengan pendapatan daerah yang dapat diserap oleh suatu daerah. Sumber-sumber keuangan yang menjadi penerimaan pemerintah daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan lain-lain Pendapatan yang Sah, diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. Penerimaan pemerintah daerah tersebut merupakan sumber pendapatan yang sangat diperlukan guna terselenggaranya pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pelayanan publik. Dalam hal ini, ketersediaan sumber keuangan tersebut harus sebanding dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pemerintahan.

Komponen Belanja Daerah ialah terdiri atas:

1. Belanja Tidak Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa Lainnya dan Belanja Tidak Terduga.
2. Belanja Langsung yang didalamnya terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal.

Pada tahun 2021, proyeksi belanja Kabupaten Langkat mencapai Rp. 3.751.258.719.194,34. Besaran belanja ini meningkat dari tahun 2020 dimana proporsi masing-masing pos belanja peningkatannya relatif tidak banyak mengalami perubahan dan belanja tidak terduga masih dalam perhitungan.

Dari pos Belanja Tidak Langsung, pengeluaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar jumlahnya. Pada tahun 2021 proporsi belanja Total Belanja Pegawai terhadap Total Belanja Tidak Langsung mencapai 53,86%. Tingginya alokasi belanja untuk pegawai ini perlu diperhatikan, apakah timbal balik kepada masyarakat berupa pelayanan publik sudah sepadan, serta dengan tingginya proporsi tersebut berakibat mengurangi besaran belanja langsung secara signifikan.



**Tabel 3-8**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah**  
**Kabupaten Langkat Tahun 2017–2021**

No	Uraian	Realisasi	Realisasi	Target	Proyeksi	Proyeksi
		Tahun 2017 (Rp)	Tahun 2018 (Rp)	Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
A	JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG	1.445.004.535.994,00	1.501.672.512.862,74	1.193.104.356.944,00	1.318.509.086.096,00	<b>2.099.821.218.079,06</b>
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.445.004.535.994,00	1.501.672.512.862,74	1.193.104.356.944,00	1.318.509.086.096,00	<b>2.099.821.218.079,06</b>
2.1.1	Belanja Pegawai	1.069.676.930.062,00	1.099.295.943.095,74	862.626.372.443,00	958.348.606.781,50	1.131.047.303.449,55
2.1.2	Belanja Bunga	0			0	0,00
2.1.3	Belanja Subsidi	0			0	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	29.761.243.100,00	72.960.101.900,00	3.734.800.000,00	3.867.300.632,00	22.610.322.043,36
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	9.165.300.000,00	9.971.000.000,00	6.032.400.000,00	6.438.038.004,00	2.219.901.224,28
2.1.6	Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kab/kota dan Pemerintah Desa	3.505.085.000,00	3.795.917.935,00	4.088.917.935,00	4.475.077.935,00	939.910.888.141,22
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintah Desa	329.795.977.832,00	314.010.549.932,00	313.403.515.796,00	344.033.327.500,00	3.784.793.458,29
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.100.000.000,00	1.639.000.000,00	3.218.350.770,00	1.346.735.243,50	248.009.762,36
B	JUMLAH BELANJA LANGSUNG	1.041.220.048.103,99	889.443.031.200,18	623.949.492.679,00	619.027.268.063,00	<b>1.651.437.501.115,28</b>
2.2	Belanja Langsung	1.041.220.048.103,99	889.443.031.200,18	623.949.492.679,00	619.027.268.063,00	<b>1.651.437.501.115,28</b>
2.2.1	Belanja Pegawai	125.882.696.631,00	113.885.049.246,00	116.867.240.834,00	117.490.195.106,00	209.940.057.888,57
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	339.031.900.218,80	350.996.199.160,50	287.695.705.728,00	304.791.810.829,00	539.837.277.411,26
2.2.3	Belanja Modal	576.305.451.254,19	424.561.782.793,68	219.386.546.117,00	196.745.262.128,00	901.660.165.815,45
C	TOTAL JUMLAH BELANJA	2.486.224.584.097,99	2.391.115.544.062,92	1.817.053.849.623,00	1.937.536.354.159,00	<b>3.751.258.719.194,34</b>



Dari tabel diatas bahwa proporsi Belanja Tidak Langsung untuk Tahun 2021 sebesar 55,98% dan proporsi Belanja Langsung sebesar 44,02% .

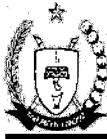
Kebijakan belanja daerah juga sangat erat kaitannya dengan sistem manajemen keuangan daerah, system penganggaran, maupun sistem akuntansi. Seiring dengan dilaksanakannya reformasi bidang keuangan, masyarakat semakin menuntut adanya pengelolaan keuangan publik secara transparan, sehingga tercipta akuntabilitas publik (*Public Accountability*) dengan mendasarkan pada prinsip *value for money*. Disamping itu, pengelolaan belanja daerah harus berlandaskan anggaran kinerja (*performance budget*), yaitu belanja daerah yang berorientasi pada kepentingan publik.

Arah pengelolaan belanja daerah harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Terutama untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan dan pengurangan pengangguran, sehingga dengan demikian perlu pengelolaan dengan hasil yang baik dan biaya rendah (*work better and cost less*) melalui pendekatan kinerja (*performance oriented*). Pengeluaran daerah juga harus mampu menumbuhkan profesionalisme kerja di setiap organisasi terkait, berdasarkan pada Standar Analisa Belanja (SAB), Standar Harga, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Harga, Tolok Ukur Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal (SPM), serta memperhatikan prinsip *value for money*. Identifikasi belanja pengeluaran akan dibedakan menurut belanja langsung dan tidak langsung, guna meningkatkan aspek efektifitas dan akuntabilitas.

Belanja pegawai pada Tahun 2021 diproyeksikan sebesar Rp 1.131.047.303.449,55 untuk mengakomodir belanja gaji pegawai, pengangkatan CPNS dan kenaikan sertifikasi guru.

### **3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Realisasi Penerimaan Pembiayaan dari Tahun 2017-2019 mengalami penurunan dan di Tahun 2020 mengalami peningkatan, dimana sumber utama penerimaan sejak Tahun 2017 hanya dari SILPA. Realisasi pembangunan daerah dari Tahun 2021 diprediksi sebesar Rp. 215.000.954.692,45



**Tabel 3-9**  
**Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah**  
**Kabupaten Langkat Tahun 2017–2021**

No	Uraian	Realisasi Tahun 2017 (Rp)	Realisasi Tahun 2018 (Rp)	Realisasi Tahun 2019 (Rp)	Tahun 2020 (Rp)	Proyeksi Tahun 2021 (Rp)
<b>A</b>	<b>JUMLAH PENERIMAAN BIAYA</b>	<b>141.653.929.930,99</b>	<b>130.468.532.865,92</b>	<b>129.610.314.419,37</b>	<b>264.938.924.196,36</b>	<b>219.250.954.692,45</b>
3.1	Penerimaan Pembiayaan	141.653.929.930,99	130.468.532.865,92	129.610.314.419,37	264.938.924.196,36	219.250.954.692,45
3.1.1	SILPA	141.653.929.930,99	130.468.532.865,92	129.610.314.419,37	264.938.924.196,36	219.250.954.692,45
3.1.2	Pencairan Dana	0	0	0	0	0
3.1.3	Hasil Penjualan Kekayaan yang Dipisahkan	0	0	0	0	0
3.1.4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
3.1.5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	0	0	0
3.1.6	Penerimaan Piutang Daerah	0	0	0	0	0
3.1.7	Penerimaan Dana Bergulir	0	0	0	0	0
<b>B</b>	<b>JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>3.374.256.536,00</b>	<b>2.000.000.000,00</b>	<b>3.500.000.000,00</b>	<b>4.250.000.000,00</b>
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	3.500.000.000,00	3.374.256.536,00	2.000.000.000,00	3.500.000.000,00	4.250.000.000,00
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0	0	0
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi Daerah)	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	3.500.000.000,00	4.250.000.000
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	1.500.000.000,00	1.374.256.536,00	0	0	0
	Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0	0
<b>C</b>	<b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>138.153.929.930,99</b>	<b>127.094.276.329,92</b>	<b>127.610.314.419,37</b>	<b>261.438.924.196,36</b>	<b>215.000.954.692,45</b>



---

## **BAB IV**

### **SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH**

#### **4.1 Tujuan Dan Sasaran Pembangunan**

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang dan yang dihadapi Kabupaten Langkat, dan mempertimbangkan isu- isu strategis baik dalam konteks nasional dan provinsi, maka dengan merujuk kepada :

- a. Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 pada Bab II Bagian Kesembilan, tentang Penyusunan RKPD bagi Daerah yang Belum Memiliki RPJMD, dimana pada Pasal 147 Ayat (2) Untuk menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD Kabupaten/Kota dan mengacu pada RPJMD Provinsi untuk keselarasan program dan kegiatan pembangunan daerah kabupaten/kota dengan pembangunan daerah provinsi dan pada Ayat (3) dinyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menjadi bagian dari RPJMD yang akan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- b. Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD merupakan penjabaran dari RPJM Daerah dan mengacu pada RKP, memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- c. Pasal 263 Ayat (4) Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan programstrategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Berlandaskan pada peraturan perundang-undangan tersebut, maka Prioritas dan Sasaran RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 ini disusun berdasarkan kepada :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 06 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005-



2025, dengan mempedomani Sasaran Pokok/Arah Kebijakan RPJPD untuk Tahapan RPJMD Ke Empat Tahun 2019-2023;

- b. Sinkronisasi dengan Rancangan Awal RKPD Provinsi Tahun 2021 dengan mencermati Isu Strategis, Prioritas Provinsi Sumatera Utara, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Pembangunan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021.
- c. Sinkronisasi dengan RKP Tahun 2021, dengan mencermati Isu Strategis, Prioritas Nasional, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2021. Selain itu dalam penentuan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2021, juga dengan melihat dan mencermati :
  1. Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 09 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Langkat 2013-2033;
  2. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Langkat berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses DPRD Kabupaten Langkat;
  3. Hasil evaluasi pembangunan Tahun 2019, dan tahun berjalan 2020, serta perumusan permasalahan dan tantangan pada Tahun 2021 yang merupakan tahun kedua dari RPJMD 2019-2024 dari Bupati dan Wakil Bupati Terpilih.

#### **4.1.1 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah berdasarkan RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025**

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Langkat Tahun 2005–2025 bahwa visi pembangunan Kabupaten Langkat adalah masyarakat yang religius, maju berdaya saing dan sejahtera. Guna mewujudkan visi pembangunan daerah Kabupaten Langkat ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun toleran dan penuh kesejukan, serta memelihara dan mengembangkan budaya berdasar kearifan lokal.
2. Mewujudkan percepatan pencapaian kesejahteraan sosial.
3. Mewujudkan peningkatan daya saing perekonomian daerah.
4. Terwujudnya Tata Pemerintahan Kabupaten Langkat yang Bersih Baik, Berkeadilan, Demokratis, dan Berlandaskan Hukum.
5. Mewujudkan lingkungan hidup yang asri dan lestari.



Sedangkan tujuan pembangunan jangka panjang Tahun 2005 – 2025 adalah untuk mewujudkan Kabupaten Langkat Yang Religius, Maju, Sejahtera dan Berdaya Saing, dan untuk mencapai tujuan pembangunan jangka panjang tersebut maka sasaran jangka panjang yang hendak dicapai Kabupaten Langkat adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kehidupan beragama yang rukun toleran dan penuh kesejukan, memelihara serta mengembangkan budaya berdasarkan kearifan lokal.
2. Terwujudnya percepatan pencapaian kesejahteraan sosial.
3. Mewujudkan peningkatan daya saing perekonomian daerah.
4. Terwujudnya Tata Pemerintahan Kabupaten Langkat yang Bersih Baik, Berkeadilan, Demokratis dan Berlandaskan Hukum.
5. Terwujudnya lingkungan hidup yang asri dan lestari.

Sebagai ukuran tercapainya sasaran pembangunan jangka panjang diarahkan pada hal-hal sebagai berikut :

1. Mewujudkan kehidupan beragama yang rukun toleran dan penuh kesejukan, memelihara serta mengembangkan budaya berdasarkan kearifan lokal.
2. Mewujudkan percepatan pencapaian kesejahteraan sosial.
3. Meningkatkan daya saing perekonomian daerah.
4. Terwujudnya Tata Pemerintahan Kabupaten Langkat yang Bersih, Baik, Berkeadilan, Demokratis, dan Berlandaskan Hukum.
5. Terwujudnya lingkungan hidup yang asri dan lestari.

Berlandaskan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberkelanjutan RPJM ke-4 Tahun 2019-2024 ditujukan untuk mewujudkan visi Kabupaten Langkat yaitu “Masyarakat yang Religius, Maju, Berdaya Saing dan Sejahtera” melalui percepatan dan sinergisitas pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh diberbagai aspek kehidupan politik serta supremasi hukum, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat. Terwujudnya sinergi antara aparat hukum dan masyarakat dalam bidang keamanan, terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan dan berwibawa yang berdasarkan hukum,



serta birokrasi yang profesional dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya kesejahteraan sosial, tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayannya pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Sumber daya manusia Kabupaten Langkat diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, dinamis dan berorientasi iptek.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antar sektor. Lembaga perekonomian sudah tersusun, tertata serta berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan perkapita pada Tahun 2025 mencapai kesejahteraan, tingkat penganggaran dan penduduk miskin semakin rendah.

#### **4.1.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024**

Perumusan Visi Kab. Langkat mencerminkan apa yang ingin dicapai pada kurun waktu 5 (lima) tahun dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan, peluang yang dihadapi serta mempertimbangkan keberagaman budaya yang hidup di masyarakat, isu-isu strategis dan kondisi perekonomian.

Dari hal tersebut ditetapkan Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2019-2024 (Ranwal RPJMD Kab. Langkat Tahun 2019-2024) yaitu Visi Kabupaten Langkat 2019-2024 menggambarkan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Langkat yang dapat terwujud melalui upaya pemerintah bersama DPRD, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya, yaitu :

**“MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN”**



Makna dalam visi tersebut adalah sebagai berikut :

### **Maju**

Kabupaten Langkat memiliki tingkat perekonomian yang maju dan unggul dengan berbasis pengelolaan SDA yang berkelanjutan dengan didukung infrastruktur yang memadai. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh masyarakat yang berkualitas dan memiliki modal sosial yang tinggi. Kemajuan daerah Kabupaten Langkat juga dicirikan oleh tata kelola pemerintahan Kabupaten Langkat yang baik dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi serta inovasi.

### **Sejahtera**

Masyarakat Kabupaten Langkat tercukupi kebutuhan dasarnya dalam aspek, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan perumahan yang sehat dan tentram. Kesejahteraan dalam masyarakat juga terwujud dengan adanya pelestarian budaya dan tertanamnya nilai-nilai budaya, kebangsaan dan kerukunan dalam masyarakat. Selain itu, partisipasi dan kerjasama di seluruh lapisan masyarakat juga terwujud dalam pengentasan kemiskinan dan penyelesaian masalah-masalah sosial.

### **Religius**

Kabupaten Langkat yang religius terwujud dengan meningkatnya kegiatan-kegiatan keagamaan di Kabupaten Langkat yang didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Nilai-nilai agama juga diresapi masyarakat dan ditunjukkan dalam pikiran, sikap, perilaku, tindakan, dan aktivitas sehari-hari. Perwujudan nilai-nilai agama dilakukan dalam berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Selain itu, masyarakat dan aparatur pemerintah menjadikan norma agama sebagai pedoman sikap dan perilaku sehari-hari dalam aspek penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### **Berkelanjutan**

Pembangunan Kabupaten Langkat dilakukan dengan prinsip berkelanjutan pada tiga aspek utama, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan. Pembangunan diprioritaskan pada pengembangan sektor pariwisata dan penyediaan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Langkat meningkat dengan kontribusi sektor pariwisata yang meningkat tanpa mengesampingkan pengembangan ekonomi pada sektor-sektor lainnya.



Pengembangan pariwisata didukung dengan pembangunan infrastruktur untuk mendukung perekonomian dan menciptakan kesejahteraan masyarakat tanpa menimbulkan dampak negatif yang signifikan pada lingkungan.

### **Misi**

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut, dijabarkan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Langkat sebagai berikut.

1. Mewujudkan kerukunan, ketentraman, dan ketertiban dan pelestarian budaya dalam masyarakat sebagai penguatan ideologi bangsa
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur strategis dan berkelanjutan
5. Mengoptimalkan Sumber Daya Alam (SDA) dengan berbasis penataan ruang dan pelestarian lingkungan hidup berkelanjutan
6. Menciptakan reformasi birokrasi dan meningkatkan partisipasi publik dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih

Dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, ditetapkan tujuh tujuan utama pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024. Perumusan tujuan adalah tahap perumusan strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan.

Perumusan tujuan merupakan salah satu tahap perencanaan kebijakan (*policy planning*) yang memiliki titik kritis (*critical point*) dalam penyusunan RPJMD yang dirumuskan melalui berbagai pendekatan (teknokratik, politis, partisipatif, dan *top-down & bottom-up*).

Tujuan merupakan operasionalisasi penjabaran visi-misi Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Langkat ke dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan. Perumusan tujuan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih juga menjadi landasan



perumusan tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun ke depan.

Tujuan juga menggambarkan dampak (*impact*) keberhasilan pembangunan daerah yang diperoleh dari pencapaian berbagai program prioritas terkait. Tujuan dari masing-masing misi pembangunan daerah Kabupaten Langkat ialah seperti yang ditunjukkan dalam Tabel berikut.

**Tabel 4-1**  
**Penjabaran Visi, Misi dan Tujuan Jangka Menengah Kabupaten Langkat 2019-2024**

VISI	MISI	TUJUAN
MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN	Misi 1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial	1.1 Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial
	Misi 2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	2.1 Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan
	Misi 3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata	3.1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah
	Misi 4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan	4.1 Terciptanya penurunan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup
	5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	5.1 Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi

**Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2019–2024**

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan. Sasaran memiliki kinerja yang diukur dalam indikator yang menunjukkan hasil (outcomes) dari dilaksanakannya strategi-strategi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Sasaran beserta indikator kinerja yang hendak dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun adalah sebagai berikut.



**Tabel 4-2**  
**Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Langkat 2019–2024**

MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	SATUAN	UTAMA	PENDUKUNG
<b>Misi 1.</b> Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial	1.1 Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial	1.1.1 Meningkatnya status desa	Peningkatan status desa (berdasarkan Indeks Desa Membangun/IDM)		Dinas PMD	Kecamatan
			- Desa Maju	Desa		
			- Desa Berkembang	Desa		
			- Desa Tertinggal	Desa		
			- Desa Sangat Tertinggal	Desa		
		1.1.2 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah PMKS	Orang	Dinas Sosial	Dinas PP, KB dan PPA
			Indeks Pembangunan Gender	Poin		
		1.1.3 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah prestasi pemuda :	Medali/Piala	Dinas Pemuda dan Olahraga	Kecamatan
			- Internasional	Medali/Piala		
			- Nasional	Medali/Piala		
			- Daerah	Medali/Piala		
		1.1.4 Meningkatnya pengembangan budaya lokal	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal	%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
		1.1.5 Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	Kantor Kesbangpol	Satpol PP, Dinas PMD
		1.1.6 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	%	Dinas PMD	Kecamatan
<b>Misi 2.</b> Meningkatkan pelayanan kebutuhan	2.1 Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dasar di	2.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Dinas Pendidikan	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
			Harapan Lama Sekolah	Tahun		
			APK SD/MI Sederajat	%		





MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	SATUAN	UTAMA	PENDUKUNG
dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	bidang pendidikan dan kesehatan		APM SD/MI Sederajat	%		
			APK SMP/MTS Sederajat	%		
			APM SMP/MTS Sederajat	%		
		2.1.2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	Dinas Kesehatan RSUD Tg.Pura	Dinas PP, KB, dan PPA
			Prevalensi Gizi Buruk	%		
			TFR (Total Fertility Rate)	%		
<b>Misi 3.</b> Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata	3.1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah	3.1.1 Meningkatnya kunjungan wisawatan dan pendapatan dari wisata	Tingkat pertumbuhan jumlah wisatawan	%	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Lingkungan Hidup
			Kontribusi Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan minum) pada PDRB (ADHB)	%		
		3.1.2 Meningkatnya pengembangan UMKM dan IKM dalam sektor ekonomi kreatif	Tingkat Pertumbuhan UMKM	%	Dinas Koperasi	Dinas Perindag
			Tingkat Pertumbuhan IKM	%		
		3.1.3 Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Skor PPH	Poin	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas PUPR
			Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian pada PDRB (ADHB)	%		
			Kontribusi Sub Sektor Perikanan pada PDRB (ADHB)	%		
		3.1.4 Meningkatnya investasi daerah	Tingkat pertumbuhan investasi daerah (PMA-PMDN)	Persen (%)	Dinas PM dan PPTSP	
		3.1.5 Meningkatnya penguatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	%	Badan Pendapatan Daerah	
		3.1.6 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dalam ekonomi lokal	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha	%	Dinas Tenaga Kerja	
			Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	%		
<b>Misi 4.</b> Meningkatkan kinerja	4.1 Terciptanya penurunan	4.1.1 Meningkatnya konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Per Luas Wilayah	Km/km2	Dinas PUPR, Dinas Perhubungan	



MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
			INDIKATOR	SATUAN	UTAMA	PENDUKUNG
infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan	kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup	jalan	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%		
			Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	%		
		4.1.2 Meningkatnya kinerja infrastruktur permukiman	Luas Kawasan Kumuh	Ha	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	Dinas Lingkungan Hidup
			Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Air Bersih	%		
			Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi	%		
			Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Persampahan	%		
		4.1.3 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	Dinas PUPR	
		4.1.4 Meningkatnya pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	Dinas Lingkungan Hidup	
		4.1.5 Menurunnya resiko kejadian bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	BPBD Satpol PP	Dinas PUPR
			Luas Wilayah Rawan Genangan Banjir	Ha		
<b>Misi 5.</b> Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	5.1 Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	5.1.1 Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja keuangan pemerintah	Opini BPK	Opini (WTP, WDP, TW, TMP)	BPKAD, Bappeda, Inspektorat	Sekretariat Daerah, BKD
			Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)		
			Indeks Profesionalitas ASN	Poin		
			Tingkat Maturitas SPIP	Level		
		5.1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis SIT	Nilai Indeks SPBE	Poin	Dinas Kominfo Dinas PMD, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinas PM dan PPTSP	Sekretariat Daerah, Dinas Kearsipan dan Perpustakaan, Bappeda
			Persentase Desa dengan Pelayanan Berbasis TIK	%		
			Indeks Kepuasan Masyarakat	%		



### **Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan Untuk Mewujudkan Misi**

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dan sasaran RPJMD dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi, dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, dan pemanfaatan teknologi informasi. Perumusan strategi dan arah kebijakan RPJMD Kabupaten Langkat juga mempertimbangkan penciptaan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dan perwujudan penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis sistem informasi dan teknologi dan inovasi.



**Tabel 4-3**  
**Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Pembangunan Kabupaten Langkat 2020-2024**

MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN PER TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial	1.1 Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial	1.1.1 Meningkatnya status desa	1. Meningkatkan kapasitas SDM dan kelembagaan desa untuk pembangunan infrastruktur perdesaan	Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa	Peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam pembagunan infrastruktur perdesaan	Pembinaan desa dalam pemenuhan SPM desa	Pembinaan desa dalam pemenuhan SPM desa	Pembinaan desa dalam pemenuhan SPM desa
			2. Meningkatkan peran desa dalam pengelolaan Sumber Daya Alam dan potensi ekonomi	Peningkatan kapasitas BUMDes	Peningkatan kapasitas BUMDes	Peningkatan kolaborasi masyarakat desa untuk pengelolaan SDA dan Lingkungan hidup	Peningkatan kolaborasi masyarakat desa untuk pengelolaan SDA dan Lingkungan hidup	Pengembangan kerjasama antar desa dalam perekonomian
		1.1.2 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	1. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pelayanan, rehabilitasi, dan pemberdayaan PMKS	Penyediaan sistem informasi dan pendataan PMKS serta PSKS berbasis TIK	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Peningkatan Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Pemberdayaan PMKS	Pemberdayaan PMKS
			2. Meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelaporan tindakan kekerasan pada perempuan dan anak	Pelembagaan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak	Pelembagaan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak
			3. Meningkatkan pemanfaatan potensi dan sumber-sumber kesejahteraan sosial	Pembinaan panti sosial	Pemanfaatan bimbingan keluarga sejahtera untuk kesejahteraan sosial	Peningkatan peran serta organisasi sosial dan relawan sosial dalam peningkatan kesejahteraan sosial	Peningkatan peran serta organisasi sosial dan relawan sosial dalam peningkatan kesejahteraan sosial	Peningkatan peran swasta dalam peningkatan kesejahteraan sosial
		1.1.3 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	1. Meningkatkan partisipasi pemuda dalam aktivitas kepemudaan dan olahraga	Peningkatan kegiatan dan fasilitas kepemudaan dan olahraga	Peningkatan kegiatan dan fasilitas kepemudaan dan olahraga	Peningkatan kompetensi pemuda dalam aktivitas kepemudaan, ekonomi, dan olahraga	Peningkatan prestasi pemuda dalam olahraga	Peningkatan prestasi pemuda dalam olahraga



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN PER TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
		1.1.4 Meningkatnya pengembangan budaya lokal	1. Meningkatkan pemanfaatan wadah-wadah aktualisasi keagamaan	Peningkatan jumlah fasilitas ibadah dan keagamaan	Intensifikasi kegiatan keagamaan di masyarakat dan pemerintah	Pengembangan event dan festival keagamaan dan budaya	Pengembangan wadah/organisasi kerukunan umat beragama	Peningkatan pemanfaatan wadah / organisasi keagamaan
			2.Mengintensifkan keikutsertaan masyarakat dalam kompetisi keagamaan	Pengembangan kompetisi keagamaan di tingkat daerah	Pengembangan potensi pemuda dan masyarakat umum dalam keagamaan	Peningkatan keikutsertaan masyarakat dalam kompetisi keagamaan	Fasilitasi keikutsertaan pemuda dalam kompetisi keagamaan	Peningkatan prestasi pemuda dalam kompetisi keagamaan
			3.Meningkatkan Pelestarian Budaya Lokal	Pengembangan sistem informasi dan database potensi seni dan cagar budaya berbasis TIK	Perencanaan pengelolaan seni dan budaya lokal	Penyusunan regulasi pelestarian dan pengelolaan seni dan budaya	Peningkatan apresiasi terhadap pelaku seni dan budaya lokal	Pelestarian dan pengelolaan potensi dan cagar budaya
			4. Meningkatkan pengembangan budaya lokal melalui pariwisata	Penyediaan sistem informasi dan database budaya lokal berbasis TIK	Pemberdayaan masyarakat untuk integrasi kebudayaan lokal dalam kepariwisataan	Integrasi kebudayaan lokal dalam kepariwisataan	Pengembangan Pariwisata Budaya	Pengembangan Pariwisata Budaya
		1.1.5 Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	1. Meningkatkan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan melalui peningkatan partisipasi masyarakat	Perencanaan regulasi sistem pemeliharaan ketentraman dan ketertiban berbasis masyarakat	Peningkatan kemampuan masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan	Pemberdayaan masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan	Pemberdayaan masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan	Pemberdayaan masyarakat untuk turut menjaga ketertiban dan keamanan
			2. Meningkatkan rasa solidaritas masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Perencanaan regulasi sistem pemeliharaan ketentraman dan ketertiban berbasis masyarakat	Peningkatan kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat	Peningkatan kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat	Peningkatan kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat	Peningkatan kegiatan gotong royong di lingkungan masyarakat
			3. Meningkatkan ketaatan terhadap peraturan daerah melalui peningkatan partisipasi masyarakat	Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan daerah	Peningkatan pengetahuan masyarakat terhadap peraturan daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan peraturan daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan peraturan daerah	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan peraturan daerah
		1.1.6 Meningkatnya partisipasi	1. Meningkatkan peran desa/kelurahan dalam pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kapasitas desa/kelurahan dalam pengelolaan	Peningkatan kegiatan pembangunan yang dikelola desa/kelurahan	Peningkatan kegiatan pembangunan yang dikelola	Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan	Peningkatan peran masyarakat dalam kegiatan



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN PER TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
		masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	dan pembangunan sarana/prasarana di level desa/kelurahan	kegiatan pembangunan		desa/kelurahan	pembangunan yang dikelola desa/kelurahan	pembangunan yang dikelola desa/kelurahan
2. Meningkatkan pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	2.1 Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan	2.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat	1. Meningkatkan pendidikan penduduk untuk memenuhi wajib pendidikan dasar 9 tahun	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pendidik	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dan tenaga pendidik	Peningkatan peran desa dan kelurahan dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam pendidikan	Penelitian dan pengembangan inovasi dalam peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh jenjang pendidikan	Implementasi inovasi peningkatan partisipasi masyarakat dalam seluruh jenjang pendidikan
			2. Meningkatkan mutu pendidikan dasar	- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah pendidikan dasar	- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah pendidikan dasar	- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah pendidikan dasar	- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah pendidikan dasar	- Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana sekolah pendidikan dasar
				- Peningkatan kualitas SDM pelayanan pendidikan dasar	- Peningkatan kualitas SDM pelayanan pendidikan dasar	- Peningkatan kualitas SDM pelayanan pendidikan	- Peningkatan kualitas SDM pelayanan pendidikan	- Peningkatan kualitas SDM pelayanan pendidikan
			3. Meningkatkan literasi penduduk	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana perpustakaan	Peningkatan jumlah perpustakaan dan taman baca	Peningkatan jumlah kunjungan perpustakaan dan taman baca	Peningkatan minat baca masyarakat	Peningkatan minat baca masyarakat
		2.1.2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	1. Meningkatkan kondisi gizi masyarakat, pola hidup bersih dan sehat, serta keselamatan melahirkan.	Peningkatan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, pengobatan serta pencegahan penyakit menular	Peningkatan pelayanan kesehatan, perbaikan gizi, pengobatan serta pencegahan penyakit menular	Peningkatan pelayanan kesehatan dan pengobatan serta pencegahan penyakit menular	Peningkatan jumlah masyarakat yang menerapkan PHBS	Peningkatan jumlah masyarakat yang menerapkan PHBS
			2. Meningkatkan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan	Penyusunan sistem informasi dan database pengelolaan jaminan kesehatan bagi masyarakat	Peningkatan akses masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan	Peningkatan pelayanan kesehatan khusus masyarakat miskin	Peningkatan pelayanan kesehatan khusus masyarakat miskin	Peningkatan pelayanan kesehatan khusus masyarakat miskin



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN PER TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
				miskin berbasis TIK				
			3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM pelayanan kesehatan	Peningkatan jumlah SDM pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	Peningkatan jumlah SDM pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	Peningkatan jumlah SDM pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	Peningkatan jumlah SDM pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar	Peningkatan jumlah SDM pelayanan kesehatan yang memiliki kompetensi sesuai standar
			4. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan	Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dan RSUD	Peningkatan peran desa dan kelurahan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sarana kesehatan	Peningkatan peran desa dan kelurahan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas sarana kesehatan	Pengembangan pelayanan kesehatan dan RSUD
			5. Meningkatkan akses masyarakat pada layanan KB	Peningkatan pengetahuan masyarakat terkait keluarga berencana	Peningkatan akses masyarakat mendapatkan layanan KB	Peningkatan peran desa dan kelurahan dalam peningkatan akses masyarakat pada layanan KB	Peningkatan peran desa dan kelurahan dalam peningkatan akses masyarakat pada layanan KB	Pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan akses masyarakat pada layanan KB
3. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata	3.1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah	3.1.1 Meningkatnya kunjungan wisawatan dan pendapatan dari wisata	1. Mengembangkan potensi pariwisata daerah	Pengembangan sistem informasi dan database potensi pariwisata berbasis TIK	Pengembangan Infrastruktur Pendukung Kepariwisataaan	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan Destinasi Wisata	Pengembangan Promosi Wisata
			2. Meningkatkan pengembangan industri pariwisata	Perencanaan pengembangan industri pariwisata	Peningkatan investasi dalam industri pariwisata	Pengembangan Jasa Kepariwisataaan	Pengembangan Jasa Kepariwisataaan	Pengembangan Jasa Kepariwisataaan
			3. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Peningkatan kapasitas SDM masyarakat dalam kepariwisataan	Peningkatan peran desa dan kelurahan dalam kepariwisataan	Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata	Pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan pariwisata
		3.1.2 Meningkatnya pengembangan UMKM dan IKM dalam sektor ekonomi kreatif	1. Meningkatkan kemudahan UMKM untuk menjalankan usaha	Peningkatan kapasitas UMKM	Peningkatan kapasitas UMKM	Peningkatan kapasitas UMKM	Peningkatan inovasi produk UMKM	Peningkatan inovasi produk UMKM
			2. Meningkatkan kapasitas kelembagaan koperasi dan lembaga keuangan lainnya	Peningkatan kapasitas pengelola koperasi	Peningkatan kapasitas pengelola koperasi	Peningkatan kapasitas pengelola koperasi	Peningkatan dukungan BPR/LKM pada UMKM	Peningkatan dukungan BPR/LKM pada UMKM
			3. Meningkatkan daya	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan	Peningkatan daya



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN PER TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
			saing industri	pembinaan kelompok pengrajin dan IKM	kompetensi IKM	kebaruan dan inovasi produk IKM	kebaruan dan inovasi produk IKM	saing industri
		4. Meningkatkan pemasaran produk UMKM dan IKM	4. Meningkatkan pemasaran produk UMKM dan IKM	Peningkatan event pemasaran produk IKM dan UMKM	- Pengembangan Sentra IKM	Pengembangan TIK untuk pemasaran produk UMKM dan IKM	Pengembangan TIK untuk pemasaran produk UMKM dan IKM	Peningkatan Ekspor Produk IKM
					- Penataan pemasaran produk UMKM			
		3.1.3 Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	1. Meningkatkan kualitas konsumsi dan ketersediaan pangan	Penelitian dan pengembangan kemandirian pangan	Pembentukan desa mandiri pangan	Peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan volume produksi	Peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan volume produksi	Peningkatan ketersediaan pangan melalui peningkatan volume produksi
			2. Meningkatkan upaya penanganan kerawanan pangan	Penyusunan sistem informasi dan database pengelolaan pangan berbasis TIK	Penyediaan sistem informasi pengelolaan pangan	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi pangan	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi pangan	Peningkatan sarana dan prasarana distribusi pangan
			3. Meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan dan hortikultura	Peningkatan ketersediaan infrastruktur irigasi untuk pengairan lahan pertanian	Peningkatan ketersediaan infrastruktur irigasi untuk pengairan lahan pertanian	Peningkatan produksi komoditas pertanian	Peningkatan produksi komoditas pertanian	Peningkatan produksi komoditas pertanian
			4. Meningkatkan produktivitas peternakan	Optimalisasi kelembagaan peternakan	Optimalisasi kelembagaan peternakan	Peningkatan produksi dan kualitas komoditas peternakan	Optimalisasi kelembagaan peternakan	Optimalisasi kelembagaan peternakan
			5. Meningkatkan daya saing komoditas perkebunan	Peningkatan kualitas komoditas perkebunan	Peningkatan kualitas komoditas perkebunan	Peningkatan kualitas komoditas perkebunan	Fasilitasi sertifikasi produk perkebunan	Fasilitasi sertifikasi produk perkebunan
			6. Meningkatkan pemasaran hasil pertanian, perkebunan, dan peternakan	Penyusunan sistem informasi dan database pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan	Penyediaan sistem informasi pemasaran produk pertanian, perkebunan, dan peternakan	Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
			7. Meningkatkan daya saing perikanan	Peningkatan produksi komoditas perikanan	Peningkatan produksi komoditas perikanan	Pemberdayaan kelompok nelayan untuk penciptaan nilai tambah produk perikanan	Penciptaan Nilai Tambah Komoditas Perikanan	Penciptaan Nilai Tambah Komoditas Perikanan





MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN PER TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
				8. Meningkatkan kinerja infrastruktur perairan untuk mendukung produktivitas pertanian	Pengembangan jaringan sumberdaya air/irigasi	Pengembangan jaringan sumberdaya air/irigasi	Pemeliharaan saluran irigasi	Pemeliharaan saluran irigasi
	3.1.4 Meningkatnya investasi daerah	1. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif	Penyusunan peta potensi investasi daerah	Penyusunan kebijakan percepatan investasi daerah	Penyusunan kebijakan percepatan investasi daerah	Pemasaran investasi daerah	Pemasaran investasi daerah	
	3.1.5 Meningkatnya penguatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	2. Meningkatkan realisasi PAD	Penyusunan sistem informasi dan database pengelolaan pajak dan retribusi daerah berbasis TIK	Peningkatan ketaatan masyarakat dalam pajak dan retribusi daerah	Peningkatan ketaatan masyarakat dalam pajak dan retribusi daerah	Peningkatan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah	Peningkatan manajemen pengelolaan pajak dan retribusi daerah	
	3.1.6 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dalam ekonomi lokal	1. Meningkatkan kompetensi kewirausahaan masyarakat	Peningkatan kompetensi kewirausahaan tenaga kerja	Peningkatan kompetensi kewirausahaan tenaga kerja	Peningkatan kompetensi kewirausahaan tenaga kerja	Peningkatan fasilitasi pengembangan wirausaha	Peningkatan fasilitasi pengembangan wirausaha	
2. Meningkatkan penyerapan tenaga kerja lokal		Penataan regulasi ketenagakerjaan	Penyediaan sistem informasi tenaga kerja	Peningkatan penempatan tenaga kerja lokal di sektor ekonomi strategis	Peningkatan penempatan tenaga kerja lokal di sektor ekonomi strategis	Peningkatan penempatan tenaga kerja lokal di sektor ekonomi strategis		
3. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja		Peningkatan kompetensi tenaga kerja memenuhi kebutuhan pasar kerja di sektor ekonomi strategis	Peningkatan kompetensi tenaga kerja memenuhi kebutuhan pasar kerja di sektor ekonomi strategis	Peningkatan kompetensi tenaga kerja memenuhi kebutuhan pasar kerja di sektor ekonomi strategis	Peningkatan kompetensi tenaga kerja memenuhi kebutuhan pasar kerja di sektor ekonomi strategis	Peningkatan kompetensi tenaga kerja memenuhi kebutuhan pasar kerja di sektor ekonomi strategis		
4. Meningkatkan kinerja infrastruktur dan tata ruang berkelanjutan	4.1 Terciptanya penurunan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup	4.1.1 Meningkatnya konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur jalan	1. Meningkatkan penyediaan jalan kabupaten	Penyediaan lahan untuk pengembangan jalan kabupaten	Peningkatan panjang jalan kabupaten	Peningkatan panjang jalan kabupaten	Peningkatan kelas jalan kabupaten	Peningkatan kelas jalan kabupaten
			2. Meningkatkan kualitas jaringan jalan	Penyusunan sistem informasi dan database kondisi jaringan jalan berbasis TIK	Penyediaan sistem informasi pengamanan lalu lintas	- Peningkatan kondisi jaringan jalan	- Peningkatan kondisi jaringan jalan	- Peningkatan kondisi jaringan jalan
						- Peningkatan sarana dan prasarana pengamanan lalu lintas	- Peningkatan sarana dan prasarana pengamanan lalu lintas	- Peningkatan sarana dan prasarana pengamanan lalu lintas
			3. Meningkatkan pelayanan	Pengelolaan sistem	Pengelolaan sistem	Peningkatan layanan	Peningkatan layanan	Peningkatan layanan



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN PER TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
			angkutan jalan umum	pelayanan angkutan jalan, kereta api, sungai, dan laut di tingkat kabupaten	pelayanan angkutan jalan, kereta api, sungai, dan laut di tingkat kabupaten	angkutan umum dan pengelolaan simpul transportasi	angkutan umum dan pengelolaan simpul transportasi	angkutan umum dan pengelolaan simpul transportasi
		4.1.2 Meningkatnya kinerja infrastruktur permukiman	1. Mengurangi kawasan kumuh	Penyediaan sistem informasi dan pendataan kawasan kumuh berbasis TIK	Penanganan dan Penataan kawasan kumuh	Penanganan dan Penataan kawasan kumuh	Peningkatan peran desa/kelurahan dan kelompok masyarakat dalam penataan kawasan kumuh	Pengelolaan kawasan kumuh
			2. Meningkatkan kebutuhan perumahan yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan masyarakat miskin	Penyusunan sistem informasi dan database rumah tidak layak huni berbasis TIK	Peningkatan rumah layak huni dan Peningkatan PSU perumahan yang layak bagi MBR dan masyarakat miskin	Peningkatan peran desa/kelurahan dalam pengurangan rumah tidak layak huni	Peningkatan rumah layak huni dan Peningkatan PSU perumahan yang layak bagi MBR dan masyarakat miskin	Peningkatan rumah layak huni dan Peningkatan PSU perumahan yang layak bagi MBR dan masyarakat miskin
			3. Meningkatkan cakupan layanan air bersih	Penyusunan sistem informasi dan database pelayanan air bersih berbasis TIK	Penyusunan rencana induk sistem pengelolaan air bersih/minum	Peningkatan peran desa/kelurahan dalam peningkatan layanan air bersih/minum	Peningkatan cakupan layanan air bersih di kawasan perkotaan dan perdesaan	Peningkatan cakupan layanan air bersih di kawasan perkotaan dan perdesaan
			4. Meningkatkan cakupan layanan sanitasi	Penyusunan sistem informasi dan database pelayanan sanitasi berbasis TIK	Penyusunan rencana induk sistem pengelolaan sanitasi	Peningkatan peran desa/kelurahan dalam peningkatan layanan air bersih/minum	Peningkatan cakupan layanan sanitasi di kawasan perkotaan dan perdesaan	Peningkatan cakupan layanan sanitasi di kawasan perkotaan dan perdesaan
			5. Meningkatkan cakupan layanan persampahan	Penyusunan sistem informasi dan database pelayanan persampahan berbasis TIK	Penyusunan rencana induk sistem pengelolaan persampahan	Peningkatan cakupan layanan persampahan di kawasan perkotaan dan Peningkatan cakupan layanan persampahan berbasis komunitas di kawasan perdesaan	Peningkatan cakupan layanan persampahan di kawasan perkotaan dan Peningkatan cakupan layanan persampahan berbasis komunitas di kawasan perdesaan	Peningkatan cakupan layanan persampahan di kawasan perkotaan dan Peningkatan cakupan layanan persampahan berbasis komunitas di kawasan perdesaan
			4.1.3	1. Menyediakan rencana	Penyusunan rencana	Penyusunan rencana	Penyusunan rencana	Penyusunan rencana



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN PER TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
		Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	tata ruang yang mendukung pertumbuhan ekonomi	rinci tata ruang	rinci tata ruang	rinci tata ruang	rinci tata ruang	rinci tata ruang
			2. Meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang yang memberikan dampak negatif bagi masyarakat dan lingkungan	Penyediaan sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang berbasis TIK	Penyediaan sistem informasi pengendalian pemanfaatan ruang berbasis TIK	Pengoptimalan pengawasan dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	Pengoptimalan pengawasan dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang	Pengoptimalan pengawasan dan penertiban pelanggaran pemanfaatan ruang
		4.1.4 Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup	1. Meningkatkan pengawasan penurunan kualitas lingkungan hidup	Penyediaan regulasi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan ketersediaan infrastruktur pengendalian air limbah dan pengawasan kualitas lingkungan hidup	Peningkatan peran masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan pengawasan dan pengelolaan lingkungan hidup
			2. Meningkatkan kesadaran badan usaha dan masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup	Penyediaan regulasi pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan pengetahuan badan usaha dan masyarakat dalam pelestarian dan pengelolaan lingkungan hidup	Peningkatan partisipasi masyarakat terkait PPLH dan Peningkatan ketaatan usaha terhadap pengendalian LH	Peningkatan partisipasi masyarakat terkait PPLH dan Peningkatan ketaatan usaha terhadap pengendalian LH	Peningkatan partisipasi masyarakat terkait PPLH dan Peningkatan ketaatan usaha terhadap pengendalian LH
		4.1.5 Menurunnya resiko kejadian bencana	1. Meningkatkan kapasitas daerah untuk penanggulangan bencana	Penyediaan penanggulangan bencana	Penyediaan sistem informasi penanggulangan bencana	Penyediaan sistem informasi peringatan dini	Penyediaan sistem informasi peringatan dini	Pengembangan sistem informasi peringatan dini
			2. Menurunkan tingkat kerentanan wilayah	Penelitian dan pengembangan tingkat kerentanan wilayah terhadap bencana	Peningkatan kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana	Pengembangan desa/kelurahan siaga bencana	Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan bencana	Peningkatan pemberdayaan masyarakat untuk penanggulangan bencana
			3. Meningkatkan penanganan kejadian kebakaran	Penyusunan rencana induk penanggulangan kebakaran	Penyediaan sistem informasi penanggulangan kebakaran	Peningkatan cakupan pelayanan dan waktu respon penanganan kebakaran	Peningkatan cakupan pelayanan dan waktu respon penanganan kebakaran	Peningkatan cakupan pelayanan dan waktu respon penanganan kebakaran



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN PER TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
			4. Menurunkan tingkat potensi kejadian bencana banjir	Penyusunan sistem informasi dan database bencana banjir berbasis TIK	Penelitian dan pengembangan penanganan dan pencegahan banjir	Optimalisasi kapasitas saluran drainase primer, sekunder, dan tersier dan penataan kawasan sungai	Optimalisasi kapasitas saluran drainase primer, sekunder, dan tersier dan penataan kawasan sungai	Optimalisasi kapasitas saluran drainase primer, sekunder, dan tersier dan penataan kawasan sungai
5. Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	5.1 Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	5.1.1 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	1. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan laporan keuangan daerah	Penyusunan sistem informasi dan pelaporan keuangan yang berbasis TIK	Pengoptimalan pendataan dan pengelolaan aset daerah	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam penyelesaian laporan keuangan	Pengoptimalan pelaporan aset daerah dan Peningkatan kapasitas desa dalam akuntabilitas keuangan daerah	Pengoptimalan pelaporan aset daerah dan Peningkatan kapasitas desa dalam akuntabilitas keuangan daerah
			2. Meningkatkan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	Peningkatan kapasitas SDM pemerintahan dalam integrasi perencanaan pembangunan daerah	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah terintegrasi berbasis TIK	Pengembangan sistem perencanaan pembangunan daerah terintegrasi berbasis TIK	Pengendalian keterpaduan perencanaan pembangunan daerah	Pengendalian keterpaduan perencanaan pembangunan daerah
			3. Meningkatkan keterpaduan perencanaan dengan kelitbangan untuk peningkatan kinerja pembangunan daerah	Perencanaan sistem kelitbangan dan inovasi daerah	Penataan sistem kelitbangan dan inovasi daerah	Peningkatan kerjasama pelaksanaan kelitbangan dengan lembaga riset swasta, komunitas, dan swasta	Peningkatan kegiatan penelitian dan pengembangan daerah	Peningkatan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan
			4. Meningkatkan Profesionalitas Aparatur Pemerintah Daerah	Penataan kepegawaian berbasis kompetensi	Pengelolaan sistem informasi kepegawaian berbasis TIK	Pengelolaan kepegawaian berbasis TIK	Peningkatan monitoring dan informasi pengawasan kedisiplinan dan kinerja ASN	Peningkatan monitoring dan informasi pengawasan kedisiplinan dan kinerja ASN
			5. Mengoptimalkan fungsi pengawasan keuangan dan kinerja	Penyusunan sistem informasi berbasis TIK untuk penyelarasan dokumen perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja daerah	Peningkatan kapasitas APIP	Peningkatan kapasitas APIP	Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan keuangan	Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan keuangan



MISI	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN PER TAHUN				
				2020	2021	2022	2023	2024
		5.1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis SIT	1. Meningkatkan tata kelola SPBE di level pemerintah daerah	Penyediaan sarana dan prasarana SIT pada di level pemerintah kabupaten dan kecamatan	Penyediaan sarana dan prasarana SIT pada di level pemerintah kabupaten dan kecamatan	Penyediaan sarana dan prasarana SIT pada di level pemerintah kabupaten dan kecamatan	Peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan SIT pada level pemerintah kabupaten dan kecamatan	Peningkatan kapasitas SDM dalam pemanfaatan SIT pada level pemerintah kabupaten dan kecamatan
			2. Meningkatkan pelayanan publik berbasis TIK	Pengembangan sistem pengaduan masyarakat terhadap layanan publik berbasis TIK	Pengembangan sistem pengaduan masyarakat terhadap layanan publik berbasis TIK	Penjaringan aspirasi masyarakat melalui SIT	Penjaringan aspirasi masyarakat melalui SIT	Pengembangan sistem layanan dokumentasi dan informasi hukum
			3. Mengintegrasikan pelayanan berbasis TIK pada tingkat desa	Peningkatan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi di tingkat desa	Peningkatan sarana dan prasarana jaringan telekomunikasi di tingkat desa	Peningkatan kapasitas perangkat desa dalam pelayanan berbasis TIK	Pemanfaatan TIK dalam pelayanan di tingkat desa	Pemanfaatan TIK dalam pelayanan di tingkat desa
			4. Meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan	Peningkatan pelayanan dan pemutakhiran data kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan pelayanan dan pemutakhiran data kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan pelayanan dan pemutakhiran data kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan pelayanan dan pemutakhiran data kependudukan dan pencatatan sipil	Peningkatan pelayanan dan pemutakhiran data kependudukan dan pencatatan sipil
			5. Meningkatkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	Pengembangan sistem informasi dan database perizinan terpadu satu pintu berbasis TIK	Penataan sistem perizinan terpadu satu pintu	Peningkatan pelayanan sistem perizinan terpadu satu pintu	Peningkatan pelayanan sistem perizinan terpadu satu pintu	Peningkatan pelayanan sistem perizinan terpadu satu pintu
			6. Meningkatkan pengelolaan kearsipan berbasis TIK	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam pengelolaan arsip secara baku	Peningkatan kapasitas perangkat daerah dalam pengelolaan arsip secara baku	Pengembangan sistem pengelolaan kearsipan berbasis TIK	Penerapan sistem pengelolaan kearsipan berbasis TIK di perangkat daerah	Penerapan sistem pengelolaan kearsipan berbasis TIK di perangkat daerah
			7. Membangun sistem pengelolaan data pembangunan daerah berbasis TIK	Pengembangan pusat data daerah	Pengembangan sistem pengelolaan data statistik terpadu berbasis TIK	Pengelolaan integrasi database kependudukan dan statistik sektoral	Pengelolaan integrasi database kependudukan dan statistik sektoral	Pengelolaan integrasi database kependudukan dan statistik sektoral



#### **4.1.3 Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Berdasarkan RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021**

Berpedoman dari Dokumen Perencanaan Kabupaten Langkat (RPJPD dan RPJMD Kabupaten Langkat) dan dengan melihat kondisi objektif pelaksanaan pembangunan tahun-tahun sebelumnya dan memperhatikan tingkat kemajuan yang dicapai tahun 2020, perkiraan pada tahun 2021 serta mencermati berbagai permasalahan yang ada khususnya terkait dengan permasalahan dampak covid-19, kemudian dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, maka ditetapkan tujuan dan sasaran RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :



**Tabel 4-4**  
**Tujuan, Sasaran dan Indikator RKPD Tahun 2021**

NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		KONDISI AWAL (2019)	TARGET	TARGET MAJU
				INDIKATOR	SATUAN		2021	2022
VISI : MENJADIKAN LANGKAT YANG MAJU, SEJAHTERA, DAN RELIGIUS MELALUI PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN INFRASTRUKTUR YANG BERKELANJUTAN								
1.	Misi 1 : Mewujudkan pemberdayaan masyarakat untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial	Tujuan 1.1 Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial		Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	10,2 (2018)	9,6	9,4
				Jumlah Desa Mandiri	Desa	8	10	11
			1.1.1 Meningkatnya status desa	Peningkatan status desa (berdasarkan Indeks Desa Membangun/IDM)				
				- Desa Maju	Desa	8	12	16
				- Desa Berkembang	Desa	193	191	187
				- Desa Tertinggal	Desa	38	32	29
				- Desa Sangat Tertinggal	Desa	1	1	0
			1.1.2 Meningkatnya kesejahteraan sosial masyarakat	Jumlah PMKS	Orang	4085	2468	1968
				Indeks Pembangunan Gender	Poin	68	68,06	68,08
			1.1.3 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah prestasi pemuda :	Medali/Piala	127	169	187
				- Internasional	Medali/Piala	13	22	27
				- Nasional	Medali/Piala	5	12	15
				- Daerah	Medali/Piala	109	135	145
			1.1.4 Meningkatnya pengembangan budaya lokal	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal	%	3	10	15
			1.1.5 Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	50	60	65
			1.1.6 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	%	n/a	45	50
2.	Misi 2 : Meningkatkan	Tujuan 2.1 Terciptanya		IPM	Poin	70,27 (2018)	71	71,5



NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		KONDISI AWAL (2019)	TARGET	TARGET MAJU
				INDIKATOR	SATUAN		2021	2022
	pelayanan kebutuhan dasar untuk peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan	2.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,52 (2018)	8,82	8,88
				Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,75 (2018)	12,9	13
				APK SD/MI Sederajat	%	110,43 (2017/2018)	112,64964	113,77614
				APM SD/MI Sederajat	%	94,28 (2017/2018)	96,270251	97,473629
				APK SMP/MTS Sederajat	%	106,99 (2017/2018)	109,1405	110,2319
				APM SMP/MTS Sederajat	%	79,59 (2017/2018)	83,619244	85,709725
			2.1.2 Meningkatnya pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,22 (2018)	68,75	69
				Prevalensi Gizi Buruk	%	0,09	0	0
				TFR (Total Fertility Rate)	%	2,76	2,57	2,56
				LPE	Persen (%)	5,02 (2018)	5,2	5,3
3.	Misi 3 : Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan prioritas pengembangan pada sektor pariwisata	Tujuan 3.1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah		TPT	Persen (%)	4,67	4,3	4,1
				3.1.1 Meningkatnya kunjungan wisawatan dan pendapatan dari wisata	%	10	12	12
			3.1.2 Meningkatnya pengembangan UMKM dan IKM dalam sektor ekonomi kreatif	Kontribusi Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan minum) pada PDRB (ADHB)	%	2,28 (2018)	2,43	2,6
				Tingkat Pertumbuhan UMKM	%	11,3	12	13
			3.1.3 Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	Tingkat Pertumbuhan IKM	%	n/a	3,04	3,1
				Skor PPH	Poin	89,6	89,9	90
				Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian pada PDRB (ADHB)	%	35,06	36,06	36,56
				Kontribusi Sub Sektor Perikanan pada PDRB (ADHB)	%	3,12	3,62	3,87
			3.1.4 Meningkatnya investasi daerah	Tingkat pertumbuhan investasi daerah (PMA-PMDN)	Persen (%)	5	7	8
			3.1.5 Meningkatnya penguatan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah	Pertumbuhan PAD	%	1,71	3,5	4,5
4.	Misi 4 : Meningkatkan kinerja infrastruktur	Tujuan 4.1 Terciptanya penurunan kesenjangan		Indeks Gini	Poin	0,25	0,23	0,22
				Indeks Williamson	Poin	0,607	0,58	0,57





NO	MISI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN		KONDISI AWAL (2019)	TARGET	TARGET MAJU
				INDIKATOR	SATUAN		2021	2022
	dan tata ruang berkelanjutan	wilayah melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup	4.1.1 Meningkatnya konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur jalan	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Per Luas Wilayah	Km/km <sup>2</sup>	0,274	0,277	0,278
				Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	50,11	54	56
				Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	%	60	64	65
			4.1.2 Meningkatnya kinerja infrastruktur permukiman	Luas Kawasan Kumuh	Ha	150	120	105
				Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Air Bersih	%	14	24	29
				Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi	%	44	56	62
				Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Persampahan	%	78	79	80
			4.1.3 Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	93	94,268	94,902
			4.1.4 Meningkatnya pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	N/A	60	62
			4.1.5 Menurunnya resiko kejadian bencana	Indeks Risiko Bencana	Poin	140	128	137
				Luas Wilayah Rawan Genangan Banjir	Ha	1500	1490	1485
5.	Misi 5 : Menciptakan reformasi birokrasi dalam mendukung penyelenggaraan sistem tata kelola Pemerintahan yang baik dan bersih	Tujuan 5.1 : Terciptanya reformasi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	Indeks Reformasi Birokrasi		Poin	n/a	62	64
			5.1.1 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	Opini BPK	Opini (WTP, WDP, TW, TMP)	WDP	WTP	WTP
				Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)	CC (65, Tahun 2018)	B (70)	BB (72,5)
				Indeks Professionalitas ASN	Poin	n/a	72,5	75
				Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 2	Level 3	Level 3
			5.1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis SIT	Nilai Indeks SPBE	Poin	2,51	3,25	3,5
				Persentase Desa dengan Pelayanan Berbasis TIK	%	n/a	70	80
				Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75,6 (2018)	78,16	79,44

---

## **4.2 Prioritas Pembangunan Tahun 2021**

### **4.2.1. Prioritas Pembangunan Nasional**

Prioritas pembangunan nasional Tahun 2021 tidak terlepas dari sasaran Pembangunan yang tertuang didalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, yang diterjemahkan kedalam 7 Prioritas Nasional sebagai berikut :

- 1. Prioritas Nasional 1 :** Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan, dengan Program Prioritas : (a) Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT); (b) Peningkatan Kuantitas/ Ketersediaan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi; (c) Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan; (d) Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman dan Kelautan; (e) Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi; (f) Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi; (g) Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN); (h) Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi.
- 2. Prioritas Nasional 2 :** Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan, dengan Program Prioritas : (a) Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera; (b) Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali, (c) Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara; (d) Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan; (e) Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi; (f) Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku; (h) Pembangunan Wilayah Pulau Papua. Dengan kegiatan prioritas antara lain : Pengembangan Kawasan Strategis, Pengembangan Sektor Unggulan, Pengembangan Kawasan Perkotaan, Pemenuhan Pelayanan Dasar, Pembangunan Daerah Tertinggal, Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi, Kelembagaan dan Keuangan Daerah.
- 3. Prioritas Nasional 3 :** Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing, dengan Program Prioritas antara lain : (a) Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Memperkuat Tata Kelola Kependudukan; (b) Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial; (c) Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta; (d) Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas; (e) Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda; (f) Mengentaskan Kemiskinan; (g) Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing.
- 4. Prioritas Nasional 4 :** Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan, dengan Program Prioritas : (a) Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila; (b)



Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan; (c) Memperkuat Moderasi Beragama; (d) Meningkatkan Literasi, Inovasi dan Kreativitas.

5. **Prioritas Nasional 5** : Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar, dengan Program Prioritas :(a) Infrastruktur Pelayanan Dasar; (b) Infrastruktur Ekonomi; (c) Infrastruktur untuk Mendukung Perkotaan; (e) Energi dan Ketenagalistrikan; (e) Transformasi Digital.
6. **Prioritas Nasional 6** : Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim, dengan Program Prioritas : (a) Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; (b) Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; (c) Pembangunan Rendah Karbon.
7. **Prioritas Nasional 7** : Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik, dengan program prioritas : (a) Konsolidasi Demokrasi; (b) Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri; (c) Penegakan Hukum Nasional; (d) Reformasi Kelembagaan Birokrasi; (e) Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMN 2020-2024 ditetapkan 41 (empat puluh satu) Proyek Prioritas Strategis (*Major Project*) yang merupakan proyek strategis yang terintegrasi baik dari K/L, pusat, daerah, BUMN dan Masyarakat. Proyek Prioritas ini menjadi acuan dalam penyusunan RKP dan APBN tahun 2021 dan Forum pembahasan (musrenbang dan Forum KL/BUMN/Swasta). Beberapa Proyek Prioritas yang akan dilaksanakan di Sumatera Utara antara lain :

1. Industri 4.0 di 5 Sub Sektor Prioritas: Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi
2. 10 Destinasi Pariwisata Unggulan: Danau Toba, Borobudur Dskt, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado- Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo-Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai
3. 9 Kawasan industri di luar Jawa dan 31 Smelter
4. Penguatan Jaminan Usaha Serta 350 Korporasi Petani dan Nelayan
5. Pembangunan Energi Terbarukan Green Fuel Berbasis Kelapa Sawit
6. Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional
7. Percepatan Penurunan Kematian Ibu dan Stunting
8. Pendidikan dan Pelatihan Vokasi untuk Industri 4.0
9. Integrasi Bantuan Sosial Menuju Skema Perlindungan Sosial Menyeluruh
10. Jalan Tol Trans Sumatera Aceh-Lampung.
11. Jaringan 7 Pelabuhan Utama Terpadu
12. Sistem Angkutan Umum Massal Perkotaan di 6 Wilayah Metropolitan: Jakarta, Surabaya, Bandung, Medan, Semarang, dan Makassar
13. Pembangunan dan Pengembangan Kilang Minyak



14. Pembangkit Listrik 27.000 MW, Transmisi 19.000 KMS dan Gardu Induk 38.000 MVA
15. Infrastruktur TIK untuk Mendukung Transformasi Digital
16. Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik) Layak dan Aman (90% Rumah Tangga)
17. Akses Air Minum Perpipaan (10 Juta Sambungan Rumah)
18. Rumah Susun Perkotaan (1 Juta)
19. Infrastruktur Jaringan Gas Kota untuk 4 Juta Sambungan Rumah
20. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3
21. Penguatan Sistem Peringatan Dini Bencana

Pembangunan Wilayah Sumatera RPJMN Tahun 2020-2024 mengutamakan pada pemerataan, pertumbuhan, pelaksanaan otonomi daerah, penguatan konektivitas, serta mitigasi dan pengurangan risiko bencana sebagai berikut:

- (1) Peningkatan pelayanan dasar antara lain: (a) peningkatan kualitas SDM khususnya peningkatan akses layanan pendidikan dan kesehatan, pendidikan vokasional pertanian, perikanan dan pariwisata; dan revitalisasi Balai Latihan Kerja; (b) percepatan pembangunan daerah tertinggal dilaksanakan dengan fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pemenuhan pelayanan dasar yang memperhatikan aspek mitigasi dan kesiapsiagaan terhadap risiko bencana; (c) pembinaan dan keberpihakan dari K/L serta pelaku pembangunan lainnya dilakukan terhadap daerah tertinggal yang telah terentaskan tahun 2019, selama maksimal 3 tahun (2020 – 2022); (d) pemenuhan pelayanan dasar dan peningkatan tata kelola di kecamatan perbatasan; (e) percepatan pembangunan desa secara terpadu untuk mendorong transformasi sosial, budaya dan ekonomi desa; (f) pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekonomi lokal untuk mendorong transformasi kawasan rawan gempa menjadi kawasan ekonomi lokal sebagai bagian terpadu pembangunan Aceh; dan (g) pelaksanaan pembangunan afirmatif.
- (2) Penguatan pusat-pusat pertumbuhan wilayah dilakukan melalui antara lain : (a) Pengembangan komoditas unggulan Wilayah Sumatera yang meliputi kakao, kelapa, kelapa sawit, karet, kopi, lada, pala, tebu, emas, timah, minyak bumi, gas bumi, batubara, perikanan tangkap, dan perikanan budidaya; (b) pengembangan sentra produksi perikanan di SKPT/WPP; (c) pengembangan sentra produksi pertanian dan perkebunan yang tersebar di beberapa KPPN; (d) pengembangan kawasan strategis dan pengolahan sumber daya alam perkebunan, perikanan, pertambangan, dan industri kedirgantaraan di beberapa Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan Kawasan industri (KI), serta Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan



Bebas (KPBPB); (e) revitalisasi kawasan transmigrasi; (f) pengembangan ekonomi kawasan perbatasan berbasis komoditas unggulan; (g) pembangunan alternatif di Provinsi Aceh untuk mentransformasi kawasan rawan ganja menjadi kawasan ekonomi lokal sebagai bagian terpadu pembangunan daerah; (h) pengembangan pariwisata daerah sebagai salah satu motor penggerak pengembangan ekonomi lokal pada Destinasi Pariwisata; (i) pengembangan industri kedirgantaraan; (j) pengembangan kawasan perkotaan termasuk WM sebagai pemacu pertumbuhan ekonomi Pulau Sumatera dan pembangunan kota baru serta pengembangan kota lainnya; dan (k) penguatan keterkaitan desa-kota yang mendukung pusat pertumbuhan wilayah.

- (3) Pelaksanaan otonomi daerah dilakukan melalui antara lain: (a) peningkatan kapasitas pemerintahan daerah (kelembagaan, aparatur dan keuangan daerah); (b) pengembangan dan penguatan peran kecamatan sebagai pusat data, informasi dan pengetahuan, pusat pelayanan dasar; pusat pemberdayaan masyarakat, pusat pengembangan inovasi dan kewirausahaan, pusat pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, serta pusat pertumbuhan ekonomi kabupaten; (c) percepatan penerapan SPM, termasuk sanitasi dan air bersih, serta pengelolaan sampah dan limbah, peningkatan pelayanan perizinan investasi, dan perluasan kerjasama antar daerah; dan (d) pengelolaan dan kualitas belanja dana APBD sebagian daerah dan dana Otonomi Khusus Aceh dapat terus ditingkatkan.
- (4) Penguatan konektivitas dan kualitas pelayanan transportasi perkotaan yang dipadukan dengan jaringan multi moda pelabuhan, bandara, dan jaringan jalan non-tol, yang dilakukan melalui antara lain: (a) pengembangan dan penguatan konektivitas antar moda laut, sungai, darat dan udara yang terintegrasi antara lain; (b) pengembangan jaringan dan informasi; dan (c) memantapkan sistem logistik wilayah dalam mendukung industrialisasi khususnya di koridor pesisir timur Wilayah Sumatera;
- (5) Pengarusutamaan penanggulangan bencana dan adaptasi perubahan iklim dilakukan melalui: (a) peningkatan kapasitas masyarakat dan aparat; (b) peningkatan ketahanan kawasan pantai barat Pulau Sumatera dan pemantapan pemulihan pasca bencana Kawasan Selat Sunda dan sekitarnya; (c) adaptasi masyarakat terhadap perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal; (d) peningkatan investasi mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana, dan (e) peningkatan penanganan abrasi pantai di pesisir dan daerah kepulauan, serta konservasi hutan.



Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, maka Prioritas Nasional (PN), Program Prioritas (PP) dan Kegiatan Prioritas (KP) pada RKP Tahun 2021 ditetapkan sebagaimana tabel berikut ini :

Tabel 4-5  
Prioritas Nasional, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas RKP Tahun 2021

NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
1.	Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	1. Pemenuhan Kebutuhan Energi dengan Mengutamakan Peningkatan Energi Baru Terbarukan (EBT)	
		2. Peningkatan Kuantitas/ Ketersediaan Air untuk Mendukung Pertumbuhan Ekonomi	
		3. Peningkatan Ketersediaan, Akses dan Kualitas Konsumsi Pangan	
		4. Peningkatan Pengelolaan Kemaritiman dan Kelautan	
		5. Penguatan Kewirausahaan dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), dan Koperasi	
		6. Peningkatan Nilai Tambah Lapangan Kerja dan Investasi di Sektor Riil, dan Industrialisasi	
		7. Peningkatan Ekspor Bernilai Tambah Tinggi dan Penguatan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN)	
		8. Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi	
2.	Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan	1. Pembangunan Wilayah Pulau Sumatera; 2. Pembangunan Wilayah Pulau Jawa-Bali, 3. Pembangunan Wilayah Kepulauan Nusa Tenggara; 4. Pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan; 5. Pembangunan Wilayah Pulau Sulawesi; 6. Pembangunan Wilayah Kepulauan Maluku; 7. Pembangunan Wilayah Pulau Papua	a. Pengembangan Kawasan Strategis, b. Pengembangan Sektor Unggulan, c. Pengembangan Kawasan Perkotaan, d. Pemenuhan Pelayanan Dasar, e. Pembangunan Daerah Tertinggal, f. Kawasan Perbatasan, Pedesaan, dan Transmigrasi, g. Kelembagaan dan Keuangan Daerah
3.	Sumber Daya Manusia berkualitas dan berdaya saing	1. Mengendalikan Pertumbuhan Penduduk dan Memperkuat Tata Kelola Kependudukan;	
		2. Memperkuat Pelaksanaan Perlindungan Sosial;	
		3. Meningkatkan pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta	
		4. Meningkatkan Pemerataan Layanan Pendidikan Berkualitas	



NO	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS
		5. Meningkatkan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda	
		6. Mengentaskan Kemiskinan	
		7. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing	
4.	Revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan	8. Revolusi Mental dan Pembinaan Ideologi Pancasila;	
		1. Meningkatkan Pemajuan dan Pelestarian Kebudayaan	
		2. Memperkuat Moderasi Beragama	
		3. Meningkatkan Literasi, Inovasi dan Kreativitas	
5.	Infrastruktur untuk Ekonomi dan Pelayanan Dasar	1. Infrastruktur Pelayanan Dasar;	
		2. Infrastruktur Ekonomi	
		3. Infrastruktur untuk Mendukung Perkotaan	
		4. Energi dan Ketenagalistrikan	
		5. Transformasi Digital	
6.	Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	1. Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;	
		2. Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim	
		3. Pembangunan Rendah Karbon	
7.	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	1. Konsolidasi Demokrasi;	
		2. Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri	
		3. Penegakan Hukum Nasional	
		4. Reformasi Kelembagaan Birokrasi	
		5. Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional	

Sumber : Rancangan Awal RKP 2021 Bappenas

#### 4.2.2. Prioritas Pembangunan Sumatera Utara Tahun 2021

Pembangunan Provinsi Sumatera Utara pada RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 diprioritaskan kepada:

1. Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;
2. Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;
3. Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;
4. Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;
5. Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata



Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Prioritas akan dicapai berdasarkan norma-norma kehidupan, nilai-nilai agama dan budaya daerah, serta dengan menerapkan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan, sebagai berikut:

1. **Good Governance (tata kelola pemerintahan) yang baik**, yaitu pengelolaan pemerintahan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) untuk menciptakan penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang seimbang, bertanggung jawab, efektif dan efisien, dengan menjaga keserasian interaksi yang konstruktif di antara pemerintah, swasta dan masyarakat;
2. **Integrity (integritas)**, yaitu suatu kesatuan perilaku yang melekat pada prinsip-prinsip moral dan etika, terutama mengenai karakter moral dan kejujuran, yang dihasilkan dari suatu sistem nilai yang konsisten;
3. **Quality and Accountability (mutu dan akuntabilitas)**, yaitu suatu tingkatan kesempurnaan karakteristik pribadi yang mampu memberikan hasil melebihi kebutuhan ataupun harapan, dan sebuah bentuk tanggung jawab untuk suatu tindakan, keputusan dan kebijakan yang telah mempertimbangkan mengenai aturan, pemerintahan dan implementasinya, dalam pandangan hukum dan tata kelola yang transparan;
4. **Pemerataan pembangunan yang berkeadilan**, yaitu upaya mewujudkan peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi tingkat kemiskinan, kesenjangan antar wilayah, dan kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat, melalui pemenuhan kebutuhan akses pelayanan sosial dasar termasuk perumahan beserta sarana dan prasarannya, serta memberikan kesempatan berusaha bagi seluruh lapisan masyarakat untuk menanggulangi pengangguran dengan menyeimbangkan pengembangan ekonomi skala kecil, menengah, dan besar.

Sejalan dengan Prioritas RPJMD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023, maka prioritas pembangunan daerah dalam RKPDP Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 adalah :

1. **Prioritas Pembangunan-1 : Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja**, diarahkan kepada:
  - a. Membangun kerjasama dengan institusi nasional dan internasional serta pemangku kepentingan lainnya dalam membangun dan mengembangkan Balai Latihan Kerja antara lain Kota Medan, Kab. Simalungun dan Wilayah Kepulauan Nias





- b. Pengembangan Pusat Inovasi dan Industri Kreatif antara lain Kab. Samosir, Langkat, Tapanuli Tengah dan Kota Medan
- c. Pengembangan UMKM Center di Kawasan Danau Toba dan Wilayah Pantai Barat (Sibolga)
- d. Pengembangan Sentra Industri Kecil Menengah (IKM) berbasis online (*e-smart*) antara lain : Medan, Deli Serdang, Binjai dan Pematang Siantar.
- e. Mendorong pengembangan dan perluasan kesempatan kerja melalui wirausaha baru dan pengembangan industri kreatif;
- f. Peningkatan Promosi serta kemudahan perizinan sebagai upaya tumbuhnya investasi dan wirausahawan baru

**2. Prioritas Pembangunan-2 : Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan,** diarahkan kepada:

- a. Pemberian Beasiswa untuk peningkatan kualitas dan kompetensi guru.
- b. Penambahan Gaji Guru Honorar.
- c. Program Guru Lintas Sekolah (GLS) atau Guru Terbang untuk membantu mengatasi masalah kekurangan guru di daerah terpencil di Provinsi Sumatera Utara.
- d. Beasiswa bagi lulusan SMA berprestasi dari keluarga kurang mampu yang akan melanjutkan ke Perguruan Tinggi.
- e. Mendorong partisipasi BUMN/BUMD Swasta dan Masyarakat dalam Pembangunan dan Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana Pendidikan SMA disetiap kecamatan menyesuaikan dengan kebutuhan.
- f. Pembangunan SMK yang relevan dengan kebutuhan dan potensi unggulan daerah
- g. Penguatan dan pengintegrasian pendidikan karakter di semua mata pelajaran/kurikulum dengan pengembangan nilai-nilai seperti nilai religius, bekerja keras, jujur, toleransi, dan disiplin terutama di sekolah menengah di Provinsi Sumatera Utara;

**3. Prioritas Pembangunan-3 : Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan,** diarahkan kepada:

- a. Peningkatan akses dan pemenuhan infrastuktur Pelayanan Dasar (jalan, air minum, sanitasi, energi listrik, dan rumah layak huni)
- b. Mendukung Pembangunan Proyek Strategis Nasional seperti Pembangunan Jalan TOL Sumatera. Kereta Api Trans Sumatera dan pelabuhan Kuala Tanjung



- c. Pengembangan kawasan strategis nasional Mebidang dengan pembangunan SPAM Regional, Transportasi Massal LRT/MRT, bendung serbaguna lausimeme
  - d. Pengembangan KSN Danau Toba melalui Pembangunan Jalan Tol Tebing Tinggi-Parapat serta peningkatan akses Transportasi menuju Destinasi Wisata
  - e. Pengembangan wilayah pada 14 Kawasan Strategis Provinsi antara lain:
    - 1. Kawasan Sport Center Berstandar Internasional
    - 2. Pembangunan Jalan Alternatif Medan-Berastagi
    - 3. Penataan Kawasan Koridor Sei Mangke – KualaTanjung
    - 4. Akses Jalan Lingkar Pulau Nias
    - 5. Pemenuhan Infrastruktur Dasar (Air Minum, Sanitasi, Energi dan Penyediaan Rumah Lauak Huni danTerjangkau)
    - 6. Penataan kawasan kumuh pada sempadan sungai wilayah perkotaan
4. **Prioritas Pembangunan-4 : Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas,** diarahkan kepada:
- a. Peningkatan Kompetensi SDM Tenaga Kesehatan, Sarana dan Prasarana, dan Peningkatan kualitas pelayanan
  - b. Pengembangan Rumah Sakit Rujukan antara lain : RSUD Samosir, RSUD Toba Samosir, RSUD Padang Sidempuan, serta pengembangan Rumah Sakit bertaraf Internasional
  - c. Pengembangan siaga kesehatan akibat bencana dan kejadian luar biasa.
  - d. Penurunan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi, Balita Stunting dan Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
5. **Prioritas Pembangunan-5 : Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata,** diarahkan kepada:
- a. Sektor Agraris:
    - 1. Pengembangan Kawasan Agrobisnis dan Agro Industri berbasis produk unggulan Daerah (*One Region OneProduct*)
    - 2. Pengembangan Kawasan Agropolitan Dataran Tinggi Bukit Barisan
    - 3. Pengembangan sentra-sentra peternakan di Kabupaten Padang Lawas Utara, Asahan, Tapanuli Selatan dan Labuhan Batu
    - 4. Pengembangan Kelautan dan Perikanan melalui Pembangunan Cold



Stronge di Kabupaten Batu Bara dan Kepulauan Nias,

- 5. Menghidupkan kembali kearifan lokal melalui inovasi Mina Padi di seluruh Wilayah Sentra-sentra Produksi Padi.

b. Sektor Pariwisata:

- 1. mendorong Partisipasi Swasta dalam Pembangunan *Convention Center*, perhotelan, Restoran dan *Sport Area*
- 2. Pembangunan Agrotechno Park di Kawasan Mebidangro
- 3. Pembangunan Wisata Sport Eco Tourism di Kawasan Danau Toba, Kepulauan Nias, Tapanuli Tengah, Sibolga, Asahan, Tapanuli Selatan, Bahorok dan Tangkahan
- 4. Pengembangan pusat wisata budaya dan Religi sejarah (islamic center) di deli Serdang, Titik Nol Masuknya islam di Barus Tapanuli Tengah dan Putri Hujau di Deli Serdang
- 5. Situs-situs dan cagar budaya serta wisata Mangrove pesisir timur di Kab. Batubara, Langkat dan Serdang Bedagai
- 6. Pelaksanaan Event Wisata seperti Festival Kopi, Buah dan Bunga di Karo serta Karnaval Kebudayaan

Tabel 4-6  
Prioritas Provinsi, Program Prioritas dan Kegiatan Prioritas  
RKPD Propinsi Sumatera Utara Tahun 2021

NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI
1.	Peningkatan Kompetensi SDM Unggul	1. Peningkatan Kapasitas SDM	<div>1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas</div> <div>2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan</div> <div>3. Pengelolaan Pendidikan Khusus</div> <div>4. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Menengah</div> <div>5. Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Khusus</div> <div>6. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Provinsi</div> <div>7. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi</div> <div>8. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi</div> <div>9. Perencanaan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi</div> <div>10. Pengembangan Mutu dan Peningkatan kompetensi teknis Sumber daya manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi</div> <div>11. Pengembangan dan Pelaksanaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) tingkat daerah</div>



NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI
			provinsi
		2. Pengentasan Kemiskinan	1. Pengelolaan data Fakir Misikin Cakupan daerah provinsi 2. Rehabilitas Sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan social (PMKS) lainnya 3. Rehabilitasi Sosial Dasar Gelandangan dan Pengemis di Dalam Panti 4. Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti 5. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja 6. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 7. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 8. Pelayanan antar Kerja Lintas Daerah Kabupaten/Kota 9. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
		3. Revitalisasi Balai Latihan Kerja	1. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 3. Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi
		4. <i>Link and Match</i> dgn BUMN/BUMD/S wasta	1. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan
		5. Penguatan Kewirausahaan dan KUKM	1. Pengembangan usaha kecil dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha menengah
		6. Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja dan Penciptaan Lapangan Kerja	1. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi 2. Pelaksanaan Akreditasi Lembaga Pelatihan Kerja 3. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Provinsi 4. Penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP), Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK) 5. Penyelenggaraan Pengawasan Ketenagakerjaan 6. Penyusunan dan Evaluasi Rencana pembangunan Industri Provinsi 7. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Provinsi berbasis Sistem Informasi Industri Nasional (SIINAS) 8. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 9. Pemberdayaan Usaha Kecil yang dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perijinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi Dengan Para Pemangku Kepentingan 10. Pengembangan Usaha Kecil Dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Menengah
2.	Perluasan Akses Pendidikan Menengah,	1. Peningkatan akses dan kualitas Tenaga Pendidik vokasi Khususnya Pertanian, Perikanan dan Parawisata	1. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Provinsi
			2. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
		2. Revitalisasi sekolah menengah umum dan kejuruan	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 3. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 4. Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota



NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI
		2. Sarana dan Prasana Pendidikan Menengah	1. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Atas 2. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan 3. Pengelolaan Pendidikan Khusus 4. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi 5. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi 6. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi 7. Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi 8. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi 9. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B 10. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi 11. Penyelenggaraan Jalan Provinsi
		4. Pemerataan akses dan layanan pendidikan khusus	1. Pengelolaan Pendidikan Khusus
			2. Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Provinsi
			3. Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Provinsi
			4. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
		5. Distribusi guru bidang studi	1. Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Lintas Kabupaten / Kota dalam 1 (satu) Provinsi
3.	Konektivitas antar pusat pertumbuhan wilayah dan pusat-pusat produksi,	1. Aksesibilitas jalan ke daerah pariwisata dan agraris	1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi
		2. Peningkatan sarana dan prasarana Transportasi	1. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			2. Penetapan Rencana Umum Jaringan Trayek Antarkota dalam Daerah Provinsi dan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
			3. Penyelenggaraan Jalan Provinsi
			4. Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi
			5. Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
			6. Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
			7. Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
		3. Peningkatan kuantitas, kualitas dan akses sumber daya air	1. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			2. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup
			3. Penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
			4. Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi
		4. Peningkatan Infrastruktur Perkotaan dan Pedesaan	1. Penyelenggaraan Jalan Provinsi
			2. Fasilitas Kerjasama antardesa yang menjadi kewenangan provinsi
			3. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
			4. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
			5. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe B
			6. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			7. Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan



NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI
			Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			8. Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya Melampaui Lebih dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			9. Penetapan Tarif Kelas Ekonomi untuk Angkutan Orang yang Melayani Trayek antar Kota dalam Daerah Provinsi serta Angkutan Perkotaan dan Perdesaan yang Melampaui 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi
			10 Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Rencana Rinci Tata Ruang provinsi
			11 Koordinasi dan sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang
			12 Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
			13 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi
			14. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
		5. Peningkatan jaringan Infrastruktur Teknologi Informasi (TIK)	1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
4.	Peningkatan jangkauan layanan kesehatan	1. Peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2. Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 3. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi
		2. Sarana Prasarana Kesehatan	1. Penyediaan Fasilitas Pelayanan, Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan Untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi 2. Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi 3. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
			4. Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota
		3. Penanganan Stunting	1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 2. Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Provinsi
		4. Peningkatan gizi Masyarakat	1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi 2. Penerbitan Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang dan Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK)
		5. Kesehatan ibu dan anak	1. Perencanaan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKM dan UKP Provinsi
			2. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			3. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
		6. Pemberdayaan keluarga	1. Pencegahan Kekerasan terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota
			2. Pengelolaan Pelaksanaan Desain Program Pembangunan



NO	PRIORITAS PROVINSI	PROGRAM PRIORITAS PROVINSI	KEGIATAN PRIORITAS PROVINSI
			Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
5	Peningkatan nilai tambah sektor agraris dan pariwisata,	1. Peningkatan destinasi wisata	1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi 2. Penyelenggaraan Jalan Provinsi 3. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Provinsi
		2. Peningkatan SDM pariwisata	1. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Provinsi
			2. Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi Pengelolaan Pendidikan Sekolah
			3. Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan
		3. Promosi Wisata	1. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi 2. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
		4. Akses dan Kualitas Pangan	1. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota
		5. Peningkatan investasi, produksi, Nilai Tambah (Hilirisasi produk pertanian) dan Promosi	2. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi
			2. Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian
			3. Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman
		6. Lingkungan Hidup dan mitigasi bencana	1. Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan lingkungan hidup
			2. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Provinsi
		7. Investasi	1. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi

#### 4.2.3. Prioritas Pembangunan Kabupaten Langkat

##### 4.2.3.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021

Tema dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 ditentukan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

a. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD 2005-2025)

Pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2021 mengacu pada arah kebijakan pembangunan jangka panjang yang ada di dalam RPJPD Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025 berdasarkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJMD ke 3 (2014-2018), maka RPJMD ke 4 (2019-2024) ditujukan kepada perwujudan masyarakat Kabupaten Langkat yang religius, maju, berdaya saing dan sejahtera melalui percepatan dan sinergisitas pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif sumber daya alam dan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing tinggi.

Kelembagaan politik dan hukum telah tercipta yang ditandai dengan terwujudnya konsolidasi demokrasi yang kokoh di berbagai aspek kehidupan politik serta



supremasi hukum, terwujudnya rasa aman dan damai bagi seluruh masyarakat. Terwujudnya sinergi antara aparat hukum dan masyarakat dalam bidang keamanan, terwujudnya tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa yang berdasarkan hukum, serta birokrasi yang profesional dan netral, terwujudnya masyarakat sipil, masyarakat politik dan masyarakat ekonomi yang mandiri.

Kesejahteraan masyarakat yang terus meningkat ditunjukkan oleh makin tinggi dan meratanya tingkat pendapatan masyarakat, mantapnya sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, antara lain ditandai oleh meningkat dan meratanya kesejahteraan sosial.

Tingkat kualitas dan relevansi pendidikan seiring dengan makin efisien dan efektifnya manajemen pelayanan pendidikan, meningkatnya derajat kesehatan dan status gizi masyarakat, meningkatnya kesetaraan gender, serta kesejahteraan dan perlindungan anak. Sumber daya manusia Kabupaten Langkat diharapkan berkarakter cerdas, tangguh, kompetitif, berakhlak mulia, bermoral yang dicirikan dengan watak dan perilaku masyarakat yang beragama, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi luhur, toleran terhadap keberagaman, bergotong royong, dinamis dan berorientasi iptek.

Struktur perekonomian makin maju dan kokoh dengan daya saing perekonomian yang kompetitif dan berkembangnya keterpaduan antar sektor. Lembaga perekonomian sudah tersusun, tertata serta berfungsi dengan baik. Pertumbuhan ekonomi yang semakin berkualitas dan berkesinambungan dapat dicapai sehingga pendapatan perkapita pada Tahun 2025 mencapai kesejahteraan, tingkat pengangguran dan penduduk miskin semakin rendah.

**b. Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) Kab. Langkat Tahun 2013-2033**

Rencana tata ruang wilayah Kabupaten Langkat ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 9 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Langkat Tahun 2013-2033. Tujuan penataan ruang Kabupaten Langkat adalah terwujudnya Langkat sebagai pusat pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan pariwisata dipesisir timur Sumatera Utara yang berwawasan lingkungan. Oleh karena untuk mendukung tujuan penataan ruang tersebut maka pembangunan daerah Tahun 2020 dilaksanakan dengan mempertimbangkan substansi dari Rencana Tata Ruang Kabupaten yang meliputi :



- Rencana Struktur Ruang

Kabupaten Langkat memiliki 4 (empat) tingkatan tata jenjang pusat permukiman/pusat-pusat pelayanan, yaitu PKL (Pusat Kegiatan Lokal), PKLp (Pusat Kegiatan Lokal Promosi), PPK (Pusat Pelayanan Kawasan) dan PPL (Pusat Pelayanan Lingkungan). Sistem pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Langkat tetap dibagi menjadi 3 wilayah pengembangan, yaitu Langkat Hulu, Langkat Hilir dan Teluk Haru dengan Pusat Kegiatan Lokal (PKL), yaitu Stabat, Pangkalan Brandan (Babalan) dan Kuala.

- Rencana Pola Ruang

Pengelolaan kawasan lindung adalah upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Pengelolaan kawasan lindung bertujuan untuk mencegah timbulnya kerusakan fungsi lingkungan hidup.

1. Meningkatkan fungsi lindung terhadap tanah, air, iklim, tumbuhan dan satwa serta nilai sejarah dan budaya bangsa.
2. Mempertahankan keanekaragaman tumbuhan, satwa, ekosistem, dan keunikan alam.
3. Peningkatan Hidrologis HL berupa penanaman pengayaan dan pemanfaatan tanaman Multi Purposes Tree Spesies (MPTS).
4. Perlu adanya peningkatan kerjasama dalam pengelolaan kawasan hutan lindung dengan Kabupaten Karo dan NAD (Taman Nasional Gunung Lauser yang merupakan satu kesatuan dengan kawasan hutan lindung Kabupaten Langkat.

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan sumberdaya buatan. Kawasan budidaya merupakan kawasan di luar kawasan lindung. Penetapan kawasan budidaya dititikberatkan pada usaha untuk memberikan arahan pengembangan berbagai kegiatan budidaya sesuai dengan fungsi sumberdaya yang ada dengan memperhatikan optimasi pemanfaatannya.

Pengarah kawasan budidaya dalam rencana tata ruang wilayah Kabupaten ditujukan untuk :



1. Memberikan arahan pemanfaatan ruang kawasan budidaya secara optimal, berdayaguna dan berhasil guna, serasi, seimbang dan berkelanjutan;
2. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang antar kegiatan budidaya yang berbeda;
3. Memberikan arahan bagi perubahan jenis pemanfaatan ruang dari jenis kegiatan budidaya terutama ke jenis yang lain.
4. Proses penentuan kawasan budidaya ini mengacu kepada kawasan lindung yang telah ditetapkan sebelum dan menjadi pembatas bagi penetapan kawasan budidaya;
5. Kriteria menurut Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Daerah  
yang diterbitkan oleh Kelompok Kerja Tim Tata Ruang Nasional;
6. Rencana Strategi Program Pembangunan Daerah (Renstra Propeda);
7. Hasil Masukan analisis fisik, sosial, ekonomi dan struktur tata ruang.

Berdasarkan pedoman-pedoman diatas, maka kawasan budidaya yang direncanakan di Kabupaten Langkat adalah :

1. Kawasan hutan produksi :
  - Kawasan hutan produksi terbatas
  - Kawasan hutan produksi tetap
2. Kawasan pertanian :
  - Kawasan tanaman lahan basah
  - Kawasan tanaman lahan kering
  - Kawasan tanaman tahunan/perkebunan
  - Kawasan peternakan
  - Kawasan perikanan
3. Kawasan pertambangan
4. Kawasan perindustrian
5. Kawasan pariwisata
6. Kawasan permukiman

c. Dinamika Kondisi Umum Daerah

Berdasarkan hasil evaluasi indikator pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2019 dan memperhatikan arahan Kepala Daerah, Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Langkat serta mempertimbangkan kondisi lingkungan strategis (internal dan eksternal) yang akan dihadapi Kabupaten Langkat Tahun 2021, maka ditentukan tema RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 yakni :

**“Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Strategis Dan Pariwisata dan Layanan Publik Berbasis TIK”**

Dengan sasaran makro pembangunan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

- a. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 69,78
- b. Tingkat Kemiskinan 9,36
- c. Pertumbuhan Ekonomi 4,29-5,29
- d. Gini Rasio 0,2264
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,44-6,44

Dan fokus pembangunan daerah atau **Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021** diberikan perhatian khusus pada :

1. Pertumbuhan ekonomi untuk mendukung prioritas pengembangan pariwisata.
2. Peningkatan pelayanan kebutuhan dasar dan pengentasan permasalahan sosial.
3. Peningkatan infrastruktur dengan lingkungan berkelanjutan.
4. Peningkatan kerukunan, ketentraman dan ketertiban lingkungan dan pelestarian budaya.
5. Peningkatan reformasi birokrasi, tata kelola pemerintahan, penegakan hukum.
6. Penanganan dampak pandemik covid-19

#### **4.2.3.2. Prioritas Pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2021**

Dalam upaya mewujudkan prioritas pembangunan kabupaten untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, maka telah dirumuskan Prioritas Pembangunan, Program



dan kegiatan prioritas Tahun 2021. Kegiatan prioritas tersebut dilandaskan pada permasalahan yang ada di Kabupaten Langkat yang belum terselesaikan pada pembangunan Tahun 2019 serta memiliki dampak nyata bagi keberlanjutan pembangunan.

Tabel 4-7  
Prioritas, Program Prioritas, Kegiatan Prioritas  
RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021

PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendukung Prioritas Pengembangan Pariwisata	1. Program Pencapaian Usaha Kecil Menengah yang Konduksif	1. Perencanaan, Koordinasi, dan Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Dinas Koperasi
		2. Fasilitas Pengembangan Usaha Kecil Menengah	
	2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	1. Fasilitas Pengembangan Inkubator Teknologi dan Bisnis	
		2. Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	
		3. Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan	
		4. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD	
	3. Proram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	1. Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	
		2. Pemutakhiran Database UMKM Unggulan/Produk UMKM Orientasi Eksport	
		3. Pelatihan Keterampilan Usaha	
	4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	1. Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	
		2. Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian	
		3. Pembinaan, Pengawasan, dan Perhargaan Koperasi Berprestasi	
		4. Peningkatan dan Pengembangan Jaringan Kerjasama Usaha Koperasi	
		5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
		6. Pelatihan Dasar-dasar Peroperasian untuk gender	
		7. Pelatihan akuntansi pengurusan, badan pengawasan dan anggota koperasi	
		8. Pembinaan Pra Koperasi	
		9. Pemantauan administrasi dan pengawasan badan hokum koperasi	
		10. Sosialisasi Strategi Peningkatan Usaha Koperasi	
		11. Peringatan Hari Koperasi	
	5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KUKM	1. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Koperasi	
		2. Penilaian kesehatan simpan pinjam	
		3. Bimbingan teknis penilaian kesehatan simpan pinjam bagi gerakan koperasi (konvensional)	
		4. Bimbingan teknis pengawasan koperasi syariah bagi pengurus dan pengawasan koperasi	
		5. Bimbingan teknis penguatan dan akuntabilitas koperasi dalam persaingan usaha	
		6. Bimbingan teknis pemeriksaan koperasi bagi pengawas koperasi	
		7. Bimbingan tahnis laporan pertanggungjawaban bagi pengurus koperasi	
		8. Bimbingan teknis pengawasan, dewan syariah tentang koperasi KSPPS/USPPS	
		9. Sosialisasi penerapan peraturan dan sanksi bagi KSPPS/USPPS	
		10. Sosialisasi kerjasama (MoU) tentang peningkatan kepatuhan koperasi bagi pengurus dan pengawas	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	6. Program Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi	11. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	PENANAMAN MODAL
		1. Peningkatan Kegiatan Pemantauan, Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal	
		2. Penyelenggaraan Pameran Investasi	
		3. Pembuatan Bahan-Bahan Promosi Dalam Bahasa Indonesia dan Inggris	
		4. Coffe Morning perkembangan penyelenggaraab PTSP di DPMPP2TSP dengan PMA/PMDN se-Kabupaten Langkat	
		5. Koordinasi dan Konsultasi Pengembangan Promosi Penanaman Modal	
	7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	1. Monitoring dan Evaluasi Pengembangan dan Peningkatan Kualitas Penanaman Modal di Kabupaten Langkat	
		2. Koordinasi dan konsolidasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Kab. Langkat	
		3. Peningkatan Kualitas SDM Guna Peningkatan Pelayanan Investasi	
	8. Program Penyimpanan Potensi Sumberdaya , Sarana, dan Prasarana Daerah	1. Pembuatan Profil DPMP2TSP Kab. Langkat dan Buku Laporan tentang Kajian Realisasi Perizinan dan Perkembangan DPMP2TSP Kab. Langkat	
		2. Konsultasi dan Koordinasi Pelaporan, Realisasi dan Pengaduan Terkait Pelayanan Perizinan	
		3. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) Terhadap Pelayan Publik DPMP2TSP Kab. Langkat	
		4. Pembuatan dan Penyusunan Standar Pelayanan Minimum (SPM)	
	9. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dan Pengendalian	1. Implementasi Aplikasi Eperizinan	
		2. Bimbingan Teknis, Diklat, Kursus dan Pelatihan Bidang Pengaduan, Kebijakan Informasi dan Pelaporan	
		3. Penyusunan Tata Hukum Kebijakan Legal Drafting Peraturan Terkait Persyaratan Pelayanan Perizinan dan investasi	
	10. Program Peningkatan Pengembangan pengelolaan Pelayanan Publik	1. Optimalisasi Pengelolaan Pengaduan Masyarakat dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	
		2. Pelayanan Pengaduan Masyarakat	
	11. Program Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	1. Monitoring Evaluasi Perizinan dan Non Perizinan	
		2. Koordinasi dan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan dalam daerah dan luar daerah	
		3. Kegiatan Survey Pada Lokasi Perizinan	
		4. Sewa Space Pemasangan Baliho, Billboard dan Running Text pada tempat-tempat strategis	
	12. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perkantoran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan se Kabupaten Langkat	
		2. Pengawasan Terhadap Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	
	13. Program Peningkatan ketahanan Pangan	1. Pembinaan Pola Tanam dan Tertib Tanam (P2T3)	Dinas Pertanian dan Ketahan Pangan
		2. Pengembangan Disertifikasi Pangan dan Gizi dalam Rangka Pelestarian Kecukupan Pangan dan Program PKK	
		3. Pembinaan Ketahanan Pangan Kabupaten Langkat	
		4. Peningkatan Produksi, produktivitas dan mutu produk perkebunan/pertanian	
		5. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan	
		6. Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)	
		7. Percepatan Penganekaragaman konsumsi pangan dan gizi yang responsive gender	
		8. Pengembangan Lumbung pangan	
		9. Operasi UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wil. Langkat Hulu	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
		10. Operasional UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wil. Langkat Hilir	
		11. Operasional UPT Balai Produksi Benih Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Wil. Teluk Aru	
		12. Pembangunan/ Perbaikan UPTD/ Balai Perbenihan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya	
	14. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaliasi Kinerja	1. Penyusunan Perencanaan Kinerja OPD	
		2. Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	
		3. Updating Data Base Statistik Pertanian	
	15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	1. Penyuluhan dan Pendampingan Petani dan Pelaku Agribisnis	
		2. Temu karya pengrajin bengkel/kontak bengkel dan pelatihan petani penerima Alsintan	
	16. Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	1. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggulan Daerah	
		2. Pembinaan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil pertanian	
		3. Kegiatan pendukung DAK pertanian	
	17. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	
		2. Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	
	18. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	1. Penyuluhan Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	
		2. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan	
		3. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan	
		4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
		5. Survey pengambilan data ubinan	
		6. Penunjang Non Fisik Dana Alokasi Khusus (DAK)	
		7. Sekolah Lapangan Pengelolaan tanaman terpadu model padi Non Hibrida	
		8. Pembinaan Penangkar Benih Tanaman Pangan	
		5. Penerapan Penggunaan Benih Unggul	
		6. Pendampingan dana Tugas Pembantuan (TP)	
		7. Pembinaan Kebun Induk kelapa dalam	
		8. Pengembangan Jaringan Irigasi Tersier	
		9. Penerapan teknologi SLPHT Berbasis Organik	
		10. Pembinaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP)	
		11. Pembangunan /Perbaikan Sumber-Sumber Air (DAK)	
		12. Pembinaan P3A/GP3A dan IP3A	
		13. Pengembangan/Peningkatan Jalan Pertanian/Jasa Produksi	
		14. Sekolah Lapang Iklim (SLI)	
		15. Gerakan Pengendalian Hama Terpadu	
		16. Pembinaan Usaha Tani Nilam	
		17. Pendataan dan Inventarisasi Jaringan Irigasi	
		18. Pengembangan Optimasi Lahan	
		19. Reklamasi/Rehabilitasi Lahan Pertanian	
		20. Sosialisasi Perundang-undangan tentang Perkebunan	
		21. Pembinaan penyaluran pupuk bersubsidi	
		22. Pengembangan Kawasan Hortikultura	
		23. Pengembangan Kawasan Bawang Merah	
		24. Pengembangan Kawasan Komoditi Buah-buahan	
		25. Pengembangan Kawasan Kopi	
	19. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan	1. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	
		2. Pembinaan petugas PHP dan pengawasan	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	lapangan	peredaran pestisida	
		3. Pembinaan Petugas Pertanian Kecamatan	
		4. Pembinaan penyuluh pertanian	
		5. Operasional UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil. Teluk Aru	
		6. Operasional UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil. Langkat Hulu	
		7. Pembangunan/Perbaikan UPT Balai Penyuluhan Pertanian Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya	
		8. Operasional UPT Balai Pelaksana Penyuluhan Pertanian Wil. Langkat Hilir	
		9. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian	
		10. Pembangunan/Perbaikan Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di Kecamatan dan Sarana Pendukungnya (DAK)	
	20. Program Pecegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	1. Pemeliharaan Kesehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Ternak	
		2. Monitoring dan pengendalian penyakit Zoonosis	
		3. Pembangunan/Perbaikan Balai/Instalasi Perbibitan dan Hijauan Pakan Ternak, Puskesmas, RPH Ruminansia Serta Penyediaan Sarana Pendukungnya	
		4. Operasional UPT Puskesmas Wil. Langkat Hulu	
		5. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	
		6. Operasional UPT Puskesmas Wil. Langkat Hilir	
		7. Pengadaan Puskesmas Keliling	
		8. Operasional UPT Puskesmas Wil. Teluk Aru	
	21. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak	
		2. Pembibitan dan Perawatan Ternak	
		3. Pembelian dan Pendistribusian Vaksin dan Pakan Ternak	
		4. Pengembangan Agribisnis Peternakan	
		5. Pengadaan dan Pengembangan Agribisnis Ternak	
		6. Pembinaan petugas teknis, Petani peternak, pemotong hewan dan pembinaan perusahaan tentang penyakit zoonosis	
		7. Pelayanan Kesehatan Hewan Kecil	
		8. Pelayanan Vaksinasi Rabies, AI/ND dan SE	
		9. Pelayanan Disinfektan	
		10. Pelayanan Pengobatan cacing	
	22. Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan	1. Penelitian dan Pengembangan Hasil Produksi Peternakan	
		2. Verifikasi dan Validasi Data Usaha Peternakan	
		3. Peningkatan Jaminan Usaha Pertanian	
	23. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	1. Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Peternakan Tepat Guna	
	24. Program Pengembangan Agribisnis Pertanian/Perkebunan	1. Peningkatan kemitraan kelompok/petani	
		2. Peningkatan Modal Usaha Pertanian	
		3. Pembinaan Lembaga/Usaha Pertanian	
	25. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	1. Operasionalisasi dan Pengembangan UPT Kemetropolitan Daerah	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
	26. Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	1. Penyiapan Data Base Kuota Setiap Jenis Barang dan Jasa	
	27. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	1. Pengembangan Informasi Peluang Pasar Perdagangan Luar Negeri	
		2. Pembangunan Promosi Perdagangan Internasional	
	28. Program Peningkatan	1. Penyempurnaan Perangkat Peraturan, Kebijakan	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	dan Pelaksanaan Operasional	
		2. Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/Produk	
		3. Pengembangan Kelembagaan Kejasama Kemitraan	
		4. Peningkatan Sistem dan Jaringan Informasi Perdagangan	
		5. Sosialisasi Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	
	29. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan	1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Pedagang Kakilima dan Asongan	
		2. Kegiatan Penataan Tempat Berusaha Bagi Pedagang Kaki lima dan Asongan	
		3. Kegiatan Pengawasan Mutu Dagangan Pedagang Kakilima dan Asongan	
	30. Pengawasan Perdagangan dan TataTertib Niaga	1. Pengawasan Kemeterologian dan Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapan	
		2. Pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT)	
		3. Pengawasan Terhadap Barang-barang Bahan Berbahaya, Kelembagaan Perdagangan	
		4. Pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) Wajib	
		5. Sosialisasi Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga	
	31. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	1. Fasilitasi Bagi Industri Kecil dan Menengah Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya	
		2. Pembinaan Industri Kecil dan Menengah Dalam Memperkuat Jaringan Klaster Industri	
	32. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Indudustri	1. Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	
	33. Program Penataan struktur Idustri	1. Penyediaan Sarana maupun Prasarana Klaster Industri	
	34. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial	1. Penyediaan Sarana Informasi	
	35. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	1. Pembangunan Pasar Pedesaan	
		2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Pasar Perdesaan	
	36. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	1. Pembinaan Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir	Dinas Kelautan dan Perikanan
		2. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Laut	
		3. Pengembangan Perikanan Budidaya Berkelanjutan untuk Keamanan Pangan dan Pengentasan Kemiskinan	
	37. Program Pemberdayaan masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	1. Pembentukan Kelompok Masyarakat Swakarsa Pengamanan Sumberdaya Kelautan	
		2. Pengembangan Reservant/Restocking Sumber Daya Perikanan	
		3. Sosialisasi Undanga-Undang dan Peraturan Tentang Perikanan	
		4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pengawasan Kelautan dan Perikanan	
	38. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat	1. Sosialisasi bersih pantai bagi masyarakat pesisir	
	39. Program Pengembangan Budidaya Perikanan	1. Pengembangan Bibit Ikan Unggul	
		2. Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	
		3. Operasional Balai Benih Ikan	
		4. Budidaya Ikan Ekonomis Penting	
		5. Unit Pembenihan Rakyat (UPR)	
		6. Pembangunan, Rehabilitasi Kolam dan Tambak	
		7. Pengadaan Sarana dan Prasarana Budidaya Perikanan	





PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
		8. Pengadaan Sarana dan Prasarana Percontohan Budidaya Perikanan	
		9. Pengembangan Budidaya Ikan Dalam Keramba Jaring Apung/Keramba Jaring Tancap (KJA/KJT)	
		10. Pengembangan Budidaya Udang Galah	
		11. Monitoring Kesehatan Ikan Keliling	
		12. Pengembangan Budidaya Udang dan Ikan Secara Polyculture	
		13. Rehabilitasi Balai Benih Ikan	
	40. Program Pengembangan Perikanan Tangkap	1. Pengembangan Penangkapan Ikan	
		2. Pengadaan Sarana dan Alat Bantu Penangkapan Ikan Skala Kecil	
		3. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Perikanan	
		4. Perlindungan Terhadap Nelayan Kecil	
	41. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	1. Pelaksanaan Pos Simpul Koordinasi Penyuluhan Perikanan	
		2. Pelatihan Teknis Penyuluh Perikanan	
		3. Pengkajian dan penerapan teknologi spesifikasi lokasi	
		4. Penyediaan media penyuluhan perikanan	
		5. Penyusunan basis data penyuluhan perikanan	
	42. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	1. Penyediaan Sarana dan Pelatihan Pasca Panen (Pengolahan) Hasil Perikanan	
		2. Pelatihan/Sosialisasi Produk Kelautan dan Perikanan	
		3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Produk Kelautan dan Perikanan	
		4. Pembinaan gerakan gemar Makan ikan dalam rangka Peningkatan Gizi Keluarga	
	43. Program Perencanaan dan Pengembangan	1. Penyerasian Program dan Kegiatan Pembanagunan Perikanan dan Kelautan	
		2. Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembnagunan	
		3. Updating Database Perikanan dan Kelautan	
	44. Program Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	1. Penyediaan Sarana Pemberdayaan Masyarakat	
		2. Pengadaan Rumah Ikan	
		3. Pengadaan empang paloh di wilayah sepadan pantai kecamatan pesisir	
	45. Program Pengembangan Nilai Budaya	1. Pengadaan Pakaian adat Etnis dan Manekin	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
	46. Program Pengelolaan kekayaan Budaya	1. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	
		2. Rehab Miniatur	
		3. Pembuatan Miniatur mini Rumah Adat dan Pembelian Tiang Gentong	
		4. Penambahan Benda Koleksi Museum Daerah	
	47. Program Pengelolaan Keragaman Budaya	1. Memperingati Hari Ulang Tahun Langkat	
		2. Pembinaan sanggar kesenian Disparbud Langkat	
		3. Penampilan Kesenian pada Hari hari Besar dan Even Tertentu	
		4. Penyelenggaraan Gelar Melayu Serumpun	
		5. Penyelenggaraan Keragaman Budaya dan Religi pada Festival Azizi	
		6. Penyelenggaraan Lomba Sampan Seruai Tingkat Kabupaten	
		7. Penyelenggaraan Festival Danau Toba	
		8. Penyelenggaraan Malam Pagelaran Kesenian PRSU Medan	
		9. Penyelenggaraan Festival Pesta Budaya Langkat	
		10. Penyelenggaraan Pertemuan Raja raja Nusantara	
	48. Program	1. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi Informasi	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Dalam Pemasaran Pariwisata	
		2. Pelaksanaan Promosi Pariwisata Nusantara di Dalam dan di Luar Negeri	
		3. Pengadaan Bahan dan Barang Promosi Pariwisata Kabupaten Langkat	
	49. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata	
		2. Pengembangan Daerah Tujuan Wisata	
		3. Monitoring tempat-tempat objek wisata di Kabupaten Langkat	
	50. Program Pengembangan Kementrian Priwisata	1. Pengembangan dan Penguatan Informasi dan Database	
		2. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengembangan Kemitraan Pariwisata	
	51. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bag Pencari Kerja	Dinas Tenaga Kerja
		2. Monitoring, Eveluasi dan Pelaporan	
		3. Bimbingan teknis penempatan calon magang ke Jepang	
	52. Program Peningkatan Kesempatan kerja	1. Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja	
		2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
		3. Tindak Lanjut Penilaian ISO 900 1 : 2008	
		4. Tenaga Kerja Mandiri (TKM)	
		5. Sosialisasi informasi ke Sekolah tentang Lowongan Pekerjaan	
	53. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	1. Rapat Operasional Tim Survey Kebutuhan Hidup Layak dan Penetapan Usulan Upah Minimum Kabupaten (UMK) dan Sektoral Kabupaten (UMSK)	
		2. Penyelesaian perselisihan hubungan industri oleh Mediator	
		3. Pelatihan penyusunan struktur dan skala upah	
		4. Sinergitas pendataan Hubungan Industrial dan Jamsos	
		5. Penyuluhan Peningkatan Perusuhan yang membuat Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)	
	54. Program Pengembangan Data Informasi	1. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Daerah	
	55. Program Percepatan Pembangunan sanitasi Pemukiman (PPSP)	1. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	Bagian Perekonomian
		2. Pembinaan, Monitoring, Evaluasi dan Penilaian terhadap BPSPAMS atas Program PAMSIMAS	
	56. Program Kegiatan Sosial, keagamaan dan seni Budaya	1. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Langkat	
		2. Pelaksanaan TC dan Pengiriman Peserta MTQ ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara	
		3. Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji	
		4. Manasik Haji Gabungan	
		5. Pelaksanaan Nasyid Tingkat Kabupaten Langkat	
		6. Pelaksanaan TC dan Pengiriman Seleksi Nasyid Tingkat Provinsi Sumatera Utara	
		7. Safari Ramadhan	
		8. Halal bi Halal Pemkab. Dan Masyarakat	
		9. Peringatan HUL Tuan Guru Babussalam Langkat	
	57. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
	58. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	1. Penyelenggaraan Pameran Investasi	
		2. Penyelenggaraan Pameran KTNA Expo	
	59. Program Peningkatan kesejahteraan Petani	1. Peninjauan dan Pendampingan KTNA Kabupaten Langkat	
		2. Rembung KTNA, Mimbar Sarasehan KTNA	
		3. Pengiriman Peserta Pekan Derah (PEDA)	
		4. Pelatihan Kelompok Wanita Tani	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	60. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	<div>1. Penguatan Monitoring Komisi Pengawas Pupuk</div> <div>2. Pembentukan Tim Koordinasi dan Pengawasan Pendistribusian dan HET Elpiji Tabung 3 kg</div> <div>3. Pembentukan TIM Pengendalian Inflasi Daerah</div> <div>4. Tim Pembinaan dan Pengawasan Koperasi Simpan Pinjam Lembaga Keuangan Mikro (LKM)</div> <div>5. Pembentukan Tim Satuan Tugas Pangan</div> <div>6. Penawasan Penanganan Penambangan Bahan Bakar Minyak Ilegal</div> <div>7. Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan dan Pemantauan Kegiatan Pengembangan Usaha Pangan Masyarakat (PUPM)</div>	
Peningkatan pelayanan Kebutuhan Dasar dan pengentasan Permasalahan Sosial	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini	<div>1. Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (DAK Non Fisik)</div> <div>2. Pengembangan Kurikulum, Bahan Ajar dan Model Pembelajaran Pendidikan Usia Dini</div> <div>3. Perencanaan dan Penyusunan Program Pendidikan anak Usia Dini</div>	Dinas Pendidikan
		<div>1. Penambahan Ruang Kelas Sekolah</div> <div>2. Pembangunan Taman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir</div> <div>3. Pembangunan Perpustakaan Sekolah</div> <div>4. Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitari</div> <div>5. Pengadaan Buku-buku dan Alat Tulis Siswa</div> <div>6. Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa</div> <div>7. Pengadaan Meubeler Sekolah</div> <div>8. Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah</div> <div>9. Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah</div> <div>10. Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium dan Ruang Praktikum Sekolah</div> <div>11. Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik</div> <div>12. Penyediaan Buku Pelajaran untuk SD/MI/SDLB dan SMP/MTs</div> <div>13. Penyebarluasan dan Sosialisasi Berbagai Informasi Pendidikan Dasar</div> <div>14. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan</div> <div>15. Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN)</div> <div>16. Olimpiade Sains Nasional (OSN), Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)</div> <div>17. Bantuan Operasional Sekolah (BOS)</div> <div>18. Gala Siswa Nasional (GSI)</div> <div>19. Festival Literasi Sekolah (FLS)</div>	
		<div>1. Penilaian Kinerja Kepala Sekolah</div> <div>2. Penilaian Guru Berprestasi</div> <div>3. Sosialisasi Bimtek Penguatan Kepala Sekolah</div> <div>4. Bimtek Penguatan Calon Kepala Sekolah SD/SMP</div>	
	2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	<div>1. Ujian Akhir Sekolah SD/MI/SMP/MTs</div> <div>2. MTQ Pelajar Tingkat SD, SMP</div>	
	3. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan	<div>1. Pembangunan Data Base Informasi Kearsipan</div> <div>2. Pengumpulan Data</div> <div>3. Pengklarifikasian Data</div> <div>4. Audit Kearsipan</div> <div>5. Pembinaan dan Penataan Kearsipan</div>	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
		<div>1. Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah</div> <div>2. Penyelamatan Arsip Statis</div> <div>3. Penilaian dan Penyusutan Arsip</div>	
		<div>1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan</div>	
	4. Program Kemampuan Siswa	<div>1. Penyusunan dan Penerbitan Naskah Sumber Arsip</div> <div>2. Sosialisasi/Penyuluhan Kearsipan di Lingkungan Instansi Pemerintah/Swasta</div>	
	5. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		
	6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		
	7. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan		
	8. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi		



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
		3. Peningkatan Kapasitas SDM	
		4. Bimtek Pengelolaan Kearsipan	
		5. Lomba Pengelolaan dan Penataan Kearsipan	
	9. Program Pengembangan Baca dan Pembinaan Perpustakaan	1. Publikasi dan Sosialisasi Minat dan Budaya Baca	
		2. Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah	
		3. Layanan Perpustakaan dan Operasional Perpustakaan Keliling	
		4. Penyediaan Bahan Bacaan Ter Up To Date	
		5. Lomba Untuk Mendorong Terwujudnya Perpustakaan yang Prima dan Representatif	
		6. Lomba-lomba untuk Menumbuh Kembangkan Minat Budaya Baca	
		7. Reservasi Bahan Pustaka	
		8. Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Referensi Perpustakaan Daerah	
		9. Penyediaan Bahan Pustaka Layanan Anak	
		10. Layanan Perpustakaan pada Hari Sabtu dan Minggu	
		11. Cenderamata bagi Anggota Perpustakaan	
		12. Pembinaan dan Pengembangan Minat Baca	
		13. Pengembangan Profesi Kepustakawanan	
	10. Program Pengembangan dan Kerasian Kebijakan Pemuda	1. Peningkatan Keimanan dan Ketaqwaan Kepemudaan	Dinas Pemuda dan Olahraga
	11. Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan	1. Pembinaan Organisasi Kepemudaan	
		2. Pendidikan dan Pelatihan dasar Kepemimpinan	
		3. Fasilitasi Aksi Bhakti Sosial Kepemudaan	
		4. Penyuluhan Pencegahan Penggunaan Narkoba di Kalangan Generasi Muda	
		5. Pembinaan Pemuda Pelopor Keamanan Lingkungan	
		6. Pameran Prestasi Hasil Karya Pemuda	
		7. Seleksi Pembentukan Paskibraka	
		8. Kota Layak Pemuda	
	12. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda	1. Pelatiahn Kewirausahaan Bagi Pemuda	
	13. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga	1. Peningkatan kesegaran Jasmani dan Rekreasi	
		2. Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga	
		3. Pemberian Penghargaan Bagi Insan Olahraga Yang Berdedikasi dan Berprestasi	
		4. Peningkatan Jumlah dan Kualitas Serta Kompetensi Pelatih, Peneliti, Praktisi, dan Teknisi Olahraga	
	14. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga	1. Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	Dinas Kesehatan
		2. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Olahraga	
		3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Olahraga	
	15. Program Obatdan perbekalan Kesehatan	1. Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	
		2. Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas dan Rumah Sakit	
		3. Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	
	16. Program Uapaya kesehatan Masyarakat	1. Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas Jaringannya	
		2. Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	
		3. Revitalisasi Sstem Kesehatan	
		4. Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan	
		5. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
		6. Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pengungsi Korban Bencana	
		7. Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah Kesehatan	
		8. Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	
		9. Pengelolaan dan Analisa Data Kesehatan	
		10. Penyelenggaraan Pelayanan Puskesmas 24 Jam	
		11. Penyusunan Profil Kesehatan Kabupaten Langkat	
		12. Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	
		13. Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)	
		14. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Kesehatan	
		15. Penyelenggaraan Kesehatan Kerja	
		16. Penyelenggaraan Kesehatan Olahraga	
	17. Program Pengawasan Obat dan Makanan	1. Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Obat dan Makanan	
		2. Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan dan Bahan Berbahaya	
		3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
	18. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia	1. Pengembangan Standarisasi Tanaman Obat Bahan Alam Indonesia	
	19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1. Pengembangan Media Promosi dan Informasi sadar Hidup Sehat	
		2. Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat	
		3. Peningkatan Pendidikan Tenaga Penyuluh Kesehatan	
		4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
		5. Pertemuan Koordinasi Petugas Promkes Puskesmas	
	20. Program perbaikan Gizi Masyarakat	1. Penyusunan Peta Informasi Masyarakat Kurang Gizi	
		2. Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin	
		3. Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	
		4. Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian Keluarga Sadar Gizi	
		5. Penanggulangan Gizi Lebih	
		6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
	21. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	1. Penyemprotan/Fogging Sarang Nyamuk	
		2. Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah	
		3. Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	
		4. Peningkatan Imunisasi	
		5. Peningkatan Surveillance Epidemiologi dan Penanggulangan Wabah	
		6. Kewaspadaan Kesehatan Haji (K3JH)	
	22. Program Standarisasi Pelayanan kesehatan	1. Evaluasi dan Pengembangan Standar Pelayanan Kesehatan	
		2. Pembangunan dan Pemutakhiran Data Dasar Standar Pelayanan Kesehatan	
		3. Pemeriksaan Bakteriologi dan Kimia Terbatas	
	23. Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	1. Penanggulangan ISPA	
		2. Penanggulangan Penyakit Cacicngan	
		3. Pelayanan Kesehatan Kulit dan Kelamin	
		4. Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu	
	24. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana puskesmas- Puskesmas pembantu	1. Pembangunan Puskesmas	
		2. Pembangunan Puskesmas Pembantu	
		3. Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas	
		4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	dan Jaringannya	5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Puskesmas Keliling	
		6. Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes	
		7. Pembuatan Pagar Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Polindes	
	25. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan	1. Kemitraan Pengobatan Lanjutan Bagi Pasien Rujukan	
	26. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia	1. Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan	
		2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
	27. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak	1. Penyuluhan Kesehatan Bagi Ibu Hamil dari Keluarga Kurang Mampu	
		2. Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil Bagi Keluarga Kurang Mampu	
		3. Pertolongan Persalinan Bagi Ibu Dari Keluarga Kurang Mampu	
		4. Pelayanan Kesehatan Remaja	
		5. Kemitraan Dukun Bayi dan Bidan Desa di Puskesmas	
		6. Bimbingan Teknis dan Supervisi	
		7. Penjaringan Bumil Resti	
		8. Penanganan Neo Natal Resti	
		9. Pertemuan Pembinaan Bidan Desa	
		10. Jaminan Persalinan (JAMPERSA)	
	28. Program Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	1. Penyelenggaraan diklat Kepemimpinan	
		2. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis dan Pelatihan	
	29. Program Pencegahan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan Jiwa	1. Pemeriksaan Deteksi Dini Penyakit Tidak Menular di Masyarakat	
		2. Pembekalan dan Peningkatan Kapasitas Petugas	
		3. Pelayanan Kesehatan Jiwa	
		4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
	30. Program peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)	1. Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Peredaran Miras dan Narkoba	
	31. Program Keresasian kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	1. Pelaksanaan Sosialisasi yang Terkait Dengan Kesetaraan Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pelindungan Anak
		2. Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat	
		3. KIE Pembangunan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak	
	32. Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan Anak	1. Advokasi dan Fasilitasi PUG Bagi Perempuan	
		2. Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)	
		3. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	
		4. Peningkatan Kapasitas dan Jaringan Kelembagaan Pemberdayaan Perempuan dan Anak	
		5. Evaluasi Pelaksanaan PUG	
		6. Pengembangan Sistem Informasi Gender dan Anak	
	33. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	1. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Perempuan di Daerah	
		2. Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Perlindungan Tenaga Kerja Perempuan	
		3. Sosialisasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan KDRT	
		4. Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan Terhadap Tindak Kekerasan	
	34. Program Peningkatan	1. Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Peran serta dan Kesetaraan gender Dalam Pembangunan	2. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender	
		3. Kegiatan Penyuluhan Bagi Ibu Rumah Tangga Dalam Membangun Keluarga Sejahtera	
		4. Kegiatan Bimbingan Manajemen Usaha Bagi Perempuan Dalam Mengelola Usaha	
	35. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan kualitas keluarga	1. Penyusunan Kebijakan Mendukung Implementasi Strategi PUG	
		2. Bimtek Penyelenggaraan Kebijakan yang Mendukung Implementasi Strategi PUG	
		3. Pembentukan dan Pengutan Forum Komunikasi Perempuan Bidang Sosial Politik dan Hukum	
		4. Pelatihan Kepemimpinan Politik Bagi Perempuan Potensial Calon Kepala Daerah	
		5. Peningkatan Kapasitas Politik Kebangsaan Perspektif Gender Bagi Perempuan	
		6. Kerjasama Kemitraan Penyelenggaraan PUG Bidang Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Keluarga	
		7. Advokasi Penerapan Kurikulum Responsif Gender	
		8. Advokasi Pelaksanaan Kebijakan PUG Bidang Sosial, Politik dan Hukum	
		9. Penguatan PUG Bidang Ekonomi	
		10. Pelatihan Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) Bagi Pelaku Industri Rumah Tangga	
		11. Penguatan dan Fasilitas Lembaga Penyedia Layanan Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi	
		12. Advokasi Pendampingan Penyelenggaraan Kebijakan Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Keluarga	
		13. Penyusunan modul Pengarusutamaan Gender Bidang Pembangunan Keluarga	
		14. Penguatan Komitmen Pelaksanaan Kebijakan Ketahanan Keluarga	
		15. Advokasi pelibatan kepala keluarga laki-laki dalam upaya Penurunan AKI	
		16. Fasilitas pelaksanaan PUG Bidang Pembangunan Keluarga	
		17. Penguatan SDM Pelaksana PPRG	
		18. Pemantauan, Evaluasi, Pelaporan Kebijakan PUG Bidang Sosial, Politik, Hukum, Ekonomi dan Pembangunan Keluarga	
		19. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga ke Dalam Daerah	
		20. Koordinasi/konsultasi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga ke Luar Daerah	
	36. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	1. Penyusunan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	
		2. Bimtek penyelenggaraan PRA (Puskesmas Ramah Anak) dan SRA (Sekolah Ramah Anak)	
		3. Bimtek Pelaksanaan Kebijakan Pemenuhan Hak Anak	
		4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Hak Anak Kedalam Daerah	
		5. Koordinasi/konsultasi Pelaksanaan Hak Anak Keluar Daerah	
		6. Pengutan Penyelenggaraan PRA (Puskesmas Ramah Anak)	
		7. Fasilitas Pemenuhan Hak Sipil, Informasi, dan Partisipasi Anak	
		8. Penguatan/Pembentukan Pusat Informasi Layak Anak	
		9. Penguatan/Pembentukan Kab/Kota Layak Anak	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
		10. Penguatan Penyelenggaraan SRA (Sekolah Ramah Anak)	
		11. Penguatan Tentang Pemenuhan Hak Anak atas Pendidikan, Kreatifitas, dan Budaya	
		12. Fasilitasi Pengembangan Forum Anak	
	37. Program Peningkatan Sistem data Gender dan Anak	1. Penyusunan Kebijakan Penyediaan Data dan Informasi Gender	
		2. Bimtek Penyelenggaraan Kebijakan dan Penyediaan Data dan Informasi Anak	
		3. Pengumpulan, Pengolahan, Analisi dan Penyajian Data Gender dan Anak	
		4. Pelatihan Pengumpulan, Pengolahan, analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak	
		5. Pelatihan Pemanfaatan Sistem Informasi Gender dan Anak	
		6. Pelatihan SDM Pengelola Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	
		7. Penyusunan Profil Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		8. KIE Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		9. Fasilitasi Lembaga Penyedia Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak	
		10. Pembuatan/Pengembangan Aplikasi/Sistem Informasi Terkait Penyediaan dan Publikasi Data, Informasi Gender dan Anak	
		11. Penguatan Forum Data Terpilah Gender dan Anak	
		12. Pemantauan, Evaluasi dan pelaporan Pemanfaatan Data Gender dan Anka ke Dalam Daerah	
		13. Koordinasi/Konsultasi Pemanfaatan Data Gender dan Anak Keluar Daerah	
	38. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perlindungan khusus Anak	1. Penyusunan Peningkatan Perlindungan Hak Permpuan dan Perlindungan Kusus Anak	
		2. Penyusunan Kesepakatan Bersama Terkait Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	
		3. Bimtek Penyelenggaraan Peningkatan Perlindungan Hak Permpuan dan Perlindungan Khusua Anak	
		4. Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	
		5. Koordinasi/Konsultasi Peningkatan Perlindungan Hal Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak Keluar Daerah	
		6. Fasilitasi Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	
		7. Fasilitas Lembaga Layanan Perlindungan Khusus Anak Termasuk P2TP2A yang Sesuai Dengan Standar	
		8. Pelatihan SDM Lembaga Layanan Perlindungan Anak	
		9. Pengelolaan Data, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Kekerasan Perempuan dan Anak	
		10. Penguatan Koordinasi dan Penyusunan Data Kekerasan Perempuan dan Anak	
		11. Penyelenggraan Fasilitas Unit P2TP2A/PPA	
		12. Supervisi, Monitoring, Evaluasi Desa/Kelurahan Percontohan Pelaksana Pola Asuh Anak dan Remaja (PAAR)	
		13. Penguatan dan Fasilitas Perempuan dan Anak Dalam Kondisi Tertentu	
		14. Advokasi Pengintegrasian Materi Penghapusan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak	





PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
		15. Fasilitasi dan Pelatihan SDM Anggota Gugus Tugas Penghapusan Tindak Kekekrasan Terhadap Perempuan dan Anak	
		16. Pembinaan dan Fasilitasi Kelompok Bina Keluarga TKI (BK-TKI)	
		17. Pengembangan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	
		18. Pelatihan Fasilitator Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM)	
	39. Program Peningkatan Peanggulangan Narkoba, PMS Terasuk HIV/AIDS	1. Penyuluhan Penanggulangan Narkoba dan PMS	
	40. Program keluarga Berencana	1. Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi Bagi Keluarga Miskin	
		2. Pelayanan KIE	
		3. Pembinaan Keluarga Berencana	
		4. Pengelolaan dan Penyusunan Buku Data (Informasi) Keluarga	
		5. Temu Kader KB Se Kabupaten Langkat	
		6. Bhakti TNI KB Terpadu	
		7. Pembentukan/Pembinaan Kampung KB	
		8. Evaluasi Program KB dan Pemberdayaan Perempuan	
		9. Pengadaan Sarana Pelayanan KB	
		10. Rapat Pertemuan Lengkap Petugas Lapangan Program KB	
	41. Program Kesehatan Reproduksi Remaja	1. Advokasi dan KIE Tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)	
		2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Penerangan KB Keliling, Pengadaan Public Address dan KIE Kit	
	42. Program pelayanan Kontrsepsi	1. Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB	
		2. Pengadaan Alat Kontrasepsi	
	43. Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri	1. Fasilitas Pembentukan Kelompok Masyarakat Peduli KB	
		2. Pelatihan R/R Dallap Bagi PPKBD dan Sub PPKBD Tingkat Kecamatan	
		3. Temu Remaja PIK R/M	
	44. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang Anak	1. Pengumpulan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	
	45. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	1. Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga di Kecamatan	
		2. Pameran Kelompok UPPKS dan Gelanggang Dagang	
		3. Operasional dan Pencanaan Kesatuan Gerak PKK-KB Kesehatan	
		4. Pengembangan dan Pembinaan Kelompok UPPKS	
		5. Pembinaan untuk Pengelolaan Kelompok Bina-bina Keluarga	
	46. Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU	1. Pengkajian Pengembangan Model Operasional BKB Posyandu-PADU	
	47. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. Penyusunan Grand Desain Kuantitas Penduduk	
		2. Pemutakhiran Data Keluarga dan Kependudukan	
		3. Penyediaan Penyusunan Parameter Kependudukan dan KB	
		4. Analisis Dampak Pengendalian Kependudukan	
		5. Fasilitas, Pemantauan dan Evaluasi Pengendalian Penduduk	
		6. Publikasi dan Sosialisasi Sistem Informasi	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Keluarga dan Kependudukan	
	48. Program Upaya Pelayanan Kesehatan	1. Peningkatan Kesehatan Masyarakat	Rumah Sakit Umum Tanjung Pura
	49. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	1. Penyusunan Standar Pelayanan Kesehatan	
	50. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	1. Rehabilitasi Bangunan Rumah Sakit	
		2. Pengadaan Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	
		3. Pengadaan Obat-obatan Rumah Sakit	
		4. Pengadaan Bahan-bahan Logistik Rumah Sakit	
	51. Program Pemeliharaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	1. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Sakit	
		2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Rawat Inap Rumah Sakit (VVIP, VIP, Kelas I, II dan III)	
		3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Instalasi Pengolahan Limbah Rumah Sakit	
		4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kesehatan Rumah Sakit	
		5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeuler Rumah Sakit	
		6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Rumah Sakit	
	52. Program Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit	1. Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit	
	53. Program Penataan Administrasi Kependudukan	1. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
		2. Pengolahan Dalam Penyusunan Laporan Informasi Kependudukan	
		3. Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan	
		4. Pelayanan Keliling Pendaftaran Penduduk	
		5. Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil	
	54. Program pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1. Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) Petugas dan Pendamping Sosial Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan PMKS Lainnya	Dinas Sosial
		2. Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Keluarga Miskin	
		3. Fasilitasi Manajemen Usaha Bagi Keluarga Miskin	
		4. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin	
		5. Pelatihan Keterampilan bagi Penyandang masalah Kesejahteraan Sosial	
	55. Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial	1. Pengembangan Kebijakan tentang Akses Sarana dan Prasarana Publik Bagi Penyandang Cacat dan Lansia	
		2. Pelayanan dan Perlindungan Sosial, Hukum Bagi Korban Eksploitasi, Perdagangan Perempuan dan Anak	
		3. Pelaksanaan KIE Konseling dan Kampanye Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	
		4. Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal	
		5. Penanganan Masalah-masalah Strategis yang Menyangkut Tanggap Cepat Darurat dan Kejadian Luar Biasa	
		6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
	56. Program Pembinaan Anak Terlantar	1. Pembangunan Sarana dan Prasarana Tempat Penampungan Anak Terlantar	
		2. Penyusunan Data dan Analisis Permasalahan Anak Terlantar	
		3. Pengembangan bakat dan Keterampilan Anak Terlantar	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	57. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma	4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
		1. Pendataan Penyandang Cacat dan Penyakit Kejiwaan	
		2. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Disabilitas Eks Trauma	
	58. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo	3. Pendayagunaan para Penyandang Cacat dan Eks Trauma	
		1. Pendidikan dan Pelatihan bagi Penghuni Panti Asuhan/Jompo	
		2. Peningkatan Keterampilan Tenaga Pelatih dan Pendidik	
	59. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)	3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
		1. Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Berusaha bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	
		2. Pembangunan Pusat Bimbingan/Konseling bagi Eks Penyandang Penyakit Sosial	
		3. Pemantauan Kemajuan Perubahan Sikap Mental Eks Penyandang Penyakit Sosial	
		4. Pemberdayaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	
	60. Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial	5. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
		1. Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial Masyarakat	
	61. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan	2. Pengembangan Model Kelembagaan Perlindungan Sosial	
		1. Pembinaan Administrasi Pemerintahan Desa/Kelurahan	
		2. Penyelenggaraan Pembinaan Proyek P2WKSS	
		3. Pembinaan Desa Percontohan PKK	
		4. Pembinaan Peningkatan Kapasitas Lembaga Posyandu	
		5. Pembinaan Pemanfaatan Lahan Pemukiman dan Perumahan Khususnya yang berbasis pada Ambang Batas Daya Dukung Lingkungan dan Daya Tampung Ruang	
		6. Pelatihan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan PAMSIMAS di Desa	
		7. Monev, Pelaporan BUMDes, Pasar Desa, Sarana Prasarana dan PAMSIMAS	
	62. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	1. Pembinaan Pengelolaan Pasar Desa	
		2. Perlombaan Pengelolaan Administrasi BUMDes	
		3. Monev Kakayaan Desa	
		4. Pembinaan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa	
	63. Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa	1. Pembinaan Kelompok Masyarakat Pembangunan Desa	
		2. Pelaksanaan Musyawarah Pembangunan Desa/Kelurahan	
		3. Perlombaan Desa dan Kelurahan	
		4. Monitoring dan Pembinaan bagi Penerima Masyarakat Bantuan Bio Gas dari Kementerian Desa	
	64. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	1. Pembuatan Perda, Perbub dan Kepbup tentang Desa	
		2. Sosialisasi Peraturan Per-UU bagi Aparatur Pemdes	
		3. Bimtek Siskuedes	
		4. Bimtek Kekayaan Desa	
		5. Bimtek Tipologi Desa	
		6. Bimtek Profil Desa	
		7. Peningkatan Kapasitas TP. PKK Kecamatan, Desa/Kel	
		8. Pendapatan Apaaratur Pemerintahan Desa	
		9. Pembinaan dan Sosialisasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	
	65. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan	1. Kegiatan TP.PKK Kab. Langkat	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	66. Program Kerjasama Pembangunan Antar Desa	1. Pembinaan Pengelolaan Sarana dan Prasarana Desa	
	67. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	1. Monev Dana Desa	
		2. Operasional APBDes	
		3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RPJMDes dan RKP-Desa	
	68. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	1. Pembinaan dan Evaluasi Posyantekdes	
		2. Pelatihan Pengurus Posyantekdes	
		3. Penyelenggaraan Jambore Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG)	
		4. Pelaksanaan Temu Informasi Pos Pelayanan Teknologi	
		5. Pembinaan Profil Desa/Kelurahan Online	
		6. Pembinaan Pendataan Data Dasar Isian Keluarga/Prodeskel	
Peningkatan Infarastuktur Dengan Lingkungan Berkelanjutan	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	1. Perencanaan Pembangunan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		2. Pembangunan Jalan	
		3. Perencanaan Pembangunan Jembatan	
		4. Pembangunan Jembatan	
		5. Monitoring, Evaluasi dan Laporan	
	2. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	1. Pembangunan Turap/Talud/Bronjong	
	3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	1. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	
		2. Perencanaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	
		3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan	
		4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan	
		5. Monitoring, Evaluasi dan Laporan	
	4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	1. Pengadaan Alat-alat Berat	
		2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Berat	
		3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan Bahan Laboratorium Kebinamargaan	
	5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Perairan Lainnya	1. Perencanaan Pembangunan Jaringan Irigasi	
		2. Pembangunan Pintu Air	
		3. Pelaksanaan Normalisasi Saluran Sungai	
		4. Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi	
		5. Optimalisasi Fungsi Jaringan Irigasi yang telah Dibangun	
		6. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
	6. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	1. Rehabilitasi Kawasan Kritis Daerah Tangkapan Sungai dan Danau	
		2. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air Lainnya	
	7. Program Pengendalian Banjir	1. Rehabilitasi dan Pemeliharaan Bantaran dan Tanggul Sungai	
	8. Program Perencanaan Tata Ruang	1. Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan	
		2. Revisi Rencana Tata Ruang	
		3. Koordinasi dan Fasilitasi Penyusunan Rencana Tata Ruang Lintas Kabupaten/Kota	
		4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
		5. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah	
	9. Program Pengadaan, Penataan dan Perawatan Lampu Jalan	1. Pengadaan Perangkat untuk Pemasangan KWH/Meter Lampu Jalan	
		2. Pengadaan/Peralatan Lampu Jalan	
		3. Pendataan Penerangan Lampu Jalan Se-Kabupaten Langkat	
	10. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman-Taman Kota	1. Pengadaan Perlengkapan Sarana dan Pemeliharaan Taman, Pembibitan dan Taman Dekorasi	
		2. Peralatan Taman Kota	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
		3. Pembuatan Taman Pulau Jalan	
		4. Perawatan Tugu	
		5. Pemeliharaan Taman Pulau Jalan	
		6. Pembuatan Taman Kota	
		7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
	11. Program Pengembangan Perumahan	1. Fasilitasi dan Stimulasi Pembangunan Perumahan Masyarakat Kurang Mampu	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
		2. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
		3. Penyusunan Detail Engineering Design (DED)	
		4. Prasarana Umum Rumah Bersubsidi	
	12. Program Lingkungan Sehat Perumahan	1. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
		2. Perencanaan Teknis dan Pengelolaan Air Baku	
		3. Penyediaan Sarana Air Bersih dan Sanitasi	
		4. Pemeliharaan Prasarana dan Saluran Pembawa	
		5. Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman	
		6. Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS)	
	13. Program Pembangunan Jalan Lingkungan	1. Perencanaan Pembangunan Jalan Lingkungan	
		2. Pembangunan Jalan Lingkungan	
		3. Monitoring, Evaluasi dan Palaporan	
	14. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	1. Perencanaan Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	
		2. Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong	
		3. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
	15. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	1. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan
		2. Rehabilitasi/Pemeliharaan Sarana Balai Pengujian Kendaraan Bermotor	
		3. Rehabilitasi/Pemeliharaan Terminal/Pelabuhan	
		4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rambu-rambu Lalu Lintas	
	16. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1. Sosialisasi/Penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas dan Angkutan	
		2. Koordinasi dalam Peningkatan Pelayanan Angkutan	
		3. Koordinasi Penilaian Kota Tertib Lalu Lintas Wahana Tata Nugraha	
	17. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	1. Pembangunan Halte Bus, Taxi Gedung Terminal	
	18. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	1. Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas	
		2. Pengadaan Marka Jalan	
		3. Pengadaan Pagar Pengaman Jalan	
	19. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	1. Pengadaan Alat Pengujian Kendaraan Bermotor	
		2. Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor	
	20. Program Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	1. Penyelenggaraan Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ) dan Wahana Tata Nugraha (WTN)	
		2. Pengadaan dan Pemasangan Fasilitas Keselamatan Jalan	
	21. Program Penegembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	1. Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
		2. Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasana dan Sarana Persampahan	
		3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Persampahan	
		4. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
	22. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	1. Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adi Pura	
		2. Pengelolaan B3 dan Limbah B3	
		3. Pelaksanaan Kegiatan Hari Lingkungan Hidup	
		4. Pelaksanaan Pameran Pekan Raya Lingkungan Hidup	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
		5. Pembinaan Sekolah Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup (ADIWIYATA)	
		6. Pembinaan Peningkatan Peringkat Kerja (PROPER) bagi Pelaku Usaha	
		7. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	
		8. Operasional Laboratorium Lingkungan	
	23. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	1. Pengendalian Dampak Perubahan Iklim	
		2. Pengelolaan Keanekaragaman Hayati dan Ekosistem	
		3. Pembinaan Perusahaan Terhadap Kerusakan Lingkungan Akibat Galian C di Kabupaten Langkat	
		4. Pembinaan Masyarakat dalam Pengelolaan Hutan Mangrove di Pesisir Pantai	
		5. Inventarisasi Kerusakan Kawasan Pesisir Pantai	
		6. Sosialisasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup di Kecamatan se Kabupaten Langkat	
	24. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	1. Pengaduan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup	
	25. Program Pengendalian Polusi	1. Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair	
		2. Pengujian Kadar Garam pada Air Sumur Masyarakat di Daerah Pesisir Pantai	
		3. Konsultasi Peningkatan Pengetahuan tentang Lingkungan Hidup	
		4. Monitoring dan Evaluasi Status Mutu Kualitas Air Sungai di Kabupaten Langkat	
		5. Pemantauan Emisi Sumber Bergerak di Kabupaten Langkat	
	26. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan	1. Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan Dikawasan Konservasi	
	27. Program Penetapan dan Pemanfaatan PPLH	1. Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	
		2. Sosialisasi Penegakan Hukum Lingkungan	
		3. Pengawasan terhadap Penerima Izin Lingkungan Hidup	
		4. Sosialisasi Tata Cara Pengaduan Sengketa Lingkungan Hidup	
		5. Teknis Penegakan Hukum Lingkungan	
		6. Penyusunan Dokumen IKPLHD (informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup)	
		7. Inventarisasi Data Usaha dan/atau Kegiatan yang belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup	
		8. Penyusunan Dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	
	28. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	1. Kegiatan Masyarakat Hukum Adat (HMA)	
	29. Program Pencegahan Dinida Penanggulangan Korban Bencana Alam	1. Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana	Dinas Penanggulanga n Bencana Daerah
		2. Pengadaan Logistik Penanggulangan Bencana	
		3. Jambore Daerah Kesiapsiagaan Bencana Daerah Kab. Langkat	
		4. Peringatan Bulan Pengurangan Resiko Bencana	
		5. Pelaksanaan Kegiatan Haei Kesiapsiagaan Bencana Nasional	
		6. Sosialisasi Kesiapsiagaan Masyarakat	
		7. Posko Siaga Bencana	
		8. Pembentukan Desa dan Kelurahan Tangguh	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	30. Program rehabilitasi dan Rekrontuksi Pasca Bencana	Bencana	
		1. Supervisi pengawasan Teknis Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
		2. Perencanaan Teknis Rehabilitas dan Rekonstruksi Pasca Bencana	
		3. Penilaian Kerugian akibat Bencana Alam	
	31. Program Penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana	1. Perbaikan Sarana dan Prasarana Vital dalam Tanggap Darurat	
		2. Bantuan Fasilitas dan Stimulasi Perbaikan Darurat Rumah Akibat Bencana	
		3. Pelatihan Penggunaan Peralatan Penanggulangan Bencana	
		4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Penggunaan Bencana	
		5. Penyediaan Sarana Mobilitas Angkutan Peralatan dan Logistik Bantuan untuk Penanggulangan Bencana	
	32. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	1. Penanggulangan Lokasi-lokasi Rawan Banjir dan Longsor (Kajian Resiko Bencana)	
	33. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	1. Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informasi
	34. Program fasilitas peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi	1. Pelatihan SDM dalam Bidang Komunikasi dan Informasi	
	35. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	1. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah	
		2. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	
	36. Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik	1. Pemantauan Opini dan Aspirasi Publik	
		2. Pengumpulan Data dan Informasi Kebijakan Pemerintah Daerah	
		3. Produksi Konten Informasi Publik	
		4. Pelayanan Informasi Publik dalam Rangka Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	
		5. Penyebarluasan Informasi Publik Melalui Media	
		6. Pengelolaan Media Komunikasi Milik Pemerintah	
	37. Proram Pengelolaan Aplikasi Informasi	1. Layanan Nama Domain dan Sub Domain bagi Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Daerah	
		2. Layanan Pengembangan dan Pengelolaan Aplikasi Umum dan Aplikasi Khusus yang Terintegrasi	
		3. Pengembangan Sumber Daya TIK Pemerintah Daerah	
		4. Penyelenggaraan Ekosistem TIK dan Kerjasama Smart City	
		5. Layanan Akses Internet, Intranet dan Komunikasi Intra Pemerintah Daerah	
		6. Layanan Infrastruktur Dasar Data Center, Disaster Recovery Center dan TIK	
		7. Layanan Website Lembaga, Pelayanan Publik dan Kegiatan Pemerintah Daerah	
Peningkatan kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban Lingkungan dan Pelestarian Budaya	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	1. Pendidikan dan Pelatihan Dasar Intelegen bagi Aparatur Kecamatan, Desa dan Kelurahan	Kesbangpol
		2. Orientasi bagi Aparat dan Masyarakat Terkait Penanganan Konflik Sosial (PKS)	
		3. Tim Pemantau, Pengawasan Orang Asing, Non Government Organization dan Lembaga Asing di Kabupaten Langkat	
	2. Program pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	1. Komunikasi Intelijen Daerah (KOMINDA) Kabupaten Langkat	
		2. Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM)	
		3. Hari Bela Negara	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
		4. Forum Koordinasi Pimpinan (FORKOPIMDA)	
		5. Tim Terpadu Pengawasan Organisasi Masyarakat Tingkat Kabupaten Langkat	
		6. Tim Kewaspadaan Dini di Daerah dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Se-Kabupaten Langkat	
		7. Orientasi Kewaspadaan Dini terhadap Radikalisme dan Kejahatan Masyarakat	
		8. Rapat Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Langkat	
	3. Program Pengembangan Wawasan kebangsaan	1. Pemberdayaan Forum Pembaruan Kebangsaan Kabupaten Langkat dan Kecamatan Se-Kabupaten Langkat	
		2. Peningkatan Toleransi dan Pemeberdayaan FKUB Kab. Langkat	
		3. Penguatan Empat Pilar Kebangsaan	
		4. Satgas Pemberantasan dan P4GN Kabupaten Langkat	
		5. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	
	4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	1. Pemberdayaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat Kabupaten, Kecamatan dan Kelurahan/Desa	
	5. Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat Penyakit Masyarakat	1. Fasilitas Pencegahan, Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba terhadap Masyarakat	
		2. Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba dan Prekursor Narkotika di Daerah Kab. Langkat	
	6. Program Pendidikan Politik Masyarakat	1. Penelitian, Pemeriksaan Persyaratan Administrasi, Pengajuan, Penyerahan dan Bantuan Kepada Parpol	
		2. Tim Pemantauan Perkembangan Politik di Daerah	
		3. Pertemuan Orkemas Se-Kabupaten Langkat	
		4. Sosialisasi Kepada Partai Politik	
		5. Sosialisasi Pembinaan Politik Kepada Masyarakat	
	7. Rogram Pemeliharaan Kantribmasdan Pencegahan Tindak Kriminal	1. Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Praja dengan TNI/POLRI dan Kejaksaan	Satpol PP
		2. Peningkatan Kapasitas Aparat dalam Rangka Pelaksanaan Siskamwakarsa di Daerah	
	8. Program peningkatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1. Penyusunan Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	
		2. Sosialisasi Norma, Standar, Prosedur, dan Manual Pencegahan Bahaya Kebakaran	
		3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pencegahan Kebakaran	
		4. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pertolongan dan Pencegahan Kebakaran	
		5. Kegiatan Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran	
		6. Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	
		7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	
		8. Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran	
	9. Program pengembangan Nilai Budaya	1. Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah	Dinas Pariwisata
		2. Pengadaan Pakaian Adat Etnis dan Manekin	
		3. Aktualisasi Nilai Moral Agama	
		4. Perlombaan Tarian Adat Tradisional	
	10. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan	1. Fasilitasi Pembentukan Kemitraan Usaha Profesi Antar Daerah	
		2. Membangun Kemitraan Pengelolaan	





PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Kekayaan Budaya	Kebudayaan Antar Daerah	
	11. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	1. Fasilitasi Pembentukan Masyarakat dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	
		2. Pengelolaan dan Pengembangan Pelestarian Peninggalan Sejarah Purbakala, Museum dan Peninggalan Bawah Air	
		3. Rehab Museum	
		4. Pembuatan Miniatur Mini Rumah Adat dan Pembelian Tiang Gentong	
		5. Penambahan Benda Koleksi Museum Daerah	
		6. Pembuatan Neon Box Pakaian Adat Daerah	
		7. Sosialisasi Pelestarian Adat Istiadat Budaya Lokal Daerah	
		8. Pembinaan terhadap Penggiat Budaya Lokal Daerah	
		9. Pemetaan Bangunan Peninggalan Sejarah	
		10. Perekaman dan Digitalisasi Video Sejarah Berandan Bumi Hangus	
		Pengakajian terhadap /benda Peninggalan Sejarah Menjadi Cagar Budaya	
		Pendokumentasian dan Perekaman Berbasis Data Cagar Budaya	
		Pengembangan Peran Serta Masyarakat dan Swasta dalam Pengelolaan Kekayaan Budaya	
Peningkatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakkan Hukum	1. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	Badan Kepegawaian Daerah
		2. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
		3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
		4. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah	
		5. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi calon PNS	
		6. Pendidikan dan Pelatihan	
	2. Program Pendidikan Kedinasan	1. Pendidikan Penjenjangan Struktural	
	3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis PNS	
		2. Pembangunan/Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	
		3. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	
		4. Proses Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNS	
		5. Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	
		6. Pelantikan	
		7. Ujian Dinas	
		8. Penyesuaian Ijazah	
		9. Seleksi Penerimaan ASN	
		10. Penataan Adminstrasi Pensiunan PNS	
		11. Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan PNS	
	4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	1. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS	Bagian Orta
		2. Percepatan Program Reformasi Birokrasi	
	5. Program Peningkatan SistemPengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksnaan Kebijakan KDH	1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	Inspektorat
		2. Penaggulangan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	
		3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	
		4. Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif	
		5. Evaluasi berkala Temuan Hasil Pengawasan	
		6. Implementasi Pencegahan Pemberantasan Korupsi Terintegrasi	
		7. Penyusunan PKPT	
		8. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	
		9. Reviu RKA-SKPD dan RKA PPKD	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
		10. Reviu Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
		11. Reviu RKPD	
		12. Penyelenggaraan Koordinasi Tim Pegawai dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D)	
		13. Pemebeentukan Unit Satgas Pemebeantasan Pungli Kabupaten Langkat	
		14. Survey Penilaian Intergritas	
		15. Reviu Penyerapan Anggaran	
	6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	1. Pendidikan dan Pelatihan Formal	
		2. Penilaian Angka Kredit Pelatih dan Pengawas	
	7. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Sistem Prosedur Pengawaasan	1. Peningkatan Kapabilitas APIP	
		2. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	
		3. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	
	8. Program Peningkatan Kesadaran hokum dan HAM	1. Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Panitia Pelaksana Ranham Daerah Kabupaten/Kota	Bagian Hukum
		2. Pembinaan Desa Keluarga Sadar Hukum/HAM	
		3. Sosialisasi Produk Hukum Daerah Berbasis HAM	
		4. Diseminasi Pelayanan Publik Berbasis HAM	
	9. Program Peningkatan kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Derah	1. Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Bagian Tapem
		2. Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah	
		3. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lainnya	
		4. Peningkatan Kapasitas Staf Ahli Bupati	
	10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	
		2. Pemebeentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Miskin	
	11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah	1. Fasilitas/Pembentuka Tim Kerjasam Pemerintah Kabupaten Langkat	
	12. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan	1. Publikasi Peraturan Perundang-undangan	
		2. Kajian Peraturan Perundang-undangan Daerah terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru, Lebih Tinggi dan Keserasian Antar Peraturan Perundang-undangan Daerah	
		3. Pembentukan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	
		4. Penyusunan Regulasi Daerah Mengenai Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Miskin	
		5. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
	13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1. Penetapan dan Penegasan Batas Kecamatan	
		2. Pembakuan Nama Rupa Bumi	
		3. Penetapan dan Penegasan Batas Daerah	
		4. Penetapan dan Penegasan Batas Desa	
	14. Program Peningkatan dan Pendalaman Tugas-tugas Aparatur Peerintahan	1. Penilaian Kecamatan Terbaik Tingkat Kabupaten	
		2. Penyusunan Laporan Kegiatan Harian/Bulanan Bupati dan Wakil Bupati	
		3. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	
		4. Penyusunan Laporan Semester I dan II Bupati	
		5. Pembentukan Tim Teknis Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan	
		6. DESK Pilkada Kabupaten Langkat	
		7. Penilaian Kelurahan Terbaik Tingkat Kabupaten	
		8. Penyusunan Memori Serah Terima Jabatan Bupati	
	15. Program pelayanan Adminstrasi Perkantoran	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bagian Umum
		2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
		3. Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
		Kantor	
		4. Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	
		5. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	
		6. Penyediaan Alat Tulis Kantor	
		7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
		8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
		9. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
		10. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
		11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
		12. Penyediaan Makanan dan Minuman	
		13. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah	
		14. Penyediaan Jasa Pegawai Honor	
		15. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi	
		16. Penyusunan Perencanaan Capaian Kinerja dan Keuangan	
		17. Penyediaan Jasa Administrasi Umum	
		18. Layanan Pengadaan Kabupaten Langkat	
	16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1. Pembangunan Gedung Kantor	
		2. Pengadaan Mobil Jabatan	
		3. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	
		4. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	
		5. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	
		6. Pengadaan Meubeuler	
		7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Jabatan	
		8. Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumas Dinas	
		9. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	
		10. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	
		11. Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	
		12. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	
		13. Pemeliharaan Rutin/Berkala Meubeuler	
		14. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman	
		15. Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Tempat Peribadatan	
	17. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	
		2. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan	
		3. Pengadaan Pakaian KORPRI	
		4. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	
	18. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media	1. Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Bagian Humas
	19. Program mengintegrasikan Penanganan Pengaduan Masyarakat	1. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat	
		2. Pembentukan Unit Khusus Penanganan Pengaduan Masyarakat Miskin	
	20. Program Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Seni Budaya	1. Pelaksanaan MTQ Tingkat Kabupaten Langkat	Bagian Kesos
		2. Pelaksanaan TC dan Pengiriman Peserta MTQ ke Tingkat Provinsi Sumatera Utara	
		3. Pemberangkatan dan Penjemputan Jemaah Haji	
		4. Manasi Haji Gabungan	
		5. Pelaksanaan Nasyid Tingkat Kabupaten Langkat	
		6. Pelaksanaan TC dan Pengiriman Seleksi Nasyid Tingkat Provinsi Sumatera Utara	
		7. Safari Ramadhan	
		8. Halal Bi Halal Pemkab. Dan Masyarakat	
		9. Peringatan HUL Tuan Guru Babussalam Langkat	
	21. Program	1. Kegiatan/Peringatan Hari Besar Nasional	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	Peringatan/Perayaan Hari Besar Nasional Keagamaan dan Momen Khusus Tertentu	2. Kegiatan/Peringatan Hari Besar Keagamaan	
		3. Kegiatan/Peringatan Hari Khusus Tertentu	
	22. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan 2. Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran	Bagian Penram
	23. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	1. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan	Sekwan
		2. Kegiatan Reses	
		3. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	
		4. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Daerah	
		5. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	
		6. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Luar Daerah	
	24. Program Pengembangan Data/Informasi	1. Penyusunan Data Base Pendidikan Kabupaten Langkat	Bappeda
		2. Penyusunan Data Base Kesehatan Kabupaten Langkat	
		3. Sistem Informasi Pembangunan Daerah	
		4. Pengembangan Sistem Langkat Satu Data	
		5. Pengelolaan dan Pengembangan Smart City	
		6. Pembuatan Peta Digital Lahan Persawahan di Kabupaten Langkat	
		7. Pemetaan Wilayah Rawan Pangan dan Rawan Gizi di Kabupaten Langkat	
	25. program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyusunan Rancangan RPJMD	
		2. Penyelenggaraan Musrenbang RPJMD	
		3. Penyusunan Rancangan RKPD	
		4. Penyelenggaraan Musrenbang RKPD	
		5. Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	
		6. Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LKPJ)	
		7. Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	
		8. Koordinasi Pelaksanaan E-Planning	
		9. Koordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan (LKPJ AMJ)	
		10. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD	
		11. Koordinasi Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus	
		12. Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Langkat	
		13. Pemetaan Potensi dan Kebutuhan infrastruktur Kawasan Pariwisata di Kabupaten Langkat	
		14. Pelaksanaan Bimtek Penyusunan RENSTRA Perangkat Daerah Se-Kabupaten Langkat	
		15. Penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024	
		16. Penyelenggaraan Musrenbang dan Konsultasi Publik Perubahan RPJMD Kabupaten Langkat 2019-2024	
	26. program Perencanaan Pembangunan Ekonomi	1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Ekonomi	
		2. Pembuatan Buku Selayang Pandang Kabupaten Langkat	
		3. Operasional Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Langkat	
		4. Koordinasi Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR)	
		5. Koordinasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDG'S)	
		6. Penyusunan Standar Satuan Harga	
		7. Penyusunan Indikator Makro Ekonomi	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
	27. program Perencanaan Sosial dan Budaya	8. Pembuatan Aplikasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	
		1. Koordinasi Perencanaan Pembangunan Bidang Sosial dan Budaya	
		2. Koordinasi Program Peningkatan Kualitas Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)	
		3. Koordinasi Program Keluarga Harapan (PKH)	
		4. Koordinasi Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi (RAD PG) Kabupaten Langkat	
		5. Koordinasi Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Kabupaten Langkat	
		6. Survey Kajian Kelayakan Rencana Pembangunan Rumah Sakit Umum Stabat	
	28. program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	1. Pemetaan Potensi dan Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Daerah Aliran Sungai di Kabupaten Langkat	
		2. Koordinasi Perencanaan Bidang Fisik	
		3. Koordinasi Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (AMPL)	
	29. program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak	1. Koordinasi Penguatan Kelembagaan Pengarustamaan Gender dan Anak	
		2. Pelatihan Perencanaan Penganggaran Responsive Gender (PPRG)	
		3. Koordinasi Gugus Tugas Kabupaten Layak Anak Kabupaten Langkat	
	30. program Penelitian dan Pengembangan	1. Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan di Kabupaten Langkat	
		2. Kajian Potensi Sumber Daya Ikan Tangkap di kabupaten Langkat	
		3. Kajian Pengembangan Kawasan Industri di Kecamatan Pangkalan Susu-Kabupaten Langkat	
		4. Pemanfaatan Pusat Jejaring Inovasi Daerah (PUJA INDAH)	
		5. Kajian, Penelitian dan Pengembangan	
		6. Sistem Inovasi Daerah (SIDA)	
	31. program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	BPKAD
		2. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	
		3. Verifikasi RKA/DPA-SKPD dan Perubahan RKA/DPA-SKPD	
	32. program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	1. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD	
		2. Penyusunan Perancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran APBD	
		3. Penyusuna Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	
		4. Penyusunan Rancangan Peratuhan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD	
		5. Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
		6. Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	
		7. Penyusunan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah	
		8. Peningkatan Manajemen Asset/Barang Daerah	
		9. Revaluasi/Appraisal Asset/Barang Daerah	
		10. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
		11. Penyelesaian Kerugian Daerah	
		12. Rekonsiliasi Kas Daerah	
		13. Penyusunan Laporan Data Gaji	
		14. Verifikasi Administrasi Pejabat Pelaksana Anggaran SKPD	
	33. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengwlolaan Keuangan Daerah	1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah	Dispenda
		2. Rapat Evaluasi dan Koordinasi Penerimaan Daerah	



PRIORITAS KABUPATEN	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	OPD PENANGGUNG JAWAB
		3. Penagihan Pajak Daerah yang Tertunggak dan Pajak Berjalan Kecamatan	
		4. Mengerjakan Ketetapan Pajak/Retribusi Daerah	
		5. Penyampaian SPPT PBB Pedesaan dan Perkotaan serta Penjabaran Target setiap Kecamatan, Kelurahan/Desa	
		6. Pemberian Penghargaan/Hadiah bagi yang Berprestasi Merealisisi Pendapatan Daerah	
		7. Monitoring, Evaluasi serta Pengawasan dalam Pemungutan Pajak/Retribusi Daerah	
		8. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	
		9. Verifikasi Piutang Pajak Daerah	
	34. Program Peningkatan Pengelolaan dan pengembangan PBB-P2 dan BPHTB	1. Cetak Massal SPPT, STTS, dan DHKP PBB-P2	
		2. Pemeliharaan Basis Data PBB-P2 Pola SISMIOP	
		3. Pekan Panutan Pembayaran PBB-P2	
		4. Verifikasi, Pendataan dan Pemutakhiran Data OP dan WP PBB-P2	
		5. Pemetaan Desa/Kelurahan Pola SISMIOP	
	35. Program Peningkatan sarana dan Prasarana	1. Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan	Kecamatan
	36. Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan dan Organisasi Desa	1. Monitoring dan Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD)	
	37. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan	1. Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	
		2. Pengadaan/Pembangunan/ Pengembangan Sarana dan Prasarana Transportasi	
		3. Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Prasarana Kesehatan	
		4. Pengadaan/Pembangunan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	
		5. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman	
		6. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi	
		7. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kesehatan	
		8. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Kebudayaan	
	38. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat	
		2. Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan	
		3. Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro Kecil, dab Menengah	
		4. Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan	
		5. Pengelolaan Kegiatan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	
		6. Penguatan Kesiapsiagaan Masyarakat dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya	
	39. Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan	

Perumusan Prioritas Pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2021 telah melalui telaahan dan penyesuaian dengan prioritas yang terdapat di RPJMD Kabupaten Langkat.



**Tabel 4-8**  
**Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2021 terhadap RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024**

NO	RPJMD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 - 2024		RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021	
	PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS RKPD
1	2	3	4	5
1	<b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendukung Prioritas Pengembangan Pariwisata</b>	1. Program Pencapaian Usaha Kecil Menengah yang Konduksif 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3. Proram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KUKM 6. Program Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi 7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 8. Program Penyimpanan Potensi Sumberdaya , Sarana, dan Prasarana Daerah 9. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dan Pengendalian 10. Program Peningkatan Pengembangan pengelolaan Pelayanan Publik 11. Program Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan 12. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perkantoran dan peningakatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 13. Program Peningakatan ketahanan Pangan 14. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaliasi Kinerja 15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 16. Program Peningakatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 17. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 18. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 19. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan 20. Program Pecegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 21. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 22. Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan 23. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 24. Program Pengembangan Agribisnis Pertanian/Perkebunan 25. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 26. Progrman Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional	<b>Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendukung Prioritas Pengembangan Pariwisata</b>	1. Program Pencapaian Usaha Kecil Menengah yang Konduksif 2. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 3. Proram Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 4. Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 5. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia KUKM 6. Program Peningkatan promosi dan Kerjasama Investasi 7. Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 8. Program Penyimpanan Potensi Sumberdaya , Sarana, dan Prasarana Daerah 9. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan dan Pengendalian 10. Program Peningkatan Pengembangan pengelolaan Pelayanan Publik 11. Program Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan 12. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perkantoran dan peningakatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) 13. Program Peningakatan ketahanan Pangan 14. Program Perencanaan Pengendalian dan Evaliasi Kinerja 15. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 16. Program Peningakatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan 17. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 18. Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 19. Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan lapangan 20. Program Pecegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak 21. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 22. Program Peningkatan Pemasaran Hasil produksi Peternakan 23. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan 24. Program Pengembangan Agribisnis Pertanian/Perkebunan 25. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan 26. Progrman Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional



NO	RPJMD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 - 2024		RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021	
	PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS RKPD
1	2	3	4	5
		27. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 28. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 29. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 30. Pengawasan Perdagangan dan Tata Tertib Niaga 31. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 32. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 33. Program Penataan struktur Industri 34. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 35. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 36. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 37. Program Pemberdayaan masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 38. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat 39. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 40. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 41. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 42. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 43. Program Perencanaan dan Pengembangan 44. Program Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 45. Program Pengembangan Nilai Budaya 46. Program Pengelolaan kekayaan Budaya 47. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 48. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 49. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 50. Program Pengembangan Kementrian Priwisata 51. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 52. Program Peningkatan Kesempatan kerja 53. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 54. Program Pengembangan Data Informasi 55. Program Percepatan Pembangunan sanitasi Pemukiman (PPSP) 56. Program Kegaitan Sosial, keagamaan dan seni Budaya		27. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 28. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri 29. Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan 30. Pengawasan Perdagangan dan Tata Tertib Niaga 31. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah 32. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri 33. Program Penataan struktur Industri 34. Program Pengembangan Sentra-Sentra Industri Potensial 35. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan 36. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir 37. Program Pemberdayaan masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan 38. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat 39. Program Pengembangan Budidaya Perikanan 40. Program Pengembangan Perikanan Tangkap 41. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan 42. Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan 43. Program Perencanaan dan Pengembangan 44. Program Penyediaan/Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat di Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 45. Program Pengembangan Nilai Budaya 46. Program Pengelolaan kekayaan Budaya 47. Program Pengelolaan Keragaman Budaya 48. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata 49. Program Pengembangan Destinasi Pariwisata 50. Program Pengembangan Kementrian Priwisata 51. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 52. Program Peningkatan Kesempatan kerja 53. Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 54. Program Pengembangan Data Informasi 55. Program Percepatan Pembangunan sanitasi Pemukiman (PPSP) 56. Program Kegaitan Sosial, keagamaan dan seni Budaya





NO	RPJMD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 - 2024		RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021	
	PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS RKPD
1	2	3	4	5
		57. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media		57. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
		58. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi		58. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
		59. Program Peningkatan kesejahteraan Petani		59. Program Peningkatan kesejahteraan Petani
		60. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan		60. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
2	Peningkatan pelayanan Kebutuhan Dasar dan pengentasan Permasalahan Sosial	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini	Peningkatan pelayanan Kebutuhan Dasar dan pengentasan Permasalahan Sosial	1. Program Pendidikan Anak Usia Dini
		2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun		2. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
		3. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan		3. Program Peningkatan Mutu Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
		4. Program Kemampuan Siswa		4. Program Kemampuan Siswa
		5. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan		5. Program Perbaikan Sistem Administrasi Kearsipan
		6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah		6. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
		7. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan		7. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
		8. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi		8. Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi
		9. Program Pengembangan Baca dan Pembinaan Perpustakaan		9. Program Pengembangan Baca dan Pembinaan Perpustakaan
		10. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda		10. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
		11. Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan		11. Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan
		12. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda		12. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan kecakapan Hidup Pemuda
		13. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga		13. Program Pembinaan dan Pemasarakatan Olah Raga
		14. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga		14. Program peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga
		15. Program Obatdan perbekalan Kesehatan		15. Program Obatdan perbekalan Kesehatan
		16. Program Uapaya kesehatan Masyarakat		16. Program Uapaya kesehatan Masyarakat
		17. Program Pengawasan Obat dan Makanan		17. Program Pengawasan Obat dan Makanan
		18. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia		18. Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
		19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat		19. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
		20. Program perbaikan Gizi Masyarakat		20. Program perbaikan Gizi Masyarakat
		21. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular		21. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
		22. Program Standarisasi Pelayanan kesehatan		22. Program Standarisasi Pelayanan kesehatan
		23. Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin		23. Program pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin
		24. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana puskesmas-Puskesmas pembantu dan Jaringannya		24. Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana puskesmas-Puskesmas pembantu dan Jaringannya
		25. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan		25. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan kesehatan
		26. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia		26. Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia



NO	RPJMD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 - 2024		RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021	
	PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS RKPD
1	2	3	4	5
		27. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak		27. Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
		28. Program Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan		28. Program Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
		29. Program Pencegahan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan Jiwa		29. Program Pencegahan pengendalian Penyakit Tidak Menular dan kesehatan Jiwa
		30. Program peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)		30. Program peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (pekat)
		31. Program Keserasian kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan		31. Program Keserasian kebijakan peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
		32. Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan Anak		32. Program Penguatan Kelembagaan pengarusutamaan gender dan Anak
		33. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan		33. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
		34. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender Dalam Pembangunan		34. Program Peningkatan Peran serta dan Kesetaraan gender Dalam Pembangunan
		35. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan kualitas keluarga		35. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan kualitas keluarga
		36. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak		36. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak
		37. Program Peningkatan Sistem data Gender dan Anak		37. Program Peningkatan Sistem data Gender dan Anak
		38. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perlindungan khusus Anak		38. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perlindungan khusus Anak
		39. Program Peningkatan Peanggungan Narkoba, PMS Terasuk HIV/AIDS		39. Program Peningkatan Peanggungan Narkoba, PMS Terasuk HIV/AIDS
		40. Program keluarga Berencana		40. Program keluarga Berencana
		41. Program Kesehatan Reproduksi Remaja		41. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
		42. Program pelayanan Kontrasepsi		42. Program pelayanan Kontrasepsi
		43. Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri		43. Program pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
		44. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang Anak		44. Program Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh kembang Anak
		45. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga		45. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
		46. Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU		46. Program Pengembangan Model Operasional BKBPosyandu-PADU
		47. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana		47. Program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		48. Program Upaya Pelayanan Kesehatan		48. Program Upaya Pelayanan Kesehatan
		49. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan		49. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
		50. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		50. Program Pengadaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata
		51. Program Pemeliharaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata		51. Program Pemeliharaan, Peningkatan sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata



NO	RPJMD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 - 2024		RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021	
	PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS RKPD
1	2	3	4	5
		52. Program Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit		52. Program Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit
		53. Program Penataan Administrasi Kependudukan		53. Program Penataan Administrasi Kependudukan
		54. Program pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya		54. Program pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
		55. Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial		55. Program Pelayanan dan Rehabilitasi kesejahteraan Sosial
		56. Program Pembinaan Anak Terlantar		56. Program Pembinaan Anak Terlantar
		57. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma		57. Program Pembinaan Para Penyandang Disabilitas dan Trauma
		58. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo		58. Program Pembinaan Panti Asuhan/Panti Jompo
		59. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)		59. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial (Eks Narapidana, PSK, Narkoba dan Penyakit Sosial Lainnya)
		60. Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial		60. Program Pemberdayaan kelembagaan Kesejahteraan Sosial
		61. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan		61. Program peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
		62. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan		62. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
		63. Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa		63. Program Peningkatan Masyarakat Dalam Membangun Desa
		64. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa		64. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa
		65. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan		65. Program Peningkatan Peran Perempuan Di Perdesaan
		66. Program Kerjasama Pembangunan Antar Desa		66. Program Kerjasama Pembangunan Antar Desa
		67. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa		67. Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
		68. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi		68. Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi
3	Peningkatan Infarstruktur Dengan Lingkungan Berkelanjutan	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Peningkatan Infarstruktur Dengan Lingkungan Berkelanjutan	1. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
		2. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong		2. Program Pembangunan Turap/Talud/Bronjong
		3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan		3. Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
		4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan		4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
		5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Perngairan Lainnya		5. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan Perngairan Lainnya
		6. Program Pengembangan,Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya		6. Program Pengembangan,Pengelolaan, dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
		7. Program Pengendalian Banjir		7. Program Pengendalian Banjir
		8. Program Perencanaan Tata Ruang		8. Program Perencanaan Tata Ruang
		9. Program Pengadaan, Penataan dan Perawatan Lampu Jalan		9. Program Pengadaan, Penataan dan Perawatan Lampu Jalan
		10. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman-Taman Kota		10. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman-Taman Kota
		11. Program Pengembangan Perumahan		11. Program Pengembangan Perumahan
		12. Program Lingkungan Sehat Perumahan		12. Program Lingkungan Sehat Perumahan



NO	RPJMD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 - 2024		RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021	
	PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS RKPD
1	2	3	4	5
		13. Program Pembangunan Jalan Lingkungan		13. Program Pembangunan Jalan Lingkungan
		14. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong		14. Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong
		15. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ		15. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
		16. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan		16. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
		17. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan		17. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
		18. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas		18. Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
		19. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor		19. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
		20. Program Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas		20. Program Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
		21. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan		21. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
		22. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup		22. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
		23. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam		23. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
		24. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup		24. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
		25. Program Pengendalian Polusi		25. Program Pengendalian Polusi
		26. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan		26. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-Kawasan Konservasi Laut dan Hutan
		27. Program Penetapan dan Pemanfaatan PPLH		27. Program Penetapan dan Pemanfaatan PPLH
		28. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan		28. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan
		29. Program Pencegahan Dinida Penanggulangan Korban Bencana Alam		29. Program Pencegahan Dinida Penanggulangan Korban Bencana Alam
		30. Program rehabilitasi dan Rekrontuksi Pasca Bencana		30. Program rehabilitasi dan Rekrontuksi Pasca Bencana
		31. Program Penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana		31. Program Penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana
		32. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana		32. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
		33. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa		33. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa
		34. Program fasilitas peningkatan SDM Didang Komunikasi dan Informasi		34. Program fasilitas peningkatan SDM Didang Komunikasi dan Informasi
		35. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media		35. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
		36. Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik		36. Program Pengelolaan Informasi dan komunikasi Publik
4	Peningkatan kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban Lingkungan dan Pelestarian Budaya	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Peningkatan kerukunan, Ketentraman, dan Ketertiban Lingkungan dan Pelestarian Budaya	1. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan
		2. Program pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal		2. Program pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
		3. Program Pegembangan Wawasan kebangsaan		3. Program Pegembangan Wawasan kebangsaan
		4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan		4. Program Pemberdayaan Masyarakat Untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan



NO	RPJMD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 - 2024		RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021	
	PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS RKPD
1	2	3	4	5
		5. Program Peningkatan Pemberdayaan Penyakit Masyarakat		5. Program Peningkatan Pemberdayaan Penyakit Masyarakat
		6. Program Pendidikan Politik Masyarakat		6. Program Pendidikan Politik Masyarakat
		7. Rogram Pemeliharaan Kantribmasdan Pencegahan Tindak Kriminal		7. Rogram Pemeliharaan Kantribmasdan Pencegahan Tindak Kriminal
		8. Program peningkatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran		8. Program peningkatan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
		9. Program pengembangan Nilai Budaya		9. Program pengembangan Nilai Budaya
		10. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya		10. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
		11. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya		11. Program Pengelolaan Kekayaan Budaya
5	Peningkatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakkan Hukum	1. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Peningkatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakkan Hukum	1. Program peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
		2. Program Pendidikan Kedinasan		2. Program Pendidikan Kedinasan
		3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		3. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur		4. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
		5. Program Peningkatan SistemPengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH		5. Program Peningkatan SistemPengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
		6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan		6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan
		7. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Sistem Prosedur Pengawaasan		7. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan Sistem Prosedur Pengawaasan
		8. Program Peningkatan Kesadaran hokum dan HAM		8. Program Peningkatan Kesadaran hokum dan HAM
		9. Program Peningkatan kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Derah		9. Program Peningkatan kedinasan Kepala daerah/Wakil Kepala Derah
		10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat		10. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat
		11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah		11. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintahan Daerah
		12. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan		12. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan
		13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana		13. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
		14. Program Peningkatan dan Pendalaman Tugas-tugas Aparatur Peerintahan		14. Program Peningkatan dan Pendalaman Tugas-tugas Aparatur Peerintahan
		15. Program pelayanan Adminstrasi Perkantoran		15. Program pelayanan Adminstrasi Perkantoran
		16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		16. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
		17. Program Peningkatan Disiplin Aparatur		17. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
		18. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media		18. Program Kerjasama Informasi Dengan Mass Media
		19. Program mengintesifkan Penanganan Penagduan Masyarakat		19. Program mengintesifkan Penanganan Penagduan Masyarakat
		20. Program Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Seni Budaya		20. Program Kegiatan Sosial, Keagamaan dan Seni Budaya
		21. Program Peringatan/Perayaan Hari Besar Nasional Keagamaan dan Momen Khusus Tertentu		21. Program Peringatan/Perayaan Hari Besar Nasional Keagamaan dan Momen Khusus Tertentu
		22. Program Perencanaan Pembangunan Daerah		22. Program Perencanaan Pembangunan Daerah



NO	RPJMD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2019 - 2024		RKPD KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2021	
	PRIORITAS RPJMD	PROGRAM PRIORITAS RPJMD	PRIORITAS RKPD	PROGRAM PRIORITAS RKPD
1	2	3	4	5
		23. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah		23. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah
		24. Program Pengembangan Data/Informasi		24. Program Pengembangan Data/Informasi
		25. program Perencanaan Pembangunan Daerah		25. program Perencanaan Pembangunan Daerah
		26. progra Perencanaan Pembangunan Ekonomi		26. progra Perencanaan Pembangunan Ekonomi
		27. program Perencanaan Sosial dan Budaya		27. program Perencanaan Sosial dan Budaya
		28. program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam		28. program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
		29. program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak		29. program Penguatan Kelembagaan Pengurustamaan Gender dan Anak
		30. program Penelitian dan Pengembangan		30. program Penelitian dan Pengembangan
		31. program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		31. program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
		32. program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		32. program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
		33. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengwlolaan Keuangan Daerah		33. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengwlolaan Keuangan Daerah
		34. Program Peningkatan Pengelolaan dan pengembangan PBB-P2 dan BPHTB		34. Program Peningkatan Pengelolaan dan pengembangan PBB-P2 dan BPHTB
		35. Program Peningkatan sarana dan Prasarana		35. Program Peningkatan sarana dan Prasarana
		36. Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan dan Organisasi Desa		36. Program Pemberdayaan Lembaga Pemerintahan dan Organisasi Desa
		37. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan		37. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kelurahan
		38. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		38. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
		39. Program Perencanaan Pembangunan Daerah		39. Program Perencanaan Pembangunan Daerah



Pemerintah Kabupaten Langkat selain berkomitmen dalam memenuhi target pencapaian kinerja pemerintahan daerah, juga turut berupaya dalam mendukung program Prioritas Nasional dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara guna mewujudkan perencanaan pembangunan yang selaras dan konsisten antara kebijakan pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi sehingga dapat dicapai penyelesaian target-target pembangunan nasional, provinsi dan kabupaten.

Penjabaran kegiatan prioritas disusun dengan harapan dapat menunjukkan kesungguhan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam mendukung prioritas dan sasaran Pembangunan Nasional dan Provinsi Sumatera Utara sebagaimana disajikan pada Tabel berikut.

**Tabel 4-9**  
**Sandingan Rancangan Prioritas Nasional Tahun 2021**  
**Dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2021**

Prioritas Nasional 2021		Prioritas Kabupaten 2021	
PN1	Ketahanan Ekonoomi untuk Pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan	PK1	Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendukung Prioritas Pengembangan Pariwisata
PN2	Pengembangan Wilayah untuk mengurangi kesenjangan	PK2	Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Pengentasan Permasalahan
PN3	SDM berkualitas dan berdaya saing	PK2	Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Pengentasan Permasalahan
PN4	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	PK3	Peningkatan Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dan Pelestarian Budaya
PN5	Infrastruktur untuk ekonomi dan pelayanan dasar	PK4	Peningkatan Infrastruktur Dengan Lingkungan Berkelanjutan
PN6	Lingkungan hidup, ketahanan bencana dan perubahan iklim	PK4	Peningkatan Infrastruktur Dengan Lingkungan Berkelanjutan
PN7	Stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	PK2	Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Pengentasan Permasalahan
		PK5	Peningkatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakkan Hukum



**Tabel 4-10**  
**Sandingan Rancangan Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021**  
**Dengan Prioritas Pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2021**

Prioritas Provinsi Sumatera Utara 2021		Prioritas Kabupaten 2021	
PP1	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja;	PK1	Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendukung Prioritas Pengembangan Pariwisata
PP2	Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan;	PK2	Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Pengentasan Permasalahan
PP3	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan;	PK4	Peningkatan Infrastruktur Dengan Lingkungan Berkelanjutan
		PK5	Peningkatan Infrastruktur Dengan Lingkungan Berkelanjutan
PP4	Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas;	PK2	Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Pengentasan Permasalahan
		PK3	Peningkatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakkan Hukum
PP5	Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata	PK1	Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendukung Prioritas Pengembangan Pariwisata

#### 4.3 Inovasi

Keberhasilan pembangunan Kabupaten Langkat perlu dilaksanakan berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Langkat, baik sifatnya jangka menengah sebagaimana tercantum dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJMD), maupun yang sifatnya tahunan seperti yang tercantum dalam dokumen perencanaan tahunan (RKPD). Guna meningkatkan kualitas hasil pembangunan, perlu didukung pula oleh inovasi pada perencanaan pembangunan, baik inovasi dalam tataran proses perencanaan, maupun dalam program Pembangunan Daerah. Bappeda Kabupaten Langkat dalam hal ini, sesuai dengan tugas dan fungsinya berperan menjadi koordinasi perencanaan pembangunan di daerah.

Berbagai inovasi telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dalam kurun waktu tahun 2017 – 2019, diantaranya yaitu :

- A. Inovasi aplikasi E-Perencanaan ([www.perencanaan.langkatkab.go.id](http://www.perencanaan.langkatkab.go.id)) dalam proses perencanaan.



Aplikasi E-Perencanaan merupakan sistem informasi perencanaan program OPD e Kabupaten Langkat yang dituangkan dari Musrenbang Desa / Kelurahan, Musrenbang kecamatan dan Pokir Anggota DPRD, E-RKPD, E-Renstra dan E-RPJMD.

Aplikasi E-Perencanaan terdiri dari :

1. E-RKPD

E-RKPD merupakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berbasis aplikasi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Elektronik. Penyusunan e-RKPD adalah rangkaian dari penyusunan Renja PD, Renstra PD, RKPD sampai dengan KUA-PPAS agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.

2. E-Musrenbang

E-Musrenbang merupakan Aplikasi pendukung kegiatan Musrenbang Desa /Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten dan Penyusunan RKPD Kabupaten Langkat serta penyelarasan program & kegiatan prioritas pembangunan daerah Desa /Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten.

3. E-Pokir DPRD

E.Pokir DPRD merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang memuat pandangan dan pertimbangan serta rumusan usulan kebutuhan .

4. E-SSH

E-SSH merupakan aplikasi pendukung untuk percepatan penyusunan dan kelengkapan database standarisasi harga yang meliputi Standar Satuan Harga (SSH), Analisa Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). Data yang sudah dientry di aplikasi e-SSH akan langsung terintegrasi dengan aplikasi dengan aplikasi E-Perencanaan Bappeda Kabupaten Langkat, yang akan digunakan dalam penyusunan Renja, Renstra, RKPD, dan KUA-PPAS.

B. Inovasi Program Pembangunan Daerah antara lain :

1. [www.perizinan.langkatkab.go.id](http://www.perizinan.langkatkab.go.id)

Aplikasi pelayanan perizinan online yang disebut E-Perizinan yaitu Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Efektif dan Efisien yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Langkat sebagai solusi atas kendala pertukaran informasi perizinan secara online .



Masyarakat dapat mengurus izin yang dibutuhkan melalui online system dan memantau proses perizinannya melalui online sistem.

2. E-Laga (Langkat Siaga)

Aplikasi ini penghubung warga Langkat dengan Pemerintah Kabupaten Langkat sehingga memudahkan masyarakat agar dapat berperan aktif mengawal jalannya roda pemerintahan, dan melaporkan situasi atau kinerja ASN secara realtime.

3. E-Bersih

Aplikasi ini merupakan data pengaduan masyarakat tentang limbah (sampah). Aplikasi ini bias didownload melalui playstore berbasis android sehingga masyarakat Langkat mudah mengaksesnya.

4. Sibaso (<http://sibaso.langkatkab.go.id>)

Aplikasi ini memberikan informasi langsung kepada masyarakat tentang data – data bantuan sosial yang diterima. Aplikasi online ini dikelola oleh Dinas Sosial

5. E-Antik (<http://antik.langkatkab.go.id/login>)

Aplikasi ini berisi tentang kumpulan berita Kabupaten Langkat yang berasal dari portal online maupun sosial media. Data dari berbagai blog, website, sosial media, kemudian di analisa untuk menghasilkan keputusan bisnis.

6. E-Surat ([www.surat.langkatkab.go.id](http://www.surat.langkatkab.go.id))

Aplikasi ini tentang system informasi manajemen administrasi surat pengelolaan arsip surat masuk / surat keluar disposisi surat diorganisasi.

7. E-pasar ([www.pasar.langkatkab.go.id](http://www.pasar.langkatkab.go.id))

Aplikasi ini merupakan informasi usaha dan perdagangan di Kabupaten Langkat, membantu masyarakat memperluas promosi usaha yang mereka miliki.



## BAB V

### RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Berdasarkan Permasalahan, isu strategis, sasaran dan prioritas pembangunan provinsi yang telah disampaikan pada bab – bab terdahulu, maka telah ditetapkan rencana program dan kegiatan prioritas berdasarkan 5 (lima) prioritas Kabupaten Langkat Tahun 2021.

Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Tahun 2021 merupakan formulasi dari hasil rangkaian pembahasan substansi Program dan Kegiatan yang telah dilakukan melalui proses Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah (Musrenbang) dalam membahas rencana program dan kegiatan prioritas dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Langkat.

#### 5.1 Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari Dana APBN/APBD Provsu/KPBU/CSR

Untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan di Kabupaten Langkat perlu dukungan pendanaan dari berbagai pihak baik swasta, provinsi maupun nasional, mengingat terbatasnya kemampuan keuangan daerah, pengalokasian anggaran Kabupaten dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat tahun 2021. Adapun kegiatan yang mendukung prioritas pembangunan yang direncanakan pembiayaannya bersumber dari dana APBN/APBD Provsu/KPBU/CSR adalah disajikan pada tabel berikut.

**Tabel 5-1**  
**Rencana Dukungan Pendanaan Pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2021**

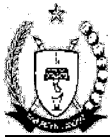
No	Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Lokasi	Skema pendanaan
1	2	3	4	5
1	Pertumbuhan Ekonomi Untuk Mendukung Prioritas Pengembangan Pariwisata	fasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dalam hal pemanfaatan tanah HGU PTPN II yang berada di lokasi objek destinasi wisata nasional Tangkahan dan Bukit Lawang, guna melengkapi prasarana/sarana sosial/umum di kedua tujuan wisata tersebut	Tangkahan, Kec. Batang Serangan dan Bukit Lawang (Kec. Bahorok)	APBD Provsu
		Peningkatan sarana dan prasarana pada destinasi wisata mangrove yang berada di kawasan hutan produksi yang	Kec. Brandan Barat (Desa Lubuk Kertang)	APBD Provsu



No	Mendukung Prioritas Pembangunan	Proyek/Kegiatan	Lokasi	Skema pendanaan
1	2	3	4	5
		menjadi kewenangan Provinsi Sumatera Utara		
2	Peningkatan Pelayanan Kebutuhan Dasar dan Pengentasan Permasalahan Sosial	Pembangunan sekolah baru (SMA/SMK) Negeri di 3 (tiga) Sekolah	Kec. Kutambaru, Kec. Batang Serangan dan Kec. Pematang Jaya	APBD Provsu
3	Peningkatan Kerukunan, Ketentraman dan Ketertiban Lingkungan dan Pelestarian Budaya	Pemeliharaan situs sejarah/budaya yang berada di Pesantren Tuan Guru Babussalam dan Masjid Azizi Tanjung Pura, dan Taman Makam Pahlawan T. Amir Hamzah serta situs sejarah lainnya.	Kec. Tanjung Pura, Kec. Padang Tualang, Kec. Stabat	APBD Provsu
4	Peningkatan Infrastruktur Dengan Lingkungan Berkelanjutan	Perbaikan Ruas Jalan Pangkalan Berandan-Batas Aceh	Kec. Brandan Barat, Kec. Besitang	APBN
		Peningkatan Jalan Ruas Jalan Tanjung Pura – Tanjung Selamat– Simpang 3 Namu Unggas – Tangkahan	Kecamatan Tg. Pura, Kec. Padang Tualang dan Kec. Batang Serangan	APBD Provsu
		3. Ruas Jalan Kuala – Simpang Marike – Namu Ukur – Batas Kabupaten Karo	Kec. Kuala, Kec. Sei Bingai	APBD Provsu
		Peningkatan Jalan Bulangta (Bukit Lawang Tangkahan)	Kec. Bahorok – Kec. Batang Serangan	APBD Provsu
		Peningkatan Ruas Jalan Lingkar di Pangkalan Berandan	Kec. Babalan – Kec. Sei Lapan	APBD Provsu
		Pembangunan Jembatan Penghubung Pulau Kampai dengan Desa Serang Jaya Hilir	kecamatan Pematang Jaya	APBD Provsu
		Pembangunan Jembatan penghubung Pulau Jaring Halus sebanyak 2 buah jembatan masing-masing sepanjang 50 meter	Kec. Secanggang	APBD Provsu
5	Peningkatan Reformasi Birokrasi, Tata Kelola Pemerintahan, Penegakkan Hukum	Penyelesaian masalah status tanah Ex HGU PTPN II (1.200 ha) yang berlarut larut dan berpotensi menimbulkan konflik ditengah-tengah masyarakat	Kec. Stabat	APBD Provsu

## 5.2 Rencana Program dan Kegiatan yang bersumber dari APBD Kabupaten Langkat

Rencanan Program dan kegiatan yang tertuang dalam RKPD Tahun 2021 merupakan program dan kegiatan yang bertujuan untuk menjawab berbagai permasalahan yang



dihadapi masyarakat guna mencapai target tujuan dan sasaran yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Langkat pada tahun ke-2. selain itu kegiatan pembangunan disinkronisasikan berdasarkan hasil pembahasan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dari mulai tingkatan terendah yakni Desa, kemudian Kecamatan dan Kabupaten dengan tetap mempedomani dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Propinsi Sumatera Utara dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Program Perangkat daerah tahun 2021 adalah sebagai berikut :

### **5.2.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah**

#### **I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR**

##### **1. Bidang Pendidikan**

- a. Program Pendidikan Anak Usia Dini
- b. Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun
- c. Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan

##### **2. Bidang Kesehatan**

- a. Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
- b. Program perbaikan gizi
- c. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- d. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- e. Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- f. Program Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan
- g. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat
- h. Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- i. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- j. Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan
- k. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin
- l. Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya
- m. Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular
- n. Program peningkatan Pelayanan Lansia
- o. Program Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan jiwa
- p. Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
- q. Program Pengawasan Obat dan Makanan
- r. Program pengembangan obat asli indonesia



- s. Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata
- t. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- u. Program Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit
- v. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata

**3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

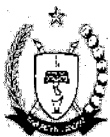
- a. Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
- b. Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
- c. Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan
- d. Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
- e. Program pengendalian banjir
- f. Program Pemanfaatan Ruang
- g. Program Perencanaan Tata Ruang
- h. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
- i. Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya
- j. Program Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah
- k. Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah
- l. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan
- m. Program Pengadaan, Penataan dan Perawatan Lampu Jalan
- n. Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman-taman Kota
- o. Program Pembangunan Turap/Talud dan Bronjong
- p. Program Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Rumah Ibadah

**4. Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman**

- a. Program Pengembangan Perumahan
- b. Program Lingkungan Sehat Perumahan
- c. Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
- d. Program pembangunan Jalan Lingkungan

**5. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**

- a. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan



- b. Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
- c. Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- d. Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
- e. Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana
- f. Program Penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana
- g. Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal
- h. Program Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)
- i. Program Pendidikan Politik Masyarakat
- j. Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam
- k. Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana

#### **6. Bidang Sosial**

- a. Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- b. Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial
- c. Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial
- d. Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
- e. Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo
- f. Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
- g. Program Pembinaan Anak Terlantar

### **II. URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR**

#### **1. Bidang Tenaga Kerja**

- a. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
- b. Program Peningkatan Kesempatan Kerja
- c. Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan
- d. Program Pengembangan Data Informasi Ketenagakerjaan

#### **2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

- a. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
- b. Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
- c. Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga
- d. Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
- e. Program Peningkatan Peran Serta dan Kestaraan Gender Dalam Pembangunan



- f. Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak
- g. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga
- h. Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak
- i. Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak

**3. Bidang Pangan**

- a. Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan

**4. Bidang Pertanahan**

- a. Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah

**5. Bidang Lingkungan Hidup**

- a. Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan- kawasan Konservasi Laut dan Hutan
- b. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
- c. Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup
- d. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
- e. Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
- f. Program Peningkatan Pengendalian Polusi
- g. Program Penataan dan Pemanfaatan PPLH
- h. Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan

**6. Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil**

- a. Program Penataan Administrasi Kependudukan

**7. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa**

- a. Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
- b. Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa
- c. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan
- d. Program Kerjasama Pembangunan Antar Desa
- e. Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan
- f. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- g. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi





- h. Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan
- i. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

**8. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

- a. Program Pelayanan Kontrasepsi
- b. Program Keluarga Berencana
- c. Program Kesehatan Reproduksi Remaja
- d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri
- e. Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS
- f. Program Pengembangan bahan Informasi tentang Pengasuhan dan Pembinaan tumbuh kembang anak
- g. Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu-Padu
- h. Program Pengendalian Penduduk dan KB

**9. Bidang Perhubungan**

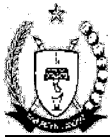
- a. Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas
- b. Program peningkatan pelayanan angkutan
- c. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
- d. Program Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
- e. Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
- f. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
- g. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

**10. Bidang Komunikasi dan Informatika**

- a. Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi
- b. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
- c. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
- d. Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media
- e. Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa

**11. Bidang Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah**

- a. Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah
- b. Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah
- c. Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif



- d. Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi
- e. Program Pengembangan Sumber daya Manusia KUKM

**12. Bidang Penanaman Modal**

- a. Program Peningkatan Iklim Investasi Daerah dan Realisasi Investasi
- b. Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah
- c. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
- d. Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah

**13. Bidang Kepemudaan dan Olahraga**

- a. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- b. Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda
- c. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan olahraga
- d. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
- e. Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba
- f. Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda
- g. Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga

**14. Bidang Statistik**

- a. Program pengembangan data/informasi/statistik daerah

**15. Bidang Persandian**

- a. Program Persandian Daerah

**16. Bidang Kebudayaan**

- a. Program Pengelolaan Keragaman Budaya
- b. Program pengelolaan kekayaan budaya
- c. Program Pengembangan Kerjasama Pengelolaan Kekayaan Budaya
- d. Program Pengembangan Nilai Budaya

**17. Bidang Perpustakaan**

- a. Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan

**18. Bidang Kearsipan**

- a. Program perbaikan sistem administrasi kearsipan



- b. Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah
- c. Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan
- d. Program Pengolahan Hasil Arsip daerah

### **III. URUSAN PILIHAN**

#### **1. Bidang Kelautan dan Perikanan**

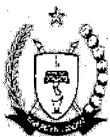
- a. Program pengembangan perikanan tangkap
- b. Program pengembangan budidaya perikanan
- c. Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir
- d. Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan
- e. Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat
- f. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan
- g. Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
- h. Program Perencanaan dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
- i. Program Penyediaan/pengembangan Sarana dan Prasarana Pembedayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil

#### **2. Bidang Pariwisata**

- a. Program Pengembangan Destinasi Wisata
- b. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata
- c. Program Pengembangan Desa Wisata
- d. Program pengembangan Kemitraan Pariwisata

#### **3. Bidang Pertanian**

- a. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan
- b. Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan
- c. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan
- d. Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak
- e. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan
- f. Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan
- g. Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
- h. Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan
- i. Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan
- j. Program Pengembangan Agribisnis Pertanian/ Perkebunan



**4. Bidang Perdagangan**

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
- b. Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
- c. Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan
- d. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- e. Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
- f. Program Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga

**5. Bidang Perindustrian**

- a. Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah
- b. Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial
- c. Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri

**IV PENUNJANG URUSAN**

**1. Bidang Kepegawaian**

- a. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- b. Program Pendidikan Kedinasan

**2. Bidang Pengawasan**

- a. Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan
- b. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH
- c. Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

**3. Bidang Perizinan Terpadu**

- a. Program Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan
- b. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dan Pengendalian
- c. Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perkantoran dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
- d. Program Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan Pelayanan Publik



**4. Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**

- a. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- b. Program perencanaan pembangunan ekonomi
- c. Program perencanaan sosial budaya
- d. Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam
- e. Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak
- f. Program pengembangan data/informasi

**5. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah**

- a. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

**6. Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah**

- a. Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah

**7. Bidang Penelitian dan Pengembangan**

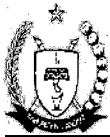
- a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

**8. Bidang Sekretariat Dewan**

- a. Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah
- b. Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi
- c. Program kerjasama informasi dan Mas Media

**9. Bidang Sekretariat Daerah**

- a. Program Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat
- b. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan
- c. Program Peringatan Kesejahteraan Petani
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah
- e. Program Kerjasama informasi dengan Mass Media
- f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
- g. Program Kegiatan Sosial , Keagamaan dan Seni Budaya
- h. Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP)
- i. Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah
- j. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
- k. Program Pembinaan dan Pengawasan BUMD, BUMDes dan Perusahaan Daerah
- l. Program Percepatan Akses Keuangan Daerah



- m. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Inventasi
- n. Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan
- o. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM
- p. Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah

10. Kewilayahan

- a. Program pengelolaan keragaman budaya
- b. Program peningkatan peran serta kepemudaan
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
- d. Program Sarana dan Prasarana Kelurahan
- e. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa
- f. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

5.2.2. Pagu Indikatif Perangkat Daerah

Rencana kerja dan pendanaan daerah yang tertuang dalam Rencana Akhir Rencana Kerja Pemerintahan Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2021 berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 sedangkan program dan kegiatan Prioritas Kabupaten Langkat merupakan hasil dari Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2021. Proyeksi Rencana Belanja Pemerintahan Kabupaten Langkat pada Tahun 2021 yang diusulkan sebesar Rp. 2.104.071.218.079,06. Yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2.099.821.218.079,06 dan Belanja Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp. 4.250.000.000,00. Rincian dari Belanja Daerah untuk Proyeksi Tahun 2021 disajikan pada Tabel 5-2, Tabel 5-3 dan Tabel 5-4.

**Tabel 5-2**  
**Proyeksi Belanja Tidak Langsung Daerah Kabupaten Langkat tahun 2021**

NO	URAIAN	PROYEKSI 2021
1	Belanja Pegawai	1.131.047.303.449,55
2	Belanja Hibah	22.610.322.043,36
3	Belanja Bantuan Sosial	2.219.901.224,28
4	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	939.910.888.141,22
5	Belanja Bagi Hasil kepada Propinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa	3.784.793.458,29
6	Belanja Tidak Terduga	248.009.762,36
Total Belanja Tidak Langsung		2.099.821.218.079,06



Tabel 5-3  
Proyeksi Belanja Pengeluaran Pembiayaan Daerah kabupaten Langkat Tahun 2021

NO	URAIAN	PROYEKSI 2021
1	Pembentukan Dana Cadangan	-
2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.250.000.000
Total Pengeluaran Pembiayaan		4.250.000.000,00

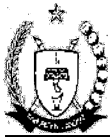
Tabel 5-4  
Proyeksi Belanja Daerah kabupaten Langkat Tahun 2021

NO	URAIAN	PROYEKSI 2021
A	Belanja Tidak Langsung	2.099.821.218.079,06
B	Pengeluaran Pembiayaan	4.250.000.000,00
Total Pengeluaran pembiayaan		2.104.071.218.079,06

Proyeksi Rencana Belanja Pemerintahan Kabupaten Langkat pada Tahun 2021 untuk Belanja langsung sebesar Rp. 1.696.203.647.461,- hal ini dapat dilihat dari Tabel 5-5 berikut :

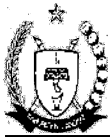
Tabel 5-5  
Rencana Pagu Anggaran Pembangunan Kabupaten Langkat RKPD Tahun 2021  
Belanja Langsung

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PROYEKSI 2021
1	2	3	4	5
I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR				
1	PENDIDIKAN	3	30	176.279.035.538
2	KESEHATAN	21	90	205.523.412.231
3	RUMAH SAKIT UMUM			43.197.704.000
4	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	16	51	600.709.813.618
5	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	4	16	84.773.600.000
6	KESBANGPOL	5	21	6.819.850.000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	3	13	9.349.784.000
8	SOSIAL	7	27	6.624.670.138
9	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	4	23	3.785.829.749
II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR				
1	TENAGAKERJAAN	3	22	4.557.805.359



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PROYEKSI 2021
1	2	3	4	5
2	PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PPA	17	111	13.933.320.000
3	LINGKUNGAN HIDUP	8	37	25.868.690.532
4	KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL	1	6	10.010.255.241
5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN ESA	8	36	11.988.268.985
6	PERHUBUNGAN	7	18	7.336.469.546
7	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	6	35	12.251.563.973
8	KOPERASI	5	34	3.610.575.500
9	PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	7	40	3.561.429.653
10	PEMUDA DAN OLAHRAGA	7	27	5.032.208.548
11	KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	5	28	5.499.054.234
<b>III. URUSAN PILIHAN</b>				
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	10	42	9.908.512.175
2	PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	6	58	23.696.333.731
3	PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	11	84	30.179.142.149
4	PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	9	23	10.225.706.651
<b>IV. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>				
1	SEKRETARIAT DAERAH	18	59	138.100.574.675
2	SEKRETARIAT DPRD	3	10	59.858.816.829
3	INSPEKTORAT DAERAH	3	23	11.204.572.400
4	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	8	38	9.251.784.999
5	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	15	14.331.388.453
6	PENDAPATAN DAERAH	1	15	76.861.533.000
7	KEPEGAWAIAN DAERAH	2	16	4.298.515.930
<b>KECAMATAN</b>				
1	Kecamatan Bahorok	6	9	1.400.604.707
2	Kecamatan Babalan	6	15	6.541.167.029
3	Kecamatan Batang Serangan	6	11	9.915.848.900
4	Kecamatan Berandan Barat	6	22	2.898.420.709
5	Kecamatan Besitang	6	21	4.700.760.979
6	Kecamatan Binjai	5	12	1.588.100.000
7	Kecamatan Gebang	6	13	1.834.505.235
8	Kecamatan Hinai	6	16	1.758.024.960
9	Kecamatan Kuala	6	21	3.299.116.762
10	Kecamatan Kutambaru	4	7	557.360.000
11	Kecamatan Padang Tualang	6	20	1.910.624.387
12	Kecamatan Pangkalan Susu	6	17	3.379.908.063
13	Kecamatan Pematang Jaya	4	6	614.874.932
14	Kecamatan Salapian	3	5	1.642.110.000
15	Kecamatan Sawit Seberang	6	14	1.949.753.633
16	Kecamatan Secanggang	6	21	1.989.033.330
17	Kecamatan Sei Bingai	6	9	1.676.350.000





NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	JUMLAH PROGRAM	JUMLAH KEGIATAN	PROYEKSI 2021
1	2	3	4	5
18	Kecamatan Sei Lapan	6	15	5.017.326.807
19	Kecamatan Selesai	6	16	2.107.183.302
20	Kecamatan Sirapit	4	7	1.016.228.756
21	Kecamatan Stabat	6	21	7.934.284.363
22	Kecamatan Tanjung Pura	6	16	2.197.338.770
23	Kecamatan Wampu	6	22	1.644.500.000
TOTAL BELANJA LANGSUNG		337	1.384	1.696.203.647.461

### 5.3 Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021

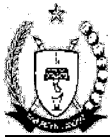
Rencana pembangunan Kabupaten Langkat Tahun 2021 ditujukan untuk mencapai sasaran pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Langkat. Pemerintah Kabupaten Langkat menyusun rencana program dan kegiatan disertai anggaran, yang juga diarahkan untuk menunjang pelaksanaan prioritas nasional Tahun 2021.

Adapun ringkasan dari dukungan program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Langkat terhadap prioritas nasional disajikan pada tabel dibawah :

**Tabel 5-6**  
**Rekapitulasi Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang Mendukung Prioritas Nasional Tahun 2021**

No	Prioritas Nasional	Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021		
		Program	Kegiatan	Anggaran
1	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan	15	54	14.949.740.850
2	Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan menjamin pemerataan	4	11	2.232.765.161
3	Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	17	48	5.868.507.322
4	Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan	11	29	8.979.041.905
5	Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar	17	43	594.980.739.380
6.	Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim	11	61	12.623.933.922
7.	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik	7	18	1.380.329.050

Sumber: Hasil analisis, 2020



5.3.1. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan.

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat kabupaten telah sejalan dengan RPJMD 2019-2024 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya sebagaimana tersaji pada Tabel berikut.

Tabel 5-7  
Rekapitulasi Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang Mendukung Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan

No	Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021		
		Program	Kegiatan	Anggaran
1	Tujuan 1 Tanpa kemiskinan	57	187	670.299.577.939
2	Tujuan 2 Tanpa kelaparan	68	203	135.082.511.620
3	Tujuan 3 Kehidupan sehat dan sejahtera	84	256	359.277.859.833
4	Tujuan 4 Pendidikan berkualitas	5	140	178.783.660.528
5	Tujuan 5 Kesetaraan gender	109	167	455.556.351.782
6.	Tujuan 6 Air bersih dan sanitasi layak	9	17	51.531.199.263
7.	Tujuan 7 Energi bersih dan terjangkau	3	3	563.850.000
8.	Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi	14	36	17.686.379.000
9.	Tujuan 9 Industri, inovasi dan infrastruktur	9	14	431.766.183.630
10.	Tujuan 10 Berkurangnya kesenjangan	22	59	15.813.052.781



No	Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan	Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021		
		Program	Kegiatan	Anggaran
11.	Tujuan 11 Kota dan komunitas berkelanjutan	7	13	10.442.863.161
12.	Tujuan 12 Konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab	4	10	3.768.787.922
13.	Tujuan 13 Penanganan perubahan iklim	3	10	1.982.650.000
14.	Tujuan 14 Ekosistem laut	4	12	991.000.000
15.	Tujuan 15 Ekosistem darat	6	21	4.640.766.922
16.	Tujuan 16 Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh	0	0	-
17.	Tujuan 17 Kemitraan untuk mencapai tujuan	0	0	-

Sumber: Hasil analisis, 2020

### 5.3.2. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Gender (PUG)

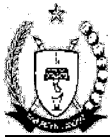
Pengarusutamaan gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. PUG bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan gender sehingga mampu menciptakan pembangunan yang lebih adil dan merata bagi seluruh penduduk Indonesia. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Rencana Program dan Kegiatan Pemerintah Kabupaten Langkat dalam Pengarusutamaan Gender (PUG) disajikan pada tabel berikut ini :

**Tabel 5-8**  
**Rekapitulasi Program dan Kegiatan, serta Anggaran Kabupaten Langkat yang Mendukung Pengarusutamaan Gender (PUG)**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD Tahun 2021		
		Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
I.	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR			
1	PENDIDIKAN	2	14	13.742.231.808
2	KESEHATAN	9	20	12.480.202.891
3	RUMAH SAKIT UMUM	1	1	2.388.386.000
4	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3	4	398.321.955.630



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD Tahun 2021		
		Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
5	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	1	5.000.000.000
6	KESBANGPOL	2	4	948.920.000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	0	-
8	SOSIAL	6	11	641.041.050
9	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	5	655.000.000
<b>II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>				
1	TENAGAKERJAAN	2	5	595.550.000
2	PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PPA	12	18	1.457.910.000
3	LINGKUNGAN HIDUP	3	5	1.233.619.000
4	KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL	1	3	420.000.000
5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN ESA	3	4	1.262.768.824
6	PERHUBUNGAN	0	0	-
7	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	2	409.500.000
8	KOPERASI	0	0	-
9	PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	1	1	60.000.000
10	PEMUDA DAN OLAHRAGA	1	3	899.000.000
11	KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1	1	120.000.000
<b>III. URUSAN PILIHAN</b>				
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	1	3	1.250.000.000
2	PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	2	3	1.578.525.000
3	PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2	3	330.980.000
4	PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0	0	-
<b>IV. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>				
1	SEKRETARIAT DAERAH			
2	SEKRETARIAT DPRD	2	2	4.753.022.950
3	INSPEKTORAT DAERAH	1	1	3.622.436.000
4	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	4	852.500.000
5	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	1	1.286.956.472
6	PENDAPATAN DAERAH	0	0	-
7	KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	-
<b>KECAMATAN</b>				
1	Kecamatan Bahorok	2	2	61.300.000
2	Kecamatan Babalan	2	2	35.200.000
3	Kecamatan Batang Serangan	2	2	28.600.000
4	Kecamatan Berandan Barat	3	3	124.412.939
5	Kecamatan Besitang	2	2	49.105.000
6	Kecamatan Binjai	2	2	36.780.000
7	Kecamatan Gebang	2	2	25.300.000
8	Kecamatan Hinai	2	2	40.350.000
9	Kecamatan Kuala	2	2	40.000.000
10	Kecamatan Kutambaru	2	2	25.485.000
11	Kecamatan Padang Tualang	2	2	40.000.000
12	Kecamatan Pangkalan Susu	2	2	24.123.000
13	Kecamatan Pematang Jaya	2	2	75.000.000
14	Kecamatan Salapian	1	2	26.250.000
15	Kecamatan Sawit Seberang	2	2	41.000.000
16	Kecamatan Secanggang	2	2	41.000.000
17	Kecamatan Sei Bingai	2	2	30.000.000



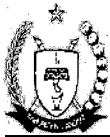
NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD Tahun 2021		
		Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
18	Kecamatan Sei Lapan	2	2	28.700.000
19	Kecamatan Selesai	2	2	42.408.960
20	Kecamatan Sirapit	2	2	39.600.000
21	Kecamatan Stabat	2	2	72.231.258
22	Kecamatan Tanjung Pura	2	2	40.000.000
23	Kecamatan Wampu	2	2	59.000.000
TOTAL ANGGARAN		109	166	455.336.351.782

### 5.3.3. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya

Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan local (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial-budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa, dalam rangka mendukung pengarusutamaan modal sosial budaya Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah mengalokasi dana sebagai berikut :

**Tabel 5-9**  
**Rekapitulasi Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang Mendukung Pengarusutamaan Modal Sosial Budaya**

NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD Tahun 2021		
		Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
<b>I. URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR</b>				
1	PENDIDIKAN	2	14	164.977.385.060
2	KESEHATAN	9	20	191.847.846.988
3	RUMAH SAKIT UMUM	1	1	32.947.384.000
4	PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	3	4	521.020.561.941
5	PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	1	1	-
6	KESBANGPOL	2	4	4.972.750.000
7	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	0	1	-
8	SOSIAL	6	11	4.540.275.467
9	PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	2	5	-
<b>II. URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>				
1	TENAGAKERJAAN	2	5	2.047.000.000
2	PENGENDALIAN PENDUDUK, KB DAN PPA	12	18	10.577.320.000



NO	URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	RKPD Tahun 2021		
		Program	Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5
3	LINGKUNGAN HIDUP	0	0	-
4	KEPENDUDUKAN DAN CACATAN SIPIL	1	3	2.725.000.000
5	PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN ESA	3	4	9.776.850.767
6	PERHUBUNGAN	0	0	2.666.969.546
7	KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1	2	7.688.741.682
8	KOPERASI	0	0	2.070.198.500
9	PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	1	1	919.000.000
10	PEMUDA DAN OLAH RAGA	1	3	3.228.500.000
11	KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN	1	6	636.400.000
III. URUSAN PILIHAN				
1	KELAUTAN DAN PERIKANAN	0	7	351.000.000
2	PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1	20	4.751.667.689
3	PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN	2	3	-
4	PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN	0	1	1.500.000.000
IV. URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG ADMINISTRASI PEMERINTAHAN				
1	SEKRETARIAT DAERAH			
2	SEKRETARIAT DPRD	0	0	-
3	INSPEKTORAT DAERAH	1	1	8.877.743.600
4	PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	3	4	2.536.000.000
5	PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	1	1	-
6	PENDAPATAN DAERAH	0	0	-
7	KEPEGAWAIAN DAERAH	0	0	-
KECAMATAN				
1	Kecamatan Bahorok	2	2	142.238.000
2	Kecamatan Babalan	2	2	2.265.700.000
3	Kecamatan Batang Serangan	2	2	162.324.800
4	Kecamatan Berandan Barat	3	3	976.639.334
5	Kecamatan Besitang	2	2	1.809.716.544
6	Kecamatan Binjai	2	2	470.100.000
7	Kecamatan Gebang	2	2	219.727.558
8	Kecamatan Hinai	2	2	489.770.000
9	Kecamatan Kuala	2	2	742.000.000
10	Kecamatan Kutambaru	2	2	70.485.000
11	Kecamatan Padang Tualang	2	2	328.000.000
12	Kecamatan Pangkalan Susu	2	2	776.920.340
13	Kecamatan Pematang Jaya	2	2	112.500.000
14	Kecamatan Salapian	1	2	63.250.000
15	Kecamatan Sawit Seberang	2	2	401.000.000
16	Kecamatan Secanggang	2	2	583.870.000
17	Kecamatan Sei Bingai	2	2	80.000.000
18	Kecamatan Sei Lapan	1	2	364.798.460
19	Kecamatan Selesai	-2	-2	384.603.960
20	Kecamatan Sirapit	2	2	110.500.000
21	Kecamatan Stabat	2	2	2.876.123.258
22	Kecamatan Tanjung Pura	2	2	183.622.338
23	Kecamatan Wampu	2	2	405.000.000
TOTAL ANGGARAN		97	183	994.677.484.832



#### **5.3.4. Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Pengarusutamaan Transformasi Digital**

Pengarustamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand) dan pengelolaan big data. Dukungan dana atas kegiatan ini sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini :



Tabel 5-10

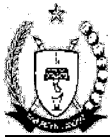
Rekapitulasi Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang Mendukung Pengarusutamaan Transformasi Digital

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA APLIKASI	DOMAIN	FUNGSI APLIKASI	PAGU
1	Bappeda	E-Perencanaan	<a href="http://www.perencanaan.langkatkab.go.id">www.perencanaan.langkatkab.go.id</a>	<p>Aplikasi E-Perencanaan merupakan sistem informasi perencanaan program OPD e Kabupaten Langkat yang dituangkan dari Musrenbang Desa / Kelurahan, Musrenbang kecamatan dan Pokir Anggota DPRD, E-RKPD, E-Renstra dan E-RPJMD.</p> <p>Aplikasi E-Perencanaan terdiri dari :</p> <p>1. E-RKPD</p> <p>E-RKPD merupakan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berbasis aplikasi yang merupakan bagian dari Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Berbasis Elektronik. Penyusunan e-RKPD adalah rangkaian dari penyusunan Renja PD, Renstra PD, RKPD sampai dengan KUA-PPAS agar dapat terselesaikan dengan mudah, cepat, tepat dan sesuai dengan arahan yang terkandung dalam Permendagri No. 86 Tahun 2017.</p> <p>2. E-Musrenbang</p> <p>E-Musrenbang merupakan Aplikasi pendukung kegiatan Musrenbang Desa /Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten dan Penyusunan RKPD Kabupaten Langkat serta penyalarsan program &amp; kegiatan prioritas pembangunan daerah Desa /Kelurahan/Kecamatan/Kabupaten.</p> <p>3. E-Pokir DPRD</p> <p>E.Pokir DPRD merupakan pokok-pokok pikiran DPRD yang memuat pandangan dan pertimbangan serta rumusan usulan kebutuhan .</p> <p>4. E-SSH</p> <p>E-SSH merupakan aplikasi pendukung untuk percepatan penyusunan dan kelengkapan database standarisasi harga yang meliputi Standar Satuan Harga (SSH), Analisa Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK). Data yang sudah dientri di aplikasi e-SSH akan langsung terintegrasi dengan aplikasi dengan aplikasi E-Perencanaan Bappeda Kabupaten Langkat, yang akan digunakan dalam penyusunan Renja, Renstra, RKPD, dan KUA-PPAS.</p>	





NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA APLIKASI	DOMAIN	FUNGSI APLIKASI	PAGU
2	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP	E-Perizinan	<a href="http://www.perizinan.langkatkab.go.id">www.perizinan.langkatkab.go.id</a>	Aplikasi pelayanan perizinan online yang disebut E-Perizinan yaitu Sistem Pelayanan Perizinan Terpadu Efektif dan Efisien sebagai solusi atas kendala pertukaran informasi perizinan secara online . Masyarakat dapat mengurus izin yang dibutuhkan melalui online sistem dan memantau proses perizinannya melalui online sistem.	
3	Dinas Komunikasi dan Informatika	E-Laga (Langkat Siaga)		Aplikasi ini penghubung warga Langkat dengan Pemerintah Kabupaten Langkat sehingga memudahkan masyarakat agar dapat berperan aktif mengawal jalannya roda pemerintahan, dan melaporkan situasi atau kinerja ASN secara realtime	
5	Dinas Sosial	Sibaso	<a href="http://sibaso.langkatkab.go.id">http://sibaso.langkatkab.go.id</a>	Aplikasi ini memberikan informasi langsung kepada masyarakat tentang data – data bantuan sosial yang diterima	
6	Dinas Komunikasi dan Informatika	E-Antik	<a href="http://antik.langkatkab.go.id/login">http://antik.langkatkab.go.id/login</a>	Aplikasi ini berisi tentang kumpulan berita Kabupaten Langkat yang berasal dari portal online maupun sosial media. Data dari berbagai blog, website, sosial media, kemudian di analisa untuk menghasilkan keputusan bisnis	
7		E-Surat	<a href="http://www.surat.langkatkab.go.id">www.surat.langkatkab.go.id</a>	Aplikasi ini tentang sistem informasi manajemen administrasi surat pengelolaan arsip surat masuk / surat keluar disposisi surat di organisasi	
8	Dinas Perdagangan dan Perindustrian	E-pasar	<a href="http://www.pasar.langkatkab.go.id">www.pasar.langkatkab.go.id</a>	Aplikasi ini merupakan informasi usaha dan perdagangan di Kabupaten Langkat, membantu masyarakat memperluas promosi usaha yang mereka miliki.	



5.4 Rencana Program dan Kegiatan yang Mendukung Prioritas Provinsi Tahun 2021

Rencana program dan kegiatan yang disusun oleh Pemerintah Kabupaten Langkat, selain diarahkan untuk menunjang pelaksanaan prioritas Nasional juga diarahkan untuk menunjang prioritas Provinsi Tahun 2021. Adapun ringkasan dari dukungan program dan kegiatan perangkat daerah Kabupaten Langkat terhadap prioritas Propinsi Sumatera Utara disajikan pada tabel dibawah:

Tabel 5-11  
Rekapitulasi Program dan Kegiatan, serta Anggaran Pemerintah Kabupaten Langkat yang Mendukung Prioritas Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021

No	Prioritas Provinsi	Program/Kegiatan RKPD Tahun 2021		
		Program	Kegiatan	Anggaran
1	Peningkatan kesempatan kerja dan berusaha melalui penyediaan lapangan kerja	10	19	1.393.697.533
2	Peningkatan dan pemenuhan akses Pendidikan	7	38	159.112.128.148
3	Pembangunan infrastruktur yang baik dan berwawasan lingkungan	12	32	136.586.721.845
4	Penyediaan layanan kesehatan yang berkualitas	20	85	226.251.248.631
5	Peningkatan daya saing melalui sektor agraris dan pariwisata	18	63	22.465.829.900
	Jumlah	67	237	545.809.626.057

5.5 Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-pokok pikiran DPRD Tahun 2021 yang tertampung dalam Reses DPRD Kab. Langkat yang akan tertuang dalam RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 5-12  
Pokok-pokok Pikiran DPRD Yang Tertampung Dalam Reses DPRD Kab. Langkat

Dinas Pendidikan

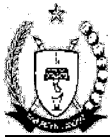
No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
2	Pembangunan sekolah SMA Negeri di Desa Halaban Kec. Besitang Kab.Langkat	Desa Halaban Desa Halaban Kec. Besitang Kab.Langkat
3	Pemasangan Paving Blok Jalan Masuk SD Impres Desa Adin Tengah Kec, Salapian Sepj. 100 m	SD Impres Desa Adin Tengah Desa Adin Tengah Kec, Salapian, Kab.Langkat
4	Agar Zonanisasi penerimaan siswa baru diperluas	Desa Batu Jonjong Kec. Bahorok Kab.Langkat
5	Belum ada Gedung Sekolah SD	Dsn III Desa Kelantan Kec. Brandan Barat
6	Mohon tindakan dari Pemerintah Daerah terkait Kepala Sekolah SD Impres Desa Adin Tengah Kec.Salapian yang tidak pernah hadir di sekolah tersebut.	SD Impres Desa Adin Tengah Desa Adin Tengah Kec, Salapian, Kab.Langkat
7	Pengadaan Mobiler Sekolah Dasar Impres	Desa Adin Tengah Desa Adin Tengah Kec, Salapian
8	Pembuatan pagar sekolah SD NEG 053991 Dusun III Pasar Rawa Hulu Desa Pasar Rawa Kec. Gebang	SD NEG 053991 Dusun III Pasar Rawa Hulu Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat



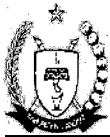
No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
9	Pembuatan pagar sekolah SD Tangkahan Batak Dusun VII Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Sepj. 100 m	SD Tangkahan Batak Dusun VII Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
10	Pembuatan pagar sekolah SD NEG 056636 Dusun VIII Kelantan Luar Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Sepj. 100 m	SD NEG 056636 Dusun VIII Kelantan Luar Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
11	Kurangnya Kesejahteraan Guru	Dusun V Desa Aman Damai Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat
12	Kurangnya Guru SD	Desa Pulau Sembilan Desa Payah Tampak Kec. Pangkalan Susu
13	Tidak Adanya Sekolah Menengah Pertama (SMP)	Desa Pulau Sembilan Desa Payah Tampak Kec. Pangkalan Susu
14	Kurangnya Bantuan Insentif Untuk Guru-guru	Desa Pulau Sembilan Desa Payah Tampak Kec. Pangkalan Susu
15	Rahab berat SD Nomor 054919 Desa Perkotaan	SD Nomor 054919 Desa Perkotaan Desa Perkotaan Kec. Secanggang
16	Rehab Ruang Kelas dan Ruang Guru SD Nomor 051808 Padat Karya Lingkungan VIII Kel.Hinai Kiri Kec. Secanggang	SD Nomor 051808 Padat Karya Lingkungan VIII Kel.Hinai Kiri Kelurahan Hinai Kiri Kec. Secanggang
17	Pembuatan pagar sekolah SD Nomor 054919	Desa Perkotaan Desa Perkotaan Kec. Secanggang
18	Rehab Berat SD Nomor 056007 Dusun Rintis	Dusun Rintis Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec. Secanggang
19	Rehab Berat Rumah Dinas Guru SD Nomor 054919	Desa Perkotaan Desa Perkotaan Kec. Secanggang
20	Pembangunan Perpustakaan Sekolah SD Nomor 056007	Dusun Rintis Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec. Secanggang
21	Pembangunan pagar sekolah SD Nomor 056007	Dusun Rintis Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec. Secanggang
22	Rehab Kamar Mandi Sekolah SD Nomor 056007	Dusun Rintis Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec. Secanggang
23	Pembuatan pagar sekolah SD Nomor 051808 Padat Karya	Lingkungan VIII Kel.Hinai Kiri Kelurahan Hinai Kiri Kec. Secanggang
24	Rusaknya Lokal di SD 05676	Desa Tanjung Pasir Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
25	Tidak Adanya SD	Desa Tanjung Pasir Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
26	Rehab berat SD Nomor 054919, Pembuatan Pagar Sekolah, Rehab. Rumah Dinas, Guru dan Rehab Berat Kamar Mandi Sekolah Desa Perkotaan Kec. Secanggang	SD Nomor 054919 Desa Perkotaan Desa Perkotaan Kec. Secanggang Kab.Langkat
27	Rehab Berat Gedung SD, pembangunan Ruang Perpustakaan, Pembangunan Pagar Sekolah, Rehab ringan Kamar Mandi, dan pemasangan Paving Blok halaman SD Nomor 056007 Dusun Rintis Desa Pantai Gading Kec.Secanggang	SD Nomor 056007 Dusun Rintis Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab.Langkat
28	Bantuan Mobiler untuk Lembaga pendidikan PAUD se Kecamatan Hinai yang berjumlah sebanyak 20 lembaga pendidikan PAUD.	Desa Baru Pasar VIII Kec.Hinai Kab.Langkat
29	Rusaknya Lokal MDT AL-Wasliyah	Kelurahan Tanjung Selamat
30	Pembangunan sekolah SMA Negeri di Desa Halaban Kec.Besitang	Desa Halaban Desa Halaban Kec. Besitang Kab.Langkat
31	Fasilitas Bus bagi anak sekolah yang ada di Desa Bukit Mas Kec.Besitang	Desa Bukit Mas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab.Langkat
32	Belum ada Gedung SD	Dsn III Desa Kelantan Kec. Brandan Barat Desa Kelantan Kec. Brandan Barat Kab.Langkat
33	Rehab Berat Bangunan Sekolah 4(empat) ruang kelas SDN 050585 Desa Tanjung Jati Kec.Binjai	SDN 050585 Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Kab.Langkat
34	Paving Blok Halaman SDN 050585 Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Sepj. 200 m x 20 m	SDN 050585 Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Kab.Langkat
35	Rehab berat SD Nomor 054919, Pembuatan Pagar Sekolah, Rehab. Rumah Dinas, Guru dan Rehab Berat Kamar Mandi Sekolah Desa Perkotaan Kec. Secanggang	SD Nomor 054919 Desa Perkotaan Kec. Secanggang Desa Perkotaan Kec. Secanggang Kab.Langkat
36	Rehab Berat SD 051808 , Ruang Kepala Sekolah, penambahan Ruang Kelas 3 lokal, Rehab Berat Kamar Mandi, pembuatan Pagar Sekolah, Pebangunan Ruang Perpustakaan sekolah Padat Karya Lingkungan VIII Kel.Hinai Kiri Kec. Secanggang	SD 051808 Padat Karya Lingkungan VIII Kel.Hinai Kiri Kec. Secanggang Kel. Hinai Kiri Kec.Secanggang Kab.Langkat
37	Rehab Berat Gedung SD Nomor 056007 Dusun Rintis Desa Pantai Gading Kec.Secanggang	SD Nomor 056007 Dusun Rintis Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab.Langkat
38	Rehab berat SD Nomor 054919 Desa Perkotaan Kec. Secanggang	SD Nomor 054919 Desa Perkotaan Desa Perkotaan Kec. Secanggang Kab.Langkat
39	Rehab berat SD Nomor 054919, Pembuatan Pagar Sekolah, Rehab. Rumah Dinas, Guru dan Rehab Berat Kamar Mandi Sekolah Desa Perkotaan Kec. Secanggang	SD Nomor 054919 Desa Perkotaan Kec. Secanggang Desa Perkotaan Kec. Secanggang Kab.Langkat
40	Rehab Berat SD 051808 , Ruang Kepala Sekolah, penambahan Ruang Kelas 3 lokal, Rehab Berat Kamar Mandi, pembuatan Pagar Sekolah, Pebangunan Ruang Perpustakaan sekolah Padat Karya Lingkungan VIII Kel.Hinai Kiri Kec. Secanggang	SD 051808 Padat Karya Lingkungan VIII Kel.Hinai Kiri Kec. Secanggang Kel. Hinai Kiri Kec.Secanggang Kab.Langkat
41	Halaman Sekolah SDN 054870 Becek	Desa Tanjung Jati
42	Halaman Sekolah SDN 050586 Becek	Desa Tanjung Jati
43	Belum Adanya Sekolah SMA	Desa Halaban
44	Tidak adanya Transportasi Anak Sekolah	Desa Bukit Mas
45	Bangunan Sekolah SDN 050585 Sudah Tidak Layak	Desa Tanjung Jati
46	Halaman Sekolah SDN 050585 Becek	Desa Tanjung Jati
47	Kamar Mandi SDN 054870 Sudah Tidak Layak	Desa Tanjung Jati
48	Belum ada Gedung Sekolah SD	Desa Kelantan Kec. Brandan Barat Kab.Langkat
49	Belum ada Gedung Sekolah SD	Desa Kelantan Kec. Brandan Barat Kab.Langkat
50	Belum Adanya Sekolah SMA	Desa Halaban
51	Tidak adanya Transportasi Anak Sekolah	Desa Bukit Mas
52	Pemasangan Paving Blok Halaman sekolah SD Nomor 056007	SD Nomor 056007 Dusun Rintis Desa Pantai Gading Desa Pantai



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
	Dusun Rintis Desa Pantai Gading Kec. Secanggang	Gading Kec. Secanggang Kab.Langkat
53	Rehab Berat Kamar Mandi SD Nomor 054919	SD Nomor 054919 Desa Perkotaan Desa Perkotaan Kec. Secanggang
54	Rehab Berat SD 051808 , Ruang Kepala Sekolah, penambahan Ruang Kelas 3 lokal, Rehab Berat Kamar Mandi, pembuatan Pagar Sekolah, Pebangunan Ruang Perpustakaan sekolah Padat Karya Lingkungan VIII Kel.Hinai Kiri Kec. Secanggang	Rehab Berat SD 051808 Padat Karya Lingkungan VIII Kel.Hinai Kiri Kelurahan Hinai Kiri Kec. Secanggang Kab.Langkat
55	Rehab ruang kelas SD Rintis No.0506007 Dusun VI Merbau Rintis Desa Pantai Gading Kec.Secanggang sebanyak dua lokal	SD Rintis No.0506007 Dusun VI Merbau Rintis Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec.Secanggang Kab.Langkat
56	Rehab Berat SD 051808 Padat Karya Lingkungan VIII Kel.Hinai Kiri Kec. Secanggang	SD 051808 Padat Karya Lingkungan VIII Kel.Hinai Kiri Kelurahan Hinai Kiri Kec. Secanggang Kab.Langkat
57	Perbaikan kebijakan Zonasi Sekolah disesuaikan dengan kondisi Desa, karena banyak anak-anak yang tidak dapat sekolah ke SMA Negeri disebabkan jarak tempuh yang jauh dari Desa Batu Jonjong Kec.Bahorok.	Desa batu Jonjong Desa Batiu Jonjong Kec.Bahorok Kab.Langkat
58	Mohon pendirian sekolah SMPN di Desa Kutambaru Kec.Kutambaru	Desa Kutambaru Kec.Kutambaru Kab.Langkat
59	perbaikan zonasi sekolah	Desa Batu Jong Jong
60	Tidak Ada SMP Negeri	Desa Kutambaru
61	Belum Teralisasi Gaji Honor	SMPN Salapian
62	Kurangnya Ruang Kelas	Kecamatan Salapian
63	Belum Terbayarnya Gaji Honor Dan Alat Peraga	Kecamatan Salapian
64	Sekolah Rusak	Desa Rumah Galuh
65	Pembuatan jalan dengan Paving Blok di SD Gungung Tinggi Kec.Sirapit Sepj. 100 m x 2,5 m	SD Gungung Tinggi Desa Gungung Tinggi Kec.Sirapit Kab.Langkat
66	Rehab Berat Gedung SD, pembangunan Ruang Perpustakaan, Pembangunan Pagar Sekolah, Rehab ringan Kamar Mandi, dan pemasangan Paving Blok halaman SD Nomor 056007	SD Nomor 056007 Dusun Rintis Desa Pantai Gading Kec.Secanggang Desa Pantai Gading Kec. Secanggang
67	Mohon agar Dana Sertifikasi dikeluarkan karena sudah 5 bulan belum terbayar untuk Guru Honoror di Kemenag	Kecamatan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura
68	Agar Dana Sertifikasi dikeluarkan karena sudah 5 bulan belum terbayar untuk Guru Honoror di Kemenag	Kec.Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura
69	Belum adanya SMA Negeri	
70	Kekurangan Kelas	Kecamatan Kuala
71	Tidak Ada Ruang Rapat	Desa Parit BINDU
72	Pembangunan Pagar Sekolah	Desa RUMAH GALOH
73	Belum adanya SMP Negeri	Desa Kutambaru Kecamatan Kutambaru
74	Tidak Ada Sekolah Paud	Desa Dalam Nama
75	Ruang Kelas Rusak	Desa Sei Penjara
76	Gaji Honor Belum Terrealisasi	Kecamatan Salapian
77	Belum Ada Ruang Kelas Untuk Pembelajaran Komputer	Kecamatan Salapian
78	Pembayaran Honor Gaji dan Belum Mempunya Alat Peraga	Kecamatan Salapian
79	Pembangunan sekolah SMA Negeri	Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat
80	Mohon pembangunan Gedung Sekolah SD	Dsn.III Desa Kelantan Desa Kelantan Kec.Brandan Barat
81	Pembangunan sekolah SMA Negeri	Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat
82	Rusaknya Kantor dan Ruang Kelas	SD Negeri 057192 Desa Blangkahan Kecamatan Kuala
83	Pengadaan Ruang Kelas	Pondok Batu Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala
84	Pemasangan Paving Blok	Buluh duri Desa Bekiung Kecamatan Kuala
85	Rehab Ruang Kelas	Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala
86	Pembangunan Gedung Sekolah SD	SD di Dsn III Desa Kelantan Desa Kelantan Kec.Brandan Barat
87	Belum Adanya MCK di Sekolah	SD Negeri 057192 Desa Blangkahan Kecamatan Kuala
88	Butuh Kenaikan Guru Honor Menjadi P3K	Kecamatan sei Bingai Kecamatan Sei Bingai
89	Kurangnya Gedung Sekolah PAUD	Desa Dalam Naman Kecamatan Kuala
90	Belum Terpakarnya Sekolah	Desa Sei Penjara Kecamatan Kuala
91	Rusaknya Ruang Kelas	Desa Sei Penjara Kecamatan Kuala
92	Kurannya MCK Di Sekolah	Desa Sei Penjara Kecamatan Kuala
93	Kurangnya Mobiuler Sekolah	SMPN 4 Blangkahan Kecamatan Kuala
94	Belum adanya Mobiuler Sekolah	SD Negeri 057192 Desa Blangkahan Kecamatan Kuala
95	Belum adanya Komputer	SMPN 4 Blangkahan Kecamatan Kuala
96	Perbaikan gedung sekolah	Desa Suka Damai Kecamatan Kuala
97	Pembuatan pagar Sekolah SD	sekolah SD Menjahoang Kecamatan Kuala
98	Perbaikan sekolah SD di Dusun II Desa Adin Tengah, Kursi dan Bangku untuk sarana belajar mengajar sebanyak 100 unit	SD di Dusun II Desa Adin Tengah Desa Adin Tengah Kec.Salapian Kab.Langkat
99	Mohon bantuan untuk PAUD Swasta dalam hal pembayaran gaji Guru Honor PAUD dan juga untuk pengadaan alat peraga di Sekolah PAUD	Kec.Salapian Kab.Langkat
100	Butuh paving Blok	Desa Beruam Kecamatan Kuala
101	Butuh Perbaikan Wilayah Zonasi	Desa belinten Kecamatan Sei Bingai
102	Butuh Perbaikan Sekolah	Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
103	Butuh Pembuatan pagar Sekolah	Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai
104	Butuh Rehap Gedung Sekolah	Kecamatan Sei Bingai Kecamatan Sei Bingai
105	Butuh Rehap Gedung SMPN	DSN Desa Belinten Kecamatan Sei Bingai
106	Pengadaan Ruang Kelas baru sebanyak 3 unit Di SD Impres No.057739 Pondok Batu	Desa Parit Bindu Desa Parit Bindu Kec. Kuala
107	Pemasangan Paving Blok halaman sekolah SD Negeri No.053962 Buluh Duri Desa Bekiung Kec.Kuala seluas 20 m x 30 m	SD Negeri No.053962 Buluh Duri Desa Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
108	Rehab Ruang Kelas SD Negeri No.053962 Desa Sido Makmur Kec.Kuala	SD Negeri No.053962 Desa Sido Makmur Desa Sido Makmur Kec. Kuala
109	Pembangunan Ruang Rapat (Aula/kantor) SD Negeri No.053962 Desa Parit Bindu Kec.Kuala	SD Negeri No.053962 Desa Parit Bindu Desa Parit Bindu Kec. Kuala
110	Pembangunan Gedung Sekolah PAUD	Desa Dalam Naman Kec. Kuala
111	Pembangunan Pagar Sekolah SD Negeri No.050609	D Negeri No.050609 Desa Sei Penjara Desa Sei Penjara Kec. Kuala
112	Guru Honorer	Kecamatan Sei Bingai
113	Rehab Berat	SD No 054919 Desa Perkotaan Kecamatan secanggang
114	Rehab Berat Ruang	Sekolah SD No 051808 Padat karya LK.VIII kel. Hinai Kiri Kecamatan secanggang
115	Rehab Berat	SD No 056007 Dusun Rintis Desa Pantai Gading Kecamatan secanggang
116	Pembangunan MCK Sekolah SD Negeri No.050609 sebanyak 2 unit	SD Negeri No.050609 Desa Sei Penjara Desa Sei Penjara Kec. Kuala
117	Pembangunan MCK SD No.057192 Desa Blangkahan Kec.Kuala sebanyak 4 unit	SD No.057192 Desa Blangkahan Desa Blangkahan Kec. Kuala
118	Pengadaan Mobiler (Meja 40, Kursi 80, whiteboard 3 dan lemari 2) SD No.057192	SD No.057192 Desa Blangkahan Desa Blangkahan Kec. Kuala
119	Pengadaan Mobiler SMPN 4 sebanyak meja 20 buah, kursi 40 buaj, lemari 2 buah	Desa Blangkahan Kec. Kuala
120	Perbaikan kantor dan ruang kelas SD No.057192	SD No.057192 Desa Blangkahan Desa Blangkahan Kec. Kuala
121	Perbaikan Gedung Sekolah sebanyak 3 unit	Desa Suka Damai Kec. Kuala
122	Pemasangan Paving Blok halaman Sekolah Desa Suka Damai Kec.Kuala seluas 90 m2	Desa Suka Damai Kec. Kuala
123	Kantor Dan Ruang Kelas Rusak	Desa Blangkahan
124	Pengadaan Mobiler	Desa Blangkahan
125	Gedung Sekolah Rusak	Desa Suka Damai
126	Halaman Sekolah Rusak/Becek	Desa Suka Damai
127	Pembuatan Pagar Sekolah SD Menjahong Bekiung Sep.500 m	SD Menjahong Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
128	Pembuatan Pagar SEKOLAH	Desa Parit Bindu
129	Rehab Kamar mandi	SDN 054870 Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai
130	Paving Blok	SDN 054870 Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai
131	Paving Blok	SDN 050586 Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai
132	Rehab Berat	SDN 050585 Desa tanjung Jati Kecamatan Binjai
133	Paving Blok	SDN 050585 Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai
134	Program Pendidikan	Kecamatan Salapian
135	Gaji Guru Honorer	Kecamatan Sei Bingai
136	Pembuatan Perda	Kecamatan Sei Bingai
137	Pembangunan Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Atas ( SMA ) / SLTA Negeri Desa Kwala Musam Kecamatan Batang Serangan
138	Rehab berat SD Nomor 054919	SD Nomor 054919 Desa Perkotaan Desa Perkotaan Kec. Secanggang
139	Rehab Berat Gedung SD Nomor 056007 Dusun Rintis Desa Pantai Gading Kec.Secanggang	SD Nomor 056007 Dusun Rintis Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab.Langkat
140	Sekolah Rusak	Kecamatan Sei Bingai
141	Pembangunan Gedung SMP	Desa Belinten
142	Kebijakan Zonasi Sekolah Tingkat SMA	Desa Batu Jong - Jong Desa Batu Jong JongKecamatan Bahorok
143	Rehab Berat SD	SD No 054919 Desa Perkotaan Kecamatan secanggang
144	Rehab Berat SD 051808 Padat Karya Lingkungan VIII Kel.Hinai Kiri Kec. Secanggang	SD 051808 Padat Karya Lingkungan VIII Kel.Hinai Kiri Kelurahan Hinai Kiri Kec. Secanggang Kab.Langkat
145	Pembuatan pagar sekolah SDN. 050606 Sepj.50 m x 2 m	SDN. 050606 Dusun IV Desa Parit Bindu Desa Parit Bindu Kec. Kuala
146	Pembuatan pagar sekolah SDN. 050606 Sepj.50 m x 2 m	SDN. 050606 Dusun IV Desa Parit Bindu Desa Parit Bindu Kec. Kuala
147	Pemasangan Paving Blok halaman SD N Buah Apam 15 x 20 m	Halaman SD N Buah Apam Desa Beruam Desa Beruam Kec. Kuala
148	Pemasangan Paving Blok halaman SD N Buah Apam 15 x 20 m	Halaman SD N Buah Apam Desa Beruam Desa Beruam Kec. Kuala
149	Mohon naikan Guru Honorer menjadi P3K Kec.Sei Bingai	Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
150	Perbaikan sistem zonasi penerimaan siswa sekolah	Desa Belinten Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
151	Perbaikan sistem zonasi penerimaan siswa sekolah	Desa Belinten Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
152	Perbaikan sekolah di Desa Rumah Galuh Kec.Sei Bingai	Desa Rumah Galuh Kec. Sei Bingai Kab.Langkat
153	Mohon naikan Guru Honorer menjadi P3K Kec.Sei Bingai	Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
154	Rehab Gedung sekolah SD Inpres Nomor 055990 Desa Rumah Galuh Kec.Sei Bingai	SD Inpres Nomor 055990 Desa Rumah Galuh Desa Rumah Galuh Kec. Sei Bingai Kab.Langkat
155	Pembangunan Gedung SMP N di Dusun Sanggapura Desa Belinten Kec.Sei Bingai	SMP N di Dusun Sanggapura Desa Belinten Desa Belinten Kec.Sei Bingai Kab.Langkat



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
156	Rehab Gedung sekolah SD Inpres Nomor 055990 Desa Rumah Galuh Kec.Sei Bingai	SD Inpres Nomor 055990 Desa Rumah Galuh Desa Rumah Galuh Kec. Sei Bingai Kab.Langkat
157	Pembangunan Gedung SMP N di Dusun Sanggapura Desa Belinten Kec.Sei Bingai	SMP N di Dusun Sanggapura Desa Belinten Desa Belinten Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
158	Perbaikan sistem zonasi penerimaan siswa sekolah pada Desa Belinten Kec.Sei Bingai	- Desa Belinten Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
159	Belum Adanya Ruang Rapat	SD negeri 053962 Parit Bindu Kecamatan Kuala
160	Dana Sertifikasi	Kecamatan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura
161	Pembangunan Sekolah	Desa Halaban Kecamatan besitang
162	Fasilitas Bus	Desa Bukit Mas Kecamatan besitang
163	Mohon realisasi Gaji untuk Guru Honor di SMPN Salapian yang telah ditampung di APBD Kab.Langkat	- Kec.Salapian Kab.Langkat
164	SEKOLAH RUSAK	Dusun II ADIN TENGAH
165	Rehab Berat Gedung SD, pembangunan Ruang Perpustakaan, Pembangunan Pagar Sekolah, Rehab ringan Kamar Mandi, dan pemasangan Paving Blok halaman SD Nomor 056007 Dusun Rintis Desa Pantai Gading Kec.Secanggang	SD Nomor 056007 Dusun Rintis Desa Pantai Gading Kec.Secanggang Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab.Langkat
166	Pembangunan Gedung Sekolah	Desa Kelantan Kecamatan brandan barat
167	Pengrehapan Ruang Kelas Belajar Sekolah SD Negeri No.050609 Desa Sei Penjara Kec.Kuala	SD Negeri No.050609 Desa Sei Penjara Desa Sei Penjara Kec. Kuala
168	Perbaikan ruang sekolah untuk sarana mengajar di Sekolah Dasar Impres Desa Adin Tengah Kec.Salapian	Sekolah Dasar Impres Desa Adin Tengah Desa Adin Tengah Kec, Salapian, Kab.Langkat
169	Pengadaan Komputer SMPN 4 Desa Blangkahan Kec.Kuala sebanyak 10 unit	Desa Blangkahan Kec. Kuala

Dinas Kesehatan

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Pembuatan Kartu KIS bagi masyarakat kurang mampu	Desa Serapuh ABC Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang
2	Penambahan Bidan di Pustu Brandan Barat Tangkahan Durian	Desa Tangkahan Durian Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat
3	Renovasi Pustu Desa Adin Tengah Kec.Salapian	Desa Adin Tengah Desa Adin Tengah Kec, Salapian, Kab.Langkat
4	Rehab Berat Polindes dan Bides tidak aktif Dusun Kampung Baru Desa Batu Jonjong Kec.Bahorok	Dusun Kampung Baru Desa Batu Jonjong Desa Batu Jonjong Kec. Bahorok
5	Agar setiap siswa yang ingin masuk SMP, SMA dan Calon Suami Istri (Calon Pengantin) di Test Narkoba	Desa Batu Jonjong Desa Batu Jonjong Kec. Bahorok Kab.Langkat
6	Pengadaan Mobil Ambulance kesehatan gratis untuk warga berobat	Desa Minta Kasih Desa Minta Kasih Kec.Salapian Kab.Langkat
7	Mohon perhatian bagi Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan) lebih ditingkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat	Desa Perkebunan Bungara Desa Perkebunan Bungara Kec. Bahorok
8	Kurangnya Dokter	Desa Pulau Sembilan Desa Payah Tampak Kec. Pangkalan Susu
9	Tidak Adanya Kendaraan Ambulance	Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat
10	Pembangunan MCK	Desa Belinten
11	Mohon segera fungsikan Puskesmas yang sudah dibangun di Kec.Wampu	Kec.Wampu
12	Pembangunan Pustu Dusun III Pangkal Pasar Desa Pantai Gading Kec.Secanggang	Dusun III Pangkal Pasar Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec.Secanggang Kab.Langkat
13	Kurangnya alat kesehatan dan obat-obatan di Puskesmas	Desa Tangkahan Durian
14	Kurangnya Bidan	Berandan Barat Tangkahan Durian
15	Kurangnya Bidan	Berandan Barat Tangkahan Durian
16	Pengadaan perlengkapan alat kesehatan beserta obat-obatan di Puskesmas Brandan Barat Tangkahan Durian	Puskesmas Brandan Barat Desa Tangkahan Durian Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat
17	Bantuan kepada Ormas Perempuan yang bergerak di bidang Kesehatan di Desa Pantai Gemi Kec.Stabat	Desa Pantai Gemi Desa Pantai Gemi Kec.Stabat Kab.Langkat
18	Pengadaan perlengkapan alat kesehatan beserta obat-obatan di Puskesmas Brandan Barat Tangkahan Durian	Puskesmas Brandan Barat Tangkahan Durian Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat
19	Penambahan Bidan di Pustu Brandan Barat Tangkahan Durian	Pustu Brandan Barat Tangkahan Durian Desa Tangkahan Durian Kec. Brandan Barat Kab. Langkat
20	Rehab berat bangunan gedung Polindes Desa Parangguam Kec.Salapian	Polindes Desa Parangguam Desa Parangguam Kec.Salapian Kab.Langkat
21	Rehab berat bangunan gedung Polindes Desa Parangguam Kec.Salapian	Polindes Desa Parangguam Desa Parangguam Kec.Salapian Kab.Langkat
22	Gedung Rusak	Kecamatan Salapian
23	Pengadaan perlengkapan alat kesehatan beserta obat-obatan di Puskesmas Brandan Barat Kel.Tangkahan Durian	Puskesmas Brandan Barat Kel.Tangkahan Durian Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat
24	Penambahan Bidan di Pustu Brandan Barat Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan barat	Pustu Brandan Barat Kel.Tangkahan Durian Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat
25	Pengadaan perlengkapan alat kesehatan beserta obat-obatan di Puskesmas Brandan Barat Kel Tangkahan Durian	Puskesmas Brandan Barat Kel Tangkahan Durian Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
26	Penambahan Bidan Pustu Brandan Barat di Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat	Pustu Brandan Barat di Kel.Tangkahan Durian Kel.Tangkahan Durian Kec.Brandan Barat
27	Butuh Jirjak Ruang KUPT	Desa Mekar Jaya Kecamatan Sei Bingai
28	Butuh Rehab Ruang Inap	Desa namu ukur Kecamatan Sei Bingai
29	Butuh Rehap Total	Kecamatan Sei Bingai Kecamatan Sei Bingai
30	Butuh Pemasangan Jaringan Listrik	Pusku Desa Mekar Jaya ,Pusku Suka Rame dan Pusku Sanggapura Kecamatan Kuala
31	Butuh pembangunan PUSKU	Desa namu Ukur Utara Kecamatan Sei Bingai
32	Butuh Mobileur	Desa Gunung Ambat Kecamatan Sei Bingai
33	Butuh Rehab Gedung PUSTU	Desa Tanjung Gunung Kecamatan Sei Bingai
34	Pembuatan WC Keluarga (MCK) se Kec.Kuala sebanyak 900 unit	Kec.Kuala
35	Tidak Adanya Jerjak	Desa Namu Ukur
36	Ruangan Rusak	Kecamatan Sei Bingai
37	Gedung Pustu Rusak	Kecamatan Sei Bingai
38	Tidak Ada Jaringan Listrik Dan Air	Kecamatan Sei Bingai
39	Pembangunan Gedung	Kecamatan Sei Bingai
40	Pengadaan Moubiler	Kecamatan Sei Bingai
41	Gedung Rusak	Kecamatan Sei Bingai
42	Rehab Berat SD No 056007	Dusun Rintis Desa Pantai Gading Kecamatan secanggang
43	Pembangunan MCK Puskesmas sebanyak 2 unit	Puskesmas Desa Belinten Desa Belinten Kec.Sei Bingai
44	Pembangunan MCK Puskesmas sebanyak 2 unit	Puskesmas Desa Belinten Desa Belinten Kec.Sei Bingai
45	Pembangunan Gedung Pustu Desa Namu Ukur Utara	Pustu Desa Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec.Sei Bingai
46	Pemasangan Jerjak Ruang KUPT dan Laboratorium Puskesmas Namu Ukur dan Pustu Mekar Jaya Kec.Sei Bingai	Desa Mekar Jaya Kec.Sei Bingai
47	Rehab Ruang Inap Puskesmas Namu Ukur Kec.Sei Bingai	Puskesmas Namu Ukur Kel.Namu Ukur Selatan Kec.Sei Bingai
48	Rehap total Gedung Pustu Proyek dan Gedung Polindes Sanggapura Desa Belinten Kec.Sei Bingai	Pustu Proyek dan Gedung Polindes Sanggapura Desa Belinten Desa Belinten Kec.Sei Bingai
49	Pemasangan Jaringan Listrik dan Air Pustu Sanggapura, Pustu Mekar Jaya, Pustu Slmpang Suka Rame dan Pustu Rumah Galuh	Kec.Sei Bingai
50	Pemasangan Jerjak Ruang KUPT dan Laboratorium Puskesmas Namu Ukur dan Pustu Mekar Jaya Kec.Sei Bingai	Puskesmas Namu Ukur dan Pustu Mekar Jaya Desa Mekar Jaya Kec.Sei Bingai
51	Rehab Ruang Inap Puskesmas Namu Ukur Kec.Sei Bingai	Puskesmas Namu Ukur Kel.Namu Ukur Selatan Kec.Sei Bingai
52	Rehap total Gedung Pustu Proyek dan Gedung Polindes Sanggapura Desa Belinten Kec.Sei Bingai	Pustu Proyek dan Gedung Polindes Sanggapura Desa Belinten Desa Belinten Kec.Sei Bingai
53	Pemasangan Jaringan Listrik dan Air Pustu Sanggapura, Pustu Mekar Jaya, Pustu Slmpang Suka Rame dan Pustu Rumah Galuh	Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
54	Pembangunan Gedung Pustu	Pustu Desa Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec.Sei Bingai
55	Pengadaan Mobiler Pustu Desa Gunung Ambat Kec.Sei Bingai	Pustu Desa Gunung Ambat Desa Gunung Ambat Kec.Sei Bingai
56	Pengadaan Mobiler Pustu Desa Gunung Ambat Kec.Sei Bingai	Pustu Desa Gunung Ambat Desa Gunung Ambat Kec.Sei Bingai
57	Rehab Gedung Pustu Desa Tanjung Gunung Kec.Sei Bingai	Pustu Desa Tanjung Gunung Desa Tanjung Gunung Kec.Sei Bingai
58	Rehab Gedung Pustu Desa Tanjung Gunung Kec.Sei Bingai	Desa Tanjung Gunung Desa Tanjung Gunung Kec.Sei Bingai
59	Permohonan pengurusan Kartu KIS karena Kartu BPJS yang dibawa ke RS selalu dipulangkan Desa Namu Sialang	Desa Namu Sialang Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
60	Permohonan pengurusan Kartu KIS karena Kartu BPJS yang dibawa ke RS selalu dipulangkan	Desa Namu Sialang Kec.Batang Serangan
61	Penambahan Bidan	Berandan Barat Tangkahan Durian Kecamatan brandan barat
62	Pengadaan Perlengkapan Alat Kesehatan	puskesmas brandan barat tangkahan durian Kecamatan brandan barat
63	Bantuan pembayaran BPJS untuk masyarakat miskin	Desa Kabun Kelapa Desa Kebun Kelapa Kec.Secanggang Kab.Langkat
64	Kurangnya alat kesehatan dan obat-obatan di Puskesmas	Desa Tangkahan Durian

Rumah Sakit Tanjung Pura

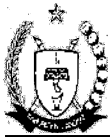
No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	TIDAK ADA ALIRAN LISTRIK	Desa Lau Lugur
2	Mohon Perhatian untuk fasilitas dan pelayanan di rumah Sakit Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura	Kecamatan Tanjung Pura
3	Mohon Perhatian untuk fasilitas dan pelayanan di rumah Sakit Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura	Rumah Sakit Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura
4	Pelayanan Rumah Sakit	Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura
5	Pengaspalan dengan Hotmi	LK.VII Jalan cenderawasih Kecamatan stabat

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

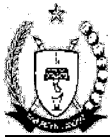


No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun V Kecamatan Hinai Kab. Langkat
2	Perbaikan Jembatan	Dusun PIR ADB Kecamatan besitang
3	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun VI Kecamatan Hinai Kab. Langkat
4	Jalan Rusak	KECAMATAN SEI BINGAI
5	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Benteng Dusun V Desa Air Hitam Sep. 2200 m x 4 m	Dusun V Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
6	Rehab Berat Kantor Lurah Pekan Besitang Kec. Besitang	Kelurahan Pekan Besitang Kelurahan Pekan Besitang Kec. Besitang
7	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Bukit IX ke Bukit V dekat Masjid Desa Serapuh ABC Sepj. 2500 m	Bukit IX ke Bukit V dekat Masjid Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat
8	Pengorekan Parit (Normalisasi) di Dusun XI Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sepj. 5 km	Dusun XI Desa Air Hitam Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
9	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Perbatasan Dusun I Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang Sepj. 1800 m	Jalan Perbatasan Dusun I Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat
10	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Dusun I ke DUSun IV Jalan Bukit Payung Desa Serapuh ABC Sepj. 2500 m	Dusun I ke DUSun IV Jalan Bukit Payung Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat
11	Pengaspalan Jalan dengan Hot Mix Jalan SImpang Sambu Menuju Titi Merbu ke Titi Leong Sepj. 1500 m	Jalan SImpang Sambu Menuju Titi Merbu ke Titi Leong Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang
12	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Jl. Tanjak di Dusun PIR ADB Sep. 3 km x 4 m	Desa PIR ADB Desa PIR ADB Kec. Besitang Kab. Langkat
13	Pengerasan Jalan Dusun X yang ada Sep. 2 km x 4 m	Jalan Dusun X yang ada di Desa Halaban Desa Halaban Kec. Besitang
14	Pengaspalan Jalan dengan Hot Mix di Dusun VII Sidodadi Sepj. 800 m x 6 m	Dusun VII Sidodadi Desa Sekoci Kec. Besitang Kab.Langkat
15	Pembuatan Bronjong tebing Sungai di Lingkungan IV Kel. Kampung Lama Kelurahan Kampung Lama Sepj. 300 m	Lingkungan IV Kel. Kampung Lama Kelurahan Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat
16	Pembangunan Jalan Tembus antara Kecamatan Besitang dan Kecamatan Pematang Jaya Sepj. 2 km x 4 m	Kecamatan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat
17	Pembangunan Tembok penahan Tanah di Lingkungan V Sei Pucuk Menuju SMA Negeri Kel. Pekan Bestitang Sepj. 50 m	Lingkungan V Sei Pucuk Menuju SMA Negeri Kelurahan Pekan Bestitang Kelurahan Pekan Besitang Kec. Besitang Kab.Langkat
18	Perbaikan Jembatan di Dusun PIR ADB	Dusun PIR ADB Desa PIR ADB Kec. Besitang Kab. Langkat
19	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun VII Kecamatan Hinai Kab. Langkat
20	Jalan Rusak	Dari perbatasan Desa Sukamulia masuk Desa Perapen menuju Kantor Camat Pematang Jaya Desa Perapen Kec. Pematang Jaya
21	Pengerasan jalan Dusun Pajok Desa Adin Tengah Kec, Salapian Sepj.4 m x 2000 m	Jalan Dusun Pajok Desa Adin Tengah Desa Adin Tengah Kec, Salapian,
22	Pengaspalan jalan Dusun I Adin Tengah Kec.Salapian Spj. 4 m x 2000 m	Dusun I Adin Tengah Desa Adin Tengah Desa Adin Tengah Kec, Salapian, Kab.Langkat
23	Pembangunan Jalan Jeramba	Dsn III Desa Kelantan Desa Kelantan Kec. Brandan Barat Kab.Langkat
24	Kesulitan Air Bersih	Desa Kelantan Kec. Brandan Barat Kab.Langkat
25	Pengerasan jalan Dusun Suka Ribu menuju Dusun Lau Buluh Leper Desa Telagah Kec.Sei Bingai Sepj.1500 m x 4 m	Dusun Suka Ribu menuju Dusun Lau Buluh Leper Desa Telagah Desa Telagah Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
26	Pengerasan jalan Dusun Bangun Desa Telagah menuju Dusun Bangun Jahe Desa Rumah Gajah Kec.Sei Bingai Sepj. 2 km x 4 m	Dusun Bangun Desa Telagah menuju Dusun Bangun Jahe Desa Rumah Gajah Desa Rumah Galuh Kec. Sei Bingai Kab.Langkat
27	Perbaikan pondasi jembatan Lau Laden akibat erosi yang harus diperbaiki untuk melalui (sarana perhubungan) 4 Desa	Jembatan Lau Laden Desa Minta Kasih Desa Minta Kasih Kec.Salapian Kab.Langkat
28	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Jalan H. Kulai Dusun II Pringgana Tebing Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Sepj. 2000 m	Jalan H. Kulai Dusun II Pringgana Tebing Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
29	Rehab berat Jembatan Paluh Baru Dusun X Paluh Baru Kec. Gebang Sepj. 45 m	Jembatan Paluh Baru Dusun X Paluh Baru Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
30	Pengaspalan Jalan Tangkahan Batak Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Sepj. 2000 m	Jalan Tangkahan Batak Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
31	Pengaspalan jalan Dusun VIII Desa Pasar Rawa Sepj. 2000 m	Dusun VIII Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
32	Pembuatan Palat Deker Dusun IV Pasar Rawa Hilir Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Sepj.10 m	Dusun IV Pasar Rawa Hilir Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
33	Pembangunan Palat Deker Dusun VI Bangun Sari Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Sepj. 10 m	Dusun VI Bangun Sari Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
34	Pengaspalan jalan Dusun III depan Kantor Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec.Gebang Sepj. 2000 m	Dusun III depan Kantor Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
35	Pembuatan Tembok Penahan Tanah Dusun VIII Kelantan Luar Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Sepj. 50 m	Dusun VIII Kelantan Luar Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
36	Pembuatan Plat Deker Dusun V Terusan Jalan Pustu, jalan Pendidikan Desa Pasar Rawa Kec. Gebang sebanyak 10 buah	Dusun V Terusan Jalan Pustu, jalan Pendidikan Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
37	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan dari Dusun 8 menuju Dusun 11 Randu Gapit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat 3000 m x 4 m	Jalan dari Dusun 8 menuju Dusun 11 Randu Gapit Desa Kwala Begumit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
38	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun I Kecamatan Hinai Kab. Langkat
39	Pembuatan Palat Deker Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Kec.Gebang Sepj. 10 m	Dusun VII Tangkahan Batak Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
40	Jalan Jelek dan Belubang	Lingkungan II Rahmad Jalan Kuini Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat
41	Jalan Jelek dan Berlubang	Jalan Gotong Royong Lingkungan V Kel.Kwala Bingai Kec. Stabat
42	Jalan Jelek dan Berlubang	Jalan Ade Irma Siryani Lingkungan IV Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat
43	Jalan Jelek dan Berlubang	Komplek Veteran ke Lingkungan VI Kelurahan Kwala Bingai Kec. Stabat
44	Jalan Jelek dan Belubang	Lingkunan VII Tegal Rejo Kelurahan Kwala Bingai Kec. Stabat
45	Pengerasan Jln Gunung Semeru Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Sepj. 1000 m x 3 m	Jln Gunung Semeru Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat





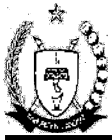
No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
46	Jalan Jelek dan Belubang	Jalan Mesjid Al Furqon Lingk. I Kelurahan Kwala Bingai Kec. Stabat
47	Jalan Jelek dan Berlubang	Jalan Purwosari Lingkungan X Kelurahan Kwala Bingai Kec. Stabat
48	Jalan Jelek dan Berlubang	Jalan Pustu Dusun II Pengubung Antara Desa Suka Jadi Kec. Hinai dengan Desa Jentera Kec. Wampu Desa Suka Jadi Kec. Hinai
49	Banjir, Tidak Adanya Saluran Air	Jalan Utama Desa Suka Maju Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat
50	Jalan Jelek dan Berlubang	Jalan Pendidikan Dusun VI sampai dengan Jalan Siswa Dusun V Desa Paya Rengas Kec. Hinai
51	Banjir, Tidak adanya Saluran Air	Jalan Utama Desa Paya Rengas Desa Paya Rengas Kec. Hinai
52	Jalan Jelek Dan Berlubang	Jalan Mekar Dusun I sampai dengan Jalan Mesjid Dusun II Desa Paya Rengas Kec. Hinai
53	Tidak Adanya Objek Wisata	Jalan Kerangan Dusun V Desa Paya Rengas Kec. Hinai Kab. Langkat
54	Jalan Jelek dan Berlubang	Jalan Utama Dusun IV sampai dengan Plamboyan Dusun III Desa Paya Rengas Kec. Hinai Kab. Langkat
55	Jalan Jelek dan Berlubang	Jalan Budi Utomo Dusun IV Desa Karang Anyar Kec. Secanggang
56	Jalan Jelek dan Berlubang	Jalan Mekar Sari Dusun X Desa Karang Anyar Kec. Secanggang
57	Jalan Jelek dan Berlubang	Jalan Kampung Melayu Dusun VI s/d Dusun VIII Desa Karang Anyar Kec. Secanggang
58	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun V Jalan Sutami Desa Karang Anyar Kec. Secanggang
59	Pengaspalan dengan Hot Mix Jln. Pandawa Dusun Pelita Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sepj. 1500 m x 3 m	Jln. Pandawa Dusun Pelita Desa Karang Rejo Desa Karang Rejo Kec.Stabat
60	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Poncowati Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sepj. 2500 m x 2,5 m	Jl. Poncowati Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Desa Karang Rejo Kec.Stabat
61	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Karya Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sep. 400 m x 2,5 m	Jl. Karya Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
62	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun V Objek Desa Banyumas Kec. Stabat Sepj. 1250 m x 3,5 m	Dusun V Objek Desa Banyumas Desa Banyumas Kec.Stabat
63	Pengaspalan dengan Hot Mix Jln. Karya Bakti Lingkungan I Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Sepj. 500 m x 3 m	Jln. Karya Bakti Lingkungan I Kel. Sidomulyo Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab.Langkat
64	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Jalan Utama Desa Tamaran Kec. Hinai Sepj. 1000 m x 4 m	Jalan Utama Desa Tamaran Desa Tamaran Kec. Hinai Kab.Langkat
65	Banjir, Tidak Adanya Saluran Air	Dusun III Kecamatan Hinai Kab. Langkat
66	Banjir, Tidak Adanya Saluran Air	Dusun VII Kecamatan Hinai Kab. Langkat
67	Jalan Jelek, Berlubang, dan tidak adanya Saluran Air yang mengakibatkan Banjir	Komplek Perumahan Langkat Berseri Kelapa Sawit Kelurahan Perdamaian di Blok A, B, dan C di Kecamatan Stabat Kecamatan Hinai
68	Jembatan Rusak Parah	Jembatan Menuju Perkotaan Desa Karang Gading Kec. Secanggang
69	Terjadinya Longsor	Samping Puskesmas Kecamatan Secanggang Kab. Langkat
70	Pintu Air Rusak	Kecamatan Secanggang Kab. Langkat
71	Banjir	Kecamatan Secanggang Kab. Langkat
72	Jalan Jelek dan Berlubang	Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kab. Langkat
73	Jalan Rusak	Jalan Karya Dari Simpang IV ke Dusun yang dituju Kec. Secanggang
74	Jalan Rusak	Dusun A dan B ke Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kab. Langkat
75	Jalan Rusak	Jalan Pematang Delik menuju Paluh Ibus Panang Kec. Secanggang
76	Tidak Adanya Tembok Penahan Tanah (TPT) Parit	Jalan H. Hasan Perak Dusun II Km. 34 Desa Teluk Meku Kec. Babalan
77	Jalan Rusak	Gang Sumarman Dusun I Titi Hitam Desa Teluk Meku Kec. Babalan
78	Jalan Jelek	Dusun II Bakti Desa Payah Tampak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
79	Tidak Adanya Dermaga	Desa Pulau Sembilan Desa Payah Tampak Kec. Pangkalan Susu
80	Jalan Jelek dan Berlubang	Titi Hitam Desa Teluk Meku Dusun I s/d Dusun V Desa Teluk Meku Kec. Babalan
81	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Jalan Protokol Desa Mangga Kec.Stabat Sepj.2400 m x 4 m	Jalan Protokol Desa Mangga Desa Mangga Kec.Stabat Kab.Langkat
82	Jalan Rusak	Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat
83	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun III Melati dan Dusun IV Sempurna Desa Payah Tampak Kec. Pangkalan Susu
84	Tidak Adanya Jembatan	Dusun IV Pasar Lintang Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat
85	Tidak Adanya Tembok Penahan Tanah (TPT) Parit	Jalan H. Hasan Perak Dusun II Desa Teluk Meku Kec. Babalan
86	Tidak Adanya Tembok Penahan Tanah (TPT) Parit	Jalan H. Hasan Perak Dusun I Titi Hitam Desa Teluk Meku Kec. Babalan
87	Tidak Adanya Tembok Penahan Tanah (TPT) Parit	Jalan Pasar Lintang Dusun IV Desa Teluk Meku Kec. Babalan
88	Jalan Rusak	Gang Jumaris Dusun I Titi Hitam Desa Teluk Meku Kec. Babalan
89	Runtuh, Erosi Parit	Jalan Teluk Kulai Dusun VI Desa Teluk Meku Kec. Babalan
90	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Sepj. 1500 m x 3 m	Jalan Dusun III Melayu Desa Teluk Desa Teluk Kec.Secanggang
91	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun VIII Sido Bangun Desa Teluk Kec. Secanggang Sepj. 1700 m x 3 m	Dusun VIII Sido Bangun Desa Teluk Desa Teluk Kec.Secanggang
92	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Dusun Parit Kaca III s/d Dusun IXLubuk Rotan I Sepj. 3700 m x 3 m	Dusun Parit Kaca III s/d Dusun IXLubuk Rotan I Desa Teluk Desa Teluk Kec.Secanggang
93	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Dusun IX Indah Sari Desa Besilam Lembasah Kec. Wampu Sepj. 1000 m x 3 m	Dusun IX Indah Sari Desa Besilam Lembasah Desa Besilam Lembasah Kec. Wampu
94	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun V Selipit Desa Mangga Kec. Stabat Sepj. 1500 m x 4 m	Jalan Dusun V Selipit Desa Mangga Desa Mangga Kec.Stabat
95	Pengaspalan dengan Hot Mix Benteng Dusun VI ke Dusun II Korong Cina Desa Cempa Kec. Hinai Sepj. 1000 m x 3 m	Benteng Dusun VI ke Dusun II Korong Cina Desa Cempa Desa Cempa Kec. Hinai



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
96	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Tanjung Dusun III Desa Cempa Kec. Hinai Sepj. 1000 m x 3 m	Jl. Tanjung Dusun III Desa Cempa Desa Cempa Kec. Hinai Kab.Langkat
97	Pengaspalan Jalan Abadi Dusun I, II dan III Desa Pertumbukan Kec. Wampu Sepj. 1500 m x 4 m	Jalan Abadi Dusun I, II dan III Desa Pertumbukan Desa Pertumbukan Kec. Wampu
98	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan dari Dusun 8 menuju Dusun 11 Randu Gapit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat 3000 m x 4 m	Jalan dari Dusun 8 menuju Dusun 11 Randu Gapit Desa Kwala Begumit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat
99	Jalan Rusak	Jalan Kartin Dusun I.A Desa Suka Makmur Kec. Binjai
100	Jalan Jelek dan Berlubang	Jalan Lapangan Lingkungan III Dusun III Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai
101	Pengaspalan dengan Hot Mix Jln.KH.Ahmad Dahlan Dusun IV Suko Beno Desa Mangga Kec.Stabat Sepj. 1800 m x 2,5 m	Jln.KH.Ahmad Dahlan Dusun IV Suko Beno Desa Mangga Desa Mangga Kec.Stabat
102	Jalan Rusak	Jalan Pungut Lingk. IV Muka Stasiun Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai
103	Jalan Rusak	Jalan Mucktar dan Jalan Baru Muka Stasiun, Lingkungan IV Muka Stasiun Kelurahan Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat
104	Longsor, Erosi pada sisi parit	Jalan Bakti Dusun VI Desa Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat
105	Longsor, Erosi pada sisi parit	Jalan Bakti Dusun VII Desa Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat
106	Rumah Tidak Layak Huni	Desa Sidomulyo Kec. Binjai Kab. Langkat
107	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun Sei Benang Gang Bisan Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat
108	Jalan Rusak	Jalan Jend. Suprpto Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat
109	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun Tempel Gang Madrasah Desa Mancang Kec. Selesai
110	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun Mawar Gang Waduk Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat
111	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun Tempel Gang Waduk Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat
112	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun Tempel Gang Persatuan Desa Mancang Kec. Selesai
113	Longsor, Erosi pada sisi parit	Jalan Jend. Ahmad Yani Menuju Jalan Jend. Suparman Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat
114	Rumah Tidak Layak Huni	Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat
115	Jalan Rusak	Selesai Selayang di Jalan Agus Salim, Lingkungan II, III, V, VI, XI Kelurahan Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat
116	Erosi pada Sisi Parit	di Jalan Lingkungan Pamah, Jalan Mesjid Lingkungan VI Pamah Dekat Sungai Kelurahan Pekan Selesai Kec. Selesai Kab. Langkat
117	Erosi pada sisi Parit	Jalan Pungut Lingk. IV Muka Stasiun Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai
118	Jalan Rusak	Jalan Pasar Padi Lingkungan XII Kelurahan Pekan Selesai Kec. Selesai
119	Jalan Rusak	Jalan Paya Jambu Lingkungan X Kelurahan Pekan Selesai Kec. Selesai
120	Erosi Pada Sisi Parit	Jalan Inpres Paya Jambu, Lingkungan X Kel.Pekan Selesai Kec. Selesai
121	Erosi Pada Sisi Parit	Jalan Perjuangan Paya Jambu, Lingk. X Kel. Pekan Selesai Kec. Selesai
122	Jalan Rusak	Jalan Sei Sekala Lingkungan I Kelurahan Pekan Selesai Kec. Selesai
123	Jalan Rusak	Jalan Ara Tunggal Lingkungan II Kelurahan Pekan Selesai Kec. Selesai
124	Jalan Jelek dan Berlubang	Jalan Protokol Dusun I dan II Desa Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat
125	Jalan Jelek dan Berlubang, Rusak	Desa PIR ADB Kec. Besitang Kab. Langkat
126	Jalan Jelek dan Berlubang	Desa Tanjung Pasir Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
127	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Gunung Agung Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Sepj. 800 m x 3 m	Jl. Gunung Agung Desa Kwala Begumit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat
128	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Gunung Lawu Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Sepj. 800 m x 3 m	Jl. Gunung Lawu Desa Kwala Begumit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat
129	Lening Parit Kapal Keruk Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Sepj.1400 m	Parit Kapal Keruk Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
130	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Gunung Semeru Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Sepj. 1000 m x 3 m	Jl. Gunung Semeru Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
131	Jalan Rusak	Dusun IV Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
132	Tidak Adanya Irigasi	Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
133	Tidak Adanya Irigasi	Desa Tanjung Pasir Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
134	Tidak Adanya Irigasi	Desa Tanjung Pasir Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
135	Tidak Adanya Irigasi	Desa Tanjung Pasir Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
136	Pengaspalan dengan Hot Mix Jln.Pandawa Dusun Pelita Desa Karang Rejo Kec.Stabat Sepj. 1500m x 3 m	Parit Besar Jln. Mesjid Lingkungan III samping Gang Tower Kel.Sidomulyo Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
137	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Poncowati Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec.Stabat Sepj. 2500 m x 2,5 m	Jl. Poncowati Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
138	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun V Objek Desa Banyumas Kec.Stabat Sepj. 1250 m x 3,5 m	Dusun V Objek Desa Banyumas Desa Banyumas Kec.Stabat
139	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun 5, 6 dan 7 Desa Muka Paya Kec. Hinai Sepj. 1500 m x 3 m	Dusun 5, 6 dan 7 Desa Muka Paya Kec. Hinai Desa Muka Paya Kec. Hinai
140	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Pendidikan Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Sepj. 1000 m x 3 m	Jl. Pendidikan Dusun I Desa Batu Malenggang Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab.Langkat
141	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Poros Desa Dusun Bukit Desa Sumber Mulyo Kec.Wampu Sepj. 1000 m x 4 m	Jalan Poros Desa Dusun Bukit Desa Sumber Mulyo Desa Sumber Mulyo Kec.Wampu Kab.Langkat
142	Pengaspakan dengan Hot Mix Dusun IX Indah Sari Desa Besilam Lembasah Kec.Wampu Sepj. 1000 m x 3 m	Dusun IX Indah Sari Desa Besilam Lembasah Desa Besilam Lembasah Kec. Wampu Kab.Langkat
143	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun VI Parit Kaca III s/d Dusun IX Lubuk Rotan I Desa Teluk Ke.Secanggang Sepj. 3700 m x 3 m	Dusun VI Parit Kaca III s/d Dusun IX Lubuk Rotan I Desa Teluk Desa Teluk Kec.Secanggang Kab.langkat
144	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Protokol Desa Mangga Kec. Stabat Sepj. 2400 m x 4 mk	Jalan Protokol Desa Mangga Desa Mangga Kec.Stabat Kab.Langkat



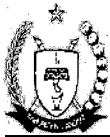
No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
145	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun V Selipit Desa Mangga Kec.Stabat Sepj. 1500 m x 4 m	Jalan Dusun V Selipit Desa Mangga Desa Mangga Kec.Stabat Kab.Langkat
146	Pengaspalan dengan Hot Mix Jln. KH Ahmad Dahlan Dusun IV SUko Beno Desa Mangga Kec.Stabat Sepj.1800 m x 2,5 m	Jln. KH Ahmad Dahlan Dusun IV SUko Beno Desa Mangga Desa Mangga Kec.Stabat Kab.Langkat
147	Pengaspalan dengan Hot Mix Benteng Dusun VI ke Dusun II Lorong Cina Desa Cempa Kec.Hinai Sepj. 1000 m x 3 m	Benteng Dusun VI ke Dusun II Lorong Cina Desa Cempa Desa Cempa Kec. Hinai Kab.Langkat
148	Pengaspalan dengan Hot Mix jalan Tanjung Dusun III Desa Cempa Kec.Hinai Sepj. 1000 m x 3 m	Jalan Tanjung Dusun III Desa Cempa Desa Cempa Kec. Hinai Kab.Langkat
149	Pengerasan jalan Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kec. Stabat Sepj. 1200 m x 5 m	Jalan Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat
150	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Abadi Dusun I,II dan III Desa Pertumbukan Kec.Wampu Sepj.1500 m x 4 m	Jalan Abadi Dusun I,II dan III Desa Pertumbukan Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab.Langkat
151	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun III Melayu Desa Teluk Kec.Secanggang Sepj. 1500 m x 3 m	Dusun III Melayu Desa Teluk Desa Teluk Kec.Secanggang Kab.langkat
152	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Protokol MH Daud Gohor-Bingai Kel.Bingai Kec.Wampu Sepj. 7000 m x 6 m	Jalan Protokol MH Daud Gohor-Bingai Kel.Bingai Kel. Bingai Kec. Wampu Kab.Langkat
153	Pembangunan Paku Bumi di pinggiran Sungai Wampu Dusun VI Kampung Durian Desa Pertumbukan Kec.Wampu	Pinggiran Sungai Wampu Dusun VI Kampung Durian Desa Pertumbukan Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab.Langkat
154	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun I, II dan III Desa Baru VIII Kec. Hinai Sepj. 3500 m x 3 m	Jalan Dusun I, II dan III Desa Baru VIII Desa Baru Pasar VIII Kec.Hinai Kab.Langkat
155	Pemasangan Tiang Listrik sekitar 20 rumah keluarga yang belum mendapatkan penerangan listrik di Dusun Jati Mulyo Desa Sei Bambang Kec.Batang Serangan	Dusun Jati Mulyo Desa Sei Bambang Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
156	Pembangunan Bronjong Sungai Dusun Aman Damai Desa Kuala Musam Kec.Batang Serangan Sepj. 265 m x 5 m	Sungai Dusun Aman Damai Desa Kuala Musam Desa Kuala Musam Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
157	Pengaspalan dengan Lapen Jalan Dusun Karya Sari Desa Kuala Musam Kec.Batang Serangan Sepj. 1780 m x 2,5 m	Jalan Dusun Karya Sari Desa Kuala Musam Desa Kuala Musam Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
158	Pengaspalan jalan Dusun IV sampai Sei Mati Desa ALur Gadung menuju jalan Desa ALur Gadung dan Jalan Buluh Telang Kec. Sawit Seberang Sepj.2000 m x 4 m	Dusun IV sampai Sei Mati Desa ALur Gadung menuju jalan Desa ALur Gadung dan Jalan Buluh Telang Desa Alur Gadung Kec. Sawit Seberang Kab.Langkat
159	Pembuatan Drainase (Gorong-gorong) Dusun Jati Mulyo Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Sepj. 3 x 500 m	Dusun Jati Mulyo Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
160	Pembuatan Bronjong Dusun Tahun Titi Belanga Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Sepj. 300 m	Dusun Tahun Titi Belanga Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
161	Pembuatan Plat Deker Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Uk. 1,5 m x 3,5 m	Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
162	Pembuatan Bronjong pengaman Jembatan Dari Rumah Pak Parmin sampai Miswadi Dusun Tahun Titi Belanga Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Sepj. 30 m	Pengaman Jembatan Dari Rumah Pak Parmin sampai Miswadi Dusun Tahun Titi Belanga Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
163	Pembuatan Plat Deker di belakang Rumah SuyantoDusun Tahun XI Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Uk. 1 x 5 m	Belakang Rumah SuyantoDusun Tahun XI Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
164	Pembuatan Plat Deker Dusun Klonie Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Uk.2,5 m x 6 m	Dusun Klonie Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
165	Jembatan Rusak	Perladangan Namu sialang Dusun Payambelang
166	Tidak adanya Jembatan	Dusun I Namu Unggas
167	Jembatan Rusak	Dusun Wono Rejo
168	Jalan Rusak	Dusun Wono Rejo
169	Jembatan Rusak	Dusun Kampung Ujung (Jalan Menuju Ekowisata Tangkahan)
170	Tidak Adanya Jembatan Gantung Menuju Dusun Namu Gedang	Dusun Namu Gedang
171	Jalan Rusak	Dusun Tegal Rejo
172	Jalan Rusak	Jalan Banjaran Dusun Permadi
173	Jalan Rusak	Gang Kades
174	Jalan Rusak	Dusun Bukit Timur
175	Tidak Adanya Pagar Pemakaman Umum	Dusun Bukit Timur
176	Jalan Jelek	Tambak Rejo s/d Pasar VI
177	Jalan Rusak	Jalan Pertanian Lingkungan IV Sido Sari Luar
178	Jalan Rusak	Dusun VIII Lubuk Tapah
179	Jalan Rusak	Jalan Poniran Lingkungan V Sido Sari Amor
180	Jalan Rusak	Jalan Alga Lingkungan V Sido Sari Amor
181	Jalan Rusak	Pasar III Lingkungan IX Sidomukti Baru
182	Pembangunan Tembok penahan Tanah di Lingkungan V Sei Pucuk Menuju SMA Negeri Sepj. 50 m	Lingkungan V Sei Pucuk Menuju SMA Negeri Kelurahan Pekan Besitang Kelurahan Pekan Besitang Kec. Besitang
183	Pengerasan Jalan Dusun X yang ada di Desa Halaban Kec.Besitang Sep. 2 km x 4 m	Dusun X yang ada di Desa Halaban Desa Halaban Kec. Besitang
184	Pembangunan Jalan Tembus antara Kecamatan Besitang dan Kecamatan Pematang Jaya Sepj. 2 km x 4 m	Kec.Besitang Kec. Besitang
185	Pengaspalan jlan dengan Hot Mix Jalan Utama Lingkungan V Sei Pucuk Kel.Pekan Besitang Kec.Besitang Sepj. 1 km x 4 m	Jalan Utama Lingkungan V Sei Pucuk Kelurahan Pekan Besitang Kec. Besitang
186	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Jl. Tanjak di Dusun PIR ADB Desa PIR ADB Kec.Besitang Sep. 3 km x 4 m	Dusun PIR ADB Desa PIR ADB Desa PIR ADB Kec. Besitang Kab. Langkat
187	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Banjaran Dusun Permadi Desa Padang Cermin Kec.Selesai Sepj.2000 m x 3,5 m	Jalan Banjaran Dusun Permadi Desa Padang Cermin Desa Padang Cermin Kec.Selesai



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
188	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan AMD Dusun II Derat Desa Nambiki Kec.Selesai Sepj. 600 m x 4 m	Jalan AMD Dusun II Derat Desa Nambiki Desa Nambiki Kec.Selesai
189	Pembuatan jembatan Sungai Guldah di Dusun II Gerat/Jalan AMD Desa Nambiki Kec.Selesai Sepj. 5 m x 6 m	Jembatan Sungai Guldah di Dusun II Gerat/Jalan AMD Desa Nambiki Desa Nambiki Kec.Selesai
190	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Poros Sei Mati Desa Selayang Baru Kec.Selesai Sepj. 4000 m x 4 m	Jalan Poros Sei Mati Desa Selayang Baru Desa Selayang Baru Kec.Selesai
191	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Gang Kades Dusun Pasar I Desa Padang Cermin Kec.Selesai Sepj.1000 m x 3 m	Jalan Gang Kades Dusun Pasar I Desa Padang Cermin Desa Padang Cermin Kec.Selesai
192	Jalan Rusak	Dari perbatasan Desa Sukumulia masuk Desa Perapen menuju Kantor Camat Pematang Jaya Desa Perapen Kec. Pematang Jaya Kab.Langkat
193	Jalan rusak	Jalan Ternak menuju Desa Alut Mentawak Aceh Tamiang Dsn XIII Desa Halaban Kec. Besitang Desa Halaban Kec. Besitang Kab.Langkat
194	Lanjutan pengaspalan dengan Hot Mix Pasar 2 Pondok Desa Jentera Kec.Wampu Sepj.4 m x 600 m	Pasar 2 Pondok Desa Jentera Desa Jentera Kec.Wampu Kab.Langkat
195	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun 6 Sepj. 3 m x 1000 m	Dusun 6 Desa Muka Paya Desa Muka Paya Kec. Hinai Kab.Langkat
196	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Sepuncung menuju Desa Pantai Gading Kec.Secanggang Sepj.4 m x 3500 m	Jalan Sepuncung menuju Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec. Secanggang
197	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Selotong Desa Pantai Gading Kec.Secanggang Sepj.4 m x 4500 m	Jalan Selotong Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec. Secanggang
198	Pengapalan dengan Hot Mix Jalan Dusun IV PKL Titi menuju Dusun II Pkl. Pasar Desa Pantai Gading Kec.Secanggang Sepj.3 m x 1500 m	Jalan Dusun IV PKL Titi menuju Dusun II PKL Pasar Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab.Langkat
199	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Kec.Secanggang Sepj.3 m x 1300 m	Dusun IX Sidodadi Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab.Langkat
200	Lening Parit Jalan Dusun VII Merbau Desa Pantai Gading Kec.Secanggang Sepj. 1 m x 1500 m	Parit Jalan Dusun VII Merbau Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab.Langkat
201	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. S.Parman Ujung (Hilir) Dusun 8 Desa Perdamaian Kec.Binjai Sepj. 1500 m x 3 m	Jl. S.Parman Ujung (Hilir) Dusun 8 Desa Perdamaian Kec.Binjai Desa Perdamaian Kec.Binjai Kab.Langkat
202	Bantuan Pergantian Tiang Listrik yang sudah rusak di Lingk. III Sejahtera Kel.Dendang Kec.Stabat	Lingk. III Sejahtera Kel.Dendang Kel.Dendang Kec.Stabat Kab.Langkat
203	Lening Paret Kapal Keruk Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Sepj. 1.400 m	Paret Kapal Keruk Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
204	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Gunung Agung Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Sepj. 800 m x 3 m	Jl. Gunung Agung Desa Kwala Begumit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
205	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan dari Dusun 8 menuju Dusun 11 Randu Gapit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat 3000 m x 4 m	Jalan dari Dusun 8 menuju Dusun 11 Randu Gapit Desa Kwala Begumit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
206	Rabat Beton Gang Bersama Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec. Stabat Sepj. 75 m x 2 m	Gang Bersama Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
207	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Gunung Lawu Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Sepj. 800 m x 3 m	Jl. Gunung Lawu Desa Kwala Begumit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
208	Pengerasan Jln Gunung Semeru Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Sepj. 1000 m x 3 m	Jln Gunung Semeru Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
209	Pengaspalan dengan Hot Mix Jln. Pandawa Dusun Pelita Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sepj. 1500 m x 3 m	Jln. Pandawa Dusun Pelita Desa Karang Rejo Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
210	Pembuatan Bronjong/Tembok penahan parit besar Jl. Mesjid Lingkungan III Samping Gang Tower Kel. Sidomoulyo Kec. Stabat Sepj. 17 m	Jl. Mesjid Lingkungan III Samping Gang Tower Kel. Sidomoulyo Kec. Stabat Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab.Langkat
211	Pembuatan Bronjong/Tembok penahan parit besar Jl. Mesjid Lingkungan III Samping Gang Tower Kel. Sidomoulyo Sepj. 17 m	Jl. Mesjid Lingkungan III Samping Gang Tower Kel. Sidomoulyo Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab.Langkat
212	Lening/Parit Beton Dusun Kota Lama Desa Telaga Jernih Kec.Secanggang Sepj. 800 m	Dusun Kota Lama Desa Telaga Jernih Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab.Langkat
213	Pengaspalan dengan Hot Mix Jln. Pandawa Dusun Pelita Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sepj. 1500 m x 3 m	Jln. Pandawa Dusun Pelita Desa Karang Rejo Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
214	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun 5, 6, 7 Desa Muka Paya Kec. Hinai Sepj. 1500 m x 3 m	Jalan Dusun 5, 6, 7 Desa Muka Paya Desa Muka Paya Kec. Hinai Kab.Langkat
215	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun V Objek Desa Banyumas Kec. Stabat Sepj. 1250 m x 3,5 m	Dusun V Objek Desa Banyumas Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat
216	Pengaspalan dengan Hot Mix Jln.Karya Bakti Lingkungan I Kelurahan Sidomulyo Kec.Stabat Sepj.500 m x 3 m	Jln.Karya Bakti Lingkungan I Kelurahan Sidomulyo Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab.Langkat
217	Pengaspalan jalan dengan Lapen Jl. Makam Dusun I Desa Tamaran Kec. Hinai Sepj. 500 m x 3 m	Jl. Makam Dusun I Desa Tamaran Desa Tamaran Kec. Hinai Kab.Langkat
218	Pengaspalan kalan dengan Hot Mix Jln. Pendidikan Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Sepk. 1000 m x 3 m	Jln. Pendidikan Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab.Langkat
219	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Poros Desa Sumber Mulyo/Bukit Batu Kec. Wampu Sepj. 2000 m x 3 m	Jalan Poros Desa Sumber Mulyo/Bukit Batu Kec. Wampu Desa Sumber Mulyo Kec.Wampu Kab.Langkat
220	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun VIII Sido Bangun Desa Teluk Kec. Secanggang Sepj. 1700 m x 3 m	Dusun VIII Sido Bangun Desa Teluk Kec. Secanggang Desa Teluk Kec.Secanggang Kab.langkat
221	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl.Cendrawasih Lingkungan VII Kel.Kwala Bingai Kec. Stabat Sepj. 450 m x 3 m	Jl.Cendrawasih Lingkungan VII Kel.Kwala Bingai Kec. Stabat Kel. Kwala Bingai Kec.Stabat Kab.Langkat
222	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Dusun IX Indah Sari Desa Besilam Lembasah Kec. Wampu Sepj. 1000 m x 3 m	Dusun IX Indah Sari Desa Besilam Lembasah Kec. Wampu Desa Besilam Lembasah Kec. Wampu Kab.Langkat
223	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Dusun Parit Kaca III s/d Dusun IXLubuk Rotan I Desa Teluk Sepj. 3700 m x 3 m	Dusun Parit Kaca III s/d Dusun IXLubuk Rotan I Desa Teluk Kec. Secanggang Desa Teluk Kec.Secanggang Kab.langkat
224	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun III Melayu Desa Teluk Kec. Secanggang Sepj. 1500 m x 3 m	Jalan Dusun III Melayu Desa Teluk Kec. Secanggang Desa Teluk Kec.Secanggang Kab.langkat



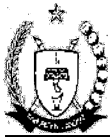
No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
225	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan dari Dusun 8 menuju Dusun 11 Randu Gapit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat 3000 m x 4 m	Jalan dari Dusun 8 menuju Dusun 11 Randu Gapit Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Kab.Langkat
226	Lening Paret Kapal Keruk Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Sepj. 1.400 m	Paret Kapal Keruk Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
227	Pengerasan Jln Gunung Semeru Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Sepj. 1000 m x 3 m	Jln Gunung Semeru Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
228	Pengerasan jalan Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kec. Stabat Sepj. 1200 m x 5 m	Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kec. Stabat Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat
229	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Abadi Dusun I,II dan III Desa Pertumbukan Kec.Wampu Sepj.1500 m x 4 m	Jalan Abadi Dusun I,II dan III Desa Pertumbukan Kec.Wampu Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab.Langkat
230	Pengaspalan dengan Hot Mix jalan Tanjung Dusun III Desa Cempa Kec.Hinai Sepj. 1000 m x 3 m	jalan Tanjung Dusun III Desa Cempa Kec.Hinai Desa Cempa Kec. Hinai Kab.Langkat
231	Pengaspalan dengan Hot Mix Benteng Dusun VI ke Dusun II Lorong Cina Desa Cempa Kec.Hinai Sepj. 1000 m x 3 m	Benteng Dusun VI ke Dusun II Lorong Cina Desa Cempa Kec.Hinai Desa Cempa Kec. Hinai Kab.Langkat
232	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun V Selipit Desa Mangga Kec.Stabat Sepj. 1500 m x 4 m	Jalan Dusun V Selipit Desa Mangga Kec.Stabat Desa Mangga Kec.Stabat Kab.Langkat
233	Pengaspalan dengan Hot Mix Jln. KH Ahmad Dahlan Dusun IV Suko Beno Desa Mangga Kec.Stabat Sepj.1800 m x 2,5 m	Jln. KH Ahmad Dahlan Dusun IV Suko Beno Desa Mangga Kec.Stabat Desa Mangga Kec.Stabat Kab.Langkat
234	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Protokol Desa Mangga Kec. Stabat Sepj. 2400 m x 4 m	Jalan Protokol Desa Mangga Kec. Stabat Desa Mangga Kec.Stabat Kab.Langkat
235	Pengaspalan dengan Hot Mix Jln. Pandawa Dusun Pelita Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sepj. 1500 m x 3 m	Jln. Pandawa Dusun Pelita Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
236	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun V Objek Desa Banyumas Kec. Stabat Sepj. 1250 m x 3,5 m	Dusun V Objek Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat
237	Pengaspalan dengan Hot Mix Jln.Karya Bakti Lingkungan I Kelurahan Sidomulyo Kec.Stabat Sepj.500 m x 3 m	Jln.Karya Bakti Lingkungan I Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab.Langkat
238	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun VIII Sido Bangun Desa Teluk Kec. Secanggang Sepj. 1700 m x 3 m	Desa Teluk Desa Teluk Kec.Secanggang Kab.langkat
239	Pengaspalan kalan dengan Hot Mix Jln. Pendidikan Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Sepk. 1000 m x 3 m	Jln. Pendidikan Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab.Langkat
240	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Dusun IX Indah Sari Desa Besilam Lembasah Kec. Wampu Sepj. 1000 m x 3 m	Desa Besilam Lembasah Desa Besilam Lembasah Kec. Wampu Kab.Langkat
241	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun III Melayu Desa Teluk Kec. Secanggang Sepj. 1500 m x 3 m	Jalan Dusun III Melayu Desa Teluk Kec.Secanggang Kab.langkat
242	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun 5, 6, 7 Desa Muka Paya Kec. Hinai Sepj. 1500 m x 3 m	Jalan Dusun 5, 6, 7 Desa Muka Paya Kec. Hinai Kab.Langkat
243	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Protokol Desa Mangga Kec. Stabat Sepj. 2400 m x 4 m	Jalan Protokol Desa Mangga Desa Mangga Kec.Stabat Kab.Langkat
244	Pengaspalan dengan Hot Mix Jln. KH Ahmad Dahlan Dusun IV Suko Beno Desa Mangga Kec.Stabat Sepj.1800 m x 2,5 m	Jln. KH Ahmad Dahlan Dusun IV Suko Beno Desa Mangga Desa Mangga Kec.Stabat Kab.Langkat
245	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun V Selipit Desa Mangga Kec.Stabat Sepj. 1500 m x 4 m	Jalan Dusun V Selipit Desa Mangga Kec.Stabat Desa Mangga Kec.Stabat Kab.Langkat
246	Pengaspalan dengan Hot Mix jalan Tanjung Dusun III Desa Cempa Kec.Hinai Sepj. 1000 m x 3 m	jalan Tanjung Dusun III Desa Cempa Desa Cempa Kec. Hinai Kab.Langkat
247	Tebing Sungai Longsor	Kelurahan Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat
248	Lening Paret Kapal Keruk Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Sepj. 1.400 m	Paret Kapal Keruk Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
249	Pengaspalan dengan Hot Mix Jln. Pandawa Dusun Pelita Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sepj. 1500 m x 3 m	Jln. Pandawa Dusun Pelita Desa Karang Rejo Kec. Stabat Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
250	Pembangunan Jalan Tembus antar Kecamatan	Kec. Besitang Kab. Langkat
251	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun V Objek Desa Banyumas Kec. Stabat Sepj. 1250 m x 3,5 m	Dusun V Objek Desa Banyumas Kec. Stabat Desa Banyumas Kec.Stabat Kab.Langkat
252	Pengaspalan jalan dengan Lapen Jl. Makam Dusun I Desa Tamaran Kec. Hinai Sepj. 500 m x 3 m	Jl. Makam Dusun I Desa Tamaran Kec. Hinai Desa Tamaran Kec. Hinai Kab.Langkat
253	Pengaspalan dengan Hot Mix Jln.Karya Bakti Lingkungan I Kelurahan Sidomulyo Kec.Stabat Sepj.500 m x 3 m	Jln.Karya Bakti Lingkungan I Kelurahan Sidomulyo Kec.Stabat Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab.Langkat
254	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun 5, 6, 7 Desa Muka Paya Kec. Hinai Sepj. 1500 m x 3 m	Jalan Dusun 5, 6, 7 Desa Muka Paya Kec. Hinai Desa Muka Paya Kec. Hinai Kab.Langkat
255	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Poncowati Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sepj. 2500 m x 2,5 m	Jl. Poncowati Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
256	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun III Melayu Desa Teluk Kec. Secanggang Sepj. 1500 m x 3 m	Jalan Dusun III Melayu Desa Teluk Kec. Secanggang Desa Teluk Kec.Secanggang Kab.langkat
257	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun VIII Sido Bangun Desa Teluk Kec. Secanggang Sepj. 1700 m x 3 m	Dusun VIII Sido Bangun Desa Teluk Kec. Secanggang Desa Teluk Kec.Secanggang Kab.langkat
258	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Protokol Desa Mangga Kec. Stabat Sepj. 2400 m x 4 m	Jalan Protokol Desa Mangga Kec. Stabat Desa Mangga Kec.Stabat Kab.Langkat
259	Pengaspalan dengan Hot Mix Jln. KH Ahmad Dahlan Dusun IV Suko Beno Desa Mangga Kec.Stabat Sepj.1800 m x 2,5 m	Jln. KH Ahmad Dahlan Dusun IV Suko Beno Desa Mangga Kec.Stabat Desa Mangga Kec.Stabat Kab.Langkat
260	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun V Selipit Desa Mangga Kec.Stabat Sepj. 1500 m x 4 m	Jalan Dusun V Selipit Desa Mangga Kec.Stabat Desa Mangga Kec.Stabat Kab.Langkat
261	Pengaspalan dengan Hot Mix Benteng Dusun VI ke Dusun II Lorong Cina Desa Cempa Kec.Hinai Sepj. 1000 m x 3 m	Benteng Dusun VI ke Dusun II Lorong Cina Desa Cempa Kec.Hinai Desa Cempa Kec. Hinai Kab.Langkat
262	Pengaspalan dengan Hot Mix jalan Tanjung Dusun III Desa Cempa Kec.Hinai Sepj. 1000 m x 3 m	jalan Tanjung Dusun III Desa Cempa Kec.Hinai Desa Cempa Kec. Hinai Kab.Langkat
263	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Abadi Dusun I,II dan III Desa	Jalan Abadi Dusun I,II dan III Desa Pertumbukan Kec.Wampu Desa



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
	Pertumbukan Kec. Wampu Sepj.1500 m x 4 m	Pertumbukan Kec. Wampu Kab.Langkat
264	Jalan Rusak	Dusun I Telaga Hitam dari Perbatasan Desa Limau Mungkur sampai rumah Bapak Nursakum Desa Pematang Tengah
265	Jalan Rusak	Jalan Pendidikan Dusun III Menuju Dusun II dan Dusun I Nambertung
266	Erosi Pada Sisi Sungai	Dusun Mandailing
267	Kantor Lurah Sudah Tidak Layak	Kelurahan Pekan Besitang
268	Jalan Rusak	Dusun VII Sidodadi
269	Jalan Rusak	Dusun Pir ADB
270	Jembatan Rusak	Dusun PIR ADB
271	Jalan Rusak	Jalan Utama Lingkungan V Sei Pucuk Menuju SMA NEGERI
272	Jalan Rusak	Dusun X yang ada di Desa Halaban
273	Jalan Rusak	Jalan S.Parman Ujung (Hilir) Dusun 8
274	Tidak Adanya Bronjong Sungai	Dusun XVI dan XVII
275	Jalan Rusak	Dusun 12
276	Jalan Rusak	Dusun XI, XII dan XIII
277	Jalan Rusak	Dusun XVI
278	Jalan Rusak	Gang Wajar Dusun I
279	Jalan Rusak	Dusun XIV dan XV
280	Jalan Rusak	Jalan Banjaran Dusun X
281	Jalan Rusak	Jalan Sei Mati
282	Tidak Adanya Jembatan Sungai Guldah	Dusun II Gerat/ Jalan AMD
283	Jalan Rusak	Jalan AMD Dusun II Gerat
284	Tidak Adanya TPT (Tembok Penahan Tanah)	Kelurahan Pekan Besitang
285	Kesulitan Air Bersih	Desa Kelantan Kec. Brandan Barat Kab.Langkat
286	Jalan Rusak	Desa Halaban Kec. Besitang Kab.Langkat
287	Jalan Rusak	Desa Perapen Kec. Pematang Jaya Kab.Langkat
288	Kesulitan Air Bersih	Desa Kelantan Kec. Brandan Barat Kab.Langkat
289	Jalan Rusak	Desa Halaban Kec. Besitang Kab.Langkat
290	Tebing Sungai Longsor	Kelurahan Kampung Lama Kec. Besitang Kab. Langkat
291	Pembangunan Jalan Tembus antar Kecamatan	Kec. Besitang Kab. Langkat
292	Jalan Rusak	Dusun VII SIDODADI
293	Jalan Rusak	Dusun Pir ADB
294	Jembatan Rusak	Dusun PIR ADB
295	Jalan Rusak	Jalan Utama Lingkungan V Sei Pucuk Menuju SMA NEGERI
296	Tidak Adanya TPT (Tembok Penahan Tanah)	Kelurahan Pekan Besitang
297	Jalan Rusak	Dusun X yang ada di Desa Halaban
298	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Ternak menuju Desa Alut Mentawak Aceh Tamiang Dsn XIII Desa Halaban Sepj.2km x 4km	Jalan Ternak menuju Desa Alut Mentawak Aceh Tamiang Dsn XIII Desa Halaban Kec. Besitang Kab.Langkat
299	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix di Lingkungan V Sei Pucuk menuju SMA Negeri Sepj. 250 m x 3 m	Lingkungan V Sei Pucuk menuju SMA Negeri Kelurahan Pekan Besitang Kelurahan Pekan Besitang Kec. Besitang Kab.Langkat
300	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix dari Jln Dusun Prasetia Datuk Rubiah Desa Suka Mulia menuju ke Dusun Kota Lama I dan Dusun Blok E depan Masjid Mafaatiful Huda Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Sepj.1700 m x 3 m	Jln Dusun Prasetia Datuk Rubiah Desa Suka Mulia menuju ke Dusun Kota Lama I dan Dusun Blok E depan Masjid Mafaatiful Huda Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab.Langkat
301	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Poncowati Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sepj. 2500 m x 2,5 m	Jl. Poncowati Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
302	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Poros Desa Sumber Mulyo/Bukit Batu Kec. Wampu Sepj. 2000 m x 3 m	Jalan Poros Desa Desa Sumber Mulyo Kec.Wampu Kab.Langkat
303	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun IV menuju Dusun V Desa Pertumbukan Kec.Wampu Sepj.800 m x 3 m	Jalan Dusun IV menuju Dusun V Desa Pertumbukan Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab.Langkat
304	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Dusun V menuju Dusun IV Veteran Desa Pertumbukan Kec.Wampu Sepj. 1500 m x 2,5 m	Dusun V menuju Dusun IV Veteran Desa Pertumbukan Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab.Langkat
305	Pengaspalan dengan Hot Mix Gang Salak Dusun IV Kacangan s/d Dusun VI Kacangan Desa Karang Gading Sepj. 1700 m x 3 m	Gang Salak Dusun IV Kacangan s/d Dusun VI Kacangan Desa Karang Gading Desa Karang Gading Kec.Secanggang Kab.Langkat
306	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Jalan Desa Timbang Lawan Kec. Bahorok Sepj.1.000 m x 4 m	Jalan Desa Timbang Lawan Desa Timbang Lawan Kec.Bahorok Kab.Langkat
307	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun VI Desa Suka Rakyat Kec. Bahorok Sepj. 1.000 m x 4 m	Jalan Dusun VI Desa Suka Rakyat Desa Suka Rakyat Kec. Bahorok Kab.Langkat
308	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Jalan Desa Perkebunan Bungara kec. Bahorok Sepj. 2.500 m x 4 m	Jalan Desa Perkebunan Bungara Desa Perkebunan Bungara Kec. Bahorok Kab.Langkat
309	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun I Telaga Hitam dari Perbatasan Desa Limau Mungkur sampai rumah Bapak Nursakum Sepj.3 km x 4 m	Dusun I Telaga Hitam dari Perbatasan Desa Limau Mungkur sampai rumah Bapak Nursakum Desa Pematang Tengah Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab.Langkat
310	Rehab Berat Kantor Lurah Pekan Besitang Kec. Besitang	Kantor Lurah Pekan Besitang Kelurahan Pekan Besitang Kec. Besitang
311	Pengaspalan Jalan dengan Hot Mix di Dusun VII Sidodadi Desa Sekoci Kec.Besitang Sepj. 800 m x 6 m	Dusun VII Sidodadi Desa Sekoci Desa Sekoci Kec. Besitang Kab.Langkat
312	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun I Telaga Hitam dari Perbatasan Desa Limau Mungkur sampai rumah Bapak Nursakum Sepj.3 km x 4 m	Dusun I Telaga Hitam dari Perbatasan Desa Limau Mungkur sampai rumah Bapak Nursakum Desa Pematang Tengah Desa Pematang Tengah Kec. Pematang Jaya Kab.Langkat



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
313	Pengaspalan jalan dari Simpang Tanjung Keliling menuju Dusun Suka Jahe Desa Minta Kasih Kec.Salapian Sepj.1.200 m x 3 m	Simpang Tanjung Keliling menuju Dusun Suka Jahe Desa Minta Kasih Desa Minta Kasih Kec.Salapian Kab.Langkat
314	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix di Lingkungan V Sei Pucuk menuju SMA Negeri Kel. Pekan Besitang Sepj. 250 m x 3 m	Lingkungan V Sei Pucuk menuju SMA Negeri Kelurahan Pekan Besitang Kelurahan Pekan Besitang Kec. Besitang Kab.Langkat
315	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Gunung Agung Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Sepj. 800 m x 3 m	Jl. Gunung Agung Desa Kwala Begumit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
316	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun 5, 6, 7 Desa Muka Paya Kec. Hinai Sepj. 1500 m x 3 m	Jalan Dusun 5, 6, 7 Desa Muka Paya Desa Muka Paya Kec. Hinai Kab.Langkat
317	Pengerukan Sungai dari Desa Jaring Halus ke Desa Pematang Buluh Kec.Secanggang	Sungai Desa Jaring Halus sampai Desa Pematang Buluh Desa Jaring Halus Kec.Secanggang Kab.Langkat
318	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Gunung Agung Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Sepj. 800 m x 3 m	Jl. Gunung Agung Desa Kwala Begumit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
319	Lening Paret Kapal Keruk Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Sepj. 1.400 m	Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
320	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix dari Jln Dusun Prasetia Datuk Rubiah Desa Suka Mulia menuju ke Dusun Kota Lama I dan Dusun Blok E depan Masjid Mafaatiful Huda Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Sepj.1700 m x 3 m	Jln Dusun Prasetia Datuk Rubiah Desa Suka Mulia menuju ke Dusun Kota Lama I dan Dusun Blok E depan Masjid Mafaatiful Huda Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab.Langkat
321	Pengaspalan jalan dengan Lapeh Jl. Makam Dusun I Desa Tamaran Kec. Hinai Sepj. 500 m x 3 m	Jl. Makam Dusun I Desa Tamaran Desa Tamaran Kec. Hinai Kab.Langkat
322	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun F2 Desa Telaga Jernig Kec.Secanggang Sepj. 700 m x 3 m	Jalan Dusun F2 Desa Telaga Jernig Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab.Langkat
323	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Poros Desa Sumber Mulyo/Bukit Batu Kec. Wampu Sepj. 2000 m x 3 m	Jalan Poros Desa Sumber Mulyo/Bukit Batu Desa Sumber Mulyo Kec.Wampu Kab.Langkat
324	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Karya Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Kec.Stabat Sepj. 400 m x 2,5 m	Jl. Karya Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
325	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl.Poros Desa Sumber Mulyo/Bukit Batu Kec. Wampu Sepj.2000 m x 3 m	Jl.Poros Desa Sumber Mulyo/Bukit Batu Kec. Wampu Desa Sumber Mulyo Kec.Wampu Kab.Langkat
326	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun VIII Sido Bangun Desa Teluk Kec. Secanggang Sepj. 1700 m x 3 m	Dusun VIII Sido Bangun Desa Teluk Desa Teluk Kec.Secanggang Kab.langkat
327	Jalan Rusak	Dusun Handayani Desa Sido Makmur
328	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun VIII Rintis menuju Dusun I Pasar II Desa Pantai Gading Sepj. 3 m x 1400 m	Jalan Dusun VIII Rintis menuju Dusun I Pasar II Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab.Langkat
329	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. S.Parman Ujung (Hilir) Dusun 8 Desa Perdamaian Kec.Binjai Sepj. 1500 m x 3 m	Jl. S.Parman Ujung (Hilir) Dusun 8 Desa Perdamaian Desa Perdamaian Kec.Binjai Kab.Langkat
330	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Abadi Dusun I,II dan III Desa Pertumbukan Kec.Wampu Sepj.1500 m x 4 m	Jalan Abadi Dusun I,II dan III Desa Pertumbukan Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab.Langkat
331	Pengaspalan dengan Hot Mix di Dusun I Musam Pembangunan dari Batas Desa Musam Kendit sampai dengan Dusun 3 Telkom Kec.Bahorok Sepj.975 m	Dusun I Desa Sei Musam Pembangunan, dari Batas Desa Musam Kendit sampai dengan Dusun 3 Telkom Desa Sei Musam Pembangunan Kec.Bahorok Kab.Langkat
332	jalan rusak	Kecamatan Bahorok
333	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix dari Jln Dusun Prasetia Datuk Rubiah Desa Suka Mulia menuju ke Dusun Kota Lama I dan Dsn Blok E depan Masjid Mafaatiful Huda Sepj.1700mx3m	Jln Dusun Prasetia Datuk Rubiah Desa Suka Mulia menuju ke Dusun Kota Lama I dan Dusun Blok E depan Masjid Mafaatiful Huda Desa Telaga Jernih Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab.Langkat
334	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Dusun Parit Kaca III s/d Dusun IX Lubuk Rotan I Desa Teluk Sepj. 3700 m x 3 m	Dusun Parit Kaca III s/d Dusun IX Lubuk Rotan I Desa Teluk Desa Teluk Kec.Secanggang Kab.langkat
335	Perbaikan jembatan di Dusun Kampung Baru Desa Batiu Jonjong Kec.Bahorok sebanyak 1 Unit	Dusun Kampung Baru Desa Batiu Jonjong Desa Batiu Jonjong Kec.Bahorok Kab.Langkat
336	Mohon aliran listrik ke Dusun Lau Berun Desa Kuta Gajah	Dusun Lau Berun Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru
337	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix di Dusun VI Telkom ke Dsn.Tg.Beringin Desa Parangguam Sepj. 3 km x 3 m	Dusun VI Telkom ke Dsn.Tg.Beringin Desa Parangguam Kec.Salapian Kab.Langkat
338	Pengaspalan jalan di Dusun V Batu Lima Desa Tanjung Lenggang	Dusun V Batu Lima Desa Tanjung Lenggang Desa Tanjung Lenggang Kec.Bahorok Kab.Langkat
339	Lanjutan pengaspalan jalan lingkari di seputaran Desa Lau Damak, Desa Batu Jonjong, Desa Ujung Bandar, Desa Simpang Pulu Rambung dan Desa Empus	Kec. Bahorok
340	Pengaspalan dengan Hot Mix dari simpang Pos Polisi Marike s/d Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru Sepj.4000 m x 4 m	Dari simpang Pos Polisi Marike s/d Desa Kuta Gajah Desa Kuta Gajah Kec.Bahorok Kab.Langkat
341	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix (Lanjutan) Jalan Dusun Mbacang Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru Sepj.1000 m x 4 m	Jalan Dusun Mbacang Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru Kab.Langkat
342	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix (Lanjutan) dari jembatan Sungai Wampu menuju SPG Salam Dusun Cinta Rakyat Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru Sepj.1000 m x 4 m	Dari jembatan Sungai Wampu menuju SPG Salam Dusun Cinta Rakyat Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru Kab.Langkat
343	Mohon aliran listrik ke Dusun Lau Berun	Dusun Lau Berun Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru Kab.Langkat
344	Pembuatan Bronjong di Dusun Sungai Tukun Desa Kaperas Kec.Kutambaru, mohon diselesaikan	Dusun Sungai Tukun Desa Kaperas Desa Kaperas Kec.Kutambaru Kab.Langkat
345	Lanjutan pengaspalan jalan Desa Namotongan Kec.Kutambaru Sepj. 700 m	Jalan Desa Namotongan Desa Namotongan Kec.Kutambaru Kab.Langkat
346	Jalan rusak	Dusun I Musam Pembangunan dari Batas Desa Musam Kendit s/d Dusun 3 Telkom
347	Pembuatan Bronjong di Sungai Melati Dusun Kampung I Desa Mekar Sawit Kec.Sawit Seberang Sepj. 250 m	Sungai Melati Dusun Kampung I Desa Mekar Sawit Desa Mekar Sawit Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat
348	Lanjutan pengaspalan dari Desa Alur Gadung menuju Kel.Sawit Seberang Kec.Sawit Seberang Sepj. 2500 m	Dari Desa Alur Gadung menuju Kel.Sawit Seberang Desa Alur Gadung Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat
349	Pembuatan Parit Beton di Dusun Kampung I Desa Mekar Sawit Kec.Sawit Seberang Sepj.1000 m	Dusun Kampung I Desa Mekar Sawit Desa Mekar Sawit Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat

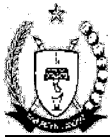


No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
350	Pengerukan Sungai di Dusun I Desa Mekar Sawit	Dusun I Desa Mekar Sawit Desa Mekar Sawit Kec.Sawit Seberang
351	Pemasangan Paving Blok halaman Kantor Camat Sawit Seberang Sepj. 1000 m	Halaman kantor Camat Sawit Seberang Desa Sawit Seberang Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat
352	Lanjutan pembuatan pagar kantor Camat Seberang Sepj.2,5 m x 310 m	Kantor Camat Seberang Desa Sawit Seberang Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat
353	Pembangunan Plat Deker Kantor Camat Sawit Seberang Uk. 3 m x 10 m	Plat Deker Kantor Camat Sawit Seberang Desa Sawit Seberang Kec.Sawit Seberang
354	Jalan rusak	Desa Tanjung Lenggang
355	Perbaikan Titi Permanen di Sungai Penilah Desa Parangguam Kec.Salapian Sepj.30 m	Titi Permanen di Sungai Penilah Desa Parangguam Kec.Salapian
356	Jembatan terlalu kecil untuk dilewati mobil	Dusun Kampung Baru Desa Batu Jong Jong
357	Tidak adanya penerangan listrik	Desa Ujung Bandar
358	Jalan masih berbatu dan berlubang	Jalan protokol perbatasan perkebunan LNK Bukit Lawang s/d perbatasan Desa Sei Musam Kec. Batang Sarangan
359	Jalan rusak	Dusun VI desa Timbang Lawan menuju Desa Suka Rakyat
360	jalan rusak	Dusun Cinta Rakyat
361	jalan rusak	Dusun Cinta Rakyat
362	Jalan Rusak	Dusun VIII Jalan Utama Menuju Sirapit
363	Jalan Rusak	Desa Garunggung Ke Batas Desa Parangguan
364	Jalan rusak	Dusun Cinta Rakyat
365	Tidak Adanya Aliran Listrik	Dusun Lau Berun
366	Erosi Pada Sisi Sungai	Dusun Sungai Tukun Desa
367	jalan rusak	Desa Namotongan
368	Jalan Rusak	Dusun VI Telkom Ke Dusun Tanjung Beringin
369	Jembatan Rusak	Kecamatan Salapian
370	Jalan Rusak	Dusun IV Manggusta Sampai Dusun I Parangguam
371	Jalan Rusak	Dusun Namu Grogro
372	Jalan Rusak	Desa Ujung Teran Dari Dusun Pocowarna Ke Tanjung Langkat
373	Mohon Rabat Beton	Kuta Male Lingkungan V Namo Kumbahang
374	Kurangnya Tiang Listrik	Lingkungan V Namo Kumbahang
375	Tidak Ada Lampu Jalan	Lingkungan V Namo Kumbahan
376	Tidak Ada Jembatan/ Jembatan Rusak	Lingkungan V Namo Kumbahang
377	Rumah Ibadah Rusak/ Tidak Layak	Lingkungan V Namo Kumbahang
378	Erosi Tanah Persawahan	Dusun I Mandailing Desa Makmur
379	Jalan Rusak	Lingkungan Sei Tembo Menuju Dusun Inpres Desa Sido Makmur
380	Jalan Rusak	Dusun Inpres Desa Sido Makmur
381	Jalan rusak	Dusun Mbancang
382	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan dari Dusun 8 menuju Dusun 11 Randu Gapit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat 3000 m x 4 m	Jalan dari Dusun 8 menuju Dusun 11 Randu Gapit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
383	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun F2 Desa Telaga Jernig Kec.Secanggang Sepj. 700 m x 3 m	Jalan Dusun F2 Desa Telaga Jernig Kec.Secanggang Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab.Langkat
384	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix dari Jln Dusun Prasetia Datuk Rubiah Desa Suka Mulia menuju ke Dsn Kota Lama I dan Dsn Blok E depan Masjid Mafaatiful Huda Sepj.1700 m x 3 m	Jln Dusun Prasetia Datuk Rubiah Desa Suka Mulia menuju ke Dusun Kota Lama I dan Dusun Blok E depan Masjid Mafaatiful Huda Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang
385	Pengaspalan kalan dengan Hot Mix Jln. Pendidikan Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Sepk. 1000 m x 3 m	Jln. Pendidikan Dusun I Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Desa Batu Malenggang Kec. Hinai Kab.Langkat
386	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun F2 Desa Telaga Jernig Kec.Secanggang Sepj. 700 m x 3 m	Jalan Dusun F2 Desa Telaga Jernig Kec.Secanggang Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab.Langkat
387	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Dusun IX Indah Sari Desa Besilam Lembasah Kec. Wampu Sepj. 1000 m x 3 m	Dusun IX Indah Sari Desa Besilam Lembasah Kec. Wampu Desa Besilam Lembasah Kec. Wampu Kab.Langkat
388	Kurangnya Penerangan	Dusun Petak Dua
389	Jalan Rusak	Desa Sido Makmur
390	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun 2 dan 3 Desa Tanjung Keriahan menuju Desa Aman Damai Sepj.1000 m x 3 m	Dusun 2 dan 3 Desa Tanjung Keriahan menuju Desa Aman Damai Desa Tanjung Keriahan Kec.Sirapit Kab.Langkat
391	Lanjutan pengaspalan dengan Hot Mi Dusun 1 Desa Sidorejo Kec.Sirapit Sepj. 600 m x 3 m	Dusun 1 Desa Sidorejo Kec.Sirapit Desa Sidorejo Kec.Sirapit Kab.Langkat
392	Pengaspalan dengan Hot Mix di Desa Pulau Semikat Kec.Sirapit Sepj. 2000 m x 3 m	Desa Pulau Semikat Kec.Sirapit Desa Pulau Semikat Kec.Sirapit Kab.Langkat
393	Nomalisasi Sungai Kemuyak Dusun 1 Paya Rego Desa Gunung Tinggi Kec.Sirapit Sepj.1000 m	Sungai Kemuyak Dusun 1 Paya Rego Desa Gunung Tinggi Desa Gungung Tinggi Kec.Sirapit Kab.Langkat
394	Pengaspalan Gang Pertanian Dusun Paya Rego Desa Gunung Tinggi Kec.Sirapit Sepj. 1000 m x 2,5 m	Gang Pertanian Dusun Paya Rego Desa Gunung Tinggi Desa Gungung Tinggi Kec.Sirapit Kab.Langkat
395	Perbaikan Jembatan Dusun Paya Rego Desa Gunung Tinggi Kec.Sirapit Sepj.8 m x 4 m	Jembatan Dusun Paya Rego Desa Gunung Tinggi Desa Gungung Tinggi Kec.Sirapit Kab.Langkat
396	Pembangunan Irigasi pengairan sawah di Desa Sidorejo , Pulau Semikat dan Gunung Tinggi Kec.Sirapit	Desa Sidorejo , Pulau Semikat dan Gunung Tinggi Desa Sidorejo Kec.Sirapit Kab.Langkat
397	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Dusun Parit Kaca III s/d Dusun IX Lubuk Rotan I Desa Teluk Sepj. 3700 m x 3 m	Dusun Parit Kaca III s/d Dusun IX Lubuk Rotan I Desa Teluk Kec. Secanggang Desa Teluk Kec.Secanggang Kab.langkat
398	Pembuatan Bronjong di Dusun Suka Berbakti di Desa Suka Pulung Kec.Sirapit Sepj.1000 m	Dusun Suka Berbakti di Desa Suka Pulung Desa Suka Pulung Kec.Sirapit Kab.Langkat





No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
399	Pengaspalan dengan Hot Mix Desa Sendang Rejo jalan protokol menuju Desa Sidomulyo Kec.Binjai Sepj.2500 m x 3 m	Desa Sendang Rejo jalan protokol menuju Desa Sidomulyo Desa Sendang Rejo Kec.Binjai Kab.Langkat
400	Pembuatan Bronjong penahan tanggul di Dusun 7 Desa Aman Damai Kec.Sirapit Sepj.500 m	Dusun 7 Desa Aman Damai Desa Aman Damai Kec.Sirapit Kab.Langkat
401	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Padat Karya Desa Suka Makmur Kec.Binjai Sepj. 1500 m x 3 m	Jalan Padat Karya Desa Suka Makmur Desa Suka Makmur Kec.Binjai Kab.Langkat
402	Pengaspalan dengan Hot Mix jalan Mesjid Dusun 3 dan 2 Desa Suka Makmur Kec.Binjai Sepj.1200 m x 3 m	jalan Mesjid Dusun 3 dan 2 Desa Suka Makmur Desa Suka Makmur Kec.Binjai Kab.Langkat
403	Pengaspalan dengan Hot Mix Desa Sendang Rejo jalan protokol menuju Desa Sidomulyo Kec.Binjai Sepj.2500 m x 3 m	Desa Sendang Rejo jalan protokol menuju Desa Sidomulyo Desa Sendang Rejo Kec.Binjai Kab.Langkat
404	Pengaspalan Jalan Karya Tani menuju Dusun 3 Desa Perdamaian Kec.Binjai Sepj.1500 m x 3 m	Jalan Karya Tani menuju Dusun 3 Desa Perdamaian Desa Perdamaian Kec.Binjai Kab.Langkat
405	Pengaspalan dengan Hot Mix di Jalan Tengku Amir Hamzah Kel Pekan Selesai Kec.Selesai Sepj.3500 m x 5 m	Jalan Tengku Amir Hamzah Kel Pekan Selesai Kel.Pekan Selesai Kec.Selesai Kab.Langkat
406	Pengaspalan dengan Hot Mix Link 7 dan 8 Sepj.2500 m x 3 m	Link 7 dan 8 Kel.Pekan Selesai Kel.Pekan Selesai Kec.Selesai
407	Mohon pendalaman Waduk Jl. Bambu Runcing GG.Waduk dan pengadaan Water Pump 10 inci sepj. 300 m	Waduk Jl. Bambu Runcing GG.Waduk Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
408	Peninggian dan Pengaspalan Jalan rendah, rusak dan berlubang di Jalan Jurung Kel.Pekan Tanjung Pura Sepj. 220 m	Jalan Jurung Kel.Pekan Tanjung Pura Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
409	Pembangunan atau peninggian Tanggul di Desa Pulau Banyak	Desa Pulau Banyak Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura
410	Pengaspalan dengan Lapen Jalan untuk Dusun Tujuh Sari Desa Pulau Banyak Kec. Tanjung Pura	Dusun Tujuh Sari Desa Pulau Banyak Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura
411	Pendalaman Waduk dan pengadaan Water Pump 10 inchi sepanjang 300 m	Jalan Bambu Runcing GG Waduk Kel.Pekan Tanjung Pura Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura
412	Peninggian dan pengaspalan jalan rendah, rusak dan berlubang di Jalan Jurung Kel.Pekan Tanjung Pura Sepj. 220 m	Jalan Jurung Kel.Pekan Tanjung Pura Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
413	Erosi Pada Sisi Parit	Lingkungan II Amal Kel. Bela Rakyat
414	Pengerukan Sungai	Pekan Kuala
415	Pelebaran Sungai	Pekan Kuala
416	Erosi Pada Sisi Sungai	Pekan Kuala
417	Jalan Rusak	Kecamatan Kuala
418	Pemindahan Kantor Desa	Desa Bekiun
419	Jalan Rusak	Dusun Pancang Lima Menuju Dusun Suka Damai Desa Beruam
420	Jalan Rusak	Desa Beruam Menuju Dusun Menjuah-Juah
421	Jalan Rusak	Jalan Perintis Kemerdekaan Dusun Iv Menuju Dusun Ii Parit Bindu
422	Jalan Rusak	Kel. Pekan Kuala
423	Pengadaan Jaringan Listrik	Dsn III Sidorukun
424	Drainase Rusak	Lingkungan III Karya Jalan Kartini Kelurahan Bingai Kec. Stabat
425	Jalan Jelek Dan Berlubang	Jalan Mesjid Al Furqon Lingkungan I Kelurahan Bingai Kec. Stabat
426	Jalan Rusak	Lingk. V Jalan Gotong Royong Kel. Kwala Bingai Kecamatan Stabat
427	Jalan Rusak dan Berlubang	Lingkungan IV Jalan Ade Irma Suryani Kelurahan Bingai Kec. Stabat
428	Pengadaan Akir Bersih Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura	Desa Pulau Banyak Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
429	Pengaspalan dengan Lapen Jalan untuk Dusun Tujuh Sari Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura	Dusun Tujuh Sari Desa Pulau Banyak Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
430	Mohon Pembangunan atau peninggian tanggul di Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura	Desa Pulau Banyak Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
431	Pengaspalan jalan Dusun IV sampai Sei Mati Desa Alur Gadung menuju Jalan Desa Alur Gadung dan Jalan Buluh Telang Desa Alur Gadung Kec.Batang Serangan Sepj. 2000 m x 4 m	Dusun IV sampai Sei Mati Desa Alur Gadung menuju Jalan Desa Alur Gadung dan Jalan Buluh Telang Desa Alur Gadung Desa Alur Gadung Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
432	Pemasangan Tiang Listrik (sekitar 20 rumah keluarga yang belum mendapatkan penerangan listrik)	Dusun Jati Mulyo Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
433	Jalan Rusak dan Belubang	Lingkungan VII Tegal Rejo Kelurahan Bingai Kec. Stabat
434	Pembuatan Bronjong Dusun Tahun Titi Belanga Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Sepj.300 m	Dusun Tahun Titi Belanga Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
435	Pembuatan Bronjong pengaman jembatan dari Rumah Pak parmin sampai Miswadi kanan-kiri Sepj. 30 m	Dari Rumah Pak parmin sampai Miswadi kanan-kiri Dusun Tahun Titi Belanga Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
436	Jalanan Jelek dan Belubang	Jalan Dusun Sejagat
437	Belum adanya Parit	Kecamatan Kuala
438	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Lokasi Telaga Said Desa Telaga Said Kec.Sei Lapan Sepj.7000 m x 5 m	Jalan Lokasi Telaga Said Desa Telaga Said Desa Telaga Said Kec.Sei Lapan Kab.Langkat
439	Jalan Masih Berbatu dan berlubang	Desa Perkebunan Bukit Lawang Menuju Desa Sei Musim Kec. Bahorok
440	Pengadaan Lampu Jalan	Simpang Durian Mulo Menuju Desa Raja Tengah
441	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Lintas Sendayan I, Sendayan II Dusun VI dan VII Sepj.3000 m x 3,5 m	Jalan Lintas Sendayan I, Sendayan II Dusun VI dan VII Desa Securai Selatan Desa Securai Selatan Kec.Babalan Kab.Langkat
442	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Utama Sendayan Dusun I, IV, VI dan VII Desa Securai Selatan Sepj.6000 m x 3 m	Jalan Utama Sendayan Dusun I, IV, VI dan VII Desa Securai Selatan Desa Securai Selatan Kec.Babalan Kab.Langkat
443	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Protokol Sendayan II Pasar 8 - Pasar 20 Desa Securai Selatan Kec.Babalan Sepj.6000 m x 3 m	Jalan Protokol Sendayan II Pasar 8 - Pasar 20 Desa Securai Selatan Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
444	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun Bukit Satu Desa Securai Selatan Kec.Babalan Sepj.2000 m x 3,5 m	Dusun Bukit Satu Desa Securai Selatan Desa Securai Selatan Kec.Babalan Kab.Langkat
445	Belum Adanya Jembatan	Desa Batu Jong Jong Kecamatan Bahorok



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
446	Pengadaan Ruang Kelas	Desa Parit Bindu
447	Parit Belum dilenning	Jalan Pemukiman Simpang Tiga Polindes S/D Rumah Japet Dusun Tanjung Gunung Kecamatan Kutambaru
448	Belum Selesai Pengaspalan	Dusun Cinta Rakyat Kecamatan Kutambaru
449	Nomalisasi Parit Titi Batu perbatasan Desa Securai Utara dengan Pelawi Selatan Kec.babalan	Parit Titi Batu perbatasan Desa Securai Utara dengan Pelawi Selatan Desa Securai Utara Kec.Babalan Kab.Langkat
450	Lanjutan pengaspalan Jalan Utama Lingkungan Takari Makmur Kel.Harapan Jaya Kec.Sei Lapan Sepj.2500 m x 3 m	Jalan Utama Lingkungan Takari Makmur Kel.Harapan Jaya Kel.Harapan Jaya Kec.Sei Lapan Kab.Langkat
451	Jalan Rusak	Dusun I Musam Pembangunan Dari Batas Desa Musam Kendit Sampai Dengan Dusun 3 Telkom Desa Musam Pembangunan Kec. Bahorok
452	Pengaspalan Jalan	Desa Timbang Lawan Menuju Desa Desa Suka Rakyat Desa Timbang Lawang Kecamatan Bahorok
453	Jalan Rusak	Dusun V Batu Lima Desa Tanjung Lenggang. Kecamatan Bahorok
454	Jalan Belun di aspal	Simpang Pos Polisi Marike S/D Desa Kuta Gajah Kecamatan Kutambaru
455	Parit Belum di lenning	Jalan Pemukiman Depan Gbkp Ke Jalan Mbacang Dusun Rih Sogong Kecamatan Kutambaru
456	Belum Selesaian Pengaspalan	Jalan Dusun Mbacang Kecamatan Kutambaru
457	Halaman Sekolah Rusak	Desa Bekiung
458	Ruang Kelas Rusak	Desa Sido Makmur
459	Pembuatan WC	Kecamatan Kuala
460	Jalan Rusak	Link I Sidodadi
461	Jalan Belum diaspal	Dusun VI Telkom Ke Dsn Tg.Beringin Kecamatan Salapian
462	Pembangunan Jalan (Penimbunan, Pengerasan dan Pengaspalan) Jalan Arteri Sepj.3,5 m x 3000 m	Jalan Arteri di Lingkungan Paya Lebar Kel.Harapan Jaya Kel.Harapan Jaya Kec.Sei Lapan Kab.Langkat
463	Parit Belum di Lenning	Jalan Pemukiman Depan Rumah Untung Dusun Rih Sogong Kec. Kutambaru
464	Belum Selesai Pembuatan Bronjong	Dusun Sungai Tukun Desa Kaperas Kecamatan Kutambaru
465	Belum Selesai Pengaspalan	Desa Namotongan Kecamatan Kutambaru
466	Rusak berat Gedung Polindes	Kecamatan Salapian Kecamatan Salapian
467	Titi Penyebrangan Rusak	Kecamatan salapian Kecamatan Salapian
468	Jalan Belum di aspal	dusun IV manggusta sampai Dusun I Parangguam Kecamatan Salapian
469	Jalan rusak	Jalan Utama Menuju Sirapit Kecamatan Salapian
470	Jalan Rusak	Gang Sejahtera
471	Pembangunan Pasar Modern	Kelurahan Pekan Kuala
472	Jalan Rusak	Jalan Bakti ABRI Link VIII Undian Dan Link VI Rel
473	Rehab berat Kantor Lurah Pekan Besitang Kec.Besitang	Kantor Lurah Pekan Besitang Kel.Pekan Besitang Kec.Besitang
474	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Sepj.800 m x 6 m	Dusun VII Sidodadi Desa Sekoci Desa Sekoci Kec.Besitang Kab.Langkat
475	Erosi Pada Sisi Parit	Jalan Link III Tumakninah
476	Saluran Tipe C	Desa Dalan Nama
477	Pembangunan Jembatan	Desa Dalan Nama
478	Jalan Rusak	Desa Dalan Nama
479	Jalan Rusak	Desa Sei Penjara
480	Perbaikan Jembatan di Dusun PIR ADB Desa PIR ADB Besitang	Dusun PIR ADB Desa PIR ADB Besitang Desa PIR ADB Kec.Besitang
481	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix di Jalan Utama lingkungan V Sei Pucuk Kel.Pekan Besitang Kec.Besitang Sepj. 1 km x 4 m	Jalan Utama lingkungan V Sei Pucuk Kel.Pekan Besitang Kel.Pekan Besitang Kec.Besitang Kab.Langkat
482	Pembuatan Tembok penahan tanah di Lingkungan V Sei Pucuk menuju SMA Negeri Kel.Pekan Besitang Kec.Besitang Sepj.50 m	Lingkungan V Sei Pucuk menuju SMA Negeri Kel.Pekan Besitang Kel.Pekan Besitang Kec.Besitang Kab.Langkat
483	Pengerasan jalan Dusun X yang ada di Desa Halaban Kec.Besitang Sepj.2 km x 4 m	Dusun X yang ada di Desa Halaban Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat
484	Rusak Meja Sekolah	Desa Parangguam Kecamatan Salapian
485	Jalan Rusak	Dusun Namu Grogo Kecamatan Salapian
486	Jalan Belum diaspal	Desa tanjung Langkat Kecamatan Salapian
487	Belum adanya Jembatan	Kecamatan Salapian
488	Pembangunan Bronjong	Dusun I Mandailing Kecamatan Kuala
489	Pembangunan Bronjong	Dusun I Mandailing Desa Suka Makmur Kecamatan Kuala
490	Jalan Belum di Hotmix	Dusun I mandailing Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala
491	Jalan Belum diaspal	Dusun I Mandailing Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala
492	Pengaspalan Jalan	Dusun I Mandailing Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala
493	Pembuatan Bronjong	Dusun I mandailing Desa Sidkmur Kecamatan Kuala
494	Pembuatan Tanggul	Dusun I Mandailing Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala
495	Penambahan Tiang Listrik	Dusun Petak Dua Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala
496	Penyediaan air bersih bagi masyarakat Dusun X Desa Halaban	Dusun X Desa Halaban Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat
497	Lenning Parit	LK.II Amal Kel. Bela rakyat Kecamatan Kuala
498	Pengerukan Sungai	Pekan Kuala Kecamatan Kuala
499	Bronjong di Sungai	Pekan Kuala Kecamatan Kuala
500	Pembuatan Jalan Tembus antara Kec.Besitang dan Kec.Pematang Jaya Sepj.3 km x 4 m	Jalan Tembus antara Kec.Besitang dan Kec.Pematang Jaya Kec.Besitang Kab.Langkat
501	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun I Telaga Hitam dari	Dusun I Telaga Hitam dari perbatasan Desa Limau Mungkur sampai



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
	perbatasan Desa Limau Mungkur sampai Rumah Bapak Nursakum Desa Pematang Tengah Sepj. 3 Km x 4 m	Rumah Bapak Nursakum Desa Pematang Tengah Desa Pematang Tengah Kec.Pematang Jaya Kab.Langkat
502	Lanjutan Pengaspalan dengan Hot Mix dari perbatasan Desa Sukamulia masuk Desa Perapen menuju Kantor Camat Pematang Jaya Sepj. 2 km x 4 m	Dari perbatasan Desa Sukamulia masuk Desa Perapen menuju Kantor Camat Pematang Jaya Desa Perk.Perapen Kec.Pematang Jaya Kab.Langkat
503	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Jalan Ternak menuju Desa Alur Mentawak Aceh Tamiang Sepj.2 km x 4 m	Jalan Ternak menuju Desa Alur Mentawak Aceh Tamiang Dsn.III Desa Halaban Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat
504	Rehab Berat Kantor Lurah Pekan Besitang Kec.Besitang	Kantor Lurah Pekan Besitang Kel.Pekan Besitang Kec.Besitang
505	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Sepj.800 m x 6 m	Dusun VII Sidodadi Desa Sekoci Desa Sekoci Kec.Besitang
506	Belum Selesai Pengaspalan	Jalan Perintis Kemerdekaan Kecamatan Kuala
507	Pengaspalan Lapen	Jalan Gg Rahayu LK.II Pasa Lori Kecamatan Kuala
508	Pemindahan Kantor Desa	Desa Bekiung Kecamatan Kuala
509	Pengaspalan Jalan	Desa Suka Damai Kecamatan Kuala
510	Pengaspalan Hotmix	LK II Amal Kecamatan Kuala
511	Pasangan Paving Blok	Pekan Kuala Kecamatan Kuala
512	Perbaikan jembatan di Desa PIR ADB Besitang Kec.Besitang	- Desa PIR ADB Kec.Besitang Kab.Langkat
513	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix di Jalan Utama Lingkungan V Sei Pucuk Kel.Pekan Besitang Kec.Besitang Sepj 1 km x 4 m	Jalan Utama Lingkungan V Sei Pucuk Kel.Pekan Besitang Kel.Pekan Besitang Kec.Besitang Kab.Langkat
514	Pengerasan jalan Dusun X yang ada di Desa Halaban Kec.Besitang Sepj.2 km x 4 m	Dusun X yang ada di Desa Halaban Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat
515	Pembangunan jalan tembus antara Kec.Besitang dan Kec.Pematang Jaya Sepj.2 km x 4 m	Kec.Besitang Kab.Langkat
516	Erosi Pada Sisi Parit	Desa Rumah Galoh
517	Pengadaan Lampu	Jalan Simpang Durian Mulo Kecamatan Kuala
518	Rehab Berat Bendungan	DSN III Mberagian Desa Besadi Kecamatan Kuala
519	Pembuatan Bronjong Tebing Sungai di Lingkungan IV Desa Kampung Lama Kec.Besitang Sepj. 300 m	Lingkungan IV Desa Kampung Lama Kel.Kampung Lama Kec.Besitang Kab.Langkat
520	Lanjutan pengaspalan dengan Hot Mix dari perbatasan Sukamulia masuk Desa Perapen menuju Kantor Camat Pematang Jaya Sepj.2 km x 4 m	Dari perbatasan Sukamulia masuk Desa Perapen menuju Kantor Camat Pematang Jaya Desa Perk.Perapen Kec.Pematang Jaya Kab.Langkat
521	Belum adanya WC Keluarga	Se Kecamatan Kuala Kecamatan Kuala
522	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan ternak menuju Desa Alur Mentawak Aceh Tamiang Dsn III Desa Halaban Kec.Besitang Sepj.2 km x 4 m	Jalan ternak menuju Desa Alur Mentawak Aceh Tamiang Dsn III Desa Halaban Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat
523	Rusaknya Ruang Aula Kantor	Kantor Kel. Pekan Kuala Kecamatan Kuala
524	Belum Selesai Pengaspalan	Jl. LK.I Sidodadi Kecamatan Kuala
525	Rusaknya Jalan Beton	Gang Sejahtera Kel. Pekan Kuala Kecamatan Kuala
526	Belum Teraspalnya Jalan	Lingkungan VIII Sido Selamat
527	Pengaspalan dengan Hot Mix Dsn 2 Pasar 8 Sepj.1000 m x 3 m	Dusun 2 Pasar 8 Desa Lau Mulgab Desa Lau Mulgab Kec. Selesai
528	Rusaknya Kantor Desa	Desa Blangkahan Kecamatan Kuala
529	Rehab beton	Gang Imam Pemula Kel. Pekan Kuala
530	Pembuatan Bronjong	Sungai Tembo Kelurahan Pekan Kuala
531	pembuatan bronjong	Sungai Gerpah Kelurahan Pekan Kuala
532	pembuatan bronjong	Sungai Penjara Kelurahan Pekan Selesai
533	Pengerasan jalan	Link VIII Undian dan Link,VI Rel Kel. Bela Rakyat
534	pengaspalan dengan hotmix	SD Inpres Link. I Suka Tani Kel. Bela Rakyat
535	pembuatan leaning parit jalan	Jalan Kuala Binjai Kel. Bela Rakyat
536	Belum Terpasang Paving Blok	Jalan Gg Keluarga RT. I Kecamatan Kuala
537	Belum Selesai Lenning Parit Beton	Jalan LK.III Tumakninah Kecamatan Kuala
538	Belum adanya paving Blok	Jalan Gang RT I /RW I LK.II Amal Kecamatan Kuala
539	Belum Terleaning Parit	Kecamatan Kuala
540	Belum adanya Jembatan	Jalan Titi panjang Kecamatan Kuala
541	pengaspalan hotmix	Jalan pijer dodi desa dalan dalam Kecamatan Kuala
542	pengaspalan hotmix jalan	jalan namo jawi desa dalan naman Kecamatan Kuala
543	Belum Teraspalnya Jalan	Jalan DSN I Suka Raja Kecamatan Kuala
544	Pengaspalan jalan Dusun 3 Desa Lau Mulgab Sepj.1000 m x 3 m	Dusun 3 Desa Lau Mulgab Desa Lau Mulgab Kec.Selesai
545	Belum Selesai Pengaspalan Jalan	DSN III dan IV Desa Suka Damai Kecamatan Kuala
546	Jalan Belum Teraspal Hotmix	DSN I Indah Jaya Desa Suka Damai Kecamatan Kuala
547	Belum Disertukannya Jalan	DSN III Sekar Wangi Desa Suka Damai Kecamatan Kuala
548	Belum Dibuatnya Tembok Penahan Tanah	DSN III Sekar wangi Desa Suka Damai Kecamatan Kuala
549	Pemasangan Paving Blok	Desa Suka Damai Kecamatan Kuala
550	Pengaspalan Hotmix Jalan	Desa Bekiung Kecamatan Kuala
551	Belum Diaspalnya Jalan	Jalan Masuk DSN Bekiung Lama Kecamatan Kuala
552	Belum Adanya Bronjong Pinggiran Sungai	DSN II Desa Bekiung Kecamatan Kuala
553	Belum adanya Tembok penahanAir Bendungan	Desa Bekiung Kecamatan Kuala
554	Belum Adanya Paving Blok	Jalan Gg Bowo DSN V Sidomulyo Kecamatan Kuala
555	Belum Adanya Paving Blok	Jalan gg Doyok DSN V Sidomulyo Kecamatan Kuala



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
556	Belum Teraspalnya Jalan	Jalan Masuk DSN Sidomulyo Kecamatan Kuala
557	Pengaspalan Jalan Dusun 5 GG.Mitra menuju Dusun 4 Desa Bekulap Kec.Selesai Sepj.1000 m x 4 m	Dusun 5 GG.Mitra menuju Dusun 4 Desa Bekulap Desa Bekulap Kec.Selesai Kab.Langkat
558	Pengaspalan jalan ke Tanah Wakaf di Dusun 6 Desa Bekulap Kec.Selesai Sepj.600 m x 3 m	jalan ke Tanah Wakaf di Dusun 6 Desa Bekulap Desa Bekulap Kec.Selesai Kab.Langkat
559	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Sepj.2000 m x 3 m	Dusun 6 Karoja Desa Bekulap Desa Bekulap Kec.Selesai Kab.Langkat
560	Lanjutan pengaspalan Jalan Sepj.800 m x 3 m	Jalan Dusun Paya Rempah Desa Bekulap Desa Bekulap Kec.Selesai
561	Pengaspalan Jalan Dusun Sei mati menuju ke Selayang Desa Perhiasan Kec.Selesai Sepj.800 m x 3 m	Jalan Dusun Sei mati menuju ke Selayang Desa Perhiasan Desa Perhiasan Kec.Selesai Kab.Langkat
562	Belum adanya sanggar Kreatifitas	Desa Bekiung Kecamatan Kuala
563	Jalan Rusak	Jalan Gg Becek DSN II Kampung Baru Kecamatan Kuala
564	Belum Selesai Pengaspalan	DSN 5 Menjahong Kecamatan Kuala
565	Belum Teraspalnya Jalan	DSN VI Jalan Terdam Menjahong Kecamatan Kuala
566	Belum Teraspalnya Jalan	DSN 5 Menjahong Kecamatan Kuala
567	Belum adanya Tembok penahan kanan Kiri	jalan Terdam Kecamatan Kuala
568	Belum Di leaning Parit	DSN V Menjahong Kecamatan Kuala
569	Belum adanya Paving Blok	jalan Gg Kecil DSN V menjahong Kecamatan Kuala
570	Pengaspalan hotmix	Desa Bekiung JALAN Dusun VI Menjahong Kecamatan Kuala
571	Pembangunan leaning Parit	jalan pertanian dusun III Kecamatan Kuala
572	Rehab jalan dari Desa Garunggang ke batas Desa Parangguan Kec.Kuala	Desa Garunggang ke batas Desa Parangguan Desa Garunggang Kec. Kuala
573	Mohon aliran listrik ke Dusun VI Desa Lau Lugur Kec.Salapian	Dusun VI Desa Lau Lugur Desa Lau Lugur Kec.Salapian Kab.Langkat
574	Pembangunan Gorong - gorong	dijalan durian Mulo Kecamatan Kuala
575	Lanjutan pengaspalan dengan Hot Mix Dusun Tanjung Baru Pama Desa Perhiasan Kec.Selesai Sepj.4500 m x 3 m	Dusun Tanjung Baru Pama Desa Perhiasan Desa Perhiasan Kec.Selesai Kab.Langkat
576	Pengaspalan hotmix jalan	Jalan Tanjung Bunga Dusun VII Kecamatan Kuala
577	Pengaspalan lapen jalan	Jalan Dusun VI Bunga Rinte Garunggang Kecamatan Kuala
578	Pengaspalan Lapen jalan	Jalan Wisata Lau Kulap Desa Garunggang Kecamatan Kuala
579	Pengaspalann Lapen jalan	Jalan Dusun IX Pinang pulo desa Garunggang Kecamatan Kuala
580	Pengaspalan lapen jalan	Jalan Dusun V Tenang Menanti Sampai Dusun I UUK Gedang desa Garunggang Kecamatan Kuala
581	Pembuatan Bronjong	Dusun VII Tanjung Bunga Deda Garunggang Kecamatan Kuala
582	Pengaspalan Hotmix jalan	Simpang Besadi Sampai Dusun Sepirak Kecamatan Kuala
583	Pengaspalan Hotmix jalan	Jalan Desa Ke Dusun Durian Mulo Desa Besadi Kecamatan Kuala
584	Pengaspalan lapen jalan	Jalan Pertanian Dusun Lau Mentar Kecamatan Kuala
585	Pembangunan Tembok penahan	Jalan Rawan Longsor Kecamatan Kuala
586	Pembangunan MCK	Desa Besadi Kecamatan Kuala
587	Pengaspalan jaln umum dari Dusun IV Manggusta sampai Dusun 1 Desa Parangguam Kec.Salapian Sepj.8 km	Dusun IV Manggusta sampai Dusun 1 Desa Parangguam Desa Parangguam Kec.Salapian Kab.Langkat
588	Pembangunan MCK	Desa Besadi Kecamatan Kuala
589	Perbaikan jalan di Dusun VIII Jalan Utama menuju Sirapit Kec.Salapian Sepj.3 km	Dusun VIII Jalan Utama menuju Sirapit Desa Parangguam Kec.Salapian Kab.Langkat
590	Pembangunan Tembok Penahan	Jalan Desa Rawan Longsor Kecamatan Kuala
591	Pengaspalan Hotmix jalan	Jalan Desa Dusun Lau Mentar Kecamatan Kuala
592	Pengaspalan dengan Lapen	Jalan Dusun Buah Apam Menuju Dusun Pancang V Desa Beruam Kecamatan Kuala
593	Pembangunan Bronjong Jalan	Jalan Dusun Pancang Lima Desa Beruam Kecamatan Kuala
594	Butuh Bronjong	DSN Perpulungen Kecamatan Kuala
595	Pengaspalan Lapen jalan	jalan dusun VII lekang IV menuju dusun VI Telko desa parit bindu Kecamatan Kuala
596	Pengaspalan Jalan Dusun Namu Grogo Kec.Salapian Sepj.1,4 km	Dusun Namu Grogo Kec.Salapian Desa Garunggang Kec. Kuala
597	Pengaspalan Jalan menuju Desa Ujung Teran dari Dusun Poncowarno ke Tanjung Langkat Kec.Salapian Sepj.3,7 km	Jalan menuju Desa Ujung Teran dari Dusun Poncowarno ke Tanjung Langkat Desa Ujung Teran Kec.Salapian
598	Pembangunan Bronjong	Desa parit bindu Kecamatan Kuala
599	Pemasangan Tiang Listrik di GG Mushola sebanyak 6 tiang dan GG Sepakat sebanyak 4 tiang di Lingk. V Namu Kumbahang	GG Mushola sebanyak 6 tiang dan GG Sepakat sebanyak 4 tiang di Lingkungan V Namu Kumbahang Desa Naman Jahe Kec.Salapian
600	Pembuatan pagar sekolah	sekolah SDN. 050606 dusun IV Kecamatan Kuala
601	Pembuatan pagar sekolah	sekolah SDN. 050606 dusun IV Kecamatan Kuala
602	Leaning jalan	jalan dusun VII Lekang IV menuju dusun VI Telko Kecamatan Kuala
603	Pengerasan Jalan	dusun suka dame menuju desa garunggang Kecamatan Kuala
604	Pembangunan Bronjong jalan	jalan dusun pancang lima desa beruam Kecamatan Kuala
605	Pembangunan Bronjong Jalan	Jalan dusun pancang lima desa beruam Kecamatan Kuala
606	Pembuatan Bronjong Jalan	Jalan dusun pancang lima desa beruam
607	Pembangunan Bronjong	Jalan DSN Suka Dame Kecamatan Kuala
608	Butuh Pengaspalan	simpang Gudang menuju DSN Namu Mbelin Kecamatan Kuala
609	Butuh pipanisasi	Kecamatan se Bingai Kecamatan Sei Bingai
610	Butuh Pengaspalan Jalan	DSN IV Emplasmen Kecamatan Kuala
611	Butuh Pengaspalan Jalan	DSN I Beliler Ke DSN IV Balai Kasih Kecamatan Kuala



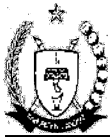
No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
612	Butuh Pengaspalan Jalan	Jalan Kampung Beliler Kecamatan Kuala
613	Butuh Peningkatan Jalan Lapen	Jalan DSN IV Kampung Balai Kasih Kecamatan Kuala
614	Butuh peningkatan jalan	Jalan DSN II masjid gg Madrasah Kecamatan Kuala
615	Butuh Rehab kantor	Desa Namu ukur Selatan Kecamatan Sei Bingai
616	Butuh Perbaikan Jalan	Desa Durian Lingga Kecamatan Sei Bingai
617	Butuh pengaspalan Jalan	Jalan Pasar IV namutrase Kecamatan Sei Bingai
618	Butuh Pengaspalan Jalan	Jalan Di Dusun Sanggapura Kecamatan Sei Bingai
619	Butuh MCK	Puskesmas Desa belinten Kecamatan Sei Bingai
620	Butuh Leaning Parit	Desa Rumah Galuh Kecamatan Sei Bingai
621	Pembangunan Bronjong penahan tebing diatas Bendungan persawahan Sepj. 100 m	Bendungan persawahan Dusun I Mandailing Desa Sido Makmur Desa Sido Makmur Kec. Kuala
622	Pebangunan Bronjong penahan Tebing di bawah Bendungan areal persawahan Sepj.120 m	Bendungan areal persawahan Dusun I Mandailing Desa Sido Makmur Desa Sido Makmur Kec. Kuala
623	Butuh Pemasangan Paving Blok	Halaman Kantor Camat Sei Bingai Kecamatan Sei Bingai
624	Penambahan Tiang Listrik Dusun Petak Dua sebanyak 6 Tiang	Dusun Petak Dua Desa Sido Makmur Desa Sido Makmur Kec. Kuala
625	Butuh pemasangan Pagar	Kantor Camat Sei Bingai Kecamatan Sei Bingai
626	Butuh Pengaspalan Jalan	Jalan simpang Ngemat Desa Emplasmen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai
627	Butuh Rehabilitasi Irigasi	Bengaru Desa belinten Kecamatan Sei Bingai
628	Butuh Perbaikan Irigasi	Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai
629	Butuh Perbaikan Irigasi	Desa Telagah Kecamatan Sei Bingai
630	Pengaspalan dengan Hot Mix Sepj.3 m x 1400 m	Dusun Handayani Desa Sido Makmur Desa Sido Makmur Kec. Kuala
631	Pembuatan Bronjong aliran sungai Kec.Kuala Sepj.100 m	Dusun Mandailing Desa Sido Makmur Desa Sido Makmur Kec. Kuala
632	Pembuatan Tanggul irigasi Kec.Kuala Sepj.300 m	Dusun Mandailing Desa Sido Makmur Desa Sido Makmur Kec.Kuala
633	Butuh Rehab Total Los Pekan	Pekan Namu Tating Kecamatan Sei Bingai
634	Butuh Pengaspalan Jalan	Jalan gg Rumah saudara Agen Sembiring Sampai Dengan Gg Rumah saudari Br Kaban Kecamatan Sei Bingai
635	Butuh Bedah Rumah	Di Desa Simpang Kuta Buluh Kecamatan Sei Bingai
636	Butuh Pengaspalan Jalan	Jalan Linkar DSN Telaga B Menuju Jalan Lingkar Pekan Kec. Sei Bingai
637	Butuh Pengerasan Jalan	Jalan Ujung Langkat Sampai Dengan DSN Suka Ribu Kecamatan
638	Pengerukan Sungai Pekan Kuala Kel.Pekan Kuala Kec.Kuala	Sungai Pekan Kuala Kel.Pekan Kuala Kec.Kuala
639	Pengaspalan Jalan Pancar 5 menuju Desa Suka Damai Kec.Kuala Sepj.2000 m x 3 m	Jalan Pancar 5 menuju Desa Suka Damai Kec.Kuala
640	Pengaspalan Jalan Dusun Pancang Lima menuju Dusun Suka Damai Desa Beruam Kec.Kuala Sepj.3 m x 3000 m	Jalan Dusun Pancang Lima menuju Dusun Suka Damai Desa Beruam Desa Beruam Kec.Kuala
641	Butuh Pengaspalan Jalan	jalan Desa perpulungan Menuju DSN Dagangan Sukaraja Kec.Sei Bingai
642	Butuh pengaspalan Jalan	Jalan Menuju Sukarame Kecamatan Sei Bingai
643	Butuh Jembatan Benteng Sungai	Sungai Lombang Kecamatan Sei Bingai
644	Butuh Leaning parit	Jalan DSN V Sumber Mulyo Sebelah Timur Kecamatan Sei Bingai
645	Pengadaan jaringan listrik Jln Dusun III Sidorukun Desa Belangkahan Kec.Kuala	Jln. Dusun III Sidorukun Desa Belangkahan Desa Belangkahan Kec. Kuala
646	Pemasangan Lampu Jalan Simpang Durian Mulo menuju Desa Raja Tengah Kec.Kuala sebanyak 50 titik	Jalan Simpang Durian Mulo menuju Desa Raja Tengah Desa Raja Tengah Kec. Kuala
647	Butuh Rabat Beton	Jalan Lintas Pertanian dari Simpang Jalan raya menuju Jembatan Melewati Tanah wakaf DSN II Lau Tenges Kecamatan Sei Bingai
648	Butuh Beton Jalan	DSN VI Serba Jadi Menuju Perpulungan Kecamatan Sei Bingai
649	Butuh Pengaspalan Jalan	DSN IV Srirejo Berbatasan dengan Binjai Estate Kecamatan Sei Bingai
650	Butuh Tembok Penahanan Tanah	Dusun I Adimulio Desa Pasar VI Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai
651	Butuh Pengaspalan Jalan	Jalan Pertanian DSN I adimulio Kecamatan Sei Bingai
652	Butuh Pengaspalan Jalan	Jalan Pariwisata Pangkal Namu Sira - Sira Kecamatan Sei Bingai
653	Butuh Pengaspalan Jalan	Jalan namu Tating Menuju Namu ukur Kecamatan Sei Bingai
654	Butuh Pengaspalan Jalan	Jalan Ujung Payung Baru Sampai Jalan Ujung payung Lama Kec. Sei Bingai
655	Butuh Parit Beton	Jalan Beringin Jaya Dekat Kampung Beringin Jaya dan Jembatan Kecamatan Sei Bingai
656	Butuh Parit	Dusun II Jalan Pondok Besar Kecamatan Sei Bingai
657	Butuh Rehab Beton	Jln. Gg mangga Dusun Cinta Damai Desa pantai Gemi Kec.Stabat
658	Butuh Lanjutan Pengaspalan Jalan	Dusun 8 Menuju Dusun 11 randu gapit Kwala Begumit Kec. Stabat
659	Butuh Rebat Beton	Gg Keluarga Dusun 3 Gg Famili Desa ara Condong Kecamatan Stabat
660	Butuh rabat Beton	Gg Sodara Dusun 3 Gg Famili Desa Ara Condong Kecamatan Stabat
661	Rehab Berat Bendungan Persawahan Dusun III Mberiagan Desa Besadi Kec.Kuala	Bendungan Persawahan Dusun III Mberiagan Desa Besadi Desa Besadi Kec.Kuala
662	Butuh Pengaspalan Jalan	jalan Dusun adimulio Hulu dan Hilir Gg Netral Kecamatan Sei Bingai
663	Butuh Pengaspalan Jalan	Jl. Bandar Meriah Kecamatan Sei Bingai
664	Butuh Pengaspalan Jalan	Jl. Dusun VII Ujung barat Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai
665	Rehab Ruang Aula Kantor Kelurahan Pekan Kuala Kec.Kuala	Kantor Kelurahan Pekan Kuala Kel.Pekan Kuala Kec. Kuala
666	Pembuatan Bronjong Sungai Tembo Kel.Pekan Kuala Sepj.100m	Sungai Tembo Kel.Pekan Kuala Kel.Pekan Kuala Kec. Kuala
667	Pembuatan Bronjong Sungai Gerpah Sepj.100 m	Sungai Gerpah Kel.Pekan Kuala Kel.Pekan Kuala Kec. Kuala



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
668	Pembuatan Pagar Kantor Kelurahan Kuala Kec.Kuala	Kel.Pekan Kuala Kec. Kuala
669	Butuh Rebat Beton	Gg bersama Dusun 3 Gg Famili desa Ara Condong Kec. Stabat
670	Butuh Pengaspalan Jalan	Jln, gunung Agung desa kwala Begumit Kecamatan Stabat
671	Butuh Pengaspalan Jalan	Jl. gunung Lawu Desa kwala Begumit Kecamatan Stabat
672	Butuh Leaning Parit	Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kecamatan Stabat
673	Butuh Lanjutan Pengerasan	Jln. Gunung Semeru Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kec.Stabat
674	Butuh Rabat Beton	Jl. Gg bambu Dsn Mulia Bakti desa Karang Rejo Kecamatan Stabat
675	Butuh Pembuatan Bronjong	Jl. Mesjid LK.III Samping Gg Tewor Kel. Sidomulio Kecamatan Stabat
676	Butuh pengaspalan Jalan	Jln. Pandawa Dsn pelita Desa Karang rejo Kecamatan Stabat
677	Pengaspalan dengan Hotmix	Jln.Poncowati dusun mulia bakti desa karang rejo Kecamatan Stabat
678	Pembuatan Bronjong di Sungai Pekan Kuala Sepj.200 m	Sungai Pekan Kuala Kel.Pekan Kuala Kec. Kuala
679	Pembangunan Jembatan Benteng Jalan Titi Panjang Desa Dalam Naman Kec.Kuala Sepj.4 m	Jembatan Benteng Jalan Titi Panjang Desa Dalam Naman Desa Dalam Naman Kec. Kuala
680	Pengaspalan dengan hotmix	Jln.Pendidikan Dsn I Desa Batu Malenggang Kecamatan Hinai
681	Pengaspalan dengan hotmix	Dsn V objek wisata Desa Banyumas Kecamatan Stabat
682	Pengaspalan dengan hotmix	Jalan utama desa tamaran Kecamatan Hinai
683	Pengaspalan dengan Lapen	Jln. Makam dusun I Desa Tamaran Kecamatan Hinai
684	Pengaspalan dengan hotmix	Desa Muka Paya dusun 5,6,7 Kecamatan Hinai
685	Mohon Pengaspalan Jalan	Desa Telaga Jernih Dusun F2 Kec. Secanggang Kecamatan secanggang
686	Mohon Pengaspalan Jalan	Jl. Poros Desa Sumber Mulyo/Bukit Batu Kec. Wampu Keca.Wampu
687	Mohon Pengaspalan Jalan	Jl. Poros Desa Bikit Sumber Mulyo/Bukit Batu Kecamatan Wampu
688	Mohon Pengaspalan Jalan	dusun IX Indah Sari Desa Besilam Lembasah Kecamatan Wampu
689	Mohon Rabat Beton	LK,VII Jl. Damai Raya Kel. Perdamaian Stabat Kecamatan Stabat
690	Pengaspalan jalan dengan Hot mix Jalan Sepj.1200 m x 3	Jalan Dusun I Sukaraja Desa Sei Penjara Desa Sei Penjara Kec. Kuala
691	Butuh Pengaspalan Jalan	Lingkungan VII Jln. Cendrawasih Kecamatan Stabat
692	Butuh Pengaspalan Jalan	Dusun III Maelayu Desa Teluk Kecamatan secanggang
693	Butuh Pengaspalan	Dusun VI Parit Kaca III s.d Dusun IX Lubuk Rotan Kec. secanggang
694	Pengaspalan dengan Hotmix	Jl. Protokol Desa Mangga Kecamatan Stabat
695	Pengaspalan dengan Hotmix	Jl. K.H.Ahmad Dahlan Dusun IV Suko Beno Kecamatan Stabat
696	Pengaspalan dengan Hotmix	Jl. Dusun V Selipit Kecamatan Stabat
697	Pembangunan Kantor Desa beserta Aula Desa Blangkahan	Desa Blangkahan Kec. Kuala
698	Lanjutan pengaspalan dengan Hot mix Dusun II Mekar Jaya ke Dusun III dan IV Desa Suka Damai Kec.Kuala Sepj.3000 m x 3 m	Dusun II Mekar Jaya ke Dusun III dan IV Desa Suka Damai Desa Suka Damai Kec. Kuala
699	Lanjutan pengaspalan dengan Hot mix Sepj.800 m x 3 m	Dusun I Indah Jaya Desa Suka Damai Desa Suka Damai Kec. Kuala
700	Jalan Rusak	Pasar IV Namutrase
701	Pengaspalan Jalan	Jalan Link. XII Pasar Padi Kecamatan Selesai
702	Pengaspalan dengan Hotmix	Jl. Protokol Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai
703	Pengaspalan dengan Hotmix	Kecamatan Selesai Kecamatan Selesai
704	Pengaspalan dengan Hotmix	Jalan Menuju Perkuburan Muslim Desa Padang Brahrang Kec.Selesai
705	Pengaspalan Dengan Hotmix	Dusun Melati Kecamatan Selesai
706	Lanjutan Pengaspalan dengan Hotmix	Dusun Tanjung Hulu Kecamatan Selesai
707	Lanjutan Pengaspalan dengan Hotmix	Dusun Kantil Kecamatan Selesai
708	Pemasangan Paving Blok	Jalan Menuju Perkuburan Dusun Cinta Dapat Desa Padang Brahrang Kecamatan Selesai
709	Pengaspalan dengan Hotmix	Jl. Benteng Dusun VI Ke Dusun II Lorong Cina Desa Cempa Kec. secanggang
710	Pengaspalan dengan Hotmix	Jl. Tanjung Dusun III desa Cempa Kecamatan Hinai
711	Pengaspalan dengan hotmix	Jl. Jengkol Dusun IV Kecamatan Hinai
712	Pengaspalan dengan Hotmix	Jl.Abadi Dusun I,II,III Desa Pertumbukan Kecamatan Wampu
713	Pengerasan jalan	LK.IV Sempurna Kel. Perdamaian Kecamatan Stabat
714	Leaning Parit	LK IV Sempurna Kel. Perdamaian Kecamatan Stabat
715	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun Pembangunan menuju Dusun Rejosari Desa Bekiung Sepj.4 m x 1500 m	Jalan Dusun Pembangunan menuju Dusun Rejosari Desa Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
716	Pengaspalan dengan Lapen Jalan Masuk Dusun Bekiung Lama Desa Bekiung Kec.Kuala Sepj.4 m x 1500 m	Jalan Masuk Dusun Bekiung Lama Desa Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
717	Pengaspalan dengan Hotmix	Jalan Dusun Pasar I Menuju Dusun Guldah Kecamatan Selesai
718	Pengaspalan dengan Hotmix	Jl. Pasar II Banjaran Menuju Jalan Afdeling III Kecamatan Selesai
719	Pengaspalan dengan Hotmix	Jalan Bakti ABRI Desa Sei Limbat Kecamatan Selesai
720	Pengaspalan dengan Lapen	Dusun VIII Jl. Lestari Kecamatan Binjai
721	Pengaspalan dengan Lapen	Dusun IV Jalan PJKA Kecamatan Binjai
722	Pengaspalan dengan Lapen	DSN III Jalan Perjuangan Kecamatan Binjai
723	Pengaspalan dengan lapen	Dusun I Jalan Suka Tani Kecamatan Binjai
724	Pengaspalan	Dusun V Jl. Bakti Kecamatan Binjai
725	Pemasangan Paving Blok	Dusun VII Jl. Suka ramai Kecamatan Binjai
726	Pembautan Parit Beton	Jl. Bakti Kecamatan Binjai
727	Pemasangan paving Blok	Dusun III Gg Gatot Kecamatan Binjai



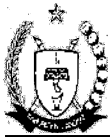
No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
728	Pemasangan Paving Blok	Dusun IV Gg Patin Kecamatan Binjai
729	Pemasangan Paving Blok	Dusun V Gg SS Kecamatan Binjai
730	Pemasangan paving Blok	Dusun VI Gg Kusnan Kecamatan Binjai
731	Pembuatn Tembok Penahan Air Bendungan (Irigasi) Lorong Pembangunan Desa Bekiung Kec.Kuala Sepj.200 m	Bendungan (Irigasi) Lorong Pembangunan Desa Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
732	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan masuk Sepj.4 m x 1000 m	Jalan masuk Dusun Sidomulio Desa Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
733	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan masuk Dusun Sidomulio Desa Bekiung Kec.Kuala Sepj.4 m x 1000 m	Jalan masuk Dusun Sidomulio Desa Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
734	Pembangunan Aula Kantor Desa	Desa Blangkahan
735	PEMBANGUNAN MCK	Desa Blangkahan
736	Pemasangan Paving Blok	Dusun VII Gg Abadi 21 Kecamatan Binjai
737	Jalan Rusak	Dusun Pembangunan Menuju Dusun Rejosari
738	Pemasangan Paving Blok	Jl. Obor Kecamatan Binjai
739	Pengaspalan	Gg randu Kecamatan Binjai
740	Pemasangan Paving Blok	Dusun IV Gg Tenggiri Kecamatan Binjai
741	Pemasangan Paving	Dusun VII Gg abadi 20 Kecamatan Binjai
742	Pengaspalan	Jalan Utama dari Jalan Coklat sampai Jalan Sudirman Kecamatan Binjai
743	Pengaspalan Jalan	Jalan Dusun VIII,IX dan XII Kecamatan Binjai
744	Pengaspalan dengan Lapen Dsn 5 Menjahong A Uk 3mx1500m	Dusun 5 Menjahong A Desa Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
745	Pengaspalan dengan Hot Mix Simpang SD Menjahong menuju Dusun 5 Menjahong A Desa Bekiung Kec.Kuala Uk 3 m x 1500 m	Simpang SD Menjahong menuju Dusun 5 Menjahong A Desa Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
746	Pembangunan Lening Parit Kanan Kiri Dusun V Menjahong A Desa Bekiung Kec.Kuala Sep. 1000 m	Dusun V Menjahong A Desa Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
747	Jalan Rusak	Dusun Bekiung Lama
748	Jalan Rusak	Dusun II Mekar Jaya Ke Dusun III dan IV
749	Jalan Rusak	Desa Suka Damai
750	Pengaspalan Jalan	Jalan Purwoganda Dusun XIV Kecamatan Binjai
751	Pengaspalan Jalan	Dusun XVII Kampung Banten Kecamatan Binjai
752	Pembuatan Parit Beton	Dusun VIII Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai
753	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun VI Menjahong B Bekiung Kec.Kuala Sep. 3 m x 1000 m	Jalan Dusun VI Menjahong B Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
754	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Jalan Dusun VII Tanjung Bunga Desa Garunggang Kec.Kuala Sepj. 3 m x 1500m	Jalan Dusun VII Tanjung Bunga Desa Garunggang Kec. Kuala
755	Pengaspalan jalan dengan Lapen Jalan Dusun VI Bunga Rinte Desa Garunggang Kec.Kuala Sepj. 3 m x 2000m	Jalan Dusun VI Bunga Rinte Desa Garunggang Kec. Kuala
756	Jalan Rusak	Dusun Sidomulio
757	Jalan Rusak	Dusun 5 Menjahong A
758	Jalan Rusak	Simpang SD Menjahong Menuju Dusun 5 Menjahong A
759	Pengaspalan jalan dengan Lapen Jalan Wisata Lau Kulap Desa Garunggang Kec.Kuala Sepj. 3 m x 900m	Jalan Wisata Lau Kulap Desa Garunggang Kec. Kuala
760	Pengaspalan jalan dengan Lapen Jalan Dusun IX Pinang Pulo Desa Garunggang Kec.Kuala Sepj. 3 m x 2000m	Jalan Dusun IX Pinang Pulo Desa Garunggang Kec. Kuala
761	Pengaspalan dengan Hotmix	Jalan Banjaran dusun Permadi desa Padang Cermin Kecamatan Selesai
762	Pengaspalan dengan Hotmix	Jalan AMD dusun II gerat desa nambiki Kecamatan Selesai
763	Pengaspalan dengan hotmix	Jalan Pendidikan dusun III menuju dusun II dan Dusun Nambertung Desa Nambiki Kecamatan Selesai
764	Perlu Pembuatan Jembatan	dusun II Gerat / Jalan AMD Desa Nambiki Kecamatan Selesai
765	Pengaspalan Dengan Hotmix	Jalan Banjaran dusun X Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai
766	Pengaspalan jalan dengan Lapen Jalan Dusun IX Pinang Pulo Desa Garunggang Kec.Kuala Sepj. 3 m x 2000m	Jalan Dusun IX Pinang Pulo Desa Garunggang Kec. Kuala
767	Jalan Rusak	Dusun Lau Mentar
768	Erosi PADA SISI Parit	Dusun V Menjahong A
769	Jalan Rusak	Dusun VI Menjahong B
770	PAGAR SEKOLAAH RUSAK	Desa Bekiung
771	Jalan Rusak	Dusun VII Tanjung Bunga
772	Jalan Rusak	Dusun VI Bunga Rinte
773	Jalan Rusak	Desa Garunggang
774	Jalan Rusak	Dusun IX Pinang Mulo
775	Jalan Rusak	Dusun V Tenang Menanti Sampai Dusun I UUK Gedang
776	Jalan Rusak	Desa dari Spg. Besadi Sampai Dusun Sepirak
777	Jalan Rusak	Desa Besadi
778	Jalan Rusak	Dusun Durian Mulo Kampung Manis
779	Jalan Rusak	Dusun Lau Mentar
780	Rumah Tidak Layak Huni	Desa Besadi
781	Pengaspalan Jalan	Kecamatan Kuala



Dinas Perumahan dan Permukiman

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Jalan Jelek dan Belubang	Dusun IV Kecamatan Hinai Kab. Langkat
2	Pengorekan parit drainase	Desa Air Hitam Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
3	Pengadaan sarana air bersih Dusun V Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat	Dusun V Desa Air Hitam, Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
4	Pengaspalan Gg. Bilal Dusun 1 Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Sepj. 900 m x 2,5 m	Gg. Bilal Dusun 1 Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
5	Penyediaan air bersih bagi masyarakat Dusun X Desa Halaban	Dusun X Desa Halaban Desa Halaban Kec. Besitang Kab.Langkat
6	Pembangunan Jembatan Sei Teladeh Dusun Sei Teladeh Desa Batu Jonjong Kec. Bahorok Sepj.25 m x 3 m	Jembatan Sei Teladeh Dusun Sei Teladeh Desa Batu Jonjong Desa Batu Jonjong Kec. Bahorok Kab.Langkat
7	Pembangunan Sumur Bor untuk air bersih dan pipanisasi Dusun Kampung Baru Desa Batu Jonjong Kec. Bahorok	Dusun Kampung Baru Desa Batu Jonjong Desa Batu Jonjong Kec. Bahorok Kab.Langkat
8	Jalan Lingkungan Rusak	Desa Kelantan Kec. Brandan Barat Kab.Langkat
9	Pipanisasi sarana air bersih Dusun Bangun Jahe Desa Rumah Galuh Kec. Sei Bingai	Dusun Bangun Jahe Desa Rumah Galuh Desa Rumah Galuh Kec. Sei Bingai Kab.Langkat
10	Pemasangan Tiang Listrik di Dusun Sebatu dan Dusun III Desa Suka Rakyat Kec. Bahorok	Dusun Sebatu dan Dusun III Desa Suka Rakyat Desa Suka Rakyat Kec. Bahorok Kab.Langkat
11	Pembuatan Sumur Bor Dusun VIII Kelantan Luar Desa Pasar Rawa Kec.Gebang sebanyak 1 unit	Dusun VIII Kelantan Luar Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
12	Pembuatan Sumur Bor Dusun VI, V, VII, XI dan X Desa pasar Rawa Kec. Gebang sebanyak 5 Unit	Dusun VI, V, VII, XI dan X Desa pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
13	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Tawang Mangu Kelurahan Kwala Bingai Kec. Stabat Sepj. 380 m x 2,5 m	Jl. Tawang Mangu Kelurahan Kwala Bingai Kel. Kwala Bingai Kec.Stabat Kab.Langkat
14	Rabat Beton Gang Keluarga Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec.Stabat Sepj.100 m x 2 m	Gang Keluarga Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
15	Rabat Beton Gang Sodara Dusun 3 Desa Ara Condong Kec. Stabat Sepj. 100 m x 2 m	Gang Sodara Dusun 3 Desa Ara Condong Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
16	Banjir, Tidak Adanya Saluran Air	Jalan Kartini Lingkungan III Karya Kelurahan Kwala Bingai Kec. Stabat
17	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Gunung Lawu Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Sepj. 800 m x 3 m	Jl. Gunung Lawu Desa Kwala Begumit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
18	Jalan Rusak	Gang Sepakat Dusun V Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat
19	Jalan Rusak	Jalan Keluarga Desa Suka Jadi Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat
20	Jalan Rusak	Gang Rukun Dusun VI Desa Suka Jadi Kec. Hinai Kab. Langkat
21	Lening/Parit Beton Dusun Kota Lama Desa Telaga Jernih Kec.Secanggang Sepj. 800 m	Dusun Kota Lama Desa Telaga Jernih Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab.Langkat
22	Jalan Jelek dan Berlubang	Lingkungan Dusun VIII Suka Damai Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai
23	Jalan Jelek dan Berlubang	Jalan Usaha Tani Dusun IV Kecamatan Hinai Kab. Langkat
24	Jalan Jelek dan Berlubang	Jalan Bakti Abri Dusun IV Kecamatan Hinai Kab. Langkat
25	Jalan Rusak Parah	Jalan menuju Desa Telaga Jernih Kecamatan Secanggang Kab. Langkat
26	Jalan Rusak	Gang Sempurna Kecamatan Secanggang Kab. Langkat
27	Kurangnya Penerangan dan Jaringan Listrik	Barak Induk Dusun V AMANDAMAI Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat
28	Tidak Adanya Pagar Pustu	Dusun I Titi Hitam Desa Teluk Meku Kec. Babalan Kab. Langkat
29	Jalan Rusak	Gang Insan Dusun I Titi Hitam Desa Teluk Meku Kec. Babalan
30	Rabat Beton Lingkungan VII Jl. Damai Raya Kel. Perdamaian Kec. Stabat Sepj. 400 m x 1 m	Lingkungan VII Jl. Damai Raya Kel. Perdamaian Kel. Perdamaian Kec.Stabat
31	Jalan Jelek dan Berlubang	Lingk. Gg Keluarga Dusun I.A Desa Suka Makmur Kec. Binjai
32	Longsor, erosi pada sisi parit	Lingk. Gg Keluarga menuju Sekolah SD Desa Suka Makmur Kec. Binjai
33	Lening Parit Jalan Antara dan Sempurna Lingkungan IV Sempurna Kec.Stabat Sepj. 500 m x 80 cm x 60 cm	Jalan Antara dan Sempurna Lingkungan IV Sempurna Kel. Perdamaian Kec. Stabat
34	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Tawang Mangu Kelurahan Kwala Bingai Kec. Stabat Sepj. 380 m x 2,5 m	Jl. Tawang Mangu Kelurahan Kwala Bingai Kel. Kwala Bingai Kec.Stabat
35	Lening Parit Lingkungan IV Sempurna Ke. Perdamaian Kec. Stabat Sepj. 800 m x 1 m x 80 cm	Lingkungan IV Sempurna Ke. Perdamaian Kel. Perdamaian Kec.Stabat
36	Rabat Beton Gang Keluarga Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec.Stabat Sepj.100 m x 2 m	Gang Keluarga Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Desa Ara Condong Kec. Stabat
37	Jalan Jelek dan Berlubang	Lingk. Dusun I.B Gang Bersama Desa Suka Makmur Kec. Binjai
38	Jalan Jelek dan Berlubang	Lingk. Gg Buntu Dusun II Kp Padang Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai
39	Jalan Jelek dan Berlubang	Lingkungan Dusun IV Maju Bersama Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai
40	Jalan Jelek dan Berlubang	Lingkungan Dusun IV Veteran Desa Kwala Air Hitam Kec. Selesai
41	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun VI Gang Kusnan Kecamatan Selesai Kab. Langkat
42	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun VII Gang Abadi 20 Kecamatan Selesai Kab. Langkat
43	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun VII Gang Abadi 21 Kecamatan Selesai Kab. Langkat
44	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun Melati Gang Puskesmas Desa Mancang Kec. Selesai
45	Tidak Adanya Aliran Listrik	Desa PIR ADB Kec. Besitang Kab. Langkat
46	Rabat Beton Gang Sodara Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec.Stabat Sepj.100 m x 2 m	Gang Sodara Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
47	Tidak Adanya Kanal	Dusun I s/d II Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
48	Rabat Beton Jalan Gg. Mangga Dusun Cinta Damai Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Sepj. 150 m x 2 m	Gg. Mangga Dusun Cinta Damai Desa Pantai Gemi Desa Pantai Gemi Kec.Stabat Kab.Langkat





No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
49	Pembuatan Rabat Beton Jln. Gang Bambu Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sepj. 200 m x 2 m	Jln. Gang Bambu Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
50	Pembuatan Bronjong/Tembok Penahan Parit Besar Jln. Mesjid Lingkungan III samping Gang Tower Kel.Sidomulyo Sepj.17 m	Parit Besar Jln. Mesjid Lingkungan III samping Gang Tower Kel.Sidomulyo Kel. Sidomulyo Kec. Stabat
51	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Karya Bakti Lingkungan I Kel.Sidomulyo Kec.Stabat Sepj. 500 m x 3 m	Jl. Karya Bakti Lingkungan I Kel.Sidomulyo Kel. Sidomulyo Kec. Stabat
52	Pengaspalan dengan Lapen Jln.Makam Dusun I Desa Tamaran Kec. Hinai Sepj. 500 m x 3 m	Jln.Makam Dusun I Desa Tamaran Desa Tamaran Kec. Hinai
53	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun F2 Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Sepj.700 m x 3 m	Dusun F2 Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang
54	Rabat Beton Lingk. VII Jln. Damai Raya Kel.Perdamaian Kec.Stabat Sepj. 400 m Uk. 100 x 70 x 70	Lingk. VII Jln. Damai Raya Kel.Perdamaian Kel. Perdamaian Kec.Stabat
55	Lening Parit Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kec.Stabat Sepj.800 m x 1 m x 80 cm	Parit Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kel. Perdamaian Kec.Stabat
56	Pengerasan Jalan Cendana Dusun III A Suka Makmur Desa Pantai Gemi Kec.Stabat Spj. 600 m x 2 m	Jalan Cendana Dusun III A Suka Makmur Desa Pantai Gemi Desa Pantai Gemi Kec.Stabat
57	Rabat Beton Jalan menuju Masjid Al Hasanah Kel.Bingai Kec.Wampu Sepj. 200 m	Jalan menuju Masjid Al Hasanah Kel.Bingai Kel. Bingai Kec. Wampu
58	Pengerasan jalan Lingk. I dari Simpang Iwan menuju Sampan Getek Kel. Bingai Kec.Wampu Sepj. 600 m x 3 m	Lingk. I dari Simpang Iwan menuju Sampan Getek Kel. Bingai Kec.Wampu
59	Pembangunan Lening Parit di Lingkungan II Batu Lapan Titi Panjang Kel.Bingai Kec.Wampu Sepj. 350 m x 1 m	Parit di Lingkungan II Batu Lapan Titi Panjang Kel.Bingai Kel. Bingai Kec. Wampu
60	Pembangunan Sumur Bor di Link.I Kel.Bingai Kec,Wampu sebanyak 1 unit	Link.I Kel.Bingai Kel. Bingai Kec. Wampu Kab.Langkat
61	Pembuatan Sumur Bor di Kampung Durian Desa Pertumbukan Kec.Wampu sebanyak 1 unit	Kampung Durian Desa Pertumbukan Desa Pertumbukan Kec. Wampu
62	Pengaspalan dengan Hot Mix Gang Mushola Dusun VII Desa Pematang Serai Kec.Tanjung Pura Sepj. 655 m x 3 m	Gang Mushola Dusun VII Desa Pematang Serai Desa Pematang Serai Kec.Tanjung Pura
63	Pembuatan Parit Beton Dusun Puji Dadi dari rumah Pak Mariono Desa Sei Bamban Sepj. 40 x 60 x 200 m	Dusun Puji Dadi dari rumah Pak Mariono Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
64	Pembuatan Parit Beton Dusun Puji Dadi II Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Sepj. 40 x 60 x 150 m	Dusun Puji Dadi II Sungai Tenang Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
65	Pembuatan Parit Beton Dari Rumah Ustad Asad sampai Parit Alam Dusun Sumberejo Utara Uk. 40 x 60 x 180 m	Dari Rumah Ustad Asad sampai Parit Alam Dusun Sumberejo Utara Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
66	Pembuatan Parit Beton dari Perbatasan Sidomulyo sampai dengan Jati Mulyo Sepj. 60 x 40 x 400 m	Dari Perbatasan Sidomulyo sampai dengan Jati Mulyo Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
67	Pembuatan Parit Beton Dusun Sidomulyo Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Sepj. 40 x 80 x 420 m	Dusun Sidomulyo Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
68	Pembuatan Rabat Beton Dari Rumah Ustad Asad sampai Parit Alam Dusun Sumberejo Utara Sepj. 100 x 60 x 180 m	Dari Rumah Ustad Asad sampai Parit Alam Dusun Sumberejo Utara Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
69	Pembuatan Rabat Beton Dari Rumah Sumdari sampai dengan Rumah Sutrisno Dusun Sumberejo Selatan Uk.2,5 m x 280 m	Dusun Sumberejo Selatan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
70	Pembuatan Parit Beton Samping Masjid Dusun Benteng Teladan Uk.40 x 60 x 350 m	Samping Masjid Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
71	Pembuatan Parit Beton Dusun Puji Dadi IV Desa Sei Bamban Ke.Batang Serangan Sepj. 60 cm x 40 cm x 200 m	Dusun Puji Dadi IV Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
72	Pembuatan Parit Beton Dari Rumah Pak Tugiman sampai depan Rumah Pak Kamino Dusun Titi Belanga Sentosa Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Sepj. 50 m Uk. 40 x 60 x 60	Parit Dari Rumah Pak Tugiman sampai depan Rumah Pak Kamino Dusun Titi Belanga Sentosa Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
73	Pembuatan Rabat Beton dari Rumah Suparmin sampai Rumah Mas Judi Dusun Tahun XI Sepj. 300 m x 2,5 m	Dari Rumah Suparmin sampai Rumah Mas Judi Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
74	Pembuatan Parit Beton Dari depan Kantor Desa Belong sampai depan rumah Pak Juliawan Dusun Titi Belangan Sentosa Desa Sei Bamban Kec.batang Serangan Sepj. 200 m Uk. 40 x 60 x 60	Parit Dari depan Kantor Desa Belong sampai depan rumah Pak Juliawan Dusun Titi Belangan Sentosa Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
75	Jalan Rusak	Dusun Wono Rejo Ujung Pinem
76	Tidak adanya Plat Deker Menuju Ekowisata Tangkahan	Perladangan Namo sialang Dusun Payabelang
77	Jalan Rusak	Dusun Rumah Sekolah Menuju Objek Wisata Tangkahan
78	Kurangnya Sumur Bor di Dusun Afdeling II	Dusun Afdeling II
79	Erosi Pada Sisi Parit	Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus
80	Jalan Rusak	Bukit Barat s/d Kampung Baru Dusun II Teladan Rejo
81	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun V Jati Mulyo
82	Erosi Pada Sisi Parit	Lingkungan VIII Pasar III
83	Kurangnya Penerangan	Dusun VI Bangun Murni
84	Jalan Rusak	Jalan Adan Lubis Lingkungan V Sido Sari Amor
85	Erosi PAda Sisi Parit	Pasar 3 dan Pasar 4
86	Tidak Adanya Pelat Deker	Jalan Samping Kantor Camat
87	Erosi pada sisi Parit	Pasar II Lingkungan VIII Sido Mukti
88	Penyediaan air bersih bagi masyarakat Dusun X Desa Halaban	Dusun X Desa Halaban Desa Halaban Kec. Besitang Kab.Langkat
89	Pembuatan Bronjong Tebing Sungai Sepj. 300 m	Lingkungan IV Kel. Kampung Lama Kel. Kampung Lama Kec.Besitang
90	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Banjaran Dusun X Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Sepj.450 m x 3 m	Jalan Banjaran Dusun X Desa Tanjung Jati Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Kab.Langkat
91	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun XIV dan XV Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Sepj. 300 m x 4 m	Dusun XIV dan XV Desa Tanjung Jati Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Kab.Langkat



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
92	Pengaspalan dengan Hot Mix Gang Wajar Dusun I Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Sepj.1100 m x 3 m	Gang Wajar Dusun I Desa Tanjung Jati Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Kab.Langkat
93	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun XI, XII dan XIII Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Sepj. 1000 m x 3 m	Dusun XI, XII dan XIII Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Kab.Langkat
94	Jalan Rusak	Jalan jeramba di Dsn III Desa Kelantan Kec.Brandan Barat Desa Kelantan Kec. Brandan Barat Kab.Langkat
95	Jalan Rusak	Dsn. III Desa Kelantan Kec.Brandan Barat Desa Kelantan Kec. Brandan Barat Kab.Langkat
96	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun XVI Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Sepj. 600 m x 3 m	Dusun XVI Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Kab.Langkat
97	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl.Tawang Mangu Kel.Kwala Bingai Kec.Stabat Sep. 380 m x 2,5 m	Jl.Tawang Mangu Kel.Kwala Bingai Kel. Kwala Bingai Kec.Stabat Kab.Langkat
98	Lening Parit di Dusun X Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Sepj.250 m Uk. 70 cm x 50 cm x 70 cm	Dusun X Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Kab.Langkat
99	Rabat Beton Gang Sodara Dusun 3 Desa Ara Condong Kec. Stabat Sepj. 100 m x 2 m	Gang Sodara Dusun 3 Desa Ara Condong Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
100	Pembuatan Rabat Beton Jln. Gang Bambu Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sepj. 200 m x 2 m	Jln. Gang Bambu Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
101	Rabat Beton Jln. Gang Mangga Dusun Cinta Damai Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Sepj. 150 m x 2 m	Jln. Gang Mangga Dusun Cinta Damai Desa Pantai Gemi Desa Pantai Gemi Kec.Stabat Kab.Langkat
102	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Karya Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sep. 400 m x 2,5 m	Jl. Karya Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
103	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Gunung Agung Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Sepj. 800 m x 3 m	Jl. Gunung Agung Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
104	Lening Parit Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kec.Stabat Sepj.800 m x 1 m x 80 cm	Parit Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat
105	Rabat Beton Gang Bersama Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec. Stabat Sepj. 75 m x 2 m	Gang Bersama Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
106	Lening Parit Jalan antara Murni dan Sempurna Lingk. IV Sempurna Kel.Perdamaian Sepj. 500 m x 80 m x 60 cm.	Parit Jalan antara Murni dan Sempurna Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat
107	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Karya Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sep. 400 m x 2,5 m	Jl. Karya Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
108	Pengaspalan jalan dengan Lapen Jl. Makam Dusun I Desa Tamaran Kec. Hinai Sepj. 500 m x 3 m	Jl. Makam Dusun I Desa Tamaran Kec. Hinai Kab.Langkat
109	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun F2 Desa Telaga Jernig Kec.Secanggang Sepj. 700 m x 3 m	Jalan Dusun F2 Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab.Langkat
110	Rabat Beton Lingkungan VII Jl. Damai Raya Sepj. 400 m x 1 m	Jl. Damai Raya Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat
111	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl.Cendrawasih Lingkungan VII Kel.Kwala Bingai Kec. Stabat Sepj. 450 m x 3 m	Jl.Cendrawasih Lingkungan VII Kel. Kwala Bingai Kec.Stabat Kab.Langkat
112	Lening/Parit Beton Dusun Kota Lama Sepj. 800 m	Dusun Kota Lama Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab.Langkat
113	Lening Parit Lingkungan IV Sempurna Sepj.800 m x 1 m x 80 cm	Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kel. Perdamaian Kec.Stabat
114	Pengaspalan dengan Hot Mix Benteng Dusun VI ke Dusun II Lorong Cina Desa Cempa Kec.Hinai Sepj. 1000 m x 3 m	Benteng Dusun VI ke Dusun II Lorong Cina Desa Cempa Desa Cempa Kec. Hinai Kab.Langkat
115	Pengerasan jalan Lingkungan IV Sempurna Sepj. 1200 m x 5 m	Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kel. Perdamaian Kec.Stabat
116	Rabat Beton Jln. Gang Mangga Dusun Cinta Damai Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Sepj. 150 m x 2 m	Jln. Gang Mangga Dusun Cinta Damai Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Desa Pantai Gading Kec. Secanggang Kab.Langkat
117	Lening Parit Jalan antara Murni dan Sempurna Lingk. IV Sempurna Kel.Perdamaian Sepj. 500 m x 80 m x 60 cm.	Jalan antara Murni dan Sempurna Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat
118	Rabat Beton Gang Keluarga Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec.Stabat Sepj.100 m x 2 m	Gang Keluarga Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec.Stabat Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
119	Rabat Beton Gang Sodara Dusun 3 Desa Ara Condong Kec. Stabat Sepj. 100 m x 2 m	Gang Sodara Dusun 3 Desa Ara Condong Kec. Stabat Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
120	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Tawang Mangu Kelurahan Kwala Bingai Kec. Stabat Sepj. 380 m x 2,5 m	Jl. Tawang Mangu Kelurahan Kwala Bingai Kec. Stabat Kel. Kwala Bingai Kec.Stabat Kab.Langkat
121	Pengerasan Jln Gunung Semeru Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Sepj. 1000 m x 3 m	Jln Gunung Semeru Dusun I Bengkel Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
122	Pembuatan Rabat Beton Jln. Gang Bambu Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sepj. 200 m x 2 m	Jln. Gang Bambu Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
123	Lening/Parit Beton Dusun Kota Lama Desa Telaga Jernih Kec.Secanggang Sepj. 800 m	Dusun Kota Lama Desa Telaga Jernih Kec.Secanggang Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab.Langkat
124	Pembuatan Bronjong/Tembok penahan parit besar Jl. Mesjid Lingkungan III Samping Gang Tower Sepj. 17 m	Jl. Mesjid Lingkungan III Samping Gang Tower Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab.Langkat
125	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Karya Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sep. 400 m x 2,5 m	Jl. Karya Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Kec. Stabat Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
126	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Gunung Agung Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Sepj. 800 m x 3 m	Jl. Gunung Agung Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
127	Rabat Beton Lingkungan VII Jl. Damai Raya Kel. Perdamaian Kec. Stabat Sepj. 400 m x 1 m	Lingkungan VII Jl. Damai Raya Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat
128	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl.Cendrawasih Lingkungan VII Kel.Kwala Bingai Kec. Stabat Sepj. 450 m x 3 m	Pengaspalannjalan lingkungan Kel. Kwala Bingai Kec.Stabat Kab.Langkat
129	Pengerasan jalan Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kec. Stabat Sepj. 1200 m x 5 m	Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kec. Stabat Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat
130	Kurangnya Air Bersih	Dusun X
131	Erosi pada sisi Parit	Dusun X



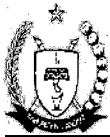
No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
132	Pembangunan Jalan Jeramba	Dsn III Desa Kelantan
133	Jalan Rusak	Desa Kelantan Kec. Brandan Barat Kab.Langkat
134	Pembangunan Jalan Jeramba	Dsn III Desa Kelantan
135	Jalan Rusak	Desa Kelantan Kec. Brandan Barat Kab.Langkat
136	Kurangnya Air Bersih	Dusun X
137	Pembuatan parit beton di Dusun V, IX, X dan Dusun ASABRI di Perumahan Langkat Indah Desa Air Hitam. 850 m	Dusun V, IX, X dan Dusun ASABRI di Perumahan Langkat Indah Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang
138	Pengaspalan dengan Hot Mix Sepj. 380 m x 2,5 m	Jl. Tawang Mangu Kel.Kwala Bingai Kec.Stabat
139	Rabat Beton Jln. Gang Mangga Sepj. 150m x 2m	Jln. Gang Mangga Dusun Cinta Damai Desa Pantai Gemi Kec.Stabat
140	Rabat Beton Gang Keluarga Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec.Stabat Sepj.100 m x 2 m	Gang Keluarga Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec.Stabat
141	Rabat Beton Gang Sodara Dusun 3 Sepj. 100 m x 2 m	Gang Sodara Dusun 3 Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
142	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Gunung Lawu Sepj. 800m x 3m	Jl. Gunung Lawu Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
143	Pembuatan Rabat Beton Jln. Gang Bambu Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sepj. 200 m x 2 m	Jln. Gang Bambu Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
144	Pembuatan Parit Beton Dusun III Simpang Parit 2 sampai Masjid Desa Pasar Rawa Kec.Gebang Sepj. 500 m	Dusun III Simpang Parit 2 sampai Masjid Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
145	Rabat Beton Dusun IV Wono Sari Gang Famili, Gang Sawo, Gang Damai dan Gang Masjid Desa Pasar Rawa Sepj. 1500 m	Dusun IV Wono Sari Gang Famili, Gang Sawo, Gang Damai dan Gang Masjid Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
146	Lening Parit Dusun Kampung Antara Sepj.500 m	Dusun Kampung Antara Desa Adin Tengah Desa Adin Tengah Kec, Salapian
147	Rabat Beton Gang Bersama Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec. Stabat Sepj. 75 m x 2 m	Gang Bersama Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
148	Pembangunan Pipanisasi air bersih Sepj.3.970 m	Desa Telagah Desa Telagah Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
149	Pembuatan Bronjong Tebing Sungai di Lingkungan IV Kel. Kampung Lama Kec.Besitang Sepj. 300 m	Lingkungan IV Kel. Kampung Lama Kel. Kampung Lama Kec.Besitang Kab.Langkat
150	Pengerasan jalan Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kec.Stabat Sepj. 1200 m x 5 m	Jalan Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat
151	Rabat Beton Gang Bersama Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec. Stabat Sepj. 75 m x 2 m	Gang Bersama Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
152	Erosi Pada Sisi Parit	Dusun Tanjung Gunung
153	Rabat Beton Gang Bersama Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec. Stabat Sepj. 75 m x 2 m	Gang Bersama Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
154	Pengaspalan dengan Hot Mix Lingkungan VII Jl. Cendrawasih Kel. Kwala Bingai Kec. Stabat Sepj. 450 m x 3 m	Lingkungan VII Jl. Cendrawasih Kel. Kwala Bingai Kec.Stabat Kel. Kwala Bingai Kec.Stabat Kab.Langkat
155	Lening Parit Jalan antara Murni dan Sempurna Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Sepj. 500 m x 80 m x 60 cm.	Parit Jalan antara Murni dan Sempurna Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat
156	Pembuatan Parit Beton Dusun Puji Dadi SD Impres Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Sepj. 40 x 60 x 200 m	Dusun Puji Dadi SD Impres Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
157	Pembuatan Parit Beton Balai Desa sampai dengan sungai Dusun Sumberejo Selatan Desa Sei Bamban Uk.40 x 60 x 200 m	Balai Desa sampai dengan sungai Dusun Sumberejo Selatan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
158	Pembuatan Rabat Beton Dusun Puji Dadi III Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Sepj.2,5 m x 700 m	Dusun Puji Dadi III Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
159	Pembuatan Rabat Beton Dari Simpang Legiran sampai Rumah Acai Dusun Jati Mulyo Sepj. 100 x 73 x 173 m	Dari Simpang Legiran sampai Rumah Acai Dusun Jati Mulyo Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
160	Pembuatan Parit Beton Dari Rumah Pak Ngadiman samap Pak Kaswin Dusun Titi Belanga Sepj. 40 x 60 x 60 x 200 m	Parit Dari Rumah Pak Ngadiman samap Pak Kaswin Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
161	Rabat Beton Gang Keluarga Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec.Stabat Sepj.100 m x 2 m	Gang Keluarga Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
162	Lening Parit Jalan Pemukiman Simpang Tiga Polindes s/d Rumah Japet Dusun Tanjung Gunung Sepj.300 m	Dusun Tanjung Gunung Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru Kab.Langkat
163	Lening Parit jalan pemukiman depan GBKP ke jalan Mbacang Dusun Rih Sogong Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru Sepj.300 m	Jalan pemukiman depan GBKP ke jalan Mbacang Dusun Rih Sogong Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru Kab.Langkat
164	Lening Parit Jalan Pemukiman depan Rumah Untung Dusun RIH Sogong Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru Sepj.100 m	Jalan Pemukiman depan Rumah Untung Dusun RIH Sogong Desa Kuta Gajah Kec.Kutambaru Kab.Langkat
165	Pembuatan Gorong-Gorong Parit Lorong I di teruskan ke sungai Banjaran Desa Mekar Sawit Kec.Sawit Seberang	Parit Lorong I di teruskan ke sungai Banjaran Desa Mekar Sawit Desa Mekar Sawit Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat
166	Erosi Pada Sisi Parit	Dusun Rih Sogong
167	Erosi Pada Sisi Bendungan	Dusun I Mandailing
168	Rabat Beton Lingkungan VII Jl. Damai Raya Kel. Perdamaian Kec. Stabat Sepj. 400 m x 1 m	Jl. Damai Raya Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat
169	Rabat Beton Gang Bersama Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec. Stabat Sepj. 75 m x 2 m	Gang Bersama Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec. Stabat Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
170	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Gunung Lawu Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Sepj. 800 m x 3 m	Jl. Gunung Lawu Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
171	Pembangunan Parit Beton di Dusun 8 Sidomakmur Desa Gunung Tinggi Kec.Sirapit Sepj.400 m	Dusun 8 Sidomakmur Desa Gunung Tinggi Desa Gungung Tinggi Kec.Sirapit Kab.Langkat
172	Pembangunan jalan dengan Paving Blok di Dusun 8 Sidomakmur Desa Gungung Tinggi Kec. Sirapit Sepj.150 m x 2 m	Dusun 8 Sidomakmur Desa Gungung Tinggi Desa Gungung Tinggi Kec.Sirapit Kab.Langkat
173	Lening Parit Jalan antara Murni dan Sempurna Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Sepj. 500 m x 80 m x 60 cm.	Jalan antara Murni dan Sempurna Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat
174	Pengaspalan jalan Kampong Lama Dusun Tanjung Baru Desa Gungung Tinggi Kec.Sirapit Sepj. 450 m x 2,5 m	Kampong Lama Dusun Tanjung Baru Desa Gungung Tinggi Desa Gungung Tinggi Kec.Sirapit Kab.Langkat



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
175	Pengaspalan jalan Dusun 5 Gunung Baru Desa Gunung Tinggi Kec.Sirapit Sepj.400 m x 3 m	Dusun 5 Gunung Baru Desa Gunung Tinggi Desa Gungung Tinggi Kec.Sirapit Kab.Langkat
176	Pengaspalan Jalan PJKA Dusun 4 Desa Sendang Rejo Kec.Binjai Sepj.500 m x 2,5 m	Jalan PJKA Dusun 4 Desa Sendang Rejo Desa Sendang Rejo Kec.Binjai Kab.Langkat
177	Pembuatan Paving Blok di Jalan Lingkungan VIII Kelurahan Pekan Selesai Kec.Selesai Sepj. 85 m x 2,5 m	Jalan Lingkungan VIII Kelurahan Pekan Selesai Kel.Pekan Selesai Kec.Selesai Kab.Langkat
178	Pengaspalan dengan Hot Mix jalan Inpres di Lingkungan 8 Kelurahan Pekan Selesai Kec.Selesai Sepj.250 m 2,5 m	Jalan Inpres di Lingkungan 8 Kelurahan Pekan Selesai Kel.Pekan Selesai Kec.Selesai Kab.Langkat
179	Mohon agar Drainase di Desa Pulau Banyak Kec.tanjung Pura di masukan anggarannya di APBD Kab.Langkat	Desa Pulau Banyak Kec.tanjung Pura Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
180	Pengaspalan jalan Linkungan 7 Ladang Kapas Kel.Pekan Selesai Kec.Selesai Sepj.400 m x 3 m	Jalan Linkungan 7 Ladang Kapas Kel.Pekan Selesai Kel.Pekan Selesai Kec.Selesai Kab.Langkat
181	Pembuatan jalan dengan Paving Blok Lingkungan 7 Ladang Kapas Kel.Pekan Selesai Kec.Selesai Sepj.300 m x 3 m	Lingkungan 7 Ladang Kapas Kel.Pekan Selesai Kel.Pekan Selesai Kec.Selesai Kab.Langkat
182	Pengaspalan jalan lingkungan 8 menuju Lingkungan 9 Kel.Pekan Selesai Kec.Selesai Sepj. 400 m x 2,5 m	jalan lingkungan 8 menuju Lingkungan 9 Kel.Pekan Selesai Kel.Pekan Selesai Kec.Selesai Kab.Langkat
183	Pembuatan Lening Parit Lingkungan 8 menuju Rel Jalan Diponegoro Kel.Pekan Selesai Kec.Selesai Sepj. 700 m	Lingkungan 8 menuju Rel Jalan Diponegoro Kel.Pekan Selesai Kel.Pekan Selesai Kec.Selesai Kab.Langkat
184	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Jalan SMA Negeri Lingkungan Kel.Pekan Gebang Kec.Gebang Sepj.400 m 3 m	Jalan SMA Negeri Lingkungan Kel.Pekan Gebang Kel.Pekan Gebang Kec.Gebang Kab.Langkat
185	Rabat Beton/Peninggian 4 Gang (GG.Senangin, GG.Bawal, GG.Tongkol dan GG Cencaru) Jl.Jurung Kel Pekan Tanjung Pura	Jl.Jurung Kel Pekan Tanjung Pura Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
186	Pengadaan air bersih di Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura	Desa Pulau Banyak Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
187	Mohon Rabat Beton/Peninggian 4 Gang (Gg Senangin, GG.Bawal, GG.Tongkol dan GG Cencaru) Jl. Jurung	Gg Senangin, GG.Bawal, GG.Tongkol dan GG Cencaru, Jl. Jurung Kel.Pekan Tanjung Pura Kel.Pekan Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura
188	Mohon agar Drainase di Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura dimasukan anggarannya dalam APBD Kab.Langkat	Desa Pulau Banyak Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
189	Jalan Rusak	Lingkungan II Amal Kel Bela Rakyat
190	Pembuatan Parit Beton dari Rumah Pak mariono Dusun Puji Dadi I Desa Sei Bamban Sepj. 40x60x 200 m	Dusun Puji Dadi I Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
191	Pembuatan Parit Beton dari SD Inpres Dusun Puji Dadi I Desa Sei Bamban Kec. Batang Serangan Sepj. 40x60x 200 m	Dari SD Inpres Dusun Puji Dadi I Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
192	Pengaspalan dengan Hot Mix Gang Mushola Dusun VII Desa Pematang Serai Kec.Tanjung Pura Sepj. 655 m x 3 m	Gang Mushola Dusun VII Desa Pematang Serai Desa Pematang Serai Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
193	Pembuatan Drainase (Gorong-gorong) Dusun Jati Mulyo Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Uk.3 x 500 m	Dusun Jati Mulyo Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
194	Pembuatan Parit Beton Dusun Puji Dadi II Sungai Tenag Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Uk.40 x 60 x 150 m	Dusun Puji Dadi II Sungai Tenag Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
195	Pembuatan Parit Beton dari Rumah Ustad asad sampai Parit Alam Dusun Sumberejo Utara Sepj.40 x 60 x 180 m	Rumah Ustad asad sampai Parit Alam Dusun Sumberejo Utara Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
196	Pembuatan Rabat Beton dari Rumah Ustad asad sampai Parit Alam Dusun Sumberejo Utara Sepj.100 x 60 x 180 m	Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
197	Pembuatan Rabat Beton dari Simpang Legiran sampai Rumah Acai Dusun Jati Muyo Makmur Sepj.100 x 73 x 173 m	Simpang Legiran sampai Rumah Acai Dusun Jati Muyo Makmur Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
198	Pembuatan Parit Beton dari perbatasan Sidomulyo dengan Jati Mulyo Sepj.60 x 40 x 400 m	Perbatasan Sidomulyo dengan Jati Mulyo Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
199	Pembuatan Parit Beton Dusun Sido Mulyo Sepj.40 x 80 x 420 m	Dusun Sido Mulyo Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
200	Pembuatan Parit Beton samping Masjid Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Sepj.40 x 60 xx 350 m	Samping Masjid Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
201	Pembuatan Plat Deker Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Uk.1,5 m xx 3,5 m	Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
202	Pembuatan Parit Beton Balai Desa sampai dengan Sungai Dusun Sumberejo Selatan 40 x 60 x 200 m	Balai Desa sampai dengan Sungai Dusun Sumberejo Selatan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
203	Pembuatan Parit Beton dari Rumah Sumdari sampai dengan Rumah Husein Dusun Sumberejo Selatan Sepj.40 x 60 x 200 m	Dari Rumah Sumdari sampai dengan Rumah Husein Dusun Sumberejo Selatan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
204	Pembuatan Rabat Beton Dusun Puji Dadi III Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Sej. 2,5 m x 700 m	Dusun Puji Dadi III Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
205	Pembuatan Parit Beton Dusun Puji Dadi IV Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Sepj. 60 x 40 x 200 m	Dusun Puji Dadi IV Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
206	Pembuatan Parit Beton dari rumah Pak Ngadiman sampai Pak Kaswin Dusun Tahun Titi Belanga Uk.40 x 60 x 60 x 200 m	Dari rumah Pak Ngadiman sampai Pak Kaswin Dusun Tahun Titi Belanga Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
207	Pembuatan Parit Beton dari Rumah Pak Belong sampai Pak Gisol Dusun Titi Belanga Uk. 40 x 60 x 60 x 200 m	Dari Rumah Pak Belong sampai Pak Gisol Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
208	Pembuatan Parit Beton Dusun Tahun X Selatan Sepj.40 x 60 x 300 m	Dusun Tahun X Selatan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
209	Pembuatan Parit Beton dari Rumah Bapak Tugiman sampai depan Rumah Bapak Kamino Dusun Titi Belanga Sentosa Sepj. 40 x 60 x 60 x 50 m	Dari Rumah Bapak Tugiman sampai depan Rumah Bapak Kamino Dusun Titi Belanga Sentosa Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
210	Pembuatan Parit Beton dari Depan Kantor Desa Belong sampai RUMah Pak Juliawan Dusun Titi Belanga Sentosa Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Sepj. 40 x 60 x 60 x 200 m	Dari Depan Kantor Desa Belong sampai RUMah Pak Juliawan Dusun Titi Belanga Sentosa Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
211	Pembuatan Plat Deker Simpang Tuah Dusun Tahun X Selatan Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Uk.4 m	Simpang Tuah Dusun Tahun X Selatan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
212	Pembuatan Plat Deker di belakang rumah Suyanto Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Uk.1 x 5 m	Belakang rumah Suyanto Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat



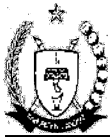
No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
213	Pembuatan Rabat Beton dari Rumah Suparmin sampai Rumah Mas Judi Dusun Tahun XI Uk. 2,5 m x 300 m	Dari Rumah Suparmin sampai Rumah Mas Judi Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
214	Pembuatan Plat Deker Dusun Klonie Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Uk. 2,5 m x 6 m	Dusun Klonie Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
215	Pengaspalan dengan Hot Mix Gg.Methodis Desa Securai Selatan Kec.Babalan Sepj.200 m x 3,5 m	Gg.Methodis Desa Securai Selatan Desa Securai Selatan Kec.Babalan Kab.Langkat
216	Pengaspalan dengan Hot Mix Gg.Damai Desa Securai Selatan Kec.Babalan Sepj.200 m x 3,5 m	Gg.Damai Desa Securai Selatan Desa Securai Selatan Kec.Babalan Kab.Langkat
217	Halaman Kantor Rusak	Kecamatan Kuala
218	Bendungan Rusak	Dusun III Mberiangan
219	Pengaspalan dengan Hot Mix Gang Amal Dusun Pasar Lebar Desa Securai Utara Kec.Babalan Sepj.800 m x 3,5 m x 0,2 m	Gang Amal Dusun Pasar Lebar Desa Securai Utara Desa Securai Utara Kec.Babalan Kab.Langkat
220	Plat Deker Simpang Tugu 100 THN Securai Pasar Desa Securai Utara Kec.babalan	Simpang Tugu 100 THN Securai Pasar Desa Securai Utara Desa Securai Utara Kec.Babalan Kab.Langkat
221	Normalisasi Parit Negara Dusun II Securai Pasar dan Dusun III Bukit Satu Desa Securai Utara Kec.babalan Sepj.2000 m	Parit Negara Dusun II Securai Pasar dan Dusun III Bukit Satu Desa Securai Utara Desa Securai Utara Kec.Babalan Kab.Langkat
222	Normalisasi Parit Istana (Titi Panjang) perbatasan Desa Securai Utara dan Desa Securai Selatan Kec.Babalan	Parit Istana (Titi Panjang) perbatasan Desa Securai Utara dan Desa Securai Selatan Desa Securai Utara Kec.Babalan Kab.Langkat
223	Penerangan Listrik	Desa Ujung Bandar Desa Ujung Bandar
224	Ruangan Aula Rusak	Kelurahan Pekan Kuala
225	Erosi Pada Sisi Sungai	Kelurahan Pekan Kuala
226	Jalan Rusak	Jalan Utama Link III Sido Slamet
227	Jalan Rusak	Kelurahan Pekan Kuala
228	Erosi Pada Sisi Sungai	Kelurahan Pekan Kuala
229	Erosi Pada Sisi Sungai	Kelurahan Pekan Kuala
230	Pembuatan Pagar	Kelurahan Pekan Kuala
231	Erosi Pada Sisi Parit	Jalan Parit 10 RT10/RW02
232	Jalan Rusak	Kelurahan Bela Rakyat
233	Erosi Pada Sisi Parit	Jalan Kuala Binjai
234	Jalan Rusak	GANG RT I/RW I Link II Amal
235	Jalan Rusak	Desa Dalam Nama
236	Pembangunan Pagar Sekolah	Desa Sei Penjara
237	Pengaspalan dengan Hot Mix di Lingkungan V Sei Pucuk menuju SMA Negeri Kel.Pekan Besitang Kec.Besitang Sepj.250 m x 3 m	Lingkungan V Sei Pucuk menuju SMA Negeri Kel.Pekan Besitang Kel.Pekan Besitang Kec.Besitang Kab.Langkat
238	Belum ada Lampu Jalan	Lingkungan V Namo Kumbahang Kecamatan Salapian
239	Tiang Listrik Belum ada	Lingkungan V Namo Kumbahang Kecamatan Salapian
240	Pembangunan MCK	Desa SEI PENJARA
241	Mohon pembangunan Jalan Jeramba di Dsn III Desa Kelantan Kec.Brandan Barat Sepj.100 m x 1,5 m	Jalan Jeramba di Dsn III Desa Kelantan Desa Kelantan Kec.Brandan Barat Kab.Langkat
242	Mohon pembangunan Sumur Bor air Mushola Dsn.III	Mushola Dsn.III Desa Kelantan Desa Kelantan Kec.Brandan Barat
243	Pembangunan Rabat Beton di Dsn III Sepj.1500 m x 2 m	Dsn III Desa Kelantan Desa Kelantan Kec.Brandan Barat
244	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix di Lingkungan V Sei Pucuk menuju SMA Negeri Kel.Pekan Besitang Sepj. 250 m x 3 m	Lingkungan V Sei Pucuk menuju SMA Negeri Kel.Pekan Besitang Kel.Pekan Besitang Kec.Besitang Kab.Langkat
245	Pembangunan Tembok penahan tanah di Lingkungan V Sei Pucuk menuju SMA Negeri Kel.Pekan Besitang Sepj. 50 m	Lingkungan V Sei Pucuk menuju SMA Negeri Kel.Pekan Besitang Kel.Pekan Besitang Kec.Besitang Kab.Langkat
246	Penyediaan air bersih bagi masyarakat Dsn X Desa Halaban	Dsn X Desa Halaban Desa Halaban Kec.Besitang Kab.Langkat
247	Mohon Pembangunan jalan Jeramba di Dsn III Desa Kelantan Kec.Brandan Barat Sepj. 100 m x 1,5 m	Jalan Jeramba di Dsn III Desa Kelantan Desa Kelantan Kec.Brandan Barat Kab.Langkat
248	Pembangunan Sumur Bor air Mushola Dsn III Desa Kelantan	Dsn III Desa Kelantan Desa Kelantan Kec.Brandan Barat Kab.Langkat
249	Pembangunan Rabat Beton di Dsn III Sepj.1500 m x 2 m	Dsn III Desa Kelantan Desa Kelantan Kec.Brandan Barat Kab.Langkat
250	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun 4 Pasar 8 Sepj.800 m x 3 m	Dusun 4 Pasar 8 Desa Lau Mulgab Desa Lau Mulgab Kec.Selesai
251	Pembuatan Plat Deker Lau Tuala di Dusun 2 Benteng Sawah Desa Lau Mulgab Kec.Selesai Uk.6 m x 3,5 m	Lau Tuala di Dusun 2 Benteng Sawah Desa Lau Mulgab Desa Lau Mulgab Kec.Selesai Kab.Langkat
252	Pengaspalan jalan Dusun 4 Paya Jambu Sidomulyo Desa Bekulap Kec.Selesai Sepj.300 m x 4 m	Dusun 4 Paya Jambu Sidomulyo Desa Bekulap Desa Bekulap Kec.Selesai Kab.Langkat
253	Pembuatan Paving Blok Dusun 2 Gang Paijo Desa Bekulap Kec.Selesai Sepj.400 m x 2,5 m	Dusun 2 Gang Paijo Desa Bekulap Desa Bekulap Kec.Selesai Kab.Langkat
254	Pembuatan Paving Blok Dusun 5 GG Mitra Desa Bekulap Kec.Selesai Sepj.350 m x 2,5 m	Dusun 5 Gg Mitra Desa Bekulap Desa Bekulap Kec.Selesai
255	Pengerasan Jalan Dusun Tanjung Baru Kampung Pantai Ara Desa Perhiasan Kec.Selesai Sepj.150 m x 3 m	Jalan Dusun Tanjung Baru Kampung Pantai Ara Desa Perhiasan Desa Perhiasan Kec.Selesai Kab.Langkat
256	Pembuatan 1 Unit MCK di Dusun Paya Kerbau Desa Perhiasan	Dusun Paya Kerbau Desa Perhiasan Desa Perhiasan Kec.Selesai
257	Pembangunan Rehap rumah	Desa Besadi Kecamatan Kuala
258	Rabat Beton Jalan ke Kuta Male Lingkungan V Namo Kumbahang Kec.Salapian Sepj.1200 m x 2,5 m	Jalan ke Kuta Male Lingkungan V Namo Kumbahang Desa Naman Jahe Kec.Salapian Kab.Langkat
259	Butuh Peningkatan Jalan	Jalan DSN IV Gg Sempurna
260	Pengaspalan Lapen Jalan Baru Dusun Inpres Sepj.3 m x 350 m	Dusun Inpres Desa Sido Makmur Desa Sido Makmur Kec. Kuala
261	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Jalan SD Impres Lingkungan I Sukatani Kel Bela Rakyat Kec.Kuala Sepj.3 m x 300 m	Jalan SD Impres Lingkungan I Sukatani Kel Bela Rakyat Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala
262	Pembangunan Lening Parit Beton Lingkungan II Amal Kel.Bela	Lingkungan II Amal Kel.Bela Rakyat Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
	Rakyat Kec.Kuala Sepj.500 m	
263	Pengaspalan dengan Lapen Jalan Gang Rahayu Lingk II Pasar Lori Kel.Pekan Kuala Kec.Kuala Sepj.3 m x 200 m	Jalan Gang Rahayu Lingk II Pasar Lori Kel.Pekan Kuala Kel.Pekan Kuala Kec. Kuala
264	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Tugu Durian Simpang Durian Mulo Link. II Amal Kel,Bela Rakyat Kec.Kuala Sepj.5 m x 350 m	Tugu Durian Simpang Durian Mulo Link. II Amal Kel,Bela Rakyat Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala
265	Pemasangan Paving Blok halaman Kantor Camat Kuala seluas 500 m	Kec. Kuala
266	Lanjutan pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Link.I Sidodadi Kel.Pekan Kuala Kec.Kuala Sepj.614 m	Jalan Link.I Sidodadi Kel.Pekan Kuala Kel.Pekan Kuala Kec. Kuala
267	Rabat Beton Gang Sejahtera Kel.Pekan Sepj.200 m x 2 m	Gang Sejahtera Kel.Pekan Kuala Kel.Pekan Kuala Kec. Kuala
268	Pengaspalan dengan Lapen Jalan Utama Link.VIII Sido Selamat Kel.Pekan Kuala Kec.Kuala Sepj. 300 m x 3 m	Jalan Utama Link.VIII Sido Selamat Kel.Pekan Kuala Kel.Pekan Kuala Kec. Kuala
269	Rabat Beton Gang Imam Pemula Sepj.200 m x 2 m	Gang Imam Pemula Kel.Pekan Kuala Kel.Pekan Kuala Kec. Kuala
270	Pengerasan jalan Bakti ABRI Link.VIII Undian dan Link.VI Rel Kel.Bela Rakyat Kec.Kuala Sepj.300 m x 3 m	Jalan Bakti ABRI Link.VIII Undian dan Link.VI Rel Kel.Bela Rakyat Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala
271	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan menuju SD Impres Link I Sukatani Kel.Bela Rakyat Kec.Kuala Sepj.300 m x 3 m	Jalan menuju SD Impres Link I Sukatani Kel.Bela Rakyat Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala
272	Pemasangan Paving Blok di Jalan Gang Keluarga RT 1 ke RT II Sepj.70 m	Jalan Gang Keluarga RT 1 ke RT II Kel.Bela Rakyat Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala
273	Lanjutan Lening Parit beton Jalan Sepj.1000 m	Link.III Tumakninah Kel.Bela Rakyat Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala
274	Pemasangan Paving BlokJln.Gang RT 1/RW I Sepj.290	Gang RT 1/RW I Link.II Amal Kel.Bela Rakyat Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala
275	Pembuatan Lening Parit Jalan Parit 10 RT 04/RW 02 Sepj.500 m	Jalan Parit 10 RT 04/RW 02 Kel.Bela Rakyat Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala
276	Pembangunan saluran Tipe C Jalan Titi Panjang	Titi Panjang Desa Dalan Naman Desa Dalan Naman Kec. Kuala
277	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Jalan Sepj.200 m x 3 m	Jalan Namo Jawi Desa Dalan Naman Desa Dalan Naman Kec. Kuala
278	Pembuatan Tembok penahan tanah Sepj.200 m	Dusun III Sekar Wangi Desa Suka Damai Desa Suka Damai Kec. Kuala
279	Pemasangan Paving Blok Jalan Sepj.2 m x 100 m	Gang Bowo Dusun V Sidomulio Desa Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
280	Pemasangan Paving Blok Jalan Sepj.2 m x 70 m	Gang Doyok Dusun V Sidomulio Desa Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
281	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Gang Becek Dusun II Kampung Baru Desa Bekiung Kec.Kuala Uk 3 m x 500 m	Jalan Gang Becek Dusun II Kampung Baru Desa Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
282	Jalan Rusak	Desa Suka Damai
283	Erosi	Dusun III Sekar Wangi
284	Pemasangan Paving Blok Jalan gang Kecil Dusun V Menjahong A Desa Bekiung Kec.Kuala Sep. 3 m x 250 m	Jalan gang Kecil Dusun V Menjahong A Desa Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
285	Erosi Pada Sisi Sungai	Dusun II Desa Bekiung
286	Erosi Pada Sisi Bendungan	Desa Bekiung
287	Jalan Rusak	Gg. Bowo Dusun V Sidomulio
288	Jalan Rusak	Gg. Doyok Dusun V Sidomulio
289	Jalan Rusak	Gg. Becek Dusun II Kampung Baru
290	Jalan Rusak	Dusun VI JALAN TERDAM MENUJU SD Menjahong B
291	Erosi / Longsor	Desa Besadi
292	Erosi Pada Sisi Jalan	Jalan Terdram Menuju Dusun V dan VI Menjahong B
293	Jalan Rusak	Gg. Kecil Dusun V Menjahong A
294	Erosi	Dusun VII TANJUNG BUNGA
295	Erosi / Longsor	Desa Besadi
296	Pembangunan Gorong Gorong	Desa Besadi
297	Jalan Rusak	Desa Parit Bindu
298	Bedah rumah	Desa Pir ADB Kecamatan Besitang
299	Pembuatan Bronjong	Dusun Pancang Lima
300	Pembangunan Bronjong	Mohon Pembangunan Bronjong Jalan Dusun Pancang Lima
301	Pengerasan Jln Gunung Semeru Dusun Bengkel Desa Kwala Begumit Kec.Stabat Sepj. 1000 m x 3 m	Jln Gunung Semeru Dusun Bengkel Desa Kwala Begumit Desa Kwala Begumit Kec. Stabat Kab.Langkat
302	Rabat Beton Gang Bersama Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec. Stabat Sepj. 75 m x 2 m	Gang Bersama Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
303	Lening/Parit Beton Dusun Kota Lama Desa Telaga Jernih Kec.Secanggang Sepj. 800 m	Dusun Kota Lama Desa Telaga Jernih Desa Telaga Jernih Kec. Secanggang Kab.Langkat
304	Pembuatan Bronjong/Tembok penahan parit besar Jl. Mesjid Lingkungan III Samping Gang Tower Kel. Sidomoulyo Sepj. 17 m	Jl. Mesjid Lingkungan III Samping Gang Tower Kel. Sidomoulyo Kel. Sidomulyo Kec. Stabat Kab.Langkat
305	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Karya Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sep. 400 m x 2,5 m	Jl. Karya Dusun Mandiri Desa Karang Rejo Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
306	Pengaspalan dengan Hot Mix Jln.Karya Bakti Sepj.500 m x 3 m	Jln.Karya Bakti Lingkungan I Kel.Sidomulyo Kec. Stabat
307	Pengaspalan jalan dengan Lapen Jl. Makam Sepj. 500 m x 3 m	Jl. Makam Dusun I Desa Tamaran Desa Tamaran Kec. Hinai
308	Rabat Beton Lingkungan VII Jl. Damai Raya Kel. Perdamaian Kec. Stabat Sepj. 400 m x 1 m	Lingkungan VII Jl. Damai Raya Kel. Perdamaian Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat
309	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl.Cendrawasih Lingkungan VII Kel.Kwala Bingai Kec. Stabat Sepj. 450 m x 3 m	Jl.Cendrawasih Lingkungan VII Kel.Kwala Bingai Kel. Kwala Bingai Kec.Stabat Kab.Langkat
310	Lening Parit Jalan antara Murni dan Sempurna Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Sepj. 500 m x 80 m x 60 cm.	Jalan antara Murni dan Sempurna Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kel. Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat
311	Rabat Beton Jln. Gang Mangga Dusun Cinta Damai Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Sepj. 150 m x 2 m	Jln. Gang Mangga Dusun Cinta Damai Desa Pantai Gemi Desa Pantai Gemi Kec.Stabat Kab.Langkat
312	Pengerasan jalan Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kec.	Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kel. Perdamaian Kec.Stabat



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
	Stabat Sepj. 1200 m x 5 m	Kab.Langkat
313	Lening Parit Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kec.Stabat Sepj.800 m x 1 m x 80 cm	Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kec.Stabat Kab.Langkat
314	Erosi / Longsor	Desa Beruam
315	Erosi Dan Sering Banjir	Desa Namo Belin
316	Jalan Rusak	Desa Balai Kasih
317	Halaman Sekolah Rusak	Desa Beruam
318	Pembuatan Pagar Kantor	Kecamatan Sei Bingai
319	Irigasi Rusak	Desa Pekan Sawah
320	Irigasi Rusak	Desa Telagah
321	Erosi PADA SISI Parit	Desa Purwobinangun
322	Jalan Rusak	Desa Telaga
323	Jalan Rusak	Desa Gunung Ambat
324	Rabat Beton Gang Keluarga Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Kec.Stabat Sepj.100 m x 2 m	Gang Keluarga Dusun 3 Gang Famili Desa Ara Condong Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
325	Pembuatan Parit	Desa Pasar IV Namu Trasi
326	Jalan Rusak	Desa Balai Kasih
327	Pembuatan Rabat Beton Jln. Gang Bambu Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sepj. 200 m x 2 m	Jln. Gang Bambu Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
328	Mohon pembangunan Rehap Rumah tidak layak huni Desa Besadi Kec.Kuala sebanyak 20 Unit	Desa Besadi Kec. Kuala
329	Mohon Pembangunan MCK Umum sebanyak 50 unit	Desa Besadi Kec. Kuala
330	Pembangunan Lening Parit Jalan Pertanian Dusun III Desa Parit Bindu Kec.Kuala Sepj.3000 m	Jalan Pertanian Dusun III Desa Parit Bindu Desa Parit Bindu Kec. Kuala
331	Pengaspalan jalan denagn Hot Mix Jalan Kampung Beliler Desa Balai Kasih Kec.Kuala Sepj. 250 m x 3 m	Jalan Kampung Beliler Desa Balai Kasih Desa Balai Kasih Kec. Kuala
332	Pengaspalan jalan denagn Hot Mix Jalan Dusun IV Desa Balai Kasih Kec.Kuala Sepj. 175 m x 3 m	Jalan Dusun IV Desa Balai Kasih Desa Balai Kasih Kec. Kuala
333	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Jalan Dusun IV Gang Sempurna Desa Balai Kasih Kec.Kuala Sepj. 400 m x 3 m	Jalan Dusun IV Gang Sempurna Desa Balai Kasih Desa Balai Kasih Kec. Kuala
334	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Jalan Dusun II Masjid Gang Madrasah Desa Balai Kasih Kec.Kuala Sepj. 175 m x 3 m	Jalan Dusun II Masjid Gang Madrasah Desa Balai Kasih Desa Balai Kasih Kec. Kuala
335	Pengaspalan jalan di Dusun Sanggapura Sepj.500 m x 3 m	Dusun Sanggapura Desa Belinten Desa Belinten Kec.Sei Bingai
336	Lening Parit Desa Rumah Galuh Kec.Sei Bingai Sepj.500 m	Desa Rumah Galuh Kec. Sei Bingai
337	Pengaspalan jalan di Dusun Sanggapura Sepj.500 m x 3 m	Dusun Sanggapura Desa Belinten Desa Belinten Kec.Sei Bingai
338	Rabat Beton Jalan Lintas Pertanian dari Simpang Jalan Raya menuju Jembatan melewati Tanah Wakaf Sepj.1500 m	Simpang Jalan Raya menuju Jembatan melewati Tanah Wakaf Dusun II Lau Tenges Desa Purwobinangun Desa Purwobinangun Kec.Sei Bingai
339	Pembangunan Lening Parit Dusun V Sebelah Timur Desa Purwobinangun Kec.Sei Bingai Sepj.500 m	Dusun V Sebelah Timur Desa Purwobinangun Desa Purwobinangun Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
340	Pembangunan Parit Beton di Jalan Beringin Jaya dekat kampung Beringin Jaya dan Jembatan Sepj.250 m x 3 m	Jalan Beringin Jaya dekat kampung Beringin Jaya dan Jembatan Desa Pasar IV Namo Terasi Desa Pasar IV Namo Terasi Kec.Sei Bingai
341	Pembuatan Parit Dusun II Jalan Pondok Besar Desa Pasar IV Namo Terasi Kec.Sei Bingai Sepj.300 m	Dusun II Jalan Pondok Besar Desa Pasar IV Namo Terasi Desa Pasar IV Namo Terasi Kec.Sei Bingai Kab.langkat
342	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Jalan Bandar Meriah Desa Namu Ukur Utara Kec.Sei Bingai Sepj.2000 m x 4 m	Jalan Bandar Meriah Desa Namu Ukur Utara Desa Namu Ukur Utara Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
343	Pembangunan Plat Deker menuju Kawasan Ekowisata Tangkahan di Perladangan Namo Sialang Uk.3 m x 4 m	Perladangan Namo Sialang Dusun Paya Mbelang Desa Namo Sialang Desa Namo Sialang Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
344	Pembuatan Sumur Bor	Dusun Afdeling II Desa Namo Sialang Desa Namo Sialang Kec.Batang Serangan
345	Pembuatan Sumur Bor	Dusun Afdeling II Desa Namo Sialang Desa Namo Sialang Kec.Batang Serangan
346	Lanjutan Lening Parit di Lorong Lapangan Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Kec.Padang Tualang Sepj.500 m	Lorong Lapangan Dusun Karang Sari Desa Tanjung Putus Desa Tanjung Putus Kec.Padang Tualang Kab.Langkat
347	Pemasangan Paving Blok Dusun V Jati Mulyo Desa Tebing Tanjung Selamat Kec.Padang Tualang Sepj.250 m x 2 m	Dusun V Jati Mulyo Desa Tebing Tanjung Selamat Desa Tebing Tanjung Selamat Kec.Padang Tualang Kab.Langkat
348	Lening Parit di Pasar II Lingkungan VIII Sido Mukti Kel.Tanjung Selamat Kec.Padang Tualang Sepj.250 m	Pasar II Lingkungan VIII Sido Mukti Kel.Tanjung Selamat Kec.Padang Tualang Kel.Tanjung Selamat Kec.Padang Tualang Kab.Langkat
349	Lanjutan Rabat Beton di Dusun VIII Lubuk Tapah Desa Besilam Kec.Padang Tualang Sepj.750 m x 3 m	Dusun VIII Lubuk Tapah Desa Besilam Desa Besilam Kec.Padang Tualang Kab.Langkat
350	Pengaspalan Lapen Jalan Adan Lubis Lingkungan V Sido Sari Amor Kel.Tajung Selamat Kec.Padag Tualang Sepj.300 m x 2,5 m	Jalan Adan Lubis Lingkungan V Sido Sari Amor Kel.Tajung Selamat Kel.Tanjung Selamat Kec.Padang Tualang Kab.Langkat
351	Pembangunan Parit Beton di Pasar 3 dan Pasar 4 dan Kel.Tajung Selamat Kec.Padag Tualang Sepj 1400 m	Pasar 3 dan Pasar 4 dan Kel.Tajung Selamat Kel.Tanjung Selamat Kec.Padang Tualang Kab.Langkat
352	Lening Parit di Lingkungan VIII Pasar III Kel.Tanjung Selamat Kec. Padang Tualang Sepj.250 m	Lingkungan VIII Pasar III Kel.Tanjung Selamat Kel.Tanjung Selamat Kec.Padang Tualang Kab.Langkat
353	Pengaspalan dengan Hot Mix Gang Gereja Dusun III Desa Air Hitam, Kecamatan GebangSepj.600 m x 3 m	Gang Gereja Dusun III Desa Air Hitam Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
354	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Dusun Kampung I Desa Mekar Sawit Kec.Sawit Seberang Sepj. 2,5 m x 350 m	Dusun Kampung I Desa Mekar Sawit Desa Mekar Sawit Kec.Sawit Seberang Kab.Langkat
355	Jalan Jelek dan Berlubang	Dusun Melati Gang Jala Desa Mancang Kec. Selesai Kab. Langkat
356	Pengaspalan jalan GG.Mesjid Sepj. 700 m x 3 m	Lingk.III Sejahtera Kel.Dendang Kel.Dendang Kec.Stabat
357	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Penerangan Sepj.500m x 3m	Jalan Penerangan Lingk. II Kel.Stabat Baru Kel.Stabat Baru Kec.Stabat

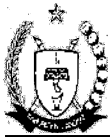


No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
358	Pengerasan jalan Simp.Masjid Al Falah menuju Benteng Dusun VI Kampung Durian Desa Pertumbukan Sepj.500 m x 3 m	Simp.Masjid Al Falah menuju Benteng Dusun VI Kampung Durian Desa Pertumbukan Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab.Langkat
359	Pembuatan Paving Blok Dusun 2 Sep.50 m x 2 m	Dusun 2 Desa Lau Mulgab Desa Lau Mulgab Kec.Selesai Kab.Langkat
360	Pembuatan jalan Paving Blok Gang Keluarga Sepj.80 m x 2,5 m	Gang Keluarga Dusun 3 Desa Lau Mulgab Desa Lau Mulgab Kec.Selesai
361	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Lama Securai Pasar Desa Securai Utara Kec.Babalan Sepj.200 m x 3,5 m x 0,2 m	Jalan Lama Securai Pasar Desa Securai Utara Desa Securai Utara Kec.Babalan Kab.Langkat
362	Pembuatan Rabat Beton Rumah Sumdari sampai dengan Rumah Sutrisno Sep. 2,5 m x 280 m	Rumah Sumdari sampai dengan Rumah Sutrisno Dusun Sambirejo Selatan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
363	Rabat Beton Jln. Gang Mangga Dusun Cinta Damai Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Sepj. 150 m x 2 m	Jln. Gang Mangga Dusun Cinta Damai Desa Pantai Gemi Kec. Stabat Desa Pantai Gemi Kec.Stabat Kab.Langkat
364	Pembuatan Rabat Beton Jln. Gang Bambu Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Kec. Stabat Sepj. 200 m x 2 m	Jln. Gang Bambu Dusun Mulia Bakti Desa Karang Rejo Desa Karang Rejo Kec.Stabat Kab.Langkat
365	Pembuatan Parit Beton dari depan rumah Sumardi sampai rumah Husein Uk. 40 x 60 x 200 m	Depan rumah Sumardi sampai rumah Husein Dusun Sumberejo Selatan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
366	Pembuatan Parit Beton dari simpang Suis sampai Mbah Kromo Sepj.40 x 60 x 400 m	Simpang Suis sampai Mbah Kromo Dusun Tahun X Selatan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
367	Lening Parit Lingkungan IV Sempurna Sepj.800 m x 1 m x 80 cm	Lingkungan IV Sempurna Kel.Perdamaian Kec.Stabat
368	Pengerasan jalan Suka Damai Desa Beruam menuju Dusun Mejuah-Juah Desa Garunggang Kec.Kuala Sepj.4 m x 2000 m	Jalan Suka Damai Desa Beruam menuju Dusun Mejuah-Juah Desa Garunggang Kec. Kuala
369	Banjir	Dusun Mandailing
370	Pengaspalan dengan Hot Mix Jl. Tawang Mangu Kelurahan Kwala Bingai Kec. Stabat Sepj. 380 m x 2,5 m	Jl. Tawang Mangu Kelurahan Kwala Bingai Kel. Kwala Bingai Kec.Stabat Kab.Langkat
371	Rabat Beton Gang Sodara Dusun 3 Desa Ara Condong Kec. Stabat Sepj. 100 m x 2 m	Gang Sodara Dusun 3 Desa Ara Condong Desa Ara Condong Kec. Stabat Kab.Langkat
372	Pembuatan Lening Parit Jalan Kuala Binjai Sepj.60 m	Jalan Kuala Binjai Kel.Bela Rakyat Kel.Bela Rakyat Kec. Kuala
373	Jalan Rusak	Jalan Gang Keluarga RT I KE RT II
374	Pengaspalan jalan dengan Hot Mix Jalan Pijer Podi Desa Dalan Naman Kec.Kuala Sepj.250 m x 3 m	Jalan Pijer Podi Desa Dalan Naman Desa Dalan Naman Kec. Kuala
375	Pembuatan Parit Beton Dari Rumah pak Belong sampai Pak Gisol Dusun Titi Belanga Sejahtera Sepj. 200 m Uk.40 x 60 x 60	Parit Dari Rumah pak Belong sampai Pak Gisol Dusun Titi Belanga Sejahtera Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
376	Pembangunan Sumur Bor Air Mushola Dsn.III	Dsn.III Desa Kelantan Desa Kelantan Kec. Brandan Barat
377	Pengaspalan dengan Hot Mix Dusun VI Jalan Terdam menuju SD Menjahong B Desa Bekiung Kec.Kuala Uk 3 m x 400 m	Dusun VI Jalan Terdam menuju SD Menjahong B Desa Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
378	Pembangunan Tembok Penahan Kanan Kiri Jalan terdam menuju Dusun V dan VI Menjahong B Desa Bekiung Sep. 30 m	Kanan Kiri Jalan terdam menuju Dusun V dan VI Menjahong B Desa Bekiung Desa Bekiung Kec. Kuala
379	Pengaspalan dengan Hot Mix Jalan Dusun 12 Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Sepj. 100 m x 3,5 m	Jalan Dusun 12 Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Desa Tanjung Jati Kec.Binjai Kab.Langkat
380	Pembangunan sanitasi air bersih Dusun I sampai Dusun III Desa Parit Bindu Kec.Kuala Spj.4500 m	Dusun I sampai Dusun III Desa Parit Bindu Desa Parit Bindu Kec. Kuala
381	Erosi Pada Sisi Parit	Desa Pasar IV Namu Trasi
382	Pengaspalan jalan denagn Hot Mix Jalan Kampung Beliler Desa Balai Kasih Kec.Kuala Sepj. 250 m x 3 m	Jalan Kampung Beliler Desa Balai Kasih Desa Balai Kasih Kec. Kuala
383	Rabat Beton Jalan Lintas Serbajadi Dusun VI Serbajadi menuju Perpulungen Desa Purwobinangun Kec.Sei Bingai Sepj.1500 m	Jalan Lintas Serbajadi Dusun VI Serbajadi menuju Perpulungen Desa Purwobinangun Desa Purwobinangun Kec.Sei Bingai Kab.Langkat

Pertanian

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Pengadaan Embung (Penyimpanan Air) untuk Petani	Desa Air Hitam Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
2	Penyaluran Pupuk bersubsidi dan bantuan Ternak ke Kelompok Tani Desa Halaban Desa Halaban Kec. Besitang	Kelompok Tani Desa Halaban Desa Halaban Kec. Besitang Kab.Langkat
3	Bantuan Bibit ternak Lembu	Desa Batu Jonjong Desa Batu Jonjong Kec. Bahorok Kab.Langkat
4	Bantuan alat pertanian pencacah pakan Ternak	Desa Batu Jonjong Desa Batu Jonjong Kec. Bahorok Kab.Langkat
5	Irigasi yang ada tidak lancar mohon perhatian	Desa Timbang Lawan Desa Timbang Lawan Kec.Bahorok Kab.Langkat
6	Bantuan bibit Ternak Babi di Desa Telagah Kec. Sei Bingai	Desa Telagah Desa Telagah Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
7	Bantuan Bibit Ternak Lembu di Desa Minta Kasih Kec.Salapian	Desa Minta Kasih Desa Minta Kasih Kec.Salapian Kab.Langkat
8	Bantuan Modal Ternak Lembu sebesar @ Rp.40.000.000,-	Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
9	Tidak Adanya Gilingan Kacang/Tempe	Jalan Pembangunan Lingkungan IX Kelurahan Kwala Bingai Kec. Stabat
10	Tidak adanya Mesin Pembuat Pakan Ternak	Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat
11	Tidak Adanya Mesin Pembuat Pupuk Kompos	Desa Karang Anyar Kec. Secanggang Kab. Langkat
12	Kurangnya Pupuk Bersubsidi	Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
13	Kurangnya Pupuk Bersubsidi	Desa Tanjung Pasir Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
14	Tidak Adanya Bantuan Ternak	Desa Paya Tampak Desa Tanjung Pasir Kec. Pangkalan Susu
15	Bantuan Bibit Ternak SIWAB (Sapi Wajib Bunting) untuk peternak di Kecamatan Hinai	Kecamatan Hinai Kecamatan Hinai
16	Bantuan alat Pompanisasi lahan pertanian Desa Baru Pasar VIII	Desa Baru Pasar VIII Desa Baru Pasar VIII Kec.Hinai
17	Penyaluran Pupuk bersubsidi dan bantuan Ternak ke Kelompok Tani Desa Halaban Kec.Besitang	Kelompok Tani Desa Halaban Desa Halaban Kec. Besitang Kab.Langkat





No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
18	Bantuan bibit Ikan dan Ternak bagi Kelompok Tani yang ada di Desa Bukit Mas demi menunjang penghasilan masyarakat	Desa Bukit Mas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab.Langkat
19	Kurangnya Pupuk Bersubsidi	Desa Halaban
20	Kurangnya Pupuk Bersubsidi	Desa Halaban
21	Bantuan Bibit Sayuran dan Polibeg untuk Warung Hidup	Desa Pantai Gemi Desa Pantai Gemi Kec.Stabat Kab.Langkat
22	Bantuan Bibit Mangga, Durian dan Jambu Madu Dusun Puji Dadi Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan	Dusun Puji Dadi Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
23	Bantuan Bibit Ikan	Desa Sido Makmur
24	Bantuan Bibit Ikan	Desa Sido Makmur
25	Bibit Ikan	Desa Sido Makmur
26	Ternak Kambing	Desa Sido Makmur
27	Ternak Sapi / Lembu	Desa Sido Makmur
28	Pengadaan Pupuk	Kecamatan Kuala
29	Ternak Kambing	Dusun I Mandailing Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala
30	Mohon bantuan bibit Mangga, Durian dan Jambu Madu Dusun Puji Dadi IV Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan	Dusun Puji Dadi IV Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
31	Ternak Lembu/Sapi	Dusun I Mandailing Desa ido makmur Kecamatan Kuala
32	Egrek + Gagang Panjang	Desa Dalan Nama
33	Bibit Kelapa Sawit	Desa Dalan Nama
34	Pengadaan Sapi Jantan	Desa Dalan Nama
35	Pengadaan Sapi Betina Dara	Desa Dalan Nama
36	Bantuan Bibit Ikan dan ternak bagi Kelompok Tani yang ada di Desa Bukit Mas	Desa Bukit Mas Desa Bukit Mas Kec.Besitang Kab.Langkat
37	Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan bantuan Ternak supaya tepat sasaran	Kec.Besitang Kab.Langkat
38	pengadaan Pupuk	Kecamatan Kuala Kecamatan Kuala
39	Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan bantuan Ternak ke Kelompok Tani di Kec.Besitang supaya tepat sasaran	Kec.Besitang Kab.Langkat
40	Bantuan Bibit Ikan dan Ternak bagi Kelompok Tani yang ada di Desa Bukit Mas Kec.Besitang	Kelompok Tani yang ada di Desa Bukit Mas Desa Bukit Mas Kec.Besitang Kab.Langkat
41	Kurangnya Egrek + Gagang	Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala
42	Kurangnya Bibit Kelapa Sawit	Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala
43	Kuarangnya Sapi Jantan	Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala
44	Kurangnya Sapi Betina	Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala
45	Kurangnya Bibit Sapi	Desa Blangkahan Kecamatan Kuala
46	Kurangnya Bibit Domba	Desa Blangkahan Kecamatan Kuala
47	Kurangnya Bibit Kelapa Hibrida	Desa Blangkahan Kecamatan Kuala
48	Kurangnya Bibit Ikan Lele dan Nila	Desa Blangkahan Kecamatan Kuala
49	Kurangnya Bibit Sapi	Desa Suka Damai Kecamatan Kuala
50	Belum adanya Bibit Ternak Kambing	Desa Bekiung Kecamatan Kuala
51	Belum adanya Bibit Kelapa	Desa bekiung Kecamatan Kuala
52	Masih Kurang Pemahaman Tentang Pupur Organik	Desa Bekiung Kecamatan Kuala
53	Pengadaan mesin trasktor	kel.tani desa raja tengah Kecamatan Kuala
54	bantuan ternak sapi	Desa besadi Kecamatan Kuala
55	Bantuan Ternak	dusun I s/d VIII Desa parit bindu Kecamatan Kuala
56	Butuh MesinTraktor	Desa Beruam Kecamatan Kuala
57	Bantuan Ternak	dusun I s/d VIII DesaParit Bindu Kecamatan Kuala
58	Butuh Bibit sapi/ Lembu	Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala
59	Butuh Bibit Kambing	Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala
60	Butuh sapi Betina	Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala
61	Butuh sapi Jantan	Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala
62	Butuh Pupuk Bersubsidi	Kecamatan Sei Bingai Kecamatan Sei Bingai
63	Mohon Bantuan Bibit Ikan Lele sebanyak 50.000 ekor	Desa Sido Makmur Kec. Kuala
64	Bantuan Ikan Gurami sebanyak 50.000 ekor	Desa Sido Makmur Kec. Kuala
65	Bantuan Ternak Kambing sebanyak 50 ekor	Desa Sido Makmur Kec. Kuala
66	Banuan Ternak Lembu sebanyak 10 ekor	Desa Sido Makmur Kec. Kuala
67	Butuh Hand Traktor	Desa Emplasmen Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai
68	Butuh Hewan Ternak Kambing	Desa rumah galuh , Desa Tanjung unung, Desa Psr IV Namu Terasi, Simpang Kuta Buluh dan Desa Pekan Sawah Kecamatan Sei Bingai
69	Butuh Bibit Sawit Unggul	Desa Gunung Ambat Kecamatan Sei Bingai
70	Pengadaan Pupuk bersubsidi di Kec.Kuala	Kec. Kuala
71	Butuh Bibit Padi dan Jagung	Desa Pasar VI Kwala Mencirim Kecamatan Sei Bingai
72	Pengadaan Bibit Ikan Nila Desa Dalan Aman Kec.Kuala sebanyak 850 ekor	Desa Dalan Naman Kec. Kuala
73	Pengadaan Egrek+Gagang Panjang sebanyak 10 pasang	Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
74	Pengadaan bibit kelapa sawit sebanyak 2000 batang	Desa Dalan Naman Kec. Kuala
75	Pengadaan Sapi jantan dara sebanyak 5 ekor	Desa Dalan Naman Kec. Kuala



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
76	Pengadaan Sapi Betina dara sebanyak 5 ekor	Desa Dalam Naman Kec. Kuala
77	Bantuan Bibit Sapi/Lembu sebanyak 5 ekor	Desa Blangkahan Kec. Kuala
78	Bantuan Bibit Domba sebanyakK 5 ekor	Desa Blangkahan Kec. Kuala
79	Bantuan Bibit Kelapa Hibrida sebanya 50 pohon	Desa Blangkahan Kec. Kuala
80	Bantuan Ternak Sapi/Lembu sebanyak 100 ekor	Desa Suka Damai Kec. Kuala
81	Pengadaan Bibit Ternak Kambing sebanyak 100 ekor	Desa Bekiung Kec. Kuala
82	Bibit Kepala Hibrida	Desa Blangkahan
83	Pengadaan Teranak Sapi Dan Kambing	Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai
84	Bibit Domba	Desa Blangkahan
85	Bibit Sapi/Lembu	Desa Blangkahan
86	Bibit Ikan Lele	Desa Blangkahan
87	Bantuan Ternak Sapi	Desa Suka Damai
88	Pengadaan Teranak Itik	Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai
89	Pengadaan Bibit Kelapa Hibrida sebanyak 500 batang	Desa Bekiung Kec. Kuala
90	Pengadaan Mesin Traktor kelompok Tani sebanyak 4 unit	Desa Raja Tengah Kec. Kuala
91	Bibit Ternak	Desa Bekiung
92	Bibit Kelapa Hibrida	Desa Bekiung
93	Pelatihan Pembuatan Pupuk	Desa Bekiung
94	Pengadaan Mesin Traktor	Desa Raja Tengah
95	Bantuan Ternak	Desa BESADI
96	Bantuan Ternak	Desa Parit Bindu
97	Bantuan Ternak	Desa Parit Bindu
98	Pupuk	Kecamatan Kuala Kecamatan Kuala
99	Ternak Lembu	Kecamatan Salapian Kecamatan Salapian
100	Bantuan Pupuk	Kecamatan Sei Bingai
101	Pengadaan Mesin Traktor	Desa Beruam
102	Pengadaan Bibit Ternak	Desa Namo Mbelin
103	Pengadaan Bibit Ikan	Desa Namo Mbelin
104	Pengadaan Bibit Ternak	Desa Namo Mbelin
105	Pengadaan Bibit Ternak	Desa Perkebunan Bekiun
106	Pengadaan SAPI JANTAN	Desa Perkebunan Bekiun
107	Bantuan Bibit Jagung Dan Padi	Desa Pasar VI Kwala Mencirim
108	Pengadaan Handtraktor	Desa Emplasmen Kwala Mencirim
109	Pengadaan Bibit Sawit	Desa Gunung Ambat
110	Mohon bantuan Ternak Sapi/lembu untuk warga sebanyak 50 ekor	Desa Besadi Kec. Kuala
111	Mohon bantuan ternak Sapi/lembu Dusun I s/d VIII sebanyak 5 ekor/Dusun Desa Parit Bindu Kec.Kuala	Dusun I s/d VIII Desa Parit Bindu Desa Parit Bindu Kec. Kuala
112	Mohon bantuan ternak Kambing Dusun I s/d VIII sebanyak 5 ekor/Dusun Desa Parit Bindu Kec.Kuala	Dusun I s/d VIII Desa Parit Bindu Desa Parit Bindu Kec. Kuala
113	Mohon bantuan ternak Kambing Dusun I s/d VIII sebanyak 5 ekor/Dusun Desa Parit Bindu Kec.Kuala	Dusun I s/d VIII Desa Parit Bindu Desa Parit Bindu Kec. Kuala
114	Pengadaan Mesin Traktor untuk Kelompok Tani Desa Beruam Kec.Kuala sebanyak 4 unit	Kelompok Tani Desa Beruam Desa Beruam Kec. Kuala
115	Pengadaan Mesin Traktor untuk Kelompok Tani Desa Beruam Kec.Kuala sebanyak 4 unit	Kelompok Tani Desa Beruam Desa Beruam Kec. Kuala
116	Bantuan pengadaan Bibit Kambing Desa Namo Mbelin Kec.Kuala Sebanyak 11 Kelompok Ternak	Desa Namo Mbelin Kec. Kuala
117	Bantuan pengadaan Bibit Kambing Desa Namo Mbelin Kec.Kuala Sebanyak 11 Kelompok Ternak	Desa Namo Mbelin Kec. Kuala
118	Bantuan pengadaan Bibit Sapi/Lembu Betina Dara Desa Namo Mbelin Kec.Kuala Sebanyak 11 Kelompok Ternak	Desa Namo Mbelin Kec. Kuala
119	Mohon pengadaan Bibit Sapi Betina sebanyak 25 ekor	Desa Bekiung Kec. Kuala
120	Bantuan pengadaan Bibit Kambing Sebanyak 11 Kelompok Ternak	Desa Namo Mbelin Kec. Kuala
121	Mohon pengadaan Bibit Sapi Jantan Desa Bekiun Kec.Kuala sebanyak 25 ekor	Desa Bekiung Kec. Kuala
122	Perbaikan jaringan irigasi di Bangaru Desa Belinten	Jaringan irigasi di Bangaru Desa Belinten Desa Belinten Kec.Sei Bingai
123	Perbaikan jaringan irigasi di Desa Pekan Sawah Kec.Sei Bingai	Jaringan irigasi di Desa Pekan Sawah Desa Pekan Sawah Kec.Sei Bingai
124	Perbaikan jaringan irigasi di Bangaru Desa Belinten	Jaringan irigasi di Bangaru Desa Belinten Desa Belinten Kec.Sei Bingai
125	Perbaikan jaringan irigasi di Desa Pekan Sawah Kec.Sei Bingai	Jaringan irigasi di Desa Pekan Sawah Desa Pekan Sawah Kec.Sei Bingai
126	Pengadaan Hand Traktor sebanyak 2 unit	Desa Emp. Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai
127	Pengadaan hewan ternak Kambing sebanyak 250 ekor	Desa Rumah Galuh, Tanjung Gunung, Psr.IV Namu Terasi, Simpang Kuta Buluh dan Pekan Sawah Kec.Sei Bingai
128	Pengadaan Hand Traktor di Desa Emplasemen Kwala Mencirim Kec.Sei Bingai sebanyak 2 unit	Desa Emp. Kwala Mencirim Kec. Sei Bingai
129	Pengadaan hewan ternak Kambing sebanyak 250 ekor	Desa Rumah Galuh, Tanjung Gunung, Psr.IV Namu Terasi, Simpang Kuta Buluh dan Pekan Sawah Kec.Sei Bingai



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
130	Bantuan pengadaan Bibit Sawit Unggul untuk Desa Gunung Ambat Kec.Sei Bingai sebanyak 100 batang	Desa Gunung Ambat Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
131	Bantuan Bibit Pad dan Jagung Desa Pasar VI.KW. Mencirim Kec.Sei Bingai sebanyak 1000 bungkus	Desa Pasar VI.KW. Mencirim Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
132	Fasilitasi Membreeding	Desa Sekoci Kecamatan besitang
133	Perubahan Ahli Fungsi Bakau	Kecamatan Besitang Kecamatan besitang
134	Penyaluran Pupuk	Desa Halaban Kecamatan besitang
135	Bantuan Bibit	Desa Bukit Mas Kecamatan besitang
136	Penyertuan (Pemasangan Pasir dan batu) Jalan Perladangan Dusun III Sekar Wangi Sepj.1000 m x 3 m	Jalan Perladangan Dusun III Sekar Wangi Desa Suka Damai Desa Suka Damai Kec. Kuala
137	Bantuan Hewan Ternak	Kecamatan Sei Bingai

Satuan Polisi Pamong Praja

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Kurangnya Keamanan	Dusun V Aman Damai Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat
2	Pembentukan Tim pembasmi Narkoba	Desa Air Hitam. Desa Air Hitam, Kecamatan Gebang Kabupaten Langkat
3	perhatikan masalah Narkobah	Kecamatab Bahorok Kecamatan Bahorok

Dinas Tenaga Kerja

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Tidak Adanya Mesin Bordir	Jalan Bantenan Lingkungan VIII Kelurahan Kwala Bingai Kec. Stabat
2	Pelatihan ketrampilan kepada Ibu-Ibu agar meningkatkan perekonomian keluarga dari BLK Dinas Tenaga Kerja	Desa Pertumbukan Desa Pertumbukan Kec. Wampu Kab.Langkat
3	Permohonan pelatihan kursus membordir	Kecamatan Sei Lapan Kab.Langkat
4	Pelatihan Las Listrik	Desa Dalan Nama
5	Pelatihan Menjahit	Desa Dalan Nama
6	Pelatihan Salon Kecantikan	Desa Dalan Nama
7	Kurang Terampilnya Tukang Las Listrik	Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala
8	Kurang Tenaga Penjahit	Desa Dalan Naman Kecamatan Kuala
9	Kurangnya Salon Kecantikan	Desa dalan Naman Kecamatan Kuala
10	Butuh Mesin Jahit	Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala
11	Pengadaan Pelatihan Menjahit Desa Dalan Aman Kec.Kuala	Desa Dalan Naman Kec. Kuala
12	Pengadaan Pelatihan Las Listrik Desa Dalan Aman Kec.Kuala	Desa Dalan Naman Kec. Kuala
13	Pengadaan Pelatihan Menjahit Desa Dalan Aman Kec.Kuala	Desa Dalan Naman Kec. Kuala
14	Pengadaan Pelatihan Salon Kecantikan Desa Dalan Aman	Desa Dalan Naman Kec. Kuala
15	Pelatihan Bordir untuk Ibu-ibu warga Desa Blangkahan	Desa Blangkahan Kec. Kuala
16	Pelatihan buat pupuk organik Desa Bekiung Kec.Kuala	Desa Bekiung Kec. Kuala
17	Pelatihan Bordir	Desa Blangkahan
18	Pelatihan	Kecamatan Kuala Kecamatan Kuala
19	Pengadaan Mesin Jahit	Desa Parit Bindu
20	Membuka Lapangan pekerjaan	Desa PIR ADB Kecamatan Besitang
21	Pengadaan Pelatihan Ketrampilan	Desa PIR ADB Kecamatan Besitang
22	Pembekalan/Pelatihan	Kecamatan Tanjung Kecamatan Tanjung Pura
23	Pelatihan	Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai

Dinas Sosial

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Kartu BPJS tidak Bisa Digunakan	Desa Namo Sialang
2	Perbaikan Mesjid	Lingkungan V Namo Kumbahang Kecamatan Salapian
3	Penyelesaian Tanah Wakaf	Kecamatan Kuala Kecamatan Kuala
4	Perhatian PKH	Kecamatan Kuala Kecamatan Kuala
5	Pengadan Teratak	dusun C2 Desa PIR ADB Kecamatan Besitang
6	Pengadaan Penyuluhan	Kecamatan Binjai Kecamatan Besitang
7	Honor Bilal Mayit	Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura



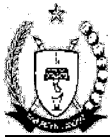
No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
8	Mohon Perhatikan Nasib	Kecamatan Batang Serangan Kecamatan Batang Serangan

Dinas Lingkungan Hidup

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Penghentian penutupan Paluh-Paluh yang ada di Kel. Bukit Kubu Kec. Besitang	Paluh-Paluh yang ada di Kel. Bukit Kubu Kec. Besitang Kelurahan Bukit Kubu Kec. Besitang Kab.Langkat
2	Penertiban pembuangan limbah pabrik Sawit dan pabrik Getah yang ada di Kec. Besitang	Kecamatan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat
3	Penghentian perubahan alih fungsi Bakau (Hutan Mangrove) menjadi Kebun Sawit di Kec.Besitang	Kec. Besting Kec. Besitang Kab. Langkat
4	Penertiban pembuangan limbah pabrik Sawit dan pabrik Getah yang ada di Kec. Besitang	Kec.Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat
5	Penghentian penutupan Paluh-Paluh yang ada di Kel. Bukit Kubu	Kel. Bukit Kubu Kel. Bukit Kubu Kec. Besitang Kab.Langkat
6	Alih Fungsi Hutan Bakau (Mangrove) menjadi kebun Sawit	Kec. Besitang Kab. Langkat
7	Penutupan Paluh-Paluh	Kelurahan Bukit Kubu Kec. Besitang Kab.Langkat
8	Penertiban pembuangan limbah pabrik	Kec. Besitang Kab. Langkat
9	Penertiban pembuangan limbah pabrik	Kec. Besitang Kab. Langkat
10	Penutupan Paluh-Paluh	Kelurahan Bukit Kubu Kec. Besitang Kab.Langkat
11	Penghentian perubahan alih fungsi Bakau (Hutan Mangrove) menjadi Kebun Sawit	Kecamatan Besitang Kec. Besitang Kab. Langkat
12	Pembuatan Taman Kantor Camat Sawit Seberang	Kantor Camat Sawit Seberang
13	Agar ditiptikan pembuangan limbah Pabrik Sawit dan Pabrik Getah yang ada di Kec.Besitang	Kec. Besitang
14	Penertipan pembuangan limbah Pabrik Sawit dan Getah yang ada di Kec.Besitang	Kec. Besitang
15	Penutupan Paluh yang ada di Kel.Bukit Kubu Kec.Besitang	Kel.Bukit Kubu Kec.Besitang
16	Perubahan alih fungsi Bakau menjadi sawit yang ada di Kec.Besitang	Kec. Besitang
17	Penyediaan Air Bersih	Dusun X Desa Halaban Kecamatan besitang
18	Ditertibkan Pembangunan	Kecamatan Besitang Kecamatan besitang
19	Perubahan/alih Fungsi Hutan Bakau menjadi Sawit yang ada di Kec.Besitang	Kecamatan Besitang Kab.Langkat
20	Alih Fungsi Hutan Bakau (Mangrove) menjadi kebun Sawit	Kec. Besitang Kab. Langkat

Dinas PMD

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Pembangunan MCK di Balai Desa Dusun Bangun	Balai Desa Dusun Bangun Desa Telagah Desa Telagah Kec.Sei Bingai
2	Tidak Adanya Surat Tanah	Dusun V Aman Damai Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lapan
3	Sulitnya Beraudensi	Dusun V Aman Damai Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat
4	Kebebasan untuk Memilih	Kecamatan Sei Lapan Kab. Langkat
5	Bantuan untuk Honor RT/RW Dusun Jati Mulyo	Dusun Jati Mulyo Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
6	Bantuan Honor RT/RW Dusun Klonie 1	Dusun Klonie 1 Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
7	Bantuan Honor RT/RW Dusun Tahun XI	Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
8	Tidak Adanya Kelompok SDM	Dusun I Sumur Bor
9	Alat Musik	Desa Sido Makmur
10	Pembekalan/Pelatihan untuk Pengurus BPD se Kec.Tanjung Pura	Kec.Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura
11	Gaji Kepala Lingkungan	Kecamatan Kuala
12	Mohon Pembekalan/Pelatihan untuk pengurus BPD	Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
13	Bantuan Honor untuk RT/RW Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan	Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
14	Bantuan Honor untuk RT/RW Dusun Jati Mulyo Makmur Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan	Dusun Jati Mulyo Makmur Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
15	Bantuan Honor untuk RT/RW Dusun Titi Belanga Sejahtera Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan	Dusun Titi Belanga Sejahtera Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
16	Mohon Naikan Gaji Kepala Lingkungan Kec.Kuala	Kec. Kuala
17	Pemindahan Kantor Desa Bekiung ke Asam Kumbang Kec.Kuala	Desa Bekiung Kec. Kuala
18	Pengadaan Mesin Jahit	Desa Namo Mbelin
19	Mohon Pembekalan/Pelatihan untuk pengurus BPD	Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
20	Bantuan Honor untuk RT/RW Dusun Klonie 1 Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan	Dusun Klonie 1 Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat



Catpil

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Tidak Adanya Blangko E-KTP	Desa Pulau Sembilan Desa Payah Tampak Kec. Pangkalan Susu
2	Tidak Adanya Akte	Desa Payah Tampak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
3	Kepengurusan KTP dan BPJS	Kecamatan Salapian

Dinas KBPP

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Bantuan makanan tambahan Balita, Anak-anak dan Ibu Hamil di Posyandu se-Kabupaten Langkat	Posyandu Kabupaten Langkat Kabupaten Langkat
2	Pembentukan Kelompok SDM Salon Kecantikan di Dusun I Sumur Bor Desa Tebing Tanjung Selamat Kec.Padang Tualang.	Dusun I Sumur Bor Desa Tebing Tanjung Selamat Desa Tebing Tanjung Selamat Kec.Padang Tualang Kab.Langkat

Dinas Perhubungan

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Fasilitas Bus bagi anak sekolah yang ada di Desa Bukit Mas	Desa Bukit Mas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab.Langkat
2	Pemasangan Tower Telekomunikasi	Desa Perkebunan Bungara Desa Perkebunan Bungara Kec. Bahorok

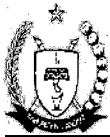
Dinas Koperasi

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Pelatihan Keterampilan Bordir	Dusun I mandailing Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala
2	Kurangnya Kualitas Bordiran	Desa Blangkahan Kecamatan Kuala

Dinas Pemuda dan Olahraga

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Bantuan Fasilitas Olah Raga di Desa Pasar Rawa Ke. Gebang	Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
2	Tidak Adanya PERDA Relawan Anti Narkoba	Desa Tanjung Pasir Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
3	Bantuan modal usaha untuk kelompok Karang Taruna	Desa Baru Pasar VIII Desa Baru Pasar VIII Kec.Hinai Kab.Langkat
4	Bantuan sarana prasarana pembinaan Remaja Masjid berupa dana dan pendidikan di Masjid Al Ubudiyah Desa Karang Gading	Remaja Masjid berupa dana dan pendidikan di Masjid Al Ubudiyah Desa Karang Gading Desa Karang Gading Kec.Stabat Kab.Langkat
5	Bantuan Bola Volley 1 set beserta Kostum Dusun Puji Dadi Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan	Dusun Puji Dadi Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
6	Bantuan Perlengkapan Bola Volley beserta Kostum Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan	Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
7	Bantuan Perlengkapan Bola Volley beserta Kostum di Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan	Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
8	Bantuan Fasilitas Olag Raga di Desa Sei Bamban	Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
9	Bantuan Perlengkapan Bola Voly 1 set beserta Kostum Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan	Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
10	Bantuan Perlengkapan Bola Voly 1 set beserta Kostum Dusun Titi Belanga Sentosa Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan	Dusun Titi Belanga Sentosa Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
11	Bantuan Perlengkapan Bola Voly 1 set beserta Kostum Dusun Tahun IX Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan	Dusun Tahun IX Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
12	Bantuan Fasilitas Olah Raga di Desa Sei Bamban	Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
13	Tidak Ada Gedung Sanggar	Desa Bekiung
14	Pengadaan Baju Seragam	desa pir adb Kecamatan Besitang
15	Sarana Olah Raga	Desa PIR ADB Kecamatan Besitang
16	Pengadaan Baju Seragam	Kecamatan Besitang Kecamatan Besitang
17	Bantuan Perlengkapan Bola Voly 1 set beserta Kostum Dusun Puji Dadi IV Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan	Dusun Puji Dadi IV Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Perhatian Instansi Terkait terhadap Objek Wisata Pemakaman Datok Landak Desa Timbang Lawan Kec.Bahorok	Objek Wisata Pemakaman Datok Landak Desa Timbang Lawan Desa Timbang Lawan Kec.Bahorok Kab.Langkat
2	Pembangunan jalan setapak Objek Wisata Selang Pangeran Desa Timbang Lawan	Objek Wisata Selang Pangeran Desa Timbang Lawan Desa Timbang Lawan Kec.Bahorok Kab.Langkat
3	Kurangnya Home Stay atau Tempat Penginapan	Desa Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat
4	Kurangnya Promosi Ekowisata Mangrove	Desa Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat
5	Infrastruktur jalan menuju objek wisata Batu Katak agar diperbaharui sehingga Wisatawan dapat mudah menuju objek wisata Batu Katak	Desa Batu Jonjong Desa Batu Jonjong Kec. Bahorok
6	Butuh Alat Musik	Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala
7	Alat Musik Kuda Lumping	Dusun I Mandailing Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala
8	Butuh Alat Musik Sholawat badar	Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala
9	Butuh Perlengkapan Grub Marhaban	Desa Namo Mbelin Kecamatan Kuala
10	Butuh Baju Perwiritan	Desa Perkebunan Bekiun Kecamatan Kuala
11	Pembuatan Gedung Sanggar Kreatifitas Uk 6 m x 6 m	Desa Bekiung Kec. Kuala
12	Pembinaan nasyid	Desa Tanjung Jati Kecamatan Binjai
13	Pembuatan Sanggar	Kecamatan Kecamatan Salapian
14	Pengadaan Alat Musik	Desa Namo Mbelin
15	Pengadaan Perlengkapan Grup Marhaban	Desa Namo Mbelin
16	Pengadaan Baju Wirit	Desa Perkebunan Bekiun
17	Kurang Majunya Ekowisata	Desa Lubuk Kertang Kec. Brandan Barat Kab. Langkat

Dinas Perikanan dan Kelautan

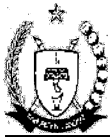
No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Bantuan bibit Ikan dan Ternak bagi Kelompok Tani yang ada di Desa Bukit Mas demi menunjang penghasilan masyarakat	Kelompok Tani yang ada di Desa Bukit Mas Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat
2	Bantuan alat tangkap ikan dan udang Desa Pasar Rawa Kec. Gebang sebesar @ Rp. 20.000.000,-	Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
3	Tidak Adanya Bibit Ikan	Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
4	Bantuan Bibit Ikan Gurami untuk Peternak ikan Dusun Klonie I Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan sebanyak 1000 ekor	Dusun Klonie I Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
5	Bantuan Bibit Ikan Gurami untuk Peternak ikan Dusun Titi Belanga Sejahtera Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan sebanyak 1000 ekor	Dusun Titi Belanga Sejahtera Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
6	Bantuan Bibit Ikan Gurami untuk Peternak ikan Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban sebanyak 1000 ekor	Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
7	Bantuan Bibit Ikan Gurami untuk Peternak ikan Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban sebanyak 1000 ekor	Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
8	Bantuan Bibit Ikan Gurami untuk Peternak ikan Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban sebanyak 1000 ekor	Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
9	Bantuan Bibit Ikan Gurami untuk Peternak ikan Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan sebanyak 1000 ekor	Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
10	Kurangnya Bibit Ikan	Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat
11	Kurangnya Bibit Ikan	Desa Bukit Mas Kec. Besitang Kab. Langkat
12	Pengadaan Boat (Perahu) 25 Kaki untuk Nelayan Desa Pasar Rawa Kec. Gebang sebesar @ Rp.40.000.000,-	Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
13	Bantuan bibit Udang Vaname dan Pakan Udang untuk Penambak Udang di Desa Pantai Gading sebanyak 8 kelompok	8 Kelompok Nelayan Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec.Secanggang Kab.Langkat
14	Bantuan bibit Udang Vaname dan Pakan Udang untuk Penambak Udang di Desa Pantai Gading sebanyak 8 kelompok	8 Kelompok Nelayan Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec.Secanggang Kab.Langkat
15	Bantuan Perahu Mesin dan alat tangkap ikan kepada Nelayan	Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec.Secanggang
16	Mohon kejelasan tentang Nelayan di Desa Pulau Banyak	Desa Pulau Banyak Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura
17	Mohon bantuan nelayan berupa alat tangkap ikan dan perahu Nelayan untuk Kec.Tanjung Pura	Kec.Tanjung Pura Kec.Tanjung Pura
18	Mohon Kejelasan tentang Nelayan di Desa Pulau Banyak	Desa Pulau Banyak Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura
19	Mohon bantuan Bibit Ikan Gurami 1000 ekor untuk peternak di Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban	Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
20	Mohon bantuan Bibit Ikan Gurami 1000 ekor untuk peternak di Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban	Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
21	Mohon bantuan Bibit Ikan Gurami 1000 ekor untuk peternak di Dusun Titi Belanga Sejahtera Desa Sei Bamban	Dusun Titi Belanga Sejahtera Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
22	Mohon bantuan Bibit Ikan Gurami 1000 ekor untuk peternak di Dusun Titi Belanga Sentosa Desa Sei Bamban	Dusun Titi Belanga Sentosa Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
23	Mohon bantuan Bibit Ikan Gurami 1000 ekor untuk peternak di Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban	Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
24	Mohon bantuan Bibit Ikan Gurami 1000 ekor untuk peternak di Dusun Klonie I Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan	Dusun Klonie I Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
25	Bibit Ikan Nila	Desa Dalam Nama



No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
26	Bibit Ikan Lele	Dusun I mandailing Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala
27	Bibit Ikan Gurami	Dusun I Mandailing Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala
28	Penutupan paluh-paluh yang ada di Kel. Bukit Kubu	Kel.Bukit Kubu Kec.Besitang Kab.Langkat
29	Pengadaan bibit ikan	Desa dalam naman Kecamatan Kuala
30	bantuan bibit ikan	Desa suka damai
31	Butuh Bibit Ikan	Desa Namo Mbelin
32	Bantuan Bibit Ikan Lele dan Nila Desa Blangkahan Kec.Kuala sebanyak 10.000 ekor	Desa Blangkahan Kec. Kuala
33	Bantuan Bibit Ikan Nila Desa Suka Damai Kec.Kuala sebanyak 500 ekor	Desa Suka Damai Kec. Kuala
34	Bantuan Bibit Ikan Nila	Desa Suka Damai
35	Bibit Ikan	Kecamatan Kuala
36	Bantuan pengadaan Bibit Ikan Mas Namo Mbelin Kec.Kuala Sebanyak 11 Kelompok Ternak	Desa Namo Mbelin Kec. Kuala
37	Mohon bantuan nelayan berupa alat tangkap ikan dan perahu Nelayan untuk Kec.Tanjung Pura	Kec.Tanjung Pura
38	Mohon Kejelasan tentang Nelayan di Desa Pulau Banyak	Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
39	Mohon bantuan nelayan berupa alat tangkap ikan dan perahu Nelayan untuk Kec.Tanjung Pura	Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
40	Alat Tangkap Ikan	Kecamatan Tanjung Pura Kecamatan Tanjung Pura
41	Bantuan bibit Udang Vaname dan Pakan Udang untuk Penambak Udang di Desa Pantai Gading sebanyak 8 kelompok	Kelompok Nelayan Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec.Secanggang Kab.Langkat
42	Bantuan Bibit Ikan Gurami untuk Peternak ikan Dusun Titi Belanga Sentosa Desa Sei Bamban sebanyak 1000 ekor	Dusun Titi Belanga Sentosa Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat

Dinas Perindustrian dan Perdagangan

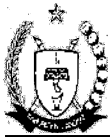
No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Fasilitasi membrending harga Jeruk Peras bagi masyarakat	Desa Sekoci Desa Sekoci Kec. Besitang Kab.Langkat
2	Penambahan Modal Usaha Bengkel Las Desa Pasar Rawa Kec. Gebang sebesar Rp.20.000.000,-	Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
3	Penambahan Modal Usaha Kecil Menengah (UKM) Desa Pasar Rawa sebesar @ Rp.20.000.000,-	Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang Kab.Langkat
4	Kurangnya Bantuan Pembiayaan Ekonomi Kreatif	Desa Alur Cempedak Kec. Pangkalan Susu Kab. Langkat
5	Bantuan alat/mesin pengrajin keramik di Kecamatan Hinai	Kecamatan Hinai Kecamatan Hinai
6	Penambahan Modal UKM Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan sebesar Rp.30.000.000,-	Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
7	Fasilitasi membrending harga Jeruk Peras bagi masyarakat Desa	Desa Sekoci Kec.Besitang Desa Sekoci Kec. Besitang Kab.Langkat
8	Harga Jeruk Murah di tingkat petani	Desa Sekoci
9	Harga Jeruk Murah di tingkat petani	Desa Sekoci
10	Pembangunan Pasar Desa sebanyak 1 Unit	Desa Pantai Desa Pantai Gading Kec.Secanggang Kab.Langkat
11	Pelatihan Bordir	Desa Sido Makmur
12	Mohon medapatkan penambahan modal Usaha Kecil dan Menengah sebesar Rp.30.000.000,- Dusun Benteng Teladan	Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan Kab.Langkat
13	Pengusulan permohonan bantuan mesin Jahit	Kecamatan Sei Lapan Kab.Langkat
14	Fasilitasi membrending harga jeruk peras bagi masyarakat Desa Sekoci Kec.Besitang	Desa Sekoci Kec.Besitang Kab.Langkat
15	Fasilitasi membrending harga jeruk peras bagi masyarakat Desa Sekoci Kec.Besitang	Desa Sekoci Kec.Besitang Kab.Langkat
16	pembangunan secara modern	pasar Berinin Kuala
17	Pengadaan Mesin Jahit	Dusun I s/d VIII Desa Parit Bindu Kecamatan Kuala
18	Pembangunan secara Modern Pasar Tradisional di Pasar Berinin Kuala Kel.Pekan Kuala Kec.Kuala	Pasar Tradisional di Pasar Berinin Kuala Kel.Pekan Kuala Kel.Pekan Kuala Kec. Kuala
19	Pelatihan dan pengadaan alat Bordir untuk Ibu-Ibu PKK Desa Sido Makmur Kec.Kuala	Desa Sido Makmur Kec. Kuala
20	Harga Karet	Kecamatan Kuala
21	Los Pekan Rusak	Kecamatan Sei Bingai
22	Mohon pengadaan Mesin Jahit Dusun I s/d Dusun VIII Desa Parit Bindu Kec. Kuala sebanyak16 buah/Dusun	Dusun I s/d Dusun VIII Desa Parit Bindu Desa Parit Bindu Kec. Kuala
23	Mohon pengadaan Mesin Jahit Dusun I s/d Dusun VIII Desa Parit Bindu Kec. Kuala sebanyak16 buah/Dusun	Dusun I s/d Dusun VIII Desa Parit Bindu Desa Parit Bindu Kec. Kuala
24	Pengadaan Mesin Jahit Desa Namo Mbelin Sebanyak 24 set	Desa Namo Mbelin Kec. Kuala
25	Pengadaan Mesin Jahit Desa Namo Mbelin Sebanyak 24 set	Desa Namo Mbelin Kec. Kuala
26	Rehap Total Los Pekan Namu Tating Desa Pekan Sawah	Pekan Namu Tating Desa Pekan Sawah Desa Pekan Sawah Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
27	Rehap Total Los Pekan Namu Tating Desa Pekan Sawah	Pekan Namu Tating Desa Pekan Sawah Desa Pekan Sawah Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
28	Pembangunan Pajak Kuala	Kecamatan Kuala Kecamatan Kuala



Sekretariat Daerah

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Pembangunan Mushola ditingkatkan menjadi Masjid baru Nurul Huda	Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang
2	Bantuan pembangunan Masjid Nurul Iman	Desa Serapuh ABC Kecamatan Padang Tualang
3	Rehab Mushola AL Ikhlas Dusun Kampung Baru	Dusun Kampung Baru Desa Batu Jonjong Desa Kec. Bahorok
4	Kelangkaan pupuk bersubsidi di Desa Timang Lawan	Desa Timbang Lawan Kec.Bahorok
5	Pembebasan lahan sekitar Mata Air Telagah Desa Telagah	Mata Air Telagah Desa Telagah Kec.Sei Bingai
6	Bantuan pembangunan Masjid Al Amin yang belum selesai	Dusun Suka Jahe Desa Minta Kasih Kec.Salapian
7	Rehab berat Mushola di Dusun II Pringganebing	Dusun II Pringganebing Desa Pasar Rawa Kec. Gebang
8	Pemasangan Kanopi Masjid At Taqwa	Dusun VIII Kelantan Luar Desa Pasar Rawa Kec. Gebang
9	Pengadaan Bibit Mangrove untuk merehabilitasi Hutan Mangrove yang rusak	Desa Pasar Rawa Desa Pasar Rawa Kec. Gebang
10	Bantuan Dana pembangunan Masjid Al Falah	Dusun VI Desa Karang Gading Kec.Stabat
11	Pelebaran jalan dari simpang Rumah Sakit Bersama Pasar 12 menuju Dusun Parit Kaca	Jalan dari simpang Rumah Sakit Bersama Pasar 12 menuju Dusun Parit Kaca Desa Teluk Kec.Secanggang
12	Bantuan Honor untuk Bilal Mayit	Desa Kuala Musam Kec.Batang Serangan
13	Bantuan Honor guru Ngaji dan Bilal Mayit	Dusun Titi Belanga Sejahtera Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
14	Pembuatan Pagar dan pintu Kuburan	Kuburan Dusun Klonie Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
15	Bantuan Honor Guru Ngaji dan Bilal Mayit	Dusun Jati Mulyo Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
16	Bantuan Honor Guru Ngaji dan Bilal Mayit	Dusun Tahun X Selatan Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
17	Bantuan Honor Guru Ngaji dan Bilal Mayit	Dusun Benteng Teladan Sei Bamban Kec.Batang Serangan
18	Bantuan Honor Guru Ngaji dan Bilal Mayit	Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
19	Bantuan satu set Tenda STM	Dusun Sumberjo Utara Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
20	Bantuan Kursi STM sebanyak 100 buah	Dusun Sumberjo Utara Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
21	Bantuan Kursi STM sebanyak 100 buah	Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
22	Bantuan satu set Tenda STM	Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
23	Bantuan satu set Tenda STM	Dusun Tahun X Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
24	Bantuan Kursi STM 100 buah	Dusun Tahun X Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
25	Bantuan Kursi STM 100 buah n	Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
26	Bantuan satu set Tenda STM	Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
27	Bantuan Kursi STM sebanyak 100 buah	Dusun Titi Belanga Sejahtera Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
28	Bantuan Kursi STM sebanyak 100 buah	Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
29	Bantuan Tenda STM Dusun Tahun XI	Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
30	Bantuan Kursi STM sebanyak 100 buah	Dusun Klonie 1 Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
31	Perehabitan TPQ di Dusun VIII Kelantan Luar	Dusun VIII Kelantan Luar Desa Pasar Rawa Kec. Gebang
32	Bantuan Honor Guru Ngaji dan Bilal Mayit	Dusun Titi Belanga Sejahtera Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
33	Rehab Mesjid di Desa Pantai Gading sebanyak 8 Unit	Desa Pantai Gading Desa Pantai Gading Kec.Secanggang
34	Bantuan Honor Guru Ngaji dan Bilal Mayit	Dusun Klonie 1 Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
35	Bantuan Paving Blok Halaman Masjid Baitul Huda Uk. 200m	Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
36	Bantuan satu set Tenda STM Dusun Titi Belanga Sejahtera	Dusun Titi Belanga Sejahtera Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
37	Agar masyarakat bisa memanfaatkan Hutan yang terlantar	Hutan di Desa Selotong Desa Selotong Kec.Secanggang
38	Mohon agar Honor Bilal Mayit di naikan	Desa Pulau Banyak Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura
39	Mohon agar Honor Bilal Mayit dinaikan	Desa Pulau Banyak Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura
40	Perbaikan Pagar Kuburan dan Pembuatan pintu Pagar Kuburan	Kuburan Dusun Klonie 1 Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
41	Bantuan Paving Blok halaman Masjid Baitul Huda Sepj. 200 m	Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
42	Usulan Bantuan Honor Guru Ngaji dan Bilal Mayit	Dusun Jati Mulyo Makmur Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
43	Usulan Bantuan Honor Guru Ngaji dan Bilal Mayit	Dusun Tahun X Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
44	Usulan Bantuan Honor Guru Ngaji dan Bilal Mayit	Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
45	Usulan Bantuan Honor Guru Ngaji dan Bilal Mayit	Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
46	Usulan Bantuan Honor Guru Ngaji dan Bilal Mayit	Dusun Titi Belanga Sejahtera Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
47	Usulan Bantuan Honor Guru Ngaji dan Bilal Mayit	Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
48	Usulan Bantuan Honor Guru Ngaji dan Bilal Mayit	Dusun Klonie 1 Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
49	Bantuan Satu Set Tenda STM Dusun Sumberejo Utara	Dusun Sumberejo Utara Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
50	Bantuan Satu Set Tenda STM Dusun Benteng Teladan	Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
51	Bantuan Satu Set Tenda STM Dusun Benteng Teladan	Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
52	Bantuan Satu Set Tenda STM Dusun Benteng Teladan	Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
53	Bantuan Satu Set Tenda STM Dusun Tahun X	Dusun Tahun X Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
54	Bantuan Satu Set Tenda STM	Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
55	Bantuan Satu Set Tenda STM	Dusun Titi Belanga Sejahtera Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
56	Bantuan Satu Set Tenda STM	Dusun Tahun XI Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
57	Bantuan Kursi STM 100 buah	Dusun Tahun X Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
58	Bantuan Kursi STM 100 buah	Dusun Titi Belanga Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan





No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
59	Bantuan Kursi STM 100 buah	Dusun Titi Belanga Sejahhtera Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
60	Bantuan Kursi STM 100 buah	Dusun Taun XI Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
61	Bantuan Kursi STM 100 buah	Dusun Klonie 1 Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
62	Bantuan Kursi STM 100 buah	Dusun Benteng Teladan Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
63	Bantuan Kursi STM 100 buah	Dusun Sumberejo Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan
64	Permohonan bantuan alat Nasyid	Kecamatan Sei Lapan Kab.Langkat
65	TPT masjid Al mabrur	Dusun IV Parit Bindu Kecamatan Kuala
66	Pembangunan Masjid Nurul Ahmad	Lingkungan V Namo Kumbahang Desa Naman Jahe Kec.Salapian
67	Pengadaan alat musik Kuda Lumping	Desa Sido Makmur Kec. Kuala
68	Permintaan Ustaz	Kecamatan Kuala
69	Mohon TPT Masjid Al-Mabrur Sepj.2 m x 30 m	Dusun IV Desa Parit Bindu Kec. Kuala
70	Bantuan alat musik Shalawat Badar Sebanyak 1 set	Desa Namo Mbelin Kec. Kuala
71	Bantuan perlengkapan group Marhaban Sebanyak 1 set	Desa Namo Mbelin Kec. Kuala
72	Pengadaan Baju Perwiritan Desa Bekiung sebanyak 100 buah	Desa Bekiung Kec. Kuala
73	Bantuan Pupuk Bersubsidi Kec.Sei Bingai	Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
74	Bantuan Pupuk Bersubsidi Kec.Sei Bingai	Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
75	Bantuan Pupuk Bersubsidi Kec.Sei Bingai	Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
76	Bedah Rumah bagi rumah tangga miskin sebanyak 10 unit	Desa Simpang Kuta Buluh Kec.Sei Bingai
77	Bedah Rumah bagi rumah tangga miskin sebanyak 10 unit	Desa Simpang Kuta Buluh Kec.Sei Bingai
78	Mohon agar Honor Bilal Mayit dinaikan	Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura
79	Pembuatan Pagar Pemakanan Umum	Dusun Bukit Timur Desa Tebing Tanjung Selamat Kec.Padang Tualang
80	Pengrehapan Lokal MDT Al-Wasliyah	Kel. Tanjung Selamat Kec.Padang Tualang
81	Agar Dana Sertifikasi dikeluarkan karena sudah 5 bulan belum terbayar untuk Guru Honoror di Kemenag	Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
82	Bantuan Honor RT/RW Dusun Titi Belanga Sejahtera	Dusun Titi Belanga Sejahtera Desa Sei Bamban Kec.Batang Serangan

Sekretariat DPRD

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Mohon Perda tentang Guru PNS tidak bisa menjadi Pegawai Struktural Kec.Sei Bingai	Kec.Sei Bingai Kab.Langkat
2	Mohon Perda tentang Guru PNS tidak bisa menjadi Pegawai Struktural Kec.Sei Bingai	Kec.Sei Bingai Kab.Langkat

Kecamatan Kuala

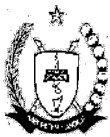
No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Jalan Jelek dan Belubang	Pekan Kuala Kecamatan Binjai
2	Belum adanya Rumah Ibadah ( Mesjid )	Kecamatan Kuala
3	Naikan Gaji Kepala Lingkungan	Desa Sido Makmur Kecamatan Kuala

Badan Kepegawaian Daerah

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Butuh Perda	Kecamatan Sei Bingai Kecamatan Sei Bingai

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

No	Hasil Reses	Lokasi
1	2	3
1	Mohon agar Drainase di Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura dimasukan anggarannya dalam APBD Kab.Langkat	- Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat
2	Mohon agar Drainase di Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura dimasukan anggarannya dalam APBD Kab.Langkat	- Desa Pulau Banyak Kec.Tanjung Pura Kab.Langkat



BAB VI

KINERJA PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DAERAH

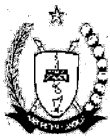
Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Langkat dalam bentuk kinerja nyata dari seluruh OPD yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi wewenang pemerintah kabupaten. Dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, perlu dilakukan penetapan kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan tolok ukur kinerja yang harus dicapai dalam membangun Tahun 2019-2021.

6.1 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024 Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat yang dimaksud dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah acuan kinerja yang digunakan oleh OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Langkat untuk menetapkan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen perjanjian kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Langkat.

Tabel 6-1  
Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Kabupaten Langkat Tahun 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU		KONDISI AWAL (2018/2019)	TARGET CAPAIAN 2021
	INDIKATOR	SATUAN		
1	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	10,2 (2018)	9,6
2	IPM	Poin	70,27 (2018)	71
3	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,52	8,82
4	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,22	68,75
5	Tingkat pertumbuhan jumlah wisatawan	%	10	12
6	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	50,11	54
7	Jumlah Desa Mandiri	Desa	8	10
8	Jumlah PMKS	Orang	4085	2468
9	Indeks Pembangunan Gender	Poin	68	68,06
10	Tingkat pertumbuhan investasi daerah (PMA-PMDN)	Persen (%)	5	7
11	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,76	2,57
12	Luas Kawasan Kumuh	Ha	150	120



NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA IKU		KONDISI AWAL (2018/2019)	TARGET CAPAIAN 2021
	INDIKATOR	SATUAN		
13	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	N/A	60
14	Indeks Risiko Bencana	Poin	140	128
15	Opini BPK	Opini (WTP, WDP, TW, TMP)	WDP	WTP
16	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)	CC (65)	B (70)
17	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75,6	78,16



**Tabel 6-2**  
**Program Pembangunan yang Mendukung Capaian Indikator Kinerja Utama**  
**Kabupaten Langkat Tahun 2021**

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
1.	Tujuan 1.1 Terciptanya peningkatan partisipasi masyarakat dan kemandirian desa untuk peningkatan kesejahteraan dan pengentasan permasalahan sosial		Tingkat Kemiskinan												
			Jumlah Desa Mandiri												
		1.1.1 Meningkatnya status desa	Peningkatan status desa (berdasarkan Indeks Desa Membangun/ID M) - Desa Maju - Desa Berkembang - Desa Tertinggal - Desa Sangat Tertinggal	1	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan dikelola secara modern	Pasar	0	0	0	1	1	2	Disperindag	
				2	Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas PMD	
						Tingkat pertumbuhan aparatur desa dengan kemampuan pengoperasian TIK	Persen (%)	n/a	240	240	240	240	240		
				3	Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan	Jumlah BUMDes Aktif	Unit	70	100	120	140	150	200	Dinas PMD	
					Program Kerjasama Pembangunan Antar Desa	Jumlah Kerjasama Antar Desa	MoU	1	1	1	1	1	1	Dinas PMD	
				4	Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	130	150	170	200	220	240	Dinas PMD	
				5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Tingkat realisasi penyerapan ADD di desa	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas PMD; Kecamatan	
				6	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Jumlah desa yang menggunakan pelayanan berbasis TIK	Desa	80	144	168	216	240	240	Dinas PMD	
		7	Program Pembinaan dan Pengawasan BUMD , BUMDes dan Perusahaan Daerah	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Sekretariat Daerah			
		1.1.2 Meningkatnya kesejahteraan	- Jumlah PMKS - Indeks Pembangunan	1	Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Sistem database PMKS	Unit	2	2	2	2	3	3	Dinas Sosial	
Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen (%)					55	80	85	89	90	100				



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
		sosial masyarakat	Gender			Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen (%)	65	68	100	100	100	100		
				2	Program Pembinaan Eks Penyandang Penyakit Sosial	Tingkat Pertumbuhan Penyandang Penyakit Sosial	Persen (%)	60	45%	40%	35%	30%	20%	Dinas Sosial	
				3	Program pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil (KAT) dan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) lainnya, program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Fakir Miskin	Persen (%)	60	52%	40%	35%	25%	15%	Dinas Sosial	
				4	Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase Penyandang Disabilitas yang Berdayaguna	Persen (%)	0	30%	35%	47%	47%	50%	Dinas Sosial	
				5	Program pembinaan panti asuhan/ panti jompo	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen (%)	n/a	20%	30%	35%	35%	50%	Dinas Sosial	
				6	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen (%)	n/a	40%	50%	55%	65%	70%	Dinas Sosial	
				7	Program Pembinaan Anak Terlantar	Persentase Anak Terlantar yang dibina	Persen (%)	n/a	70%	75%	85%	90%	100%	Dinas Sosial	
				8	Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas PP, KB dan PPA	
				9	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan pemberdayaan lembaga pengarusutamaan gender dan anak	Persen (%)	18	20	25	30	35	40	Dinas PP, KB dan PPA	
				10	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Orang	80	100	120	150	160	180	Dinas PP, KB dan PPA	



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
				11	Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan	Cakupan Kegiatan peningkatan yang mendukung kualitas anak dan peran perempuan	%	100	100	100	100	100	100	Dinas PP, KB dan PPA	
				12	Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	0,03	0,04	0,04	0,05	0,06	0,07	Dinas PP, KB dan PPA	
				13	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	42	45	50	55	60	70	Dinas PP, KB dan PPA	
				14	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Kualitas Keluarga	Cakupan kelompok perempuan yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas hidup dan keluarga	Kelompok	9	10	12	14	16	20	Dinas PP, KB dan PPA	
				15	Program Peningkatan Pemenuhan Hak Anak	Persentase Intitusi/lembaga dan Kecamatan yang menerapkan kategori layak/ramah anak	%	15	22	30	35	45	55	Dinas PP, KB dan PPA	
				16	Program Peningkatan Sistem Data Gender dan Anak	Sistem informasi database gender dan anak	Unit	2	3	3	4	4	5	Dinas PP, KB dan PPA	
				17	Program penguatan kelembagaan pengarusutamaan gender dan anak	Jumlah dokumen pengarusutamaan gender dan anak	dok	0	1	1	1	1	1	Bappeda	
				18	Program Pelayanan Kontrasepsi	Rasio Akseptor KB	%	65,6	69,55	70,22	71,02	71,05	72	Dinas PP, KB dan PPA	
				19	Program Keluarga Berencana	Rata-Rata jumlah Anak Per Keluarga	jiwa	3,16	3,1	3,06	3,02	2,9	2,7	Dinas PP, KB dan PPA	
				20	Program Kesehatan Reproduksi Remaja	ASFR 15 - 19	angka	24,2	24,07	23,66	23,02	23	22,86	Dinas PP, KB dan PPA	
				21	Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Mandiri	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	8	10	15	20	25	30	Dinas PP, KB dan PPA	
				22	Program Peningkatan penanggulangan narkoba, PMS termasuk HIV/AIDS	Cakupan kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap bahaya narkoba, PMS, dan HIV/AIDS	Kelompok	12	15	20	30	40	46	Dinas PP, KB dan PPA	
				23	Program Pengembangan bahan Informasi tentang Pengasuhan	Keluarga yang mempunyai balita tergabung dikelompok	keluarga	525	575	675	775	875	975	Dinas PP, KB dan PPA	



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
					dan Pembinaan tumbuh kembang anak	bina keluarga									
				24	Program Pengembangan Model Operasional BKB, Posyandu-Padu	Pengeleloa kelompok bina keluarga yang mendapat pelatihan/pembinaan	orang	35	45	45	50	50	55	Dinas PP, KB dan PPA	
				25	Program Pengendalian Penduduk dan KB	Persentase Perangkat daerah (Badan/Dinas) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	11	20	22	25	30	35	Dinas PP, KB dan PPA	
		1.1.3 Meningkatnya partisipasi pemuda dalam pembangunan	Jumlah prestasi pemuda : - Internasional - Nasional - Daerah	1	Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	Persentase peningkatan jumlah kegiatan organisasi pemuda	Persen (%)	60	62%	63%	65%	68%	70%	Dinas Pemuda dan Olah Raga	
				2	Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Jumlah wirausaha muda yang dibina	orang	28	30 Orang	40 Orang	50 Orang	60 Orang	70 Orang	Dinas Pemuda dan Olahraga	
				3	Program Pembinaan dan Pemasarakatan olahraga	Jumlah prestasi pemuda dalam kejuaraan olahraga	Medali/Juara	127 Medali /Juara	147 Medali /Juara	169 Medali/ Juara	187 Medali /Juara	220 Medali /Juara	254 Medali /Juara	Dinas Pemuda dan Olahraga	
				4	Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	Jumlah	408	411	413	415	415	418	Dinas Pemuda dan Olahraga	
				5	Program upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Jumlah Kegiatan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah (SMA/SMK)	3 Sekolah (SMA/SMK)	4 Sekolah (SMA/SMK)	5 Sekolah (SMA/SMK)	7 Sekolah (SMA/SMK)	9 Sekolah (SMA/SMK)	10 Sekolah (SMA/SMK)	Dinas Pemuda dan Olahraga	
				6	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda	Jumlah dokumen terkait kebijakan kepemudaan	Dokumen	1 Dokumen	-	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pemuda dan Olahraga	
				7	Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olahraga	Jumlah organisasi dan tenaga keolahragaan yang dibina	Organisasi dan orang	1 Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	Dinas Pemuda dan Olahraga	
				8	Program peningkatan peran serta kepemudaan	Persentase peningkatan jumlah kegiatan organisasi pemuda	Persen (%)	n/a	10	10	10	10	10	Kecamatan	
		1.1.4 Meningkatnya pengembangan budaya lokal	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal	1	Program Pengelolaan Keragaman Budaya	Presentase peningkatan festival dan event kebudayaan	Persen (%)	10	13	14	15	16	17	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				2	Program pengelolaan kekayaan budaya	Persentase cagar budaya yang sudah dikelola	Persen (%)	3	5	10	15	20	25	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				3	Program Pengembangan Nilai Budaya	Nilai budaya yang telah dikembangkan	kegiatan	0	0	1	0	3	8	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
				4	Program Kegiatan Sosial , Keagamaan dan Seni Budaya	Jumlah Festival, dan event keagamaan	Kegiatan	14	14	14	14	14	14	Sekretariat Daerah	
				5	Program pengelolaan keragaman budaya	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	Kegiatan Per Tahun	n/a	3	3	3	3	3	Kecamatan	
		1.1.5 Meningkatnya kapasitas pemberdayaan masyarakat dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban lingkungan	Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Aktif	1	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan	Jumlah satuan keamanan lingkungan aktif	Satuan	-	40	45	50	55	60	Dinas PMD	
				2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Jumlah FKUB	Jumlah	n/a	4	4	4	4	4	Kantor Kesbangpol	
				3		Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	n/a	100	100	100	100	100		
				4	Program Peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan	Jumlah organisasi/kelompok penjaga lingkungan	Kelompok	n/a	23	23	23	23	23	Satpol PP	
				5	Program pemeliharaan kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Jumlah pelanggaran perda	Kasus	n/a	53	45	35	30	25	Satpol PP	
				6	Program Pemeliharaan Kanrantibmas dan pencegahan tindak kriminal	Persentase Konflik sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	Kantor Kesbangpol	
				7	Program Peningkatan Pembrantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT)	Jumlah Kasus Pekat	Jumlah	75	70	65	60	55	50	Kantor Kesbangpol	
				8	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Cakupan Organisasi Masyarakat Yang mendapatkan Sosialisasi	%	100	100	100	100	100	100	Kantor Kesbangpol	
				9	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM	Jumlah masyarakat yang terbina	Orang	-	200	200	200	200	200	Sekretariat Daerah	
		1.1.6 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	1	Program Peningkatan Peran Perempuan di Pedesaan	Cakupan PKK Aktif	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas PMD	
				2	Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa	Cakupan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	Keg	100	100	100	100	100	100	Dinas PMD	
				3	Program Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di kelurahan	Persen (%)	n/a	20	25	30	35	40	Kecamatan	
				4	Program Sarana dan Prasarana	Jumlah kegiatan pembangunan	Kegiatan	n/a	100	100	100	100	100	Kecamatan	





NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB	
								2019	2020	2021	2022	2023	2024			
								Target	Target	Target	Target	Target	Target			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13		
					Kelurahan	sarana dan prasarana kelurahan										
				5	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan desa	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan Dana Desa	Persen (%)	n/a	100	100	100	100	100	Kecamatan		
				6	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase cakupan aspirasi Musrenbang Kecamatan dalam e-musrenbang	Persen (%)	n/a	100	100	100	100	100	Kecamatan		
2.	Tujuan 2.1 Terciptanya peningkatan kualitas pelayanan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan	2.1.1 Meningkatnya pelayanan pendidikan bagi masyarakat	IPM - Rata-Rata Lama Sekolah - Harapan Lama Sekolah - APK SD/MI Sederajat - APM SD/MI Sederajat - APK SMP/MTS Sederajat - APM SMP/MTS - Sederajat	1	Program Pendidikan Anak Usia Dini	APK PAUD usia 3-6 tahun	Persen (%)	93,67	94,63	95,55	96,51	97,47	98,45	Dinas Pendidikan		
				2	Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun	Persentase Anak Putus Sekolah di Tingkat SD	Persen (%)	1,19	1,18	1,17	1,16	1,15	1,14	Dinas Pendidikan		
						Persentase Anak Putus Sekolah di Tingkat SMP	Persen (%)	2,1	2,09	2,08	2,07	2,06	2,05	Dinas Pendidikan		
						Angka Melanjutkan SD-SMP	Persen (%)	68,19	68,2	68,21	68,22	68,23	68,24	Dinas Pendidikan		
						Angka kelulusan SMP	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Pendidikan		
						Rasio Siswa Per Ruang Kelas	Siswa : Ruang Kelas	32	32	32	32	32	32	Dinas Pendidikan		
						Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	Siswa : Ruang Kelas	73,62	73,64	73,65	73,66	73,67	73,68	Dinas Pendidikan		
						Jumlah Sekolah (SD/ sederajat dan SMP/ sederjat) Terakreditasi A atau B	Sekolah	579 (2018)	603	615	627	639	651	Dinas Pendidikan		
				3	Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan	Persentase guru, TK, SD, SMP, yang bersertifikat pendidik	%	85	87	89	91	93	95	Dinas Pendidikan		
				4		Rasio Guru bersertifikat pendidik per sekolah	Rasio	8,6 : 1	8,9 : 1	9,1 : 1	9,3 : 1	9,6 : 1	10,0 : 1			
				5	Program pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Jumlah koleksi bahan pustaka	eksempla r	25.125	1500	1600	1700	1800	1900	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan		
				6		Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	kunjunga n	n/a	9.200	9.300	9.450	9.550	9.700			
			2.1.2 Meningkatnya pelayanan kesehatan	- Angka Harapan Hidup (AHH) - Prevalensi Gizi		1	Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	% Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	95,5	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan
								Jumlah Kematian Balita	Indeks	39	37	35	33	31	28	
								Jumlah Kematian Ibu	Indeks	8	8	8	7	7	6	



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
		bagi masyarakat	Buruk - TFR (Total Fertility Rate)			Jumlah Kematian Bayi	Indeks	36	34	32	30	28	26	Dinas Kesehatan	
				2	Program perbaikan gizi	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Persen (%)	12,33	12,25	12	11,5	11	10		
						Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persen (%)	20,4	20,35	20,3	20,2	20,1	20		
						Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun	Persen (%)	13,83	13,5	13	12	11	10		
				3	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Persen (%)	70	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
						Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan asuransi/jaminan kesehatan	%	70	100	100	100	100	100		
						Persentase Puskesmas yang memberikan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	100		
				4	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	86,7	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
						Persentase Rumah Sakit Sesuai Standar (Terakreditasi)	%	50	50	60	70	80	90		
				5	Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Nilai IKM RSUD	%	n/a	78	79	80	82	85	RSUD Tanjung Pura	
						Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Status Akreditasi	80	100	100	100	100	100		
				6	Program Peningkatan Kualitas SDM Kesehatan	Persentase tenaga kesehatan yang berstandar kompetensi	Persen (%)	0	5	10	15	20	25	Dinas Kesehatan	
						Puskesmas yang memiliki dokter minimal 3 orang	%	83	100	100	100	100	100		
				7	Program promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat	Persentasi Keluarga yang Menerapkan PHBS	%	55	69	70	71	72	73	Dinas Kesehatan	
				8	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Farmasi dan Alat Kesehatan	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
				9	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Persentase kasus penyakit menular yang tertangani	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
						Persentase Desa UCI	%	89,89	91,7	93,9	95,7	97,8	100		



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
				10	Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	Jumlah Kemitraan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Kemitraan	0	2	3	4	4	5	Dinas Kesehatan	
				11	Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	Eradikasi Polio	kasus (spesimen)	0	0	0	0	0	0	Dinas Kesehatan	
				12	Program Pengadaan, Peningkatan, dan Perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/puskesmas pembantu dan jaringannya	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan (Puskemas, Pustu & jaringannya) dalam kondisi baik	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
				13	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit menular	Persentase kasus penyakit menular yang tertangani	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
						Persentase Desa UCI	%	89,89169675	91,6967509	93,86281588	96	98	100		
				14	Program peningkatan Pelayanan Lansia	Meningkatnya Kesehatan bagi Lansia (UHH)	angka	67,94	68	69	69	70	70	Dinas Kesehatan	
				15	Program Pencegahan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa	Persentase Cakupan Posbindu	%	30,32	44,04	57,76	71,48	85,2	100	Dinas Kesehatan	
				16	Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)	Jumlah Penyuluhan Bahaya Peredaran Miras Dan Narkoba	kali	0	1	1	1	1	1	Dinas Kesehatan	
				17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Persentase Sarana Distribusi Obat Yang Terstandar	%	89,93	100	100	100	100	100	Dinas Kesehatan	
						Persaentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang terstandart	%	63,92	57,06	62,25	67,44	72,63	77,81		
				18	Program pengembangan obat asli indonesia	Persentase HATRA (Penyehat Tradisional) yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	%	10	11	12	14	19	24	Dinas Kesehatan	
				19	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit / Rumah Sakit jiwa / Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik	%	80	100	100	100	100	100	RSUD Tanjung Pura	
				20	Program Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentasi masyarakat yang terlayani upaya kesehatan masyarakat	%	80	100	100	100	100	100	RSUD Tanjung Pura	



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
				21	Program Peningkatan Pelayanan BLUD Rumah Sakit	Persentasi Realisasi Capaian BLUD	%	80	100	100	100	100	100	RSUD Tanjung Pura	
				22	Program Pengadaan , Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-paru/Rumah Sakit Mata	Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	%	80	100	100	100	100	100	RSUD Tanjung Pura	
3.	Tujuan 3.1 Terwujudnya pertumbuhan ekonomi dan penurunan tingkat pengangguran melalui pengembangan pariwisata yang terintegrasi dengan sektor ekonomi unggulan daerah		LPE												
			TPT												
		3.1.1 Meningkatkan kunjungan wisatawan dan pendapatan dari wisata	- Tingkat pertumbuhan jumlah wisatawan - Kontribusi Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan minum) pada PDRB (ADHB)	1	Program Pengembangan Destinasi Wisata	Lama kunjungan Wisata	hari	2	2	3	3	4	4	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				2	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	100.104	110.114	123.328	138.127	158.846	190.615	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				3	Program Pengembangan Desa Wisata	Jumlah Desa Wisata	Desa	-	-	-	1	1	2	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
				4	Program pengembangan Kemitraan Pariwisata	Sistem Informasi Kepariwisata	Unit	1	1	15	2	3	3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
						Pertumbuhan Jumlah Kamar	%	n/a	2	2	2	2	2		
						Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Orang	n/a	100	100	105	110	115		
				5	Program Pengembangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan di Kawasan-kawasan Konservasi Laut dan Hutan	Persentase daya tarik ekowisata di kawasan konservasi yang dikelola	Persen (%)	N/A	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup	
		3.1.2 Meningkatkan pengembangan UMKM dan IKM dalam sektor ekonomi kreatif	- Tingkat Pertumbuhan UMKM - Tingkat Pertumbuhan IKM	1	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah	Jumlah IKM	IKM	3347	3447	3547	3647	3747	3847	Dinas Perindag	
						Tingkat Pertumbuhan Kebaruan Produk IKM	Persen (%)	0	3	5	8	11	15		
				2	Program Pengembangan Sentra-sentra Industri Potensial	Jumlah Pengembangan Sentra Industri	Sentra	1	1	2	2	3	4	Dinas Perindag	
				3	Porgram Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	200	210	220	240	240	240	Dinas Perindag	
				4	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah pertumbuhan kebaruan produk UMKM	Unit	0	30	30	30	30	30	Dinas Koperasi	
		Jumlah kegiatan akses UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) ke layanan keuangan	keg			1	1	1	1	1	1				



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
				5	Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	Persentase UMKM yang mengalami peningkatan skala bisnis	Persen (%)	0	5	10	15	20	25	Dinas Koperasi	
				6	Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi	Cakupan koperasi aktif	Persen (%)	41	42	43	43	44	45	Dinas Koperasi	
				7	Program Pengembangan Sumber daya Manusia KUKM	Cakupan kegiatan Pengembangan sumber daya manusia KUKM	Keg	0	11	11	11	11	11	Dinas Koperasi	
				8	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase peningkatan harga barang pokok yang tersubsidi	%	-	10	10	10	10	10	Sekretariat Daerah	
		3.1.3 Meningkatnya produksi pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan	- Skor PPH - Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian pada PDRB (ADHB) - Kontribusi Sub Sektor Perikanan pada PDRB (ADHB)	1	Program peningkatan ketahanan pangan pertanian/ perkebunan	Volume ketersediaan pangan utama	Ton	333.480	141.131	144.377	147.698	151.095	154.570	Dinas Pertanian dan Ket. Pangan	
				2	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Produksi komoditas tanaman pangan	Ton	792721	793117	793514	793991	794308	794705	Dinas Pertanian dan Ket. Pangan	
						Jumlah Produksi Komoditas Holtikultura	Ton	95476	95524	95571	95619	95667	95715	Dinas Pertanian dan Ket. Pangan	
						Produksi komoditas perkebunan	ton	795635	811507	827701	844244	865281	895281	Dinas Pertanian dan Ket. Pangan	
				3	Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan	Jumlah Produk Olahan Hasil Pertanian/ Perkebunan	Produk	0	1	2	2	2	2	Dinas Pertanian dan Ket. Pangan	
				4	Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi daging	Ton	8487	8668	8737	8794	8848	8942	Dinas Pertanian dan Ket. Pangan	
						Produksi Telur	Ton	10577	10897	11061	11282	11451	11623	Dinas Pertanian dan Ket. Pangan	
				5	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Angka kejadian penyakit ternak	Kasus	14841	14544	14253	13968	13689	13415	Dinas Pertanian dan Ket. Pangan	
						Angka Kematian Ternak	Kasus	158374	155269	154493	154339	154031	153877	Dinas Pertanian dan Ket. Pangan	
				6	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Sapi	Ekor	201.193	207.217	213.434	219.837	226.432	233.225	Dinas Pertanian dan Ket. Pangan	
						Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras	Ekor	1.324.604	1.324.604	1.364.342	1.405.272	1.447.431	1.490.853		
				7	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan	Jumlah Produk Olahan Hasil Peternakan	Produk	0	1	1	1	1	1	Dinas Pertanian dan Ket. Pangan	
				8	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah Kelompok Tani/ Petani yang Mendapatkan Pelatihan Usaha Agribisnis	Kelompok Tani/ Petani	30	30	30	30	30	30	Dinas Pertanian dan Ket. Pangan	



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
				9	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan	Produktivitas :								Dinas Pertanian dan Ket. Pangan	
				10		Padi (Kw/ha)	Kw/Ha	63,45	58,491	58,782	59,073	59,364	59,655		
						Jagung (Kw/Ha)	Kw/Ha	73,52	66,661 65	66,9933	67,324 95	67,656 6	67,988 25		
						Kelapa Sawit (Ton/Ha/Th)	Ton/Ha/Th	18,18	18,907 2	19,2708	19,634 4	19,998	20,361 6		
						Karet (Ton/Ha/Th)	Ton/Ha/Th	1,04	1,0816	1,1024	1,1232	1,144	1,1648		
						Kakao (ton/Ha/th)	Ton/Ha/Th	1,15	1,196	1,219	1,242	1,265	1,288		
						Kelapa (ton/Ha/th)	Ton/Ha/Th	1,14	1,1856	1,2084	1,2312	1,254	1,2768		
				11	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/ perkebunan lapangan	Jumlah Penyuluh Pertanian yang Jenjang Jabatan Fungsionalnya Meningkat	Org	5	5	10	15	20	25	Dinas Pertanian dan Ket. Pangan	
						Jumlah Kelompok Tani yang naik kelas	Kelompok	250	350	375	380	390	400		
				12	Program pengembangan agribisnis pertanian/ perkebunan	Jumlah Petani yang memanfaatkan Kemitraan Usaha, Modal Usaha dan Manajemen Usaha Pertanian	Kelompok/ Petani	0	150	150	150	150	150	Dinas Pertanian dan Ket. Pangan	
				13	Program pengembangan perikanan tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	ton	31.037,92	31.037,92 Ton	32.605,33	34.268,20	36.033,02	37.906,73	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				14	Program pengembangan budidaya perikanan	Produksi Perikanan Budidaya	ton	27.361,49	28.729,56	28.756,92	30.252,28	31.916,16	33.735,38	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				15	Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen (%)	-	5	6	8	10	15	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				16	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	401,89	421,98	443,08	465,24	488,5	512,92	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				17	Program Peningkatan Kegiatan Budaya Kelautan dan Wawasan Maritim kepada Masyarakat	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Sosialisasi	Persen (%) Per Tahun	-	5	6	7	8	9	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				18	Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Jumlah Pokmaswas Yang Terbentuk	Kelompok	-	3	4	5	6	7	Dinas Kelautan dan Perikanan	



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
				19	Program Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Penyuluhan	Persen (%) Per Tahun	-	5	6	7	8	9	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				20	Program Perencanaan dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Dokumen Perencanaan Program	Dokumen Per Tahun	-	2	2	2	2	2	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				21	Program Penyediaan/pengembangan Sarana dan Prasarana Pembedayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir dan Pulau-pulau Kecil	Persentase Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Dibantu	Persen (%)	-	5	6	7	8	9	Dinas Kelautan dan Perikanan	
				22	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani	Jumlah kelompok Petani yang dibina	Unit	23	23	23	23	23	23	Sekretariat Daerah	
				23	Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya	Panjang jaringan irigasi dalam Kondisi Baik	meter	52	54	56	58	60	62	Dinas PUPR	
				3.1.4 Meningkatnya investasi daerah	Tingkat pertumbuhan investasi daerah (PMA-PMDN)	1	Program Peningkatan Iklim Investasi Daerah dan Realisasi Investasi	Dokumen Regulasi Investasi	Perda	0	1	1	2	2	3
		2	Program Penyiapan Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah	Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah		Unit							Dinas PM dan PPTSP		
		3	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN)		Rp	5,1 T	5,4 T	5,8 T	6,25 T	6,8 T	7,4 T	Dinas PM dan PPTSP		
		4	Program Penyiapan Potensi Sumber Daya, Sarana Dan Prasarana Daerah	Cakupan sistem informasi potensi investasi daerah		%	100	100	100	100	100	100	Dinas PM dan PPTSP		
		5	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Inventasi	Jumlah Pameran yang dilaksanakan dalam peningkatan promosi dan investasi		Kegiatan	2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah		
		3.1.5 Meningkatnya penguatan sumber-sumber Pendapatan	Pertumbuhan PAD	6	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Persentase Piutang Pajak dan Retribusi yang terselesaikan	Persen (%)	n/a	80	84	88	92	96	Badan Pendapatan Daerah	
						Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak	Persen (%)	n/a	3	3,25	3,5	3,75	4		
						Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi	Persen (%)	13,18	20	27	34	41	48		



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
		Asli Daerah		7	Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Perkantoran dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase realisasi retribusi perizinan	Persen (%)	65	75	80	85	90	95	Dinas PM dan PPTSP	
		8		Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	Persentase Batas Daerah yang tersedia	%	2000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Sekretariat Daerah		
		3.1.6 Meningkatnya partisipasi angkatan kerja dalam ekonomi lokal	- Tingkat Pertumbuhan Wirausaha - Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	1	Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Jumlah fasilitas inkubator teknologi dan bisnis	Unit	0	1	1	1	1	1	Dinas Koperasi	
						Jumlah wirausaha baru yang memperoleh akses permodalan	Unit	0	30	30	30	30	30		
						Jumlah Fasilitas Wirausaha Baru oleh Mitra Badan Usaha	Unit	0	30	30	30	30	30		
				2	Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor	Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri	Produk	15 Produk	15 Produk	25 Produk	25 Produk	35 Produk	35 Produk	Disperindag	
				3	Program Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan	Jumlah kelompok pedagang Kaki lima dan Asongan yang dibina	Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	2 Kelompok	2 Kelompok	3 Kelompok	4 Kelompok	Disperindag	
				4	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Jumlah pasar tertib ukur	Pasar	1 Pasar	1 Pasar	2 Pasar	2 Pasar	3 Pasar	4 Pasar	Disperindag	
				5	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Tingkat lonjakan harga barang pokok	%	0	5%	5%	5%	5%	5%	Disperindag	
				6	Program Pengawasan Perdagangan dan Tertib Niaga	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	%	0	5%	10%	15%	20%	25%	Disperindag	
				7	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen (%)	n/a	14,81	27,78	27,78	27,78	27,79	Dinas Tenaga Kerja	
						Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen (%)	n/a	13,89	19,44	22,22	22,22	22,23		
				8	Program Peningkatan Kesempatan Kerja	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen (%)	n/a	97	98	99	98	99	Dinas Tenaga Kerja	
				9	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Tertangani	Kasus	n/a	65	70	75	80	85	Dinas Tenaga Kerja	
				10	Program Pengembangan Data Informasi Ketenagakerjaan	Cakupan database ketenagakerjaan	Persen (%)	n/a	95	95	95	95	98	Dinas Tenaga Kerja	





NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
4.	Tujuan 4.1 Terciptanya penurunan kesenjangan wilayah melalui pembangunan infrastruktur, penataan ruang, dan pengelolaan lingkungan hidup		Indeks Gini	1	Program Pembangunan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan Kabupaten	Km	1.561	1.611	1.661	1.711	1.761	1.811	Dinas PUPR	
			Indeks Williamson			Persentase peningkatan kelas jalan Kabupaten	%	54,51	54,61	54,71	54,81	54,91	55,01		
						Jumlah Jembatan	unit	262	282	302	322	342	362		
		4.1.1 Meningkatnya konektivitas wilayah dan kinerja infrastruktur jalan	- Persentase Panjang Jalan Kabupaten Per Luas Wilayah - Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap - Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	2	Program Pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan	Database kondisi jalan	Unit	0	0	1	1	1	1	Dinas PUPR	
						3	Program rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Km	426,55	484	541	598		655
					Jumlah Jembatan dalam kondisi baik			Unit	161	191	221	251	281	311	Dinas PUPR
				4	Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas	Jumlah Rambu,Marka,Pagar Pengaman Jalan	unit	500	600	700	800	900	1000	Dinas Perhubungan	
				5	Program peningkatan pelayanan angkutan	Jumlah Armada Bus Sekolah	unit	2	3	4	5	6	7	Dinas Perhubungan	
				6	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Jumlah Halte Bus/Taxi gedung terminal	unit	10	11	12	13	14	15	Dinas Perhubungan	
				7	Program Optimalisasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Titik Rawan Kemacetan	Titik	20	19	18	17	16	15	Dinas Perhubungan	
				8	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Jumlah Terminal Sesuai Standar	unit	0	1	2	3	4	5	Dinas Perhubungan	
				9	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ	Cakupan Prasarana dan Fasilitas dalam Kondisi Baik	persen	30	35%	40%	45%	50%	55%	Dinas Perhubungan	
				10	Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor	Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	persen	60	62%	64%	66%	68%	70%	Dinas Perhubungan	
				11	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persen (%)	64	66	68	70	72	74	Dinas PUPR	
				12	Program Pengadaan, Penataan dan Perawatan Lampu Jalan	Jumlah ruas jalan yang dilayani Penerangan Jalan Umum	ruas jalan	726	734	742	750	758	766	Dinas PUPR	
	4.1.2 Meningkatnya kinerja infrastruktur	- Luas Kawasan Kumuh - Proporsi Rumah Tangga	1	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Rumah Tangga dengan Rumah Tidak Layak Huni	%	11	10,6	10,2	9,8	9,4	9	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman		
		Rencana Penanganan Kawasan			Dokumen	5	1	1	1	1	1				



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
		permukiman	dengan Layanan Air Bersih - Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi - Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Persampahan			Kumuh									
				2	Program Lingkungan Sehat Perumahan	Cakupan Wilayah yang Terlayani Air Bersih	%	14	19	24	29	34	40	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
						Jumlah Lokasi Kawasan Kumuh yang Tertata	Lokasi	1	1	1	1	1	1		
				3	Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong	Cakupan Wilayah yang terlayani sanitasi	Persen (%)	44	100	100	100	100	100	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
						4	Panjang saluran drainase lingkungan	meter	108000	153000	201000	252000	306000		366000
				5	Program pembangunan Jalan Lingkungan	Panjang Jalan lingkungan	meter	77237	153001	201001	252001	306001	366000	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
				6	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Cakupan RT Perkotaan yang Terlayani Sistem Pengangkutan Sampah	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup	
				7	Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman ( PPSP)	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pamsimas	Orang	-	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah	
		4.1.3 Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	1	Program Pemanfaatan Ruang	Jumlah Kebijakan Tata Ruang	Dokumen	0	0	2	4	6	8	Dinas PUPR	
				2	Program Perencanaan Tata Ruang	Dokumen RDTR, Dokumen RTR Kawasan Strategis Kabupaten	Dokumen	0	7	14	21	28	35	Dinas PUPR	
				3	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Sistem Informasi Tata Ruang,	Unit	0	0	1	2	3	4	Dinas PUPR	
						Jumlah kasus pelanggaran tata ruang	kasus	2	0	0	0	0	0	Dinas PUPR	
		4.1.4 Meningkatkan pengawasan terhadap kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	1	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	poin	n/a	55	57	59	61	63	Dinas Lingkungan Hidup	
						Indeks Kualitas Udara	poin	53,32 (2018)	54,32	55,32	56,32	57,32	58,32		
						Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	n/a	58	60	62	64	66		
						Persentase ketaatan/kepatuhan usaha terhadap aspek lingkungan	Persen (%)	100	100	100	100	100	100		
				2	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Jumlah Kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan konservasi SDA	%	1	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	
						Jumlah Dokumen Database Konservasi SDA	Dokumen								
				3	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber	Persentase Laporan Masyarakat terkait Lingkungan Hidup yang	Persen (%)	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup	



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
					Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Ditindaklanjuti									
				4	Program Peningkatan Pengendalian Polusi	Jumlah kegiatan pengendalian polusi	Kegiatan	1	4	4	4	4	4	Dinas Lingkungan Hidup	
				5	Program Penataan dan Pemanfaatan PPLH	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan PPLH	%	100	100	100	100	100	100	Dinas Lingkungan Hidup	
				6	Program Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan	Jumlah Dokumen Profil MHA	Dokumen	1	1	1	1	1	1	Dinas Lingkungan Hidup	
				7	Program Pembangunan dan Pemeliharaan Taman-taman Kota	Jumlah taman dalam kondisi baik	Unit	12	16	20	24	28	32	Dinas PUPR	
		4.1.5 Menurunnya resiko kejadian bencana	- Indeks Risiko Bencana - Luas Wilayah Rawan Genangan Banjir	1	Program Perencanaan Pembangunan Daerah Rawan Bencana	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0	1	1	1	1	1	1	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
				2	Program Penyelenggaraan Tanggap Darurat Bencana	Prosentase ketersediaan data dan informasi kebencanaan	%	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				3	Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Bencana	Desa	2	2	2	3	4	4	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				4	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase kejadian bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100	100	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
				5	Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Persentase cakupan wilayah penangan Kebakaran	%	n/a	13	17	22	26	30	Satpol PP	
						Rata-rata waktu respon penanganan kejadian kebakaran	Menit	n/a	15	10	10	10	10		
				6	Program pengendalian banjir	Bantaran dan Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	meter	36480	43480	50480	57480	64480	71480	Dinas PUPR	
				7	Program Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Panjang sungai yang terkonservasi	meter	500	1300	2100	2900	3700	4500	Dinas PUPR	
				8	Program Pembangunan Turap/Talud dan Bronjong	Panjang Turap / Talud dan Bronjong Yang Dibangun	meter	6631	9631	12631	15631	18631	21631	Dinas PUPR	
5.	Tujuan 5.1 : Terciptanya reformasi birokrasi		Indeks Reformasi Birokrasi	1	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi										



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
	dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan peningkatan inovasi, pemanfaatan sistem informasi dan teknologi	5.1.1 Meningkatnya akuntabilitas, transparansi keuangan dan kinerja pemerintah	- Opini BPK - Nilai Evaluasi AKIP - Indeks Professionalitas ASN - Tingkat Maturitas SPIP	2	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Keuangannya Selesai Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	
						Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Asset/Barang Daerahnya Diterbitkan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100		
						Persentase Laporan Perangkat Daerah Capaian Kinerjanya Terbit Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	100		
				3	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	100	100	100	100	100	100	Bappeda	
						Persentase cakupan aspirasi Musrenbang Kabupaten dalam e-musrenbang	%	100	100	100	100	100	100	Bappeda	
						Persentase Konsistensi RENSTRA SKPD dengan dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	Bappeda	
				4	Program perencanaan pembangunan ekonomi	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	dok	5	5	5	5	5	5	Bappeda	
				5	Program perencanaan sosial budaya	Jumlah dokumen perencanaan sosbud	dok	1	0	1	0	0	0	Bappeda	
				6	Program perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	dok							Bappeda	
			7	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Jumlah kebijakan pendukung kelitbang daerah	Perbup	0	2	2	2	2	2	Bappeda		
					Persentase implementasi rencana kelitbang	Persen (%)	n/a	20	40	60	80	100			
			8	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah		
			9	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	Cakupan peraturan daerah yang dapat diakses secara online	Persen (%)	n/a	100	100	100	100	100	Sekretariat Dewan		
			10	Program kerjasama informasi dan Mas Media	Cakupan kegiatan DPRD yang terpublikasi	Persen (%)	n/a	100	100	100	100	100	Sekretariat Dewan		



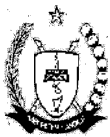
NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
				11	Program Penataan dan Penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	3	3	3	3	3	Inspektorat	
				12	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Temuan (Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi)	Persen (%)	78,4	80	82	85	87	89	Inspektorat	
				13	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase Peningkatan Kompetensi Penjenjangan APIP	Persen (%)	10	11	12	13	14	15	Inspektorat	
				14	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan	Cakupan peraturan kepala daerah yang dapat diakses secara online	%	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah	
				15	Program Kerjasama informasi dengan Mass Media	Jumlah kegiatan yang terdokumentasi	Kegiatan	200	250	250	250	250	250	Sekretariat Daerah	
				16	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan antar pemerntah daerah	MoU	10	10	10	10	10	10	Sekretariat Daerah	
				17	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Jumlah Dokumen Kajian Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Dokumen	2	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah	
				18	Program Percepatan Akses Keuangan Daerah	Jumlah tim yang terbentuk	Tim	3	3	3	3	3	3	Sekretariat Daerah	
				19	Program Pembinaan dan Peningkatan Organisasi Perangkat Daerah	Tingkat realisasi Sasaran Kinerja ASN	%	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah	
				20	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah	Persentase Layanan Kedinasan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	100	Sekretariat Daerah	
				21	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Percepatan durasi penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan akurat	hari	n/a	21	20	18	16	14	Badan Kepegawaian Daerah	
				22	Program Pendidikan Kedinasan	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM Per Tahun	Pegawai	n/a	2	2	2	2	2	Badan Kepegawaian Daerah	
				23	Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip	Dokumen/arsip daerah yang dapat diselamatkan	OPD	n/a	10	10	10	10	10	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
					Daerah										
				24	Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasarana Kearsipan	Sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara	Kotak	n/a	80	80	100	80	80	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
				25	Program Pengolahan Hasil Arsip daerah	Jumlah Dokumen Hasil Olahan hasil Arsip Daerah	Dok	0	1	1	1	1	501	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
				26	Program Persandian Daerah	Persentase Pemanfaatan Sandi Daerah	%	n/a	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		5.1.2 Meningkatnya kepuasan masyarakat dalam pelayanan publik berbasis SIT	- Nilai Indeks SPBE - Persentase Desa dengan Pelayanan Berbasis TIK - Indeks Kepuasan Masyarakat	1	Program fasilitasi Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase SDM Pemerintahan dengan Kompetensi TIK	Persen (%)	n/a	20	40	60	80	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				2	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Tindak Lanjut Laporan Masyarakat	%	n/a	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				3	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Cakupan Integrasi Sistem Aplikasi Pemerintahan dan Layanan Publik	%	n/a	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				4	Program Kerjasama Informasi dengan Mass Media	Cakupan Kegiatan Pemerintahan yang Terpublikasi di Media Massa	%	n/a	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				5	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Cakupan Kegiatan Pemerintahan yang Terpublikasi di Tingkat Kecamatan	%	n/a	100	100	100	100	100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
				6	Program pengembangan data/informasi	Sistem Database Pembangunan Yang Terbaharui	unit	1	2	2	2	2	2	Bappeda	
				7	Program Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan	Rata-rata Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Hari	15	15	15	10	10	7	Dinas PM dan PPTSP	
				8	Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan Dan Pengendalian	Sistem Informasi Perizinan	Unit	1	1	1	2	2	3	Dinas PM dan PPTSP	
				9	Program Peningkatan Pengembangan, Pengelolaan Pelayanan Publik	Persentase laporan/pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	100	Dinas PM dan PPTSP	
				10	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh DPRD	Persen (%)	n/a	100	100	100	100	100	Sekretariat Dewan	
				11	Program Mengintensifkan	Unit Khusus Penangana	Unit	2	2	2	2	2	2	Sekretariat	



NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SAS ARAN	PROGRAM PRIORITAS		INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SATUAN	REALI SASI	TARGET						OPD PENANGGUNG JAWAB
								2019	2020	2021	2022	2023	2024		
								Target	Target	Target	Target	Target	Target		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11	11	11	13	
					penanganan pengaduan masyarakat	Pengaduan Masyarakat yang terbentuk								Daerah	
				12	Program perbaikan sistem administrasi kearsipan	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen (%)	n/a	83	86	90	95	100	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
				13	Program pengembangan data/informasi/statistik daerah	Presentase data statistik terintegrasi	Persen (%)	n/a	100	100	100	100	100	Bappeda	
						Dokumen data-data statistik	dokumen /tahun	24	24	24	24	24	24		
				14	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Persentase Penduduk Yang Melakukan Perekaman Data Kependudukan	Persen (%)	91	93	94	95	96	97	Disduk Catpil	
						Rata-rata Waktu Pelayanan Administrasi Kependudukan	Hari	5	4	4	3	3	2	Disduk Catpil	
						Persentase anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	Persen	86	87	88	89	90	91	Disduk Catpil	



## **6.2 Indikator Kinerja Kunci**

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah perlu kiranya ditetapkan indikator kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian Pemerintah Daerah. Indikator kinerja daerah meliputi 3 (tiga) aspek kinerja yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat; aspek pelayanan umum; serta aspek daya saing daerah.

### **1. Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

Aspek kesejahteraan masyarakat diukur melalui indikator makro yang merupakan indikator gabungan (indikator komposit) dari berbagai kegiatan pembangunan ekonomi maupun sosial dan dibagi kedalam 3(tiga) focus yaitu Fokus Kesejahteraan dan Pemeratan Ekonomi, Fokus Kesejahteraan Sosial dan focus seni budaya dan olah raga sebagaimana tabel dibawah ini.





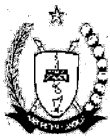
**Tabel 6-3**  
**Indikator Aspek Kesejahteraan Masyarakat**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
1	LPE	Persen (%)	5,02 (2018)	5.02	5.07	5,1	5,2	Seluruh Perangkat Daerah
2	IPM	Poin	70,27 (2018)	70.27	70.76	70,5	71	Seluruh Perangkat Daerah
3	Tingkat Kemiskinan	Persen (%)	10,2 (2018)	10.2	9.91	9,8	9,6	Seluruh Perangkat Daerah
4	Indeks Gini	Poin	0,25	0.25	0.23	0,24	0,23	Seluruh Perangkat Daerah
5	Indeks Williamson	Poin	0,607	0.607	0.58	0,59	0,58	Seluruh Perangkat Daerah
6	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	8,52 (2018)	8.52	8.82	8,76	8,82	Dinas Pendidikan
7	Harapan Lama Sekolah	Tahun	12,75 (2018)	12.75	12.9	12,8	12,9	Dinas Pendidikan
8	Angka Harapan Hidup (AHH)	Tahun	68,22 (2018)	68.22	68.75	68,5	68,75	Dinas Pendidikan
9	Prevalensi Gizi Buruk	%	0,09	0.09	0	0	0	Dinas Kesehatan
10	TPT	Persen (%)	4,67	4.67	4.3	4,5	4,3	Dinas Ketenaga kerjaan
11	Jumlah Desa Mandiri	Desa	8	8	10	9	10	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa
12	Jumlah PMKS	Orang	4085	4085	2468	3268	2468	Dinas Sosial
13	Indeks Pembangunan Gender	Poin	68	68	68.06	68,02	68,06	Pengendalian Penduduk, KB dan PPA
14	TFR (Total Fertility Rate)	%	2,76	2.76	2.57	2,6	2,57	Dinas Kesehatan
15	Tingkat pertumbuhan jumlah wisatawan	%	10	10	12	12	12	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16	Indeks Risiko Bencana	Poin	140	140	128	139	128	BPBD
17	Skor PPH	Poin	89,6	89.6	n/a	89,8	89,9	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
18	Kontribusi Sektor Pariwisata (Akomodasi dan Makan minum) pada PDRB (ADHB)	%	2,28 (2018)	2.28	2.34	2,4	2,43	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
19	Kontribusi Sub Sektor Pertanian, Peternakan, Perburuan dan Jasa Pertanian pada PDRB (ADHB)	%	35,06	35.06	36.06	35,56	36,06	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
20	Kontribusi Sub Sektor Perikanan pada PDRB (ADHB)	%	3,12	3.12	3.62	3,37	3,62	Dinas Perikanan dan Kelautan



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
21	Tingkat Pertumbuhan UMKM	%	11,3	11.3	n/a	11,5	12	Dinas Koperasi
22	Tingkat Pertumbuhan IKM	%	n/a	n/a	n/a	2,99	3,04	Dinas Koperasi
23	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	n/a	n/a	n/a	60	62	Bag. Organisasi
24	Opini BPK	Opini (WTP, WDP, TW, TMP)	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP	BPKAD
25	Indeks Profesionalitas ASN	Poin	n/a	n/a	n/a	70	72,5	BKD
26	Nilai Evaluasi AKIP	Nilai (AA, A, B, CC, C, D)	CC (65, Tahun 2018)	CC (65. Tahun 2018)	CC (65)	B (67,5)	B (70)	Bag. Organisasi
27	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	75,6 (2018)	75.6	72.77	76,88	78,16	Seluruh Perangkat Daerah

Sumber : Bappeda Kabupaten Langkat Tahun 2020 (Data diolah)



## **2. Aspek Daya Saing Daerah**

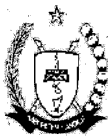
Aspek daya saing daerah merupakan indikator yang mengukur kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan. Indikator yang diukur antara lain: laju pertumbuhan investasi, pendapatan per kapita, laju pertumbuhan PMA. Penetapan indikator kinerja daerah dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program(outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah.



**Tabel 6-4**  
**Indikator Aspek Daya Saing Daerah**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
1	Tingkat pertumbuhan investasi daerah (PMA-PMDN)	Persen (%)	5	5	n/a	6	7	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
2	Pertumbuhan PAD	%	1,71	1,71	10,38	2,5	3,5	Badan Pendapatan Daerah

Sumber : Bappeda Kabupaten Langkat Tahun 2020 (Data diolah)



### **3. Aspek Pelayanan Umum**

Aspek pelayanan umum merupakan segala bentuk pelayanan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan atau urusan yang telah diserahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan fokus layanan Urusan Pemerintah wajib baik dasar maupun non dasar. Urusan pilihan dan penunjang sebagaimana terdapat pada tabel dibawah ini.



**Tabel 6.5**  
**Indikator Aspek Pelayanan Umum**

No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
URUSAN WAJIB								
1.	Pendidikan							
1	APK SD/MI Sederajat	%	110,43 (2017/2018)	110.43	85.24	111,5343	112,649643	Dinas Pendidikan
2	APM SD/MI Sederajat	%	94,28 (2017/2018)	94.28	81.09	95,2228	96,2702508	
3	APK SMP/MTS Sederajat	%	106,99 (2017/2018)	106.99	71.68	108,0599	109,140499	
4	APM SMP/MTS Sederajat	%	79,59 (2017/2018)	79.59	59.14	81,57975	83,6192438	
5	APK PAUD usia 3-6 tahun	Persen (%)	93,67	93.67	20.95	94,63	95,55	
6	Persentase Anak Putus Sekolah di Tingkat SD	Persen (%)	1,19	1.19	n/a	1,18	1,17	
7	Persentase Anak Putus Sekolah di Tingkat SMP	Persen (%)	2,1	2.1	n/a	2,09	2,08	
8	Angka Melanjutkan SD-SMP	Persen (%)	68,19	68.19	68.21	68,2	68,21	
9	Angka kelulusan SMP	Persen (%)	100	100.	100.	100	100	
10	Rasio Siswa Per Ruang Kelas	Siswa : Ruang Kelas	32	32.	32.	32	32	
11	Persentase Ruang Kelas dalam Kondisi Baik	Siswa : Ruang Kelas	73,62	73.62	73.65	73,64	73,65	
12	Jumlah Sekolah (SD/ sederajat dan SMP/ sederjat) Terakreditasi A atau B	Sekolah	579 (2018)	579.	643.	603	615	
13	Persentase guru, TK, SD, SMP, yang bersertifikat pendidik	%	85	85.	89.	87	89	
14	Rasio Guru bersertifikat pendidik per sekolah	Rasio	8,6 : 1	8.6 : 1	9.1 : 1	8,9 : 1	9,1 : 1	
2	Kesehatan							
1	% Persalinan di Fasilitas Kesehatan	%	95,5	95.5	95.5	100	100	Dinas Kesehatan dan
2	Jumlah Kematian Balita	Indeks	39	39	39	37	35	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB RSUD Tanjung Pura
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
3	Jumlah Kematian Ibu	Indeks	8	8	8	8	8	
4	Jumlah Kematian Bayi	Indeks	36	36	36	34	32	
5	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita	Persen (%)	12,33	12.33	12.33	12,25	12	
6	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita	Persen (%)	20,4	20.4	20.4	20,35	20,3	
7	Prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 (lima) tahun	Persen (%)	13,83	13.83	13.83	13,5	13	
8	Persentase Penduduk yang memiliki jaminan kesehatan	Persen (%)	70	70	70	100	100	
9	Persentase masyarakat miskin yang mendapatkan asuransi/jaminan kesehatan	%	70	70	70	100	100	
10	Persentase Puskesmas yang memberikan Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat	%	100	100	100	100	100	
11	Persentase Puskesmas Terakreditasi	%	86,7	86.7	86.7	100	100	
12	Persentase Rumah Sakit Sesuai Standar (Terakreditasi)	%	50	50	50	50	60	
13	Nilai IKM RSUD	%	n/a	n/a	n/a	78	79	
14	Nilai Akreditasi Rumah Sakit	Status Akreditasi	80	80	80	100	100	
15	Persentase tenaga kesehatan yang berstandar kompetensi	Persen (%)	0	0	0	5	10	
16	Puskesmas yang memiliki dokter minimal 3 orang	%	83	83	83	100	100	
17	Persentasi Keluarga yang Menerapkan PHBS	%	55	55	55	69	70	
18	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Farmasi dan Alat Kesehatan	Persen (%)	100	100	100	100	100	
19	Persentase kasus penyakit menular yang tertangani	Persen (%)	100	100	100	100	100	
20	Persentase Desa UCI	%	89,89	89.89	89.89	91,7	93,9	
21	Jumlah Kemitraan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Kemitraan	0	0	0	2	3	
22	Eradikasi Polio	kasus (spesimen)	0	0	0	0	0	
23	Persentase Sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan (Puskemas, Pustu & jaringannya) dalam kondisi baik	Persen (%)	100	100	100	100	100	
24	Persentase kasus penyakit menular yang tertangani	Persen (%)	100	100	100	100	100	
25	Persentase Desa UCI	%	90	90	90	92	94	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
26	Meningkatnya Kesehatan bagi Lansia (UHH)	Angka	67,94	67.94	67.94	68	69	
27	Persentase Cakupan Posbindu	%	30,32	30.32	30.32	44,04	57,76	
28	Jumlah Penyuluhan Bahaya Peredaran Miras Dan Narkoba	Kali	0	0	0	1	1	
29	Persentase Sarana Distribusi Obat Yang Terstandar	%	89,93	89.93	89.93	100	100	
30	Persaentase Sarana Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) yang terstandart	%	63,92	63.92	63.92	57,06	62,25	
31	Persentase HATRA (Penyehat Tradisional) yang memiliki STPT (Surat Terdaftar Penyehat Tradisional)	%	10	10	10	11	12	
32	Persentase Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dalam kondisi baik	%	80	80	80	100	100	
33	Persentasi masyarakat yang terlayani upaya kesehatan masyarakat	%	80	80	80	100	100	
34	Persentasi Realisasi Capaian BLUD	%	80	80	80	100	100	
35	Jumlah sarana dan prasarana dalam kesehatan dalam kondisi baik	%	80	80	80	100	100	
<b>3</b>	<b>Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>							
1	Persentase Panjang Jalan Kabupaten Per Luas Wilayah	Km/km <sup>2</sup>	0,274	0.275	0.277	0,275	0,277	Dinas PUPR
2	Persentase Jalan dalam Kondisi Mantap	%	50,11	52	54	52	54	
3	Tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan RTRW	%	93	93.634	94.268	93,634	94,268	
4	Panjang jaringan irigasi dalam Kondisi Baik	meter	52	54	56	54	56	
5	Panjang Jalan Kabupaten	Km	1.561	1.611	1.661	1.611	1.661	
6	Persentase peningkatan kelas jalan Kabupaten	%	54,51	54.610	54.710	54,61	54,71	
7	Jumlah Jembatan	unit	262	282	302	282	302	
8	Database kondisi jalan	Unit	0	0	n/a	0	1	
9	Panjang Jalan dalam Kondisi Baik	Km	426,55	484	541	484	541	
10	Jumlah Jembatan dalam kondisi baik	Unit	161	191	221	191	221	
11	Bantaran dan Tanggul Sungai Dalam Kondisi Baik	meter	36480	43480	50480	43480	50480	
12	Jumlah Kebijakan Tata Ruang	Dokumen	0	0	0	0	2	





No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
13	Dokumen RDTR, Dokumen RTR Kawasan Strategis Kabupaten	Dokumen	0	7	n/a	7	14	
14	Sistem Informasi Tata Ruang,	Unit	0	0	0	0	1	
15	Jumlah kasus pelanggaran tata ruang	kasus	2	0	0	0	0	
16	Panjang sungai yang terkonservasi	meter	500	1300	2100	1300	2100	
17	Jumlah Rumah Ibadah yang direhabilitasi	Unit	0	0	0	0	10	
18	Luas lahan yang dibebaskan	m2	1189	2.189	3.189	2.189	3.189	
19	Cakupan Pemenuhan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan	Persen (%)	64	66	68	66	68	
20	Jumlah ruas jalan yang dilayani Penerangan Jalan Umum	ruas jalan	726	734	742	734	742	
21	Jumlah taman dalam kondisi baik	Unit	12	16	20	16	20	
22	Panjang Turap / Talud dan Bronjong Yang Dibangun	meter	6631	9631	12631	9631	12631	
23	Jumlah Rumah Ibadah yang terehabilitasi	Unit	0	0	0	0	5	
4	<b>Perumahan dan Kawasan Permukiman</b>							
1	Luas Kawasan Kumuh	Ha	150	135	120	135	120	Dinas PKP
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Air Bersih	%	14	19	24	19	24	
3	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Sanitasi	%	44	50	56	50	56	
4	Luas Wilayah Rawan Genangan Banjir	Ha	1500	1495	1490	1495	1490	
5	Persentase Rumah Tangga dengan Rumah Tidak Layak Huni	%	11	10.6	10.2	10,6	10,2	
6	Rencana Penanganan Kawasan Kumuh	Dokumen	5	1	1	1	1	
7	Cakupan Wilayah yang Terlayani Air Bersih	%	14	19	24	19	24	
8	Jumlah Lokasi Kawasan Kumuh yang Tertata	Lokasi	1	1	1	1	1	
9	Cakupan Wilayah yang terlayani sanitasi	Persen (%)	44	100	100	100	100	
10	Panjang saluran drainase lingkungan	meter	108000	153000	201000	153000	201000	
11	Panjang Jalan lingkungan	meter	77237	153001	201001	153001	201001	
5	<b>Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b>							
1	Jumlah FKUB	Jumlah	n/a	4	4	4	4	BPBD, Satpol



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
2	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Kegiatan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	%	n/a	100	100	100	100	PP, Kantor Kesbangpol
3	Jumlah organisasi/kelompok penjaga lingkungan	Kelompok	n/a	23	23	23	23	
4	Jumlah pelanggaran perda	Kasus	n/a	53	45	53	45	
5	Persentase cakupan wilayah penangan Kebakaran	%	n/a	13	17	13	17	
6	Rata-rata waktu respon penanganan kejadian kebakaran	Menit	n/a	15	10	15	10	
7	Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Daerah	Dokumen	0	1	1	1	1	
8	Prosentase ketersediaan data dan informasi kebencanaan	%	100	100	100	100	100	
9	Persentase Konflik sosial yang tertangani	%	100	100	100	100	100	
10	Jumlah Kasus Pekat	Jumlah	75	70	65	70	65	
11	Cakupan Organisasi Masyarakat Yang mendapatkan Sosialisasi	%	100	100	100	100	100	
12	Jumlah Desa/Kelurahan Siaga Bencana	Desa	2	2	2	2	2	
13	Persentase kejadian bencana yang tertangani	%	100	100	100	100	100	
6	<b>Sosial</b>							
1	Sistem database PMKS	Unit	2	2	2	2	2	Dinas Sosial
2	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	Persen (%)	55	80	85	80	85	
3	Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen (%)	65	68	100	68	100	
4	Tingkat Pertumbuhan Penyandang Penyakit Sosial	Persen (%)	60	45%	40%	45%	40%	
5	Tingkat Pertumbuhan Jumlah Fakir Miskin	Persen (%)	60	52%	40%	52%	40%	
6	Persentase Penyandang Disabilitas yang Berdayaguna	Persen (%)	0	30%	35%	30%	35%	
7	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial ekonomi sejenis lainnya	Persen (%)	n/a	20%	30%	20%	30%	
8	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	Persen (%)	n/a	40%	50%	40%	50%	
9	Persentase Anak Terlantar yang dibina	Persen (%)	n/a	70%	75%	70%	75%	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR								
7.	Tenaga Kerja							
1	Tingkat Pertumbuhan Wirausaha	%	n/a	2	2.5	2	2,5	Dinas Ketenaga kerjaan
2	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja Lokal	%	n/a	20	21	20	21	
3	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	Persen (%)	n/a	14.81	27.78	14,81	27,78	
4	Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi	Persen (%)	n/a	13.89	19.44	13,89	19,44	
5	Persentase pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	Persen (%)	n/a	97	98	97	98	
6	Persentase Kasus Perselisihan Hubungan Industrial yang Tertangani	Kasus	n/a	65	70	65	70	
7	Cakupan database ketenagakerjaan	Persen (%)	n/a	95	95	95	95	
8.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan oleh petugas terlatih di dalam unit pelayanan terpadu	Persen (%)	100	100	100	100	100	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perempuan Perlindungan Anak
2	Cakupan pemberdayaan lembaga pengarusutamaan gender dan anak	Persen (%)	18	20	25	20	25	
3	Jumlah Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Orang	80	100	120	100	120	
4	Cakupan Kegiatan peningkatan yang mendukung kualitas anak dan peran perempuan	%	100	100	100	100	100	
5	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	0,03	0.04	0.04	0,04	0,04	
6	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum	%	42	45	50	45	50	
7	Cakupan kelompok perempuan yang mendapatkan pembinaan peningkatan kualitas hidup dan keluarga	Kelompok	9	10	12	10	12	
8	Persentase Intitusi/lembaga dan Kecamatan yang menerapkan kategori layak/ramah anak	%	15	22	30	22	30	
9	Sistem informasi database gender dan anak	Unit	2	3	3	3	3	
9.	Pangan							



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
1	Volume ketersediaan pangan utama	Ton	333.480	141.131	144.377	141.131	144.377	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
<b>10.</b>	<b>Pertanahan</b>							
1	Persentase Batas Daerah yang tersedia	%	2000	2.000	2.000	2.000	2.000	Sekretariat Daerah
<b>11.</b>	<b>Lingkungan Hidup</b>							
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	poin	N/A	58	60	58	60	Dinas Lingkungan Hidup
2	Proporsi Rumah Tangga dengan Layanan Persampahan	%	78	78	79	78	79	
3	Persentase daya tarik ekowisata di kawasan konservasi yang dikelola	Persen (%)	N/A	100	100	100	100	
4	Cakupan RT Perkotaan yang Terlayani Sistem Pengangkutan Sampah	Persen (%)	100	100	100	100	100	
5	Indeks Kualitas Air	poin	n/a	55	57	55	57	
6	Indeks Kualitas Udara	poin	53,32 (2018)	54.32	55.32	54,32	55,32	
7	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	poin	n/a	58	60	58	60	
8	Persentase ketaatan/kepatuhan usaha terhadap aspek lingkungan	Persen (%)	100	100	100	100	100	
9	Jumlah Kelompok masyarakat yang mendapat pembinaan konservasi SDA	%	1	4	4	4	4	
10	Jumlah Dokumen Database Konservasi SDA	Dokumen						
11	Persentase Laporan Masyarakat terkait Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	Persen (%)	100	100	100	100	100	
12	Jumlah kegiatan pengendalian polusi	Kegiatan	1	4	4	4	4	
13	Jumlah kegiatan pengendalian dan pengawasan PPLH	%	100	100	100	100	100	
14	Jumlah Dokumen Profil MHA	Dokumen	1	1	1	1	1	
<b>12.</b>	<b>Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil</b>							
1	Persentase Penduduk Yang Melakukan Perekaman Data	Persen (%)	91	91	94	93	94	Dinas



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
	Kependudukan							Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Rata-rata Waktu Pelayanan Administrasi Kependudukan	Hari	5	5	4	4	4	
3	Persentase anak usia 0-18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran	Persen	86	86	88	87	88	
<b>13.</b>	<b>Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</b>							
1	Peningkatan status desa (berdasarkan Indeks Desa Membangun/IDM)							Dinas PMD
	- Desa Maju	Desa	8	8	8	10	12	
	- Desa Berkembang	Desa	193	193	194	192	191	
	- Desa Tertinggal	Desa	38	38	37	35	32	
	- Desa Sangat Tertinggal	Desa	1	1	1	1	1	
2	Persentase Organisasi/Lembaga Kemasyarakatan Aktif	%	50	50	50	55	60	
3	Persentase Desa dengan Pelayanan Berbasis TIK	%	n/a	37%	37%	60	70	
4	Jumlah satuan keamanan lingkungan aktif	Satuan	-	n/a	n/a	40	45	
5	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa dalam kondisi baik	Persen (%)	100	100	100	100	100	
6	Tingkat pertumbuhan aparatur desa dengan kemampuan pengoperasian TIK	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	240	240	
7	Jumlah BUMDes Aktif	Unit	70	70	212	100	120	
8	Jumlah Kerjasama Antar Desa	MoU	1	1	1	1	1	
9	Rata-rata jumlah kelompok binaan lembaga pemberdayaan masyarakat (LPM)	Kelompok	130	130	130	150	170	
10	Tingkat realisasi penyerapan ADD di desa	Persen (%)	100	100	100	100	100	
11	Jumlah desa yang menggunakan pelayanan berbasis TIK	Desa	80	80	80	144	168	
12	Cakupan PKK Aktif	Persen (%)	100	100	100	100	100	
13	Cakupan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan	Keg	100	100	100	100	100	
<b>14</b>	<b>Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</b>							
1	Rasio Akseptor KB	%	65,6	65.6	69.55	69,55	70,22	Dinas



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
2	Rata-Rata jumlah Anak Per Keluarga	jiwa	3,16	3.16	3.1	3,1	3,06	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, dan Perempuan Perlindungan Anak
3	ASFR 15 - 19	angka	24,2	24.2	24.07	24,07	23,66	
4	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	%	8	8	10	10	15	
5	Cakupan kelompok masyarakat yang memiliki pemahaman terhadap bahaya narkoba, PMS, dan HIV/AIDS	Kelompok	12	12	15	15	20	
6	Keluarga yang mempunyai balita tergabung dikelompok bina keluarga	keluarga	525	525	575	575	675	
7	Pengeleloa kelompok bina keluarga yang mendapat pelatihan/pembinaan	orang	35	35	45	45	45	
8	Persentase Perangkat daerah (Badan/Dinas) yang menyusun dan memanfaatkan rancangan induk pengendalian penduduk	%	11	11	20	20	22	
15.	<b>Perhubungan</b>							
1	Cakupan Pelayanan Angkutan Umum	%	60	60	62	62	64	Dinas Komunikasi dan Informatika
2	Jumlah Rambu,Marka,Pagar Pengaman Jalan	unit	500	500	600	600	700	
3	Jumlah Armada Bus Sekolah	unit	2	2	3	3	4	
4	Jumlah Halte Bus/Taxi gedung terminal	unit	10	10	11	11	12	
5	Jumlah Titik Rawan Kemacetan	Titik	20	20	19	19	18	
6	Jumlah Terminal Sesuai Standar	unit	0	0	0	1	2	
7	Cakupan Prasarana dan Fasilitas dalam Kondisi Baik	persen	30	30	35	35%	40%	
8	Kendaraan Bermotor yang Laik Jalan	persen	60	60	60	62%	64%	
16.	<b>Komunikasi dan Informatika</b>							Dinas Komunikasi dan Informatika
1	Nilai Indeks SPBE	Poin	2,51	2.51	3	3	3,25	
2	Persentase SDM Pemerintahan dengan Kompetensi TIK	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	20	40	
3	Persentase Tindak Lanjut Laporan Masyarakat	%	n/a	n/a	n/a	100	100	
4	Cakupan Integrasi Sistem Aplikasi Pemerintahan dan Layanan Publik	%	n/a	n/a	n/a	100	100	
5	Cakupan Kegiatan Pemerintahan yang Terpublikasi di Media Massa	%	n/a	n/a	n/a	100	100	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
6	Cakupan Kegiatan Pemerintahan yang Terpublikasi di Tingkat Kecamatan	%	n/a	n/a	n/a	100	100	
<b>17.</b>	<b>Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah</b>							
1	Jumlah fasilitas inkubator teknologi dan bisnis	Unit	0	0	0	1	1	Dinas Koperasi
2	Jumlah wirausaha baru yang memperoleh akses permodalan	Unit	0	0	0	30	30	
3	Jumlah Fasilitasi Wirausaha Baru oleh Mitra Badan Usaha	Unit	0	0	0	30	30	
4	Jumlah pertumbuhan kebaruan produk UMKM	Unit	0	0	0	30	30	
5	Jumlah kegiatan akses UMKM (usaha mikro kecil dan menengah) ke layanan keuangan	keg	1	1	1	1	1	
6	Persentase UMKM yang mengalami peningkatan skala bisnis	Persen (%)	0	0	0	5	10	
7	Cakupan koperasi aktif	Persen (%)	41	41	41	42	43	
8	Cakupan kegiatan Pengembangan sumber daya manusia KUKM	Keg	0	0	0	11	11	
<b>18.</b>	<b>Penanaman Modal</b>							
1	Dokumen Regulasi Investasi	Perda	0	1	1	1	1	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
2	Sistem Informasi Potensi Investasi Daerah	Unit		0	0			
3	Jumlah nilai investasi (PMA/PMDN)	Rp	5,1 T	5.1 T	5.1 T	5,4 T	5,8 T	
4	Cakupan sistem informasi potensi investasi daerah	%	100	100	80	100	100	
<b>19.</b>	<b>Kepemudaan dan Olahraga</b>							
1	Jumlah prestasi pemuda :	Medali/Piala	127	127	147	147	169	Dinas Pemuda dan Olah Raga
	- Internasional	Medali/Piala	13	13	18	18	22	
	- Nasional	Medali/Piala	5	5	9	9	12	
	- Daerah	Medali/Piala	109	109	120	120	135	
2	Persentase peningkatan jumlah kegiatan organisasi pemuda	Persen (%)	60	60	60	62%	63%	
3	Jumlah wirausaha muda yang dibina	orang	28	28	30	30 Orang	40 Orang	
4	Jumlah prestasi pemuda dalam kejuaraan olahraga	Medali/Juara	127 Medali/Juara	127 Medali/Juara	147 Medali/Juara	147 Medali/Juara	169 Medali/Juara	
5	Jumlah sarana dan prasarana olahraga	Jumlah	408	408	411	411	413	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
6	Jumlah Kegiatan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba	Sekolah (SMA/SMK)	3 Sekolah (SMA/SMK)	3 Sekolah (SMA/SMK)	3 Sekolah (SMA/SMK)	4 Sekolah (SMA/SMK)	5 Sekolah (SMA/SMK)	
7	Jumlah dokumen terkait kebijakan kepemudaan	Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	n/a	-	1 Dokumen	
8	Jumlah organisasi dan tenaga keolahragaan yang dibina	Organisasi dan orang	1 Dokumen	1 Dokumen	n/a			
<b>20.</b>	<b>Stastitik</b>							
1	Presentase data statistik terintegrasi	Persen (%)	n/a	100	70	100	100	Bappeda
2	Dokumen data-data statistik	dokumen/tahun	24	24	24	24	24	
<b>21.</b>	<b>Persandian</b>							
21.	Persentase Pemanfaatan Sandi Daerah	%	n/a	n/a	n/a	100	100	Dinas KomInfo
<b>22.</b>	<b>Kebudayaan</b>							
1	Cakupan Pelestarian dan Pengembangan Budaya Lokal	%	3	3	5	5	10	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Presentase peningkatan festival dan event kebudayaan	Persen (%)	10	10	13	13	14	
3	Persentase cagar budaya yang sudah dikelola	Persen (%)	3	3	5	5	10	
4	Jumlah kerjasama pengelolaan kekayaan budaya yang terealisasi	Jumlah kerjasama		n/a	n/a	0	0	
5	Nilai budaya yang telah dikembangkan	kegiatan	0	0	0	0	1	
<b>23.</b>	<b>Perpustakaan</b>							
1	Jumlah koleksi bahan pustaka	eksemplar	25.125	n/a	n/a	1500	1600	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Jumlah pengunjung perpustakaan/tahun	kunjungan	n/a	n/a	n/a	9.200	9.300	
<b>24.</b>	<b>Kearsipan</b>							
1	Persentase Perangkat Daerah yang mengelola arsip secara baku	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	83	86	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
2	Dokumen/arsip daerah yang dapat diselamatkan	OPD	n/a	n/a	n/a	10	10	
3	Sarana dan prasarana kearsipan yang terpelihara	Kotak	n/a	n/a	n/a	80	80	
4	Jumlah Dokumen Hasil Olahan hasil Arsip Daerah	Dok	0	0	0	1	1	
<b>URUSAN PILIHAN</b>								
<b>25.</b>	<b>Kelautan dan Perikanan</b>							





No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
1	Produksi Perikanan Tangkap	ton	31.037,92	31.037.92	31.037.92	31.037,92 Ton	32.605,33	Dinas Kelautan dan Perikanan
2	Produksi Perikanan Budidaya	ton	27.361,49	27.361.49	28.729.56	28.729,56	28.756,92	
3	Cakupan bina kelompok nelayan	Persen (%)	-	-	-	5	6	
4	Jumlah Produksi Pengolahan Hasil Perikanan	Ton	401,89	401.89	421.98	421,98	443,08	
5	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Sosialisasi	Persen (%) Per Tahun	-	-	-	5	6	
6	Jumlah Pokmaswas Yang Terbentuk	Kelompok	-	-	-	3	4	
7	Persentase Masyarakat Yang Mendapat Penyuluhan	Persen (%) Per Tahun	-	-	-	5	6	
8	Dokumen Perencanaan Program	Dokumen Per Tahun	-	-	-	2	2	
9	Persentase Kawasan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Dibantu	Persen (%)	-	-	-	5	6	
<b>26.</b>	<b>Pariwisata</b>							
1	Lama kunjungan Wisata	hari	2	2	2	2	3	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2	Jumlah kunjungan wisatawan	Orang	100.104	100.104	100.104	110.114	123.328	
3	Jumlah Desa Wisata	Desa	-	-	-	-	-	
4	Sistem Informasi Kepariwisataaan	Unit	1	1	1	1	1	
5	Pertumbuhan Jumlah Kamar	%	n/a	n/a	n/a	2	2	
6	Jumlah Tenaga Kerja Pariwisata	Orang	n/a	n/a	n/a	95	100	
<b>27.</b>	<b>Pertanian</b>							
1	Jumlah Produksi komoditas tanaman pangan	Ton	792721	792721	792721	793117	793514	Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2	Jumlah Produksi Komoditas Holtikultura	Ton	95476	95476	95476	95524	95571	
3	Produksi komoditas perkebunan	ton	795635	795635	795635	811507	827701	
4	Jumlah Produk Olahan Hasil Pertanian/ Perkebunan	Produk	0	0	0	1	2	
5	Produksi daging	Ton	8487	8487	8487	8668	8737	
6	Produksi Telur	Ton	10577	10577	10577	10897	11061	
7	Angka kejadian penyakit ternak	Kasus	14841	14841	14841	14544	14253	
8	Angka Kematian Ternak	Kasus	158374	158374	158374	155269	154493	
9	Jumlah Populasi Ternak Sapi	Ekor	201.193	201.193	201.193	207.217	213.434	
10	Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras	Ekor	1.324.604	1.324.604	1.324.604	1.324.604	1.364.342	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
11	Jumlah Produk Olahan Hasil Peternakan	Produk	0	0	0	1	1	
12	Jumlah Kelompok Tani/ Petani yang Mendapatkan Pelatihan Usaha Agribisnis	Kelompok Tani/ Petani	30	30	30	30	30	
13	Produktivitas :							
	Padi (Kw/ha)	Kw/Ha	63,45	63.45	63.45	58,491	58,782	
	Jagung (Kw/Ha)	Kw/Ha	73,52	73.52	73.52	66,66165	66,9933	
	Kelapa Sawit (Ton/Ha/Th)	Ton/Ha/Th	18,18	18.18	18.18	18,9072	19,2708	
	Karet (Ton/Ha/Th)	Ton/Ha/Th	1,04	1.04	1.04	1,0816	1,1024	
	Kakao (ton/Ha/th)	Ton/Ha/Th	1,15	1.15	1.15	1,196	1,219	
	Kelapa (ton/Ha/th)	Ton/Ha/Th	1,14	1.14	1.14	1,1856	1,2084	
14	Jumlah Penyuluh Pertanian Lapangan	Orang	177	177	177	177	177	
15	Terlaksananya pelatihan kelompok tani calon mitra usaha/pengurus gapoktan	Kelompok/ Petani	0	0	0	150	150	
<b>28.</b>	<b>Perdagangan</b>							
1	Jumlah produk unggulan daerah yang dipasarkan ke luar negeri	Produk	15 Produk	15 Produk	25 Produk	15 Produk	25 Produk	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Jumlah Pasar Desa yang berdaya saing dan dikelola secara modern	Pasar	0	0	0	0	0	
3	Jumlah kelompok pedagang Kaki lima dan Asongan yang dibina	Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	1 Kelompok	2 Kelompok	
4	Jumlah pasar tertib ukur	Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	1 Pasar	2 Pasar	
5	Tingkat lonjakan harga barang pokok	%	0	0	-0.28%	5%	5%	
6	Cakupan Pengawasan Usaha Perdagangan yang melaksanakan tertib niaga	%	0	0	10%	5%	10%	
<b>29.</b>	<b>Perindustrian</b>							
1	Jumlah IKM	IKM	3347	3347	3547	3447	3547	Dinas Perdagangan dan Perindustrian
2	Tingkat Pertumbuhan Kebaruan Produk IKM	Persen (%)	0	0	0	3	5	
3	Jumlah Pengembangan Sentra Industri	Sentra	1	1	1	1	2	
4	Jumlah IKM yang menerapkan teknologi tepat guna	IKM	200	200	220	210	220	
<b>PENUNJANG URUSAN</b>								



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
<b>30.</b>	<b>Kepegawaian</b>							
1	Percepatan durasi penyelesaian pelayanan administrasi kepegawaian yang transparan, cepat dan akurat	hari	n/a	21	20	21	20	BKD
2	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat PIM Per Tahun	Pegawai	n/a	2	2	2	2	
<b>31.</b>	<b>Pengawasan</b>							
1	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 2	Level 2	Level 2	Level 2	Level 3	Inspektorat
2	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	2	2	2	3	3	
3	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Atas Temuan (Keuangan Negara/Daerah dan Administrasi)	Persen (%)	78,4	78.4	78.4	80	82	
4	Persentase Peningkatan Kompetensi Penjenjangan APIP	Persen (%)	10	10	10	11	12	
<b>32.</b>	<b>Perizinan Terpadu</b>							
1	Rata-rata Waktu Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Hari	15	15	15	15	15	Dinas Penanaman Modal dan PPTSP
2	Sistem Informasi Perizinan	Unit	1	1	1	1	1	
3	Persentase realisasi retribusi perizinan	Persen (%)	65	65	65	75	80	
4	Persentase laporan/pengaduan masyarakat yang ditindak lanjuti	%	100	100	100	100	100	
<b>33.</b>	<b>Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							
1	Persentase konsistensi dokumen perencanaan, penganggaran, pengendalian, pelaporan dan pengelolaan keuangan dan aset daerah	%	100	100	100	100	100	Bappeda
2	Persentase cakupan aspirasi Musrenbang Kabupaten dalam e-musrenbang	%	100	100	100	100	100	
3	Persentase Konsistensi RENSTRA SKPD dengan dokumen perencanaan	%	100	100	100	100	100	
4	Jumlah dokumen perencanaan pembangunan ekonomi	dok	5	5	5	5	5	
5	Jumlah dokumen perencanaan sosbud	dok	1	1	1	0	1	
6	Jumlah dokumen perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	dok		n/a	n/a			
7	Jumlah dokumen pengarusutamaan gender dan anak	dok	0	1	1	1	1	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
8	Sistem Database Pembangunan Yang Terbaharui	unit	1	2	2	2	2	
<b>34.</b>	<b>Pengelolaan Keuangan Daerah</b>							
1	Persentase Perangkat Daerah yang Dokumen Keuangannya Selesai Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	BPKAD
2	Persentase Perangkat Daerah yang Laporan Asset/Barang Daerahnya Diterbitkan Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	
3	Persentase Laporan Perangkat Daerah Capaian Kinerjanya Terbit Tepat Waktu	%	100	100	100	100	100	
<b>35.</b>	<b>Pengelolaan Pendapatan Daerah</b>							
1	Persentase Piutang Pajak dan Retribusi yang terselesaikan	Persen (%)	n/a	80	80	80	84	Badan Pendapatan Daerah
2	Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak	Persen (%)	n/a	3	3	3	3,25	
3	Persentase Realisasi Pajak dan Retribusi	Persen (%)	13,18	13.18	13	20	27	
<b>36.</b>	<b>Penelitian dan Pengembangan</b>							
1	Jumlah kebijakan pendukung kelitbangan daerah	Perbup	0	2	2	2	2	Bappeda
2	Persentase implementasi rencana kelitbangan	Persen (%)	n/a	20	20	20	40	
<b>37.</b>	<b>Sekretariat Dewan</b>							
1	Persentase Aspirasi Masyarakat yang Ditindaklanjuti oleh DPRD	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	100	100	Sekretariat DPRD
2	Cakupan peraturan daerah yang dapat diakses secara online	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	100	100	
3	Cakupan kegiatan DPRD yang terpublikasi	Persen (%)	n/a	n/a	n/a	100	100	
<b>38.</b>	<b>Sekretariat Daerah</b>							
1	Unit Khusus Penangana Pengaduan Masyarakat yang terbentuk	Unit	2	2	2	2	2	Sekretariat Daerah
2	Cakupan peraturan kepala daerah yang dapat diakses secara online	%	100	100	100	100	100	
3	Jumlah kelompok Petani yang dibina	Unit	2	2	2	2	2	
4	Persentase Layanan Kedinasan yang terlaksana	%	100	100	100	100	100	
5	Jumlah kegiatan yang terdokumentasi	Kegiatan	200	200	250	250	250	
6	Jumlah Dokumen perencanaan pembangunan daerah	Dokumen	2	2	2	2	2	
7	Jumlah Festival, dan event keagamaan	Kegiatan	14	14	14	14	14	



No.	Indikator Kinerja	Satuan	Kondisi Kinerja	EVALUASI HASIL RKPD 2019		Target Capaian Kinerja		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
			Awal RPJMD	TARGET	REALISASI	2020	2021	
8	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam Pamsimas	Orang	-	-	-	100	100	
9	Jumlah Kerjasama yang dilaksanakan antar pemerintah daerah	MoU	10	10	10	10	10	
10	Jumlah Dokumen Kajian Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Dokumen	2	2	2	2	2	
11	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi	Dokumen	1	1	1	1	1	
12	Jumlah tim yang terbentuk	Tim	3	3	3	3	3	
13	Jumlah Pameran yang dilaksanakan dalam peningkatan promosi dan investasi	Kegiatan	2	2	2	2	2	
14	Persentase peningkatan harga barang pokok yang tersubsidi	%	-	-	-	10	10	
15	Jumlah masyarakat yang terbina	Orang	-	-	-	200	200	
16	Tingkat realisasi Sasaran Kinerja ASN	%	100	100	100	100	100	
<b>39.</b>	<b>Kewilayahan</b>							
1	Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di level desa/kelurahan	%	n/a	40	40	40	45	23 Kecamatan
2	Jumlah Festival dan Event Keagamaan	Kegiatan Per Tahun	n/a	3	3	3	3	
3	Persentase peningkatan jumlah kegiatan organisasi pemuda	Persen (%)	n/a	10	10	10	10	
4	Cakupan kelompok masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan di kelurahan	Persen (%)	n/a	20	20	20	25	
5	Jumlah kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan	Kegiatan	n/a	100	100	100	100	
6	Tingkat realisasi penyerapan ADD dan Dana Desa	Persen (%)	n/a	100	55.56	100	100	
7	Persentase cakupan aspirasi Musrenbang Kecamatan dalam e-musrenbang	Persen (%)	n/a	100	65	100	100	

Sumber : Bappeda Kabupaten Langkat Tahun 2020 (Data diolah)



---

## **BAB VII**

### **PENUTUP**

Rencana Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Langkat Tahun 2021 disusun sebagai dokumen perencanaan tahunan yang memuat Kebijakan Publik dan Arah Kebijakan Pembangunan dengan memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Langkat, RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2005-2025, serta mengacu kepada RPJMD Provinsi Sumatera Utara dan RPJM Nasional.

Penyusunan Rancangan Awal RKPD Kabupaten Langkat telah dilakukan melalui proses Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang, yaitu mulai dari Musrenbang Desa/Kelurahan, Musrenbang Kecamatan, Forum SKPD dan menjadi bahan pembahasan Musrenbang Kabupaten. Untuk itu Rancangan Awal RKPD Kabupaten Langkat Tahun 2021 ini mampu menjadi dasar bagi segenap komponen dan SKPD untuk bahan menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja-SKPD) definitif nantinya serta acuan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran serta acuan pada evaluasi RPJMD Kabupaten Langkat Tahun 2019-2024.

Demikianlah Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Langkat Tahun 2021 disusun sebagai bahan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafond Anggaran yang bermuara kepada APBD Kabupaten Langkat Tahun 2021.

BUPATI LANGKAT

ttd

TERBIT RENCANA PERANGIN ANGIN

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
ALIMAT TARIGAN, SH  
NIP. 19730803 200212 1 005